



Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Barat

2016



PROFIL KESEHATAN

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah kami panjatkan puji sukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan hadirnya Buku Profil Kesehatan di Jawa Barat tahun 2016 , yang merupakan salah satu bentuk dokumentasi tahunan dari produk Sistem Informasi Kesehatan yang dapat memberikan gambaran perkembangan situasi kesehatan khususnya di Wilayah Provinsi Jawa Barat dan juga merupakan investasi informasi untuk kebutuhan di masa yang akan datang, baik bagi kalangan sendiri, maupun masyarakat luas

Kami Menyadari publikasi kesehatan ini belum memenuhi harapan bagi pengguna data khususnya pihak perencana pembangunan kesehatan, Pelaku dan penggiat bidang kesehatan, akibat masih kurang lengkapnya informasi, dan penerbitan yang terlambat serta akurasi dan konsistensi data rutin yang belum terkelola dengan baik.

Harapan kami semoga buku ini dapat membantu bagi teman sejawat memenuhi kebutuhan informasi baik sektor kesehatan sendiri maupun sektor non kesehatan, terutama dalam proses manajemen yang meliputi perencanaan, penggerakan, pengendalian dan monitoring serta evaluasi pembangunan kesehatan.

Publikasi ini terwujud berkat kerjasama dan bantuan berbagai pihak baik instansi kesehatan maupun Non kesehatan , sehingga dalam kesempatan ini kami menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar besarnya bagi para pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam terwujudnya profil kesehatan ini , semoga buku ini bermanfaat bagi kebaikan umat manusia, tak lupa kami mohonkan tanggapan dan saran bagi para pembaca dan pengguna sebagai masukan dan perbaikan untuk penerbitan berikutnya.

Bandung, 2017

Sekretaris Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Barat

UUS SUKMARA, SKM, M.Epid

KATA SAMBUTAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah Kami panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa'ta'ala, saya menyambut gembira atas terbitnya profil kesehatan Jawa Barat 2016 sebagai publikasi data dan informasi kesehatan yang komprehensif, tentunya publikasi dan informasi kesehatan ini dapat digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan pada setiap proses manajemen kesehatan. Selain itu profil kesehatan juga merupakan pemenuhan hak terhadap akses informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.

Jika dilihat secara kuantitas data kesehatan di Jawa Barat sudah cukup baik tercermin setiap pengelola program mempunyai data, dan ketersediaan data profil di Jawa Barat mencapai 100%, akan tetapi secara kualitas masih banyak pihak yang meragukan keakuratannya, atas kesadaran ini semestinya kita tertantang, dan bekerja lebih keras lagi untuk mampu menyajikan data rutin dengan kualitas baik.

Sangat disadari bahwa kuantitas data saja tidak cukup, kita perlu data yang berkualitas, karena data yang rendah mutunya berakibat pada pengambilan kebijakan dan intervensi program kesehatan yang keliru, Dukungan data dan informasi kesehatan yang akurat, tepat, dan cepat sangat menentukan dalam pengambilan keputusan dan menetapkan arah kebijakan serta strategi pembangunan kesehatan yang tepat, oleh karena itu, saya berharap upaya peningkatan kualitas profil kesehatan Jawa Barat terus dilakukan, baik dari segi ketepatan waktu, validitas, kelengkapan, dan konsistensi data,

Untuk meningkatkan kualitas data maka harus dibangun sistem pemantauan kualitas data, sehingga data rutin menjadi data yang akurat, valid, reliable (handal) up to date dan terjaga kerahasiaannya, dan selain itu untuk menjamin kevalidan data dan kesamaan dalam menerima informasi perlu dipikirkan konsep satu data sehingga setiap tahapan pemerintahan memiliki data dan informasi yang sama. Syarat untuk menjamin terwujudnya satu data diperlukan minimal 3 syarat yaitu sistem pelaporan harus dalam satu portal data, Standar data yang sama dan meta data yang sama, sehingga pertukaran dan integrasi data dapat dilakukan dengan mudah.

Ada berbagai metode yang dapat digunakan untuk menilai dimensi yang berbeda dari kualitas data. WHO mengusulkan sebuah metode di mana dimensi kualitas data dipilih dan digunakan berdasarkan kebutuhan. Namun, langkah pertama dalam penilaian kualitas data adalah dengan melakukan desk review dari kualitas data. Hasil dari desk review memang belum tentu mampu mengidentifikasi penyebab data tidak akurat tetapi paling tidak mampu mengidentifikasi masalah akurasi data, kehandalan, keabsahan dan kelengkapannya. Dimensi kunci dari kualitas data adalah akurasi dan kehandalan (accuracy and reliability).

Penilaian kualitas data dapat dilakukan secara mandiri oleh petugas pengelola data program pada tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota. Kegiatan penilaian kualitas data dilakukan terhadap data rutin hasil pelayanan atau cakupan program yang dilaporkan oleh unit yang lebih rendah, dan berjenjang, serta penilaian kualitas data harus dilakukan secara rutin terhadap data yang diterima sesuai periodenya (bulanan atau triwulan) : Walaupun demikian Kegiatan penilaian kualitas data harus terintegrasi dengan kegiatan program, sehingga hasil penilaian kualitas data harus diintegrasikan dengan laporan tahunan kinerja program, semoga terbitnya Profil ini menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan arah program pembangunan kesehatan demi tercapainya peningkatan derajat kesehatan di Jawa Barat .

Bandung, 2017

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat

dr. H. DODO SUHENDAR, MM.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
SAMBUTAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) TAHUN 2015 - 2018	1
B. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 -2018	8
C. VISI MISI DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT	13
BAB II	
GAMBARAN UMUM	20
A. GAMBARAN UMUM WILAYAH	20
B. KEPENDUDUKAN	21
1. Perkembangan Penduduk	22
2. Piramida Penduduk	22
C. GAMBARAN SOSIAL EKONOMI	24
1. Tingkat Kemiskinan Di Jawa Barat	25
2. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Di Jawa Barat September 2015 – Maret 2016	27
3. Perubahan Garis Kemiskinan September 2015 – Maret 2016	28
D. TINGKAT PENDIDIKAN	31
1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kab/Kota dan Jenjang Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 s/d 2015	31
2. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kab/Kota dan Jenjang Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 s/d 2015	32
3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7 – 24 th Menurut Kab/Kota dan Kelompok Umur di Jawa Barat Tahun 2013 sd 2015	34

	HALAMAN
E. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	36
1. Skenario IPM 80 Tahun 2005-2015	37
2. Capaian IPM Jawa Barat	37
BAB III SARANA KESEHATAN	39
A. SARANA PELAYANAN KESEHATAN DASAR (PUSKESMAS)	39
1. Prinsip Penyelenggaraan	39
2. Tugas, Fungsi dan Wewenang	39
3. Situasi Sarana Kesehatan Dasar Puskesmas di Jawa Barat	41
B. SARANA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN (RUMAH SAKIT)	44
1. Tugas dan Fungsi	45
2. Jenis dan Klasifikasi	45
3. Klasifikasi	46
4. Situasi Rumah Sakit di Jawa Barat	46
C. SARANA PELAYANAN KESEHATAN DASAR LAINNYA	48
D. UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT	49
BAB IV SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG KESEHATAN	51
A. TENAGA KESEHATAN	51
1. Tenaga Kesehatan di Puskesmas	56
2. Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit	62
A. RASIO TENAGA KESEHATAN TERHADAP JUMLAH PENDUDUK PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016	64
BAB V PEMBIAYAAN KESEHATAN	67
A. ANGGARAN KESEHATAN	67
B. PEMBIAYAAN KESEHATAN BERSUMBER APBD	69
1. APBD Provinsi	71
2. APBD Kabupaten/Kota	73
C. PEMBIAYAAN KESEHATAN BERSUMBER APBN	75
1. Dana Alokasi Khusus	75

	HALAMAN
2. Dana Dekonsentrasi	76
3. Dana Kapitasi	76
D. PEMBIAYAAN KESEHATAN BERSUMBER PHLN	77
1. Anggaran APBN	77
2. Anggaran PHLN (Pinjaman dan Hibah Luar Negeri)	78
BAB VI DERAJAT KESEHATAN	79
A. ANGKA HARAPAN HIDUP	79
B. MORTALITAS/KEMATIAN	81
1. Angka Kematian Bayi (AKB)	81
2. Angka Kematian Balita (AKABA)	84
3. Angka Kematian Ibu (AKI)	85
4. Angka Kematian Kasar	88
BAB VII UPAYA PELAYANAN KESEHATAN	90
A. KESEHATAN KELUARGA	90
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	90
a. Pelayanan Atenatal	90
b. Pelayanan Ibu Hamil Resiko Tinggi	92
c. Pelayanan Imunisasi TT2+	94
d. Pelayanan Zat Besi (FE) Pada Ibu Hamil	95
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin/Nifas	97
a. Persalinan Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan (Nakes)	97
b. Persalinan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Nifas	98
c. Pelayanan Pemberian Vitamin A pada Ibu Bersalin/Nifas	100
B. UPAYA PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	102
1. Berat Badan Lahir Bayi	102
2. Penanganan Komplikasi Neonatal (Bayi Baru Lahir)	105
3. Pelayanan Kesehatan Bayi	108
4. Pemberian ASI Eksklusif	110
5. Pemberian Kapsul Vitamin A pada Balita	111
6. Pelayanan Imunisasi	114
7. Pelayanan Kesehatan Anak Balita	118

	HALAMAN
8. Pelayanan Kesehatan Pada Siswa Sekolah Dasar dan Setingkat	121
9. Pelayanan Perbaikan Gizi Masyarakat	122
10. Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (Lansia)	138
11. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	140
C. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	143
1. Perilaku Hidup Bersih dan Sehatn (PHBS)	143
2. Penyehatan Lingkungan	145
D. PENGENDALIAN PENYAKIT	151
1. Pengendalian Penyakit Menular Bersumber Binatang	151
a. Malaria	151
b. Demam Berdarah Dengue (DBD)	154
c. Rabies	156
d. Flu Burung (Avian Influenza-AL)	158
e. Anthraks	161
f. Pes	162
g. Leptospirosis	162
h. Filariasis	164
2. Penyakit Menular Langsung	167
a. Diare	167
b. Kusta	169
c. Tuberkulosa	172
d. Pneumonia	178
e. HIV/AIDS dan IMS	183
3. Penyakit yang Dapat Dicegah Imunisasi (P3DI)	183
a. Diptheri	183
b. Pertusis	186
c. Tetanus Neonatrum	186
d. Campak	187
e. Surveilans AFP (Non Polio)	187
4. Penyakit Tidak Menular	188
a. Hipertensi	188
b. Obesitas	190

	HALAMAN
c. Deteksi Kanker Leher Rahim dan Payudara	191
5. Kejadian Luar Biasa (KLB)	192

DAFTAR LAMPIRAN GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN TABEL

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar II.B. 1	Jumlah Penduduk di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000 – 2016	22
Gambar II.B. 2	Piramida Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	23
Gambar II.B. 3	Persentase Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2016	23
Gambar II.C. 1	Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin September 2015 – Maret 2016	28
Gambar II.C. 2	Grafik Garis Kemiskinan Maret 2015 – Maret 2016	29
Gambar II.C. 3	Peranan Komoditi Makanan dan Non Makanan Terhadap Garis Kemiskinan Maret 2016	29
Gambar III. A.1	Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2016	42
Gambar III. A.2	Rasio Puskesmas terhadap Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	44
Gambar III. A.3	Jumlah Jejaring Puskesmas di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 s/d 2016	44
Gambar III. C.1	Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Lainnya di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	48
Gambar III. D.1	Persentase Posyandu Menurut Strata di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	50
Gambar III. D.2	Rasio Posyandu Terhadap Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	50
Gambar IV. A.1	Proporsi Kelompok Tenaga Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	53
Gambar IV. A.2	Rincian Proporsi Tenaga Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	54
Gambar IV. A.3	Rincian Proporsi Tenaga Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	55
Gambar IV. A.4	Proporsi Tenaga Kesehatan Puskesmas Berdasarkan Jenis Tenaga Kesehatan di Jawa Barat Tahun 2016	56
Gambar IV. A.5	Rasio Dokter Umum Terhadap Jumlah Puskesmas di Jawa Barat Tahun 2016	58
Gambar IV. A.6	Rasio Dokter Gigi Terhadap Jumlah Puskesmas di Jawa Barat Tahun 2016	58
Gambar IV. A. 7	Rasio Bidan Terhadap Jumlah Puskesmas di Jawa Barat Tahun 2016	59

		Halaman
Gambar IV. A. 8	Rasio Perawat Terhadap Jumlah Puskesmas di Jawa Barat Tahun 2016	60
Gambar IV. A. 9	Rasio Tenaga Gizi Masyarakat Terhadap Jumlah Puskesmas di Jawa Barat Tahun 2016	60
Gambar IV. A. 10	Rasio Tenaga Sanitarian (Kesling) Terhadap Jumlah Puskesmas di Jawa Barat Tahun 2016	61
Gambar IV. A. 11	Rasio Tenaga Apoteker Terhadap Jumlah Puskesmas di Jawa Barat Tahun 2016	62
Gambar IV. A. 12	Proporsi Sumber Daya Manusia Kesehatan di Rumah Sakit Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	63
Gambar V. A. 1	Proporsi Pembiayaan Kesehatan Berdasarkan Sumber Anggaran Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	67
Gambar V. A. 2	Proporsi Pembiayaan Kesehatan Berdasarkan Kab/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	68
Gambar V. A. 3	Pembiayaan Kesehatan Berdasarkan Anggaran APBN Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	68
Gambar V. A. 4	Pembiayaan Kesehatan APBD Kab/Kota Berdasarkan Peruntukan Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	69
Gambar V. B. 1	Pembiayaan Kesehatan Bersumber APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	70
Gambar V. B. 2	Pembiayaan APBD Provinsi Berdasarkan Peruntukan	72
Gambar V. B. 3	Pembiayaan Kesehatan Berdasarkan Anggaran APBD Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	73
Gambar V. C. 1	Pembiayaan Kesehatan APBN DAK untuk RS dan Dinas Kesehatan Tahun 2016	76
Gambar VI. A.1	Angka Harapan Hidup (AHH) Penduduk di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 - 2016	79
Gambar VI. A.2	Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	80
Gambar VI. B.1	Angka Kematian Bayi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 - 2012	82
Gambar VI. B.2	Jumlah Kematian Bayi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 - 2016	83
Gambar VI. B.3	Angka Kematian Bayi* Per 1.000 Kelahiran Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	83
Gambar VI. B.4	Proporsi Kematian Balita Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	84
Gambar VI. B.5	Pencapaian dan Proyeksi Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun	85

		Halaman
	1994 – 2015	
Gambar VI. B.6	Proporsi Kematian Ibu Maternal *Per 100.000 di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	88
Gambar VI. B.7	Angka Kematian Kasar Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 1971 – 1995	89
Gambar VII. A.1	Cakupan Pelayanan K1 dan K4 di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 - 2016	91
Gambar VII. A.2	Persentasi Mangkir Pelayanan Bumil K4 Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	92
Gambar VII. A.3	Cakupan Penanganan Komplikasi Kebidanan Pada Ibu Hamil Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	93
Gambar VII. A.4	Cakupan Penanganan Neonatal Terhadap Lahir Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	94
Gambar VII. A.5	Cakupan Pelayanan Imunisasi TT2+ Pada Ibu Hamil Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	94
Gambar VII. A.6	Cakupan Pelayanan Zat Besi Pada Ibu Hamil Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	96
Gambar VII. A.7	Pelayanan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2016	98
Gambar VII. A.8	Pelayanan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	98
Gambar VII. A.9	Cakupan Ibu Bersalin Mendapat Pelayanan Kesehatan Nifas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	99
Gambar VII. A.10	Cakupan Pemberian Vitamin A Pada Ibu Bersalin / Nifas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	100
Gambar VII. B.1	Cakupan Berat Badan Lahir Bayi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015	103
Gambar VII. B.2	Cakupan Berat Badan Lahir Bayi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	104
Gambar VII. B.3	Cakupan Berat Badan Lahir Bayi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	105
Gambar VII. B.4	Cakupan Kunjungan Neonatus (KN) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2016	106
Gambar VII. B.5	Cakupan Kunjungan Neonatus (KN1) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	107
Gambar VII. B.6	Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap (KN) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	107

		Halaman
Gambar VII. B. 7	Cakupan Kunjungan Bayi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2016	109
Gambar VII. B. 8	Cakupan Kunjungan Bayi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	109
Gambar VII. B. 9	Cakupan ASI Eksklusif Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	111
Gambar VII. B.10	Cakupan Kapsul Vitamin A Pada Bayi (6-11 bulan) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	113
Gambar VII. B.11	Cakupan Kapsul Vitamin A Pada Anak Balita (12-59 bulan) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	113
Gambar VII. B.12	Cakupan Desa/Kelurahan UCI di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2016	114
Gambar VII. B.13	Cakupan Desa/Kelurahan UCI Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2016	115
Gambar VII. B.14	Cakupan Immunisasi Dasar Bayi di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2008 – 2016	116
Gambar VII. B.15	Cakupan Imuniasi Dasar Lengkap pada Bayi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	118
Gambar VII. B. 16	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Minimal 8 Kali di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	119
Gambar VII. B.17	Cakupan Penjaringan Sekolah Dasar/Sederajat di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	122
Gambar VII. B.18	Cakupan Pelayanan Kesehatan Siswa Sekolah Dasar Kelas 1 di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	122
Gambar VII. B.19	Cakupan Balita Umur 0-59 Bulan yang Ditimbang Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	124
Gambar VII. B.20	Persentase Balita Bawah Garis Merah Terhadap Balita Ditimbang di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	126
Gambar VII. B.21	Cakupan Kasus Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	127
Gambar VII. B.22	Cakupan Pemberian PMT Pada Balita Kurus di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	127
Gambar VII. B.23	Prevalensi Status Gizi BB/TB <-2 SD Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013	129
Gambar VII. B.24	Prevalensi Anak Sangat Pendek Umur 5 – 12 Tahun Menurut Kabupaten/Kota, di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013	130
Gambar VII. B.25	Prevalensi Gemuk & Sangat Gemuk Anak Umur 5 – 12 Tahun Menurut Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2013	130
Gambar VII. B.26	Prevalensi Kurus (IMT/U) Remaja Umur 16 – 18 Tahun Menurut Kabupaten/Kota, di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013	132
Gambar VII. B.27	Persentase Cakupan Pemberian Tablet Besi (Fe3) Ibu Hamil di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2016	135
Gambar VII. B.28	Persentase Cakupan Pemberian Tablet Besi (Fe3) Ibu Hamil Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	135

		Halaman
Gambar VII. B.29	Persentase Cakupan Anak Balita (6-59 Bulan) Mendapatkan Vitamin A Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	137
Gambar VII. B.30	Persentase Rumah Tangga Yang Mengonsumsi Garam Beryodium Menurut Tipe Daerah, Jawa Barat Tahun 2013	138
Gambar VII. B.31	Persentase Rumah Tangga Yang Mengonsumsi Garam Beryodium Menurut Kabupaten/Kota Hasil Tes Cepat, Jawa Barat Tahun 2013	138
Gambar VII. B.32	Cakupan Pelayanan Usia Lanjut (> 60 Tahun) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	139
Gambar VII. B.33	Rasio Tumpatan/ Pencabutan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	140
Gambar VII. B.34	Persentase Penduduk \geq 10 Tahun yang Berperilaku Benar Menyikat Gigi Menurut Kabupaten/Kota, Jawa Barat 2013	141
Gambar VII.C.1	Persentase Rumah Tangga Ber- Perilaku Bersih dan Sehat (PHBS) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	144
Gambar VII.C.2	Cakupan (%) Rumah Sehat Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2016	145
Gambar VII.C.3	Cakupan (%) Penduduk dengan Akses Air Minum Berkualitas di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	146
Gambar VII.C.4	Cakupan (%) Penyelenggara Air Minum memenuhi Syarat Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2016	147
Gambar VII.C.5	Akses Penduduk Terhadap Fasilitas Sanitasi Layak Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	148
Gambar VII.C.6	Persentasi Tempat Tempat Umum (TTU) Memenuhi Syarat Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	148
Gambar VII.C.7	Persentasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat Kesehatan Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	149
Gambar VII.C.8	Cakupan (%) Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan STBM Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2016	150
Gambar VII.D.1	Annual Parasit Insiden (API) Malaria per 1000 penduduk di Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 1997 – 2016	153
Gambar VII.D.2	Angka Kejadian dan Angka Kematian Penyakit DBD di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000 s.d. 2016	154
Gambar VII.D.3	Angka Kesakitan DBD Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016	155
Gambar VII.D.4	Angka Kematian DBD Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016	156
Gambar VII.D.5	Vaksinasi Jumlah Kasus Hewan Penular Rabies (HPR) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2016	158
Gambar VII.D.6	Sebaran Kasus Flu Burung di Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2012	160
Gambar VII.D.7	Kasus Filariasis Kronis Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	164

		Halaman
Gambar VII.D.8	Kumulatif Kasus Filariasis di Provinsi Jawa Barat Tahun 2002-2016	164
Gambar VII.D.9	Survei Mikro Filaria di Provinsi Jawa Barat Tahun 2002-2011	165
Gambar VII.D.10	Cakupan Pelayanan Diare di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2016	168
Gambar VII.D.11	Perbandingan Cakupan Diare Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	168
Gambar VII.D.12	Penemuan Kusta Dengan Kecacatan Tingkat 2 di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	170
Gambar VII.D.13	Prevalensi Kusta dan Case Detection Rate / 100.000 Penduduk di Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2016	171
Gambar VII.D.14	Perbandingan Prevalensi Rate (PR/10.000) Penyakit Kusta, Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 – 2016	172
Gambar VII.D.15	Case Notification Rate (CNR) TBC Paru dalam 100.000 Penduduk di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 – 2016	174
Gambar VII.D.16	Case Notification Rate (CNR) TBC Paru dalam 100.000 Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	175
Gambar VII.D.17	Angka Kesembuhan (Cure Rate) TBC Paru Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	176
Gambar VII.D.18	Pola Angka Kesembuhan (Cure Rate) TBC Paru di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2016	176
Gambar VII.D.19	Angka Pengobatan Lengkap (Complete Rate) TBC Paru di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	177
Gambar VII.D.20	Angka Keberhasilan Pengobatan (TSR) TBC Paru di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	178
Gambar VII.D.21	Cakupan Pneumoni di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	179
Gambar VII.D.22	Kumulatif HIV dan Kasus HIV di Provinsi Jawa Barat Tahun <2004 – 2016	180
Gambar VII.D.23	Kasus HIV Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	181
Gambar VII.D.24	Cakupan Penemuan Kasus AIDS di Provinsi Jawa Barat Tahun < 2004 – 2016	181
Gambar VII.D.25	Kasus AIDS berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun <2004 -2016	183
Gambar VII.D.26	Penemuan Kasus Diptheri di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2016	184
Gambar VII.D.27	Kasus Diptheri Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	185
Gambar VII.D.28	Angka Kematian (CFR) Diptheri Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	185
Gambar VII.D.29	Kasus Tetanus Neonatrum di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2016	186

		Halaman
Gambar VII.D.30	<i>Insiden Rate</i> Campak Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2016	187
Gambar VII.D.31	Surveilans AFP Rate di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	188
Gambar VII.D.32	Prevalensi Hipertensi terhadap Penduduk Usia \geq 18 Tahun Berdasarkan Pemeriksaan Tekanan Darah di Puskesmas Provinsi Jawa Barat, Tahun 2016	189
Gambar VII.D.33	Persentasi Pemeriksaan Obesitas Berdasarkan Kab/Kota Terhadap Jumlah Pengunjung Puskesmas dan Jejaringnya di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2016	191
Gambar VII.C.34	IVA Positif (Kanker Rahim) Berdasarkan Kab/Kota Terhadap Sasaran Wanita Usia 30 – 50 Tahun di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2016	192
Gambar VII.C.35	IVA Positif (Tumor/ Benolan) Berdasarkan Kab/Kota Terhadap Sasaran Wanita Usia 30 – 50 Tahun Di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2016	192

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel I. A. 1	Sasaran RPJMN Berdasarkan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015	3
Tabel II. C.1	Garis Kemiskinan Menurut Kab/Kota di Jawa Barat (Rp/Kapita/Bulan) tahun 2010 s.d. 2016	24
Tabel II. C.2	Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 sd 2016	25
Tabel II. C.3	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Barat Menurut Daerah, September 2015 – Maret 2016	27
Tabel II. C.4	Persentase Penduduk Miskin (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Dirinci Menurut Daerah Perkotaan dan Perdesaan Di Provinsi Jawa Barat Bulan September 2015 dan Maret 2016	30
Tabel II. D.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Kabupaten Kota dan Jenjang Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2015	32
Tabel II. D.2	Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2015	33
Tabel II. D.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7-24 menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Jawa Barat Tahun 2013 s/d 2015	35
Tabel II. E.1	Perhitungan IPM dengan Metode Lama dengan Metode Baru	37
Tabel II. E.2	Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (EYS), Rata-rata Lama Sekolah (MYS), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2015-2016	38
Tabel III. A.1	Jumlah Kebutuhan Pembangunan Puskesmas di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	43
Tabel III. B.1	Jumlah Rumah Sakit berdasarkan Kepemilikan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	47
Tabel III. B.2	Sarana Tempat Tidur Rumah Sakit di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	47
Tabel IV. B. 1	Target Rasio Tenaga Kesehatan	64
Tabel IV. B. 2	Rasio tenaga Kesehatan per 100.000 Penduduk di Jawa Barat Tahun 2016	65
Tabel IV. B. 3	Pemenuhan Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota sampai Tahun 2016	65
Tabel IV. B. 4	Tabel Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kesehatan sampai Akhir Tahun 2025	66

		Halaman
Tabel V. B. 1	Tabel Pembiayaan Kesehatan Bersumber APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016	71
Tabel V. B. 2	Pembiayaan Program Kesehatan di Jawa Barat Bersumber APBD Provinsi Tahun 2016	72
Tabel V. C. 1	Tabel Pembiayaan Kesehatan Bersumber APBN Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016	75
Tabel V. D. 1	Tabel Pembiayaan Kesehatan Bersumber PHLN Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016	77
Tabel VI. B. 1	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup di Provinsi Jawa Barat	86
Tabel VI. B. 2	Banyaknya Kelahiran dan Angka Kematian Ibu di Provinsi Jawa Barat Tahun 2003	87
Tabel VII. A. 1	Persentase Kelahiran Menurut Penolong Persalinan Menurut Kabupaten/Kota, di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013	101
Tabel VII. B. 1	Status Gizi Balita Berdasarkan Berat Badan Menurut Umur Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	125
Tabel VII. D. 1	Annual Parasite Incidence (API) di Daerah Reseptif Malaria Tahun 2011 - 2015	152
Tabel VII. D. 2	Jumlah Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (HPR) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2016	157
Tabel VII. D. 3	Distribusi Penemuan Kasus Flu Burung pada manusia di Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2005 – 2016	159
Tabel VII. D. 4	Kasus Flu Burung (H5N1) Konfirmasi Lab Positif Berdasarkan Golongan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 s/d 2016	160
Tabel VII. D. 5	Jumlah Kasus Anthraks di Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 – 2016	161
Tabel VII. D. 6	Jumlah Kasus Anthraks Kabupaten/Kota Tahun 2006 – 2016	161
Tabel VII. D. 7	Kasus Leptospirosis di Provinsi Jawa Barat Tahun 2007 s/d 2016	163
Tabel VII. D. 8	Kasus Leptospirosis Berdasarkan Lokasi Terjangkit di Provinsi Jawa Barat Tahun 2007 s/d 2016	163
Tabel VII. D.9	Penemuan Kusta Baru, Kusta Tercatat, Kusta Anak, dan Kecacatan Tk.2 di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2008 – 2016	169
Tabel VII. D.10	Kasus AIDS Menurut Kelompok Umur, Tahun 2016	182

BAB I PENDAHULUAN

A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) TAHUN 2015 - 2019

1. Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk Tahun 2015-2019

Visi Pembangunan Nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: *“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”*. Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan, yaitu:

- a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
- c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
- d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
- e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
- f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
- g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sembilan Agenda Pembangunan (Nawa Cita), meliputi :

- a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
- b. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

- e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
- f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- h. Melakukan revolusi karakter bangsa.
- i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Bidang Kesehatan

a. Tujuan

- 1) Meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan, dengan fokus pada Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Terluar (DTPK).
- 3) Meningkatkan perlindungan finansial, melalui Penerima Bantuan Iuran.

b. Kondisi Umum

- 1) Kesehatan ibu dan anak membaik namun belum signifikan dan kesenjangan masih cukup lebar.
- 2) Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih cukup tinggi.
- 3) Disparitas masih lebar : Persalinan di fasilitas kesehatan tertinggi berada di DIY (99%) dan terendah berada di Maluku (25,2%); Cakupan imunisasi dasar lengkap tertinggi berada di DIY (83,1%) dan terendah berada di Papua (29,2%).

c. Status Gizi di Indonesia

- 1) Permasalahan kekurangan gizi, terutama pendek (*stunting*)
- 2) Wasting / kurus dialami oleh 12,1% balita
- 3) Ibu hamil di Indonesia mengalami anemia (37,1%)

d. Pengendalian Penyakit

- 1) Beban ganda penyakit: penyakit menular masih muncul sedangkan penyakit tidak menular semakin meningkat.
- 2) Prevalensi HIV dan AIDS di Indonesia cukup tinggi tahun 2013 adalah

0,43 persen.

3) Faktor Risiko PTM (Penduduk > 10 th kurang konsumsi buah dan sayur : 93,5%).

e. Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pada pelayanan kesehatan rujukan, banyak rumah sakit yang belum memenuhi standar ketenagaan.

3. Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Tabel I. A. 1
Sasaran RPJMN Berdasarkan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015

No	INDIKATOR	Status Awal	Target 2019
1	Meningkatkan Status Ibu dan Anak		
	1) Angka kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran	346 (SP.2010)	306
	2) Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran	32 (2012/2013)	24
2	Meningkatnya Status Gizi Masyarakat		
	1) Prevalensi anemia pada ibu hamil (persen)	37,1 (2013)	28
	2) Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) (persen)	10,2 (2013)	8
	3) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	38,0 (2013)	50
	4) Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita (persen)	19,6 (2013)	17
	5) Prevalensi wasting (kurus) anak balita (persen)	12 (2012)	9,5
	6) Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) anak baduta (persen)	32,9 (2013)	28
3	Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Meningkatkan Penyehatan Lingkungan		
	1) Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	297 (2013)	245
	2) Prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen)	0,43 (2013)	< 0,5
	3) Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi malaria	212 (2013)	300
	4) Jumlah provinsi mencapai eliminasi kusta	20 (2013)	34
	5) Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi Filariasis	0	35
	6) Persentase Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	15,3	40
	7) Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)	25,8 (2013)	23,4
	8) Prevalensi berat badan lebih dan obesitas	15,4 (2013)	15,4

	pada penduduk usia 18+ tahun (persen)		
	9) Prevalensi merokok pada usia \leq 18 tahun	7,2 (2013)	5,4
	10) Persentase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu dari tahun 2013	-	40
4	Meningkatnya pemerataan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Berkualitas		
	1) Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang Terakreditasi	0	5.600
	2) Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi	10 (2013)	481
	3) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi	71,2	95
5	Meningkatnya Perlindungan Finansial		
	1) Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta)	86,4	107,2
	2) <i>Unmet need</i> pelayanan kesehatan	7	1
6	Meningkatnya Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan		
	1) Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	1.015	5.600
	2) Persentase RSUD Kab/Kota kelas C yang memiliki 7 dokter spesialis	29	60
	3) Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif)	25.000	56.910
7	Memastikan Ketersediaan Obat dan Mutu Obat dan Makanan		
	1) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	75,5 (2014)	90
	2) Persentase obat yang memenuhi syarat	92 (2014)	94
	3) Presentase makanan yang memenuhi syarat	87,6 (2013)	90,1
8	Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta meningkatnya pembiayaan kegiatan promotif dan preventif;		
9	Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat		
10	Meningkatnya perlindungan finansial termasuk menurunnya pengeluaran katastrofik akibat pelayanan kesehatan;		
11	Meningkatnya responsifitas sistem kesehatan (<i>health system responsiveness</i>).		
12	Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan nasional		

4. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan R.I tahun 2015 - 2019 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia, yaitu

"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotongroyong". Dalam hal ini Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Terdapat dua tujuan, yaitu:

- a. Meningkatnya status kesehatan masyarakat dan;
- b. Meningkatnya daya tanggap (*responsiveness*) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan.

Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (*life cycle*), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia.

Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (*impact* atau *outcome*) dalam peningkatan status kesehatan masyarakat, indikator yang akan dicapai adalah:

- a. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.000 kelahiran hidup (SP 2010), 346 menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012).
- b. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup.
- c. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%.
- d. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif.
- e. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Sedangkan dalam rangka meningkatkan daya tanggap (*responsiveness*) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan, maka ukuran yang akan dicapai adalah:

- a. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan kesehatan setelah memiliki jaminan kesehatan dari 37% menjadi 10%.
- b. Meningkatnya indeks *responsiveness* terhadap pelayanan kesehatan dari 6,80 menjadi 8,00.

5. Sasaran Kegiatan Kementerian Kesehatan 2015 – 2019

- a. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
 - 1) Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas kesehatan sebesar 85%.

- 2) Menurunnya persentase ibu hamil kurang energi kronik sebesar 18,2%.
 - 3) Meningkatnya persentase kabupaten dan kota yang memiliki kebijakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebesar 80%.
- b. Meningkatnya Pengendalian Penyakit, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
- 1) Persentase kabupaten/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan sebesar 40%.
 - 2) Penurunan kasus Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I) tertentu sebesar 40%.
 - 3) Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebesar 100%.
 - 4) Menurunnya prevalensi merokok pada pada usia ≤ 18 tahun sebesar 5,4%.
- c. Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
- 1) Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang terakreditasi sebanyak 5.600.
 - 2) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi sebanyak 481 kabupaten/kota.
- d. Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
- 1) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sebesar 90%.
 - 2) Jumlah bahan baku obat, obat tradisional serta alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri sebanyak 35 jenis.
 - 3) Persentase produk alat kesehatan dan PKRT peredaran yang memenuhi syarat sebesar 83%.
- e. Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
- 1) Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan sebanyak 5.600 Puskesmas.

- 2) Persentase RS kabupaten/kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang sebesar 60%.
 - 3) Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 56,910 orang.
- f. Meningkatnya sinergitas antar Kementerian/Lembaga, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
- 1) Meningkatnya jumlah kementerian lain yang mendukung pembangunan kesehatan.
 - 2) Meningkatnya persentase kab/kota yang mendapat predikat baik dalam pelaksanaan SPM sebesar 80%.
- g. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
- 1) Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR untuk program kesehatan sebesar 20%.
 - 2) Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan sebanyak 15 ormas
 - 3) Jumlah kesepakatan kerja sama luar negeri di bidang kesehatan yang diimplementasikan sebanyak 40
- h. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan-evaluasi, dengan sasaran yang akan dicapai adalah
- 1) Jumlah provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber sebanyak 34 provinsi.
 - 2) Jumlah rekomendasi monitoring evaluasi terpadu sebanyak 100 rekomendasi.
- i. Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
- 1) Jumlah hasil penelitian yang didaftarkan HKI sebanyak 35 buah.
 - 2) Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan kesehatan yang diadvokasikan ke pengelola
 - 3) program kesehatan dan atau pemangku kepentingan sebanyak 120 rekomendasi.
 - 4) Jumlah laporan Riset Kesehatan Nasional (Riskesnas) bidang kesehatan dan gizi masyarakat sebanyak 5 laporan.

- j. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
 - 1) Persentase satuan kerja yang dilakukan audit memiliki temuan kerugian negara $\leq 1\%$ sebesar 100%.
 - 2) Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian Kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
 - Meningkatnya persentase pejabat struktural di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan sebesar 90%.
 - Meningkatnya persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik sebesar 94%.
- k. Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
 - 1) Meningkatnya persentase Kabupaten/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu sebesar 80%.
 - 2) Persentase tersedianya jaringan komunikasi data yang diperuntukkan untuk akses pelayanan *e-health* sebesar 50%.

B. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 -2018

1. Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah periode 5 (lima) tahun. Dokumen RPJMD bersifat makro yang memuat visi, misi dan program prioritas serta rencana penganggaran. RPJMD merupakan kesepakatan para pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah mengenai program prioritas 5 (lima) tahun kedepan yang akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai koridor penyusunan visi, misi dan program program pembangunan Selain itu RPJMD menjadi pedoman penyusunan program prioritas jangka menengah bagi Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan kondisi, potensi dan karakteristik daerah serta penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD/Biro Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Visi Pembangunan Jawa Barat Tahun 2005 - 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 adalah “*Dengan Iman dan Taqwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia*”. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan tantangan dan peluang serta budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018 adalah “*Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua*”.

Untuk mewujudkan pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

- a. Misi Pertama, Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
- b. Misi Kedua, Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan.
- c. Misi Ketiga, Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik.
- d. Misi Keempat, Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan.
- e. Misi Kelima, Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal.

2. Nilai-Nilai

- a. **Good Governance (tata kelola pemerintahan)**, yaitu pengelolaan pemerintahan yang baik dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang seimbang, bertanggung jawab, efektif dan efisien, dengan menjaga keserasian interaksi yang konstruktif di antara pemerintah, swasta dan masyarakat.
- b. **Integrity (integritas)**, yaitu suatu kesatuan perilaku yang melekat pada prinsip-prinsip moral dan etika, terutama mengenai karakter moral dan kejujuran, yang dihasilkan dari suatu sistem nilai yang konsisten.
- c. **Quality and Accountability (mutu dan akuntabilitas)**, yaitu suatu tingkatan kesempurnaan karakteristik pribadi yang mampu memberikan hasil melebihi kebutuhan ataupun harapan, dan sebuah bentuk tanggungjawab untuk suatu tindakan, keputusan dan kebijakan yang telah

mempertimbangkan mengenai aturan, pemerintahan dan implementasinya, dalam pandangan hukum dan tata kelola yang transparan.

- d. **Pemerataan pembangunan yang berkeadilan**, yaitu upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, dan kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat, melalui pemenuhan kebutuhan akses pelayanan sosial dasar termasuk perumahan beserta sarana dan prasarananya, serta memberikan kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi pengangguran dengan menyeimbangkan pengembangan ekonomi skala kecil, menengah, dan besar.
- e. **Penggunaan data dan informasi yang terintegrasi (Satu Data dan Informasi Jawa Barat) yang akurat, terbaharukan dan dapat dipertanggungjawabkan.** Dokumen tersebut terdiri dari data dan informasi *spasial* (keruangan) dan *a-spasial* (non keruangan).

3. Strategi dan Arah Kebijakan

Bidang Kesehatan melalui strategi pertama, Menguatkan pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan serta penyehatan lingkungan dengan **arah kebijakan** penguatan pemberdayaan masyarakat, kerjasama & kemitraan serta penyehatan lingkungan. Strategi **kedua**, Menguatkan pelayanan kesehatan, pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, gangguan mental serta gangguan gizi dengan arah kebijakan penguatan pelayanan kesehatan, pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular gangguan mental serta gizi masyarakat. Strategi **ketiga**, Menguatkan pembiayaan, sumber daya kesehatan dengan arah kebijakan penguatan Pembiayaan dan sumber daya kesehatan. Strategi **keempat**, Menguatkan manajemen, regulasi, teknologi informasi kesehatan dan penelitian pengembangan kesehatan dengan arah kebijakan penguatan manajemen, regulasi, sistem informasi bidang kesehatan dan penelitian pengembangan kesehatan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) skenario pembangunan *Common Goals* berbasis tematik sektoral. Adapun operasionalisasi *Common Goals* dilaksanakan berdasarkan 5 (lima)

strategi yaitu: *Pertama*, pelibatan komunitas berbasis masyarakat dengan prinsip penguatan aktor lokal (*strengthening local actor*); *Kedua*, integrasi seluruh potensi nyata pembangunan dan daya saing di seluruh kabupaten/kota; *Ketiga*, penerapan manajemen pemerintahan model hibrida sebagai penghela percepatan pembangunan, yaitu mengkombinasi manajemen berbasis daerah otonom Kabupaten/Kota dengan manajemen kewilayahan; *Keempat*, penguatan komitmen pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas pemerintahan; serta *Kelima*, peningkatan peran multi pihak dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan mutu serta akuntabilitas pembangunan. Penjabaran tematik sektoral untuk 10 (sepuluh) *Common Goals* berbasis untuk Bidang kesehatan adalah dengan **Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan**;

- a. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, puskesmas PONED dan pemenuhan sumber daya kesehatan
- b. Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak
- c. Peningkatan Layanan Rumah sakit Rujukan dan Rumah sakit Jiwa
- d. Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat

4. Urusan Wajib Pembangunan Kesehatan

- a. Program Promosi Kesehatan
- b. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- c. Program Pelayanan Kesehatan
- d. Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
- e. Program Sumber Daya Kesehatan
- f. Program Manajemen Kesehatan

5. Program Prioritas

a. Bidang Kesehatan

- 1) Kebijakan Penguatan pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan serta penyehatan lingkungan, yang dilaksanakan melalui :
 - a) **Program Pengembangan Lingkungan Sehat**, dengan sasaran meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STMB).
 - b) **Program Promosi Kesehatan** dengan sasaran meningkatnya

kemampuan kabupaten/kota untuk mencapai desa/kelurahan siaga aktif, PHBS di tatanan rumah tangga dan regulasi kawasan tanpa rokok.

2) Kebijakan penguatan pelayanan kesehatan, pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular gangguan mental serta gizi masyarakat melalui :

a) **Program Pelayanan Kesehatan** dengan sasaran :

- Meningkatkan perlindungan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas bayi, anak, dan masyarakat resiko tinggi untuk gerakan penyelamatan masa depan;
- Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- Meningkatnya pelayanan komprehensif gangguan mental sesuai standar.

b) **Program Pengendalian penyakit menular dan tidak menular**, dengan sasaran :

- Meningkatnya persentase desa/kelurahan mencapai *Universal child immunization* (UCI)
- Setiap kejadian luar biasa (KLB) penyakit dan keracunan tertanggulangi secara cepat dan tepat serta dilaporkan secara cepat kurang dari 24 jam kepada unit pelayanan terdekat
- Meningkatkan surveilans sistem kewaspadaan dini (SKD) dalam rangka reduksi, eliminasi, dan eradikasi penyakit yang berorientasi pada penguatan sistem, kepatuhan terhadap standar dan peningkatan komitmen
- Meningkatkan dalam pengendalian, penemuan dan tatalaksana penyakit TBC, HIV/AIDS, menurunnya angka penyakit Zoonosis, serta penyakit menular dan tidak menular lainnya.

3) Kebijakan Penguatan Pembiayaan dan sumber daya kesehatan melalui **program sumber daya kesehatan** dengan sasaran meningkatnya kualitas dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai standar.

4) Kebijakan Penguatan Managemen, regulasi, sistem infomasi bidang kesehatan dan penelitian pengembangan kesehatan melalui **program Manajemen kesehatan**, dengan sasaran sebagai berikut :

- a) Meningkatnya kualitas rumah sakit menjadi *center of excellent*/rujukan spesifik berbasis masalah kesehatan di Jawa Barat.
- b) Terwujudnya kualifikasi UPTD Provinsi menjadi *center of excellent*.
- c) Tersedianya regulasi dan kebijakan bidang kesehatan.
- d) Terwujudnya sistem informasi kesehatan terintegrasi dan penelitian pengembangan kesehatan dalam mendukung manajemen kesehatan.

C. VISI MISI DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT

Dinas Kesehatan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkepentingan untuk memberikan kontribusi yang bermakna dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan mempertimbangkan kesesuaian dan keterkaitan dengan Visi dan Misi Kementerian Kesehatan serta Visi Pembangunan Provinsi Jawa Barat, maka telah disusun **Visi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat** yaitu : **"Masyarakat yang Mandiri Untuk Hidup Sehat"** Untuk mewujudkan pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi Pembangunan Kesehatan di Jawa Barat sebagai berikut:

- 1) Membangun kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
- 2) Menjamin pelayanan kesehatan yang prima
- 3) Mendukung sumber daya pembangunan kesehatan
- 4) Regulator pembangunan kesehatan di Jawa Barat

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator

1) **Misi 1 : Membangun kemandirian masyarakat untuk hidup sehat**, dengan tujuan Terwujudnya kemandirian masyarakat untuk mencapai kualitas lingkungan yang sehat serta perilaku hidup bersih dan sehat, dengan sasaran sebagai berikut :

- a) Meningkatnya Kemandirian Masyarakat, dengan indikator :
 - Persentase Kabupaten/Kota mempunyai cakupan PHBS Rumah Tangga mencapai 50% .

- Persentase Desa Siaga Aktif
- b) Meningkatnya Kualitas Penyehatan Lingkungan, dengan indikator :
- Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas
 - Persentase penduduk yang mengiakan jamban sehat
- 2) Misi 2 : Menjamin pelayanan kesehatan yang prima,** dengan tujuan Tercapainya pelayanan kesehatan yang berkualitas, dengan sasaran :
- a) Menurunnya ratio kematian ibu dan Bayi, dengan indikator :
- Ratio Kematian Ibu
 - Ratio Kematian Bayi
 - Jumlah Kabupaten/Kota yang menangani Kasus Gizi Buruk
 - Cakupan Persalinan oleh tenaga kesehatan
- b) Meningkatnya Upaya pencegahan, pemberantasan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, dengan indikator :
- Persentasi desa/kelurahan yang mencapai UCI $\geq 90\%$
 - Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai Treatment Succes Rate TB
 - Presentase Kabupaten/Kota dengan kasus tekanan darah tinggi sebesar 23,38%
 - Persentase Kabupaten Kota dengan 100% Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan Jiwa.
- 3) Misi 3 : Mendukung sumber daya pembangunan kesehatan,** dengan tujuan Terpenuhinya Sumber Daya Kesehatan, dengan sasaran :
- a) Meningkatkan sumber daya kesehatan sesuai dengan standar, dengan indikator :
- Persentase Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) terisi dokter Spesialis sesuai standar.
 - Jumlah Puskesmas yang sudah terakreditasi.
 - Jumlah Rumah Sakit yang sudah terakreditasi.
 - Jumlah Rumah Sakit mampu memberikan pelayanan kesehatan ibu dan bayi sesuai standar .

- Persentasi ketersediaan obat esensial di instalasi farmasi kabupaten/kota.
 - b) Menuju *universal coverage* JPKM, dengan indikator : Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan.
- 4) Misi 4 : Regulator pembangunan kesehatan di Jawa Barat, dengan Tujuan :**
Terwujudnya Regulasi dan kebijakan kesehatan, dengan sasaran :
- a) Terwujudnya Regulasi dan kebijakan kesehatan, dengan indikator :
Jumlah dokumen regulasi kebijakan pembangunan kesehatan
 - b) Meningkatnya Data Kesehatan yang Komprehensif, dengan indikator :
Persentase Kabupaten/Kota yang menyediakan Data dan Informasi yang komprehensif.

2. Strategi, Kebijakan dan Program

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan dan sarannya, maka untuk memperjelas cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut melalui strategi pembangunan kesehatan yang terdiri atas Kebijakan dan Program sebagai berikut:

a. Strategi

- 1) Memperkuat pemberdayaan masyarakat, kerja sama & kemitraan serta penyehatan lingkungan;
- 2) Memperkuat pelayanan kesehatan, pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, gangguan mental serta gangguan gizi;
- 3) Memperkuat pembiayaan dan sumberdaya kesehatan;
- 4) Memperkuat manajemen, regulasi, teknologi informasi kesehatan dan penelitian pengembangan kesehatan.

b. Kebijakan :

- 1) Penguatan pemberdayaan masyarakat, kerjasama & kemitraan serta penyehatan lingkungan;
- 2) Penguatan pelayanan kesehatan, pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, gangguan mental serta gangguan gizi;
- 3) Penguatan pembiayaan dan sumber daya kesehatan;
- 4) Penguatan manajemen, regulasi, sistem informasi bidang kesehatan dan penelitian pengembangan kesehatan

c. Program

- 1) Program Promosi Kesehatan;
- 2) Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
- 3) Program Pelayanan Kesehatan;
- 4) Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular;
- 5) Program Sumber Daya Kesehatan; dan
- 6) Program Manajemen Kesehatan.

3. Perencanaan Kinerja Tahun 2015

Perencanaan Kinerja Tahun 2015 disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dari Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018, tujuan dan sasaran tersebut mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018, yaitu dengan tujuan : Membangun sumber daya manusia Jawa Barat yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, senantiasa berkarya, kompetitif, dengan tetap mempertahankan identitas dan ciri khas masyarakat yang santun dan berbudaya dan **sasarannya** : Meningkatnya kualitas layanan kesehatan bagi semua serta perluasan akses layanan yg terjangkau dan merata, dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu:

1) Misi 1 : Membangun kemandirian masyarakat untuk hidup sehat

a. Tujuan

Terwujudnya kemandirian masyarakat untuk mencapai kualitas lingkungan yang sehat serta perilaku hidup bersih dan sehat.

b. Sasaran dan Indikator

- Sasaran 1

Meningkatnya Kemandirian Masyarakat, dengan Indikator, meliputi (a) Persentase Kabupaten/Kota mempunyai cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Rumah Tangga mencapai 50% dan (b) Persentase Desa Siaga Aktif .

- Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Penyehatan Lingkungan, dengan indikator, meliputi ; (a) Persentase Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas, dan (b) Persentase Penduduk yang menggunakan jamban sehat.

2) Misi 2 : Menjamin pelayanan kesehatan yang prima

a) Tujuan

Tercapainya pelayanan kesehatan yang berkualitas

b) Sasaran dan Indikator

- Sasaran 1

Menurunnya ratio kematian ibu dan Bayi, dengan indikator, meliputi : (a) Ratio Kematian Ibu; (b) Ratio Kematian Bayi; (c) Jumlah Kabupaten/Kota yang menangani kasus gizi buruk; dan (d) Cakupan Persalinan oleh tenaga Kesehatan.

- Sasaran 2

Meningkatnya upaya pencegahan, pemberantasan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, dengan Indikator , meliputi : (a) Persentasi desa/kelurahan mencapai UCI $\geq 90\%$; (b) Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai Treatment Succes Rate TB; (c) Persentase Kabupaten/Kota dengan kasus tekanan darah tinggi sebesar 23,38%; dan (d) Persentase Kab/Kota dengan 100% Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan Jiwa.

3) Misi 3 : Mendukung sumber daya pembangunan kesehatan

a) Tujuan

Terpenuhinya Sumber Daya Kesehatan

b) Sasaran dan Indikator

- Sasaran 1

Meningkatkan sumber daya kesehatan sesuai dengan standar, dengan indikator, meliputi; (a) Persentase Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) terisi dokter spesialis sesuai standar; (b) Jumlah Puskesmas yang sudah terakreditasi; (c) Jumlah Rumah Sakit yang sudah terakreditasi; (d) Jumlah Rumah Sakit mampu memberikan pelayanan kesehatan Ibu dan Bayi sesuai standar; dan (e) Persentase ketersediaan obat esensial di instalasi farmasi Kabupaten/Kota.

- Sasaran 2

Menuju *universal coverage* Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPKM), dengan indikator, meliputi Persentasi penduduk dengan jaminan kesehatan.

- 4) Misi 4 : Regulator pembangunan kesehatan di Jawa Barat
- a) Tujuan
Terwujudnya Regulasi dan Kebijakan Kesehatan
 - b) Sasaran dan Indikator
 - Sasaran 1
Terwujudnya regulasi dan kebijakan kesehatan, dengan indikator, meliputi Jumlah dokumen regulasi kebijakan pembangunan kesehatan.
 - Sasaran 2
Meningkatnya data kesehatan yang komprehensif dengan indikator yang meliputi persentase kabupaten/kota yang menyediakan data dan informasi yang komprehensif.

4. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Perjanjian Kinerja tahun 2015 disusun berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018, tujuan dan sasaran tersebut mengacu pada sasaran yang terdapat pada RPJMD, yaitu dengan **tujuan** : Membangun sumber daya manusia Jawa Barat yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, senantiasa berkarya, kompetitif, dengan tetap mempertahankan identitas dan ciri khas masyarakat yang santun dan berbudaya dan **sasarannya** : Meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi semua serta perluasan akses layanan yg terjangkau dan merata, dengan menetapkan **Indikator Kinerja Utama**, yang tercapai melalui Indikator Kinerja Sasaran yaitu :

- a. Meningkatnya kemandirian masyarakat, dengan indikator, yaitu Persentase Kabupaten/Kota mempunyai cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Rumah Tangga mencapai 50%, dengan target 40%.
- b. Menurunnya ratio kematian ibu dan bayi, dengan indikator :
 - 1) Ratio kematian ibu, dengan target 90/100.000 KH
 - 2) Ratio kematian bayi, dengan target 6/1000 KH
 - 3) Jumlah Kabupaten/Kota yang menangani kasus Gizi Buruk, dengan target 100%.
 - 4) Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan, dengan target 85%

- c. Meningkatnya upaya pencegahan, pemberantasan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, dengan indikator :
 - 1) Presentase Desa/kelurahan yang mencapai *Universal Child Immunization* (UCI) \geq 90%, dengan target 90%.
 - 2) Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai *Treatment Succes Rate* (TSR) TB, dengan target 78%.
- d. Meningkatkan sumber daya kesehatan sesuai dengan standar, dengan indikator:
 - 1) Jumlah Puskesmas yang sudah terakreditasi, dengan target 34
 - 2) Jumlah Rumah Sakit yang sudah terakreditasi, dengan target 21
- e. Terwujudnya Regulasi dan kebijakan kesehatan, dengan indikator, yaitu Jumlah Dokumen Regulasi kebijakan pembangunan kesehatan dengan target 2 (dua) dokumen.

5. Isu Strategi Bidang Kesehatan dalam RPJMD Jawa Barat 2013 - 2018

Permasalahan utamanya adalah sebagai berikut :

- a. Intensitas beberapa penyakit menular dan tidak menular serta malnutrisi makin meningkat dan terjadi penyebaran beberapa penyakit menular (*multiple burden of disease*) diluar sasaran MDGs 2015, ada ancaman meningkatnya atau munculnya penyakit lain (*new emerging dan re-emerging*) serta kejadian luar biasa yang diakibatkan adanya perubahan perilaku manusia dan lingkungan.
- b. Sistem kesehatan belum responsif terhadap kebutuhan masyarakat, berdasarkan jumlah sarana pelayanan kesehatan belum sesuai dengan kebutuhan penduduk di kabupaten/kota.
- c. Sistem pelayanan kesehatan belum efektif dan efisien, masih berorientasi kepada kuratif daripada promotif dan preventif, hal ini terlihat dari proporsi anggaran lebih tinggi untuk kuratif.
- d. Belum optimalnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Masyarakat,
- e. Belum terpenuhinya Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan standar dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang prima.
- f. Belum optimalnya aspek Regulasi dan Sistem Informasi Kesehatan dalam mendukung manajemen kesehatan.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. GAMBARAN UMUM WILAYAH

Provinsi Jawa Barat, secara geografis terletak di antara 5°50'–7°50' Lintang Selatan dan 104°48'–108°48' Bujur Timur, dengan batas wilayah di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Banten, sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah di sebelah Selatan dibatasi oleh Samudera Indonesia, sedangkan di daerah Utara adalah Laut Jawa.

Luas wilayah Provinsi Jawa Barat 35.377,76 kilometer persegi atau sekitar 27,82% dari luas wilayah Pulau Jawa dan Madura setara 1,85 % dari luas wilayah Indonesia dan merupakan salah satu Provinsi di Indonesia di sebelah barat Pulau Jawa. Kondisi geografis yang strategis ini merupakan keuntungan bagi daerah Jawa Barat terutama dari segi komunikasi dan perhubungan. Kawasan utara merupakan daerah berdatar rendah, sedangkan kawasan selatan berbukit-bukit dengan sedikit pantai serta dataran tinggi bergunung-gunung ada di kawasan tengah.

Kondisi topografi Jawa Barat, dibedakan atas wilayah pegunungan curam (9,5%) yang terletak di bagian Selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 meter di atas permukaan laut, wilayah lereng bukit yang landai (36,48 %) yang terletak di bagian Tengah dengan ketinggian 10 -1.500 m dpl., dan wilayah daratan landai (54,02%) yang terletak di bagian Utara dengan ketinggian 0-10 m dpl. Jawa Barat memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata berkisar 17,40-30,70 derajat celsius dengan kelembaban udara 73-84%.

Jawa Barat beriklim tropis dengan curah hujan tinggi, rata-rata curah hujan dalam sebulan adalah 161 milimeter dan 7 hari hujan. Iklim demikian menunjang adanya lahan subur yang berasal dari endapan vulkanis serta banyaknya aliran sungai menyebabkan sebagian besar dari luas tanah yang ada dipergunakan sebagai lahan pertanian. Suhu 9°C di Puncak Gunung Pangrango dan 34 °C di Pantai Utara, curah hujan rata-rata 2.000 mm per tahun, namun di beberapa daerah pegunungan antara 3.000 sampai 5.000 mm per tahun.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota, mencakup sekitar 626 Kecamatan, 3.291 Desa dan 2.671 Kelurahan dan dibagi menjadi 5 koordinator wilayah yaitu :

- Wilayah Bogor yang terdiri dari Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.
- Wilayah Purwakarta terdiri dari Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang.
- Wilayah Cirebon terdiri dari Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan.
- Wilayah Priangan Timur terdiri dari Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Pangandaran.
- Wilayah Priangan Barat terdiri dari Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Garut, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.

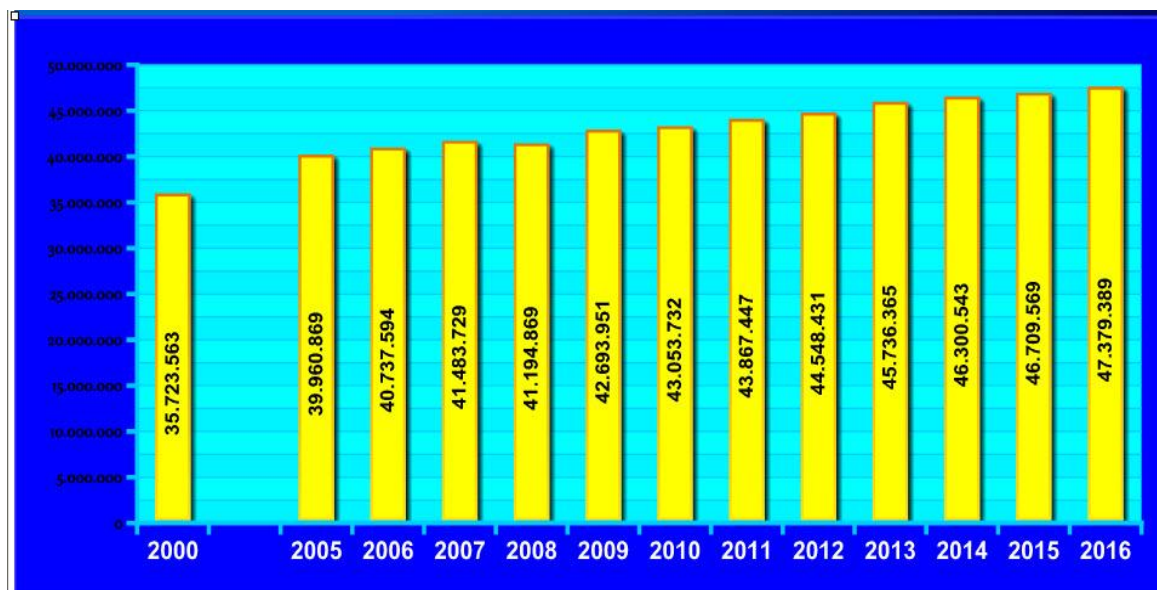
B. KEPENDUDUKAN

Pada tahun 2016, jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat adalah 47.379.389, jiwa terdiri dari penduduk laki-laki sebesar 24.011.261 jiwa (50,68%) dan penduduk perempuan adalah 23.368.128 (49,32%). *Sex Ratio* di Provinsi Jawa Barat tahun 2016 adalah 102,75 artinya komposisi laki-laki lebih banyak dibandingkan komposisi perempuan, dengan pengertian ada 102 hingga 103 orang laki-laki diantara 100 orang perempuan.

Rasio jenis kelamin tiga tertinggi di Jawa Barat adalah Kabupaten Indramayu (106,16), Kabupaten Cianjur (106,01), dan Kabupaten Karawang (105,26).

1. Perkembangan Penduduk

Gambar II B.1
Jumlah Penduduk di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000 – 2016



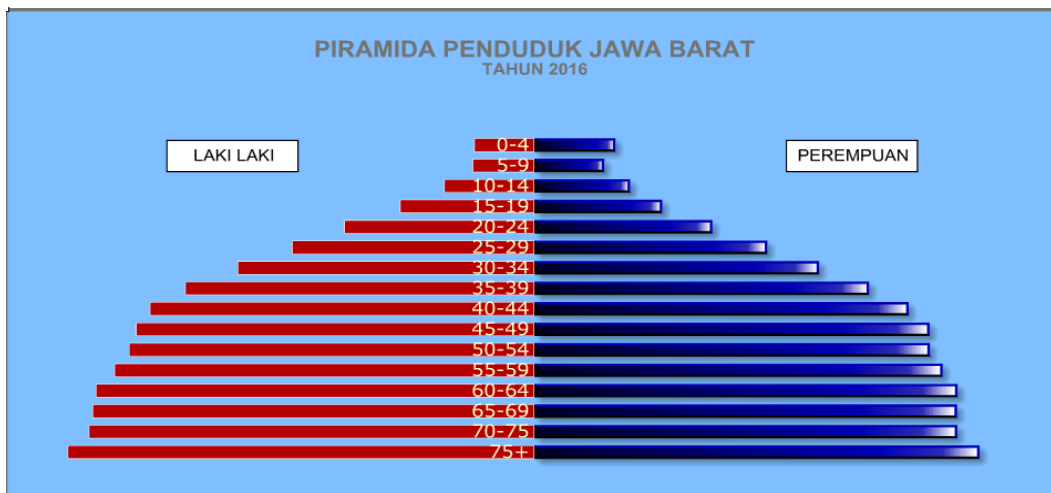
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

2. Piramida dan Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk merupakan pengelompokan penduduk berdasarkan Umur, Pekerjaan, Pendidikan, Agama, Jenis Kelamin, dan Tempat Tinggal, grafik atau penggambaran ini disebut piramida penduduk. Struktur penduduk pada dasarnya dibagi menjadi 3 kelompok yaitu :

- Struktur Penduduk Muda bila suatu wilayah sebagian besar penduduk berusia muda, atau usia belum produktif (0-14 tahun)
- Struktur penduduk Dewasa bila suatu wilayah sebagian besar penduduk berusia dewasa atau Usia Kerja atau Usia Produktif (15-64 Tahun)
- Struktur penduduk tua bila suatu wilayah sebagian besar terdiri dari penduduk berusia tua atau Usia tidak Produktif/Jompo ($> = 65$ Th).

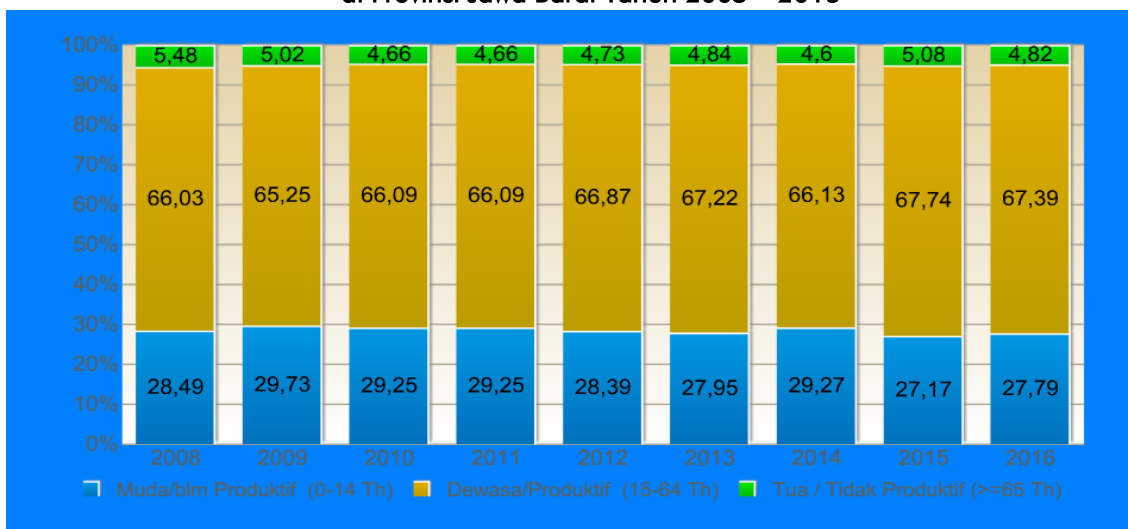
Gambar II. B.2
Piramida Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Dari piramida tersebut dapat dilihat bahwa Jumlah Penduduk Perempuan Lebih tinggi dari Pada Jumlah Penduduk Laki Laki, usia wanita produktif (15-44 tahun) sebanyak 21.608.725 oarang (49,3 % dari Jumlah Penduduk wanita Jawa Barat , atau 24,5 % dari Jumlah Penduduk Jawa Barat) hal ini dapat mrnginformasikan dan memprediksi tingkat kelahiran di Jawa Barat akan tinggi.

Gambar II. B. 3
Persentase Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2016



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Angka beban ketergantungan atau yang biasa disebut Dependency Ratio penduduk di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2008 sebesar 52,48% mengalami

penurunan menjadi 48,39% pada tahun 2016 yang artinya bahwa setiap 100 penduduk usia produktif di Jawa Barat menanggung sekitar 48,39 orang penduduk usia belum/ tidak produktif.

C. GAMBARAN SOSIAL EKONOMI

Tabel II C.1

Garis Kemiskinan Menurut Kab/Kota di Jawa Barat (Rp/Kapita/Bulan) tahun 2010 s.d. 2016

Wilayah Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Provinsi Jawa Barat	201.138	226.097	242.104	276.825	291.474	306.876	324.992
1. Bogor	214.338	235.682	259.151	271.970	280.312	290.874	317.430
2. Sukabumi	184.127	214.191	249.164	240.188	247.800	260.068	270.055
3. Cianjur	202.438	235.202	273.269	264.580	273.506	287.939	304.255
4. Bandung	217.452	228.092	239.253	256.733	264.129	275.562	297.483
5. Garut	180.406	202.350	226.963	226.308	234.661	241.068	256.770
6. Tasikmalaya	186.126	209.238	235.220	237.114	246.796	255.540	274.470
7. Ciamis	208.960	233.528	260.985	270.515	283.227	296.647	319.150
8. Kuningan	200.171	230.251	264.851	261.858	271.015	276.154	289.901
9. Cirebon	230.346	262.374	298.855	300.990	312.194	327.032	333.758
10. Majalengka	263.377	300.741	343.406	353.727	368.900	379.354	393.071
11. Sumedang	230.637	239.009	247.685	260.160	265.495	281.649	295.009
12. Indramayu	264.576	301.788	344.234	350.455	364.360	379.088	397.196
13. Subang	234.803	243.311	252.127	272.854	280.501	295.174	303.583
14. Purwakarta	226.118	236.314	246.970	271.270	281.524	296.477	312.499
15. Karawang	266.597	288.001	311.123	335.273	344.477	363.105	386.282
16. Bekasi	271.901	300.013	331.032	361.510	374.255	394.513	416.058
17. Bandung Barat ¹⁾	216.388	227.988	240.210	256.789	264.244	275.327	294.823
18. Pangandaran	-	-	-	-	-	303.646	327.399
19. Kota Bogor	278.530	305.870	335.894	360.518	372.886	392.405	416.779
20. Kota Sukabumi	284.339	334.735	394.063	411.523	395.131	421.908	441.948
21. Kota Bandung	279.784	292.104	304.966	340.355	353.423	376.311	400.541
22. Kota Cirebon	251.375	284.543	322.087	334.439	349.599	358.654	373.866
23. Kota Bekasi	332.849	365.721	401.839	449.026	466.851	497.343	521.813
24. Kota Depok	310.279	358.259	413.658	443.302	462.069	496.747	522.934
25. Kota Cimahi	280.155	293.143	306.733	347.234	361.794	386.513	411.665
26. Kota Tasikmalaya	263.177	293.985	328.399	337.841	351.718	367.673	397.215
27. Kota Banjar	193.305	219.541	249.338	250.311	260.742	271.017	289.369

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Tabel II C.2
Persentasi Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 sd 2016

Wilayah Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Provinsi Jawa Barat	11,27	10,57	9,89	9,61	9,18	9,53	8,95
1. Bogor	9,97	9,65	8,82	9,54	8,91	8,96	8,83
2. Sukabumi	10,65	10,28	9,78	9,24	8,81	8,96	8,13
3. Cianjur	14,32	13,82	13,17	12,02	11,47	12,21	11,62
4. Bandung	9,30	8,99	8,32	7,94	7,65	8,00	7,61
5. Garut	13,94	13,47	12,70	12,79	12,47	12,81	11,64
6. Tasikmalaya	12,79	12,36	11,75	11,57	11,26	11,99	11,24
7. Ciamis	10,34	9,98	9,61	8,62	8,38	8,98	8,42
8. Kuningan	14,68	14,20	13,69	13,34	12,72	13,97	13,59
9. Cirebon	16,12	15,56	14,94	14,65	14,22	14,77	13,49
10. Majalengka	15,52	14,98	14,44	14,07	13,42	14,19	12,85
11. Sumedang	12,94	12,48	11,85	11,31	10,78	11,36	10,57
12. Indramayu	16,58	16,01	15,42	14,99	14,29	14,98	13,95
13. Subang	13,54	13,06	12,47	12,35	11,73	12,27	11,05
14. Purwakarta	10,57	10,22	9,56	9,28	8,80	9,14	8,98
15. Karawang	12,21	11,80	11,10	10,69	10,15	10,37	10,07
16. Bekasi	6,11	5,93	5,25	5,20	4,97	5,27	4,92
17. Bandung Barat ¹⁾	14,68	14,22	13,33	12,92	12,26	12,67	11,71
18. Pangandaran	-	-	-	-	-	10,76	10,23
19. Kota Bogor	9,47	9,16	8,47	8,19	7,74	7,60	7,29
20. Kota Sukabumi	9,24	8,95	8,41	8,05	7,65	8,79	8,59
21. Kota Bandung	4,95	4,78	4,55	4,78	4,65	4,61	4,32
22. Kota Cirebon	12,00	11,56	11,08	10,54	10,03	10,36	9,73
23. Kota Bekasi	6,30	6,12	5,55	5,33	5,25	5,46	5,06
24. Kota Depok	2,84	2,75	2,46	2,32	2,32	2,40	2,34
25. Kota Cimahi	7,40	7,15	6,67	5,63	5,47	5,84	5,92
26. Kota Tasikmalaya	20,71	19,98	18,92	17,19	15,95	16,28	15,60
27. Kota Banjar	8,47	8,21	7,78	7,11	6,95	7,41	7,01

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

1. Tingkat Kemiskinan Di Jawa Barat

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Jawa Barat pada bulan Maret 2016 sebesar 4.224.325 (8,95 persen). Dibandingkan dengan bulan September 2015 sebesar 4.485.654 orang (9,57 persen), jumlah penduduk miskin bulan Maret 2016 mengalami penurunan sebesar 261.329 orang (5,82 persen) dari total penduduk miskin September 2015.

Persentase penduduk miskin di Jawa Barat bulan September 2015 dibandingkan dengan bulan Maret 2016 mengalami penurunan sebesar 0,62 poin.

Jumlah penduduk miskin bulan Maret 2016 untuk daerah perkotaan sebanyak 2.497.592 orang (7,67 persen terhadap jumlah penduduk perkotaan) sedangkan di daerah perdesaan sebanyak 1.726.733 orang (11,80 persen terhadap total penduduk perdesaan). Dibandingkan dengan September 2015 terjadi penurunan persentase penduduk miskin di perkotaan sebesar 0,91 persen yaitu dari 8,58 persen menjadi 7,67 persen. Dan di perdesaan terjadi kenaikan sebesar 0,19 persen yaitu dari 11,61 persen menjadi 11,80 persen.

Garis kemiskinan Jawa Barat bulan Maret 2016 sebesar Rp. 324.992,- atau mengalami peningkatan sebesar 2,01 persen dibandingkan dengan garis kemiskinan bulan September 2015 sebesar Rp. 318.602,- Untuk daerah perkotaan garis kemiskinan bulan Maret 2016 sebesar Rp. 325.017,- atau naik 2,11 persen dari kondisi bulan September 2015 sebesar Rp. 318.297.

Garis kemiskinan di daerah perdesaan mengalami peningkatan yang lebih rendah yaitu 1,79 persen menjadi sebesar Rp. 324.937,- dibandingkan dengan kondisi September 2015 yaitu sebesar Rp. 319.228,-

Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap Garis Kemiskinan (GK) sebesar 70,21 persen untuk daerah perkotaan. Sedangkan di daerah perdesaan sebesar 75,89 persen. Secara total peranan komoditi makanan terhadap GK adalah sebesar 72,04 persen.

Pada periode September 2015 - Maret 2016 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sama-sama menunjukkan kecenderungan mengalami penurunan. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga cenderung menyempit. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 1,674 pada keadaan September 2015 menjadi 1,489 pada keadaan Maret 2016 turun sebesar 0,185 poin sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan penurunan dari 0,491 pada keadaan September 2015 menjadi 0,372 pada keadaan Maret 2016 atau turun sebesar 0,119 poin.

2. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Di Jawa Barat September 2015 – Maret 2016

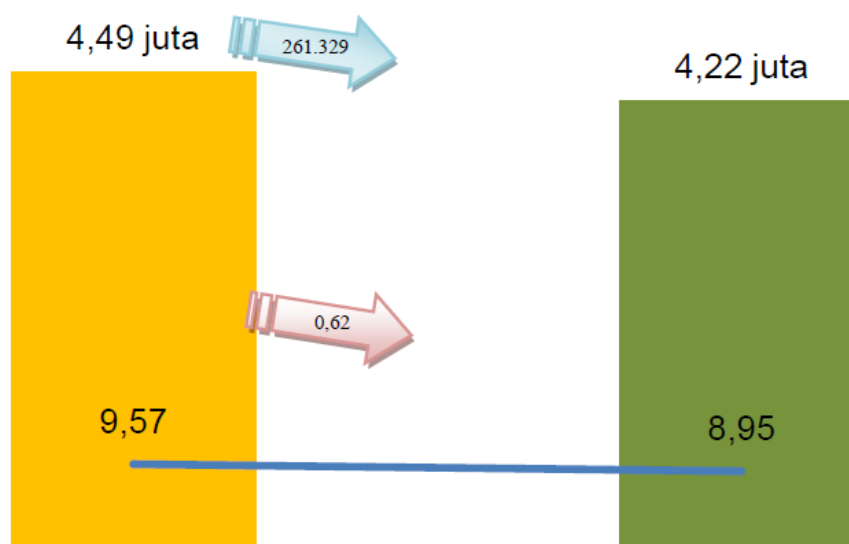
Jumlah penduduk miskin di Jawa Barat, Maret 2016 sebesar 4.224.325 orang (8,95 persen). Mengalami penurunan sebesar 261.329 orang (0,62 persen poin) dibandingkan kondisi pada bulan September 2015 sebesar 4.485.654 orang (9,57). Dalam kurun waktu enam bulan terakhir persentase penduduk miskin yang tinggal di daerah perdesaan naik sebesar 0,19 persen poin (11,61 persen menjadi 11,80 persen) sedangkan di daerah perkotaan turun 0,91 persen poin (dari 8,58 persen menjadi 7,67 persen). Secara absolut selama periode September 2015 – Maret 2016, penduduk miskin di perdesaan berkurang 52,401 orang (dari 1.779.134 orang menjadi 1.726.733 orang) sementara di perkotaan berkurang sebanyak 208,928 orang (dari 2.706.520 orang menjadi 2.497.592 orang).

Persentase penduduk miskin yang tinggal di daerah perdesaan pada bulan Maret 2016 terhadap penduduk miskin Jawa Barat adalah sebesar 40,88 persen. Ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan September 2015 (39,66 %). Sebaliknya persentase penduduk miskin perkotaan terhadap penduduk miskin menurun dari 60,34 persen menjadi 59,12 persen.

Tabel II C.3
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Barat Menurut Daerah September 2015 – Maret 2016

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)			Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin (%)
	Makanan	Bukan Makanan	Total		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Perkotaan					
September 2015	223.843	94.454	318.297	2.706.520	8,58
Maret 2016	228.191	96.826	325.017	2.497.592	7,67
Perdesaan					
September 2015	241.132	78.096	319.228	1.779.134	11,61
Maret 2016	246.605	78.332	324.937	1.726.733	11,80
Perkotaan + Desa					
September 2015	229.494	89.107	318.602	4.485.654	9,57
Maret 2016	234.108	90.884	324.992	4.224.325	8,95

Gambar II C. 1
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
September 2015 – Maret 2016



3. Perubahan Garis Kemiskinan September 2015 - Maret 2016

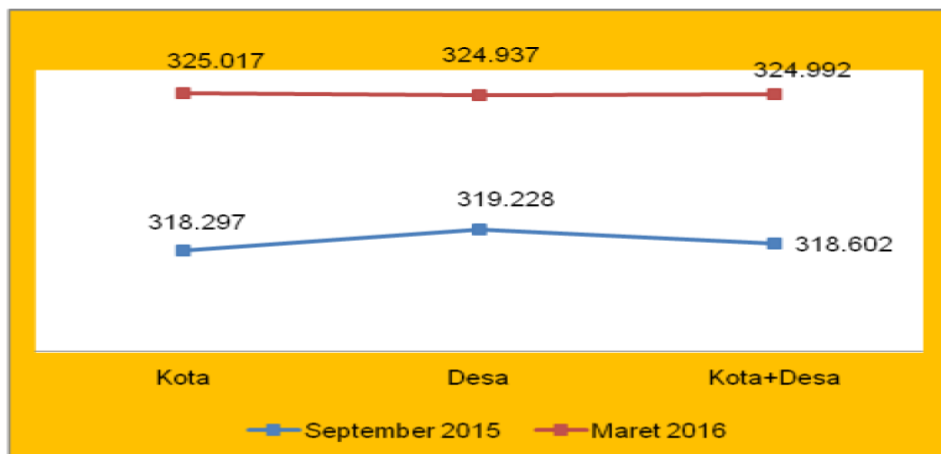
Dalam proses penghitungan, besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan. Batasan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Selama September 2015 – Maret 2016, Garis Kemiskinan naik sebesar 2,01 persen yaitu dari Rp. 318.602,- pada September 2015 menjadi Rp. 324.992,- pada Maret 2016. Dengan memperhatikan Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari GK Daerah Perkotaan dan Perdesaan, terlihat bahwa GK perkotaan kenaikannya lebih tinggi yaitu sebesar 2,11 persen dari Rp. 318.297,- pada September 2015 menjadi Rp. 325.017,- pada Maret 2016. Sedangkan kenaikan GK perdesaan lebih rendah dibanding kenaikan di perkotaan yaitu sebesar 1,79 persen dari Rp 319.228,- menjadi Rp. 324.937,-

Pada Maret 2016, Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 234.108,- sedangkan jika dibedakan antara perkotaan dan perdesaan, Garis Kemiskinan Makanan di perdesaan (Rp 246.605,-) lebih tinggi dibandingkan Garis Kemiskinan Makanan di perkotaan (Rp 228.191,-). Tetapi sebaliknya, untuk Garis Kemiskinan Non Makanan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan yaitu Rp 96.826,- berbanding Rp 78.332,-. Garis Kemiskinan Non Makanan secara total sebesar Rp 90.884,-.

Gambaran Umum

Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan sangat dominan dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat pada tingkat ekonomi rendah lebih dominan untuk pengeluaran kebutuhan makanan dibandingkan non makanan. Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap Garis Kemiskinan (GK) sebesar 70,21 persen untuk daerah perkotaan. Sedangkan di daerah pedesaan sebesar 75,89 persen. Secara total peranan komoditi makanan terhadap GK adalah sebesar 72,04 persen.

Gambar II C. 2
Grafik Garis Kemiskinan Maret 2015 – Maret 2016



Sumber : Susenas 2016

Gambar II C. 3
Peranan Komoditi Makanan dan Non Makanan Terhadap Garis Kemiskinan Maret 2016



Sumber : Susenas 2016

Tabel II C.4
Persentase Penduduk Miskin (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Dirinci Menurut Daerah Perkotaan dan Perdesaan Di Provinsi Jawa Barat Bulan September 2015 dan Maret 2016

Bulan	Kota			Desa			Kota+Desa		
	P0	P1	P2	P0	P1	P2	P0	P1	P2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
September 2015	8,58	1,402	0,400	11,61	2,233	0,678	9,57	1,674	0,491
Maret 2016	7,67	1,171	0,259	11,80	2,197	0,624	8,95	1,489	0,372
Perubahan	-0,91	-0,231	-0,141	0,19	-0,036	-0,054	-0,62	-0,185	-0,119

Sumber : Susenas 2016

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Pada periode September 2015- Maret 2016, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 1,674 pada keadaan September 2015 menjadi 1,489 pada keadaan Maret 2016 demikian pula dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga menunjukkan penurunan dari 0,491 pada keadaan September 2015 menjadi 0,372 pada keadaan Maret 2016. Penurunan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati dari garis kemiskinan dan kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin juga cenderung menyempit. Penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan dengan penurunan lebih tinggi di perkotaan dibandingkan yang terjadi di perdesaan untuk kedua indikator tersebut.

D. TINGKAT PENDIDIKAN

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. dan untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator antara lain: Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), serta Angka Partisipasi Sekolah (APS).

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kab/Kota dan Jenjang Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 sd 2015

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya dan merupakan persentasi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Pada tabel berikut ini dapat kita lihat capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) di Jawa Barat untuk SD, SMP dan SMA cenderung meningkat. Untuk SD dari 106,75 % pada tahun 2013 menjadi 106,98 % pada tahun 2014 dan 109,42% pada tahun 2015, untuk SMP/SLP dari 85,6, % pada tahun 2013 menjadi 87,50 % pada tahun 2014 dan 90,07% pada tahun 2015, untuk SMA/SLA dari 60,12, % pada tahun 2013 menjadi 68,55 % pada tahun 2014 dan 70,23% pada tahun 2015 sedangkan untuk Perguruan tinggi berfluktuasi dari 19,62% pada tahun 2013 naik menjadi 21,70% pada tahun 2014 dan turun menjadi 17,76% pada tahun 2015 (Prosentasi lebih dari 100% menunjukkan terdapat penduduk yang bersekolah tidak sesuai dengan usia sekolah di jenjang pendidikannya).

Tabel II D. 1
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kab/Kota dan Jenjang Pendidikan
Provinsi Jawa Barat 2013 - 2015

KABUPATEN/KOTA	2013				2014				2015			
	APK_SD	APK_SM	P	APK_PT	APK_SD	APK_SM	P	APK_PT	APK_SD	APK_SM	P	APK_PT
PROVINSI JAWA BARAT	106,75	85,26	60,12	19,62	106,98	87,50	68,55	21,70	109,42	90,07	70,23	17,76
01. Bogor	108,60	74,25	57,11	17,57	109,69	76,12	66,76	19,40	108,82	84,63	67,93	12,64
02. Sukabumi	107,23	82,18	54,27	20,18	106,84	84,75	61,71	22,69	113,06	83,00	54,94	10,45
03. Cianjur	106,24	86,30	54,26	13,20	106,36	88,39	63,36	15,28	109,50	86,04	43,87	4,12
04. Bandung	108,59	85,31	50,46	16,38	108,30	89,56	55,05	18,67	110,04	89,63	66,20	19,74
05. Garut	105,15	77,55	55,29	17,80	106,28	82,80	62,17	20,12	111,72	82,17	51,53	6,17
06. Tasikmalaya	109,57	85,73	46,45	19,24	105,06	90,58	60,38	17,68	107,09	91,74	65,11	13,01
07. Ciamis	104,84	89,76	63,06	22,31	104,62	93,11	79,87	23,49	108,33	84,01	75,23	16,47
08. Kuningan	104,82	79,16	74,79	19,48	103,72	81,92	81,84	23,03	108,65	86,24	72,88	13,99
09. Cirebon	110,32	82,29	54,41	10,35	109,48	82,43	66,58	15,94	104,90	91,58	74,32	9,56
10. Majalengka	108,85	83,90	68,38	7,42	107,06	89,24	70,34	15,56	109,77	97,14	60,69	11,84
11. Sumedang	108,80	89,61	64,72	23,77	106,11	93,22	71,99	29,08	109,96	86,54	76,09	23,10
12. Indramayu	105,78	92,99	55,82	21,67	108,19	92,86	69,26	22,45	117,91	83,48	74,55	14,62
13. Subang	109,20	82,04	58,72	12,55	111,40	83,58	60,38	12,66	111,10	94,60	56,83	10,62
14. Purwakarta	104,27	84,57	69,28	6,93	107,16	91,27	71,24	13,46	111,05	96,16	52,64	11,33
15. Karawang	108,18	76,94	76,19	6,94	107,41	83,74	79,66	7,95	110,37	98,91	63,27	10,24
16. Bekasi	109,37	90,96	60,21	12,33	107,42	90,75	75,60	12,96	112,55	93,10	73,38	11,12
17. Bandung Barat	99,69	91,78	42,56	9,02	104,85	89,73	52,70	8,98	108,58	93,18	58,30	7,94
18. Pangandaran	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	105,83	94,15	92,83	8,65
19. Bogor	106,54	88,23	68,15	19,96	107,62	90,53	83,93	20,59	110,48	88,62	98,02	24,08
20. Sukabumi	106,31	98,19	62,14	27,05	102,46	97,64	74,86	25,35	104,31	103,63	83,43	21,63
21. Bandung	103,68	96,49	55,56	39,85	104,46	97,14	65,66	38,14	103,76	98,33	92,71	45,22
22. Cirebon	103,55	91,78	69,38	28,51	105,31	92,88	83,49	29,54	110,26	95,63	74,81	21,04
23. Bekasi	106,99	96,67	68,77	35,55	106,34	98,42	74,70	35,80	106,11	94,51	107,34	35,84
24. Depok	100,43	99,40	78,40	32,50	104,51	94,81	80,14	37,87	107,33	93,93	86,32	34,94
25. Kota Cimahi	105,59	86,40	86,17	39,42	103,66	84,99	88,90	40,38	104,58	97,31	79,28	34,00
26. Kota Tasikmalaya	102,99	86,24	74,17	22,04	105,05	89,59	78,44	30,85	111,44	95,36	78,94	20,08
27. Banjar	99,99	87,18	80,08	20,78	101,19	93,46	91,14	19,92	104,61	97,17	83,99	19,29

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Keterangan :

- $APK\ SD = \{(Jumlah\ penduduk\ yang\ sekolah\ di\ SD : Jumlah\ penduduk\ umur\ 7-12\ tahun) \times 100\}$
- $APK\ SLTP = \{(Jumlah\ penduduk\ yang\ sekolah\ di\ SLTP : Jumlah\ penduduk\ umur\ 13-15\ tahun) \times 100\}$
- $APK\ SLTA = \{(Jumlah\ penduduk\ yang\ sekolah\ di\ SLTA : Jumlah\ penduduk\ umur\ 16-18\ tahun) \times 100\}$
- $APK\ PT = \{(Jumlah\ penduduk\ yang\ sekolah\ di\ PT : Jumlah\ penduduk\ umur\ 19-24\ tahun) \times 100\}$

2. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kab/Kota dan Jenjang Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 sd 2015

Angka partisipasi murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan

yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan, bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka angka partisipasi murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Tabel II D. 2
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kab/Kota dan Jenjang Pendidikan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 sd 2015

KABUPATEN/KOTA	2013				2014				2015			
	APM_SD	APM_SM	APM_SM	APM_PT	APM_SD	APM_SM	APM_SM	APM_PT	APM_SD	APM_SM	APM_SM	APM_PT
PROVINSI JAWA BARAT	97,08	76,76	52,25	15,94	97,60	79,30	56,48	17,48	97,68	79,55	56,73	15,78
01. Bogor	98,17	65,41	44,29	16,07	98,20	66,80	48,89	16,60	96,29	72,97	55,10	11,84
02. Sukabumi	98,64	74,09	47,69	17,26	98,94	77,80	51,50	18,43	99,65	75,76	43,94	9,92
03. Cianjur	97,09	78,00	47,27	12,99	97,74	79,38	49,56	13,89	99,89	78,40	37,18	3,86
04. Bandung	98,02	80,63	46,24	12,16	98,26	83,56	48,36	14,29	98,00	82,14	55,49	17,04
05. Garut	97,27	71,54	45,98	16,83	97,55	73,72	48,32	17,55	98,09	75,28	44,60	5,71
06. Tasikmalaya	98,07	79,24	44,27	14,67	98,73	84,54	54,54	16,33	99,09	76,98	54,80	12,16
07. Ciamis	97,93	84,56	61,48	18,22	98,08	85,90	67,17	20,66	99,75	78,19	63,39	15,95
08. Kuningan	98,73	77,26	62,01	13,68	99,11	79,23	66,40	16,98	100,00	81,58	61,44	11,86
09. Cirebon	97,51	70,10	48,58	7,47	97,81	73,10	52,14	10,96	94,82	78,41	57,18	9,00
10. Majalengka	98,34	79,26	56,33	6,21	98,67	85,61	59,15	11,59	97,10	82,42	48,68	10,49
11. Sumedang	97,77	84,41	57,30	20,57	98,36	87,85	60,80	22,58	99,75	79,53	56,35	20,25
12. Indramayu	97,65	83,28	51,44	18,52	98,41	87,90	61,74	19,78	100,00	76,02	60,81	12,43
13. Subang	98,74	78,38	48,28	7,97	99,06	79,55	48,41	9,11	97,28	81,78	41,18	9,16
14. Purwakarta	96,45	74,71	59,65	5,27	96,83	79,09	61,93	8,44	99,09	83,38	46,94	9,99
15. Karawang	97,44	72,58	60,95	5,83	97,76	76,53	63,79	7,23	97,47	84,77	52,70	9,80
16. Bekasi	96,23	77,00	54,97	9,09	97,46	79,51	62,95	9,45	99,62	82,23	58,64	9,28
17. Bandung Barat	92,12	76,47	38,25	6,66	94,15	77,11	43,32	7,69	96,56	79,39	47,25	6,93
18. Pangandaran	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	96,28	77,25	72,98	7,02
19. Bogor	97,86	79,89	62,89	18,16	98,32	86,15	69,40	18,57	94,89	77,64	67,31	20,32
20. Sukabumi	93,94	72,54	52,53	20,64	94,37	82,51	65,10	21,40	97,60	91,74	71,83	20,70
21. Bandung	97,48	89,66	51,60	28,37	97,95	89,85	59,76	28,99	96,25	87,23	74,06	39,60
22. Cirebon	94,14	78,44	54,02	24,70	94,11	79,13	64,02	25,24	96,70	82,42	60,72	17,59
23. Bekasi	96,68	91,36	67,65	28,57	96,76	91,47	68,39	28,88	94,93	80,66	80,98	33,43
24. Depok	90,19	74,84	60,87	26,93	92,47	77,15	62,26	29,81	96,08	82,72	69,72	27,97
25. Kota Cimahi	97,47	75,91	70,05	30,82	98,60	80,94	70,96	31,15	98,02	90,85	70,30	32,29
26. Kota Tasikmalaya	96,35	78,64	64,50	20,62	96,97	81,26	66,71	26,31	98,34	85,12	69,78	18,01
27. Banjar	94,25	80,24	72,50	11,07	95,79	85,87	73,36	14,36	98,07	86,54	71,15	15,85

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Keterangan :

- $APM_{SD} = \left\{ \frac{\text{Jumlah penduduk umur 7-12 yang sekolah di SD}}{\text{Jumlah penduduk umur 7-12 tahun}} \times 100 \right\}$
- $APM_{SLTP} = \left\{ \frac{\text{Jumlah penduduk umur 13-15 yang sekolah di SLTP}}{\text{Jumlah penduduk umur 13-15 tahun}} \times 100 \right\}$
- $APM_{SLTA} = \left\{ \frac{\text{Jumlah penduduk umur 16-18 yang sekolah di SLTA}}{\text{Jumlah penduduk umur 16-18 tahun}} \times 100 \right\}$

- $APM\ PT = \left\{ \left(\frac{\text{Jumlah penduduk umur 19-24 yang sekolah di PT}}{\text{Jumlah penduduk umur 19-24 tahun}} \right) \times 100 \right\}$

Dari tabel diatas kita dapat melihat capaian Angka Partisipasi Murni (APM) di Jawa Barat. Untuk SD dari 97,08 % pada tahun 2013 menjadi 97,60 % pada tahun 2014 dan 97,68% pada tahun 2015, untuk SMP/SLP dari 76,76, % pada tahun 2013 menjadi 79,30 % pada tahun 2014 dan 79,55% pada tahun 2015, untuk SMA/SLA dari 52,25, % pada tahun 2013 menjadi 56,48 % pada tahun 2014 dan 56,73% pada tahun 2015 untuk Perguruan tinggi dari 15,94% pada tahun 2013 naik menjadi 17,48% pada tahun 2014 dan turun menjadi 15,78% pada tahun 2015.

3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7 – 24 th Menurut Kab/Kota dan Kelompok Umur di Jawa Barat Tahun 2013 sd 2015

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah juga sebagai indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah, semakin tinggi angka partisipasi sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan, namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan pendidikan.

Pada tabel ini capaian Angka Partisipasi Murni (APS) di Jawa Barat. Untuk SD dari 98,50 % pada tahun 2013 menjadi 99,30 % pada tahun 2014 dan 99,57% pada tahun 2015, untuk SMP/SLP dari 89,40, % pada tahun 2013 menjadi 92,84 % pada tahun 2014 dan 93,19% pada tahun 2015, untuk SMA/SLA dari 59,98, % pada tahun 2013 menjadi 65,48 % pada tahun 2014 dan 65,72% pada tahun 2015 untuk Perguruan tinggi dari 17,34% pada tahun 2013 naik menjadi 19,27% pada tahun 2014 dan naik sedikit menjadi 19,40% pada tahun 2015.

Tabel II D. 3
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7 – 24 th Menurut Kab/Kota dan Kelompok Umur di Jawa Barat Tahun 2013 sd 2015

KABUPATEN/KOTA	2013				2014				2015			
	Kelompok Umur				Kelompok Umur				Kelompok Umur			
	7 - 12	13 - 15	16 - 18	19 - 24	7 - 12	13 - 15	16 - 18	19 - 24	7 - 12	13 - 15	16 - 18	19 - 24
PROVINSI JAWA BARAT	98,85	89,40	59,98	17,34	99,30	92,84	65,48	19,27	99,57	93,19	65,72	19,40
01. Bogor	99,37	83,82	53,14	16,64	99,23	86,90	58,51	17,79	99,05	89,24	62,23	14,64
02. Sukabumi	99,09	88,22	57,34	17,62	99,64	92,00	61,32	18,99	99,65	93,29	53,66	14,87
03. Cianjur	98,15	87,66	54,22	17,31	99,13	90,96	61,36	18,71	100,00	94,01	46,19	5,85
04. Bandung	99,23	92,21	51,31	13,92	99,51	95,02	53,70	15,87	99,91	95,01	60,55	19,99
05. Garut	98,70	83,56	49,29	17,83	98,91	86,47	58,47	19,45	98,78	87,05	51,71	8,09
06. Tasikmalaya	98,29	93,20	52,99	16,04	99,25	95,68	62,63	17,59	99,79	94,23	72,26	15,31
07. Ciamis	98,64	91,53	67,02	18,60	99,74	95,91	73,60	24,00	100,00	92,47	69,08	20,38
08. Kuningan	99,02	89,46	65,26	14,21	99,58	93,90	74,26	18,18	100,00	91,46	67,62	14,67
09. Cirebon	98,88	82,24	60,08	10,49	98,60	88,03	64,26	15,15	98,76	91,90	63,56	14,36
10. Majalengka	99,17	94,44	60,56	7,25	99,23	95,44	66,78	13,31	100,00	92,86	58,80	15,20
11. Sumedang	99,00	93,34	63,97	23,03	99,80	94,47	73,04	25,37	100,00	93,73	62,36	24,73
12. Indramayu	98,57	89,41	57,85	21,62	99,68	93,33	67,38	22,52	100,00	89,67	71,55	15,81
13. Subang	99,60	91,89	57,31	9,27	99,59	94,05	57,94	11,44	99,73	94,70	52,89	14,15
14. Purwakarta	99,17	86,91	64,32	5,88	99,63	92,06	71,31	10,32	99,75	94,10	59,44	11,65
15. Karawang	98,76	91,62	63,31	6,30	99,00	93,03	69,98	7,46	100,00	97,19	62,07	12,42
16. Bekasi	98,94	90,14	63,13	10,95	99,87	95,59	70,08	11,46	99,77	92,69	73,04	14,10
17. Bandung Barat	96,79	85,75	43,62	9,36	97,81	91,29	49,28	10,56	99,63	90,28	57,74	11,58
18. Pangandaran	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100,00	93,99	84,56	10,96
71. Bogor	98,76	88,40	71,04	18,83	100,00	97,06	74,31	21,25	98,90	93,43	72,82	26,74
72. Sukabumi	99,69	91,43	65,55	21,86	98,95	97,65	74,13	23,07	99,36	97,16	79,48	26,03
73. Bandung	98,91	93,85	67,41	29,36	99,57	97,52	73,62	29,97	99,27	97,09	85,68	43,23
74. Cirebon	99,72	91,34	61,02	27,20	98,76	96,09	75,71	27,66	99,10	97,88	69,81	22,57
75. Bekasi	98,96	94,83	77,92	29,06	99,41	98,70	78,75	29,52	100,00	97,66	86,30	37,37
76. Depok	99,38	97,54	68,91	27,94	99,16	98,57	72,82	30,52	99,36	97,65	81,31	30,70
77. Kota Cimahi	98,51	94,74	82,17	34,07	99,66	96,97	83,74	33,89	99,29	99,07	76,80	34,01
78. Kota Tasikmalaya	97,31	94,17	71,30	21,89	98,30	96,71	74,15	27,78	100,00	96,56	79,30	21,74
79. Banjar	97,63	93,75	78,34	12,65	98,80	97,30	82,40	17,64	100,00	95,78	80,61	21,27

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Keterangan

- APS (7-12) = {(Jumlah penduduk berumur 7-12 tahun yang masih sekolah:Jumlah penduduk umur 7–12 tahun) X 100 }
- APS(13-15) = {(Jumlah penduduk berumur 13-15 tahun yang masih sekolah: Jumlah penduduk umur 13-15 tahun) X 100}
- APS (16-18)= {(Jumlah penduduk berumur 16-18 tahun yang masih sekolah:Jumlah penduduk umur 16-18 tahun) X 100}
- APS (19-24)= {(Jumlah penduduk berumur 16-18 tahun yang masih sekolah:Jumlah penduduk umur 16-18 tahun) X 100}

E. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Salah satu alat ukur yang dianggap dapat merefleksikan status pembangunan manusia adalah *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living*). Konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0 dengan kategori tinggi apabila IPM lebih dari 80,0; kategori menengah atas : IPM antara 66,0 – 79,9; kategori menengah bawah : IPM antara 50,0 – 65,9; dan katagori rendah : IPM kurang dari 50,0.

Sejak tahun 2014 Perhitungan IPM berubah dengan metode baru alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM yaitu:

Pertama :

- Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik.
- Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Kedua:

Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dimensi lain.

Indikator yang berubah adalah Angka Melek Huruf (AMH) pada metode lama diganti dengan angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita, sedangkan Metode penghitungan: dari Metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Perbandingan perhitungan IPM versi lama dengan versi baru dapat dilihat pada tabel dibawah berikut ini.

Tabel II. E. 1
Perhitungan IPM dengan Metode Lama dengan Metode Baru

DIMENSI	METODE LAMA	METODE BARU	
Kesehatan	Angka Harapan Hidup (e0)	Angka Harapan Hidup (e0)	Max : 83,4 Min : 20
Pengetahuan	1. Angka Melek Huruf (AMH)	1. <i>Expected Years of Schooling (EYS)</i>	Max : 18 Min : 0
	2. <i>Mean Years of Schooling (MYS)</i>	2. <i>Mean Years of Schooling (MYS)</i>	Max : 13,1 Min : 0
Standar Hidup Layak	Pengetahuan per kapita disesuaikan (PPP IDR)	Pengetahuan per kapita disesuaikan (PPP IDR)	Max : RP 34.911.910,00 Perkiraan pengeluaran Indonesia th 2015 Min : RP. 1.409.268,00 (Pengeluaran terendah th 2008, Tolikara-Papua)
Aggregasi	Rata-rata Hitung	Rata-rata UKur	

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

1. Skenario IPM 80 Tahun 2005 – 2015

Provinsi Jawa Barat menetapkan IPM 80 poin semula akan diproyeksikan dicapai pada tahun 2015, tetapi terjadi perubahan menjadi tahun 2022 sesuai dengan Perda No.24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan daerah No. 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005–2025 dan Perda No 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013–2018.

2. Capaian IPM Jawa Barat

Berdasarkan Perhitungan BPS dengan metoda Baru IPM Jawa Barat tergambar dalam tabel dibawah ini selama periode 2015-2016 mengalami peningkatan sebesar 0,55 poin dari 69,50 tahun 2015 menjadi 70,05 pada tahun 2016,

Terdapat tiga bidang yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia yaitu usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living*) dari capaian IPM 70,05 poin pada tahun 2016 dikontribusikan oleh Angka Harapan Hidup sebesar 72,44 poin, Harapan Lama Sekolah (EYS: *Expected Years of Schooling*) sebesar 12,30 point, Rata Rata Lama Sekolah (MYS:

Mean Years of Schooling sebesar 7,95 point), dan pengeluaran per kapita 10.035.

Tabel II E. 2
Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (EYS), Rata Rata Lama Sekolah (MYS), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2015-2016

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH		EYS		MYS		Pengeluaran per kapita		IPM		Peringkat IPM		selisih IPM	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
3200	JAWA BARAT	72,41	72,44	12,15	12,30	7,86	7,95	9.778	10.035	69,50	70,05	11	10	0,70	0,55
3201	Bogor	70,59	70,65	11,83	12,05	7,75	7,83	9.368	9.537	67,77	68,32	15	15	0,41	0,55
3202	Sukabumi	70,03	70,14	12,13	12,18	6,51	6,74	7.849	8.077	64,44	65,13	23	23	0,37	0,69
3203	Cianjur	69,28	69,39	11,83	11,88	6,54	6,61	6.877	7.074	62,42	62,92	27	27	0,34	0,50
3204	Bandung	73,07	73,10	12,13	12,42	8,41	8,50	9.375	9.580	70,05	70,69	9	9	0,99	0,64
3205	Garut	70,69	70,76	11,65	11,69	6,84	6,88	6.875	7.079	63,21	63,64	25	25	0,98	0,43
3206	Tasikmalaya	68,36	68,54	12,44	12,46	6,88	6,94	6.934	7.081	63,17	63,57	26	26	0,38	0,40
3207	Ciamis	70,74	70,90	13,59	13,65	7,45	7,55	8.296	8.432	68,02	68,45	13	14	0,38	0,43
3208	Kuningan	72,64	72,76	12,03	12,04	7,20	7,34	8.516	8.580	67,19	67,51	17	17	0,56	0,32
3209	Cirebon	71,38	71,43	11,79	12,03	6,32	6,41	9.261	9.463	66,07	66,70	19	19	0,54	0,63
3210	Majalengka	69,06	69,22	11,74	11,89	6,80	6,89	8.477	8.594	64,75	65,25	22	22	0,68	0,50
3211	Sumedang	71,91	71,96	12,90	12,91	7,66	7,72	9.279	9.339	69,29	69,45	12	12	0,53	0,16
3212	Indramayu	70,59	70,72	12,09	12,20	5,46	5,56	8.769	8.866	64,36	64,78	24	24	0,81	0,42
3213	Subang	71,52	71,61	11,46	11,66	6,45	6,58	9.831	10.012	66,52	67,14	18	18	0,72	0,62
3214	Purwakarta	70,26	70,34	11,44	11,82	7,35	7,42	10.550	10.732	67,84	68,56	14	13	0,52	0,72
3215	Karawang	71,55	71,60	11,69	11,85	6,81	6,94	10.217	10.379	67,66	68,19	16	16	0,58	0,53
3216	Bekasi	73,18	73,24	11,93	12,23	8,66	8,81	10.323	10.435	71,19	71,83	8	8	0,68	0,64
3217	Bandung Barat	71,76	71,82	11,39	11,56	7,53	7,63	7.522	7.698	65,23	65,81	21	20	0,96	0,58
3218	Pangandaran	70,24	70,40	11,99	12,02	7,06	7,07	8.265	8.312	65,62	65,79	20	21	0,33	0,17
3271	Kota Bogor	72,88	72,95	12,36	13,01	10,20	10,28	10.576	10.662	73,65	74,50	5	5	0,55	0,85
3272	Kota Sukabumi	71,86	71,90	13,24	13,38	9,08	9,28	9.729	9.819	71,84	72,33	7	7	0,65	0,49
3273	Kota Bandung	73,82	73,84	13,63	13,89	10,52	10,58	15.609	15.805	79,67	80,13	1	1	0,69	0,46
3274	Kota Cirebon	71,79	71,83	12,94	13,07	9,76	9,87	10.732	10.824	73,34	73,70	6	6	0,41	0,36
3275	Kota Bekasi	74,48	74,55	13,36	13,47	10,71	10,78	15.116	15.236	79,63	79,95	2	2	0,79	0,32
3276	Kota Depok	73,98	74,01	13,54	13,86	10,71	10,76	14.424	14.560	79,11	79,60	3	3	0,53	0,49
3277	Kota Cimahi	73,58	73,59	13,73	13,75	10,78	10,89	11.012	11.141	76,42	76,69	4	4	0,36	0,27
3278	Kota Tasikmalaya	71,26	71,37	13,37	13,40	8,56	8,63	8.785	9.145	69,99	70,58	10	10	0,95	0,59
3279	Kota Banjar	70,26	70,33	12,95	13,18	8,06	8,19	9.476	9.815	69,31	70,09	11	11	0,97	0,78

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

BAB III

SARANA KESEHATAN

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Keberadaan sarana kesehatan dapat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Sarana Kesehatan yang akan di ulas pada bagian ini terdiri dari Sarana Pelayanan Dasar (Puskesmas dan Fasilitas Lainnya), Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (Rumah Sakit), Sarana Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

A. SARANA PELAYANAN KESEHATAN DASAR (PUSKESMAS)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas menyebutkan bahwa puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

1. Prinsip Penyelenggaraan

- a. Paradigma Sehat
- b. Pertanggungjawaban Wilayah;
- c. Kemandirian Masyarakat;
- d. Pemerataan;
- e. Teknologi Tepat Guna; dan
- f. Keterpaduan dan Kestinambungan.

2. Tugas, Fungsi dan Wewenang

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Dengan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat pertama di wilayah kerjanya, yaitu kegiatan untuk : memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah

kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan kewenangan; Melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan; Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan; Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan; Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait; Melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat; Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas; Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan; Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan; dan Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.

- 2) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya yaitu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan, dengan kewenangan : Penyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu; Penyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif; Penyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat; Penyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung; Penyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi; Melaksanakan rekam medis; Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan; Melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan; Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan

kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan Melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan.

3. Situasi Sarana Kesehatan Dasar Puskesmas di Jawa Barat

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Dalam ketentuannya Puskesmas harus memiliki izin dan registrasi sesuai Permenkes No 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat BAB V Pasal 26 sd 31

Situasi Puskesmas di Jawa Barat pada tahun 2016 yang memnuhi ketentuan sesuai Permenkes No 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat BAB V Pasal 26 sd 31 tercatat sebanyak 1.050 unit, yang berdasarkan kemampuan penyelenggaraan katagori puskesmas Non Rawat Inap sebanyak 874 unit dan Puskesmas Rawat Inap sebanyak 176 unit .

Rasio Puskesmas terhadap penduduk di Jawa Barat sebesar 1 : 45.123 atau 2,2 per 100.000 penduduk, hal ini masih dibawah target nasional sebesar 1 : 30.000. akan tetapi kekurangan ini dapat ditanggulangi dengan membentuk Puskesmas Pembantu sebanyak 1.603 unit , sehingga jangkauan layanan Puskesmas terhadap Masyarakat menjadi 1:17.859 , yang mampu memenuhi target Nasional 1 : 30.000.

Dalam upaya meningkatkan jangkauan pelayanan dibentuk pula Puskesmas keliling dengan kendaraan roda 4 (ambulan) sebanyak 905 unit , dan kendaraan roda 2 sebanyak 245 Unit, selain itu dibangun Jejaring Puskesmas berupa posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) sebanyak 51.035 Posyandu, dengan strata Pratama 2.845 Posyandu, Madya 21.213 Posyandu, Purnama 18.774 Posyandu , dan Mandiri sebanyak 7.856 Posyandu. Jika dibanding tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah Posyandu sebanyak 971 Posyandu . Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat dalam promotive dan preventieve. Selain Posyandu terdapat juga Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pos Persalinan Desa (Polindes) , dan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)

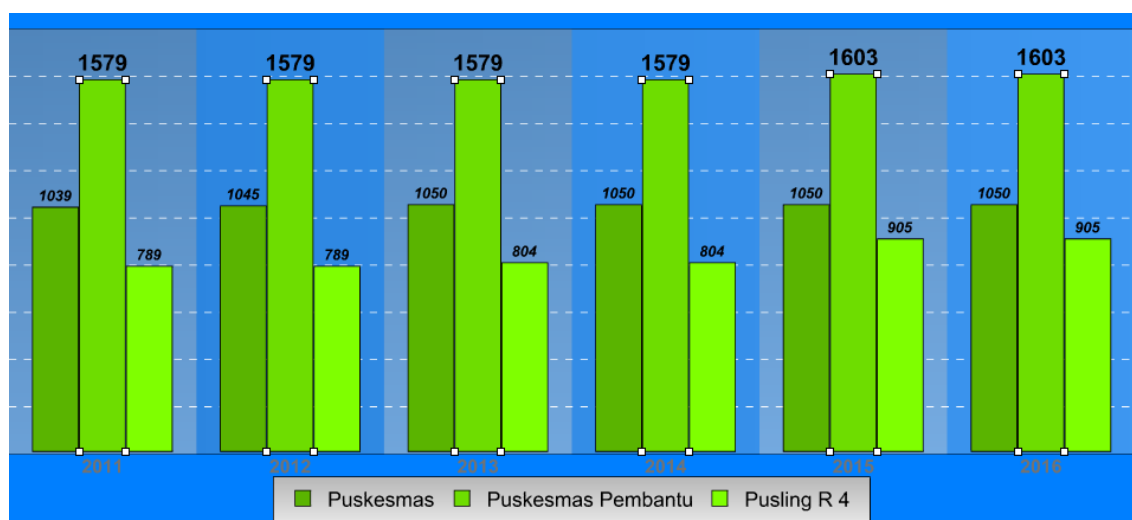
Posbindu, saat ini telah menjadi salah satu strategi penting pemerintah (Kemenkes) untuk mengendalikan trend penyakit tidak menular yang semakin mengawatirkan. Sebagaimana kita ketahui, berbagai data dan penelitian,

menunjukkan bahwa trend tingkat kesakitan dan kematian penyakit tidak menular (hipertensi, diabetes, stroke, jantung, ginjal, dan lainnya), sudah melampaui tingkat morbiditas dan mortalitas penyakit menular.

Perbedaan utama Posbindu dengan Posyandu terletak pada sasaran. Pada Posyandu sasarannya adalah bayi, balita, Ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas, serta Wanita usia subur. Sedangkan sasaran Posbindu adalah Kelompok Masyarakat Sehat, Berisiko dan Penyandang Penyakit Tidak Menular (PTM), atau orang dewasa yang berumur 15 tahun keatas.

Posbindu PTM merupakan peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM utama yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik. Faktor risiko penyakit tidak menular (PTM) meliputi merokok, konsumsi minuman beralkohol, pola makan tidak sehat, kurang aktifitas fisik, obesitas, stres, hipertensi, hiperglikemi, hiperkolesterol serta menindak lanjuti secara dini faktor risiko yang ditemukan melalui konseling kesehatan dan segera merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas). Kelompok PTM utama adalah diabetes melitus (DM), kanker, penyakit jantung dan pembuluh darah (PJPD), penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), dan gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan.

Gambar III. A. 1
Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2016



Sumber : Profil Kesehatan 2011-2015

Berdasarkan ketentuan nasional bahwa satu puskesmas untuk melayani minimal 25-30 ribu penduduk. Rasio penduduk per puskesmas di Jawa Barat

selama 2009 sd 2015 masih diatas 40 ribuan. Artinya satu puskesmas melayani 40 ribu penduduk. yang setiap tahunnya terus meningkat, penyebabnya adalah pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dibanding penambahan jumlah puskesmas.

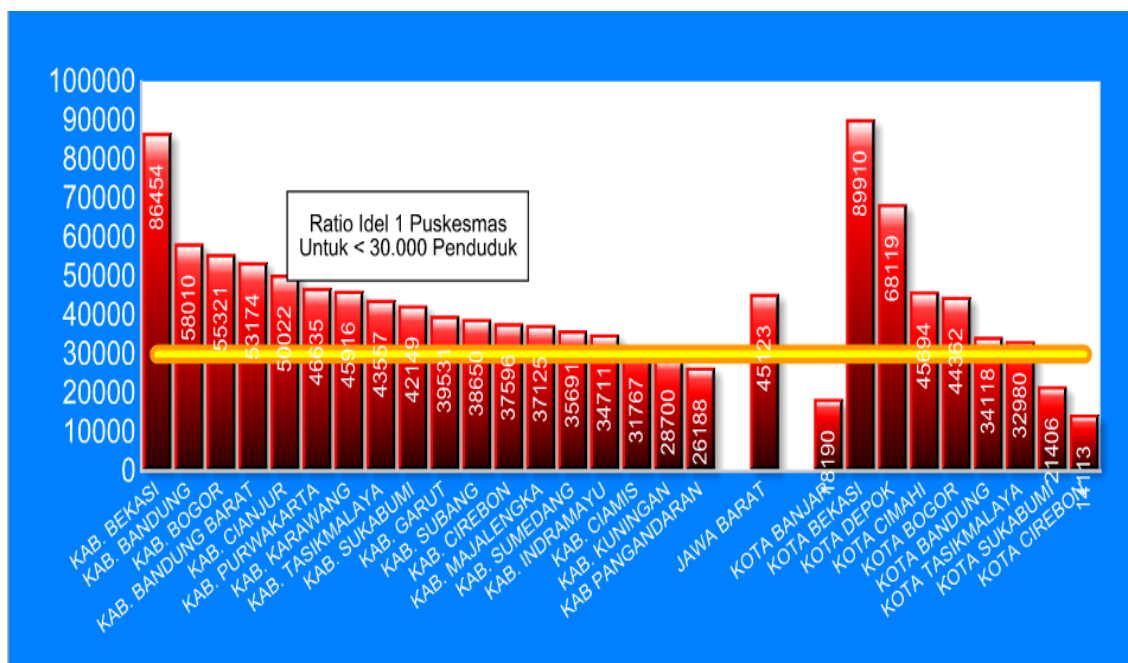
Dalam upaya mencapai standar 1 puskesmas untuk melayani 30 ribu penduduk, maka pemerintah Jawa Barat perlu menyediakan 1.544 puskesmas dan saat ini tersedia 1.050 Pusesmas artinya Jawa Barat masih kekurangan 494 Puskesmas , akan tetapi karena penyebarannya tidak merata maka kekurangan kebutuhan Puskesmas menjadi 553 unit. diharapkan pemerintah mendorong Puskesmas Pembantu untuk menjadi Puskesmas Induk sehingga cita cita untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.

Berikut gambaran kabupaten/kota dengan perbandingan puskesmas per penduduk mendekati kondisi ideal (1 Puskesmas untuk 30.000 penduduk) terdapat di 5 Kab/Kota yang telah memenuhi kondisi ideal yaitu Kabupaten Kuningan, Kabupaten Pangandaran, Kota Sukabumi, Kota Cirebon dan Kota Banjar.

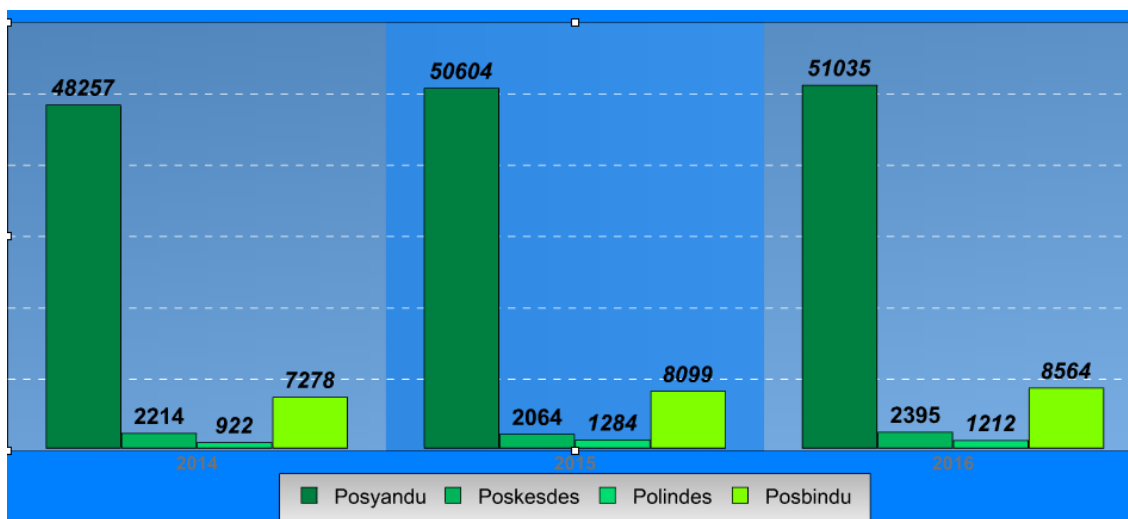
Tabel III. A. 1
Jumlah Kebutuhan Pembangunan Puskesmas
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

No	Kab/Kota	Penduduk	Kebutuhan	Tersedia	Kekurangan	PKM Pembantu
1	KAB. BOGOR	5.587.390	186	101	85	117
2	KAB. SUKABUMI	2.444.616	81	58	23	128
3	KAB. CIANJUR	2.250.977	75	45	30	116
4	KAB. BANDUNG	3.596.623	120	62	58	78
5	KAB. GARUT	2.569.505	86	65	21	136
6	KAB. TASIKMALAYA	1.742.276	58	40	18	153
7	KAB. CIAMIS	1.175.389	39	37	2	87
8	KAB. KUNINGAN	1.061.886	35	37		68
9	KAB. CIREBON	2.142.999	71	57	14	70
10	KAB. MAJALENGKA	1.188.004	40	32	8	71
11	KAB. SUMEDANG	1.142.097	38	32	6	69
12	KAB. INDRAMAYU	1.700.815	57	49	8	67
13	KAB. SUBANG	1.546.000	52	40	12	74
14	KAB. PURWAKARTA	932.701	31	20	11	44
15	KAB. KARAWANG	2.295.778	77	50	27	71
16	KAB. BEKASI	3.371.691	112	39	73	54
17	KAB. BANDUNG BARAT	1.648.387	55	31	24	64
18	KAB PANGANDARAN	392.817	13	15		35
19	KOTA BOGOR	1.064.687	35	24	11	-
20	KOTA SUKABUMI	321.097	11	15		20
21	KOTA BANDUNG	2.490.622	83	73	10	
22	KOTA CIREBON	310.486	10	22		16
23	KOTA BEKASI	2.787.205	93	31	62	24
24	KOTA DEPOK	2.179.813	73	32	41	4
25	KOTA CIMAH	594.021	20	13	7	4
26	KOTA TASIKMALAYA	659.606	22	20	2	24
27	KOTA BANJAR	181.901	6	10		9
	Jumlah		1.579	1.050	553	1.603

Gambar III. A.2
Rasio Puskesmas terhadap Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



Gambar III. A. 3
Jumlah Jejaring Puskesmas
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 sd 2016



B. SARANA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN (RUMAH SAKIT)

Rumah Sakit adalah Institusi Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap

mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat.

1. Tugas dan Fungsi

Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna yaitu pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

2. Jenis Dan Klasifikasi

Rumah Sakit dapat dibagi berdasarkan jenis pelayanan dan jenis pengelolaannya. Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, Rumah Sakit dikategorikan dalam Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus, Kategori Rumah Sakit Umum memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Sedangkan kategori Rumah Sakit Khusus memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.

Berdasarkan pengelolaannya Rumah Sakit dapat dibagi menjadi Rumah Sakit publik dan Rumah Sakit privat. Rumah Sakit publik dapat dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba. Rumah Sakit publik yang dikelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Rumah Sakit privat dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero. Rumah Sakit publik yang dikelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat dialihkan menjadi Rumah Sakit swasta. Berdasarkan Bentuk, Rumah Sakit dapat berbentuk Rumah Sakit statis, Rumah Sakit bergerak, dan Rumah Sakit lapangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan Rumah Sakit bergerak dan Rumah Sakit lapangan diatur dengan Peraturan Menteri.

3. Klasifikasi

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara berjenjang dan fungsi rujukan, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan Rumah Sakit. Klasifikasi Rumah Sakit umum terdiri atas Rumah Sakit umum kelas A; Rumah Sakit umum kelas B; Rumah Sakit umum kelas C; Rumah Sakit umum kelas D, sedangkan Klasifikasi Rumah Sakit khusus terdiri atas, Rumah Sakit khusus kelas A; Rumah Sakit khusus kelas B; Rumah Sakit khusus kelas C.

4. Situasi Rumah Sakit di Jawa Barat

Jumlah rumah sakit di Jawa Barat tahun 2016 sebanyak 328 unit, yang mencakup rumah sakit umum : 254 unit (77,44%) dan khusus : 74 unit (22,66%), dengan proporsi milik pemerintah sebanyak 70 RS (21,34%) dan milik swasta sebanyak 258 RS (78,66%). Berdasarkan pengelolaannya rumah sakit publik sebanyak 139 RS (52,38%) dan rumah sakit privat sebanyak 189 RS (57,62%). secara kuantitas ada peningkatan Jumlah RS dari 316 unit pada tahun 2015 menjadi 328 unit pada tahun 2016 terjadi peningkatan atau penambahan sebanyak 12 unit Rumah sakit .

Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit , wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali. dilakukan oleh suatu lembaga independen baik dari dalam maupun dari luar negeri berdasarkan standar akreditasi yang berlaku dan ditetapkan oleh Menteri.

Pemerintah Jawa pada tahun 2019 menargetkan seluruh Rumah sakit yang berada di Jabar harus menempuh sistem akreditasi sebagai upaya untuk memperbaiki pelayanan kesehatan.

Tabel III. B. 1
Jumlah Rumah Sakit berdasarkan Kepemilikan
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

KEPEMILIKAN RS	RSU	RSK	JUMLAH	%
Kementarian Kesehatan	1	4	5	1,5
Pemerintah Provinsi	2	2	4	1,2
Pemerintah Kabupaten/Kota	41	2	43	13,1
TNI/POLRI	13	0	13	4,0
BUMN	4	1	5	1,5
SWASTA	193	65	258	78,7
Jumlah RS Se-Jabar	254 (77,43%)	74 (22,57%)	328	100

Tabel III. B. 2
Sarana Tempat Tidur Rumah Sakit
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

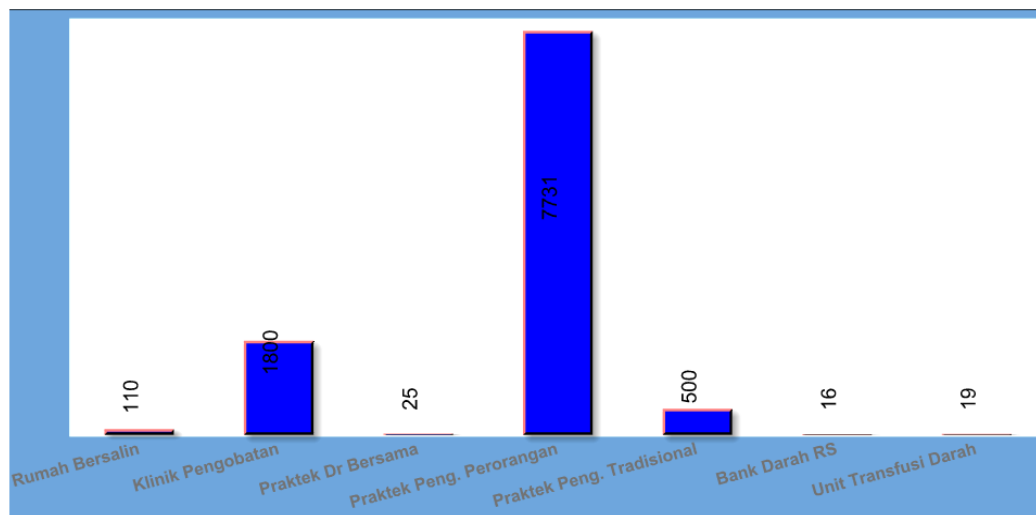
No	Kab/Kota	Penduduk	Kebutuhan TT	Tersedia	Kekurangan TT
1	KAB. BOGOR	5.587.390	5.587	2.539	3.048
2	KAB. SUKABUMI	2.444.616	2.445	903	1.542
3	KAB. CIANJUR	2.250.977	2.251	625	1.626
4	KAB. BANDUNG	3.596.623	3.597	942	2.655
5	KAB. GARUT	2.569.505	2.570	777	1.793
6	KAB. TASIKMALAYA	1.742.276	1.742	153	1.589
7	KAB. CIAMIS	1.175.389	1.175	367	808
8	KAB. KUNINGAN	1.061.886	1.062	726	336
9	KAB. CIREBON	2.142.999	2.143	504	1.639
10	KAB. MAJALENGA	1.188.004	1.188	490	698
11	KAB. SUMEDANG	1.142.097	1.142	375	767
12	KAB. INDRAMAYU	1.700.815	1.701	488	1.213
13	KAB. SUBANG	1.546.000	1.546	707	839
14	KAB. PURWAKARTA	932.701	933	851	82
15	KAB. KARAWANG	2.295.778	2.296	1.919	377
16	KAB. BEKASI	3.371.691	3.372	2.373	999
17	KAB. BANDUNG BARAT	1.648.387	1.648	514	1.134
18	KAB PANGANDARAN	392.817	393	-	393
19	KOTA BOGOR	1.064.687	1.065	2.066	
20	KOTA SUKABUMI	321.097	321	1.041	
21	KOTA BANDUNG	2.490.622	2.491	4.423	
22	KOTA CIREBON	310.486	310	330	
23	KOTA BEKASI	2.787.205	2.787	3.143	
24	KOTA DEPOK	2.179.813	2.180	1.664	516
25	KOTA CIMAHI	594.021	594	981	
26	KOTA TASIKMALAYA	659.606	660	1.106	
27	KOTA BANJAR	181.901	182	348	
	Jumlah	47.379.389	47.379	30.355	22.053

Jumlah Tempat Tidur yang tersedia Di RS sebanyak 30.355 TT, terdapat kesenjangan sebanyak 22.053 TT jika diproporsikan pada Jumlah Penduduk. Standar WHO untuk rasio tempat tidur untuk perawatan terhadap penduduk adalah 1/1000 penduduk, artinya satu tempat tidur untuk melayani 1.000 penduduk. Rasio tempat tidur rumah sakit terhadap penduduk 2016 adalah 1/1.562 penduduk. Jika mengacu ketentuan standar WHO tersebut maka di Jawa Barat idealnya membutuhkan 47.379 tempat tidur. Berarti sampai saat ini masih kekurangan sekitar 17.024 tempat tidur, saat ini Ratio Tempat Tidur di Kota 1/700, sehingga ada kelebihan di Kota, maka kekurangan RS padat tahun 2016 sebanyak 22.053 TT.

C. SARANA PELAYANAN KESEHATAN DASAR LAINNYA

Selain pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Provinsi Jawa Barat memiliki sarana pelayanan kesehatan lainnya seperti Balai Pengobatan/Klinik, Praktek Perorangan Dokter Umum, Dokter Perorangan Dokter Gigi dan Praktek Perorangan Bidan. Jumlah masing-masing sarana dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar III. C.1
Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Lainnya
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



Jaringan Puskesmas sebanyak 10.201 tersebar di Jawa Barat dengan Persentase, Praktek Dokter Umum Perorangan mencapai 75,8%, Klinik Pengobatan 17,6%, Pengobatan Tradisional 4,9%, Rumah Bersalin 1,1% sisanya Praktek Bersama, Bank Darah RS, dan Unit Trnsfusi darah 0,2%.

D. UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT

Pembangunan kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya juga memerlukan peran masyarakat. Melalui konsep Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), masyarakat berperan serta aktif dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Bentuk UKBM antara lain Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), dan RW/desa/kelurahan siaga aktif.

Desa/kelurahan/ siaga aktif adalah desa/kelurahan/ yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawat darurat, surveilans berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

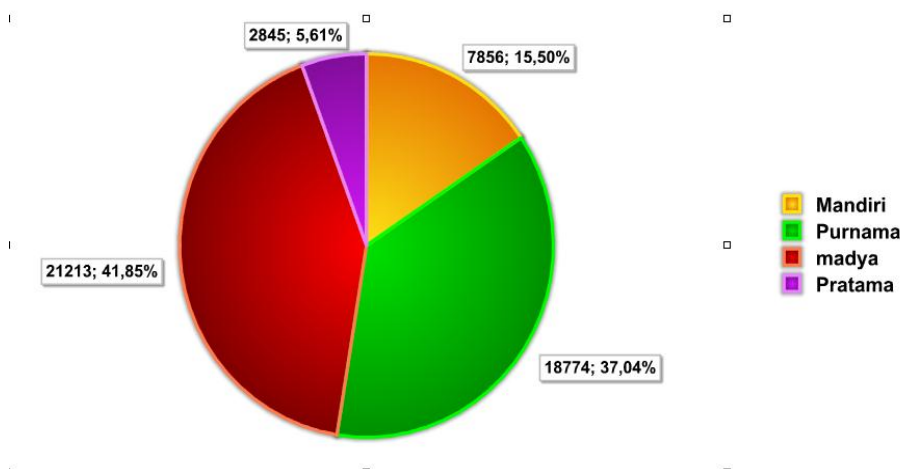
Jumlah desa/kelurahan/ siaga aktif di Jawa Barat pada tahun 2016 sebesar 5.895, dengan persentase terhadap jumlah seluruh desa/kelurahan/ sebesar 98,98%. Adapun Kabupaten/Kota dengan persentase belum mencapai 100% terdapat di 3 Kab/Kota yaitu : Kab Cirebon 421 Desa (99,3%), Kabupaten Garut sebanyak 406 Desa (92,3%) dan Kota Bekasi 32 Kelurahan (57%).

Salah satu UKBM yang memiliki peran signifikan dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah posyandu. Posyandu dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat terutama ibu, bayi, dan anak balita. Posyandu memiliki 5 (lima) program prioritas yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, gizi, serta pencegahan dan penanggulangan diare.

Jumlah Pos Pelayanan Terpadu yang ada tahun 2016 berjumlah 51.035 Posyandu, dengan strata Pratama 2.845 Posyandu (5,61%), Madya 21.213 Posyandu (41,85%), Purnama 18.774 Posyandu (37,04%), dan Mandiri 7.856 Posyandu (15,50%). Ada penambahan dibanding tahun 2015 sebanyak 971 Posyandu. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat dalam upaya promotif dan preventif.

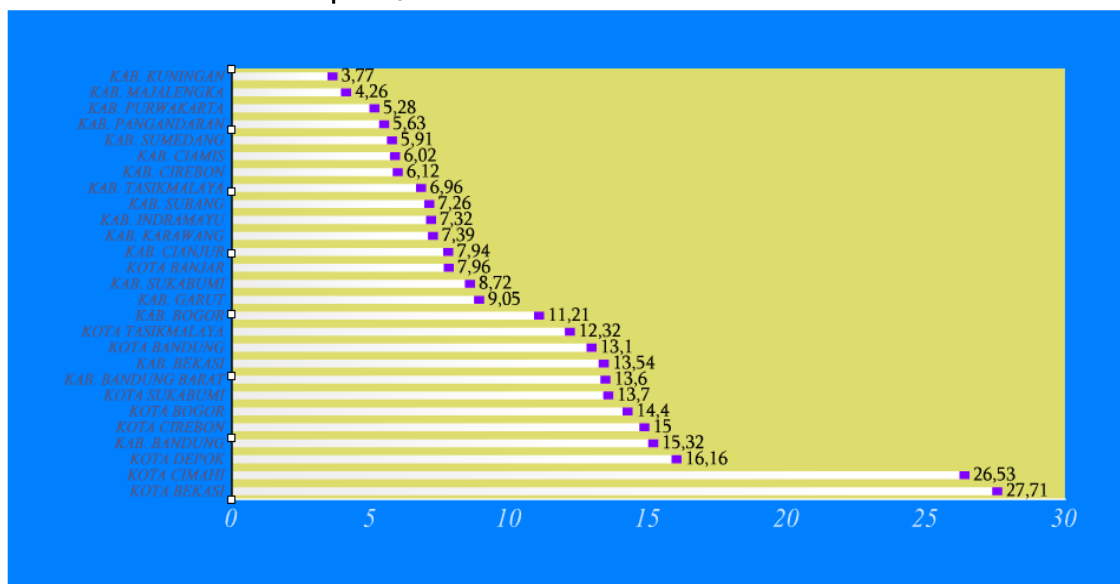
Selain Posyandu terdapat juga Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pos Persalinan Desa (Polindes), dan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)

Gambar III D. 1
Persentase Posyandu Menurut Strata di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



Pada gambar di atas terlihat bahwa proporsi tertinggi adalah posyandu madya dan proporsi terendah adalah posyandu pratama. Dalam menjalankan fungsinya, perlu diketahui rasio kecukupan posyandu terhadap masyarakat yang ada. Pada tahun 2016 di Jawa Barat rata rata rasio posyandu terhadap jumlah desa/kelurahan adalah 1/8,57 Posyandu, rasio tertinggi di Kota Bekasi sebesar 1/27,71 dan rasio terendah di Kabupaten Kuningan sebesar 1/3,77

Gambar III D.2
Rasio Posyandu Terhadap Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



BAB IV

SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG KESEHATAN

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyatakan bahwa tenaga kesehatan memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga di bidang kesehatan terdiri atas tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan dikelompokkan kedalam 13 (tiga belas) jenis, yang terdiri dari ; tenaga medis, tenaga fisiologis klinis, tenaga keperawatan, tenaga bidan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterafian fisik, tenaga keteknisan medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lainnya.

A. TENAGA KESEHATAN

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengatur terkait tenaga kesehatan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan yang tertuang dalam pasal 23 Paragraf 2 pemerintah daerah menempatkan tenaga kesehatan strategis dan pindahan tenaga kesehatan tertentu antar kabupaten/kota skala provinsi. Pemerintah daerah dapat melaksanakan pengadaan tenaga kesehatan strategis tertentu pada keadaan tertentu.

Data jumlah tenaga kesehatan sangat diperlukan dalam menentukan pengadaan dan penempatan tenaga. Dari data tersebut diharapkan dapat menggambarkan pemenuhan tenaga kesehatan setiap kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dalam peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Dalam Profil ini Sumber Daya Manusia Kesehatan dibagi menjadi 2 Kelompok yaitu SDMkes Tenaga Kesehatan (Tenaga dengan kompetensi/Pendidikan di Bidang Kesehatan) dan SDMkes Non Tenaga kesehatan (Tenaga dengan kompetensi/Pendidikan diluar Bidang Kesehatan dan bekerja di fasyankes), SDMkes Tenaga Kesehatan dibagi menjadi 8 Katagori yaitu : Tenaga Kesehatan Medis, Tenaga Kesehatan Keperawatan, Tenaga Kesehatan Kefarmasian, Tenaga Kesehatan Masyarakat, Tenaga Kesehatan Gizi, Tenaga Kesehatan Keterampilan Fisik, Tenaga Kesehatan Keteknisan Medis, dan Tenaga Kesehatan Lainnya.

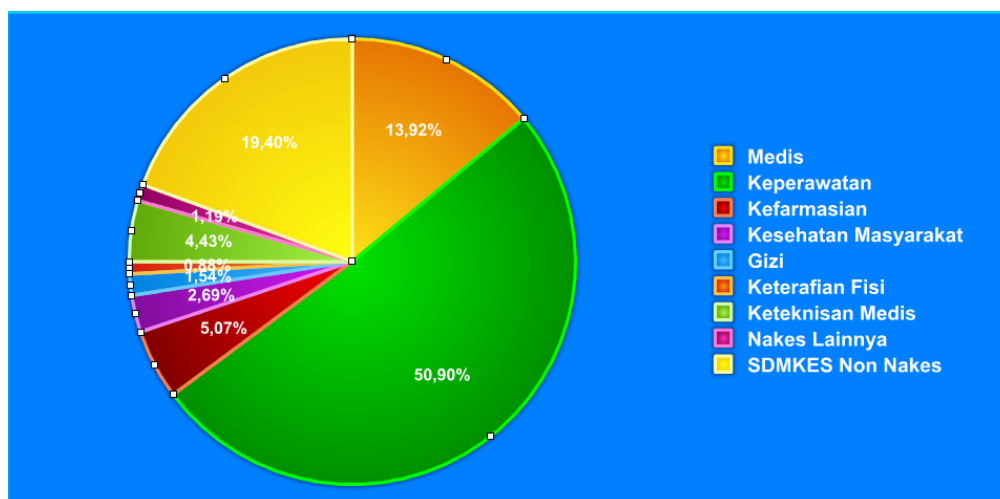
1. Tenaga Kesehatan Medis adalah tenaga yang memiliki kompetensi/pendidikan medis seperti dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis.
2. Tenaga Kesehatan Keperawatan adalah tenaga yang memiliki kompetensi/pendidikan keperawatan, keperawatan gigi dan kebidanan baik diploma, maupun ners.
3. Tenaga Kesehatan Kefarmasian adalah tenaga yang memiliki kompetensi/pendidikan teknis farmasi, apoteker dan asisten apoteker.
4. Tenaga Kesehatan Masyarakat adalah tenaga yang memiliki kompetensi/pendidikan kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, epidemiologi, entomologi, dan administrasi kesehatan.
5. Tenaga Kesehatan Gizi adalah tenaga yang memiliki kompetensi/pendidikan bidang gizi baik nutrisionis maupun deitisien.
6. Tenaga Kesehatan Keterampilan Fisik adalah tenaga yg memiliki kompetensi/pendidikan fisio terapi, terapi okufasi, terapi wicara dan akupuntur.
7. Tenaga Kesehatan Keteknisan Medis adalah tenaga yang memiliki kompetensi/pendidikan radiogafer, radio terapi, teknis elektromedis, teknis gigi, analis kesehatan, refraksionis optisien, ortetik prostetik, rekam medis dan informasi kesehatan, teknis transfusi darah, dan teknis cardio vaskular.

8. Tenaga Kesehatan Lainnya adalah tenaga yang memiliki kompetensi/pendidikan bidang kesehatan yang bekerja sebagai pengelola program kesehatan di fasyankes dan atau tenaga yang bekerja pada pengobatan tradisional, jamu dan kesehatan lain yang belum didefinisikan.

Gambaran data tenaga kesehatan ini dihasilkan dari hasil validasi data kesehatan di 27 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Beberapa keterbatasan dalam validasi data tenaga kesehatan antara lain belum semua tenaga kesehatan dapat diidentifikasi, antara lain kemungkinan adanya laporan tenaga kesehatan (terutama tenaga medis) lebih dari satu kali, belum teridentifikasinya tenaga medis yang bekerja secara penuh waktu dengan yang paruh waktu, adanya perubahan pada tingkat dan latar belakang pendidikan terakhir terutama yang mengikuti jenjang pendidikan yang berbeda dari jenis tenaga awalnya.

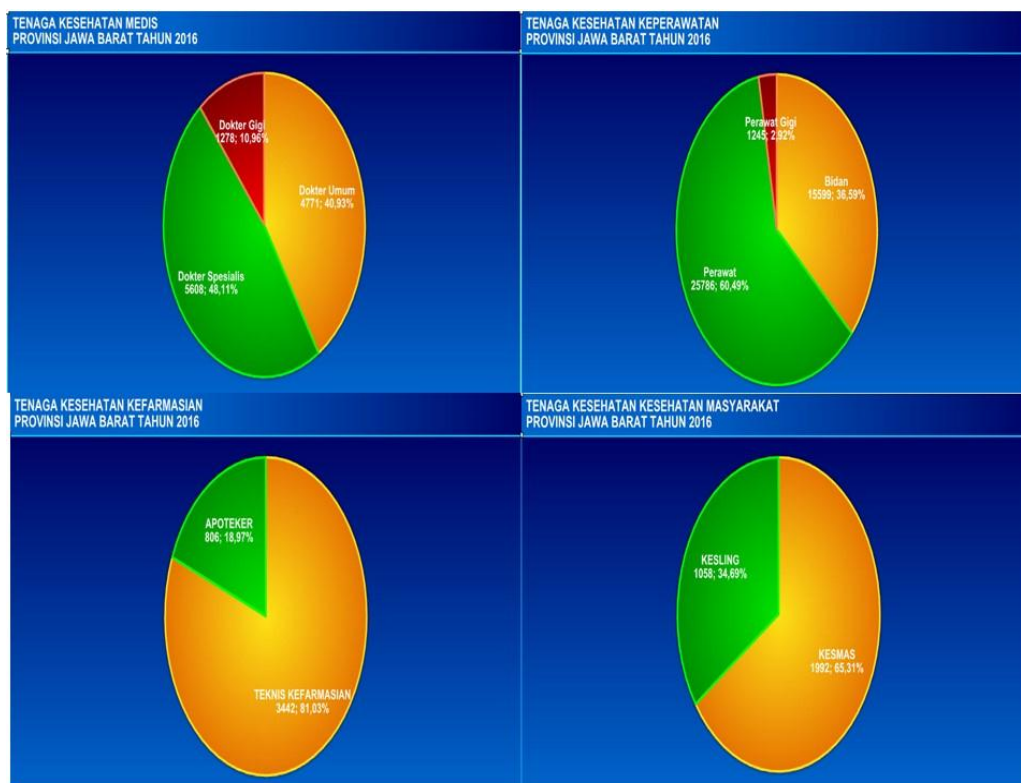
Jumlah keseluruhan tenaga bidang kesehatan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 sebanyak 83.758 orang. terdiri dari 80,60 % tenaga berasal dari pendidikan kesehatan dan 19,40 % tenaga berasal dari pendidikan non kesehatan. Berdasarkan proporsi kelompok tenaga kesehatan, tenaga keperawatan (Bidan, Perawat, dan Perawat Gigi) merupakan tenaga kesehatan yang terbanyak yaitu 50,90 %. Berikutnya tenaga Non Kesehatan sebesar 19,40 %, tenaga medis 13,92 %. tenaga kefarmasian 5,07%, Tenaga Keteknisan Medis 4,43%, Tenaga Kesehatan Masyarakat sebesar 2,69 %. Tenaga Gizi 1,54 %, tenaga kesehatan lainnya 1,19 %, dan Tenaga Keterampilan Fisik 0,88 %.

Gambar IV. A.1
Proporsi Kelompok Tenaga
Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



Proporsi Tenaga diatas dapat dirinci sebagai berikut :

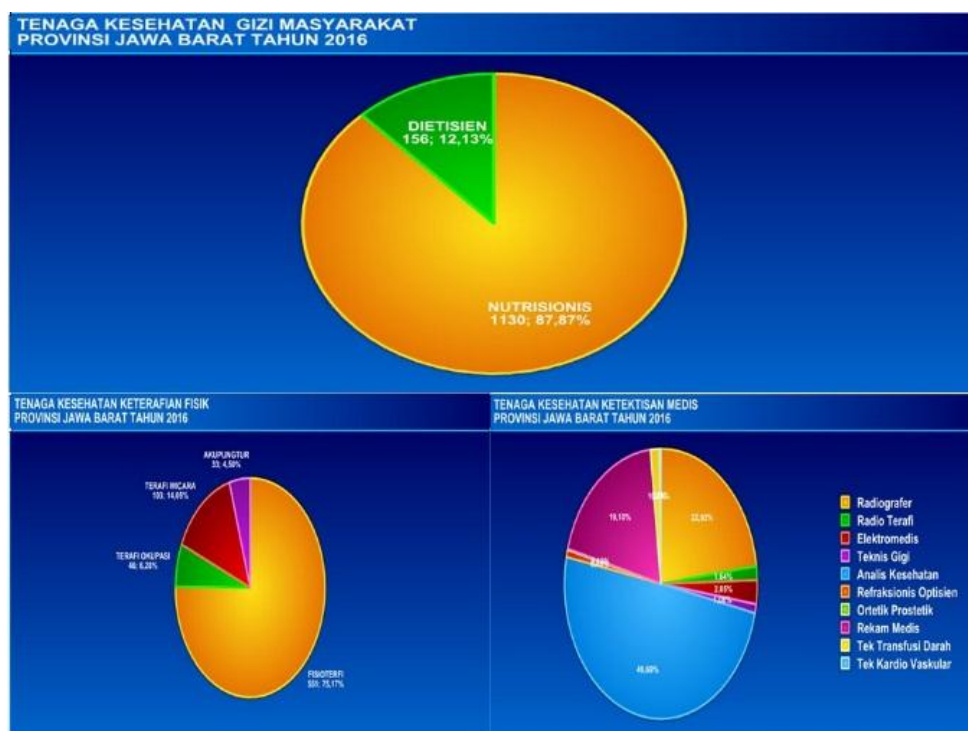
Gambar IV. A. 2
Rincian Proporsi Tenaga Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



- 1) Tenaga Medis sebanyak 11.519 orang dengan proporsi Dokter Spesialis 5.559 orang (48,26%), Dokter Umum 4.695 orang (40,76%), dan Dokter Gigi 1.265 orang (10,98%).
- 2) Tenaga Keperawatan sebanyak 47.412 orang dengan proporsi : Perawat Bidan 16.151 orang (34,07%), Perawat 30.016 orang (63,31%) dan Perawat Gigi 1.245 orang (2,63%).
- 3) Tenaga Kefarmasian sebanyak 4.248 orang dengan proporsi Nakes Teknis Farmasi 3.442 orang (81,05%) dan Apoteker 806 orang (18,97%).
- 4) Tenaga Kesehatan Masyarakat sebanyak 2.258 orang dengan Proporsi Kesehatan Masyarakat 1.200 Orang (52,14%) dan Keseling 1.058 orang (57,86%).
- 5) Tenaga Gizi sebanyak 1.292 orang dengan proporsi Nutrisionis 1.130 orang (87,46%) dan Dietisien sebanyak 156 orang (12,54%)

- 6) Tenaga Keterampilan Fisik Sebanyak 730 orang dengan proporsi Fisioterapi 551 orang (75,48%) Terapi Okupasi 46 orang (6,30%), Terapi Wicara 103 orang (14,11%) dan akupunktur 33 orang (4,52%).
- 7) Tenaga Keteknisan Medis sebanyak 3.713 orang dengan proporsi Radio Grafer 851 orang (22,92%), Radio Terapis 61 orang (1,64%), Teknis Elektromedis 106 orang (2,85%), Teknis Gigi 40 orang (1,08%) , Analisis Kesehatan 1.845 orang (49,69%), Refraksionis Optisien 32 orang (0,86%), Ortotik Prostetik 5 orang (0,13%), Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 709 orang (19,10%), Teknis Transfusi Darah 55 Orang (1,48%), dan Teknis Cardio Vaskular 9 orang (0,24%).
- 8) Tenaga Nakes lain sebanyak 994 orang dengan proporsi tenaga pengelola Program 249 orang (25,05%), dan tenaga kesehatan lainnya 745 orang (74,95%).
- 9) SDM Kes Non Kesehatan sebanyak 17.701 orang dengan proporsi : Pejabat Struktural 3.995 orang (22,57%), Staf Penunjang Administrasi 10.804 orang (61,04%), Staf Penunjang Teknologi 298 orang (1,68%), Staf Penunjang Perencanaan 112 orang (0,63%), Tenaga Pendidik 27 orang (0,15%), Tenaga Kependidikan 69 orang (0,38%), Juru 863 orang (4,88%), dan Tenaga Penunjang Kesehatan lainnya 3.167 orang (17,89%).

Gambar IV. A. 3
Rincian Proporsi Tenaga Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

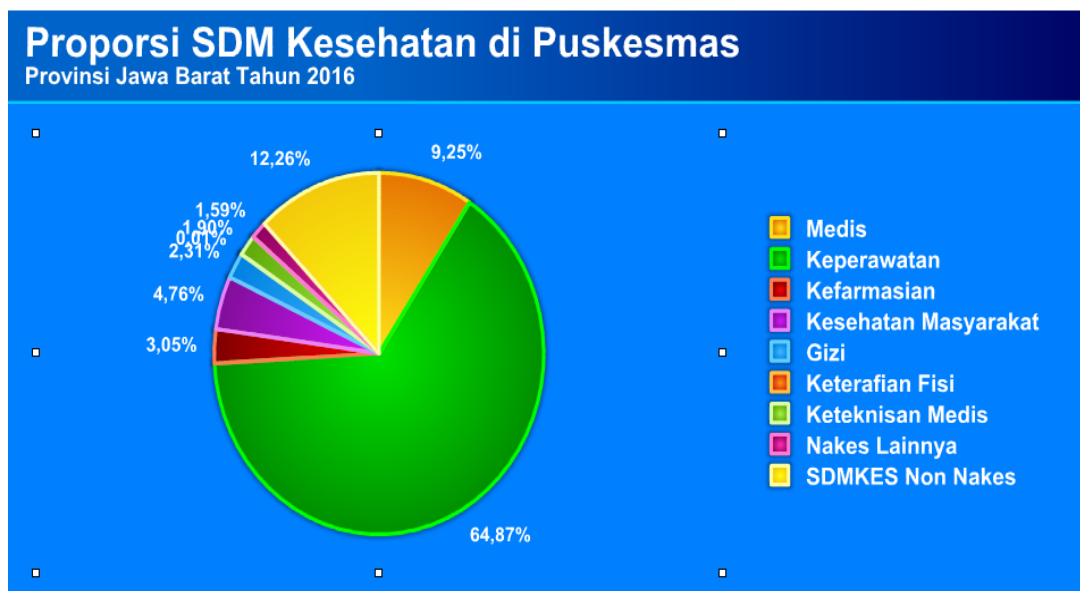


1. Tenaga Kesehatan di Puskesmas

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sumber daya manusia terdiri dari Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan. Jenis dan jumlah Tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung berdasarkan analisis beban kerja, dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya, karakteristik wilayah kerja, luas wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerja, dan pembagian waktu kerja. Tenaga Kesehatan minimal yang harus tersedia di Puskesmas terdiri dari

- a. dokter atau dokter layanan primer;
- b. dokter gigi;
- c. perawat;
- d. bidan;
- e. tenaga kesehatan masyarakat;
- f. tenaga kesehatan lingkungan;
- g. ahli teknologi laboratorium medik;
- h. tenaga gizi; dan
- i. tenaga kefarmasian.

Gambar IV. A. 4
Proporsi Tenaga Kesehatan Puskesmas
Berdasarkan Jenis Tenaga Kesehatan
Di Jawa Barat Tahun 2016

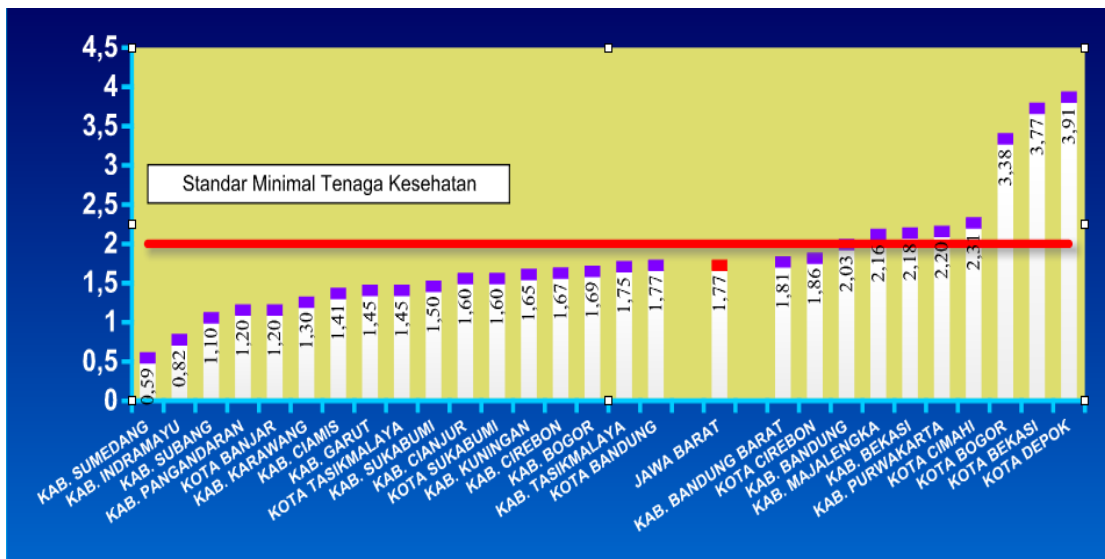


- 1) Tenaga Medis di Puskesmas sebanyak 2.753 orang dengan proporsi Dokter Spesialis 140 orang (5,09%), Dokter Umum 1.856 orang (67,42%), dan Dokter Gigi 757 orang (27,49%).
- 2) Tenaga Keperawatan sebanyak 19.314 orang dengan proporsi Bidan 11.000 orang (56,95%), Perawat 7.408, (38,36%) dan Perawat Gigi 906 orang (4,69%).
- 3) Tenaga Kefarmasian sebanyak 909 orang dengan proporsi Nakes Teknis Farmasi 748 orang (82,95%) dan Apoteker 161 orang (17,71%).
- 4) Tenaga Kesehatan Masyarakat sebanyak 1.417 orang dengan Proporsi Kesehatan Masyarakat 615 Orang (43,40%) dan Keseling 802 orang (56,60%).
- 5) Tenaga Gizi sebanyak 689 orang dengan proporsi Nutrisisionis 100% belum memiliki tenaga Dietisien 0 %.
- 6) Tenaga Keterampilan Fisik Sebanyak 4 orang dengan proporsi Fisioterapi 100%, tenaga Terapi Okupasi, Terapi Wicara, dan akupunktur belum ada.
- 7) Tenaga Keteknisan Medis sebanyak 566 orang dengan proporsi Radio Grafer 101 orang (17,84%), Radio Terapis 6 orang (1,06%), Analis Kesehatan 438 orang (77,39%), Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 21 orang (3,71%).
- 8) Tenaga Nakes lainnya sebanyak 475 orang dan SDM Kes Non Kesehatan sebanyak 3.649 orang

Berdasarkan pada indikator Indonesia Sehat standar minimal Tenaga Kesehatan untuk tenaga di Puskesmas adalah sebagai berikut :

- 1) Ratio dokter umum adalah 2 orang untuk setiap Puskesmas, Jawa Barat baru mencapai 1,77 terdapat kesenjangan 0,23 poin atau kekurangan tenaga 240 orang , dari 27 Kab/Kota terdapat 8 Kab/Kota yang sudah memenuhi Standar Minimal Tenaga Dokter Umum yaitu, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kab.Purwakarta, Kab Bekasi, Kab Majalengka dan Kab Bandung. Dan terdapat 2 Kab/Kota yang Rationya < 1, Yaitu Kab. Sumedang dan Kab Indramayu.

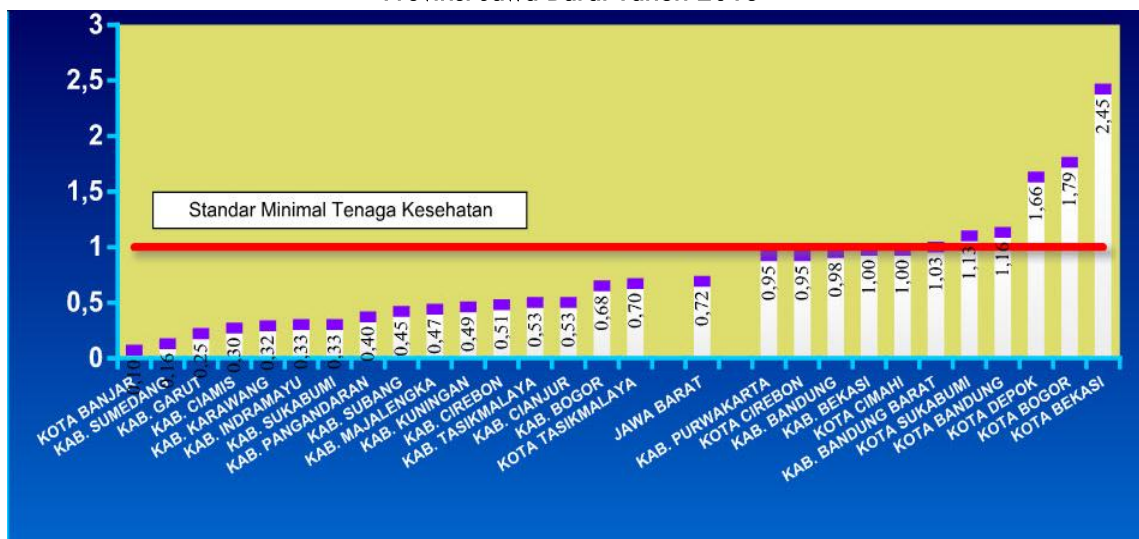
Gambar IV. A. 5
Ratio Dokter Umum Terhadap Puskesmas
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



2) Ratio Dokter Gigi

Ratio dokter gigi adalah 1 orang untuk setiap Puskesmas, Jawa Barat baru mencapai 0,72 terdapat kesenjangan 0,28 poin atau kekurangan tenaga 293 orang , dari 27 Kab/Kota terdapat 8 Kab/Kota yang sudah memenuhi Standar Minimal Tenaga Dokter Gigi yaitu, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kab Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kab Bekasi.

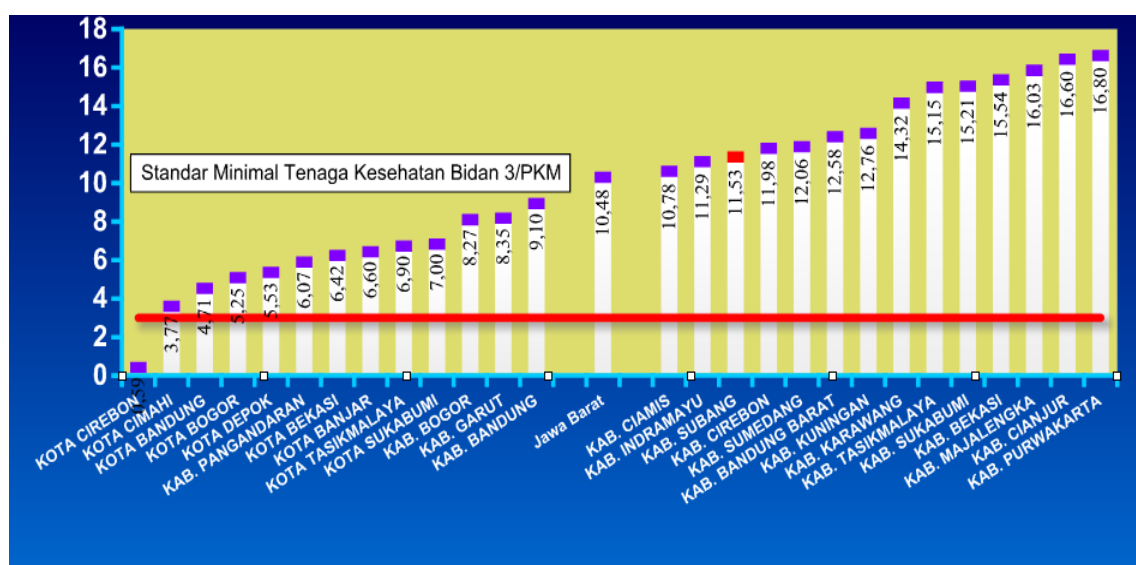
Gambar IV. A. 6
Ratio Dokter Gigi Terhadap Puskesmas
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



3) Tenaga Kesehatan Bidan Puskesmas

Ratio Bidan adalah 3 orang untuk setiap Puskesmas, Jawa Barat telah mencukupi target hingga mencapai 10,48/PKM, dalam penyebarannya selain di Puskesmas sebanyak 7.850 Bidan ditempatkan di 5.962 Desa/Kelurahan, sehingga semua Desa/Kelurahan terisi bidan dengan komposisi 1-2 orang / Desa/Kelurahan.

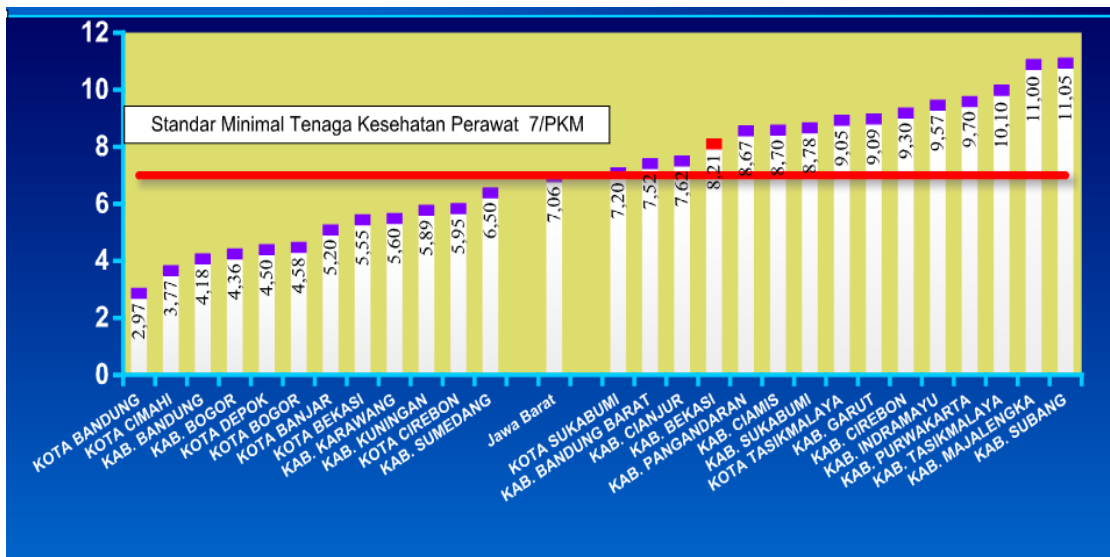
Gambar IV. A. 7
Ratio Bidan Terhadap Puskesmas
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



4) Tenaga Kesehatan Perawat Puskesmas

Ratio perawat adalah 7 orang untuk setiap Puskesmas, Jawa Barat sudah mencapai 7,06/ PKM, tetapi dalam distribusinya tidak merata sehingga masih terdapat 12 Kab/Kota yang belum memenuhi standar minimal yaitu : Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab Bandung, Kab Bogor, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Banjar, Kota Bekasi , Kab Karawang, Kab Kuningan, Kota Cirebon dan Kab Sumedang.

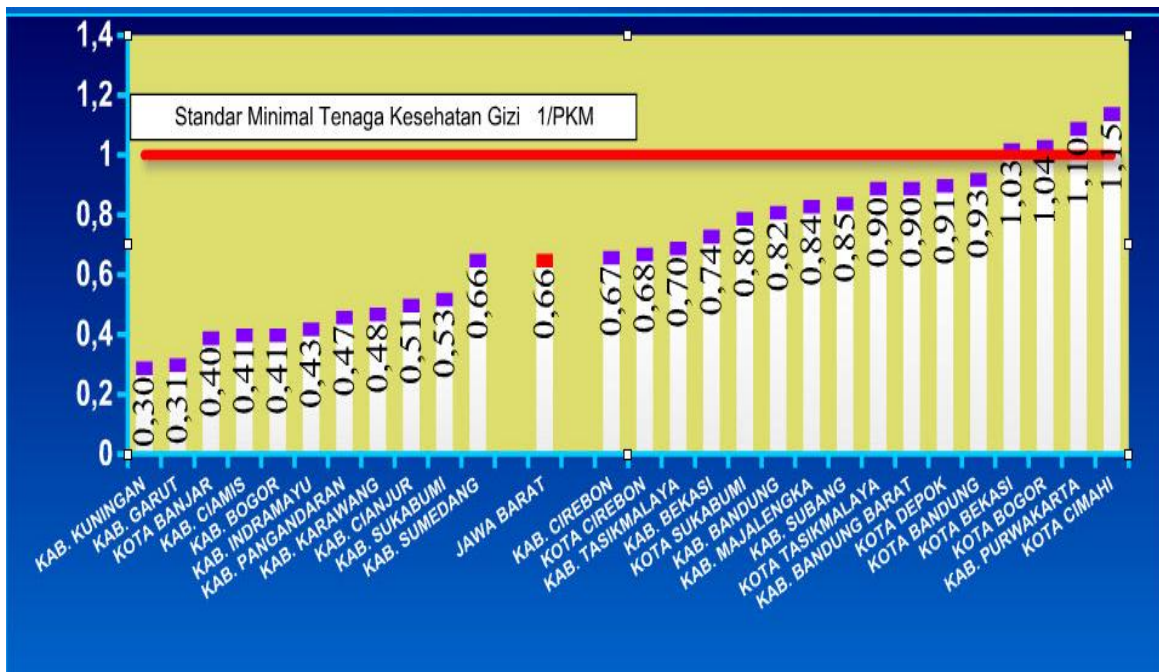
Gambar IV. A. 8
Ratio Perawat Terhadap Puskesmas
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



5) Tenaga Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas

Ratio tenaga gizi masyarakat adalah 1 orang untuk setiap Puskesmas, Jawa Barat baru mencapai 0,66/PKM terdapat kesenjangan 0,34/PKM atau kekurangan tenaga 361 orang , dari 27 Kab/Kota terdapat 4 Kab/Kota yang sudah memenuhi Standar Minimal Tenaga gizi masyarakat yaitu, Kota Cimahi, Kab Purwakarta, Kota Bogor dan Kota Bekasi.

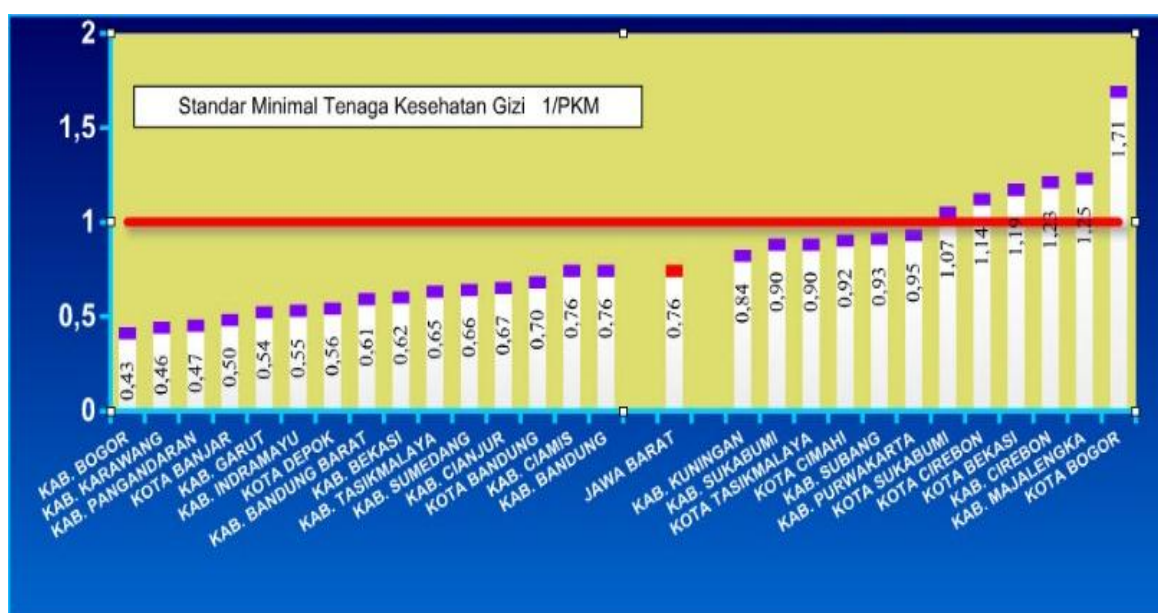
Gambar IV. A. 9
Ratio Tenaga Gizi Masyarakat Terhadap Puskesmas
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



6) Tenaga Kesehatan Sanitarian Puskesmas

Ratio tenaga Sanitasi adalah 1 orang untuk setiap Puskesmas, Jawa Barat baru mencapai 0,76/PKM terdapat kesenjangan 0,24/PKM atau kekurangan tenaga 248 orang , dari 27 Kab/Kota terdapat 6 Kab/Kota yang sudah memenuhi Standar Minimal Tenaga Sanitasi yaitu Kota Bogor, Kab Majalengka, Kab Cirebon, Kota Bekasi dan Kota Cirebon.

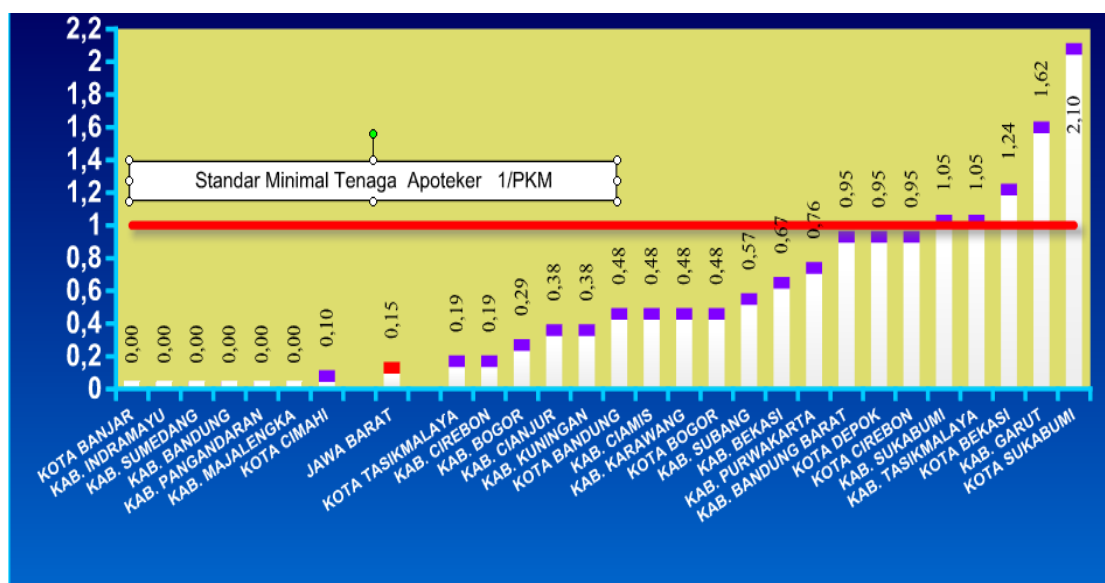
Gambar IV. A. 10
Rasio Tenaga Sanitarian (Kesling) Terhadap Puskesmas
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



7) Tenaga Kesehatan Apoteker Puskesmas

Ratio Apoteker adalah 1 orang untuk setiap Puskesmas, Jawa Barat baru mencapai 0,15/PKM terdapat kesenjangan 8,85/PKM, atau kekurangan tenaga 889 orang , dari 27 Kab/Kota terdapat 5 Kab/Kota yang sudah memenuhi Standar Minimal Tenaga Apoteker yaitu, Kota Sukabumi, Kab Garut, Kota Bekasi, Kab Tasikmalaya, dan Kab Sukabumi.

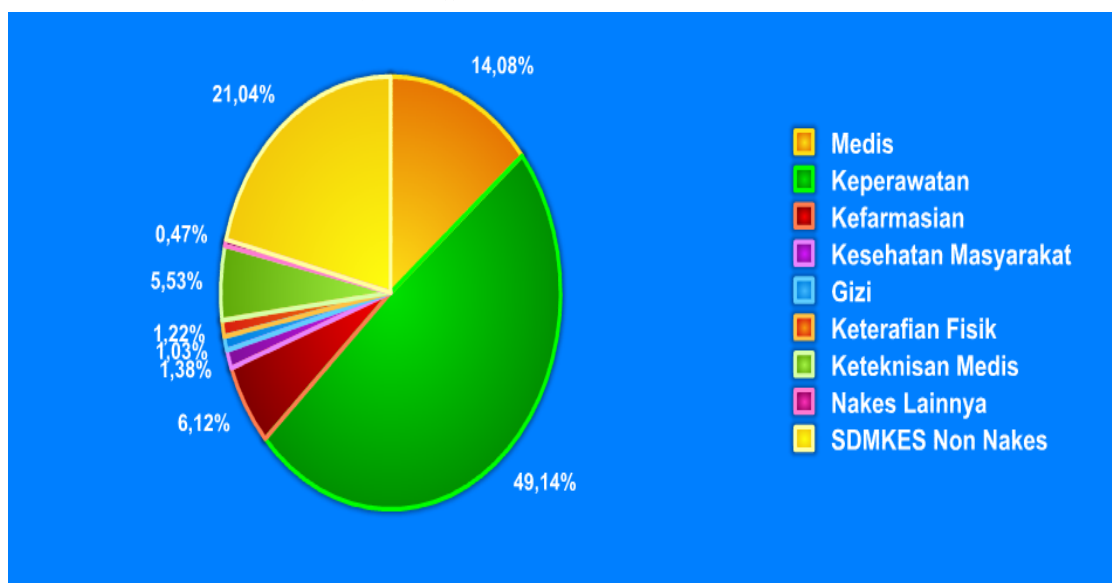
Gambar IV. A. 11
Ratio Tenaga Apoteker Terhadap Puskesmas
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



2. Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit

Sumber daya manusia kesehatan memegang peranan penting dalam dalam pelayanan rumah sakit. Rumah sakit adalah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan terhadap perorangan secara paripurna hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat sehingga ketersediaan tenaga memegang peranan penting. Jumlah tenaga di Rumah Sakit di Jawa Barat pada tahun 2016 sebanyak 57.545 orang yang terdiri dari 45.512 tenaga kesehatan dan 12.033 non tenaga kesehatan.

Gambar IV. A. 12
Proporsi Sumber Daya Manusia Kesehatan di Rumah Sakit
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



Tenaga Kesehatan meliputi :

- 1) Tenaga Medis di Rumah Sakit sebanyak 8.409 orang dengan proporsi Dokter Spesialis 5.213 orang (61,99%), Dokter Umum 2.700 orang (32,11%), dan Dokter Gigi 496 orang (5,90%).
- 2) Tenaga Keperawatan di Rumah Sakit sebanyak 28.098 orang dengan proporsi Bidan 5.151 orang (18,33%), Perawat 22.068 (80,46%) dan Perawat Gigi 339 orang (1,21%).
- 3) Tenaga Kefarmasian sebanyak 3.500 orang dengan proporsi Nakes Teknis Farmasi 2.694 orang (76,97%) dan Apoteker 806 orang (23,03%) .
- 4) Tenaga Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit sebanyak 788 orang dengan Proporsi Kesehatan Masyarakat 556 Orang (70,56%) dan Keseling 232 orang (29,44%).
- 5) Tenaga Gizi sebanyak 588 orang dengan proporsi Nutrisionis 432 orang (73,47%) dan Dietisien 156 orang (26,53 %).
- 6) Tenaga Keterafian Fisik Sebanyak 700 orang dengan proporsi Fisioterafi 535 orang, (76,43%), tenaga Terafi Okupasi 43 orang (6,14%), Terafi Wicara 97 orang (13,86%), dan akupungtur 25 orang (3,57%).
- 7) Tenaga Keteknisan Medis sebanyak 3.162 orang dengan proporsi tenaga Radio Grafer 753 orang (23,81%), Radio Terafis 55 orang (1,74%), Elektromedis 111 orang (3,51%), Tenis Gigi 40 orang (1,27%), Analisis

Kesehatan 1.410 orang (44,59%), Refleksionis Optisien 26 orang (0,82%), Ortestik Protostik 5 orang (0,16%) Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 700 orang (22,14%). Teknis Tranfusi Darah 55 orang (1,74%) dan Teknis Kardio Vascular 7 orang (0,22%).

B. RASIO TENAGA KESEHATAN TERHADAP JUMLAH PENDUDUK PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2013 tentang Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011- 2025, telah ditetapkan sejumlah target rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk sebagai berikut.

Tabel IV. B. 1
Target Rasio Tenaga Kesehatan

Jenis Tenaga	Target Sampai 2019	Pencapaian sampai 2016	Kesenjangan
Dokter Spesialis	11	11,73	terpenuhi
Dokter Umum	45	9,91	Belum terpenuhi
Dokter Gigi	13	2,67	Belum terpenuhi
Bidan	180	34,09	Belum terpenuhi
Perawat	120	63,35	Belum terpenuhi
Perawat Gigi	18	2,63	Belum terpenuhi
Teknis Kefarmasian	12	7,26	Belum terpenuhi
Apoteker	24	1,70	Belum terpenuhi
Sarjana Kes Masyarakat	15	2,53	Belum terpenuhi
Sanitaria	18	2,23	Belum terpenuhi
Gizi Masyarakat	14	2,71	Belum terpenuhi
Keterafian Fisik	5	1,54	Belum terpenuhi
Keteknisan Medis	16	7,84	Belum terpenuhi

Perhitungan rasio tenaga kesehatan digunakan untuk mengukur ketersediaan tenaga kesehatan tingkat Manajemen dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan bagi seluruh penduduk. Data jumlah tenaga kesehatan yang digunakan adalah data tenaga kesehatan yang bekerja sesuai dengan fungsi dan estimasi. Berikut adalah gambaran rasio tenaga kesehatan terhadap per 100.000 penduduk di Jawa Barat pada tahun 2016.

Tabel IV. B. 2
Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 Penduduk di Jawa Barat Tahun 2016

No	KAB/KOTA	Dokter Spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi	Bidan	Perawat	Perawat Gigi	Farmasi	Apoteker	SKM	Kesling	Gizi	Keterampilan Fisik	Ketekniksan Medis	Kesehatan Lainnya	Non Kesehatan
1	KAB. BOGOR	12,46	9,38	2,79	16,79	17,15	1,04	6,21	1,70	2,79	1,54	2,04	1,57	8,97	1,29	23,57
2	KAB. SUKABUMI	-	3,56	0,78	40,25	53,67	2,13	0,57	0,45	2,54	2,13	1,27	-	0,25	-	4,75
3	KAB. CIANJUR	1,51	5,29	1,20	37,76	38,25	1,64	2,40	0,71	0,84	1,33	1,51	0,27	2,49	-	24,30
4	KAB. BANDUNG	2,61	5,00	1,95	16,15	8,59	1,86	3,36	0,50	0,25	1,50	2,11	0,53	3,28	0,28	21,49
5	KAB. GARUT	2,45	4,86	0,62	23,62	48,10	2,61	1,25	0,97	2,06	1,56	1,56	-	2,72	0,08	23,31
6	KAB. TASIKMALAYA	0,34	4,48	1,26	35,76	26,06	4,42	1,38	0,69	0,75	1,55	1,89	-	1,43	2,07	10,73
7	KAB. CIAMIS	2,55	2,47	0,26	38,63	46,11	5,27	3,06	1,11	2,04	2,64	1,28	0,68	-	-	25,52
8	KAB. KUNINGAN	4,61	10,74	2,54	63,00	87,11	3,48	8,00	3,77	2,35	3,39	2,83	1,22	7,82	5,27	21,66
9	KAB. CIREBON	6,58	10,22	1,96	42,70	80,91	2,66	10,03	1,59	2,71	3,83	3,59	1,12	10,92	-	44,61
10	KAB. MAJALENGKA	2,02	7,91	1,68	47,14	58,59	3,62	4,71	0,51	3,37	3,70	3,03	0,34	1,52	0,08	43,60
11	KAB. SUMEDANG	6,04	11,12	2,63	41,94	59,54	3,50	6,48	0,61	3,59	3,77	1,84	0,61	-	2,71	32,57
12	KAB. INDRAMAYU	2,94	7,53	2,47	62,15	53,97	1,47	2,06	0,47	3,65	1,82	1,76	0,24	4,06	2,35	23,11
13	KAB. SUBANG	1,88	4,46	1,36	59,64	57,18	3,43	2,85	0,91	2,46	2,59	2,65	0,26	-	7,50	1,62
14	KAB. PURWAKARTA	6,43	8,68	2,79	42,89	60,58	2,57	5,47	2,14	1,61	2,25	3,54	2,36	8,04	3,54	51,36
15	KAB. KARAWANG	19,73	9,54	2,35	49,74	68,52	1,35	12,94	2,27	1,92	1,18	2,57	1,87	10,63	8,97	53,79
16	KAB. BEKASI	12,28	9,64	3,08	30,82	46,12	1,33	1,84	0,42	1,28	0,95	1,90	1,25	10,65	0,53	22,39
17	KAB. BANDUNG BARAT	2,06	13,04	2,49	27,60	22,87	2,37	2,79	1,03	1,40	1,33	2,06	0,06	3,64	-	0,49
18	KAB. PANGANDARAN	-	4,58	1,53	23,17	33,09	4,07	3,31	-	2,80	1,78	1,78	-	1,02	0,51	9,93
19	KOTA BOGOR	55,60	28,27	10,05	44,43	203,91	6,67	25,55	7,04	12,77	5,26	6,76	7,80	29,40	8,08	256,98
20	KOTA SUKABUMI	45,16	35,81	8,10	99,04	331,05	6,54	67,27	13,39	7,79	7,16	10,59	7,47	37,37	1,25	270,01
21	KOTA BANDUNG	43,52	19,39	3,41	35,21	174,94	2,01	12,17	2,09	3,41	3,49	2,73	4,18	0,32	-	11,68
22	KOTA CIREBON	46,38	36,07	11,92	23,83	362,34	12,24	49,60	12,56	9,34	12,88	14,82	5,80	49,92	14,82	169,41
23	KOTA BEKASI	13,27	10,08	3,87	13,74	35,48	1,65	6,85	2,12	1,51	1,83	3,23	1,83	7,79	6,85	20,63
24	KOTA DEPOK	25,97	16,88	5,23	28,86	109,09	3,49	17,57	3,49	2,98	1,70	3,90	5,14	20,92	-	70,92
25	KOTA CIMAH	31,82	25,25	5,05	36,70	200,83	5,56	21,72	4,04	2,19	2,86	9,26	7,24	46,46	6,73	214,47
26	KOTA TASIKMALAYA	28,20	15,31	4,09	49,73	134,78	10,46	21,68	4,24	4,85	4,85	7,73	0,61	28,96	0,61	89,30
27	KOTA BANJAR	20,34	18,14	2,75	46,73	78,06	6,05	24,74	4,40	20,34	5,50	5,50	3,30	30,24	-	246,29
	RATIO	11,73	9,91	2,67	34,09	63,35	2,63	7,26	1,70	2,53	2,23	2,71	1,54	7,84	2,10	37,36

Dari tabel diatas diketahui Kab/Kota yang telah mencapai target ketersediaan tenaga kesehatan sampai tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel IV. B. 3
Pemenuhan Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota Sampai Tahun 2016

Dokter Spesialis : Kab Bogor, Kab Karawang, Kab Bekasi, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar

Dokter Umum : Belum ada Kab/Kota yang terpenuhi

Dokter Gigi : Belum ada Kab/Kota yang terpenuhi

Bidan : Belum ada Kab/Kota yang terpenuhi

Perawat : Kota Bogor, Kota Sukabumi dan Kota Bekasi

Perawat Gigi : Kota Cirebon

Teknis Kefarmasian : Kota Bogor, Kota Sukabumi dan Kota Banjar

Apoteker : Kota Sukabumi dan Kota Cirebon

Sarjana Kes Masyarakat : Kota Banjar

Sanitarian : Belum ada Kab/Kota yang terpenuhi

Gizi Masyarakat : Kota Cirebon

Keterafian Fisik : Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Depok, dan Kota Cimahi

Keteknisan Medis : Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar.

Semua Kab/Kota belum terpenuhi target sampai tahun 2019 jenis Tenaga Kesehatan Dokter Umum, Dokter gigi, dan Bidan, sementara tenaga kesehatan lainnya ada beberapa Kab/Kota yang memenuhi target ketersediaan tenaga berdasarkan Rasio 100.000 penduduk walaupun komposisinya masih minim, diharapkan paling tidak semua Ketersediaan tenaga kesehatan berdasarkan Tempat Kerja/Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai klasifikasinya dapat dipenuhi.

Tabel IV. B. 4
Tabel Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kesehatan sampai Akhir Tahun 2025

JENIS TENAGA	TAHUN 2014		TAHUN 2019		TAHUN 2025	
	Target Ratio/100.000 Pddk	Proyeksi Kebutuhan	Target Ratio/100.000 Pddk	Proyeksi Kebutuhan	Target Ratio/100.000 Pddk	Proyeksi Kebutuhan
Dr Spesialis	10	4.630	11	5.425	12	6.334
Dr.Umum	40	18.520	45	22.193	50	26.393
Dr.Gigi	12	5.556	13	6.411	14	7.390
Perawat	158	73.155	180	88.770	200	105.571
Bidan	100	46.301	120	59.180	130	68.621
Perawat Gigi	15	6.945	18	8.877	21	11.085
Apoteker	9	4.167	12	5.918	15	7.918
Teknis Kefarmasian	18	8.334	24	11.836	30	15.836
SKM	13	6.019	15	7.398	18	9.501
Sanitarian	15	6.945	18	8.877	20	10.557
Gizi	10	4.630	14	6.904	18	9.501
Keterafian Fisik	4	1.852	5	2.466	6	3.167
Keteknisan Medis	14	6.482	16	7.891	18	9.501

BAB V

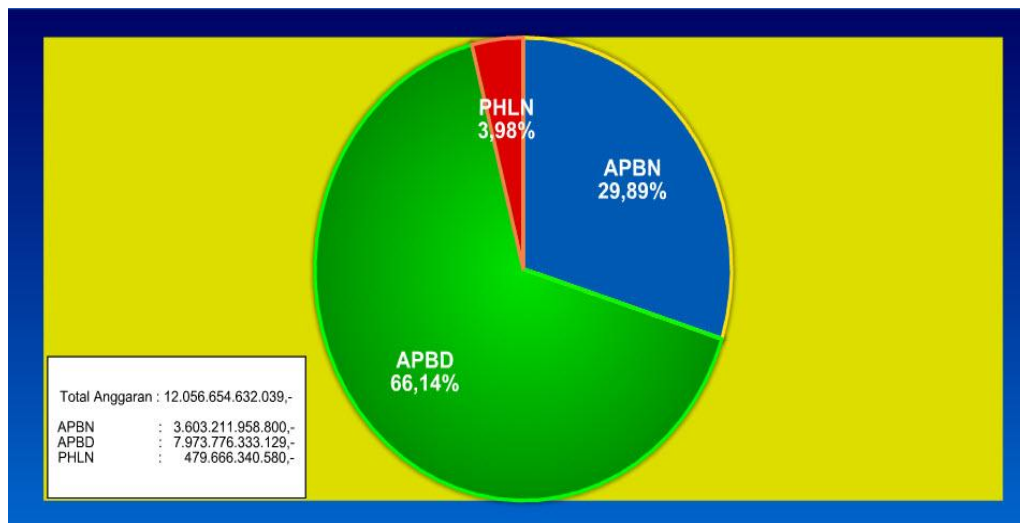
PEMBIAYAAN KESEHATAN

A. ANGGARAN KESEHATAN

Pembiayaan kesehatan adalah bentuk dan cara penyelenggaraan berbagai upaya penggalan, pengalokasian dan pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya baik berasal dari sumber pemerintah, maupun sumber lainnya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kesehatan.

Pembiayaan Kesehatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Anggaran PHLN (Pinjaman dan Hibah Luar Negeri) sebesar : Rp. 12.056.654.632.509,- (Dua Belas Triliun Lima Puluh Enam Milyar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Rupiah) , dengan proporsi bersumber APBD sebesar 66,14% , APBN sebesar 29,89% dan bersumber PHLN sebesar 3,98% .

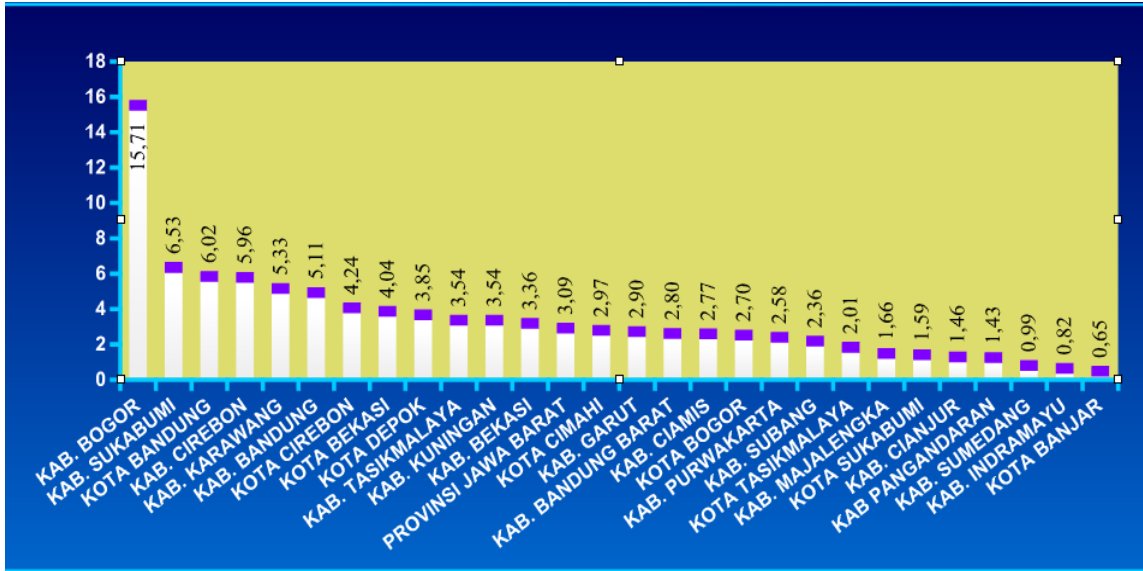
Gambar V. A.1
Proporsi Pembiayaan Kesehatan Berdasarkan Sumber Anggaran
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



Besaran Pembiayaan berdasarkan Kab/Kota antara 0,65% sd 15,71% , dengan anggaran tertinggi di kab Bogor 15,71% dari total anggaran dan

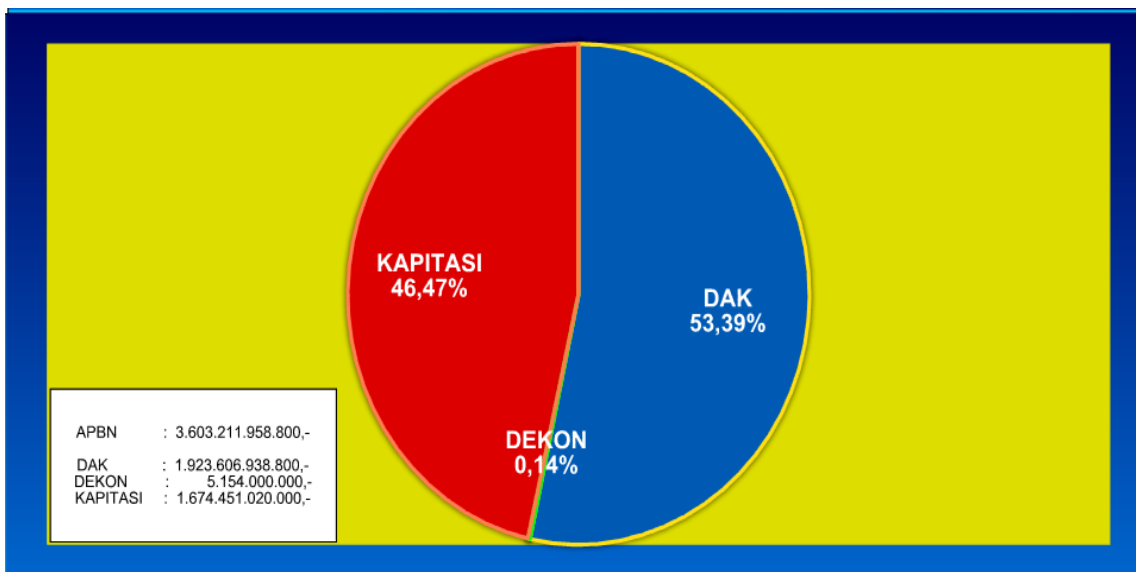
anggaran terendah di Kota Banjar (0,65%) untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar V. A. 2
Proporsi Pembiayaan Kesehatan Berdasarkan Kab/Kota
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



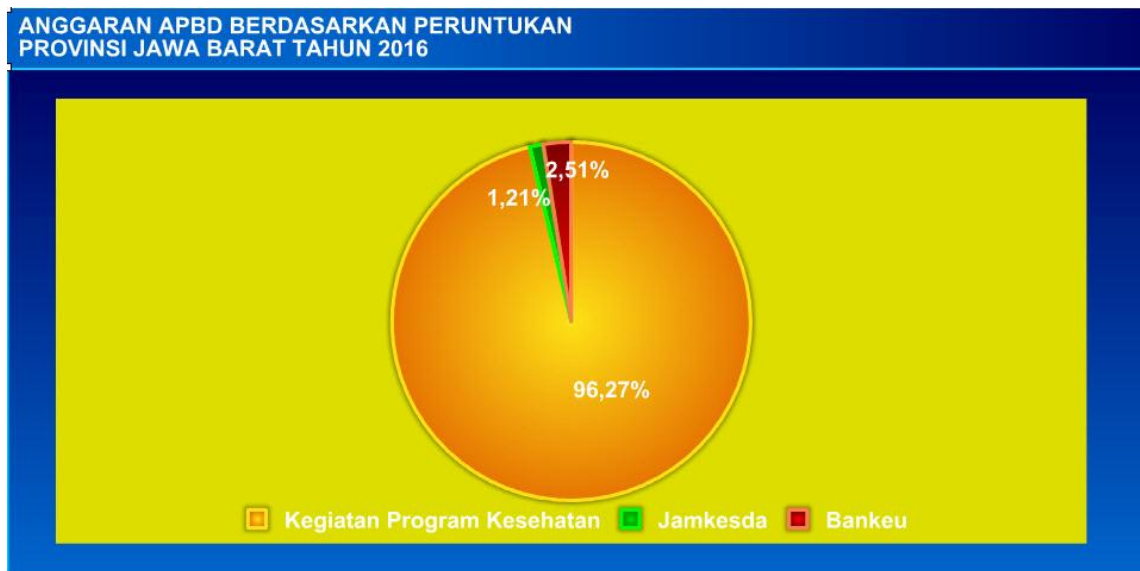
Komposisi Penbiayaan bersumber APBN diperuntukan bagi dana Kapitasi 46,47%, Dana Alokasi Khusus 53,39% dan Dana Dekonsentrasi 0,14% seperti gambar berikut ini

Gambar V. A. 3
Proporsi Pembiayaan Kesehatan Berdasarkan Anggaran APBN
Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



Sedangkan Komposisi Penbiayaan bersumber APBD diperuntukan bagi dana Pembangunan Program Kesehatan sebesar 96,27%, dana Jamkesda 1,21% dan dana bantuan keuangan 2,51% seperti dalam gambar berikut ini

Gambar V. A. 4
Proporsi Pembiayaan Kesehatan Berdasarkan Anggaran APBD
Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



B. PEMBIAYAAN KESEHATAN BERSUMBER APBD

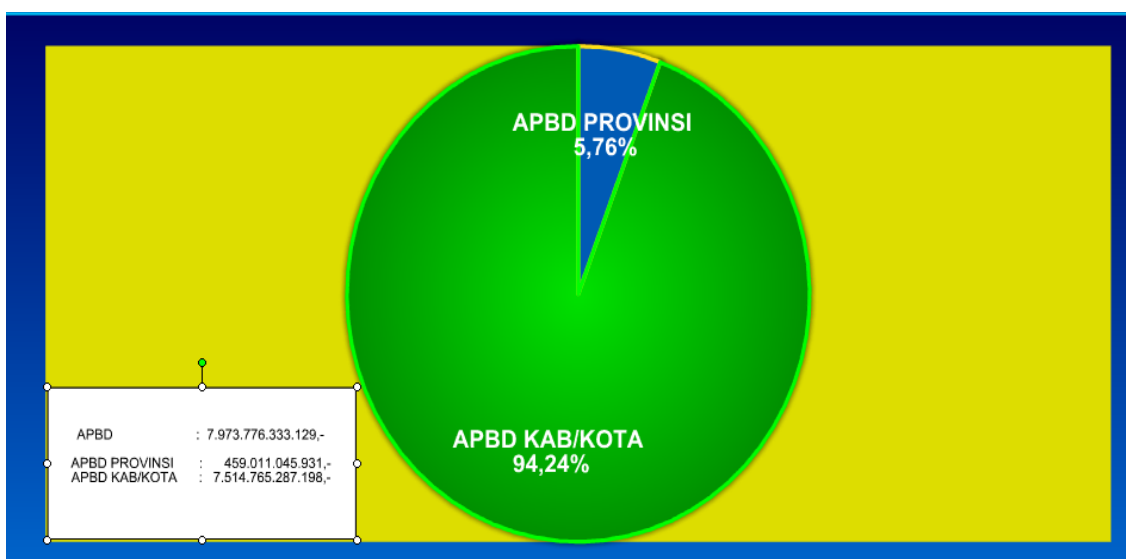
Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah, tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD terdiri atas:

- a. Anggaran Pendapatan, terdiri atas
 - Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain
 - Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus
 - Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.
- b. Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.

- c. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan kesehatan yang berseumber dari APBD sebesar Rp.7.973.776.333.129,- (Tujuh Trilyun Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Duapuluh Sembilan Rupiah) atau 66,14 % dari Total Pembiayaan Kesehatan, dengan proporsi 3,81% berasal dari APBD Provinsi Rp.459.011.045.931,- (Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Sebelas Juta Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) dan 62,33% dari APBD Kab/Kota 7.514.765.287.198,- (Tujuh Trilyun Lima Ratus Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), dengan kontribusi APBD Provinsi sebesar 5,76% dan APBD Kab/Kota 94,24%

Gambar V. B. 1
Pembiayaan Kesehatan Sumber APBD
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



Tabel V. B. 1
Tabel Pembiayaan Kesehatan Bersumber APBD
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016

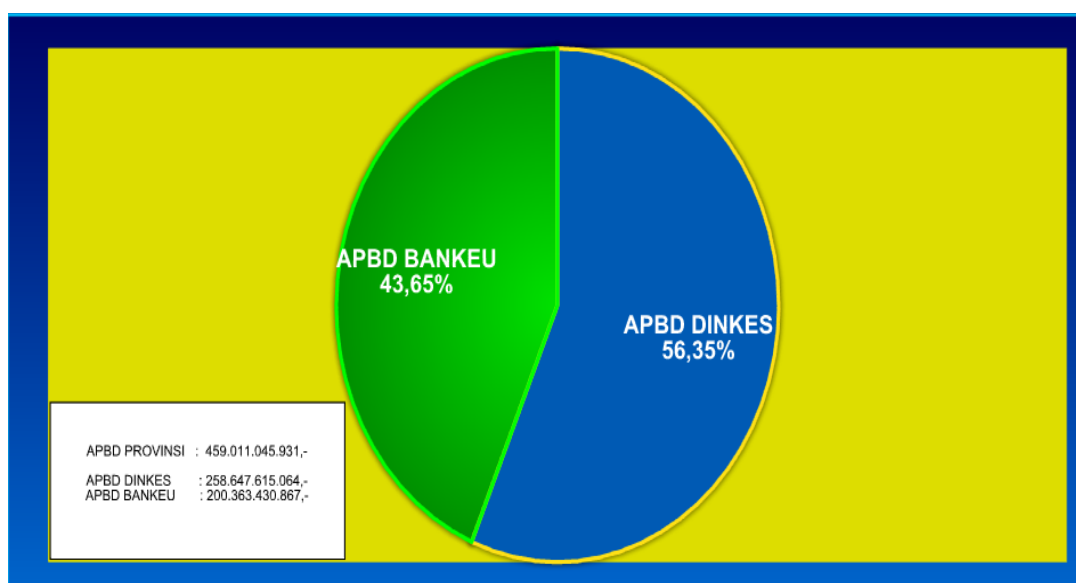
No	KAB/KOTA/PROVINSI	APBD			
		Provinsi		Kab/Kota	
		APBD DINKES	Bankeu Gub	APBD DINKES	JAMKESDA
1	KAB. BOGOR	-	37.200.460.100	1.489.620.206.000	
2	KAB. SUKABUMI	-		457.332.370.717	
3	KAB. CIANJUR	-			
4	KAB. BANDUNG	-		437.173.047.093	
5	KAB. GARUT	-		226.177.574.889	
6	KAB. TASIKMALAYA	-	7.659.120.000	293.999.639.628	
7	KAB. CIAMIS	-	18.709.054.550	81.567.938.993	
8	KAB. KUNINGAN	-	5.812.705.600	298.083.888.345	
9	KAB. CIREBON	-	4.952.048.025	555.056.834.529	
10	KAB. MAJALENGKA	-	7.808.471.856	109.572.878.012	
11	KAB. SUMEDANG	-			
12	KAB. INDRAMAYU	-			
13	KAB. SUBANG	-		131.178.659.544	
14	KAB. PURWAKARTA	-		133.129.541.661	
15	KAB. KARAWANG	-		360.228.102.592	
16	KAB. BEKASI	-	53.483.040.000	200.069.975.550	
17	KAB. BANDUNG BARAT	-		145.218.639.006	
18	KAB PANGANDARAN	-	36.551.939.525	72.725.869.781	
19	KOTA BOGOR	-		270.815.576.083	
20	KOTA SUKABUMI	-		68.383.604.107	
21	KOTA BANDUNG	-	14.608.453.209	501.698.398.438	96.733.269.141
22	KOTA CIREBON	-		368.619.900.327	
23	KOTA BEKASI	-	2.951.590.000	451.080.429.501	
24	KOTA DEPOK	-	2.754.664.000	360.489.271.661	
25	KOTA CIMAHI	-	6.698.582.252	257.131.732.505	
26	KOTA TASIKMALAYA	-		118.443.183.263	
27	KOTA BANJAR	-	1.173.301.750	30.234.755.832	
28	PROVINSI JAWA BARAT	258.647.615.064	-	-	
	JUMLAH ANGGARAN	258.647.615.064	200.363.430.867	7.418.032.018.057	96.733.269.141

1. APBD Provinsi

Dana APBD Provinsi yaitu Anggaran Belanja yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah Provinsi Jawa Barat atas dasar Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan masa waktu satu tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sd 31 Desember 2016 terkait Operasional Kegiatan Program di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Milik Provinsi Jawa Barat sebesar sebesar : 459.011.045.931 (Empat Ratus Lima Puluh

Sembilan Milyar Sebelas Juta Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan Perincian Sebagai Berikut :

Gambar V. B. 2
Pembiayaan APBD Provinsi Berdasarkan Peruntukan



Tabel V. B. 2
Pembiayaan Program Kesehatan Bersumber APBD Provinsi di Jawa Barat Tahun 2016

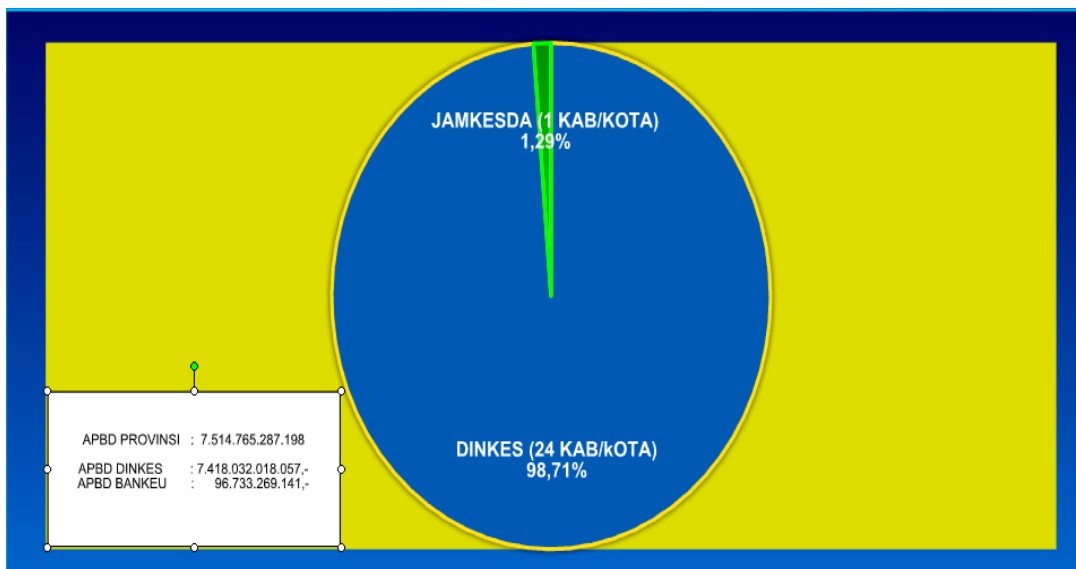
No	Program/Kegiatan	Biaya (Rp)	Proporsi
1	Program Promosi Kesehatan	4.840.366.475	1,87%
2	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1.053.515.500	0,41%
3	Program Pelayanan Kesehatan	17.773.119.842	6,87%
4	Program Pengendalian Penyakit Menular Dan Tidak Menular	4.622.846.750	1,79%
5	Program Sumber Daya Kesehatan	166.146.741.090	64,24%
6	Program Manajemen Kesehatan	3.857.565.400	1,49%
7	Pelayanan Administrasi Perkantoran	29.799.997.147	11,52%
8	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.754.999.225	1,07%
9	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur	9.187.741.210	3,55%
10	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	18.281.756.425	7,07%
11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	328.966.000	0,13%
	Total	258.647.615.064	100 %

- a. Bantuan Keuangan Gubernur Ke Kab/Kota dalam rangka mempercepat tercapainya tujuan dukungan otonomi daerah bidang kesehatan dan untuk meningkatkan sinergitas pengawasan dan peningkatan level Kapabilitas aparat Pengawasan Intern Pemerintah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 – 2019 sebesar Rp. 200.363.430.867,- (Dua Ratus Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah)

2. APBD Kabupaten / Kota

Dana APBD Kab/Kota yaitu Anggaran Belanja yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah Kab/Kota di Jawa Barat atas dasar Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kab/Kota di Jawa Barat yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota di Jawa Barat dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kab/Kota di Jawa Barat dengan masa waktu satu tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sd 31 Desember 2016 terkait Operasional Kegiatan Program di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Milik Kab/Kota di Jawa Barat sebesar : sebesar : 7.514.765.287.198 (Tujuh Trilyun Lima Ratus Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) dengan perincian :

Gambar V. B. 3
Pembiayaan Kesehatan Berdasarkan Anggaran APBD Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



- a. APBD Kab/Kota untuk pembiayaan dalam rangka penguatan pemberdayaan masyarakat, pelayanan kesehatan, manajemen kesehatan, regulasi, teknologi informasi dan penelitian pengembangan kesehatan, sebesar Rp. 7.418.032.018.057 (Tujuh Triliun Empat Ratus Delapan Belas Milyar Tiga Puluh Dua Juta Delapan Belas Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah) di laporkan oleh 24 Kab/Kota, yang belum melaporkan Kab Cianjur, Kab Sumedang, dan Kab Indramayu.

- b. Jamkesda adalah program jaminan bantuan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Sasaran Program Jamkesda adalah seluruh masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan berupa Jamkesmas, KIS, dan asuransi kesehatan lainnya. Adapun jaminan pembiayaannya meliputi Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dilakukan pada Puskesmas dan jaringannya, Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) pada RSUD sebesar Rp. 96.733.269.141 (Sembilan Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Satu Rupiah) dilaporkan oleh Kota Bandung, Kab /Kota lainnya tidak melaporkan.

C. PEMBIAYAAN KESEHATAN BERSUMBER APBN

Pembiayaan Kesehatan bersumber dari APBN sebesar : Rp. 3.603.211.958.800,- (Tiga Trilyun Enam RatusTiga Milyar Dua Ratus Sebelelas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Tabel V. C. 1
Tabel Pembiayaan Kesehatan Bersumber APBN
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016

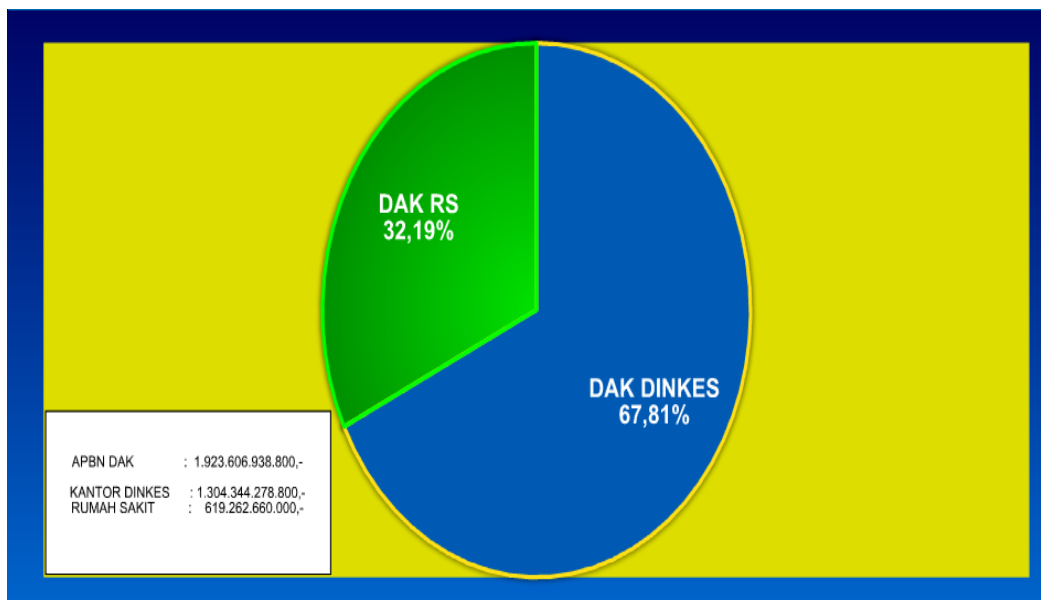
No	KAB/KOTA/PROVINSI	APBN			
		Dana Alokasi Khusus		Dana Dekon	KAPITASI
		DAK DINKKES	DAK RS	Kegiatan Program Yg Diperbantukan	JKN
1	KAB. BOGOR	114.901.044.320	83.418.192.000	-	169.263.480.000
2	KAB. SUKABUMI	109.318.542.500	-	-	107.229.480.000
3	KAB. CIANJUR	94.210.385.940	-	-	81.234.480.000
4	KAB. BANDUNG	73.982.163.940	13.596.371.000	-	91.319.220.000
5	KAB. GARUT	82.637.316.680	3.129.630.000	-	37.352.280.000
6	KAB. TASIKMALAYA	76.268.643.840	3.479.630.000	-	44.823.000.000
7	KAB. CIAMIS	49.671.198.140	20.752.637.000	-	98.463.480.000
8	KAB. KUNINGAN	24.774.510.020	32.000.000.000	-	64.424.400.000
9	KAB. CIREBON	87.742.384.440	10.300.108.000	-	57.606.900.000
10	KAB. MAJALENGA	35.816.277.260	3.479.630.000	-	41.338.380.000
11	KAB. SUMEDANG	39.126.473.120	25.003.108.000	-	54.761.460.000
12	KAB. INDRAMAYU	59.837.652.000	3.919.607.000	-	34.693.680.000
13	KAB. SUBANG	48.939.098.060	3.129.630.000	-	100.915.140.000
14	KAB. PURWAKARTA	12.189.849.480	50.000.000.000	-	115.482.120.000
15	KAB. KARAWANG	84.681.575.460	20.325.250.000	-	53.531.160.000
16	KAB. BEKASI	29.610.877.920	16.129.630.000	-	11.690.760.000
17	KAB. BANDUNG BARAT	36.737.129.120	30.000.000.000	-	124.116.540.000
18	KAB PANGANDARAN	21.586.163.040	-	-	41.519.640.000
19	KOTA BOGOR	18.687.697.920	6.919.614.000	-	15.090.360.000
20	KOTA SUKABUMI	13.076.785.460	38.580.093.000	-	71.069.640.000
21	KOTA BANDUNG	31.762.240.240	3.129.630.000	-	78.064.320.000
22	KOTA CIREBON	58.051.851.020	57.000.000.000	-	27.591.660.000
23	KOTA BEKASI	27.181.602.980	-	-	5.862.000.000
24	KOTA DEPOK	22.123.193.340	-	-	42.534.240.000
25	KOTA CIMAHI	20.945.689.120	35.491.508.000	-	16.570.200.000
26	KOTA TASIKMALAYA	19.909.811.720	40.531.762.000	-	63.234.060.000
27	KOTA BANJAR	10.574.121.720	10.129.630.000	-	24.668.940.000
28	PROVINSI JAWA BARAT	-	108.817.000.000	5.154.000.000	-
JUMLAH ANGGARAN		1.304.344.278.800	619.262.660.000	5.154.000.000	1.674.451.020.000

1. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK termasuk Dana Perimbangan, di samping Dana

Alokasi Umum (DAU), sebesar Rp. 1.923.606.938.800,- (Satu Triliun Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah)

Gambar V. C.1
Pembiayaan Kesehatan APBN DAK untuk RS dan Dinas Kesehatan Tahun 2016



2. Dana Dekonsentrasi

Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tetapi tidak termasuk dan yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah, sebesar Rp. 5.154.000.000,- (Lima Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah).

3. Dana Kapitasi

Dana Kapitasi merupakan pembiayaan kepada anggota pemberi pelayanan kesehatan di Puskesmas atas jasa pelayanan kesehatan dengan membayar dimuka sebesar Rp. 1.674.451.020.000,- (Satu Trilyun Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta, Dua Puluh Ribu Rupiah).

D. PEMBIAYAAN KESEHATAN BERSUMBER PHLN

Adalah pembiayaan bersumber dari Pinjaman Luar Negeri dan atau Hibah sebesar Rp. 479.666.340.580,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah).

Tabel V. D. 1
Tabel Pembiayaan Kesehatan Bersumber PHLN
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016

No	KAB/KOTA/PROVINSI	HIBAH/SUMBER PEMERINTAH LAIN/PHLN
1	KAB. BOGOR	
2	KAB. SUKABUMI	113.902.797.350
3	KAB. CIANJUR	
4	KAB. BANDUNG	
5	KAB. GARUT	
6	KAB. TASIKMALAYA	750.000.000
7	KAB. CIAMIS	64.283.291.112
8	KAB. KUNINGAN	1.871.950.000
9	KAB. CIREBON	3.515.429.000
10	KAB. MAJALENGKA	1.879.012.178
11	KAB. SUMEDANG	
12	KAB. INDRAMAYU	
13	KAB. SUBANG	
14	KAB. PURWAKARTA	
15	KAB. KARAWANG	124.034.706.877
16	KAB. BEKASI	94.033.942.781
17	KAB. BANDUNG BARAT	1.840.260.000
18	KAB PANGANDARAN	
19	KOTA BOGOR	13.422.587.920
20	KOTA SUKABUMI	
21	KOTA BANDUNG	
22	KOTA CIREBON	
23	KOTA BEKASI	
24	KOTA DEPOK	36.522.251.000
25	KOTA CIMAHI	21.833.487.962
26	KOTA TASIKMALAYA	
27	KOTA BANJAR	1.776.624.400
28	PROVINSI JAWA BARAT	-
	JUMLAH ANGGARAN	479.666.340.580

1. Anggaran APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.

2. Anggaran PHLN (Pinjaman dan Hibah Luar Negeri)

Pinjaman Luar Negeri adalah setiap penerimaan Negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Sedangkan hibah Luar Negeri adalah penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau dalam bentuk jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali.

BAB VI DERAJAT KESEHATAN

A. ANGKA HARAPAN HIDUP

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator derajat kesehatan yang digunakan sebagai salah satu dasar penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka Harapan Hidup memberikan gambaran probabilitas umur maksimal yang dapat dicapai seorang bayi baru lahir.

Indikator ini dipandang dapat menggambarkan taraf hidup suatu bangsa, sehingga dijadikan salah satu indikator untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Peningkatan Angka Harapan Hidup menunjukkan adanya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan penduduk serta meningkatnya derajat kesehatan suatu bangsa.

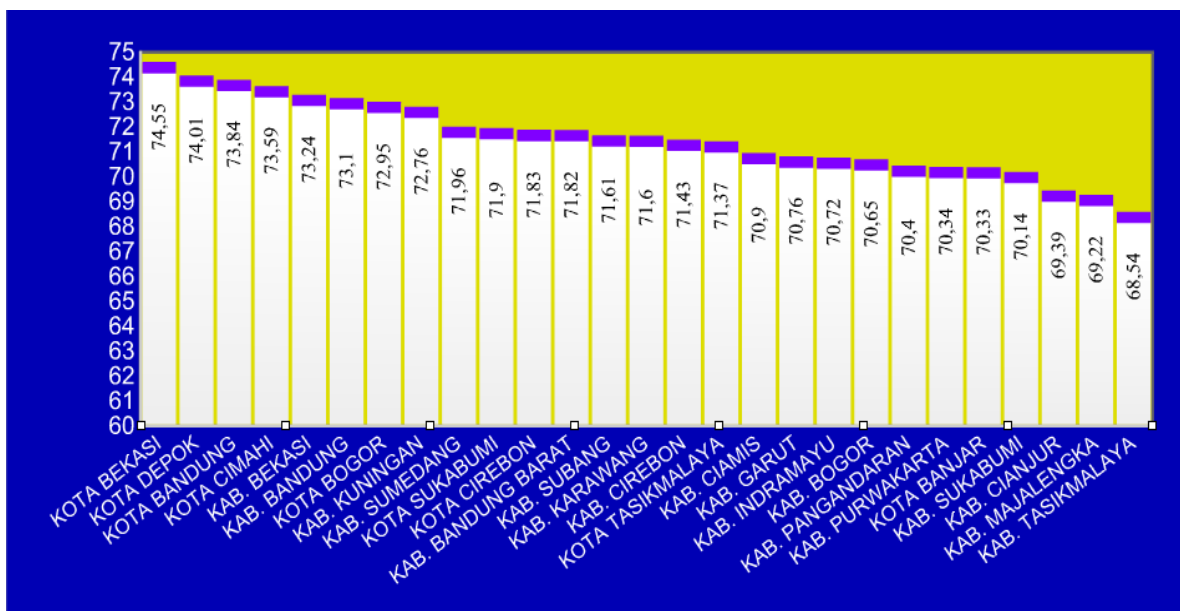
Untuk dapat meningkatkan Umur Harapan Hidup bukan saja diperlukan program pembangunan kesehatan namun diperlukan juga program sosial lainnya seperti program pemberantasan kemiskinan, perbaikan kualitas lingkungan hidup, kecukupan pangan dan gizi. Indikator Angka Harapan Hidup tidak bisa didapatkan dari sistem pencatatan pelaporan rutin, tetapi melalui estimasi berdasarkan data primer hasil survey atau sensus yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Gambar VI. A.1
Angka Harapan Hidup (AHH) Penduduk
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 - 2016



Angka Harapan Hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2011 hingga 2016, Jawa Barat telah berhasil meningkatkan Angka Harapan Hidup saat lahir sebesar 0,88 tahun. Selama periode tersebut, secara rata-rata Angka Harapan Hidup tumbuh sebesar 0,24 persen per tahun. Pada tahun 2011, Angka Harapan Hidup saat lahir di Jawa Barat hanya sebesar 71,56 tahun, dan pada tahun 2016 telah mencapai 72,44 tahun. Berdasarkan publikasi BPS 2016 capaian AHH kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat, untuk AHH tahun 2016 berkisar 68,54 tahun sampai dengan 74.55 tahun. AHH tertinggi berada di Kota Bekasi mencapai 74.55 tahun dan terendah berada di Kabupaten Tasikmalaya dengan 68.54 tahun. Untuk lebih jelasnya, secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar IV. A. 2
Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten Kota
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



Sebanyak 8 kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat mempunyai AHH diatas rata rata Jawa Barat (72,44), yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bekasi, Kab. Bandung, Kota Bogor, dan Kab Kuningan.

B. MORTALITAS/KEMATIAN

Angka kematian merupakan indikator *outcome* pembangunan kesehatan. Angka kematian dapat menggambarkan seberapa tinggi derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Pada dasarnya penyebab kematian ada yang langsung dan tidak langsung, walaupun dalam kenyataannya terdapat interaksi dari berbagai faktor yang mempengaruhi terhadap tingkat kematian di masyarakat.

Berbagai faktor yang berkaitan dengan penyebab kematian, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain dipengaruhi oleh tingkat sosial ekonomi, kualitas lingkungan hidup, upaya pelayanan kesehatan dan lain-lain. Di Provinsi Jawa Barat beberapa faktor penyebab kematian perlu mendapat perhatian khusus, diantaranya yang berhubungan dengan kematian ibu dan bayi yaitu besarnya tingkat kelahiran, umur masa paritas, jumlah anak yang dilahirkan serta penolong persalinan.

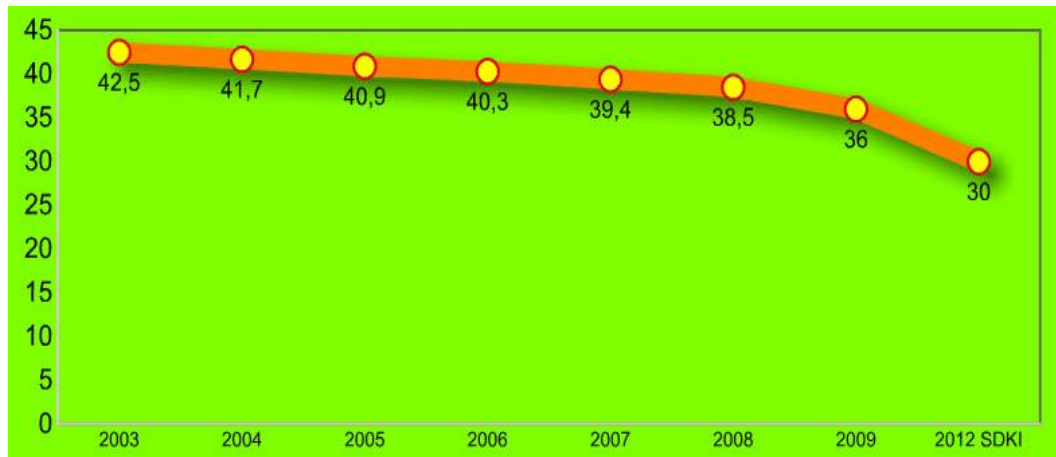
Indikator kematian yang paling sering digunakan adalah Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita (Akaba). Indikator kematian tersebut tidak dapat dihasilkan dari sistem pencatatan pelaporan rutin, namun berasal dari perhitungan yang dilakukan oleh BPS.

1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) atau *Infant Mortality Rate (IMR)* adalah Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup), selain itu berguna untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orangtua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah

khususnya di bidang kesehatan terutama yang berhubungan dengan bayi baru lahir perinatal dan neonatal.

Gambar VI. B. 1
Angka Kematian Bayi di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2003 s/d 2012



Sumber : SDKI dan BPS Jawa Barat

Berdasarkan kesepakatan internasional AKB merupakan indikator yang menggunakan konsep *rate*, meskipun dalam kenyataannya hanya *ratio*. Berdasarkan publikasi BPS, AKB Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2003 sampai dengan 2009 cenderung mengalami penurunan. Selama periode 2003 s/d 2009 AKB berhasil diturunkan sebesar 6.5 poin (range 42.5 – 36/1.000 kelahiran hidup). Berarti di Provinsi Jawa Barat rata-rata AKB turun sebesar 1 poin setiap tahunnya.

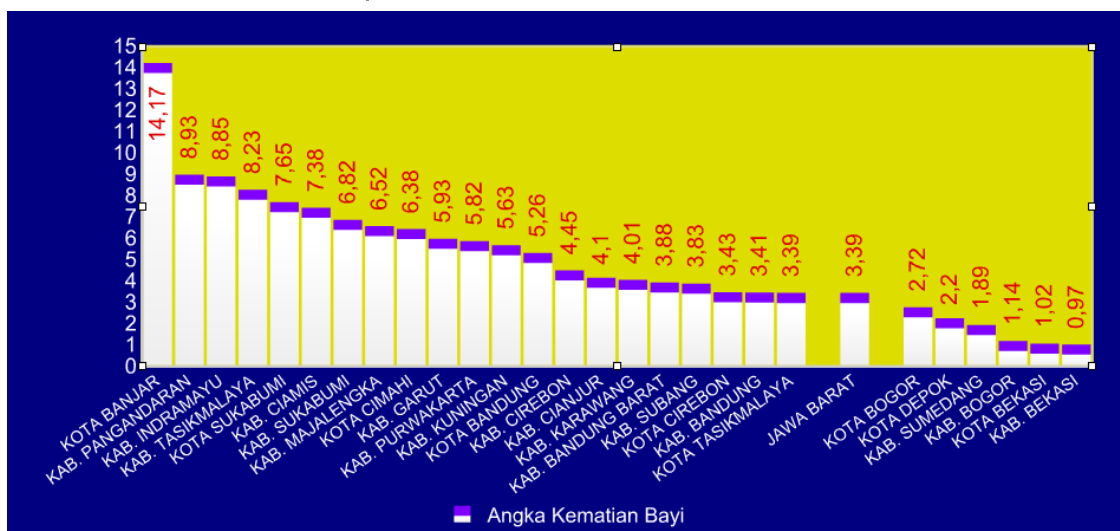
Untuk AKB 2013, BPS melakukan publikasi berdasarkan SDKI 2012, di mana Provinsi Jawa Barat mempunyai AKB sebesar 30/1.000 kelahiran hidup. Dibandingkan AKB 2009, maka terjadi penurunan sebesar 6 poin, yaitu dari 36/1.000 kelahiran hidup menjadi 30/1.000 kelahiran hidup. Berdasarkan pencatatan dan pelaporan, di Provinsi Jawa Barat tahun 2016, terdapat 3702 bayi meninggal, menurun 343 orang dibanding tahun 2015 yang tercatat 4.045 kematian bayi. Range pelaporan kematian bayi periode 2009 s/d 2016 antara 3.982 - 5719 kematian bayi, dengan rata rata 4.560/tahun.

Gambar VI. B. 2
Jumlah Kematian Bayi
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 sd 2016



Proporsi Kematian Bayi pada tahun 2016 sebesar 3,93/1000 kelahiran hidup, menurun 0,16 poin dibanding tahun 2015 sebesar 4,09/1000 kelahiran hidup. Proporsi kematian kematian bayi berasal dari bayi usia 0-28 hari (Neonatal) sebesar 84,63% atau 3,32/1000 kelahiran hidup. disarankan dalam penanganan AKB lebih difokuskan pada Bayi Baru Lahir. Walaupun demikian Angka Kematian Bayi di Jawa barat sebesar 3,93/1000 kelahiran hidup, sudah jauh melampaui target MDGs yang pada tahun 2015 harus sudah mencapai 17/1.000 kelahiran hidup.

Gambar VI. B. 3
Angka Kematian Bayi* Per 1.000 Kelahiran Hidup
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



Enam kabupaten/kota dengan proporsi kematian bayi dibawah rata rata Jawa Barat terdapat di Kab Bekasi, Kota Bekasi, Kab Bogor, Kab Sumedang, Kota Depok dan Kota Bogor.

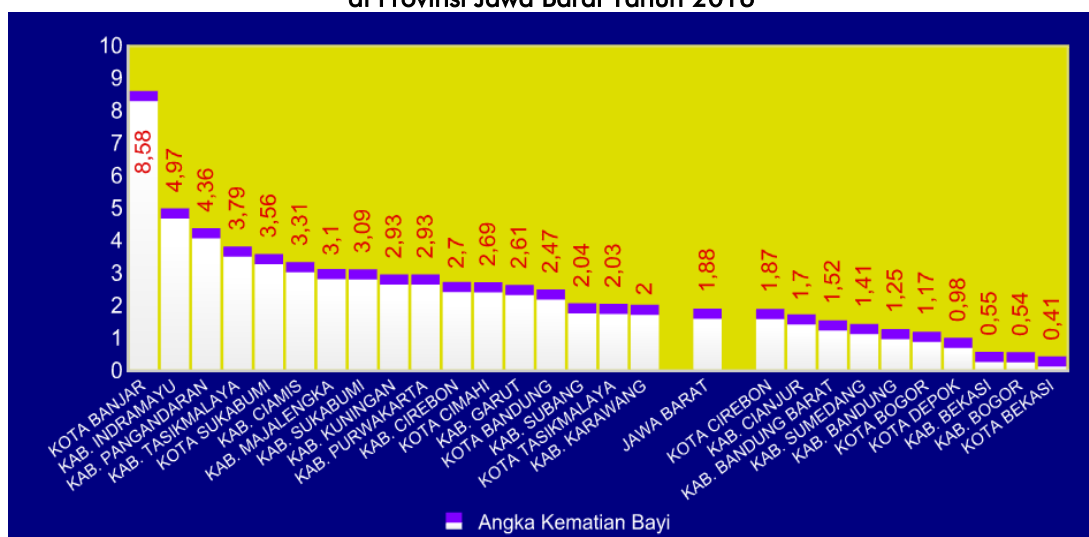
2. Angka Kematian Balita (AKABA)

Anak Balita adalah masa anak mulai berjalan dan merupakan masa yang paling hebat dalam tumbuh kembang, yaitu pada usia 12 sampai 59 bulan. Masa ini merupakan masa yang penting terhadap perkembangan kepandaian dan pertumbuhan intelektual.

Balita adalah anak yang berumur 0-59 bulan, pada masa ini ditandai dengan proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Angka kematian Balita adalah Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi), Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka Kematian Balita kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk.

Berikut ini gambaran proporsi kematian balita per 1.000 kelahiran hidup di kabupaten/kota Jawa Barat Tahun 2016 berdasarkan laporan rutin di Fasyankes.

Gambar IV. B. 4
Proporsi Kematian Balita Menurut Kabupaten Kota
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

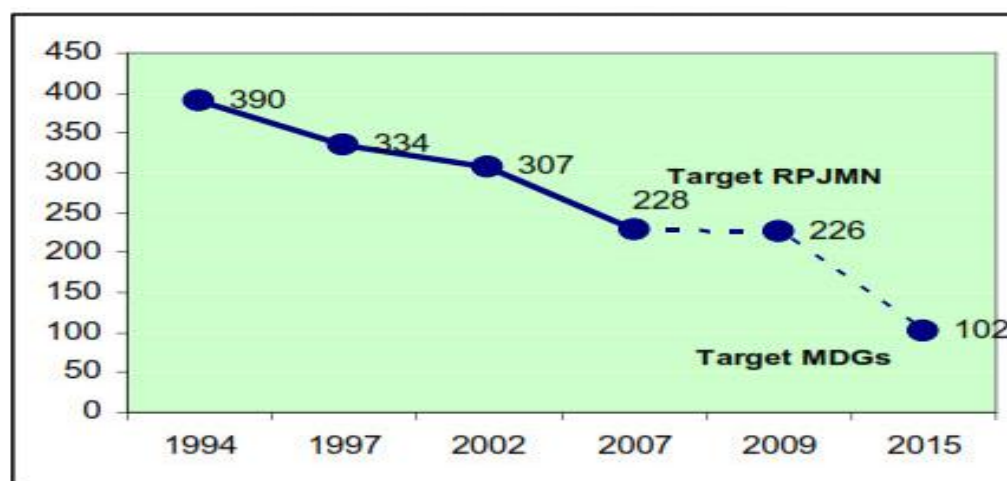


Proporsi Kematian Balita di Jawa Barat sebesar 1,8/1.000, angka kematian Balita terendah di Kota Bekasi sebesar 0,41/1.000 dan angka kematian tertinggi di Kota Banjar sebesar 8,85/1.000.

3. Angka Kematian Ibu (AKI)

Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) atau *Maternal Mortality Rate (MMR)* menggambarkan besarnya risiko kematian ibu pada fase kehamilan, persalinan dan masa nifas di antara 100.000 kelahiran hidup dalam satu wilayah pada kurun waktu tertentu. Sama halnya dengan Angka Kematian Bayi dan Balita, AKI tidak dapat dihasilkan dari pelaporan rutin tetapi merupakan hasil perhitungan BPS. Berikutnya perkembangan AKI berdasarkan beberapa hasil studi dan survey yang dilakukan oleh Institusi Pendidikan dan BPS.

Gambar IV B. 5
Pencapaian dan Proyeksi Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 1994 – 2015
(Dalam 100.000 Kelahiran Hidup)



Sumber data: SDKI, 1994, 2002/2003, 2007, MDGs dan Bappenas

Angka Kematian Ibu (AKI) Indonesia secara Nasional dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2007. Berdasarkan SDKI survei terakhir tahun 2007 AKI Indonesia sebesar 228 per 100.000 KH. Sementara target *Millennium Development Goal (MDG)* menargetkan AKI tahun 2015 sebesar 102 per 100.000 Kelahiran.

Jawa Barat secara parsial sejak tahun 1977 sudah dilaksanakan beberapa pencatatan di 12 RS di Jawa Barat (1977-1980), Studi Unpad di Ujung Berung

(studi dan survei untuk mendapatkan gambaran Angka Kematian Ibu (AKI) (penelitian 1978-1980) dan Kabupaten Sukabumi (1982) serta AKI Nasional hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) dan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang di publikasikan BPS. Dari hasil studi dan survey tersebut gambaran AKI di Jawa Barat sejak tahun 1977 sampai dengan 2012 berkisar antara 150 sampai dengan 450/100.000 kelahiran hidup. AKI tertinggi didapatkan berdasarkan SKRT 1986 dan Studi Unpad di Kab. Sukabumi yang mencapai 450/100.000 kelahiran hidup. Sedangkan AKI terendah didapatkan dari SKRT 1980 yaitu sebesar 150/100.000 kelahiran hidup.

Berdasarkan hasil SDKI tahun 2007 dan 2012, AKI Nasional menunjukkan adanya kenaikan yang sangat besar, yaitu dari 228/100.000 KH menjadi 359/100.000 KH.

Tabel VI. B. 1
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup
di Provinsi Jawa Barat

Penelitian / Survei	Tahun	AKI
Penelitian & pencatatan di 12 RS	1977 – 1980	370
Penelitian UNPAD si Ujungberung	1978 – 1980	170
SKRT	1980	150
UNPAD di Kab Sukabumi	1982	450
SKRT	1986	450
SKRT	1992	425
SDKI	1994	390
SKRT	1995	373
BPS Provinsi Jawa Barat	2003	321,15
SDKI	2007	228
SDKI 2012	2012	359

Tabel IV. B. 2
Banyaknya Kelahiran dan Angka Kematian Ibu
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2003

No	Kelompok Wilayah	Banyaknya Kelahiran	AKI
1	Bodebek (Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab. Bekasi, Kota Bekasi)	191.106	296.17
2	Bandung Raya (Kab. Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi)	133.250	237.15
3	Sukabumi – Cianjur (Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi, Kab. Cianjur)	96.934	364.17
4	Priangan Timur (Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kota Banjar, Kab. Sumedang)	150.992	319.88
5	Pantura (Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kab. Subang)	72.016	411.02
6	Cirebon (Kab. Cirebon, Kota Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka, Kab. Kuningan).	120.773	366.80
Jawa Barat		765.071	321.15

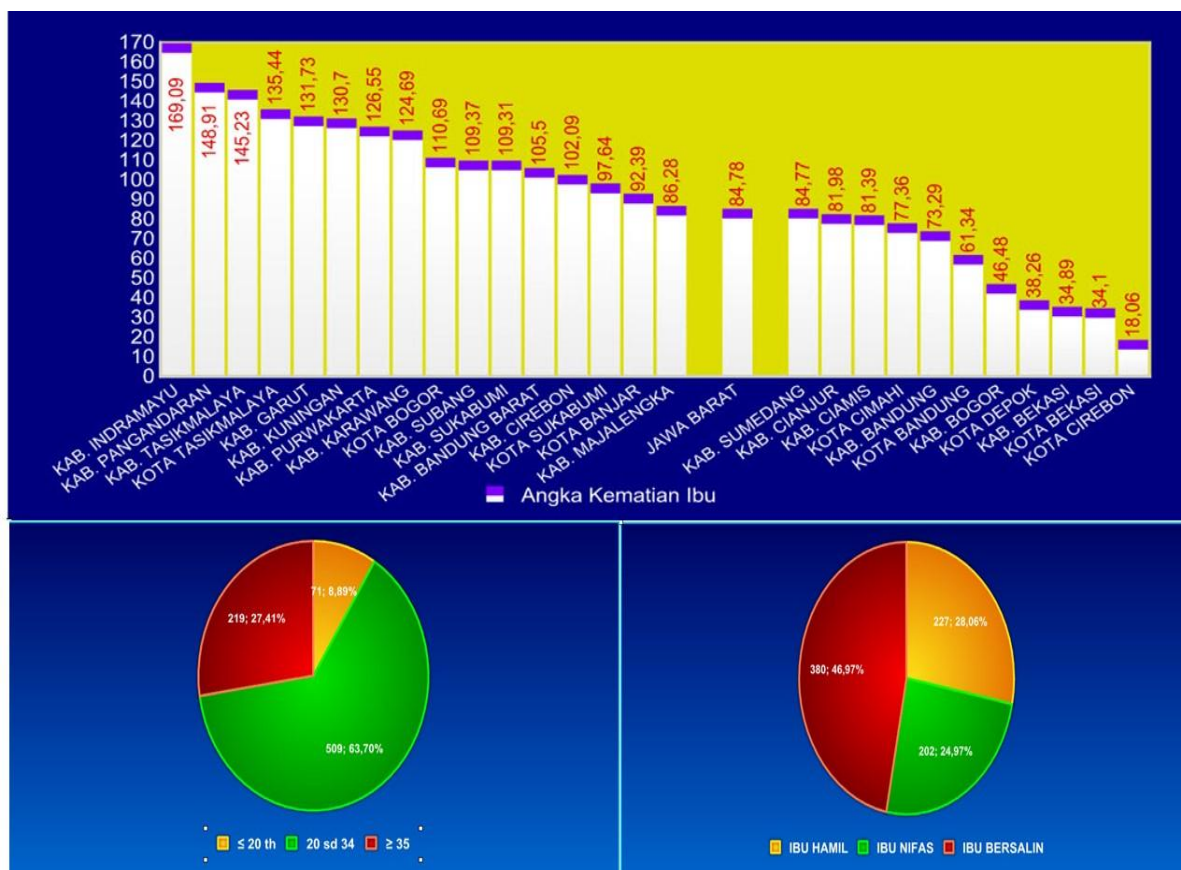
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Survey AKI 2003

Pada umumnya kematian ibu terjadi pada saat melahirkan (60,87%), waktu nifas (30,43%) dan waktu hamil (8,70%). Hal ini sejalan dengan data mengenai jumlah kematian ibu dari laporan sarana pelayanan kesehatan. Ditinjau dari sudut pendidikannya, maka diduga terdapat korelasi yang kuat antara pendidikan perempuan dengan besarnya Angka Kematian Ibu, seperti di daerah Pantura dimana AKI-nya tinggi dan ternyata perempuan berumur 10 tahun ke atas yang tidak bersekolah mencapai 15,53%.

Angka Kematian Ibu Berdasarkan laporan rutin Profil Kesehatan Kabupaten/Kota tahun 2016 tercatat jumlah kematian ibu maternal yang dilaporkan sebanyak 799 orang (84,78/100.000 KH), dengan proporsi kematian pada Ibu Hamil 227 orang (20,09/100.000), pada Ibu Bersalin 202 orang (21,43/100.000 KH), dan pada Ibu Nifas, 380 orang (40,32/100.000 KH), jika dilihat berdasarkan kelompok umur presentasi kematian pada kelompok umur <20 tahun sebanyak 71 orang (8,89%), kelompok umur 20 - 34 tahun sebanyak 509 orang (63,70%) dan >35 tahun sebanyak 219 orang (27,41%). Dan jika dilihat Berdasarkan Kabupaten/Kota proporsi kematian maternal pada ibu antara 18,06/100.000 KH – 169,09/100.000 KH, tertinggi terdapat di Kabupaten Indramayu dan terendah di Kota Cirebon. Terdapat 11 Kabupaten/Kota dengan

proporsi kematian ibu dibawah rata-rata Jawa Barat yaitu, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kab Bekasi, Kota Depok, Kab Bogor, Kota Bandung, Kab Bandung, Kota Cimahi, Kab Ciamis, Kab Cianjur, dan Kab Sumedang.

Gambar IV. B. 6
Proporsi Kematian Ibu Maternal *Per 100.000 di Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



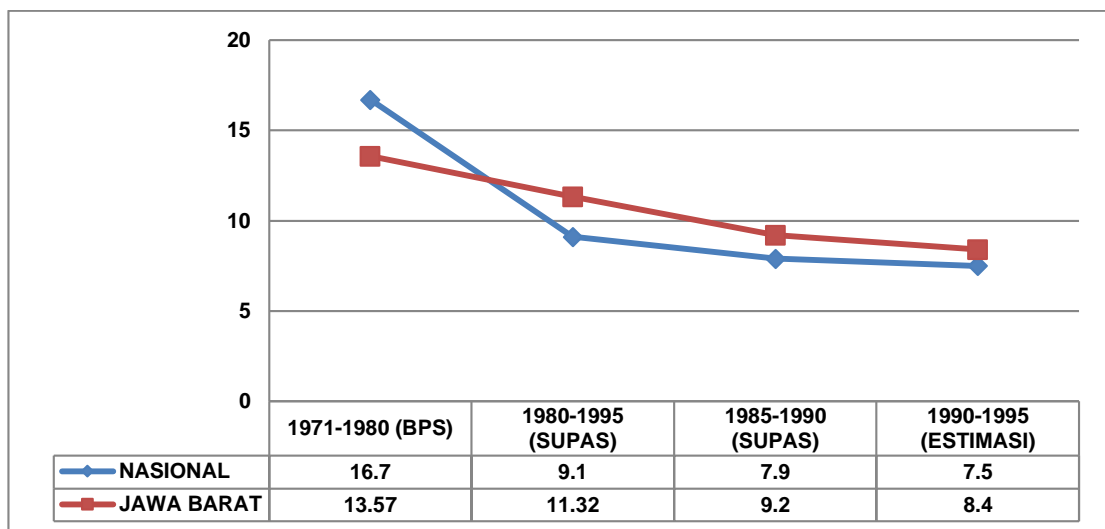
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2015

4. Angka Kematian Kasar

Angka Kematian Kasar (AKK) adalah Angka yang menunjukkan banyaknya kematian untuk setiap 1000 orang penduduk pada pertengahan tahun yang terjadi pada suatu daerah pada waktu tertentu, Angka ini berguna untuk memberikan gambaran mengenai keadaan kesejahteraan penduduk pada suatu tahun yang bersangkutan. Apabila dikurangkan dari Angka Kelahiran Kasar akan menjadi dasar perhitungan pertumbuhan penduduk alamiah.

Menurut BPS terjadi kecenderungan penurunan AKK di Provinsi Jawa Barat dari tahun 1971 hingga 1995, Dari Susenas 2003 secara nasional tercatat sebanyak 767.740 kematian, sedangkan jumlah penduduk pada pertengahan tahun tersebut diperkirakan sebesar 214.374.096 jiwa. Sehingga Angka Kelahiran Kasar yang terhitung adalah sebesar 3,58. Artinya, pada tahun 2003 terdapat 3 atau 4 kematian untuk tiap 1000 penduduk.

Gambar VI. B. 7
Angka Kematian Kasar Nasional dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 1971 – 1995



BAB VII

UPAYA PELAYANAN KESEHATAN

A. UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK

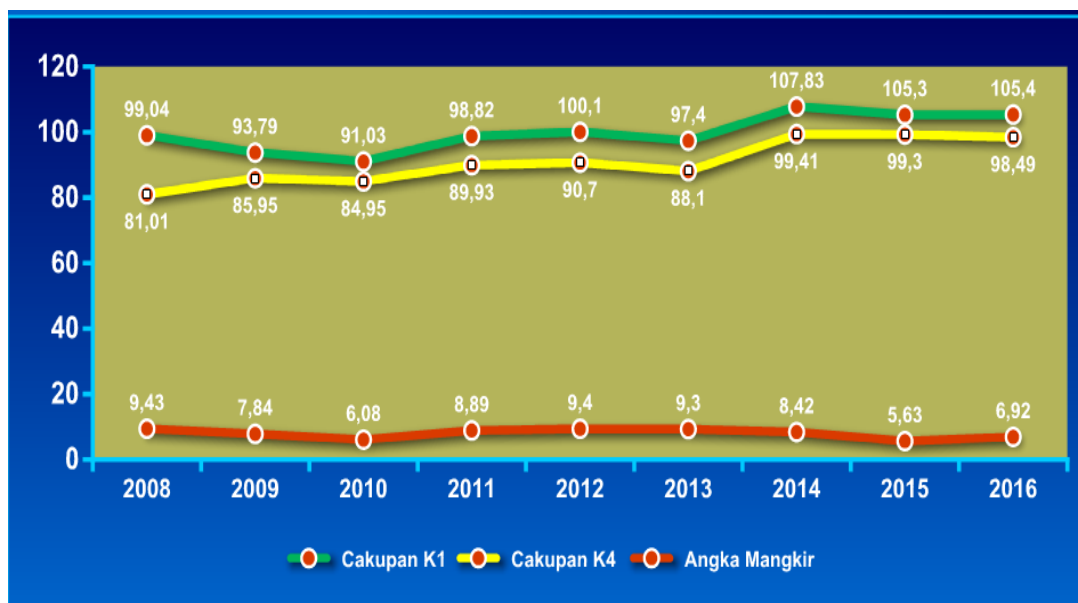
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pelayanan Kesehatan Masa Hamil bertujuan untuk memenuhi hak setiap ibu hamil memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat, dan melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas, dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga sebelum mulainya proses persalinan

a. Pelayanan Antenatal

Pelayanan antenatal merupakan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan profesional kepada ibu hamil selama masa kehamilan sesuai pedoman pelayanan antenatal yang ada dengan titik berat pada promotif dan preventif. Tujuan pelayanan antenatal adalah mengantar ibu hamil agar dapat bersalin dengan sehat dan memperoleh bayi yang sehat, mendeteksi dan mengantisipasi dini kelainan kehamilan dan kelainan janin. Hasil pelayanan antenatal dapat dilihat pada cakupan kunjungan ibu pertama kali ibu hamil (K1) dan kunjungan ibu hamil empat kali (K4). Indikator K1 untuk melihat sejauh mana akses pelayanan ibu hamil dan memberikan gambaran besaran ibu hamil yang melakukan kunjungan pertama ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan antenatal. Indikator K4 merupakan akses/kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan dengan syarat minimal satu kali kontak pada triwulan I (umur kehamilan 0-3 bulan), satu kali kontak pada triwulan II (umur kehamilan 4-6 bulan, dan minimal dua kali kontak pada triwulan III (umur kehamilan 7-9 bulan) selain itu juga sebagai indikator untuk melihat jangkauan pelayanan antenatal dan kemampuan program dalam menggerakkan masyarakat. Pelayanan antenatal dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar VII. A. 1
Cakupan Pelayanan K1 dan K4
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 - 2016

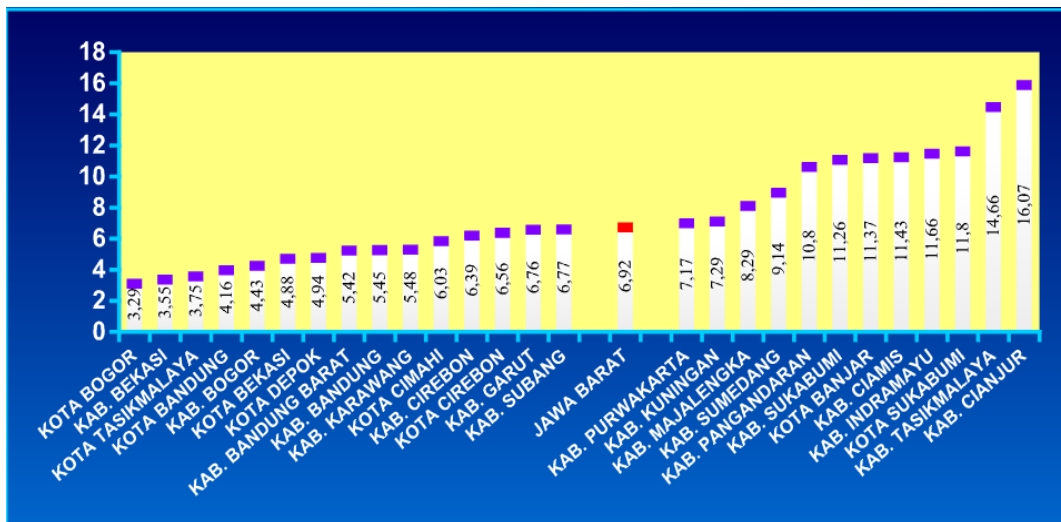


Cakupan Pelayanan K1 dan K4 dari tahun 2008 sampai 2016 di Provinsi Jawa Barat cenderung meningkat. Begitu juga dengan angka mangkir antara cakupan K1 dan K4 berfluktuatif tetapi cenderung menurun hingga pada tahun 2016 angka mangkir masih terdapat 6,92 % .

Pelayanan Kunjungan Ibu Hamil Pertama pada umur kehamilan 0-3 bulan (K1) di Provinsi Jawa Barat tahun 2016, sebanyak 1.028.526 Bumil dari sasaran 975.780 Bumil (105,4%), dan Kunjungan K4 sebanyak 961.017 Bumil (98,5%), terdapat 67.509 Bumil yang mangkir (*Drop out*) pada kunjungan K4 (6.92%).

Cakupan K1 dan K4 berdasarkan Kab/Kota, dan angka mangkir K4 dapat digambarkan seperti gambar berikut ini :

Gambar VII. A. 2
Persentasi Mangkir Pelayanan Bumil K4 Berdasarkan Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



Angka mangkir kunjungan K4 di Jawa Barat sebesar 6,92%, tertinggi di Kab Cianjur 16,07% dan terendah di Kota Bogor 3,29%, besaran angka mangkir kunjungan K4 yang masih bisa ditoleransi antara 5 – 20 %, jika dilihat pola kegagalan pemeriksaan bumil di Jawa Barat periode tahun 2008 – 2016 antara 5,63 – 9,43, dan pada tahun 2016 angka mangkir meningkat 1,29 point dibanding 2015.

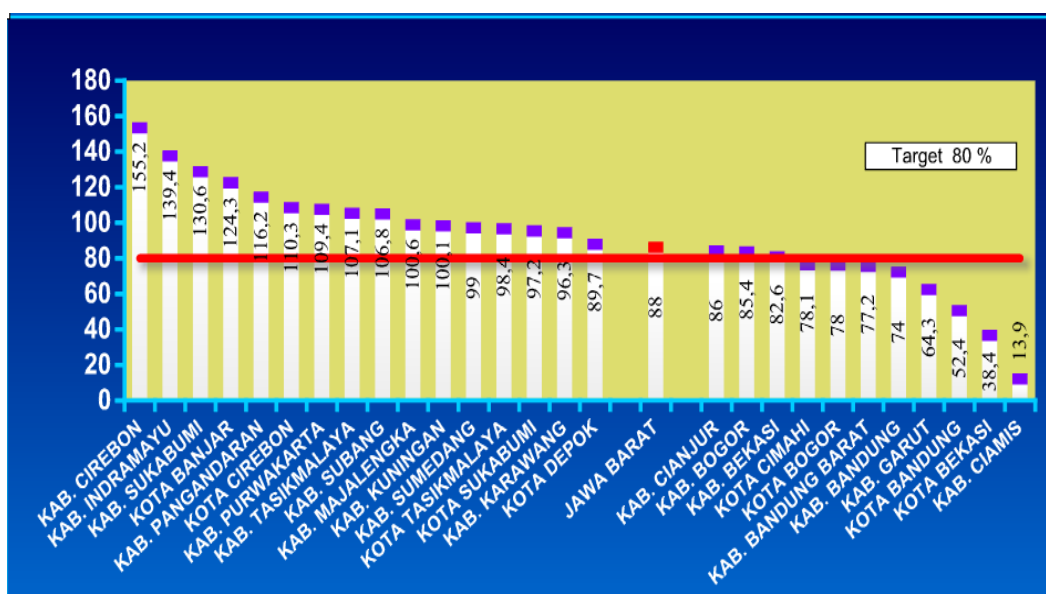
b. Pelayanan Ibu Hamil Risiko Tinggi

1) Pelayanan Komplikasi Kebidanan

Komplikasi kebidanan adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan atau janin dalam kandungan, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk penyakit menular dan tidak menular yang dapat mengancam jiwa ibu dan atau janin. Pencegahan dan penanganan komplikasi kebidanan adalah pelayanan kepada ibu dengan komplikasi kebidanan untuk mendapatkan perlindungan dan penanganan definitif sesuai standar oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencegahan dan penanganan komplikasi kebidanan adalah cakupan penanganan komplikasi kebidanan (Cakupan PK).

Cakupan Penanganan Komplikasi Kebidanan pada Kunjungan ibu hamil ke pelayanan kesehatan dengan resiko tinggi menargetkan sebesar 80%, dan pada tahun 2016 telah tercapai sebanyak 171.828 orang atau 88 % dari perkiraan bumil dengan komplikasi kebidanan sebanyak 195.156 orang, hal ini menunjukkan Penanganan Komplikasi Kebidanan telah mencapai target, walaupun demikian terdapat 8 Kab/Kota yang belum mencapai target yaitu : Kab Ciamis, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kab Garut, Kab Bandung, Kab Bandung Barat, Kota Bogor, dan Kota Cimahi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

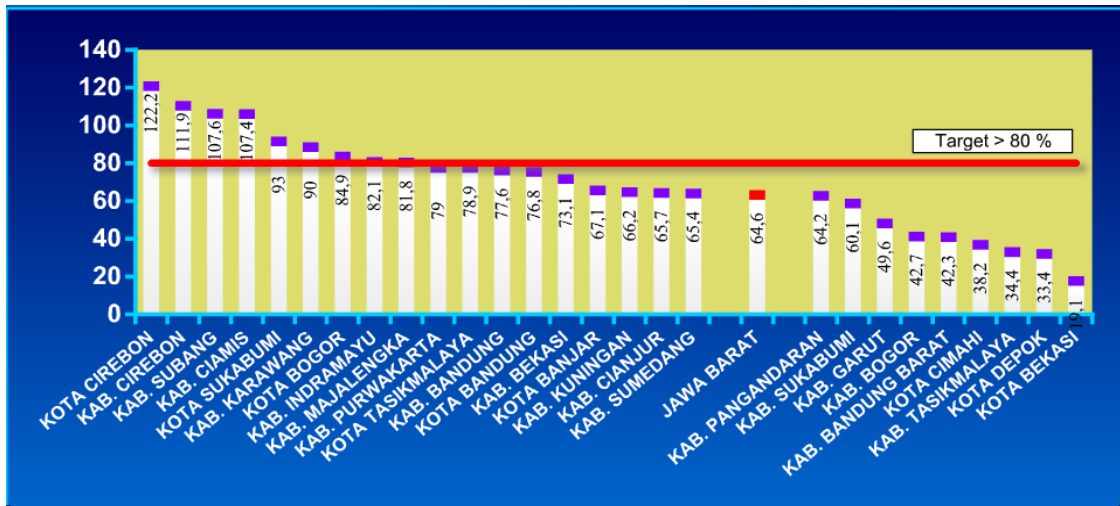
Gambar VII. A.3
Cakupan Penanganan Komplikasi Kebidanan Pada Ibu Hamil
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



2) Pelayanan Komplikasi Neonatal

Cakupan Penanganan Komplikasi Neonatal pada lahir hidup di Provinsi Jawa Barat sebesar 64,6 % dan terdapat 9 Kabupaten/Kota yang sudah mencapai target (80%), yaitu : Kota Cirebon, Kab Cirebon, Kab Subang, Kab Ciamis, Kota Sukabumi, Kab Karawang, Kota Bogor, Kab Indramayu dan Kab Majalengka.

Gambar VII. A.4
Cakupan Penanganan Neonatal Terhadap Lahir Hidup
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

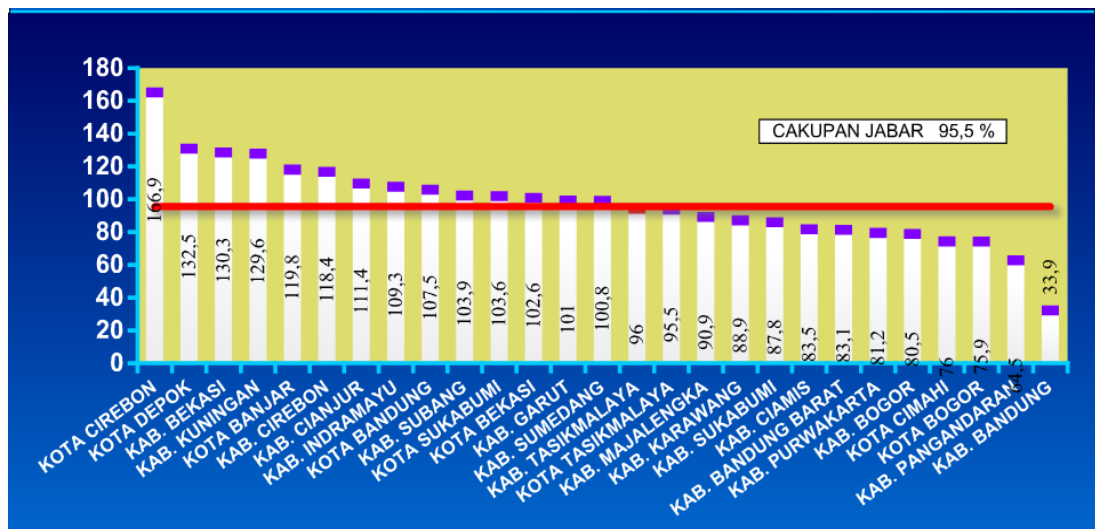


Dengan terdektesinya ibu hamil, diharapkan persalinan dapat ditangani lebih dini atau kalaupun terjadi komplikasi persalinan maka tidak mengakibatkan kematian.

c. Pelayanan Imunisasi TT2+

Program Imunisasi pada WUS baik pada WUS hamil maupun tidak hamil dilaksanakan dalam rangka komitmen Indonesia untuk melaksanakan Maternal and Neonatal Tetanus Elimination, yaitu program Eliminasi tetanus pada neonatal dan Wus termasuk Bumil, dinyatakan tereliminasi apabila terdapat < 1 kasus/1000 kelahiran hidup.

Gambar VII. A.5
Cakupan Pelayanan Imunisasi TT2+ Pada Ibu Hamil
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



Cakupan imunisasi TT2+ mencapai 95,5%, terdapat 13 Kab/Kota yang cakupannya dibawah rata rata Jawa Barat yaitu : Kab Bandung, Kab Pangandaran, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kab Bogor, Kab Purwakarta, Kab Bandung Barat, Kab Ciamis, Kab Sukabumi, Kab Karawang, Kab Majalengka, Kota Tasikmalaya, dan Kab Tasikmalaya, Pemberian Tabel Besi.

d. Pelayanan Zat Besi (FE) Pada Ibu Hamil

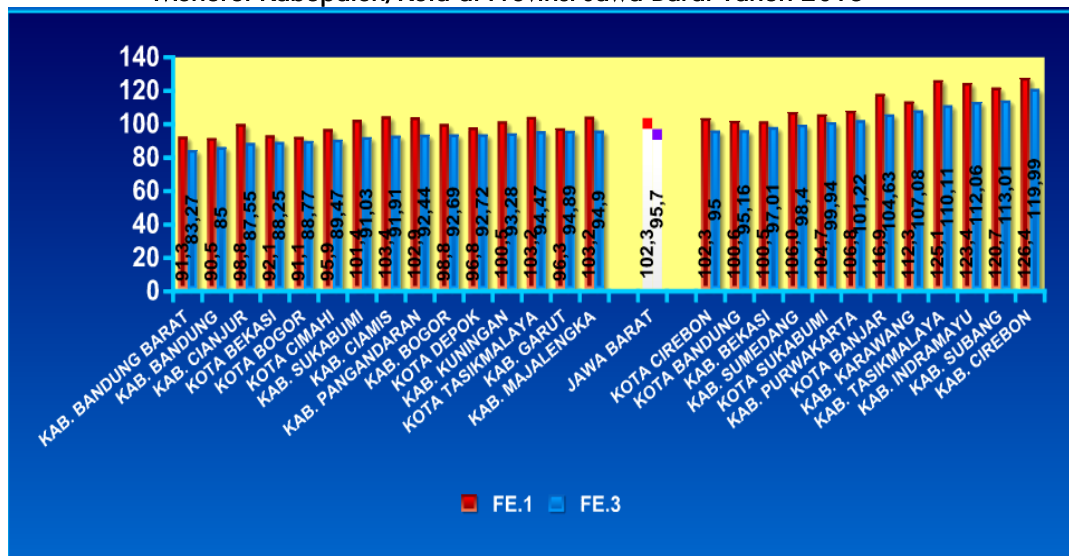
Kebutuhan zat besi pada wanita hamil yaitu rata-rata mendekati 800 mg. Kebutuhan ini terdiri dari, sekitar 300 mg diperlukan untuk janin dan plasenta serta 500 mg lagi digunakan untuk meningkatkan massa haemoglobin maternal. Kurang lebih 200 mg lebih akan dieksresikan lewat usus, urin dan kulit. Makanan ibu hamil setiap 100 kalori akan menghasilkan sekitar 8–10 mg zat besi. Perhitungan makan 3 kali dengan 2500 kalori akan menghasilkan sekitar 20–25 mg zat besi perhari. Selama kehamilan dengan perhitungan 288 hari, ibu hamil akan menghasilkan zat besi sebanyak 100 mg sehingga kebutuhan zat besi masih kekurangan untuk wanita hamil.

Besarnya angka kejadian anemia ibu hamil pada trimester I kehamilan adalah 20%, trimester II sebesar 70%, dan trimester III sebesar 70%. Hal ini disebabkan karena pada trimester pertama kehamilan, zat besi yang dibutuhkan sedikit karena tidak terjadi menstruasi dan pertumbuhan janin masih lambat. Menginjak trimester kedua hingga ketiga, volume darah dalam tubuh wanita akan meningkat sampai 35%, ini ekuivalen dengan 450 mg zat besi untuk memproduksi sel-sel darah merah. Sel darah merah harus mengangkut oksigen lebih banyak untuk janin. Sedangkan saat melahirkan, perlu tambahan besi 300 – 350 mg akibat kehilangan darah. Sampai saat melahirkan, wanita hamil butuh zat besi sekitar 40 mg per hari atau dua kali lipat kebutuhan kondisi tidak hamil.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa lebih dari $\frac{3}{4}$ ibu hamil mengalami defisiensi besi dan lebih dari $\frac{1}{3}$ mengalami anemia. Pemberian suplemen besi setara 60 mg elemen besi dan 0,25 mg asam folat per hari selama 13 minggu dapat menurunkan angka anemia serta meningkatkan status besi ibu hamil, tetapi $\frac{1}{3}$ dari mereka masih menderita defisiensi besi dan 9% masih anemia. Oleh karena itu, adalah sangat penting memberikan

asupan besi sejak masa pre-maternal supaya cadangan besi pada saat hamil cukup memadai.

Gambar VII. A.6
Cakupan Pelayanan Zat Besi Pada Ibu Hamil
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



Cakupan pemberian zat besi ibu Hamil pada kunjungan pertama (F1) mencapai 102,3 % dari perkiraan Ibu Hamil, dan pada kunjungan ke tiga (F3) terjadi penurunan 6,5 point menjadi 95,7%.

Dalam upaya memantau kesehatan Ibu hamil digunakan kartu KMS ibu hamil atau buku KIA untuk mencatat pelayanan yang sudah diterima oleh ibu selama hamil, melahirkan, nifas serta untuk bayinya dilanjutkan dengan pertumbuhan sampai umur bayinya lima tahun (Balita). Hasil Riskesdas tahun 2013 menunjukkan bahwa 74,3% mempunyai Buku KIA, namun yang bisa menunjukkan hanya 34,6%. Variasi kepemilikan buku KIA dan bisa menunjukkan menurut kabupaten/kota bervariasi yaitu di Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, dan Kota Banjar berkisar >60 persen. Cakupan sedangkan di Kabupaten Bekasi dibawah 20%.

Selanjutnya pada buku KIA dilakukan observasi Lembar Amanat Persalinan untuk melihat isian 5 komponen P4K. Hasil observasi buku KIA menunjukkan untuk isian penolong persalinan sebesar 30,5 %, dana persalinan sebesar 11,3 %, kendaraan/ambulans desa sebesar 9,8 %, metode KB pasca salin sebesar 16 % dan 7,8 % untuk isian sumbangan darah. Kelengkapan isian semua komponen sebesar 6,8 % dan 68,5 % tidak ada isian. Dari unsur tenaga

kesehatan yang memberi pelayanan pemeriksaan kesehatan yang dipilih ibu hamil memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar 90,5%. Fasilitas kesehatan disediakan untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil dari RS hingga posyandu yang merupakan salah satu upaya untuk mendekatkan tenaga kesehatan yang memberi pelayanan kepada masyarakat. sebagian besar ibu hamil ditangani oleh praktek bidan (60,3%), Puskesmas/pustu sebesar 8,9 persen dan pemanfaatan posyandu sebesar 2,8 persen.

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin / Nifas

Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin/Nifas dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. diberikan kepada ibu bersalin dalam bentuk 5 (lima) aspek dasar meliputi, membuat keputusan klinik; asuhan sayang ibu dan sayang bayi; pencegahan infeksi; pencatatan (rekam medis) asuhan persalinan; dan rujukan pada kasus komplikasi ibu dan bayi baru lahir.

a. Persalinan Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan (Nakes)

Komplikasi dan kematian ibu maternal serta bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada masa di sekitar persalinan, hal ini antara lain disebabkan pertolongan tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan.

Cakupan persalinan adalah persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan, angka cakupan ini menggambarkan tingkat penghargaan masyarakat terhadap tenaga penolong persalinan dan manajemen persalinan KIA dalam memberikan pertolongan persalinan secara profesional.

Dalam kurun tahun 2008–2016 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan cenderung meningkat dari 74,34% pada tahun 2008 menjadi 97,30% pada tahun 2016, dan telah mencapai target (90%).

Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di Jawa Barat tahun 2016 sedikit mengalami penurunan 0,8 poin apabila dibandingkan dengan cakupan tahun 2015 sebesar 98,10%.

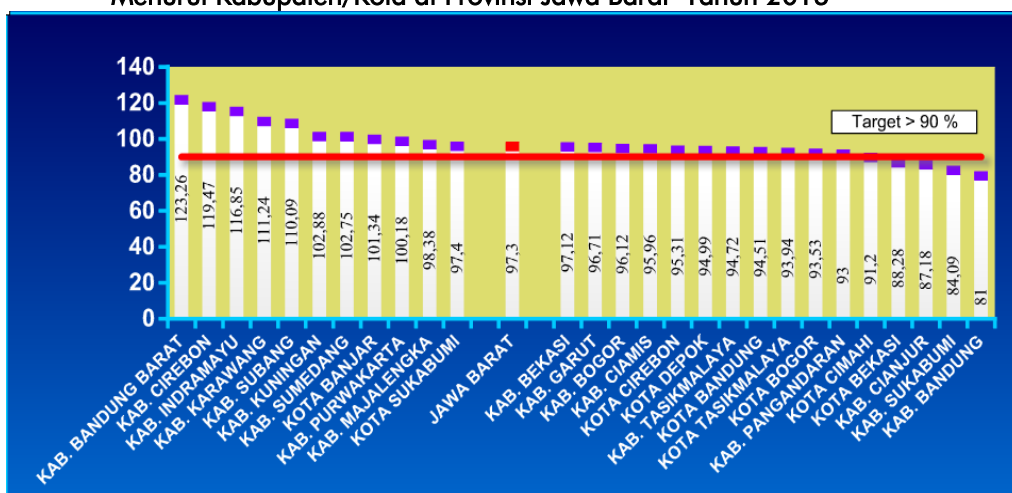
Gambar VII. A. 7
Pelayanan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2016



Sumber : Tabel Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

Apabila dibandingkan antara Kabupaten/Kota, pada tahun 2016 terdapat 23 Kabupaten/Kota yang mempunyai cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan $\geq 90\%$ dan 4 Kabupaten/Kota belum mencapai target, yaitu Kab Bandung, Kab Sukabumi, Kab Cianjur dan Kota Bekasi, untuk lebih jelasnya dapat melihat pada gambar dibawah ini.

Gambar VII. A. 8
Pelayanan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



b. Persalinan Mendapatkan Pelayan Kesehatan Nifas

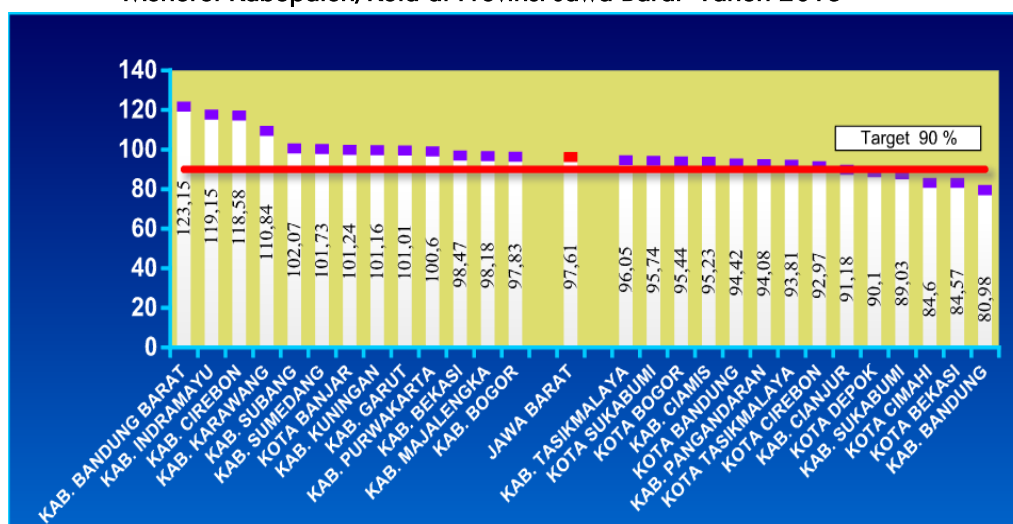
Cakupan pelayanan nifas adalah pelayanan kepada ibu dan neonatal pada masa 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan sesuai standar,

yaitu pelayanan kepada ibu nifas sedikitnya 3 kali, pada 6 jam pasca persalinan s.d 3 hari; pada minggu ke II, dan pada minggu ke VI termasuk pemberian Vitamin A 2 kali serta persiapan dan/atau pemasangan KB Paska Persalinan.

Dalam pelaksanaan pelayanan nifas dilakukan juga pelayanan neonatus sesuai standar sedikitnya 3 kali, pada 6-24 jam setelah lahir, pada 3-7 hari dan pada 28 hari setelah lahir yang dilakukan difasilitas kesehatan maupun kunjungan rumah.

Pelayanan kesehatan neonatal adalah pelayanan kesehatan neonatal dasar (ASI eksklusif, pencegahan infeksi berupa perawatan mata, tali pusat, pemberian vitamin K1 injeksi bila tidak diberikan pada saat lahir, pemberian imunisasi hepatitis B1 (bila tidak diberikan pada saat lahir), manajemen terpadu bayi muda. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan nifas yang professional.

Gambar VII. A. 9
Cakupan Ibu Bersalin Mendapat Pelayanan Kesehatan Nifas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



Cakupan Ibu Bersalin/Nifas yang mendapat pelayanan Kesehatan sesuai standar sebanyak 909.159 orang atau 97,61% dari perkiraan jumlah Ibu Bersalin/Nifas di Jawa Barat, angka ini secara teknis program telah mencapai target yang besarnya ditetapkan 90%, walaupun demikian masih terdapat 4 Kab/Kota yang belum mencapai target yaitu: Kab Bandung, Kota Bekasi, Kota Cimahi dan Kab Sukabumi.

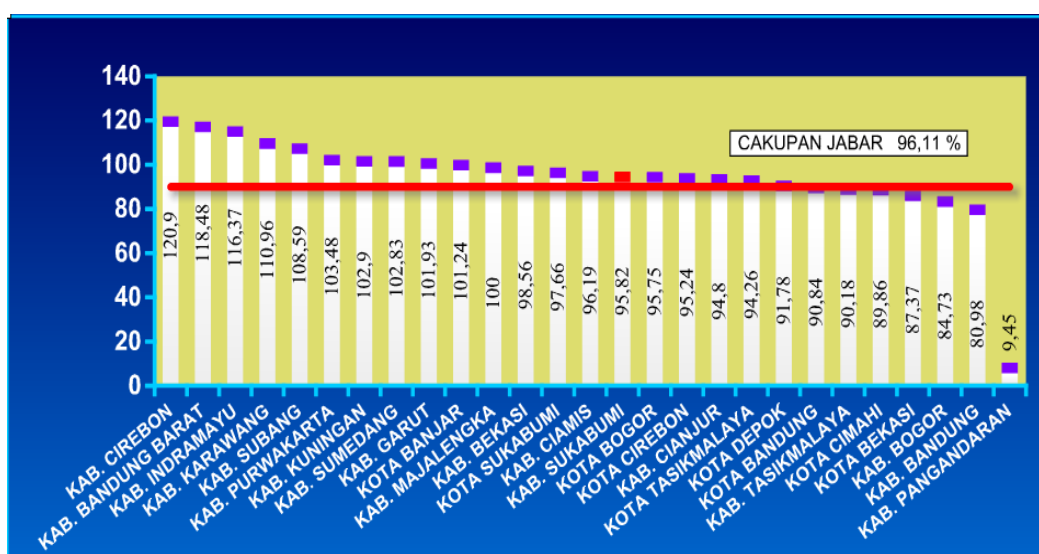
c. Pelayanan Pemberian Vitamin A pada Ibu Bersalin/Nifas

Pemberian kapsul vitamin A untuk ibu nifas memiliki manfaat penting bagi ibu dan bayi yang disusunya, selain untuk meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan kelangsungan hidup anak juga dapat membantu pemulihan kesehatan ibu.

Vitamin A merupakan unsur esensial untuk pembentukan rhodopsin. Rhodopsin adalah pigmen yang memungkinkan mata untuk dapat melihat dalam cahaya remang-remang. Pigmen ini akan terurai jika ada cahaya terang. Regenerasi rhodopsin dapat terjadi dan memerlukan vitamin A, meningkatkan kandungan vitamin A dalam ASI dan Kesehatan ibu cepat pulih setelah melahirkan.

Waktu pemberian dan dosis kapsul vitamin A pada ibu nifas yaitu, kapsul vitamin A merah (200.000 IU) diberikan pada masa nifas sebanyak 2 kali yaitu, satu kapsul diberi segera setelah persalinan, dan satu kapsul kedua diminum 12 jam sesudah pemberian kapsul yang pertama. Jika sampai 12 jam setelah melahirkan ibu tidak mendapatkan vitamin A, maka dapat diberikan pada kunjungan ibu nifas atau pada KN 1 (6-48 jam) atau saat imunisasi hepatitis B (HB0) atau pada KN 2 (bayi berumur 3-7 hari) atau KN 3 (bayi berumur 8-28 hari).

Gambar VII. A. 10
Cakupan Pemberian Vitamin A Pada Ibu Bersalin / Nifas
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



Pelayanan Ibu Bersalin/Nifas mendapat Vit A mencapai 96,11% dari perkiraan Jumlah Ibu Bersalin/Nifas, terdapat 12 Kab/Kota yang cakupannya dibawah rata rata yaitu : Kab Pangandaran, Kab Bandung, Kab Bogor, Kota Bekasi, Kota Cimahi, Kab Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Depok, Kota Tasikmalaya, Kab Cianjur, Kota Cirebon, dan Kota Bogor.

Berdasarkan Riskesdas 2013 Persentase tempat ibu melahirkan menurut karakteristik tempat tinggal dan status ekonomi, di pedesaan umumnya persalinan dilakukan di rumah/lainnya, sedangkan di perkotaan melahirkan di fasilitas kesehatan lebih banyak. Makin tinggi status ekonomi lebih memilih tempat persalinan di fasilitas kesehatan, sebaliknya untuk makin rendah status ekonomi, persentase persalinan di rumah makin besar.

Tabel VII. A. 1
Persentase Kelahiran Menurut Penolong Persalinan Menurut Kabupaten/Kota, di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013

No	Kabupaten/Kota	Dr.Kebid & Kandungan	Dokter Umum	Bidan	Perawat	Dukun	Keluarga / lainnya	Tidak ada penolong
1	Bogor	7.8	0,0	55.0	0,0	36.2	0,0	0.9
2	Sukabumi	4.7	0.6	70.8	0.6	22.1	0,0	1.2
3	Cianjur	4.3	0,0	49.5	0,0	44.4	0,0	1.9
4	Bandung	17.1	0.6	64.7	0.3	17.0	0,0	0.2
5	Garut	3.3	0,0	55.4	0.7	39.7	0.5	0.5
6	Tasikmalaya	2.2	0,0	60.9	0,0	35.6	1.3	0,0
7	Ciamis	11.2	0.4	82.8	1.3	4.3	0,0	0,0
8	Kuningan	22.2	0,0	77.8	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Cirebon	7.8	0,0	89.0	0,0	2.4	0,0	0.7
10	Majalengka	17.5	1.0	64.1	0,0	16.4	0,0	1.0
11	Sumedang	15.6	0,0	78.9	0,0	5.5	0,0	0,0
12	Indramayu	13.6	0,0	81.6	0,0	4.8	0,0	0,0
13	Subang	21.3	0,0	70.7	0,0	7.9	0,0	0,0
14	Purwakarta	13.8	0.8	58.3	0,0	26.7	0,0	0.4
15	Karawang	11.2	0,0	86.9	0,0	2.0	0,0	0,0
16	Bekasi	22.6	0,0	71.9	0.4	5.0	0,0	0,0
17	Bandung Barat	13.7	0,0	56.6	0,0	28.3	0,0	1.4
18	Kota Bogor	13.1	0.9	69.2	1.1	14.2	1.1	0.4
19	Kota Sukabumi	19.8	0.7	70.3	0,0	9.1	0,0	0,0
20	Kota Bandung	24.8	0.8	69.0	0,0	4.6	0,0	0.7
21	Kota Cirebon	34.9	0,0	64.8	0,0	0.3	0,0	0,0
22	Kota Bekasi	22.0	0.7	72.8	0,0	3.5	0,0	1.0
23	Kota Depok	32.4	1.8	60.2	0,0	5.6	0,0	0,0
24	Kota Cimahi	23.5	0,0	69.0	0,0	5.6	0,0	1.9
25	Kota Tasikmalaya	9.1	0,0	79.3	0,0	11.6	0,0	0,0
26	Kota Banjar	11.5	1.5	84.3	0,0	2.7	0,0	0,0
	Jawa Barat	14.3	0.4	67.0	0.2	17.5	0.1	0.6

Sumber : Riskesdas Tahun 2013

Riskesdas 2013 menunjukkan bahwa persalinan oleh penolong linakes (persalinan dengan tenaga kesehatan) kualifikasi tertinggi sebesar 81,6%, dengan rincian 14,3% oleh dokter spesialis kebidanan dan kandungan, 0,4 %

oleh dokter umum, 67% oleh bidan, dan 0,2% oleh perawat, sedangkan penolong persalinan oleh dukun sebesar 17,5% dan 0,1% penolong lainnya. Terlihat bahwa secara umum bidan merupakan tenaga utama sebagai penolong persalinan di Jawa Barat. Kabupaten Cirebon dan Kota Depok merupakan kabupaten/kota dengan penolong persalinan kualifikasi tertinggi oleh dokter spesialis mencapai 34,9% dan 32,4% merupakan proporsi paling tinggi dibanding kabupaten/kota lainnya.

Tempat persalinan yang ideal adalah melahirkan di institusi kesehatan. Secara umum, 66,4% kelahiran yang terjadi di fasilitas kesehatan dengan rincian, 16,5% di rumah sakit (baik pemerintah maupun swasta) dan 43,9% dilahirkan di rumah bersalin, klinik, praktek dokter/praktek bidan; 5,0% di puskesmas/pustu; dan 1,1% di poskesdes/polindes. Terdapat 33,6% masih melahirkan di rumah/lainnya. Kabupaten/kota dengan cakupan persalinan di rumah tinggi adalah Kabupaten Cianjur (72,2%), Kabupaten Garut (70,9%), dan Kabupaten Tasikmalaya (62,3%). Sementara Kota Cirebon, Kota Bandung, dan Kota Bekasi merupakan kabupaten/kota dengan cakupan persalinan di rumah terendah, masing-masing secara berturut-turut (0,3%, 7,7%, dan 8,4%).

Setelah melahirkan, ibu masih perlu mendapat perhatian. Masa nifas masih berisiko mengalami pendarahan atau infeksi yang dapat mengakibatkan kematian ibu. Berdasarkan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota cakupan pelayanan ibu nifas (KF) pada tahun 2016 telah mencapai 97,6%, terdapat 14 Kabupaten/Kota yang cakupannya dibawah cakupan Provinsi 97,6%. Kab Bandung, Kota Bekasi, Kota Cimahi, Kab Sukabumi, Kota Depok, Kab Cianjur, Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, Kab Pangandaran, Kota Bandung, Kab Ciamis, Kota Bogor, Kota Sukabumi dan Kab Tasikmalaya.

B. UPAYA PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

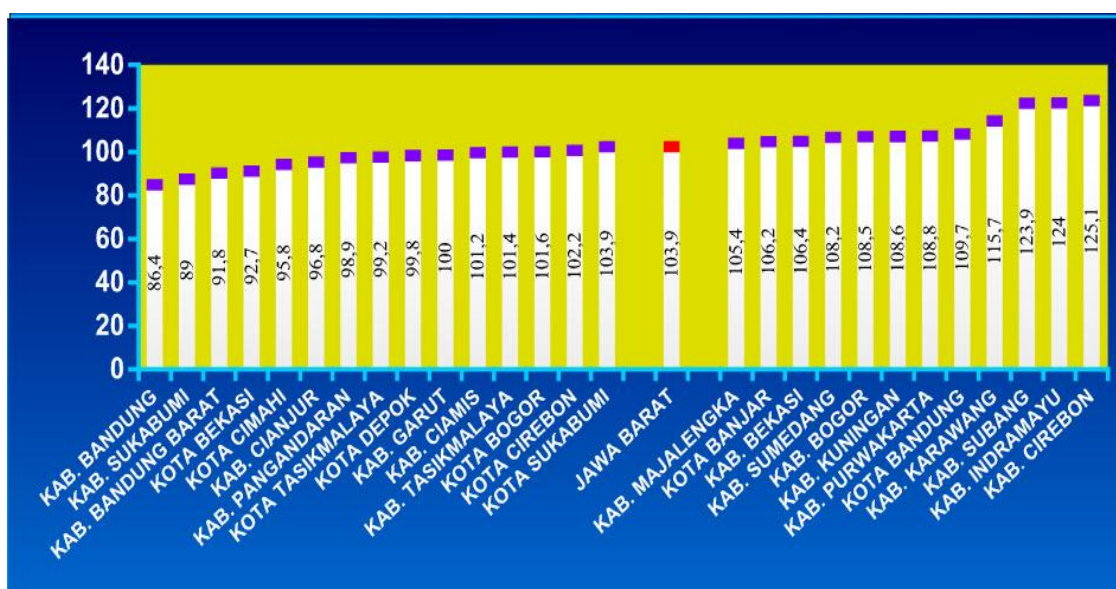
1. Berat Badan Lahir Bayi

Berat badan lahir bayi adalah berat badan bayi yang di timbang dalam waktu satu jam pertama setelah lahir. Jika dilihat dari hubungan antara waktu kelahiran dengan umur kehamilan, kelahiran bayi dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok : *Pertama*, yakni kelompok bayi kurang bulan (prematuur), yaitu bayi yang dilahirkan dengan masa gestasi (kehamilan) <37 minggu (<259 hari).

Kedua, bayi cukup bulan, yaitu bayi yang dilahirkan dengan masa gestasi antara 37-42 minggu (259 - 293 hari). *Ketiga*, adalah bayi lebih bulan, ialah bayi yang dilahirkan dengan masa gestasi >42 minggu (>294 hari).

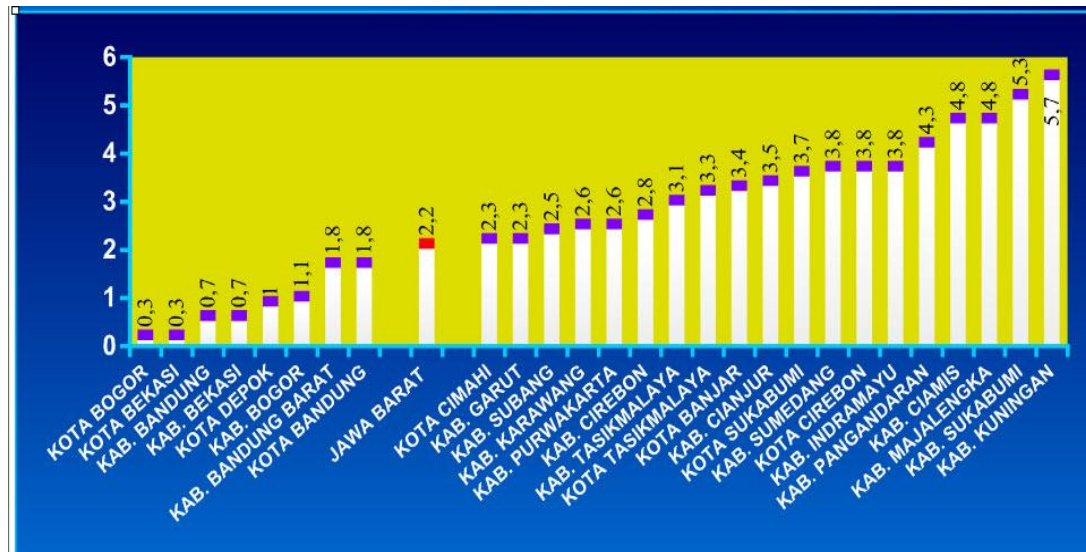
Pelayanan penimbangan bayi baru lahir di Jawa Barat tahun 2016 sebanyak 921.521 orang, atau 103,9% dari perkiraan jumlah lahir hidup, berikut gambaran penimbangan bayi baru lahir berdasarkan lokasi/tempat penimbangan :

Gambar VII. B. 1
Cakupan Berat Badan Lahir Bayi
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015



Dari penimbangan tersebut ditemukan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) ialah bayi baru lahir yang berat badannya saat lahir kurang dari 2500 gram. BBLR tidak hanya dapat terjadi pada bayi prematur, tapi juga pada bayi cukup bulan yang mengalami hambatan pertumbuhan selama kehamilan, sebaran BBLR di Jawa Barat dapat dilihat dalam gambar ini.

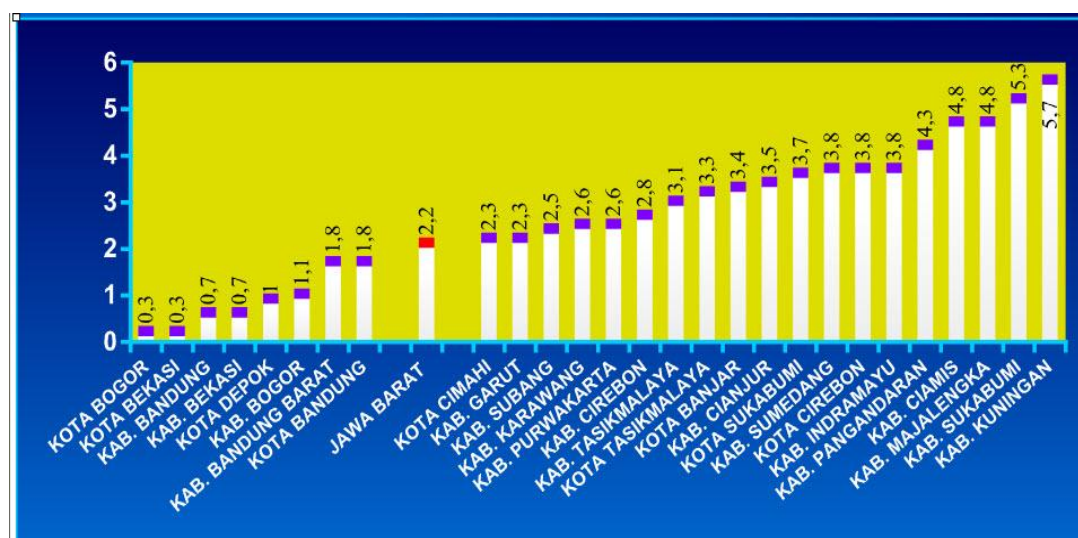
Gambar VII. B. 2
Cakupan Berat Badan Lahir Bayi
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



Prosentasi BBLR antara 0,1 – 5,7 , dan BBLR Jawa Barat sebesar 2,2% dari jumlah bayi yang ditimbang , jumlah tertinggi Berat Badan lahir Rendah terdapat di Kab Kuningan (5,7%) , dan terendah di Kota Bogor (03%). Masalah BBLR terutama pada kelahiran prematur terjadi karena ketidakmatangan sistem organ pada bayi tersebut. Bayi berat lahir rendah mempunyai kecenderungan ke arah peningkatan terjadinya infeksi dan mudah terserang komplikasi. Masalah pada BBLR pada umumnya sering terjadi akibat gangguan pada sistem pernafasan, susunan saraf pusat, kardiovaskular, hematologi, gastro intestinal, ginjal, dan termoregulasi. Penyebab lainnya Berat Badan Lahir Rendah bisa terjadi karena faktor genetik, mulai dari orang tuanya yang memang kecil atau pendek. Dapat juga disebabkan karena masalah plasenta seperti pre-eklampsia, atau kurangnya aliran darah menuju ke bayi selama kehamilan. Semua itu dapat menyebabkan pertumbuhan bayi menjadi terhambat karena tidak mendapat asupan oksigen dan nutrisi yang cukup. Selain masalah plasenta, aliran darah ke bayi juga bisa dipengaruhi oleh tekanan darah tinggi yang dimiliki oleh seorang ibu, beberapa kondisi kesehatan dan masalah emosional yang juga dapat memperlambat pertumbuhan bayi diantaranya adalah Ibu tidak memakan makanan yang bergizi selama kehamilan, memiliki penyakit kronis seperti jantung, paru-paru, ginjal, atau diabetes, stres berat selama kehamilan,

menggunakan obat-obatan terlarang seperti kokain atau heroin, banyak minum alkohol, merokok selama kehamilan atau Ibu memiliki masalah dengan kesehatan seperti infeksi saluran kemih atau infeksi rahim yang tidak diobati. Upaya yang bisa dilakukan untuk mempertahankan kesehatan bayi baru lahir dengan mengupayakan penanganan komplikasi akibat infeksi.

Gambar VII. B. 3
Cakupan Berat Badan Lahir Bayi
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



2. Penanganan Komplikasi Neonatal (Bayi Baru Lahir)

Penanganan Neonatal dengan komplikasi adalah neonatal dengan penyakit dan atau kelainan yang dapat menyebabkan kecacatan dan atau kematian, seperti *asfiksia*, ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum, infeksi/sepsis, trauma lahir, BBLR, sindroma gangguan pernafasan, dan kelainan kongenital maupun yang termasuk klasifikasi kuning dan merah pada pemeriksaan dengan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM).

Komplikasi yang menjadi penyebab kematian terbanyak yaitu asfiksia, bayi berat lahir rendah, dan infeksi (Risksdas, 2007). Komplikasi ini sebetulnya dapat dicegah dan ditangani, namun terkendala oleh akses ke pelayanan kesehatan, kemampuan tenaga kesehatan, keadaan sosial ekonomi, sistem rujukan yang belum berjalan dengan baik, terlambatnya deteksi dini, dan kesadaran orang tua untuk mencari pertolongan kesehatan.

Upaya penanganan neonatal dengan komplikasi dengan melakukan penanganan terhadap neonatal sakit dan atau neonatal dengan kelainan atau

komplikasi/kegawatdaruratan, harus mendapat pelayanan sesuai standar oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan atau perawat) terlatih baik di rumah, di sarana pelayanan kesehatan dasar maupun di sarana pelayanan kesehatan rujukan. Yang dimaksud Pelayanan sesuai standar antara lain sesuai dengan standar MTBM, manajemen Asfiksia Bayi Baru Lahir, manajemen Bayi Berat Lahir Rendah, pedoman pelayanan neonatal essensial ditingkat pelayanan kesehatan dasar, PONED, PONEK atau standar operasional pelayanan lainnya, berikut gambaran cakupan kunjungan Neonatal di Jawa Barat.

Gambar VII. B. 4
Cakupan Kunjungan Neonatus (KN)
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2016

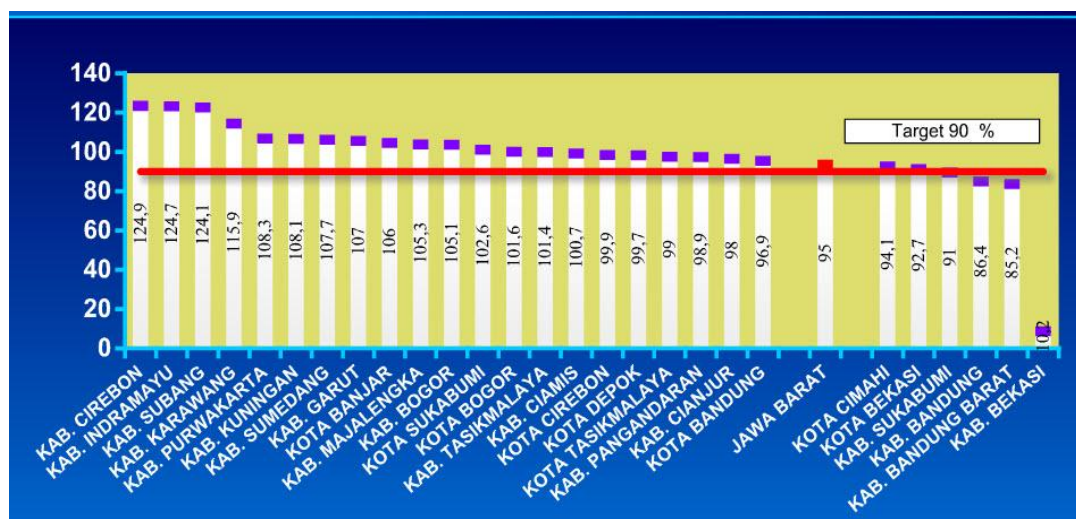


Sumber : Profil Kesehatan Tahun 2016

Cakupan kunjungan neonatal (KN) adalah persentase neonatal (bayi kurang dari satu bulan) yang memperoleh pelayanan kesehatan minimal 3 kali dari tenaga kesehatan sesuai standar, satu kali pada umur 6-48 Jam, satu kali pada umur 3-7 hari dan 1 kali pada umur 8 – 28 hari. Angka ini menunjukkan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan neonatal disuatu wilayah, hal ini karena bayi hingga umur kurang dari 1 bulan mempunyai resiko gangguan kesehatan yang paling tinggi.

Selama periode tahun 2008 – 2016 Cakupan Kunjungan Neonatal di Jawa Barat cenderung meningkat, dari 82,02 % pada tahun 2008 menjadi 98,5 % pada tahun 2016. Sedangkan sebaran cakupan kunjungan neonatal di kabupaten/ kota dapat dilihat seperti gambar dibawah ini :

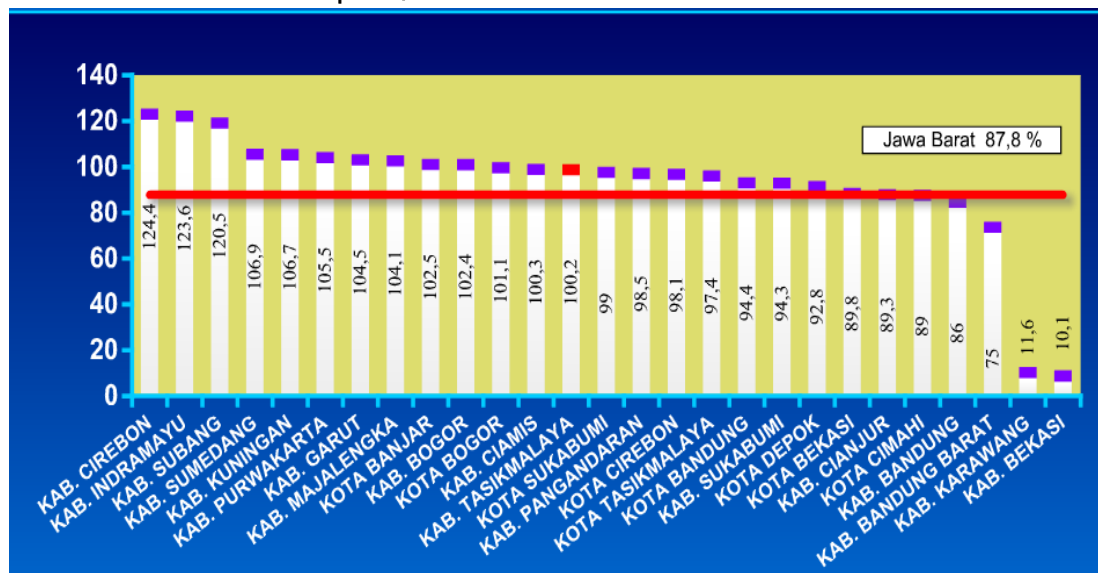
Gambar VII. B. 5
Cakupan Kunjungan Neonatus (KN1)
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



Cakupan kunjungan KN1 yang besarnya $\geq 90\%$ terdapat di 24 Kabupaten/Kota, dan hanya 3 Kabupaten/Kota $\leq 90\%$ yaitu Kab.Bekasi 10,2%, Kab Bandung Barat 85,2%, dan Kab Bandung 91%, data cakupan di Kab. Bekasi merupakan pencilan sehingga perlu ditelusuri kembali catatan pelaporannya.

Setiap bayi baru lahir sebaiknya mendapatkan semua kunjungan neonatus sebanyak 3 kali dan dinyatakan kunjungan neonatus lengkap (KN1, KN2, KN3). Berikut gambaran cakupan KN lengkap :

Gambar VII. B. 6
Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap (KN)
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



cakupan KN 3 (KN Lengkap) mencapai 87,8 % turun dibanding cakupan KN1 sebesar 95 % atau 63.981 orang tidak melanjutkan pemeriksaan sampai ke KN3.

3. Pelayanan Kesehatan Bayi

Kunjungan bayi bertujuan untuk meningkatkan akses bayi terhadap pelayanan kesehatan dasar, mengetahui sedini mungkin bila terdapat kelainan pada bayi sehingga cepat mendapat pertolongan, pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit melalui pemantauan pertumbuhan, imunisasi, serta peningkatan kualitas hidup bayi dengan stimulasi tumbuh kembang dengan demikian hak anak mendapatkan kesehatan terpenuhi.

Kesehatan bayi dan balita harus selalu dipantau untuk memastikan kesehatan mereka selalu dalam kondisi optimal. Pelayanan kesehatan bayi termasuk salah satu dari beberapa indikator yang bisa menjadi ukuran keberhasilan upaya peningkatan kesehatan bayi dan balita.

Pelayanan kesehatan pada bayi ditujukan pada bayi usia 29 hari sampai dengan 11 bulan dengan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi klinis kesehatan (dokter, bidan, dan perawat) minimal empat kali, yaitu pada usia 29 hari–2 bulan, usia 3–5 bulan, usia 6–8 bulan dan usia 9–12 bulan. Pelayanan ini terdiri dari penimbangan berat badan, pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB1-3, Polio 1-4, DPT HB 123 dan Campak), Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) bayi, pemberian vitamin A pada bayi (6-11 bulan), penyuluhan perawatan kesehatan bayi serta penyuluhan ASI Eksklusif dan pemberian makanan pendamping ASI (MP ASI).

Dalam kurun waktu tahun 2008–2015 Persentase cakupan kunjungan bayi terhadap jumlah perkiraan bayi di Jawa Barat cenderung meningkat dari 73,3% pada tahun 2008 menjadi 102,2% pada tahun 2016 seperti dalam gambar berikut ini.

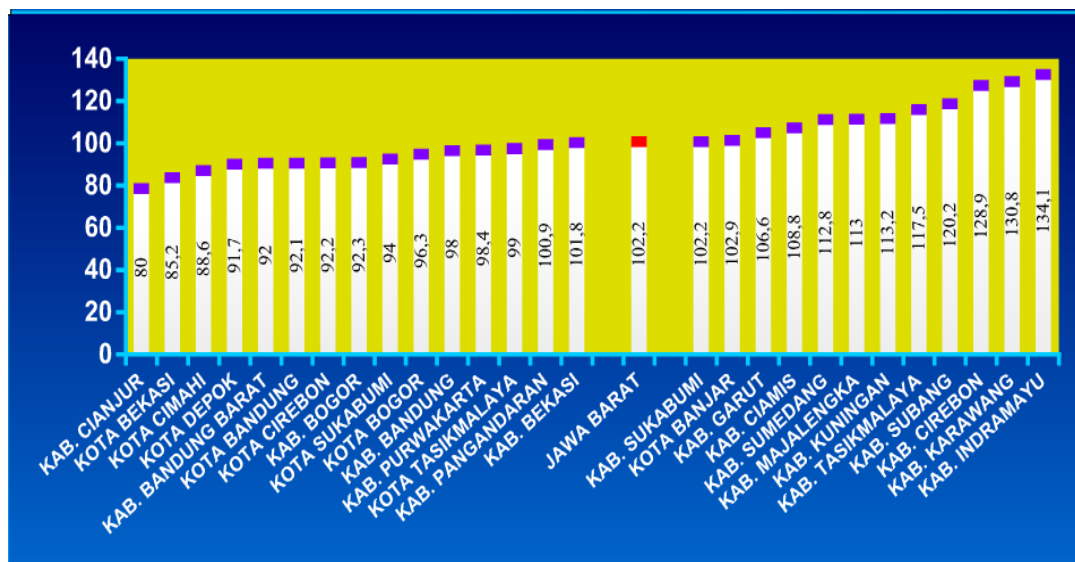
Gambar VII. B. 7
Cakupan Kunjungan Bayi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2016



Sumber: Profil Kesehatan Tahun 2008-2015

Berdasarkan sebaran lokasi apabila dibandingkan antar Kabupaten/Kota cakupan kunjungan bayi di Jawa Barat tahun 2016 antara 80,0 % – 134,1%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar VII. B. 8
Cakupan Kunjungan Bayi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



Cakupan target pelayanan kesehatan bayi sebesar 90%, capaian Jawa Barat sebesar 102,2%, terdapat 3 Kabupaten/Kota yang belum mencapai target (90%), yaitu Kab. Cianjur, Kota Bekasi dan Kota Cimahi.

4. Pemberian ASI Eksklusif

Dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan kematian anak, *United Nation Childrens Fund* (UNICEF) dan *World Health Organization* (WHO) merekomendasikan sebaiknya anak hanya disusui air susu ibu (ASI) selama paling sedikit enam bulan. Makanan padat seharusnya diberikan sesudah anak berumur 6 bulan, dan pemberian ASI dilanjutkan sampai anak berumur dua tahun (WHO, 2005). Pada tahun 2003 pemerintah Indonesia mengubah rekomendasi lamanya pemberian ASI eksklusif dari 4 bulan menjadi 6 bulan.

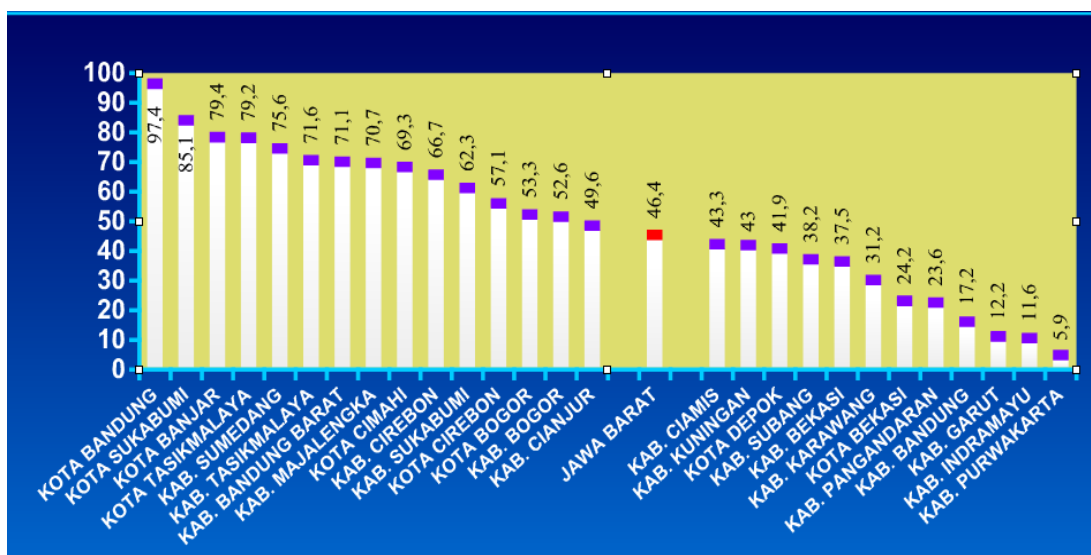
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Air Susu Ibu (ASI) eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama enam bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain (kecuali obat, vitamin dan mineral). Pengaturan pemberian ASI eksklusif bertujuan untuk :

- 1) Menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia enam bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
- 2) Memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI eksklusif kepada bayinya; dan
- 3) Meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah terhadap ASI eksklusif.

ASI mengandung kolostrum yang kaya akan antibodi karena mengandung protein untuk daya tahan tubuh dan pembunuh kuman dalam jumlah tinggi sehingga pemberian ASI eksklusif dapat mengurangi risiko kematian pada bayi. Kolostrum berwarna kekuningan dihasilkan pada hari pertama sampai hari ketiga. Hari keempat sampai hari kesepuluh ASI mengandung immunoglobulin, protein, dan laktosa lebih sedikit dibandingkan kolostrum tetapi lemak dan kalori lebih tinggi dengan warna susu lebih putih. Selain mengandung zat-zat makanan, ASI juga mengandung zat penyerap berupa enzim tersendiri yang tidak akan mengganggu enzim di usus.

Susu formula tidak mengandung enzim sehingga penyerapan makanan tergantung pada enzim yang terdapat di usus bayi. Berikut gambaran pemberian ASI eksklusif di Jawa Barat :

Gambar VII. B. 9
Cakupan ASI Eksklusif Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



Pemberian ASI eksklusif di Jawa Barat sebanyak 349.968 Bayi umur 0-6 bulan dari 754.438 jumlah bayi 0-6 bulan (46,4%) gambaran ini masih dibawah cakupan nasional 52,3% terlebih Target nasional sebesar 80%, walaupun demikian terdapat 2 Kab/Kota yang telah melampaui target nasional, yaitu Kota Bandung 97,4% dan Kota Sukabumi 85,1%.

5. Pemberian Kapsul Vitamin A pada Balita

Suplementasi kapsul Vitamin A pada anak umur 6-59 bulan dan ibu nifas bertujuan tidak hanya untuk pencegahan kebutaan tetapi juga untuk penanggulangan Kurang Vitamin A (KVA). Penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa pemberian suplementasi kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun pada balita merupakan salah satu intervensi kesehatan yang berdaya ungkit tinggi bagi pencegahan kekurangan vitamin A dan kebutaan serta penurunan kejadian kesakitan dan kematian pada balita.

Vitamin A adalah salah satu zat gizi penting yang larut dalam lemak disimpan dalam hati, dan tidak dapat diproduksi oleh tubuh sehingga harus dipenuhi dari luar tubuh. Manfaat vitamin A diantaranya

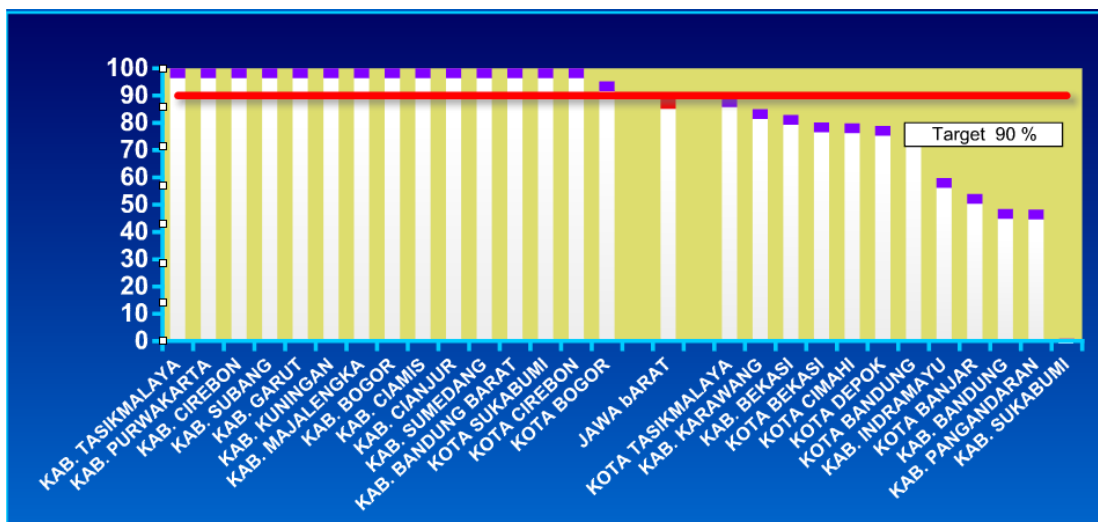
- 1) Meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit dan infeksi seperti campak dan diare.

- 2) Membantu proses penglihatan dalam adaptasi terang ke tempat yang gelap.
- 3) Mencegah kelainan pada sel-sel epitel termasuk selaput lendir mata.
- 4) Mencegah terjadinya proses metaplasia sel-sel epitel sehingga kelenjar tidak memproduksi cairan yang dapat menyebabkan kekeringan mata.
- 5) Mencegah terjadinya kerusakan mata hingga kebutaan, dan
- 6) Vitamin A esensial untuk membantu proses pertumbuhan.

Kekurangan Vitamin A (KVA) biasa terjadi pada anak yang menderita kurang energi protein atau gizi buruk tetapi dapat juga terjadi karena gangguan penyerapan pada usus. Tahap awal KVA ditandai dengan gejala rabun senja atau kurang jelas melihat pada malam hari atau menurunnya kadar serum retinol dalam darah. Selanjutnya terdapat kelainan jaringan epitel pada paru-paru, usus, kulit, dan mata. Penanggulangan masalah KVA pada anak balita sudah dilaksanakan secara intensif sejak tahun 1970-an, melalui distribusi kapsul vitamin A di posyandu setiap enam bulan yaitu bulan Februari dan Agustus dan peningkatan promosi konsumsi makanan sumber vitamin A. Ada dua jenis vitamin A yang diberikan, yaitu yang berwarna biru (100.000 IU) untuk bayi usia 6-11 bulan dan yang berwarna merah (200.000 IU) untuk anak usia 12-59 bulan.

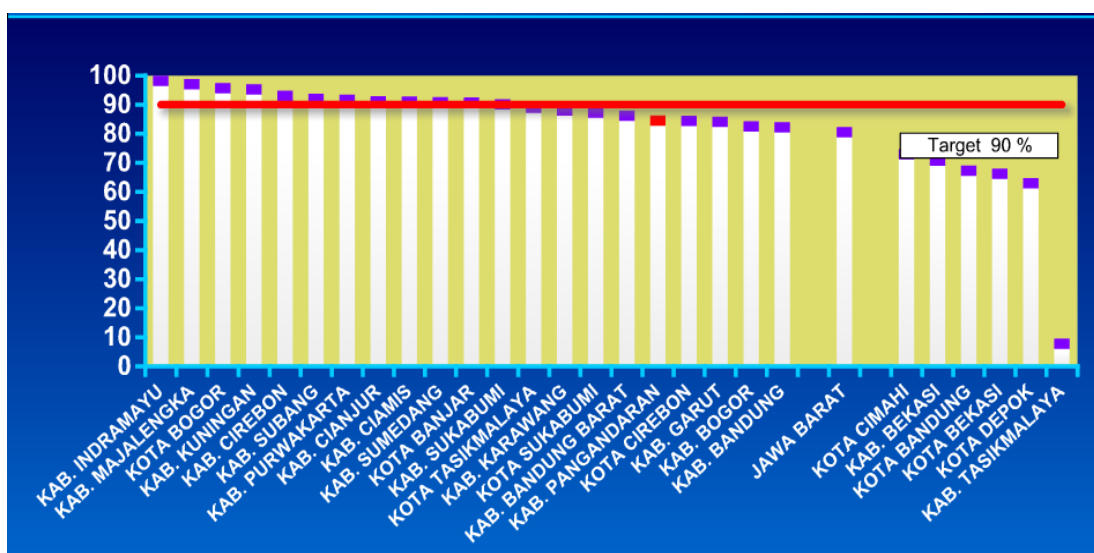
Jumlah Pemberian Vitamin A pada Bayi usia 6-11 bulan sebanyak 769.356 atau 87,97% dari Jumlah Bayi, capaian ini belum mencapai target 90%, walaupun demikian terdapat 15 Kab/Kota yaitu : Kab Tasikmalaya, Kab Purwakarta, Kab Cirebon, Kab Subang, Kab Garut, Kab Kuningan, Kab Majalengka, Kab Bogor, Kab Ciamis, Kab Cianjur, Kab Sumedang, Kab Bandung Barat, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, dan Kota Bogor.

Gambar VII. B. 10
Cakupan Kapsul Vitamin A Pada Bayi (6-11 bulan) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



Jumlah Pemberian Vitamin A pada anak balita usia 12-59 bulan sebanyak 2.854.519 atau 81,62% dari Jumlah anak balita, capaian ini belum mencapai target 90%, walaupun demikian terdapat 12 Kab/Kota yang sudah mencapai target yaitu : Kab Indramayu, Kab Majalengka, Kota Bogor, Kab Kuningan, Kab Cirebon, Kab Subang, Kab Purwakarta, Kab Cianjur, Kab Ciamis, Kab Subang, Kota Banjar, dan Kab Sukabumi.

Gambar VII. B. 11
Cakupan Kapsul Vitamin A Pada Anak Balita (12-59 bulan) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



6. Pelayanan Imunisasi

Program imunisasi merupakan salah satu program prioritas yang dinilai sangat efektif untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi akibat penyakit-penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi.

1) Cakupan UCI Desa/Kelurahan

Indikator program imunisasi salah satunya adalah Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai “*Universal Child Immunization*” (UCI). Desa yang mencapai UCI adalah desa/kelurahan yang cakupan imunisasi dasar $\geq 80\%$.

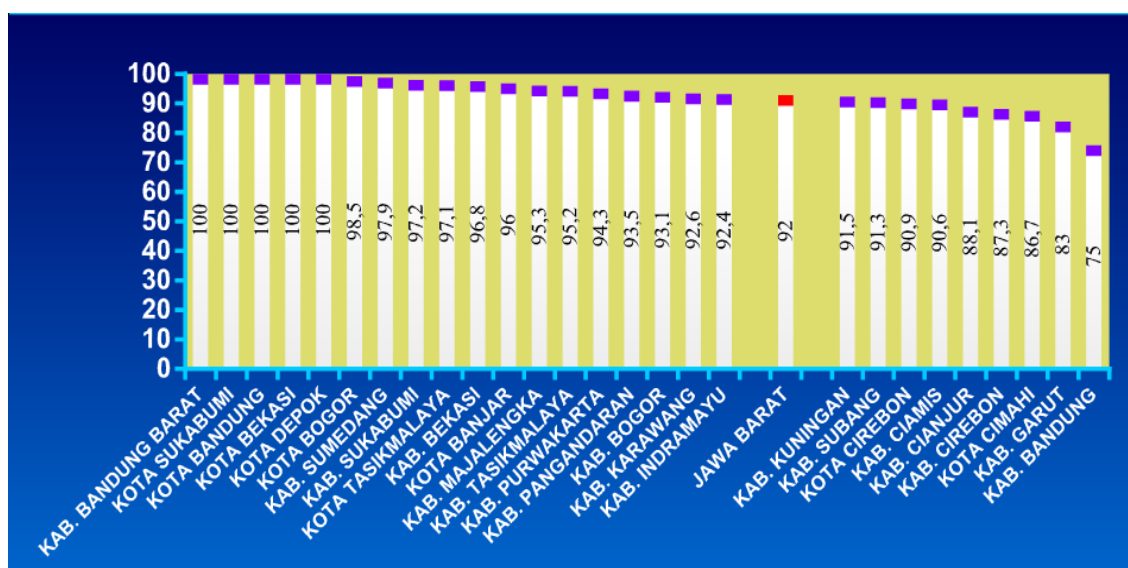
Gambar VII. B. 12
Cakupan Desa/Kelurahan UCI
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2016



Sumber: Profil Kesehatan dan Bidang Bina PLPP tahun 2008-2016

Cakupan desa/kelurahan UCI di provinsi Jawa Barat sejak tahun 2008 sampai dengan 2016 cenderung meningkat dari 66 % pada tahun 2008 menjadi 92 % pada tahun 2016, jika dibandingkan dengan tahun 2015 naik 1,5 poin secara rinci per-Kabupaten/Kota dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar VII. B. 13
Cakupan Desa/Kelurahan UCI Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota tahun 2016

Pada tahun 2016 cakupan desa/kelurahan UCI, sebanyak 5.483 desa/kelurahan dari 5.962 yang ada di Jawa Barat (92%), tersebar di 27 Kabupaten/Kota dengan cakupan antara 75%-100%, Kab/Kota yang cakupannya masih dibawah rata rata Provinsi adalah Kab Bandung, Kab Garut, Kota Cimahi, Kab Cirebon, Kab Cianjur, Kab Ciamis, Kota Cirebon, Kab Subang dan Kab Kuningan.

2) Imunisasi Dasar Pada Bayi

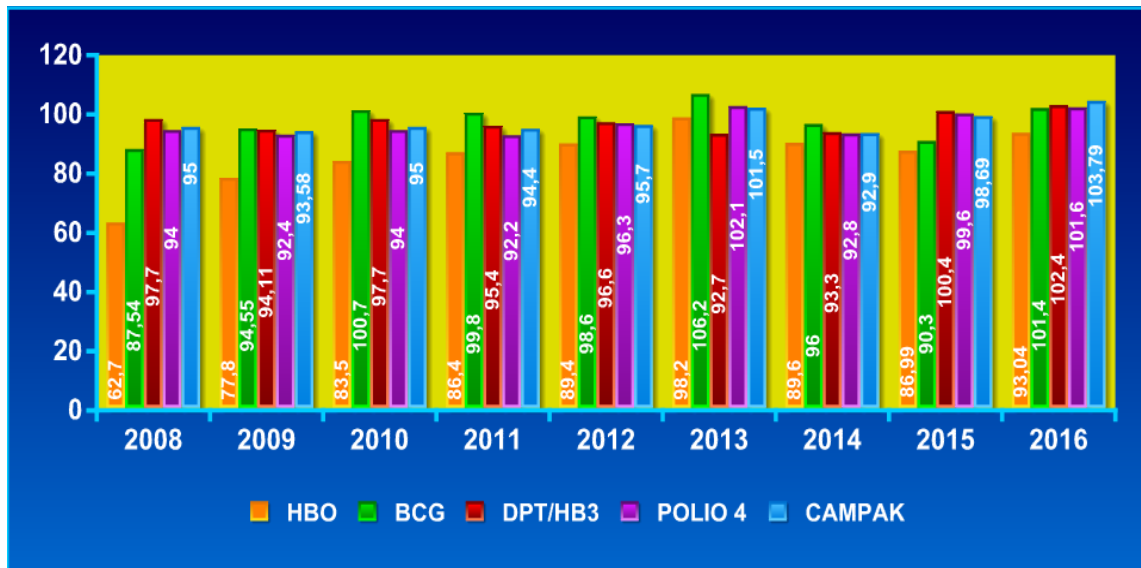
Imunisasi Dasar Bayi melindungi anak terhadap beberapa Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) seperti diptheri, pertusis, tetanus neonatorum, polio dan campak. Seorang anak diimunisasi dengan vaksin yang disuntikkan pada lokasi tertentu atau ditetaskan melalui mulut.

Sasaran program imunisasi adalah setiap bayi wajib mendapatkan imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-HB dan atau DPT-HB-Hib, 4 dosis polio, dan 1 dosis campak, dari imunisasi dasar lengkap yang diwajibkan tersebut, campak merupakan imunisasi yang mendapat perhatian lebih, hal ini sesuai komitmen Indonesia pada global untuk mempertahankan cakupan imunisasi campak sebesar 90%, Hal ini terkait dengan realita bahwa campak adalah salah satu penyebab

utama kematian pada balita. Dengan demikian pencegahan campak memiliki peran signifikan dalam penurunan angka kematian balita.

Secara umum cakupan Imunisasi di Provinsi Jawa Barat selama 8 tahun dapat digambarkan seperti dibawah ini :

Gambar VII. B. 14
Cakupan Imunisasi Dasar Bayi
di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2008 – 2016



Sumber : Profil Kesehatan Tahun 2008-2016

a) Pemberian imunisasi HBO (*Haemophilus influenza type B*)

Imunisasi HBO (*Haemophilus influenza type B*) diberikan satu kali kepada bayi usia baru lahir sampai <1 bulan. Bertujuan memberikan kekebalan tubuh bayi terhadap kemungkinan adanya infeksi virus *Haemophilus influenza type B*, yang bisa menyebabkan meningitis, pneumonia, dan epiglottitis (infeksi pada katup pita suara dan tabung suara).

Cakupan imunisasi HB < 7 hari selama tahun 2008 – 2016 berfluktuatif dari 62.7% pada tahun 2008 menjadi 98.2% pada tahun 2013, namun cenderung menurun hingga tahun 2015 cakupan hanya mencapai 86,99% dan pada tahun 2016 cakupan meningkat hingga mencapai 93,04%.

b) Pemberian Imunisasi BCG

Imunisasi BCG bertujuan untuk melindungi bayi dari kemungkinan risiko penyakit *tuberculosis*, diberikan satu kali, pada bayi berusia satu

bulan. Cakupan imunisasi BCG selama periode 2008 sampai dengan tahun 2015 antara 87,54% - 106,2%, dan pada tahun 2016 mencapai 101,04 % dari perkiraan sasaran.

c) Pemberian imunisasi DPT/HB3

Imunisasi DPT/HB3 merupakan upaya menurunkan risiko bayi terhadap kemungkinan infeksi penyakit diptheri, pertusis, tetanus neonatorum dan hepatitis B. Dosis pemberian imunisasi DPT/HB diberikan sebanyak 3 kali, masing-masing ketika bayi berusia 1 bulan sampai 4 bulan. Cakupan DPT/HB3 selama periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 antara 92,7% - 100,4%, pada tahun 2016 mencapai 102,4%. dari perkiraan sasaran.

d) Pemberian imunisasi polio

Imunisasi Polio diberikan kepada bayi dengan dosis sebanyak 4 kali. Pemberian vaksin polio diberikan secara oral. Diberikan mulai bayi 1 bulan sampai usia 4 bulan. Tujuan pemberian imunisasi polio adalah memberikan kekebalan kepada bayi terhadap infeksi virus polio liar penyebab penyakit polio (kelumpuhan). Strategi dalam upaya pencapaian sertifikasi bebas polio (eradikasi polio) dilakukan dengan upaya Pemberian imunisasi rutin polio, pemberian imunisasi massal (PIN) dan Surveilans AFP .

Cakupan imunisasi Polio4 di Jawa Barat selama periode tahun 2008 – 2015 selalu diatas 90% dengan kisaran 92.2%-102,1% cakupan tahun 2016 sebesar 101,6% dari perkiraan sasaran.

e) Pemberian imunisasi campak

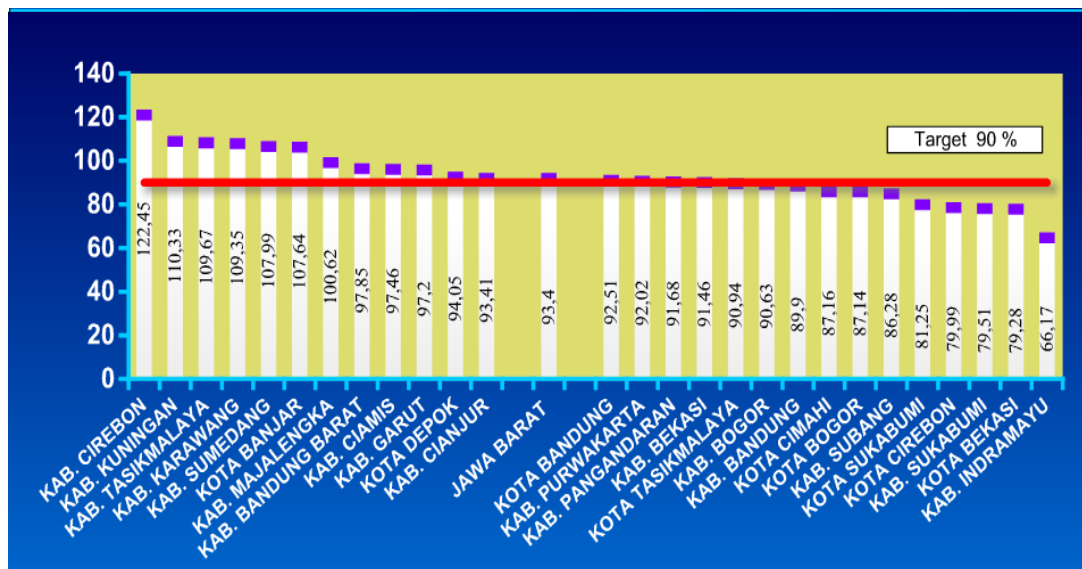
Imunisasi campak diberikan kepada bayi dengan dosis sebanyak satu kali dengan cara suntikan, ketika bayi berusia 9 bulan, merupakan vaksin terakhir yang diberikan pada pemberian imunisasi dasar. Tujuan pemberian imunisasi campak adalah untuk memberikan kekebalan kepada bayi terhadap infeksi virus campak penyebab penyakit campak. Strategi dalam upaya reduksi penyakit campak dengan cara Pemberian imunisasi rutin campak, pemberian imunisasi massal (PIN) dan surveilans campak.

Capaian imunisasi campak di Jawa Barat selama periode tahun 2008 - 2015 juga selalu mencapai diatas 90% antara 93,58% - 101,5%,

cakupan tahun 2016 mencapai 103,79%. Naik 5,10 poin dibanding 2015 yang mencapai 98,69 %.

Program imunisasi dasar pada bayi mengharapkan agar setiap bayi mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap, Keberhasilan seorang bayi dalam mendapatkan imunisasi dasar tersebut diukur melalui indikator imunisasi dasar lengkap. Cakupan imunisasi dasar lengkap di Jawa Barat tahun 2016 mencapai 93,4%, dari perkiraan jumlah sasaran, terdapat 7 Kab/Kota yang pencapaiannya melebihi jumlah Sasaran, akan tetapi terdapat 9 Kab/Kota yang tidak mencapai target sasaran yaitu : Kab Indramayu, Kota Bekasi, Kab Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kab Subang, Kota Bogor, Kota Cimahi, dan Kab Bandung. dan sisanya 11 Kab/Kota mencapai target dan tidak melebihi perkiraan sasaran.

Gambar VII. B. 15
Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

7. Pelayanan Kesehatan Anak Balita

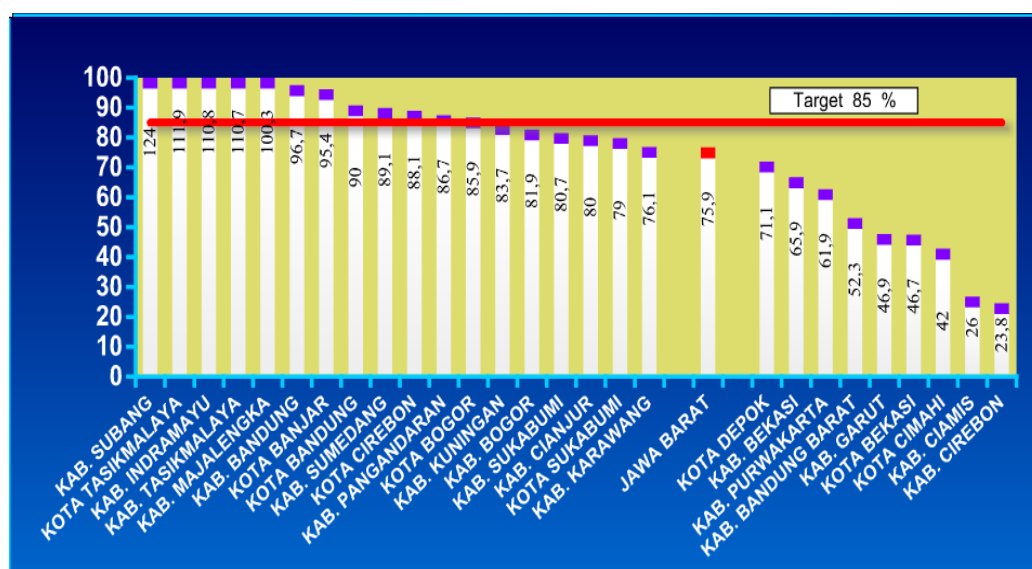
Kehidupan anak, usia dibawah lima tahun merupakan bagian yang sangat penting. Usia tersebut merupakan landasan yang membentuk masa depan kesehatan, kebahagiaan, pertumbuhan, perkembangan, dan hasil pembelajaran anak di sekolah, keluarga, masyarakat dan kehidupan secara umum. Kesehatan bayi dan balita harus dipantau untuk memastikan kesehatan mereka selalu dalam kondisi optimal. Untuk itu dipakai indikator-indikator

yang bisa menjadi ukuran keberhasilan upaya peningkatan kesehatan bayi dan balita, salah satu diantaranya adalah pelayanan kesehatan anak balita. Adapun batasan anak balita adalah setiap anak yang berada pada kisaran umur 12-59 bulan.

Pelayanan kesehatan pada anak balita yang dilakukan oleh tenaga kesehatan meliputi : Pelayanan pemantauan pertumbuhan, penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan, Pemberian vitamin A dua kali dalam setahun, Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang balita minimal dua kali dalam setahun, Pelayanan Anak Balita Sakit sesuai standar menggunakan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS).

Capaian pelayanan kesehatan anak balita minimal 8 kali pada tahun 2016 sebesar 75,9% dari target 85% , terdapat 15 Kab/Kota yang cakupannya dibawah 85 % yaitu : Kab Cirebon, Kab Ciamis, Kota Cimahi, Kota Bekasi, Kab Garut, Kab Bandung Barat, Kab Purwakarta, Kab Bekasi, Kota Depok, Kab Karawang, Kota Sukabumi, Kab Cianjur, Kab Sukabumi, Kab Bogor, dan Kab Kuningan.

Gambar VII. B. 16
Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Minimal 8 Kali
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



8. Pelayanan Kesehatan Pada Siswa Sekolah Dasar dan Setingkat

Anak usia sekolah merupakan generasi penerus sebagai sumber daya manusia masa datang dengan jumlah sekitar 20% dari jumlah penduduk

Indonesia, sehingga merupakan investasi bangsa yang potensial tetapi rawan karena berada dalam periode pertumbuhan dan perkembangan.

Melalui Trias UKS sumber daya manusia dapat ditingkatkan, Trias UKS adalah tiga program pokok dalam pembinaan dan pengembangan UKS, yaitu melalui pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sehat. Sedangkan dalam mewujudkan Trias UKS perlu melakukan 7 K (kesehatan, kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, keamanan, dan kerindangan).

Pelaksanaan UKS sangat penting untuk meningkatkan prestasi belajar dan kesehatan peserta didik. Kegiatan UKS harus menitikberatkan pada upaya promotif-preventif, dengan didukung upaya kuratif-rehabilitatif yang proporsional dan bermutu. Pelaksanaan UKS yang bermutu perlu dilaksanakan di semua sekolah, termasuk perguruan agama dan Pondok Pesantren, mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul Adfal (RA); Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI); Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs); hingga Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah(MA); serta Sekolah Luar Biasa (SLB).

Sejauh ini pelaksanaan UKS masih menitikberatkan pada pembinaan terhadap fisik gedung sekolah, seperti pengaturan pencahayaan dan ventilasi di ruang kelas, higiene dan sanitasi di kantin, kebersihan jamban, pengelolaan sampah serta saluran air limbah. Sedangkan pembinaan yang mengarah kepada pembentukan pola hidup sehat di kalangan peserta didik masih kurang.

Anak diharapkan dapat secara mandiri memilih makanan yang sehat baik di kantin sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari; mampu menolak ajakan teman sebaya untuk merokok; serta menolak ajakan mencoba narkoba atau melakukan hubungan seks pranikah.

Pentingnya kesehatan sekolah tertuang dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 pasal 79 yang berbunyi Kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, misalnya pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti menggosok gigi dengan baik dan benar, mencuci tangan

menggunakan sabun, karies gigi, kecacingan, kelainan refraksi/ketajaman penglihatan dan masalah gizi.

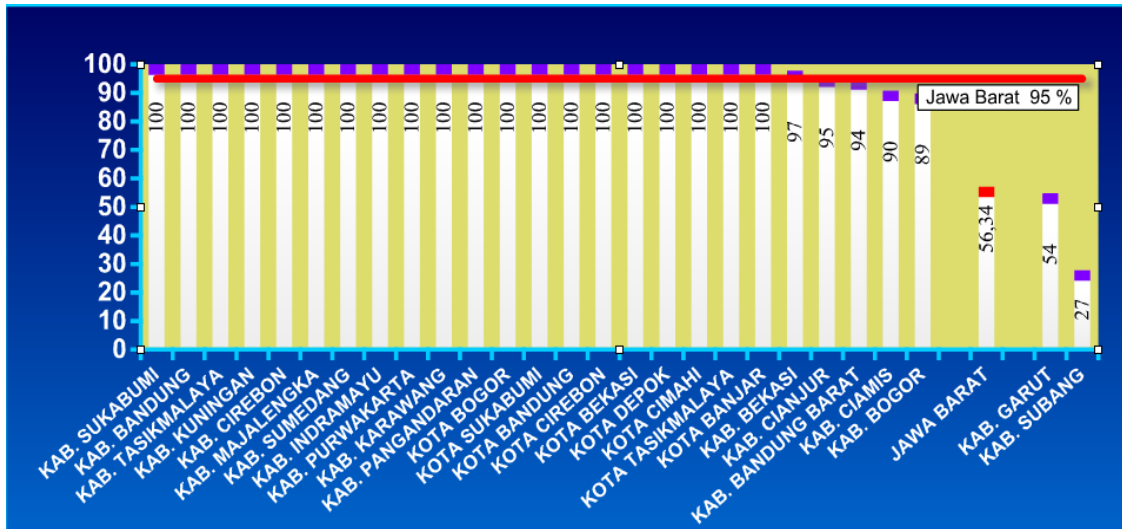
Pelayanan kesehatan pada anak termasuk pula intervensi pada anak usia sekolah. Anak usia sekolah merupakan sasaran yang strategis untuk pelaksanaan program kesehatan, karena selain jumlahnya yang besar, mereka juga merupakan sasaran yang mudah dijangkau karena terorganisir dengan baik. Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini diutamakan untuk siswa SD/ sederajat kelas satu. Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama tenaga lainnya yang terlatih (guru UKS/UKSG dan dokter kecil). Tenaga kesehatan yang dimaksud yaitu tenaga medis, tenaga keperawatan atau petugas puskesmas lainnya yang telah dilatih sebagai tenaga pelaksana UKS/UKGS. Guru UKS/UKGS adalah guru kelas atau guru yang ditunjuk sebagai pembina UKS/UKGS di sekolah dan telah dilatih tentang UKS/UKGS. Dokter kecil adalah kader kesehatan sekolah yang biasanya berasal dari murid kelas 4 dan 5 SD dan setingkat yang telah mendapatkan pelatihan dokter kecil.

Hal ini dimaksudkan agar pembelajaran tentang kebersihan dan kesehatan gigi bisa dilaksanakan sedini mungkin. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut pada khususnya dan kesehatan tubuh serta lingkungan pada umumnya. Upaya kesehatan pada kelompok ini yang dilakukan melalui penjangkaran kesehatan terhadap murid SD/MI kelas satu juga menjadi salah satu indikator yang dievaluasi keberhasilannya oleh Kementerian Kesehatan. Kegiatan penjangkaran kesehatan selain untuk mengetahui secara dini masalah-masalah kesehatan anak sekolah sehingga dapat dilakukan tindakan secepatnya untuk mencegah keadaan yang lebih buruk, juga untuk memperoleh data atau informasi dalam menilai perkembangan kesehatan anak sekolah, maupun untuk dijadikan pertimbangan dalam menyusun perencanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Penjangkaran kesehatan diukur dengan menghitung persentase SD/MI yang melakukan penjangkaran kesehatan terhadap seluruh SD/MI yang menjadi sasaran penjangkaran.

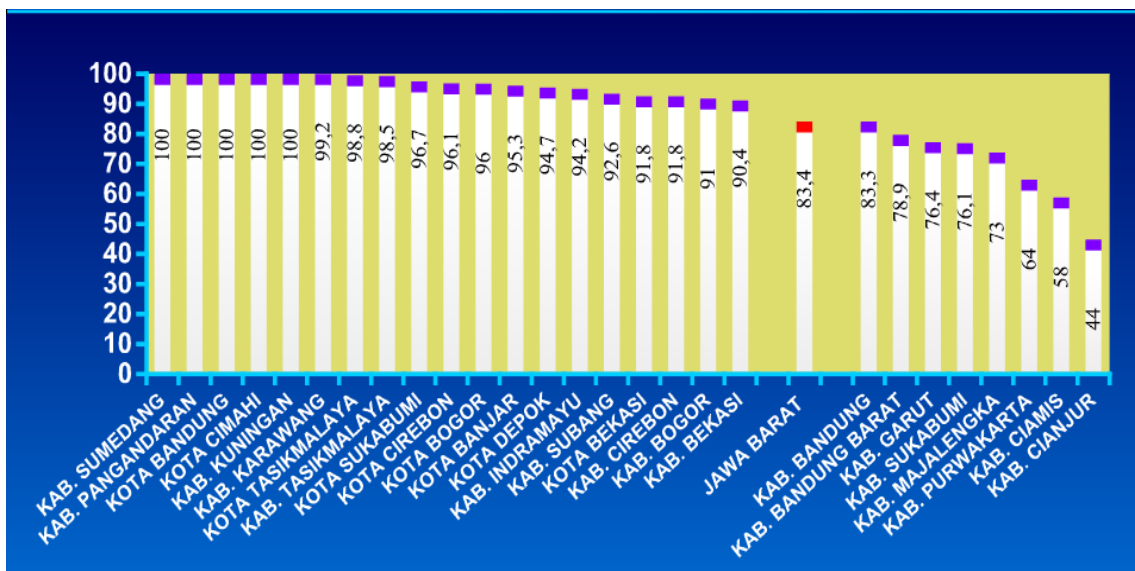
Cakupan SD atau sederajat yang melaksanakan penjangkaran kesehatan untuk siswa kelas satu pada tahun 2016 di Jawa Barat sebesar 56,34%, dari

49.427 SD sederajat dilakukan penjarangan sebanyak 27.845 SD sederajat. Dengan jumlah murid sebanyak 950.853 orang dan dilakukan pemeriksaan kesehatan sebanyak 793.442 orang (83,4%).

Gambar VII. B. 17
Cakupan Penjarangan Sekolah Dasar/Sederajat
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



Gambar VII. B. 18
Cakupan Pelayanan Kesehatan Siswa Sekolah Dasar Kelas 1
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



9. Pelayanan Perbaikan Gizi Masyarakat

Masalah gizi penduduk merupakan masalah yang tersembunyi, yang berdampak pada tingginya angka kesakitan dan kematian. Kurang asupan dan

absorpsi gizi mikro dapat menimbulkan konsekuensi pada status kesehatan, pertumbuhan, mental dan fungsi lain (kognitif, sistem imunitas, reproduksi, dan lain-lain). Timbulnya masalah gizi dapat disebabkan karena kualitas dan kuantitas dari intake makanan (terutama energi dan protein), dimana secara kronis bersama-sama dengan faktor penyebab lainnya dapat mengakibatkan marasmus atau kwashiorkor.

Kurang gizi dikarenakan akses masyarakat terhadap pangan rendah, makanan ibu hamil kurang kalori dan protein atau terserang penyakit, bayi baru lahir tidak diberi kolostrum, bayi sudah diberi Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) sebelum usia 4-6 bulan, pemberian makanan padat pada bayi terlalu lambat, anak dibawah 2 tahun diberi makanan kurang atau densitas energinya kurang, makanan yang diberikan tidak mempunyai kadar zat gizi mikro yang cukup, penanganan diare yang tidak benar dan makanan yang kotor/terkontaminasi.

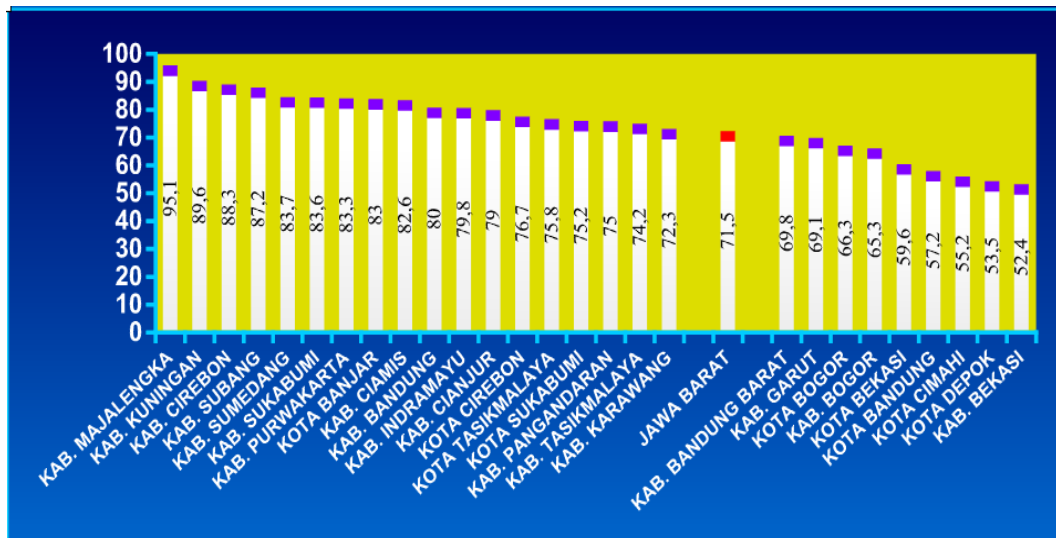
Sesungguhnya telah banyak upaya penanggulangan masalah gizi yang dilakukan, akan tetapi, keberhasilan upaya tersebut masih dirasakan belum optimal. Salah satu upaya dengan diberikannya Kartu Menuju Sehat dan Buku KIA bagi Balita sebagai pemantauan untuk ibu dan petugas kesehatan, ternyata hasil Riskesdas Persentase kepemilikan buku KIA pada anak umur 0-59 bulan baru mencapai 47,9% sisanya hilang dan tidak memiliki buku KIA.

Upaya Pelayanan Kesehatan melalui perbaikan gizi masyarakat yang telah dilaksanakan antara lain pemberian makanan tambahan pemulihan (PMTP), bantuan keuangan gubernur 90 hari, peningkatan kapasitas petugas dalam pelatihan tatalaksanaan gizi buruk, konseling menyusui, penilaian pertumbuhan, pemberian makanan bayi dan makanan (PMDH) dan konseling makanan pendamping air susu ibu (MP ASI), kerjasama lintas sektor.

a. Penimbangan Balita (Usia 0 – 59 Bulan)

Partisipasi masyarakat dalam penimbangan bayi usia 0 – 59 bulan (Balita) sebanyak 3.125.577 Balita dari total sasaran 4.371.807 balita (71,5%), dilaporkan dari 27 Kabupaten/Kota, cakupan tertinggi dari Kab. Indramayu 90,4% dan terendah dari Kota Cimahi 70,9%, terdapat 9 kabupaten/kota yang cakupannya dibawah rata rata Jawa Barat, yaitu Kab Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kab Bogor, Kota Bogor, Kab Garut, dan Kab Bandung Barat.

Gambar VII. B. 19
Cakupan Balita Umur 0-59 Bulan Yang Ditimbang
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



b. Status Gizi Balita

1) Status Gizi Balita Berdasarkan Berat Badan menurut Umur

Status Gizi Balita Berdasarkan Berat Badan Per Umur saat bulan Penimbangan Balita di Jawa Barat pada tahun 2016, dengan jumlah balita yang ditimbang sebanyak 3.310.750 orang, dari sasaran 4.371.807 balita (75,73%), dengan hasil penimbangan untuk klasifikasi Berat Badan Sangat Kurang sebanyak 21.563 Balita (0,65%), untuk klasifikasi Berat Badan Kurang sebanyak 180.147 Balita (5,46%) , Klasifikasi Berat Badan Normal sebanyak 3.037.873 Balita (91,76%), dan klasifikasi Berat Badan Lebih sebanyak 70.467 Balita (2,13%), jika dilihat status gizi balita berdasarkan Berat Badan per tinggi badan didapat klasifikasi Sangat Kurus 0,31%, Kurus sebesar 2,52%, Klasifikasi Normal 92,88%, klasifikasi Gemuk 4,30% dan jika dilihat dari Tinggi Badan Menurut umur diketahui klasifikasi sangat pendek sebesar 2,82%, klasifikasi pendek sebesar 8,72% dan klasifikasi tinggi badan normal sebanyak 88,46%.

Tabel VII. B. 1
Status Gizi Balita Berdasarkan Berat Badan Menurut Umur
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

NO	KAB/KOTA	BALITA DITIMBANG	BB SANGAT KURANG		BB KURANG		BB NORMAL		BB LEBIH	
			n	%	n	%	n	%	n	%
1	Bogor	443.241	4.011	0,90	23.303	5,26	408.414	92	7.513	1,70
2	Sukabumi	211.518	1.209	0,57	11.811	5,58	196.009	93	2.489	1,18
3	Cianjur	198.776	1.553	0,78	12.259	6,17	182.419	92	2.545	1,28
4	Bandung	167.002	512	0,31	7.150	4,28	156.189	94	3.151	1,89
5	Garut	224.810	1.224	0,54	8.484	3,77	212.506	95	2.596	1,15
6	Tasikmalaya	114.377	1.159	1,01	7.527	6,58	103.577	91	2.114	1,85
7	Ciamis	65.636	206	0,31	3.747	5,71	60.841	93	842	1,28
8	Kuningan	49.837	115	0,23	2.446	4,91	46.221	93	1.055	2,12
9	Cirebon	183.688	2.235	1,22	17.526	9,54	159.873	87	4.054	2,21
10	Majalengka	96.439	512	0,53	4.439	4,60	89.721	93	1.767	1,83
11	Sumedang	82.096	567	0,69	5.967	7,27	74.464	91	1.098	1,34
12	Indramayu	130.858	1.140	0,87	12.279	9,38	113.317	87	4.122	3,15
13	Subang	76.843	445	0,58	3.777	4,92	70.125	91	2.496	3,25
14	Purwakarta	78.486	622	0,79	3.249	4,14	73.391	94	1.224	1,56
15	Karawang	168.375	950	0,56	7.408	4,40	157.285	93	2.732	1,62
16	Bekasi	194.909	834	0,43	6.751	3,46	181.549	93	5.775	2,96
17	Bandung Brt	135.546	339	0,25	5.642	4,16	127.014	94	2.551	1,88
18	Pangandaran	25.448	88	0,35	963	3,78	24.008	94	389	1,53
19	Kt. Bogor	89.225	563	0,63	4.445	4,98	82.746	93	1.471	1,65
20	Kt. Sukabumi	23.238	113	0,49	1.383	5,95	21.204	91	538	2,32
21	Kt. Bandung	143.031	806	0,56	7.818	5,47	131.062	92	3.345	2,34
22	Kt. Cirebon	22.259	228	1,02	2.340	10,51	18.979	85	712	3,20
23	Kt. Bekasi	151.039	817	0,54	7.260	4,81	134.047	89	8.915	5,90
24	Kt. Depok	130.324	521	0,40	5.653	4,34	119.455	92	4.695	3,60
25	Kt. Cimahi	39.531	222	0,56	2.215	5,60	35.950	91	1.144	2,89
26	Kt. Tasikmalaya	50.912	500	0,98	4.206	8,26	45.211	89	995	1,95
27	Kt. Banjar	13.306	72	0,54	799	6,00	12.296	92	139	1,04
	Prov Jabar	3.310.750	21.563	0,65	180.847	5,46	3.037.873	91,76	70.467	2,13

2) Anak Bawah Garis Merah (BGM)

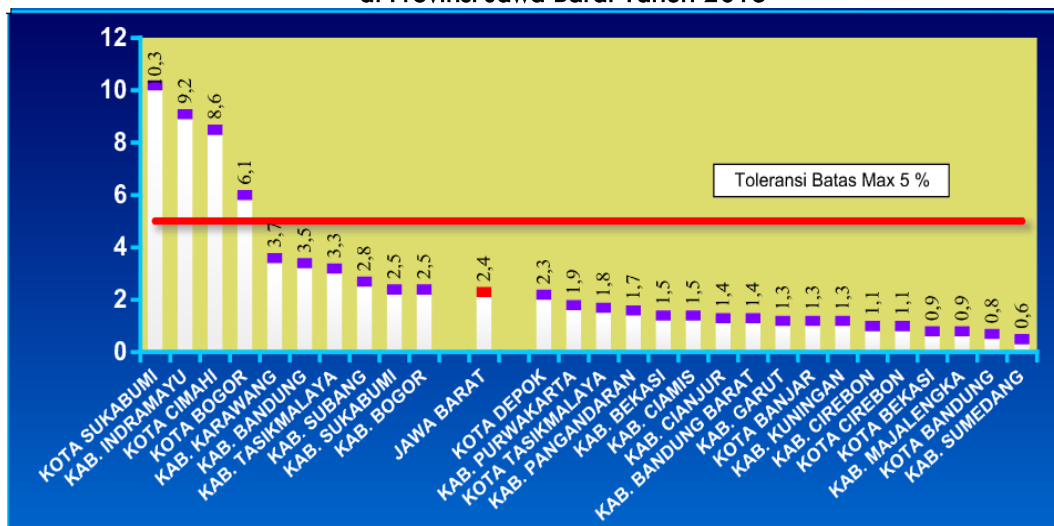
BGM adalah merupakan hasil penimbangan dimana berat badan Balita berada di bawah garis merah pada Kartu Menuju Sehat (KMS). Tidak semua BGM dapat menggambarkan gizi buruk pada Balita, hal ini masih harus dilihat tinggi badannya, jika BGM kemudian tinggi badan sesuai umur maka keadaan ini merupakan titik waspada bagi orang tua untuk tidak terlanjur menjadi lebih buruk lagi, namun jika Balita ternyata pendek maka belum tentu anak tersebut berstatus gizi buruk, toleransi BGM yang dibolehkan secara Nasional adalah < 5%.

3) Balita Bawah Garis Merah

Jumlah balita yang dilaporkan di Jawa Barat sebanyak 4.371.807 orang, yang dilakukan Penimbangan sebanyak 3.125.577 Balita (71,5%) . Dari data tersebut diketahui kasus balita BGM sebanyak 75.891 balita dari 3.125.577 Jumlah Balita yang ditimbang (2,4%) atau 1,7 % dari jumlah balita yang dilaporkan, tersebar di 27 kabupaten/kota dengan kasus balita BGM antara 0,6 – 10,3 %,

Terdapat 4 Kab/Kota dengan kasus balita BGM diatas batas toleransi 5%, yaitu : Kota Sukabumi, Kab Indramayu, Kota Cimahi dan Kota Bogor.

Gambar VII. B. 20
Persentase Balita Bawah Garis Merah Terhadap Balita Ditimbang
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



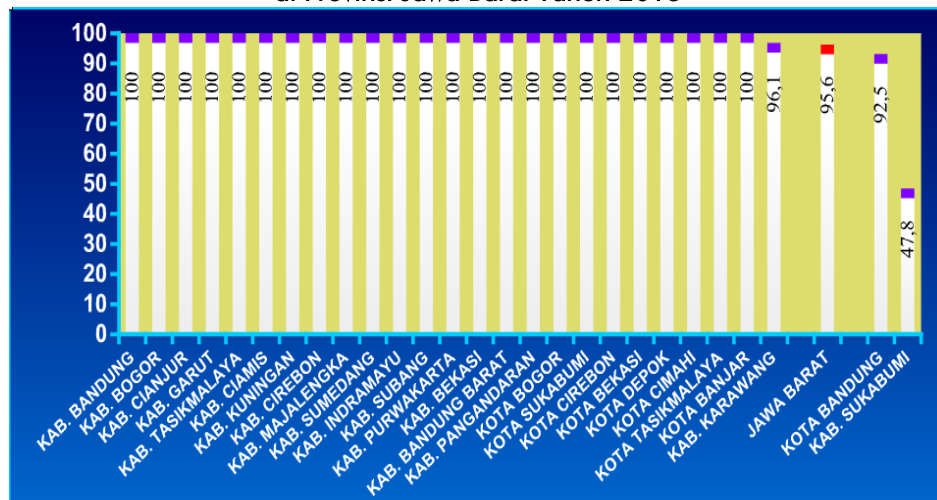
4) Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan

Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan adalah balita dengan status gizi berdasarkan indeks berat badan (BB) menurut panjang badan (BB/PB) atau berat badan (BB) menurut tinggi badan (BB/TB) dengan Z-score < -3 SD (sangat kurus) dan/atau terdapat tanda-tanda klinis gizi buruk lainnya (marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor). yang dirawat inap maupun rawat jalan (sesuai tata laksana gizi buruk) di fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat.

Kasus Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan oleh fasyankes di Jawa Barat sebanyak 2.953 orang dari 3.089 Kasus Gizi Buruk yang ditemukan (95,6%), Terdapat 3 Kab/Kota yang melakukan pelayanan/Peranganan terhadap gizi buruk kurang dan atau tidak maksimal

yaitu : Kab Sukabumi (48%), Kota Bandung (93%) dan Kab Karawang (96%).

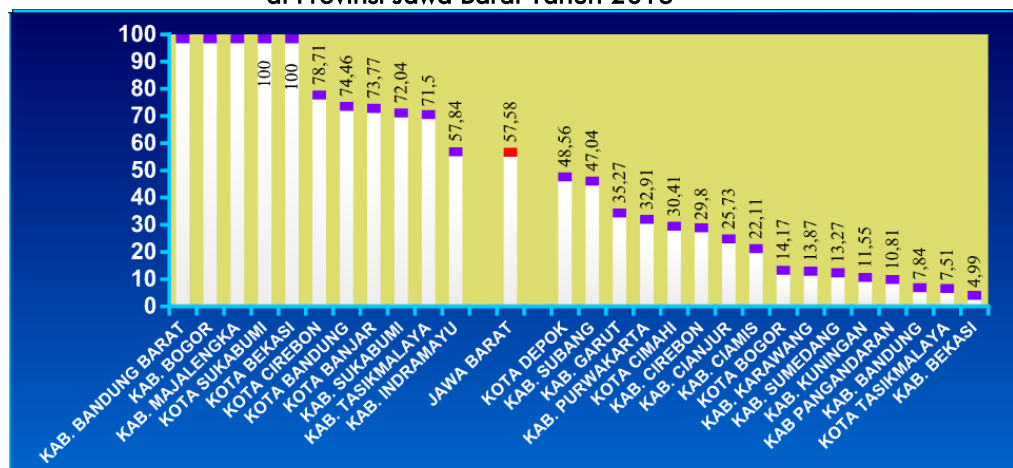
Gambar VII. B. 21
Cakupan Kasus Gizi Buruk Mendapat Perawatan
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



5) Pelayanan Balita Kurus

Jumlah Balita Kurus di Jawa Barat sebanyak 77.439 Balita, upaya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sebanyak 44.589 Balita (57,58%) akan tetapi pemberian makanan tambahan setiap kab/kota tidak merata ada yang sangat berlebih (PMT diberikan tidak hanya pada Balita Kurus akan tetapi diberikan pula pada Balita berat badan cukup yang ada pada Populasi kegiatan PMT) , berikut gambaran pemberian PMT di Jawa Barat.

Gambar VII. B. 22
Cakupan Pemberian PMT Pada Balita Kurus
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



c. Riset Tentang Status Gizi Balita

Berdasarkan Riskesdas Tahun 2013, di Jawa Barat Prevalensi gizi kurang pada balita ($BB/U < -2SD$) secara nasional adalah 19,6%, sedangkan di Jawa Barat lebih baik yaitu 15,7%. Prevalensi yang tertinggi adalah di Kabupaten Bandung Barat (22,4%) sedangkan terendah di Kota Cimahi (10,2%).

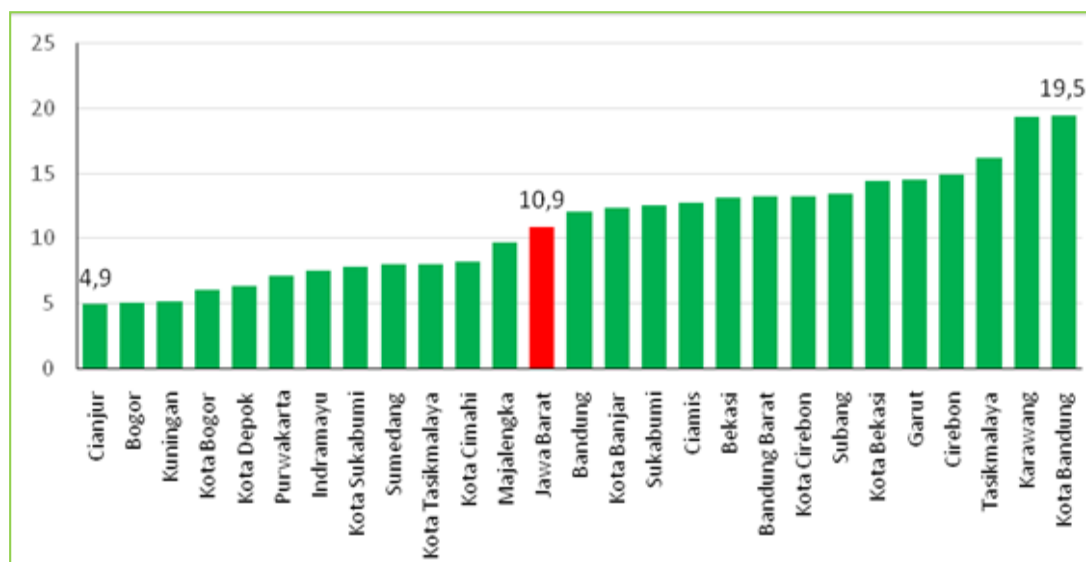
Masalah stunting/pendek pada balita menunjukkan angka rerata Jawa Barat 35,3% yang juga lebih baik dari angka nasional (37,2%). Prevalensi yang tertinggi di Kabupaten Bandung Barat (52,5%) dan terendah di Kota Depok (25,7%). Prevalensi kekurusan menurut kabupaten/kota. Salah satu indikator untuk menentukan anak yang harus dirawat dalam manajemen gizi buruk adalah keadaan sangat kurus yaitu anak dengan nilai Z-score $< -3,0 SD$. Prevalensi sangat kurus di Provinsi Jawa Barat masih cukup tinggi yaitu 5,0 %.

Demikian pula halnya dengan prevalensi kurus sebesar 5,9%. Terdapat di 14 Kabupaten/kota dimana prevalensi kurus diatas prevalensi Jawa Barat secara umum, dengan urutan dari prevalensi tertinggi sampai terendah, adalah: (1) Kota Bandung, (2) Kabupaten Karawang, (3) Kabupaten Tasikmalaya, (4) Kabupaten Cirebon, (5) Kabupaten Garut, (6) Kota Bekasi, (7) Kabupaten Subang, (8) Kota Cirebon, (9) Kabupaten Bandung Barat, (10) Kabupaten Bekasi, (11) Kabupaten Ciamis, (12) Kabupaten Sukabumi, (13) Kota Banjar dan (14) Kabupaten Bandung.

Menurut WHO 2010 masalah kesehatan masyarakat sudah dianggap serius bila prevalensi BB/TB Kurus antara 10,0 % - 14,0%, dan dianggap kritis bila $\geq 15,0$ %. Pada tahun 2013, secara umum di Provinsi Jawa Barat prevalensi BB/TB kurus pada balita masih 10,9 %. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah kekurusan di Jawa Barat merupakan masalah kesehatan yang serius. Diantara 26 Kabupaten/Kota, terdapat 14 Kabupaten/kota yang masuk kategori serius dan 6 kabupaten/kota termasuk kategori kekurusan kritis, yaitu Kota Bekasi, Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Karawang dan Kota Bandung. Kelompok umur yang terbanyak status gizi sangat kurus terjadi pada umur 6-11 bulan (6,8%) dan pada umur 0-5 bulan sebesar 6,7%, dengan jenis kelamin laki-laki lebih besar daripada perempuan.

Pada tahun 2013 Prevalensi Kegemukan di Provinsi Jawa Barat sebesar 11,8%. Terdapat 10 Kabupaten/Kota yang memiliki masalah kegemukan di atas angka umum Jawa Barat dengan urutan prevalensi tertinggi sampai terendah, yaitu (1) Kabupaten Bandung Barat, (2) Kabupaten Cirebon, (3) Kabupaten Bekasi, (4) Kota Depok, (5) Kota Bandung, (6) Kabupaten Karawang, (7) Kabupaten Bandung, (8) Kabupaten Garut, (9) Kabupaten Indramayu dan (10) Kabupaten Sukabumi.

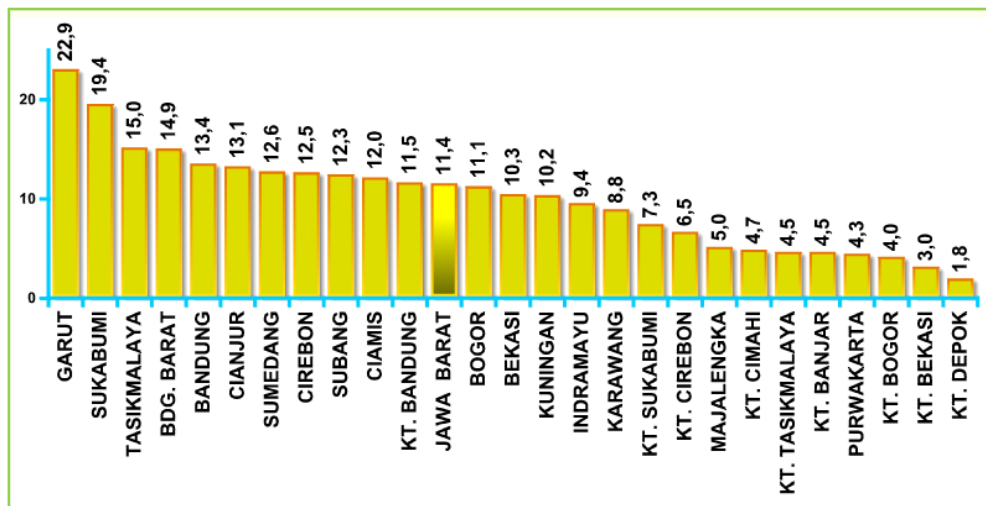
Gambar VII. B. 23
Prevalensi Status Gizi BB/TB <-2 SD Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013



Sumber: Riskesdas 2013

Status Gizi Anak umur 5 – 12 tahun di Jawa Barat Prevalensi pendek pada anak umur 5-12 tahun adalah 11,4% sangat pendek dan 18,2% pendek. Apabila dibandingkan antar Kabupaten/Kota prevalensi sangat pendek terendah di Kota Depok (1,8%) dan tertinggi di Kabupaten Garut (22,9%). Sebanyak 9 Kabupaten dengan prevalensi di atas prevalensi Jawa Barat yaitu Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Subang, Kabupaten Ciamis. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini.

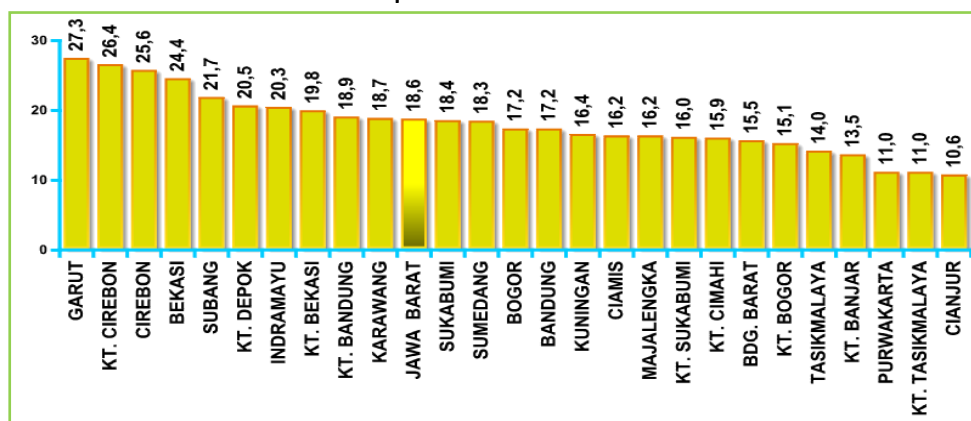
Gambar VII. B. 24
Prevalensi Anak Sangat Pendek Umur 5 – 12 Tahun Menurut Kabupaten/Kota,
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013



Sumber: Riskesdas 2013

Sedangkan prevalensi kurus (menurut IMT/U) di Jawa Barat pada anak umur 5-12 tahun adalah 9,1 %, terdiri dari 3,1 % sangat kurus dan 6,0 % kurus. Prevalensi kurus paling rendah di Kota Tasikmalaya (5,7%) dan paling tinggi di Kabupaten Indramayu (14,0%) dan sebanyak 17 Kabupaten/kota dengan prevalensi kurus diatas angka Jawa Barat yaitu Kabupaten Subang, Kota Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kota Banjar, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Cirebon, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut dan Kabupaten Indramayu.

Gambar VII. B. 25
Prevalensi Gemuk & Sangat Gemuk Anak Umur 5 – 12 Tahun
Menurut Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2013



Sumber: Riskesdas 2013

Secara umum masalah gemuk pada anak umur 5-12 tahun di Jawa Barat masih tinggi yaitu 18,6 %, terdiri dari gemuk 10,7 % dan sangat gemuk (obesitas) 7,9%. Prevalensi gemuk terendah di Kabupaten Cianjur (10,6%) dan tertinggi di Kabupaten Garut (27,3%) dan sebanyak 10 Kabupaten/kota dengan prevalensi gemuk diatas angka Jawa Barat yaitu Kabupaten Karawang, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kabupaten Indramayu, Kota Depok, Kabupaten Subang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten Garut.

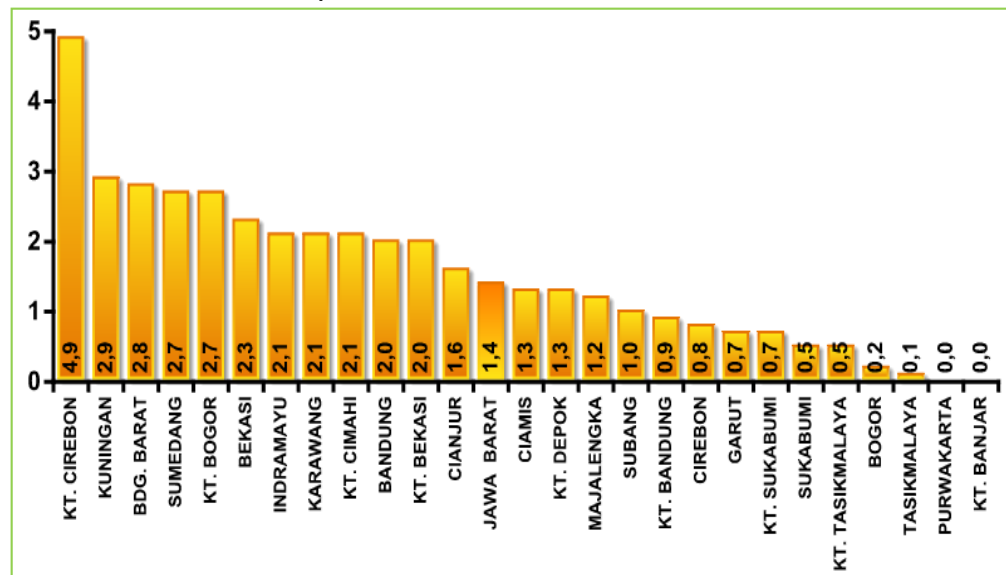
Status Gizi Remaja Prevalensi pendek pada remaja umur 13-15 tahun adalah 33,8 % terdiri dari 12,6% sangat pendek dan 21,2% pendek. Prevalensi terendah di Kota Bekasi (12,5%) dan tertinggi Kabupaten Sukabumi (53,5%). Sebanyak 12 kabupaten/kota memiliki prevalensi pendek di atas angka Jawa Barat yaitu Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bogor, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut dan Kabupaten Sukabumi.

Prevalensi kurus pada remaja umur 13-15 tahun adalah 9,1 % terdiri dari 2, % sangat kurus dan 6,5 % kurus. Prevalensi kurus terlihat paling rendah Kota Sukabumi (4,1%) dan paling tinggi di Kota Bekasi (13,9%).Sebanyak 12 kabupaten/kota dengan prevalensi anak kurus (IMT/U) diatas angka prevalensi Jawa Barat yaitu Kabupaten Garut, Kota Bandung, Kabupaten Majalengka, Kota Cirebon, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

Prevalensi gemuk pada remaja umur 13-15 tahun di Jawa Barat sebesar 9.7%, terdiri dari 7,5 % gemuk dan 2,5 % sangat gemuk (obesitas). Sebanyak 12 kabupaten/kota dengan prevalensi gemuk diatas prevalensi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kota Bogor, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Depok, Kota Cirebon, dan Kota Bekasi, sedangkan Kabupaten dengan prevalensi gemuk terendah adalah di Kabupaten Indramayu (4,5%) dan prevalensi tertinggi di Kota Bekasi (20,2%).

Status gizi remaja umur 16–18 tahun. Secara umum prevalensi pendek di Jawa Barat adalah 29,7% (7,1% sangat pendek dan 22,6% pendek). Sebanyak 12 kabupaten/kota dengan prevalensi pendek diatas prevalensi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Sumedang, Kota Sukabumi, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kota Banjar, Kabupaten Subang, Kabupaten Garut, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten dengan prevalensi pendek terendah adalah di Kabupaten Indramayu (17,6%) dan prevalensi tertinggi di Kabupaten Tasikmalaya (48,7%).

Gambar VII. B. 26
Prevalensi Kurus (IMT/U) Remaja Umur 16 – 18 Tahun
Menurut Kabupaten/Kota, di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013



Prevalensi kurus pada remaja umur 16-18 tahun secara umum sebesar 9,1% (1,4% sangat kurus dan 7,7% kurus). Sebanyak 12 kabupaten/kota dengan prevalensi kurus diatas angka prevalensi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kota Bekasi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kota Banjar, Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kabupaten Indramayu dan Kota Cirebon. Kabupaten dengan prevalensi kurus terendah adalah di Kabupaten Tasikmalaya (3,3%) dan prevalensi tertinggi di Kota Cirebon (18,7%).

Prevalensi gemuk pada remaja umur 16 – 18 tahun di Jawa Barat sebanyak 7,6 % yang terdiri dari 6,2 %gemuk dan 1,4 %obesitas. Kabupaten/kota dengan prevalensi gemuk tertinggi adalah Kota Depok (20,8%) dan terendah Kabupaten Sukabumi (3,5%). Sebanyak 12 kabupaten/kota dengan prevalensi gemuk di atas angka prevalensi Jawa Barat yaitu Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka, Kota Sukabumi, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok.

Prevalensi kekurusan (sangat kurus) pada remaja umur 16-18 tahun lebih banyak pada anak laki-laki (2,3%) daripada anak perempuan (0,5%). Sedangkan untuk prevalensi kegemukan (obese) antara anak laki-laki (1,2%) hampir sama dengan anak perempuan (1,5%).

Status Gizi Dewasa (>18 Tahun) dapat dilihat pada penduduk dewasa di atas 18 tahun adalah 11% kurus, 62,1 % normal, 11,7 % BB lebih dan 15,2 % obesitas. Permasalahan gizi pada orang dewasa cenderung lebih dominan untuk kelebihan berat badan. Prevalensi tertinggi untuk obesitas adalah Kota Bekasi (23,4%), Kota Depok (21%) dan Kota Bogor (20,1%).

Prevalensi kurus, baik pada laki-laki maupun perempuan cenderung lebih tinggi pada kelompok umur muda (19 tahun) dan kelompok umur tua (65 tahun keatas). Prevalensi obesitas cenderung mulai meningkat sampai umur 50 tahun, dan kemudian prevalensinya semakin rendah pada setiap kelompok umur.

Prevalensi obesitas lebih tinggi di daerah perkotaan dibanding daerah perdesaan, sebaliknya prevalensi kurus cenderung lebih tinggi di perdesaan dibanding perkotaan. Masalah gizi pada wanita usiasubur (WUS)15-49 tahun dan wanita hamil berdasarkan indikator Lingkar Lengan Atas (LiLA). Hasil pengukuran LiLA disajikan menurut kabupaten/kota dan karakteristik. Untuk menggambarkan adanya risiko kurang enegi kronis (KEK)dalam kaitannya dengan kesehatan reproduksi pada WUS digunakan ambang batasn timerata LiLA<23,5 cm.

Prevalensi risiko KEK wanita tidak hamil provinsi Jawa Barat lebih rendah (19,9%) dibanding angka nasional (20,8%). Terdapat 11 kabupaten/kota dengan prevalensi risiko KEK pada wanita tidak hamil di atas angka nasional dan angka provinsi yaitu kota Sukabumi, Kabupaten Subang, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kuningan, Kota Bandung, Kabupaten Sukabumi.

d. Anemia Gizi

Upaya penanggulangan anemia gizi diprioritaskan kepada kelompok rawan yaitu ibu hamil, balita, anak usia sekolah dan wanita usia subur termasuk remaja putri dan pekerja wanita. Terjadinya defisiensi besi pada wanita, antara lain disebabkan jumlah zat besi yang di absorpsi sangat sedikit, tidak cukupnya zat besi yang masuk karena rendahnya bioavailabilitas makanan yang mengandung besi atau kenaikan kebutuhan besi selama hamil, periode pertumbuhan dan pada waktu haid. Penanganan defisiensi besi dengan pemberian suplementasi tablet besi merupakan cara yang paling efektif untuk meningkatkan kadar Fe/besi dalam jangka waktu yang pendek. Pemerintah melalui Departemen Kesehatan telah melaksanakan penanggulangan anemia defisiensi besi pada ibu hamil dengan memberikan tablet besi folat (Tablet Tambah Darah/TTD) yang mengandung 60 mg elemental besi dan 250 ug asam folat) setiap hari satu tablet selama 90 hari berturut-turut selama masa kehamilan.

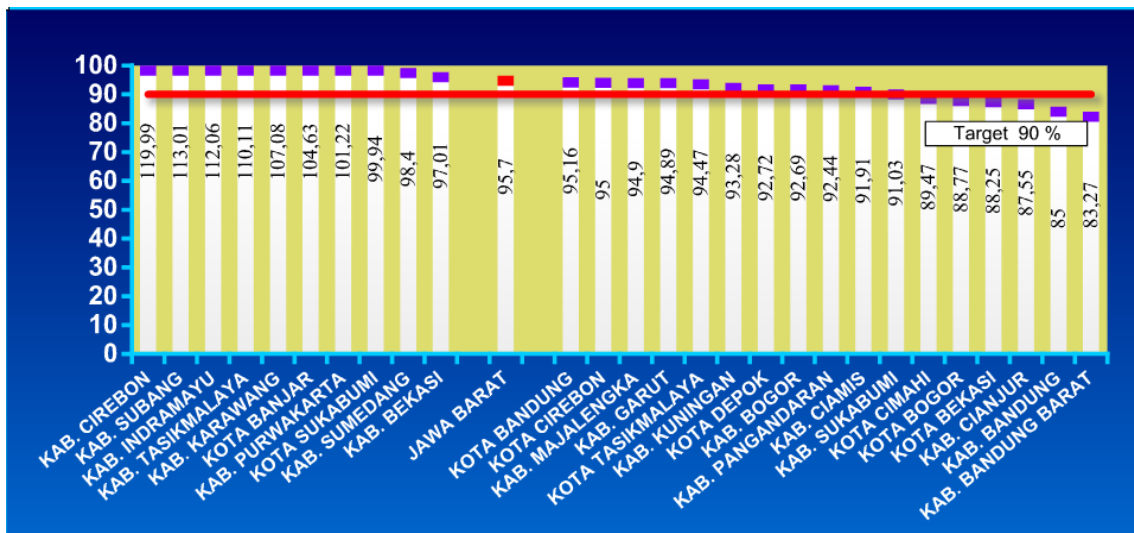
Selama ini upaya penanggulangan anemia gizi difokuskan ke sasaran ibu hamil dengan suplemen besi. Cakupan Pemberian tablet besi (Fe) pada ibu hamil dengan mendapatkan 90 tablet Besi (Fe₃) pada tahun 2016 sebesar 95,70%, angka ini sudah mencapai target (90%), mengalami kenaikan sebesar 0,43 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar VII. B. 27
Persentase Cakupan Pemberian Tablet Besi (Fe3) Ibu Hamil
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2016



Berdasarkan Kab/Kota masih terdapat 6 Kab/Kota yang cakupannya kurang dari 90 % yaitu : Kab Bandung Barat, Kab Bandung, Kab Cianjur, Kota Bekasi, Kota Bogor dan Kota Cimahi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini

Gambar VII. B. 28
Persentase Cakupan Pemberian Tablet Besi (Fe3) Ibu Hamil
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2015

e. Pemberian Vitamin A Pada Balita (6-59 Bulan)

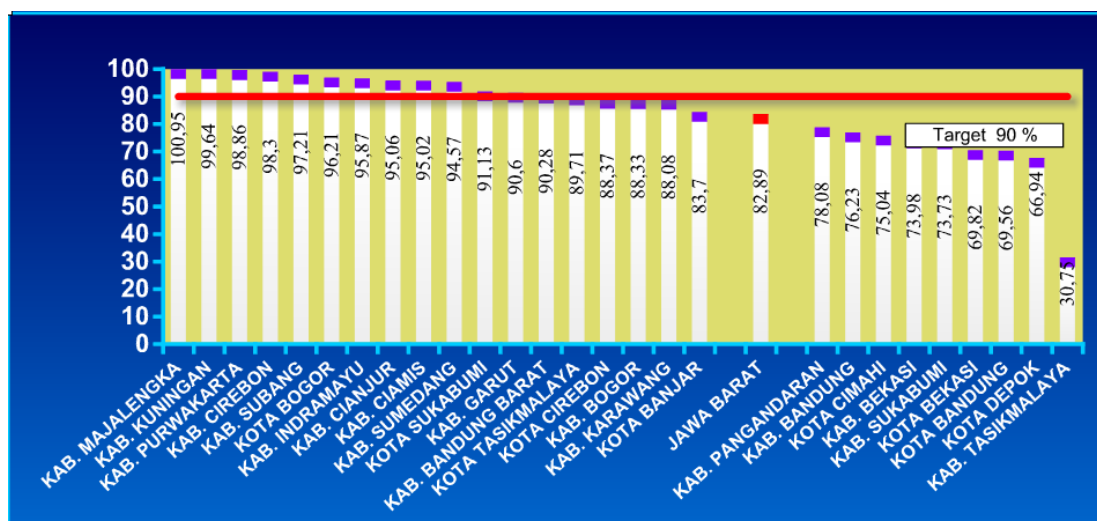
Hasil analisis vitamin A dalam serum mengungkapkan bahwa 50% status vitamin A anak balita masih rendah atau marjinal. Hal ini menggambarkan bahwa untuk mencegah terjadinya kembali prevalensi *xerophthalmia* yang tinggi, program penanggulangan kurang vitamin A perlu diteruskan dengan dukungan konsumsi makanan sumber vitamin A bagi anak balita. Penanggulangan defisiensi vitamin A pada anak balita dapat dilakukan dengan cara pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi (200.000 IU) setiap 6 bulan sekali, pendidikan gizi ibu di posyandu, fortifikasi bahan makanan yang banyak dikonsumsi anak balita dengan vitamin A (1.800 IU). Pemberian satu kapsul vitamin A pada ibu sehabis melahirkan bertujuan untuk meningkatkan kadar vitamin A dalam ASI bagi ibu dalam 1-2 minggu, disamping itu pula kepada ibu menyusui dapat diberikan pendidikan gizi di posyandu tentang pentingnya konsumsi makanan sumber vitamin A.

Buta senja adalah salah satu gejala kurang vitamin A (KVA). Kurang Vitamin A tingkat berat dapat mengakibatkan keratomalasia dan kebutaan. Vitamin A berperan pada integritas sel epitel, imunitas dan reproduksi. KVA pada anak balita dapat mengakibatkan risiko kematian sampai 20-30%. Upaya penanggulangan masalah kurang vitamin A masih bertumpu pada pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi pada anak Balita, Bayi dan ibu Nifas.

Kapsul vitamin A diberikan setahun dua kali pada bulan Februari dan Agustus, sejak anak berumur enam bulan. Kapsul merah (dosis 100.000 IU) diberikan untuk bayi umur 6-11 bulan dan kapsul biru (dosis 200.000 IU) untuk anak umur 12-59 bulan.

Cakupan pemberian Vita A pada Balita umur (6-59 bulan) di Provinsi Jawa Barat sebesar 82,89%, masih dibawah target 90%, berdasarkan Kab/Kota terdapat 13 Kab/Kota yang masih dibawah 90% yaitu : Kab Tasikmalaya, Kota Depok, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kab Sukabumi, Kab Bekasi, Kota Cimahi, Kab Bandung, Kab Pangandaran, Kota Banjar, Kab Karawang, Kab Bogor, Kota Cirebon, dan Kota Tasikmalaya.

Gambar VII. B. 29
 Persentase Cakupan Anak Balita (6-59 Bulan) Mendapatkan Vitamin A
 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



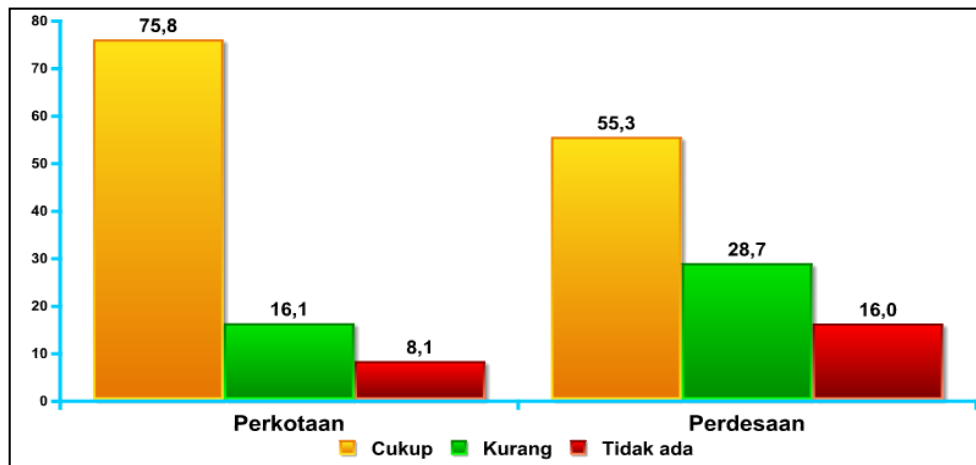
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2015

f. Riset Konsumsi Garam Beryodium

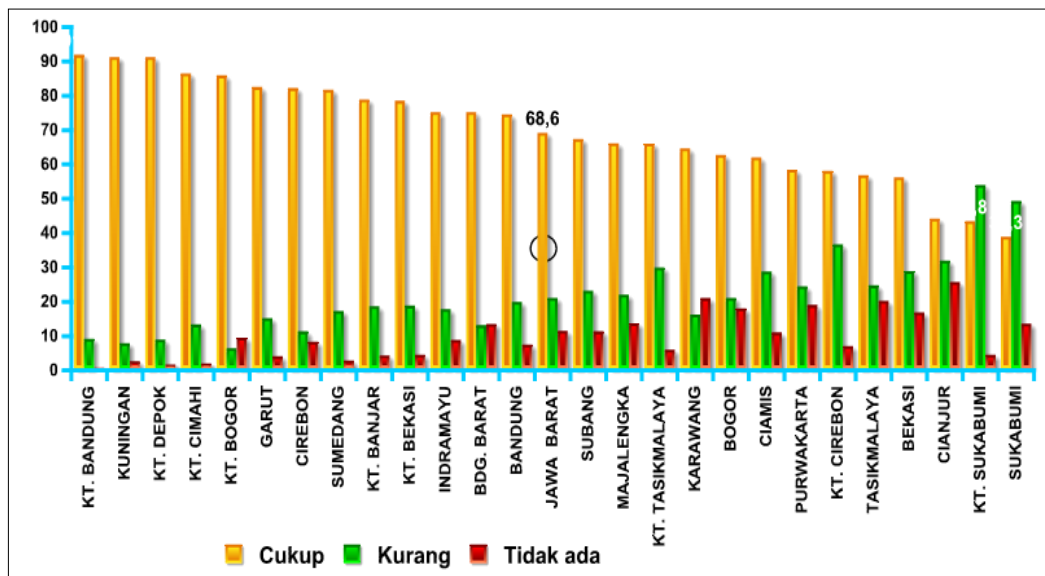
Berdasarkan hasil Riskesdas Tahun 2013, persentase rumah tangga yang mengkonsumsi garam beriodium di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat dengan kriteria konsumsi garam beriodium yaitu cukup, kurang dan tidak ada. Persentase terbanyak adalah rumah tangga dengan konsumsi garam beriodiumnya cukup (68,6%), kemudian rumah tangga dengan konsumsi garam beriodiumnya kurang (20,5%) dan terendah adalah rumah tangga yang tidak ada garam beriodium (10,9%).

Pada rumah tangga yang mengkonsumsi garam beriodiumnya cukup, tertinggi di Kabupaten Bandung (91,3%), dan terendah Kabupaten Sukabumi (38,3%). Untuk rumah tangga yang mengkonsumsi garam beriodiumnya kurang, tertinggi di Kota Sukabumi (53,4%), dan terendah Kota Bogor (5,8%). Sedangkan rumah tangga yang tidak ada garam beriodiumnya, tertinggi di Kabupaten Cianjur (25,1%), dan terendah Kota Depok (1,1%). Untuk rumah tangga yang tidak ada garam beriodium di Perkotaan lebih rendah (8,1%), dibandingkan perdesaan (16%).

Gambar VII. B. 30
 Persentase Rumah Tangga Yang Mengonsumsi Garam Beryodium Menurut Tipe Daerah, Jawa Barat Tahun 2013



Gambar VII. B. 31
 Persentase Rumah Tangga Yang Mengonsumsi Garam Beryodium Menurut Kabupaten/Kota Hasil Tes Cepat, Jawa Barat Tahun 2013



Sumber: Riskesdas Tahun 2013

10. Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (Lansia)

Jumlah lanjut usia yang meningkat saat ini akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan baik fisik, mental maupun sosial ekonomi. Untuk itu perlu pengkajian masalah usia yang lebih mendasar agar tercapai tujuan pembinaan kesehatan usia yaitu mewujudkan derajat kesehatan serta dalam peningkatan peranan serta masyarakat dapat dilaksanakan dengan bentuk penyuluhan kesehatan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan,

pelaksanaan dan penilaian upaya kesehatan usia lanjut dalam rangka menciptakan kemandirian masyarakat.

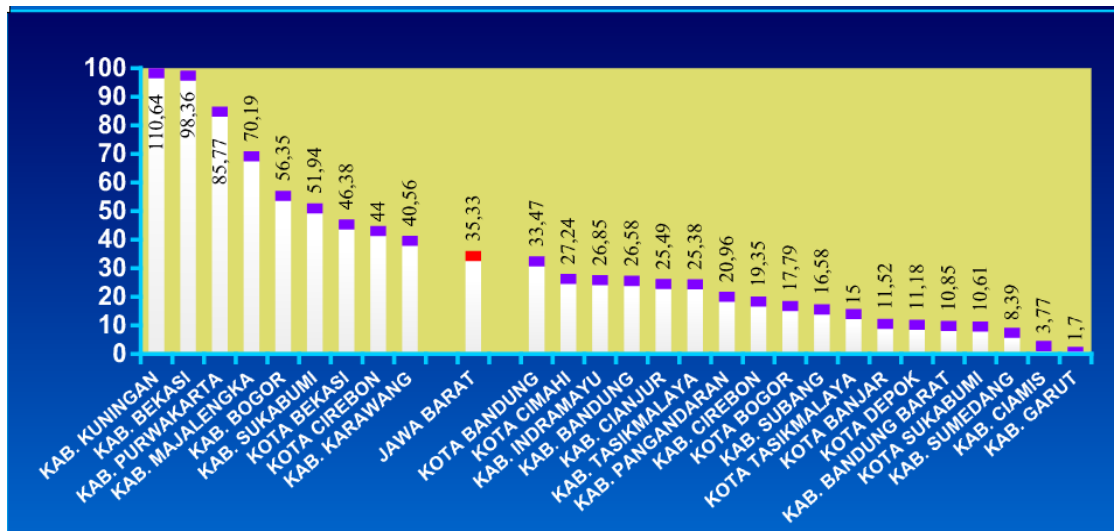
Upaya kesehatan usia lanjut adalah upaya kesehatan paripurna dasar dan menyeluruh dibidang kesehatan usia lanjut yang meliputi peningkatan kesehatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan. Tempat pelayanan kesehatan tersebut bisa dilaksanakan di puskesmas-puskesmas ataupun rumah sakit serta panti-panti dan institusi lainnya.

Kebijakan kementerian kesehatan dalam pembinaan lansia merupakan bagian dari pembinaan keluarga yang ditujukan kepada upaya menumbuhkan sikap dan perilaku yang akan menumbuhkan kemampuan keluarga itu sendiri untuk mengatasi masalah kesehatan dengan dukungan dan bimbingan tenaga profesional, menuju terwujudnya kehidupan keluarga yang sehat, sehingga diharapkan dapat mendukung keluarga untuk melaksanakan fungsi keluarga secara optimal, dilakukan dengan cara peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga. Pelayanan usia lanjut ini meliputi kegiatan upaya-upaya antara lain:

- a. Upaya promotif, yaitu menggairahkan semangat hidup bagi usia lanjut agar mereka tetap dihargai dan tetap berguna baik bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat, dapat berupa kegiatan penyuluhan merupakan hal yang penting sebagai penunjang program pembinaan kesehatan usia lanjut.
- b. Upaya preventif yaitu upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyakit maupun komplikasi penyakit yang disebabkan oleh proses ketuaan, dapat berupa kegiatan kuratif dan Pelayanan kesehatan dasar spesifikasi melalui sistem rujukan
- c. Upaya rehabilitatif yaitu upaya mengembalikan fungsi organ yang telah menurun.

Disamping upaya pelayanan diatas dilaksanakan yang tidak kalah penting adalah penyuluhan kesehatan masyarakat yang merupakan bagian integral daripada setiap program kesehatan.

Gambar VII. B. 32
Cakupan Pelayanan Usia Lanjut (> 60 Tahun)
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



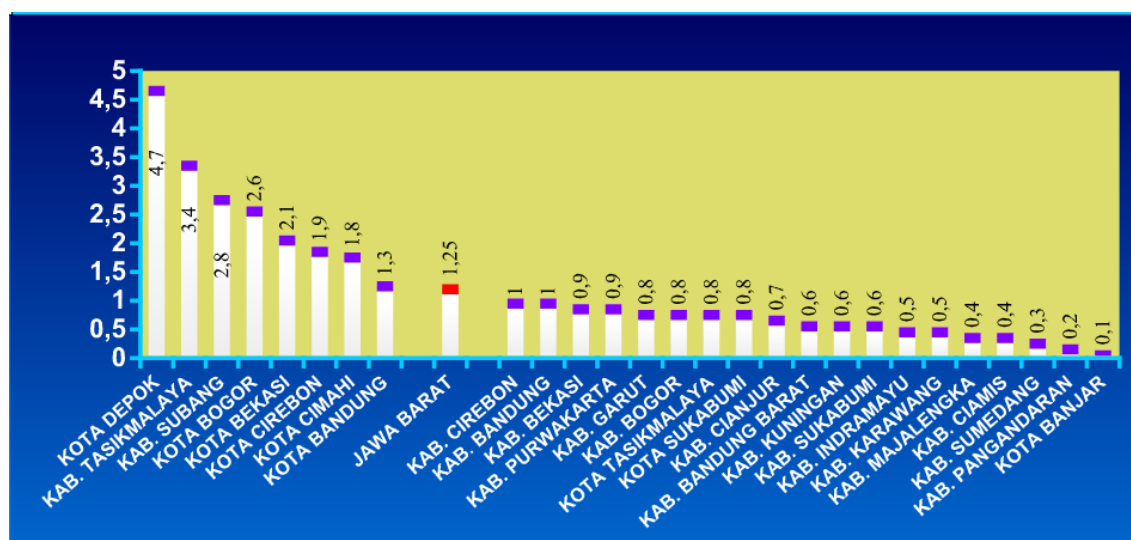
Cakupan Pelayanan usia lanjut berdasarkan Kab/Kota di Jawa Barat antara 1,7 % – 110,64 %, dan rata rata capaian 35,56%, tertinggi dicapai Kab Kuningan dan terendah oleh Kab Garut, ini menunjukkan masih kurang perhatian terhadap kesehatan lansia, dari 27 Kab/Kota prosentase cakupan antara 75 – 100 % hanya dicapai oleh 3 Kab Kota yaitu Kab Kuningan, Kab Bekasi dan Kab Purwakarta, begitu juga cakupan antara 50 – 75 % dicapai oleh 3 Kab/Kota yaitu Kab Majalengka, Kab Bogor dan Kab Sukabumi, sementara Kabupaten/Kota lainnya dibawah 50 %.

11. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

a. Cakupan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut di provinsi Jawa Barat menunjukkan adanya peningkatan kasus penyakit gigi dan mulut pada masyarakat. Indikator yang ditetapkan berupa rasio tumpatan dengan pencabutan dengan target 1:1 belum terpenuhi. Menurut profil kesehatan kabupaten/kota rasio tumpatan dengan pencabutan di Provinsi Jawa Barat sebesar 1,25 %, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar VII. B. 33
Rasio Tumpatan/ Pencabutan Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



b. Hasil Riset Kesehatan Dasar Tentang Gigi dan Mulut

Penduduk yang memiliki masalah gigi dan mulut seharusnya menerima pengobatan atau perawatan yang tepat dari tenaga medis. Agar diketahui keterjangkauan/kemampuan untuk mendapatkan pelayanan dari tenaga medis gigi, maka perlu dihitung *Effective Medical Demand* (EMD). Berdasarkan Riskesdas 2013 ini menunjukkan sebesar 28,0 persen penduduk Jawa Barat menyatakan mempunyai masalah gigi dan mulut dalam 12 bulan terakhir (*potential demand*). Diantara masalah gigi dan mulut, terdapat 33,4 persen yang menerima perawatan dan pengobatan dari tenaga medis (perawat gigi, dokter gigi atau dokter gigi spesialis).

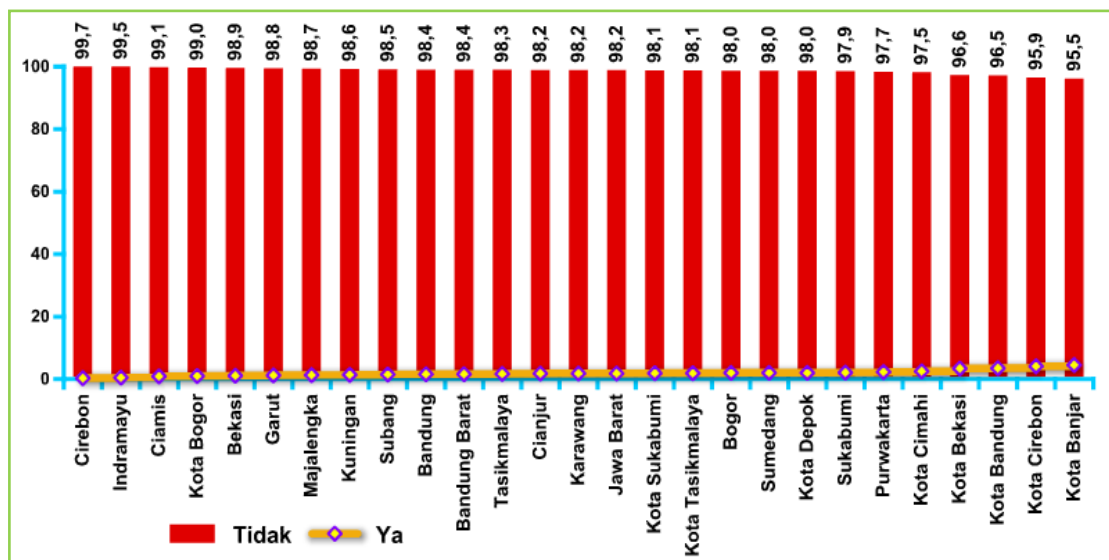
Secara keseluruhan keterjangkauan/kemampuan untuk mendapatkan pelayanan dari tenaga medis gigi/EMD sebesar 9,4 persen. Kabupaten/kota dengan EMD tertinggi adalah Kota Sukabumi (16,2%), Kota Cimahi (14,2%) dan Kabupaten Tasikmalaya (13,3%), sedangkan angka EMD terendah di Kabupaten Karawang (2,0%).

Persentase penduduk yang menyatakan dirinya mempunyai masalah gigi dan mulut/*potential demand* meningkat pada kelompok umur anak-anak dan pada usia produktif. Pada usia anak-anak dan usia produktif 5-9 tahun dan 45-54 tahun, penduduk yang menyatakan bermasalah gigi dan mulut mencapai persentase tertinggi, yaitu masing-masing 32,4 persen dan 33,9 persen. Demikian pula persentase EMD meningkat pada kelompok umur anak-anak dan

kelompok umur yang lebih tinggi, dan persentase EMD tertinggi dijumpai pada kelompok umur 5-9 tahun yaitu sebesar 11,7 persen dan pada kelompok umur 45-54 tahun sebesar 12,8 persen. Pada perempuan, EMD (10,7%) lebih tinggi dibandingkan laki-laki (8,1%). Terdapat kecenderungan pada tingkat pendidikan lebih tinggi, didapatkan EMD yang lebih tinggi. Kelompok pegawai memiliki EMD terbesar (11,1%).

Setiap orang perlu menjaga kesehatan gigi dan mulut dengan cara menyikat gigi dengan benar untuk mencegah terjadinya karies gigi, sebagian besar (97,0%) penduduk Jawa Barat umur 10 tahun keatas mempunyai kebiasaan menyikat gigi setiap hari. Kabupaten/kota dengan persentase tertinggi adalah Kota Bandung (98,5%) dan Kota Cirebon (98,4%), sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Indramayu (94,4%).

Gambar VII. B. 34
Persentase Penduduk ≥ 10 Tahun Yang Berperilaku Benar Menyikat Gigi
Menurut Kabupaten/Kota, Jawa Barat 2013



Sumber : Riskesdas 2013

C. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

1. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

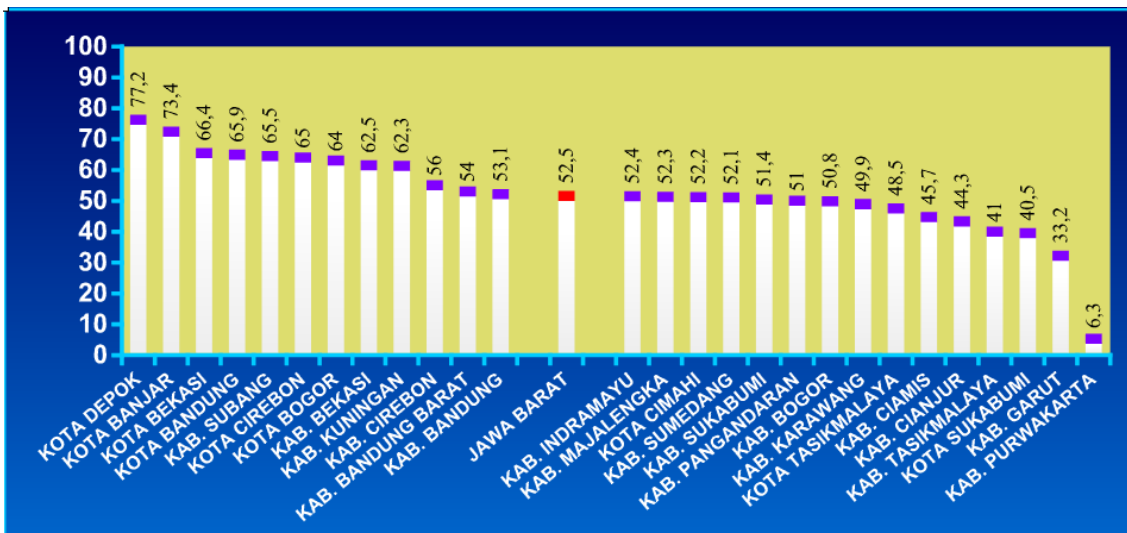
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah Rumah tangga yang seluruh anggotanya berperilaku hidup bersih dan sehat, yang meliputi 10 indikator, yaitu pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, bayi diberi ASI eksklusif, balita ditimbang setiap bulan, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik di rumah sekali seminggu, makan sayur dan buah setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, dan tidak merokok di dalam rumah. Apabila dalam Rumah Tangga tersebut tidak ada ibu yang melahirkan, tidak ada bayi dan tidak ada balita, maka pengertian Rumah Tangga ber-PHBS adalah rumah tangga yang memenuhi 7 indikator.

Pelaksanaan Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap penanggulangan masalah kesehatan melalui pencegahan terjadinya kesakitan maupun kematian. PHBS mengisyaratkan slogan "Lebih Baik Mencegah daripada Mengobati". Program PHBS adalah upaya untuk pengalaman belajar bagi perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat, untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku hidup bersih dan sehat, yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat turut menangani masalah di bidang kesehatan serta berperan-aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya. PHBS mencakup tatanan Rumah Tangga, Sekolah, Tempat Kerja, Tempat Umum dan Sarana Kesehatan.

Jumlah Rumah Tangga di Jawa Barat sebanyak 12.634.514 rumah tangga, dan dipantau sikap perilaku ber-PHBS sebanyak 8.253.302 keluarga (65,3%) , dari pemantauan ini ditemukan 4.334.650 keluarga berperilaku PHBS (52,5%). Berdasarkan Kab/Kota di Jawa Barat Cakupan tertinggi di capai oleh Kota Depok (77,2%) dan terendah Kab Purwakarta (6,3%).

Cakupan rumah tangga ber-PHBS dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan, pada tahun 2015 persentase PHBS mencapai 53,7% dan pada tahun 2016 mencapai 52,5% turun 2,8% untuk lebih jelas berikut ini gambaran persentase rumah tangga PHBS tahun 2016.

Gambar VII. C 1
Persentase Rumah Tangga Ber- Perilaku Bersih dan Sehat (PHBS)
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

Hasil riset kesehatan daerah di kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Barat tahun 2007 menunjukkan persentase keluarga PHBS yang tinggal diperkotaan lebih baik (45,1%) dibandingkan dengan di pedesaan (31,1%). Berdasarkan tingkat pengeluaran per-kapita keluarga, semakin sejahtera tingkat sosial ekonomi keluarga semakin besar proporsi pencapaian keluarga bersih dan sehat.

Penerapan PHBS di rumah tangga diharapkan mengurangi risiko terjadinya kematian bayi karena tidak ditolong oleh tenaga kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh dengan ASI. Pencegahan penyakit degeneratif dengan berolah raga, mengonsumsi makanan bergizi. Pencegahan penyakit pernafasan dengan tidak merokok dan tinggal di tempat yang tidak terlalu padat hunian. Ketersediaan air bersih, jamban dan lantai mengurangi risiko kejadian penyakit berbasis lingkungan, seperti diare, penyakit kulit, dan lain-lain. Hingga saat ini penyakit Infeksi saluran pernafasan dan diare masih merupakan penyebab kematian bayi yang cukup besar di Jawa Barat.

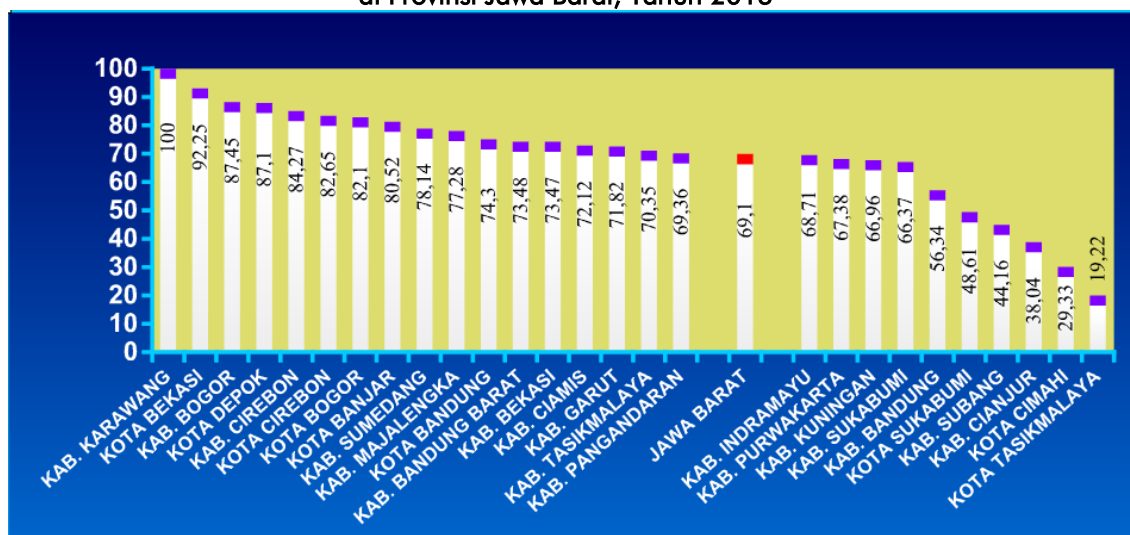
Hasil Susenas 2012, persentase penduduk 10 tahun keatas yang merokok di Jawa Barat sebanyak 29,38% yang terdiri dari umur 10-17 tahun sebanyak 2,93%, umur 18-24 tahun sebanyak 26,36% dan diatas 25 tahun sebanyak 37,68%. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat masih merupakan tantangan berat.

2. Penyehatan Lingkungan

a. Rumah Sehat

Rumah sehat adalah bangunan rumah tinggal yang memenuhi syarat kesehatan, yaitu rumah yang mempunyai layak sanitasi, mempunyai sarana air bersih, mempunyai tempat pembuangan sampah, mempunyai sarana pembuangan limbah, mempunyai ventilasi rumah yang baik, memiliki kepadatan hunian rumah yang sesuai dan mempunyai lantai rumah yang tidak terbuat dari tanah. Rumah merupakan tempat aktifitas dan tempat berlindung keluarga, sehingga diperlukan kondisi rumah yang dapat mengurangi/ menghilangkan risiko penghuni rumah untuk menjadi sakit. Berikut gambaran capaian Cakupan Rumah Sehat menurut kabupaten kota di Jawa Barat tahun 2016.

Gambar VII. C. 2
Cakupan (%) Rumah Sehat Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2016



Cakupan Rumah Sehat Provinsi Jawa Barat sebanyak 6.930.068 Rumah dari 10.029.658 Rumah (69,10%) turun 3,99 % dibanding tahun 2015 sebesar 73,09%, dengan prosentasi Kab/Kota antara 19,22-100 % . Cakupan Rumah Sehat tertinggi terdapat di Kab. Karawang 100 % (371.510 Rumah Sehat) dan terendah di Kota Tasikmalaya 19,22% (29.602 Rumah Sehat) Semakin tinggi Cakupan Rumah Sehat disuatu wilayah, maka akan semakin kecil risiko penghuni rumah tersebut menjadi sakit.

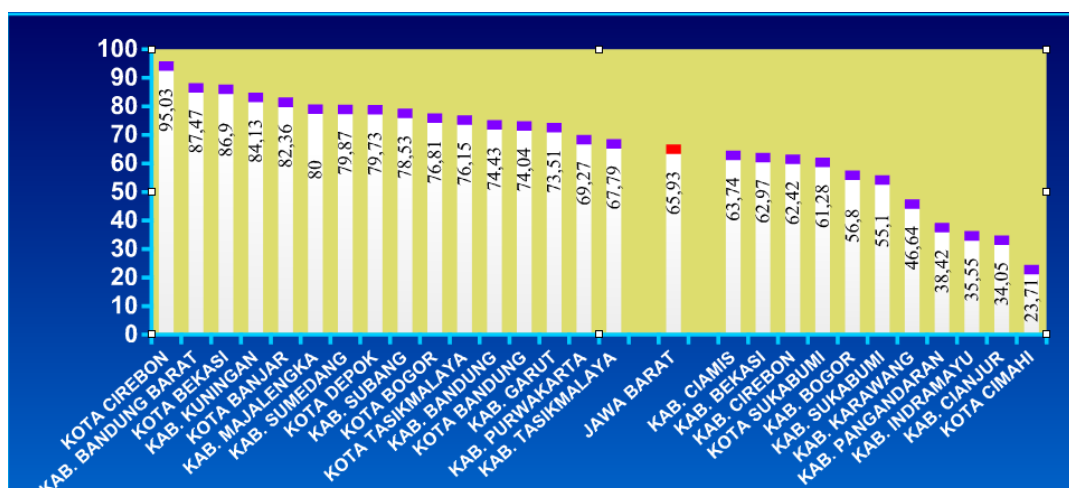
b. Akses Penduduk Terhadap Air Minum Berkualitas

Alternatif masyarakat untuk mendapatkan sumber air minum di Jawa Barat sangat bervariasi. Masyarakat perkotaan sebagian besar sudah menggunakan jasa PDAM untuk memenuhi kebutuhan sumber air minum. Sedangkan masyarakat di pedesaan relatif lebih bervariasi dari mulai yang menggunakan sumur gali, sumur pompa, mata air, air hujan sampai yang memanfaatkan badan air seperti danau, sungai untuk memenuhi kebutuhan sumber air minumannya.

Sumber mata air tersebut ada yang terlindung ada yang tidak terlindung. Sumber air PDAM, sumur gali, sumur pompa relatif lebih terlindung dan memenuhi persyaratan kesehatan. Sedangkan sumber air danau, sungai, mata air relatif tidak terlindung dan tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Yang dimaksud sumber air bersih yang terlindung adalah sumber air minum keluarga yang bersumber dari sarana air bersih yang telah memenuhi persyaratan baik biologis, kimia dan fisik (Permenkes).

Gambaran cakupan keluarga dengan akses air minum berkualitas di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada gambar dibawah ini

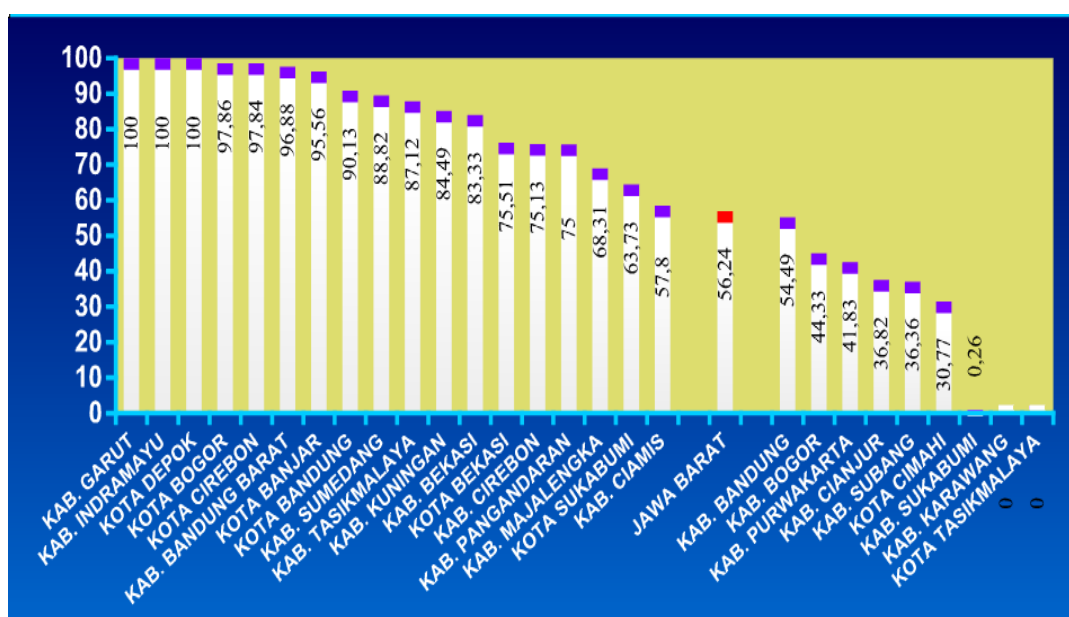
Gambar III. C. 3
Cakupan (%) Penduduk dengan Akses Air Minum Berkualitas
di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



Cakupan Penduduk dengan Akses Air Minum Berkualitas di kab/Kota tersebar di Jawa Barat pada tahun 2016 antara 23,71% - 95,03%, dan cakupan Provinsi sebesar 65,93% naik 3,29 point dibanding tahun 2015 sebesar 62,64% .cakupan tertinggi di Kota Cirebon sebesar

95,03%, dan terendah di Kota Cimahi sebesar 23,71 %, terdapat 16 kabupaten kota cakupan penduduk dengan Akses Air Bersih \geq dari cakupan provinsi, berdasarkan pemeriksaan sampel air minum dari penyedia/penyelenggara Air Minum yang dilakukan di 25 Kab/Kota (Kab Karawang dan Kota Tasikmalaya tidak mengambil sampel) dengan sample sebanyak 13.362 sample diketahui 7.514 sampel (56,24%) memenuhi syarat baik fisik, bakteriologis maupun kimia, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar berikut ini.

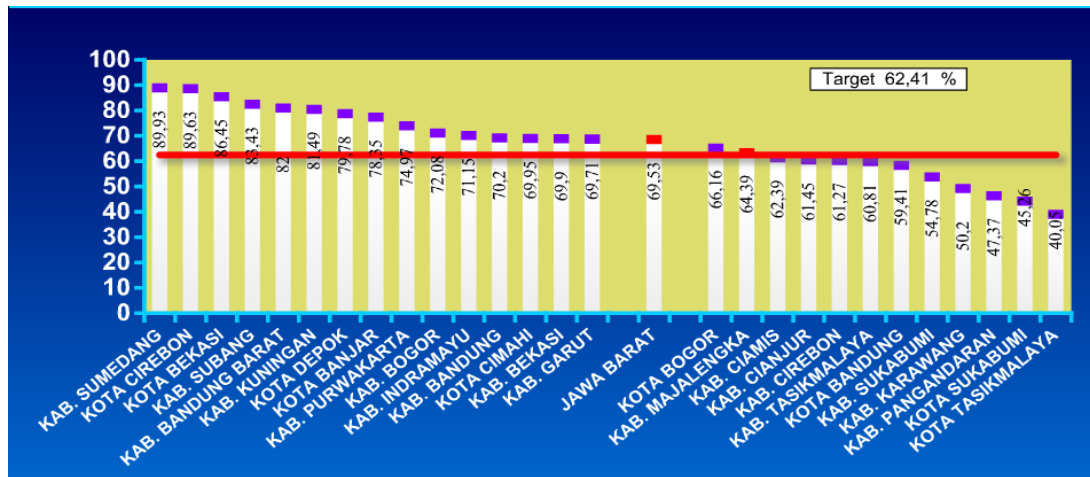
Gambar VII. C. 4
Cakupan (%) Penyelenggara Air Minum memenuhi Syarat Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2016



c. Akses Penduduk Terhadap Fasilitas Sanitasi Layak

Berdasarkan pencatatan dan pelaporan kabupaten kota, cakupan akses penduduk terhadap fasilitas sanitasi layak di Provinsi Jawa Barat tahun 2016 adalah 69,53% naik 2,83point dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 66,70 %, dan telah mencapai target MDGs sampai tahun 2015 sebesar 62,41%, cakupan tertinggi dicapai oleh Kab Sumedang sebesar 89,93 % dan cakupan terendah Kota Tasikmalaya 40,05% seperti diperlihatkan oleh gambar berikut ini.

Gambar VII. C. 5
Akses Penduduk Terhadap Fasilitas Sanitasi Layak
Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

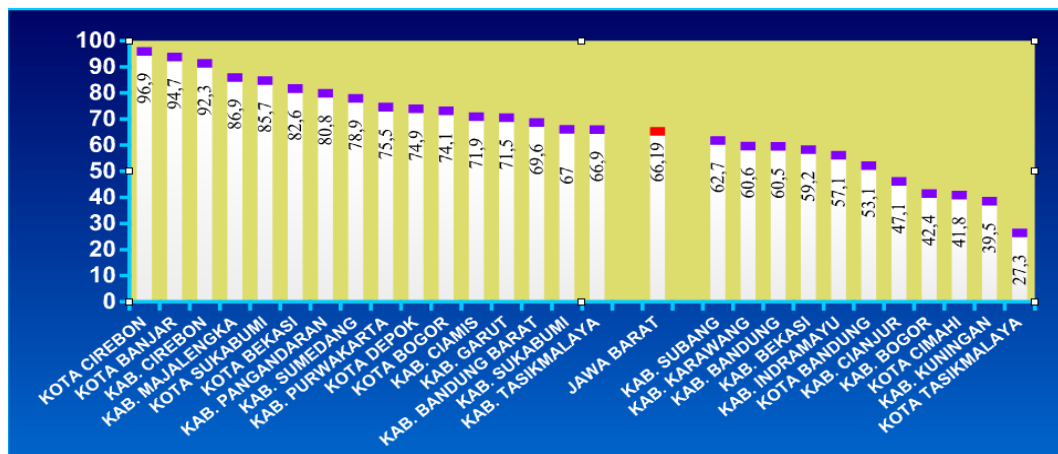


Terdapat 10 kabupaten/kota di Jawa Barat cakupan akses penduduk terhadap fasilitas sanitasi layak masih dibawah target MDGs di tahun 2015, yaitu Kota Tasikmalaya, Kota Sukabumi, Kab Pangandaran, Kab Karawang, Kab Sukabumi, Kota Bandung, Kab Tasikmalaya, Kab Cirebon, Kab Cianjur dan Kab Ciamis.

d. Tempat Tempat Umum Yang Memenuhi Syarat

Dalam upaya mengurangi risiko Tempat Tempat Umum (TTU) menjadi tempat penularan/sumber penyakit, maka dilakukan pemantauan terhadap TTU tersebut. seperti TTU yang rutin dilakukan pemantauan oleh kabupaten kota antara lain sarana pendidikan, sarana kesehatan dan sarana hotel.

Gambar VII. C.6
Persentasi Tempat Tempat Umum (TTU) Memenuhi Syarat Kesehatan
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



Berdasarkan pencatatan pelaporan kabupaten/kota di Jawa Barat selama tahun 2016 tercatat 36.049 buah Tempat Tempat Umum (TTU) yang terdiri dari Sarana Pendidikan SD – SLA sebanyak 32.893 buah, sarana kesehatan (RS dan Puskesmas) sebanyak 1.378 buah dan hotel sebanyak 1.778, diketahui 23.860 buah (66,19%) dinyatakan memenuhi syarat kesehatan, meningkat 6,73 point dibanding tahun 2015 yang hanya mencapai 59,46%. akan tetapi masih terdapat 12.189 buah (33,81%) TTU yang belum memenuhi syarat kesehatan.

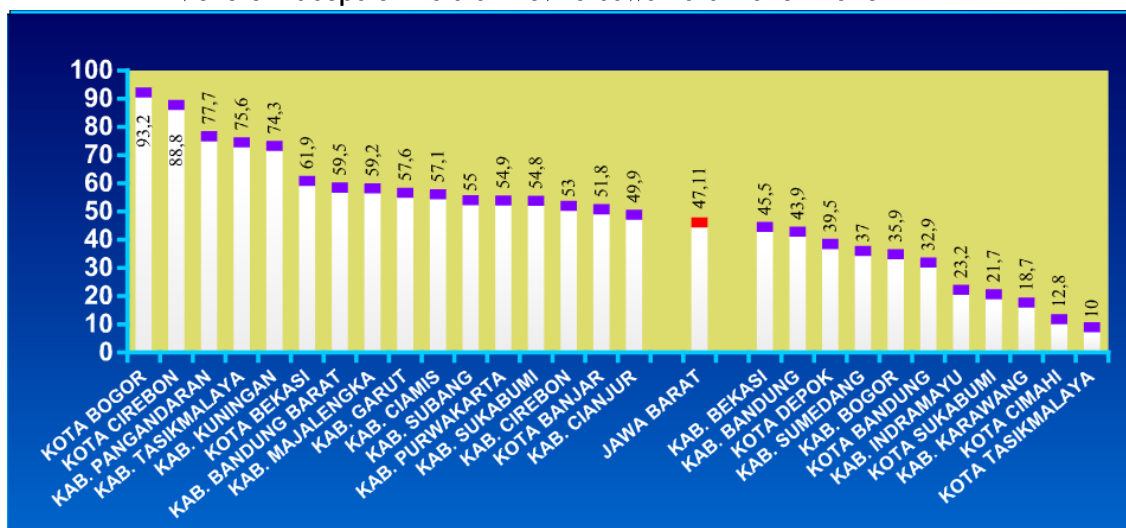
Cakupan Tempat Tempat Umum (TTU) tertinggi di Kota Cirebon sebesar 96,9% dan terendah di Kota Tasikmalaya sebesar 27,3%.

e. Tempat Tempat Pengolahan Makanan Memenuhi Syarat Gygiene Sanitasi

Dalam upaya mengurangi risiko Tempat Penolahan Makanan (TPM) menjadi tempat penularan/sumber penyakit, maka dilakukan pemantauan terhadap TPM tersebut, meliputi : Jasa Boga, Restoran, Depot Air dan Penjaja makanan

Berdasarkan pencatatan pelaporan kabupaten kota di Jawa Barat selama tahun 2016 tercatat Sebanyak 115.472 Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang terdaftar, dari pemeriksaan diketahui sebesar 47,11% memenuhi sarat Hygiene Sanitasi, naik 4,4 point dibanding tahun 2015 yang hanya mencapai 42,7 % .

Gambar VII. C. 7
Persentasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat Kesehatan Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



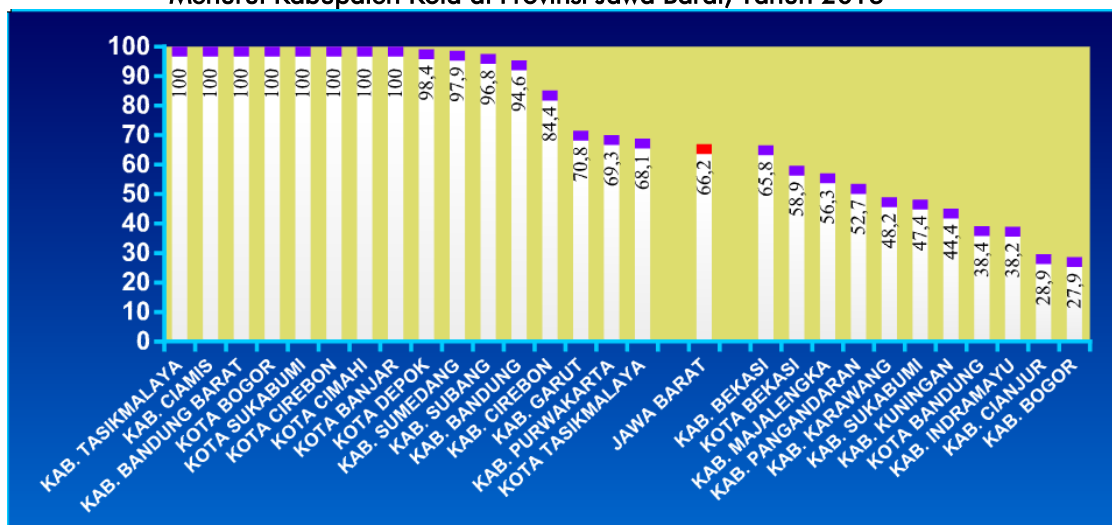
Dari jumlah 43.248 buah TPM yang belum memenuhi syarat dilakukan pembinaan sebanyak 28.865 buah (66,74%), hal ini masih terdapat 14.383 buah (33.26%) tidak dilakukan pembinaan. Kemudian dari jumlah 42.156 buah TPM yang memenuhi syarat kesehatan yang dilakukan uji petik 10.061 buah (23,87%).

f. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut sebagai STBM adalah Pendekatan untuk mengubah perilaku hygiene dan sanitasi meliputi 5 pilar yaitu tidak buang air besar (BAB) sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan yang aman, mengelola sampah dengan benar, mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan.

Sebuah wilayah desa/kelurahan disebut telah melaksanakan STBM apabila desa yang sudah melakukan pemicuan minimal 1 dusun, mempunyai tim kerja masyarakat/*natural leader*, dan telah mempunyai rencana tindak lanjut untuk menuju sanitasi total dan disebut desa STBM apabila desa yang telah mencapai 100 % penduduk melaksanakan 5 pilar STBM.

Gambar VII. C. 8
Cakupan (%) Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan STBM
Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2016



Desa/kelurahan yang telah melaksanakan pemicuan dan mempunyai tim kerja menuju sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)

tahun 2016 di Jawa Barat sebanyak 3.945 desa/kelurahan dari jumlah desa 5.962 desa/kel. (66,2%), cakupan meningkat 7 poin dibandingkan tahun 2015 yang hanya mencakup 59,2%, terdapat 11 kabupaten/kota yang cakupannya dibawah Jawa Barat, yaitu Kab. Bogor, Kab. Cianjur, Kab Indramayu, Kota Bandung, Kab Kuningan, Kab Sukabumi, Kab Karawang, Kab Pangandaran, Kab Majalengka, Kota Bekasi, dan Kab Bekasi . Dari 3.945 desa/kelurahan yang melaksanakan STBM, sebanyak 195 desa/kelurahan telah mencapai desa/kelurahan STBM, yaitu desa yang telah mencapai 100% penduduk melaksanakan 5 pilar STBM tersebar di 4 kabupaten/kota, yaitu Kota Depok ; 13 kelurahan (20,63%) , Kab Sumedang 75 desa (26,5%), Kab Karawang 70 desa (22,65%), Kab Bogor 37 desa (8,53%), adapun cakupan desa/kelurahan yang sudah mencapai desa stop BABS yaitu desa yang penduduknya 100% telah mengakses jamban sehat sebanyak 917 desa/kel (15,38%).

D. PENGENDALIAN PENYAKIT

Angka kesakitan dan kematian penyakit merupakan indikator dalam menilai derajat kesehatan suatu masyarakat. Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit perlu upaya pengendalian penyakit. Pengendalian penyakit yang akan dibahas pada bab ini yaitu pengendalian penyakit menular meliputi penyakit menular langsung dan penyakit yang ditularkan melalui binatang. Selain membahas pengendalian penyakit yang menjadi prioritas pembangunan kesehatan nasional, pada subbab ini juga dibahas pengendalian penyakit di daerah tropis yang salah satunya disebabkan oleh nyamuk, juga penyakit *neglected disease* seperti filariasis.

1. Pengendalian Penyakit Menular Bersumber Binatang

a. Malaria

Penyakit malaria mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap angka kesakitan dan kematian ibu, balita dan ibu melahirkan, pada tahun 2015 sistem pencatatan Malaria menggunakan e-SISMAL dimana data penemuan ACD, PCD dan lain-lain hanya meliputi kasus malaria positif saja.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pemberantasan malaria di Jawa Barat adalah :

- 1) Berdasarkan surat dari Dirjen PPPL Kemenkes RI tanggal 14 April 2015, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Bandung Barat sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat eliminasi Malaria dari Kementrian.
- 2) Angka kesakitan Malaria atau *Annual Parasite Incidence / API* untuk Jawa Barat tahun 2016 adalah 0,0053‰, dan Tidak ada Desa endemis tinggi Malaria.
- 3) Diagnosis Malaria di Jawa Barat 100% sudah menggunakan diagnosis terkonfirmasi Laboratorium dan sudah tidak ada diagnosis Malaria klinis.

a) Angka Kesakitan Malaria (*Annual Parasite Incidence / API*)

Tabel VII. D.1
Annual Parasite Incidence (API) di Daerah Reseptif Malaria Tahun
2011 – 2015

No	Kabupaten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Sukabumi	0,834 ‰	0,925‰	0,481‰	0,636‰	0,178‰	0,027‰
2	Garut	1,692‰	2,458‰	1,484‰	0,406‰	0,183‰	0,002‰
3	Tasikmalaya	0,160‰	0,135‰	0,304‰	0,238‰	0,151‰	0,034‰
4	Ciamis	0,664‰	0,570‰	0,380‰	-	-	-
5	Pangandaran	-	-	-	0,748‰	1,247‰	0,280‰
	Jawa Barat	0,535‰	0,535 ‰	0,781‰	0,495‰	0,257‰	0,211‰

Angka kesakitan Malaria yang diukur dengan *Annual Parasite Incidence / API* di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2011 sampai tahun 2016 cenderung menurun dari 0,535‰ pada tahun 2011 menjadi 0,211‰ pada tahun 2016, Begitu juga dengan Angka Kesakitan Malaria di kabupaten endemis (Kab Sukabumi, Kab Garut, Kab Ciamis, Kab Tasikmalaya dan Kab. Pangandaran) cenderung menurun semenjak diberikan kelambunisasi pada faktor resiko tahun 2013 program ini menunjukkan efektif untuk menurunkan angka kesakitan Malaria.

Kabupaten Ciamis pada tahun 2014 dimekarkan menjadi 2 Wilayah terdiri dari Kab Ciamis dan Pangandaran, dan semua daerah endemis di wilayah Kabupaten Ciamis sekarang masuk ke wilayah Kabupaten Pangandaran, sehingga endemis malaria hanya terdapat di 4 Kabupaten seperti diatas,

Sediaan Darah yang diperiksa sdebanyak 18.621 sampel darah, dan positif sebanyak 250 Sediaan Darah (1,34%) akan tetapi jumlah kasus

indigenous (kasus yang terjadi di wilayah setempat karena ada tempat perindukan nyamuk) hanya terjadi di 3 Kab/Kota, dengan perincian Pangandaran 6 kasus, Tasikmalaya 1 kasus, dan sukabumi 45 kasus, selebihnya kasus import (198 kasus).

Gambar VII.D.1
Annual Parasit Insiden (API) Malaria per 1000 penduduk di Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 1997 – 2016



b) Wilayah High Case Incidence

Wilayah *High Case Incidence* adalah desa yang memiliki kasus tinggi dengan API > 5 ‰ (*High Case Incidence/HCI*), jumlah kabupaten, kecamatan maupun desa dari tahun ke tahun berfluktuatif, pada tahun 2010, 2011 dan 2012 wilayah yang terdapat desa endemis tinggi ada di 2 kabupaten, dimana pada tahun 2010 terdapat di 2 desa di 2 kecamatan, pada tahun 2011 terdapat 4 desa di dua kecamatan, dan pada tahun 2012 terdapat lima desa di empat kecamatan, pada tahun 2013 hanya tinggal satu desa HCI yaitu di desa Mandalakasih Kecamatan Pameumpeuk Kabupaten Garut. Pada tahun 2014 ada dua desa HCI yaitu di desa Mandalakasih Kabupaten Garut dan desa Pasirmukti di Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan pada tahun 2016 tidak ada laporan desa HCI, pada data stratifikasi desa endemis masuk ke LCI dan MCI.

b. Demam Berdarah Dengue (DBD)

Penyakit Demam Berdarah Dengue merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang perlu mendapat perhatian cukup serius, karena penyakit ini dapat menimbulkan kematian dengan angka CFR cukup tinggi terutama dalam kondisi KLB. Penyakit ini belum ditemukan obatnya begitu juga vaksin pencegahannya, cara pemberantasannya adalah dengan pengendalian vektor baik secara Fisik, Biologi, maupun Kimia.

1) Trend Kasus DBD di Jawa Barat

Jumlah penderita penyakit DBD di Provinsi Jawa Barat tahun 2016 mencapai 37.418 kasus lebih tinggi dibanding tahun 2015 (22.111 kasus). demikian juga dengan risiko kejadian DBD di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan tajam dari 47.34/100.000 penduduk menjadi 78.98/100.000 penduduk. Jumlah Kematian DBD tahun 2016 mencapai 277 orang dengan CFR sebesar 0.74%, ini menunjukkan penurunan dibanding tahun 2015 yang sebesar 0,83%.

Gambar VII.D.2
Angka Kejadian dan Angka Kematian Penyakit DBD
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000 s.d. 2016



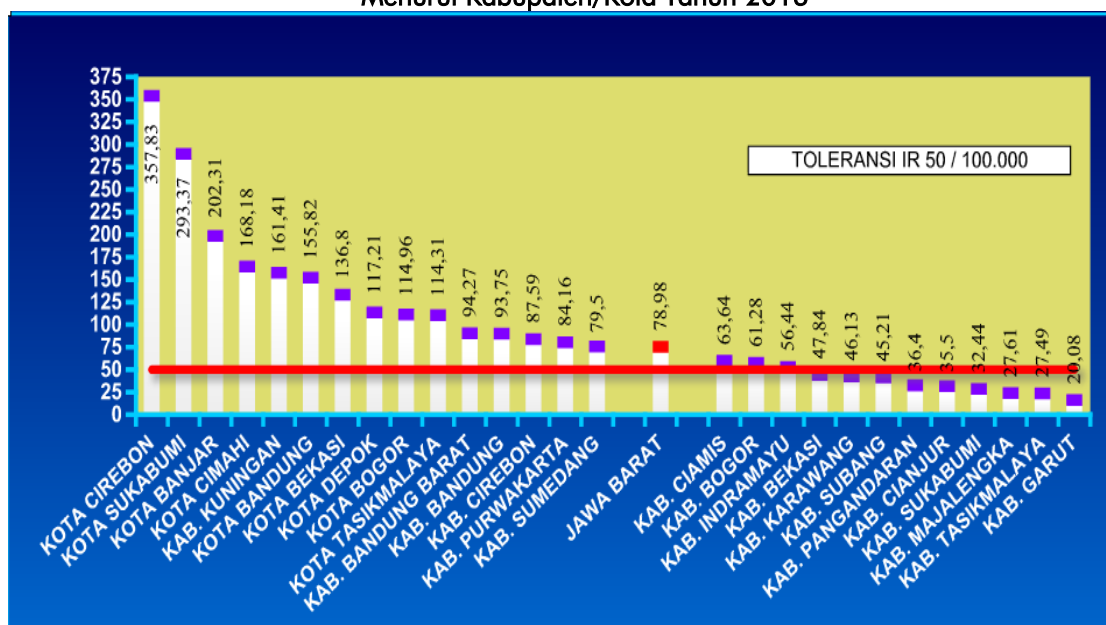
Dalam perkembangannya angka kematian DBD dari tahun 2000 sampai tahun 2015 menunjukkan penurunan, hal ini disebabkan karena adanya fasilitas kesehatan yang membaik dari kualitas maupun kuantitasnya tetapi angka kesakitan menunjukkan peningkatan sampai tahun 2009 dan setelah itu cenderung menurun. Namun tahun 2015 sedikit

meningkat dari 39,66/100.000 menjadi 47,34/100.000, dan pada tahun 2016 meningkat sangat tajam hingga mencapai 78,98% hal ini disebabkan terjadinya KLB DBD di beberapa Kabupaten/Kota.

2) Angka Kesakitan DBD Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2016

Toleransi ambang batas Angka Kesakitan DBD tahun 2015 yang ditetapkan kurang dari 50/100.000 penduduk, pada tahun 2016, Terjadi peningkatan insiden yang signifikan dari 47,3/100.000 menjadi 78,98/100.000, angka ini jauh melampaui ambang batas walaupun demikian masih terdapat 9 Kab/Kota yang masih mempertahankan Insiden Rate nya dibawah 50/100.000 penduduk yaitu : Kab Garut, Kab Tasikmalaya, Kab Majalengka, Kab Sukabumi, Kab Cianjur, Kab Pangandaran, Kab Subang, Kab Karawang, dan Kab Bekasi.

Gambar VII.D.3
Angka Kesakitan DBD
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016



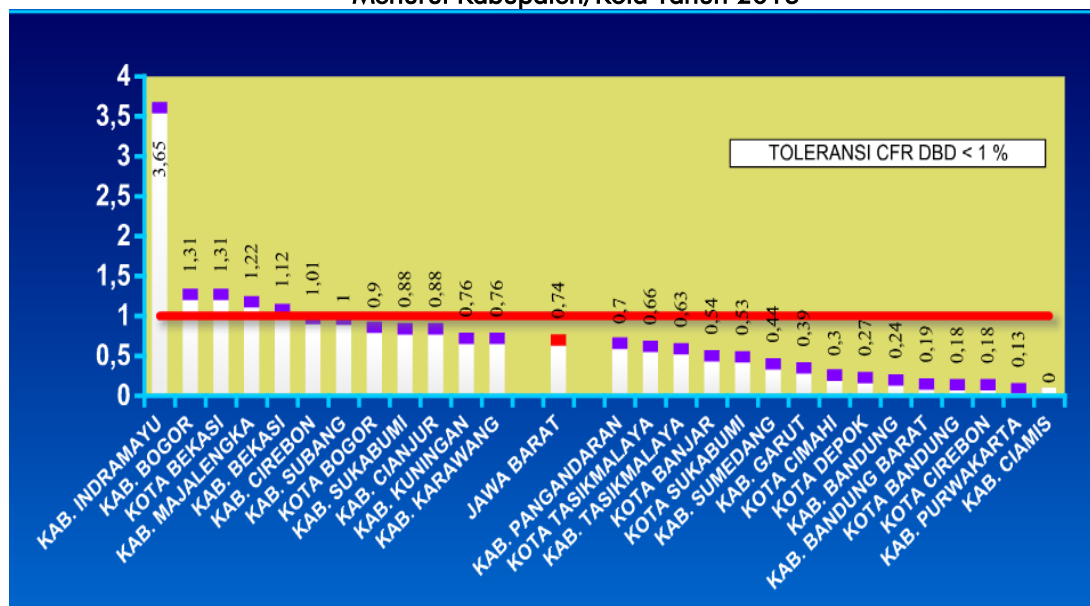
Angka kejadian DBD di wilayah kabupaten dengan kota menunjukkan perbedaan yang relatif besar, dimana angka kejadian DBD di kota menunjukkan angka yang lebih tinggi, tingginya angka kesakitan DBD di wilayah Perkotaan disebabkan oleh faktor sistem transportasi dan mobilitas penduduk yang tinggi, jumlah penduduk dan pemukiman yang padat, juga sebagai merupakan pusat pendidikan, pusat pemerintahan,

pusat ekonomi dan perdagangan sehingga dimungkinkan lebih besar pertukaran virus Den1, Den 2, Den 3, dan Den 4 antar manusia sebagai penyebab terjadinya kesakitan DBD, DB dan DSS. Faktor-faktor ini sulit untuk dikendalikan namun demikian ada hal hal yang bisa dilakukan dengan menekan kepadatan vektor melalui upaya PSN dan *Fogging*, dan dilakuan pengamatan dan pemantauan/surveilan vektor dan kasus melalui sistem kewaspadaan dini.

3) Angka Kematian DBD

Angka fatalitas/Angka Kematian (CFR) DBD tahun 2016 terdapat di 26 kabupaten/kota yang besarnya antara 0,13 – 3,65 %, CFR tertinggi terjadi di Kab Indramayu (3,65%) dan yang terendah Kab. Purwakarta (0,13%), serta Kab Ciamis tidak terdapat kasus kematian. Toleransi angka kematian < 1% , angka kematian Jawa Barat mencapai 0,74 % , terdapat di 5 Kabupaten/Kota dengan angka kematian >1 % yaitu : Kab Indramayu (3,65%), Kab Bogor (1,31%), Kota Bekasi 1,31%, Kab Majalengka 1,22%, Kab Bekasi 1,12%, dan Kab Cirebon 1,01%.

Gambar VII.D.4
Angka Kematian DBD
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016



c. Rabies

Situasi Rabies di Jawa Barat dari tahun ke tahun terus menunjukkan adanya penurunan, namun belum dapat dinyatakan menjadi daerah bebas

secara epidemiologi, walaupun Menteri Pertanian telah menyatakan bahwa Jawa Barat bebas rabies melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 566/Kpts/ PD.610/10/2004, tentang Pernyataan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Banten dan Jawa Barat bebas dari Penyakit Anjing Gila (Rabies), tanggal 6 Oktober 2004. Perlu penegakan UU No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta sosialisasi UU No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sehingga kegiatan pengendalian rabies dapat berjalan optimal. Dan pada tahun 2011 telah dibentuk Tim koordinasi Zoonosis Jawa Barat.

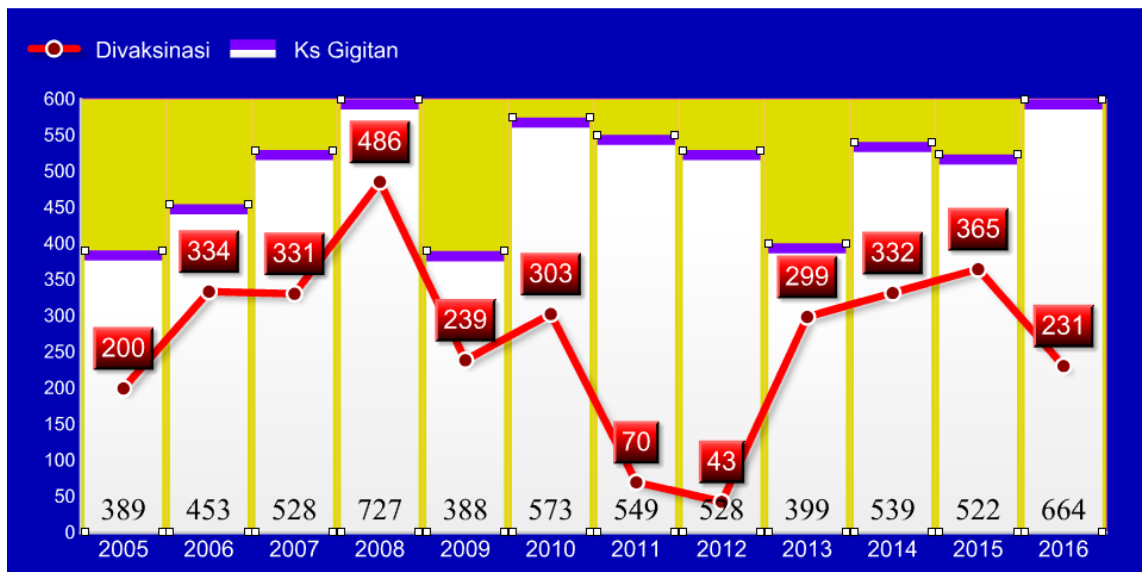
Jumlah kasus gigitan hewan penular rabies (HPR) di Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 2005-2016 sebanyak 6.259 kasus dengan rata-rata pertahun sebesar 521 kasus gigitan, terdapat 19 Kasus kematian rabies (*Lyssa*), yang tersebar di 5 Kabupaten yaitu Kab. Garut dengan 6 kematian, Kab. Sukabumi dengan 7 kematian, Kab. Cianjur dengan 4 kematian , Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, masing-masing dengan 1 kematian.

Dari 6.259 kasus gigitan yang mendapatkan Vaksin Anti Rabies sebanyak 3.233 orang (51,7%).

Tabel VII.D. 2
Jumlah Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (HPR)
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2016

PENDERITA GIGITAN HPR & LYSSA					LOKASI KASUS MENINGGAL
TAHUN	GIGITAN	VAR	LYSSA	MATI	
2005	389	200	1	1	Kab Garut
2006	453	334	2	2	Kab Garut 1 orang, Kab Tasikmalaya 1 org
2007	528	331	1	1	Kab Ciamis 1 orang
2008	727	486	3	3	Kab Cianjur 1 Org, Kab Sukabumi 2 org
2009	388	239	2	2	Kab Garut 2 org
2010	573	303	4	4	Kab Garut 2 org, Kab Sukabumi 2 org
2011	549	70	0	0	
2012	528	43	2	2	Kab Sukabumi 2 orang
2013	399	299	0	0	
2014	539	332	0	0	
2015	522	365	3	3	Kab Cianjur 3 orang
2016	664	231	1	1	Bojong Jengkol Jampang Tengah Sukabumi 1 org
TOTAL	6.259	3.233	19	19	

Gambar VII.D.5
Vaksinasi Jumlah Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (HPR)
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2016



d. Flu Burung (Avian Influenza-AI)

Kasus Flu Burung (Avian Influenza-AI) di Provinsi Jawa Barat cenderung terjadi secara sporadik, dan bergantian setiap tahun, kabupaten kota yang berbeda melaporkan adanya kejadian kasus Flu Burung. Meskipun demikian wilayah kabupaten/kota yang perbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta relatif selalu melaporkan penemuan kasus Flu Burung setiap tahunnya.

Penderita konfirmasi Avian Influenza di Jawa Barat periode tahun 2005 sd 2016 sebanyak 52 kasus dengan kematian 45 orang (CFR: 86,54%) yang tersebar di 14 Kab/Kota yaitu : Kota Bogor 2 penderita dengan 2 meninggal (CFR 100%), Kab Bogor 2 penderita dengan 2 orang meninggal (CFR 100%), Kota Depok 6 penderita dengan 6 orang meninggal (CFR 100%), Kota Bekasi 13 penderita dengan 11 orang meninggal (CFR : 84,6%), Kabupaten Bekasi 5 penderita dengan 5 orang meninggal (100%), Kab Karawang 3 penderita dengan 3 orang meninggal (CFR 100%), Kab Subang 1 orang penderita dengan 1 orang meninggal (CFR : 100%), Kab Indramayu 4 penderita dengan 3 orang meninggal (CFR : 75%), Kab Sumedang 3 penderita dengan 2 orang meninggal (CFR : 66,6%) , Kota Bandung 2 penderita dengan 1 orang meninggal (CFR : 50%), Kab Tasikmalaya 1 penderita dengan 1 orang meninggal (CFR : 100%), Kab Garut 5 penderita dengan 4 orang meninggal (CFR : 80 %) Kab Bandung 2 penderita dengan 2 orang meninggal (CFR :

100 %) Kab Bandung Barat 3 penderita dengan 2 orang meninggal (CFR : 66,6%).

Pada tahun 2012 kasus Flu Burung dilaporkan terjadi di dua kabupaten yaitu Kab. Bogor dan Kab. Karawang dengan CFR 100%. Pada tahun 2013 kejadian Flu Burung di dua kabupaten kota yaitu Kab. Bekasi dan Kota Bekasi, dengan jumlah kasus yang lebih tinggi yaitu 3 kasus dan CFR 100%.

Situasi kasus Flu Burung pada manusia tahun 2014 sebanyak 4 kasus suspek dan tidak ditemukan kasus positif, kasus suspek ditemukan di Kota bekasi (3 suspek) dan Kab. Bogor (1 suspek). Upaya yang dilakukan adalah penatalaksanaan kasus dan penyelidikan epidemiologi di wilayah sekitar kasus akan tetapi perlu diwaspadai dengan cermat mengingat kasus Flu Burung pada unggas di Jawa Barat pada tahun 2014 ditemukan di 52 desa, 37 kecamatan dan 11 Kabupaten/ Kota, tahun 2015 dan 2016 tidak ditemukan kasus suspek.

Tabel VII.D.3
Distribusi Penemuan Kasus Flu Burung pada manusia di Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2005 – 2016

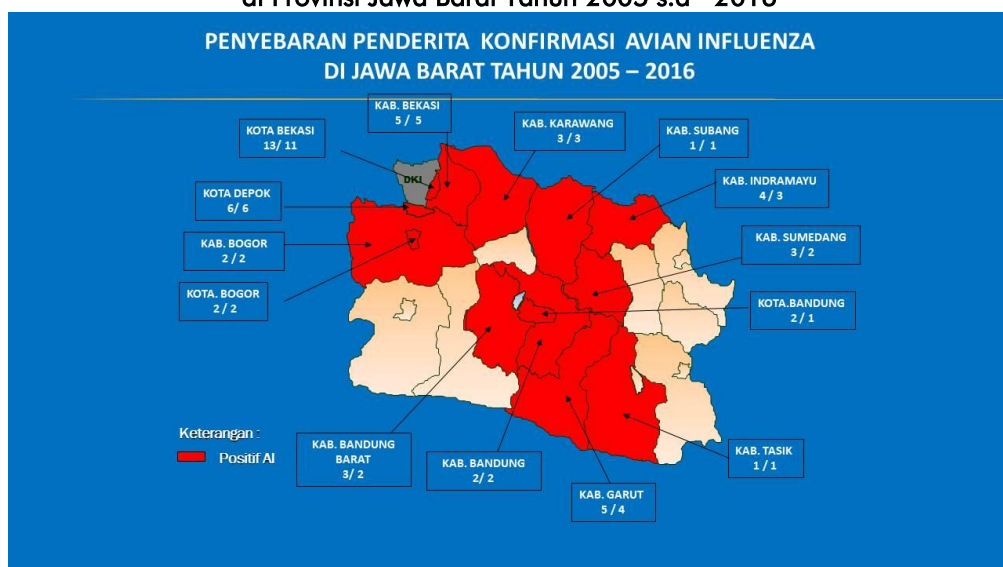
No	Kab / Kota	Suspect			Konfirmasi			Jumlah Kasus	M	CFR (%)
		P	M	CFR (%)	P	M	CFR (%)			
1	Kab. Bogor	7	2	28.6	2	2	100	9	4	44.4
2	Kab. Sukabumi	2	1	0	0	0	0	2	1	50
3	Kab. Cianjur	3	0	0	0	0	0	3	0	0
4	Bandung Barat	11	0	0	3	2	0	14	2	14
5	Kab. Bandung	30	3	10.0	2	2	0	32	5	15.6
6	Kab. Sumedang	14	0	0.0	3	2	0	17	2	12
7	Kab. Garut	47	4	9	5	4	0	52	8	15
8	Kab. Tasikmalaya	0	0	0	1	1	100	1	1	100
9	Kab. Ciamis	1	0	0	0	0	0	1	0	0
10	Kab. Kuningan	1	0	0.0	0	0	0	1	0	0
11	Kab. Cirebon	6	1	16.6	0	0	0	6	1	17
12	Kab. Majalengka	2	0	0	0	0	0	2	0	0
13	Kab. Indramayu	19	1	5.3	4	3	75.0	23	4	17.4
14	Kab. Subang	6	3	0	1	1	100	7	4	57
15	Kab. Purwakarta	4	0	0.0	0	0	0	4	0	0.0
16	Kab. Karawang	3	0	0.0	3	3	100	6	3	50.0
17	Kab. Bekasi	30	3	10	5	5	100	35	8	23
18	Kota Bogor	4	1	25	2	2	100	6	3	50
19	Kota Sukabumi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kota Bandung	31	6	19.4	2	1	50	33	7	21

21	Kota Cirebon	4	0	0	0	0	0	4	0	0
22	Kota Bekasi	31	6	19.4	13	11	83.3	44	96	37
23	Kota Depok	4	2	50	6	6	100	10	8	80
24	Kota Tasikmalaya	4	0	0	0	0	0	4	0	0
25	Kota Banjar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Kota Cimahi	2	1	50	0	0	0	2	1	50
27	Kab. Pangandaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jawa Barat		266	34	12.8	52	45	86.5	318	81	25.5

Tabel VII.D.4
Kasus Flu Burung (H5N1) Konfirmasi Lab Positif Berdasarkan Golongan Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 sd 2016

No	Umur	Jumlah Kasus	Mati	CFR (%)
1	< 5 Tahun	7	6	85,71
2	5 – 14 tahun	11	9	80,00
3	> 15 Tahun	34	30	88,24
Jumlah		52	45	86,54

Gambar VII.D.6
Sebaran Kasus Flu Burung di Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 s.d 2016



e. Anthraks

1. Jumlah kasus Anthraks berdasarkan tahun Kabupaten/Kota dan Pengobatan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 – 2014.

Tabel VII.D.5
Jumlah Kasus Anthraks di Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 – 2016

No	Tahun	Kabupaten/ Kota	Penderita			Pengobatan	Sembuh
			Kulit	Pencernaan	Resiko tertular		
1	2006	Kab. Bogor	1	-	-	-	1
		Kota Depok	8	-	13	-	7
2	2007	Kab. Bogor	3	-	-	-	3
3	2008	Kab. Bogor	9	-	-	-	9
4	2009	Kab. Bogor	2	-	-	-	2
5	2010	-	-	-	-	-	-
6	2011	-	-	-	-	-	-
7	2012	-	-	-	-	-	-
8	2013	-	-	-	-	-	-
9	2014	-	-	-	-	-	-
10	2015	-	-	-	-	-	-
11	2016	-	-	-	-	-	-

2. Distribusi kasus Anthraks berdasarkan kab/kota tahun 2006-2016

Tabel VII.D.6
Jumlah Kasus Anthraks Kabupaten/Kota Tahun 2006 – 2016

No	Tahun	Kab/Kota	Kasus	Mati	CFR (%)
1	2006	Kab. Bogor	1	0	0
		Kota Depok	8	1	12.5
2	2007	Kab. Bogor	3	0	0
3	2008	Kab. Bogor	9	0	0
4	2009	Kab. Bogor	2	0	0
5	2010	-	-	-	-
6	2011	-	-	-	-
7	2012	-	-	-	-
8	2013	-	-	-	-
9	2014	-	-	-	-
10	2015				
11	2016				

Dilihat dari tabel diatas penemuan kasus anthraks tahun 2006 terdapat di Kota Depok dengan jumlah kasus 8 orang, 1 orang meninggal (CFR : 12,5%) sedangkan di Kab. Bogor dilaporkan 1 orang tanpa adanya kematian. Tahun 2007 terdapat di Kab. Bogor dengan jumlah kasus sebanyak 3 orang tanpa ada kematian. Tahun 2008 terdapat di Kab. Bogor sebanyak 9 kasus tanpa ada kematian. Tahun 2009 terdapat 2 laporan kasus Antraks di Kabupaten Bogor dan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 tidak ditemukan kasus antraks di kabupaten/kota, tetapi perlu dilakukan pengamatan secara terus menerus terhadap daerah kantong antrak tersebut.

f. Pes

Pengamatan Penyakit Pes secara aktif dilakukan di daerah tertular pes yaitu di Desa Rawabogo Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung. Pengamatan dilakukan sejak tahun 2005 sampai dengan 2008 dengan hasil negative baik pada rodent maupun pinjal. Untuk kasus Pes selama tahun 2009 sampai 2016 tidak ada laporan dari daerah endemis.

g. Leptospirosis

Penanggulangan Leptospirosis di Jawa Barat masih bersifat pasif di sarana pelayanan kesehatan dan belum ditunjang dengan sarana pemeriksaan (laboratorium), sehingga belum diketahui hasil yang menggambarkan situasi daerah risiko tertular. Daerah tertular Leptospirosis di Provinsi Jawa Barat yang masih melakukan survey yaitu di Kab. Bekasi dan dilaporkan hasil pengamatan pada tahun 2007 terdapat 7 kasus postif Leptospirosis

Tabel VII.D.7
Kasus Leptospirosis di Provinsi Jawa Barat Tahun 2007 sd 2016

KASUS KONFIRMASI LAB DAN SUSPEK LEPTOSVIROSIS						
TAHUN	Konfirmasi Lab +	Meninggal	CFR	Suspek	Meninggal	CFR
2007	7	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0
2010	1	0	0	0	0	0
2011	29	4	13,79%	4	0	0
2012	4	4	100 %	0	0	0
2013	1	1	100%	1	1	100%
2014	27	0	0	0	0	0
2015	19	0	0	0	0	0
2016	15	0	0	0	0	0
TOTAL	103	9	8,74%	5	1	20%

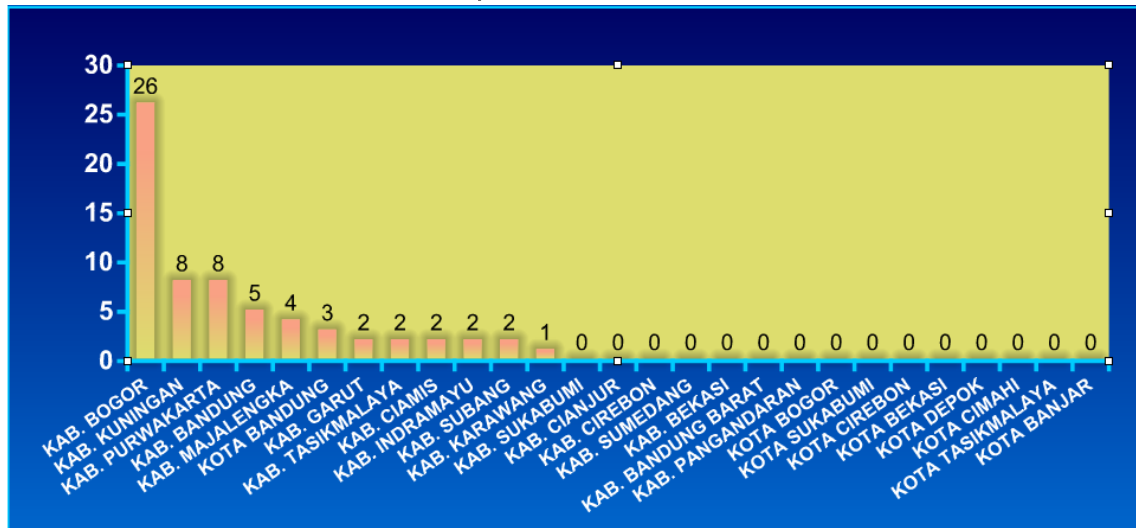
Tabel VII.D.8
Kasus Leptospirosis Berdasarkan Lokasi Terjangkit di Provinsi Jawa Barat Tahun 2007 sd 2016

KASUS KONFIRMASI LAB DAN SUSPEK LEPTOSVIROSIS						
KAB /KOTA	Konfirmasi Lab +	Meninggal	CFR	Suspek	Meninggal	CFR
Kab Bandung Barat	11	0	0	0	0	0
Kab bandung	24	1	0	0	0	0
Kota Bandung	54	6	11,1%	0	0	0
Kab Garut	1	0	0	0	0	0
Kab Tasikmalaya	1	1	0	0	0	0
Kota Banjar	0	0	0	4	0	0
Kota Cimahi	4	1	100	0	0	0
Kota Bekasi	0	0	0	1	1	100
Kab Bekasi	1	0	0	0	0	0
Kab Subang	4	0	0	0	0	0
Kab Sumedang	1	0	0	0	0	0
Kab Majalengka	1	0	0	0	0	0
Kab Purwakarta	1	0	0	0	0	0
TOTAL	103	9	8,74%	5	1	20%

h. Filariasis

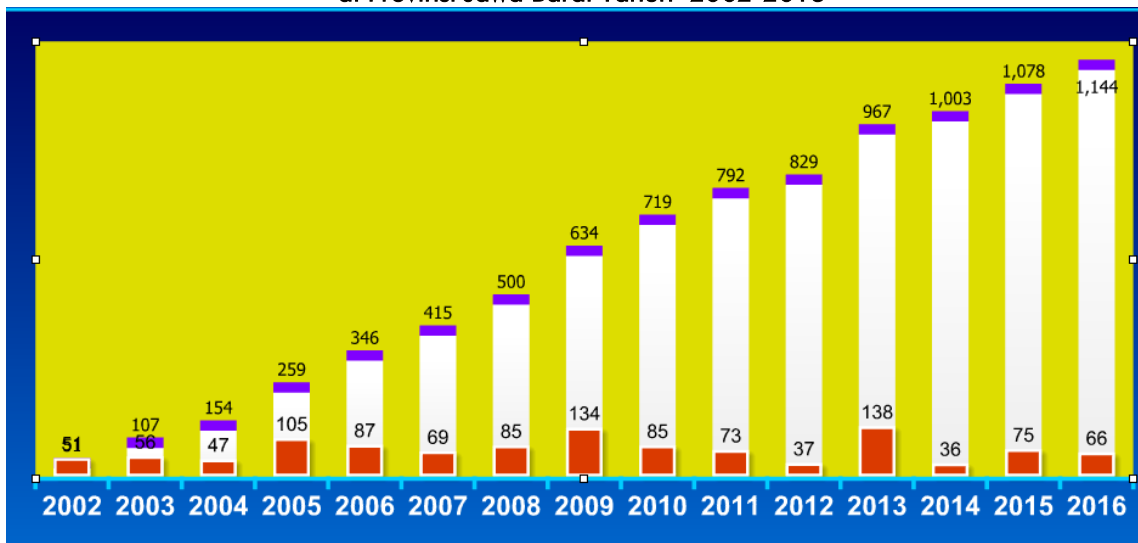
1) Kasus Filaria

Gambar VII.D.7
Kasus Filariasis Kronis Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



Kasus kronis Filariasis di Provinsi Jawa Barat tahun 2016 terbanyak 66 orang tersebar di 12 kab/Kota meliputi : Kab Bogor 26 kasus, Kab Kuningan 8 kasus, Kab Purwakarta 8 kasus, Kab Bandung 5 kasus, Kab Majalengka 4 kasus, Kota Bandung 3 kasus, , Kab Garut, Kab Tasikmalaya, Kab Ciamis, Kab Indramayu, Kab Subang masing masing 2 kasus, dan Kab Karawang 1 kasus.

Gambar VII.D.8
Kumulatif Kasus Filariasis di Provinsi Jawa Barat Tahun 2002-2016



Kejadian penyakit Filaria tahun 2002 s.d. 2016 secara kumulatif telah tercatat sebanyak 1.144 penderita, dan telah terjadi 3 kali KLB (tahun 2005,

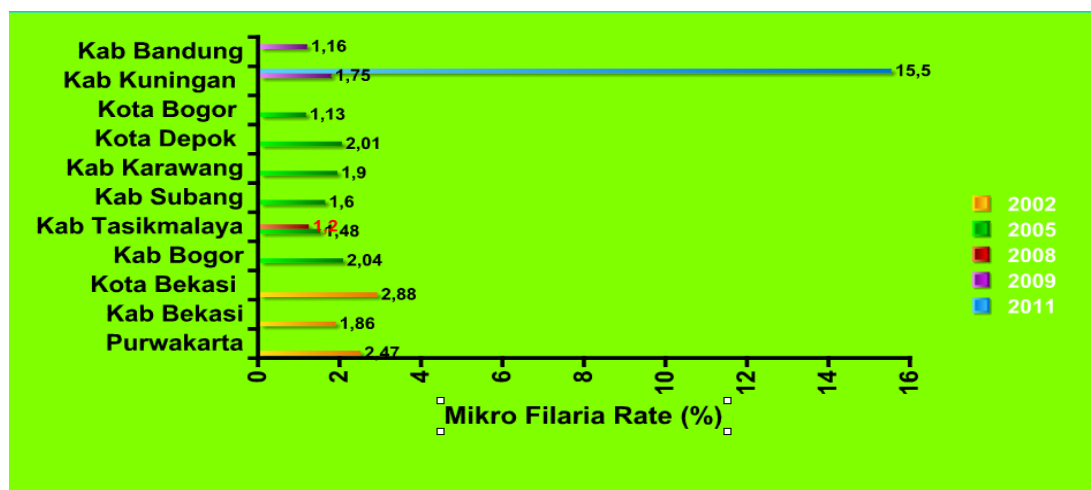
2009, 2013). Pada tahun 2005 terjadi peningkatan kasus dari 47 kasus di tahun 2004 menjadi 105 kasus pada tahun 2005, kemudian sampai tahun 2008 mengalami fluktuasi dengan kasus antara 69 – 87 orang, dan tahun 2009 kembali terjadi *out break* dengan kasus tercatat sebanyak 134 orang dan terdapat kematian sebanyak 3 orang. Kemudian berfluktuasi hingga tahun 2012 dengan kasus antara 37 – 85 orang, akan tetapi tahun 2013 meningkat tajam. Tercatat 138 kasus dan pada tahun 2016 ini kasus sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya

2) Survei Mikro Filaria

Deteksi kabupaten/kota endemis Filaria, dilaksanakan survey darah jari pada desa yang memiliki kasus kronis dengan memeriksa darah jari pada 300 orang yang tinggal disekitar tempat tinggal penderita kronis, dilaksanakan pada malam hari karena cacing Filaria Agresif di malam hari. Mikrofilaria (Mf) rate 1% atau lebih merupakan indikator suatu kabupaten/kota menjadi daerah endemis filariasis. Mf rate dihitung dengan cara membagi jumlah sediaan yang positif mikrofilaria dengan jumlah sediaan darah yang diperiksa dikali seratus persen.

Survei darah jari untuk mengetahui *Mikro Filaria Rate* telah dilakukan sejak tahun 2002 s.d. 2011, dengan hasil Mikro Filaria Rate antara 1,12% – 15,5% tersebar di 11 Kab/Kota yaitu Kab Tasikmalaya 1,12% dan 1,48%, Kota Bogor 1,13%, Kab. Bandung 1,16%, Kab. Subang 1,6%, Kab. Kuningan 1,75% dan 15,5%, Kab. Bekasi 1,86%, Kab. Karawang 1,9%, Kota Depok 2,01%, Kab. Bogor 2,04%, dan Kab. Purwakarta 2,47%.

Gambar VII..D.9
Survei Mikro Filaria
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2002-2011



3) Eliminasi Filariasis di Provinsi Jawa Barat

Pada tahun 1997, *World Health Assembly* menetapkan resolusi "*Elimination of Lymphatic Filariasis as a Public Health Problem*", yang kemudian pada tahun 2000 diperkuat dengan keputusan WHO dengan mendeklarasikan "*The Global Goal of Elimination of Lymphatic Filariasis as a Public Health Problem by the Year 2020*". Indonesia menetapkan Eliminasi Filariasis sebagai salah satu prioritas nasional penanggulangan penyakit menular. Upaya penanggulangan filariasis telah dilaksanakan sejak tahun 1975, terutama di daerah-daerah endemis filariasis tinggi. Menteri Kesehatan, Dr. Achmad Sujudi, pada tanggal 8 April 2002, telah menetapkan dimulainya upaya eliminasi filariasis di Indonesia pada acara Penganjangan Nasional Eliminasi Penyakit Kaki Gajah (Filariasis), di Desa Mainan, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Program Penanggulangan Filariasis menuju eliminasi filariasis 2020 menerapkan strategi sebagai berikut:

- a) memutuskan rantai penularan filariasis dengan POPM filariasis di kabupaten/kota endemis filariasis;
- b) mencegah dan membatasi kecacatan melalui penatalaksanaan kasus klinis filariasis;
- c) mengendalikan vektor secara terpadu;
- d) memperkuat surveilans, jejaring laboratorium, dan mengembangkan penelitian; dan
- e) memperkuat kerjasama lintas batas daerah dan negara, terutama dalam rangka memutus rantai penularan filariasis.

Jawa Barat sudah menerapkan dua strategi utama yaitu memutuskan rantai penularan dengan Pemberian obat massal pencegahan (POMP) Filariasis pada daerah endemis dan upaya pencegahan dan membatasi kecacatan melalui penatalaksanaan kasus klinis Filariasis. Pengobatan massal dilakukan setiap tahun sekali, dalam waktu minimal 5 tahun berturut-turut. Dengan upaya Pemberian obat massal pencegahan (POMP) Filariasis diharapkan dapat menurunkan angka microfilaria (*microfilaria rate*) menjadi kurang dari 1%.

2. Penyakit Menular Langsung

a. Diare

1) Pemberantasan Penyakit Diare

Hingga saat ini penyakit Diare masih merupakan masalah kesehatan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya angka kejadian Diare dari tahun ketahun dan banyaknya faktor risiko diare disekitar kita. Di dunia sebanyak 6 juta anak meninggal setiap tahun karena diare, sebagian kematian tersebut terjadi dinegara berkembang (Parashar, 2003). Menurut WHO, di Negara berkembang pada tahun 2003 diperkirakan 1.87 juta anak balita meninggal karena diare. Delapan dari 10 kematian tersebut pada usia <2 tahun. Rata rata anak usia <3 tahun dinegara berkembang mengalami episode diare 3 kali dalam setahun (WHO 2005).

Hasil survei Subdit Diare, angka kesakitan diare semua umur tahun 2000 adalah 301/1000 penduduk, tahun 2003 adalah 374/1000 penduduk dan tahun 2006 adalah 423/1000 penduduk. Kematian diare pada balita 75.3/100.000 dan semua umur 23.2/100.000 penduduk semua umur (SKRT 2012). Diare merupakan penyebab kematian nomor 4 (13.2%) pada semua umur dalam kelompok penyakit menular. Proporsi diare sebagai penyebab kematian nomor 1 pada bayi post neonatal (31.4%) dan pada anak balita (25,2%) (Risksedas 2007).

2) Cakupan Penanganan Diare

Penanganan kasus Diare di Jawa Barat terus meningkat dari 80,90% pada tahun 2007 menjadi 113,91 % pada tahun 2014, dengan sasaran penderita Diare sebesar 10% dari angka kejadian Diare 214 / 1000 penduduk, akan tetapi pada tahun 2015 angka kejadian Diare berubah menjadi 270/1000 dan tidak ditentukan target sasaran sebesar 10 % tetapi bergantung pada estimasi kemungkinan penderita diare yang berkunjung ke Puskesmas besarnya antara 10 – 20 % , akan tetapi untuk dapat membandingkan besaran masalah Diare antara Kab/Kota di Jawa Barat, dalam penyajiannya ditetapkan 10 % dari 270/1000 penduduk, sehingga cakupan penemuan Diare pada tahun 2016 sebesar 80,69 %, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

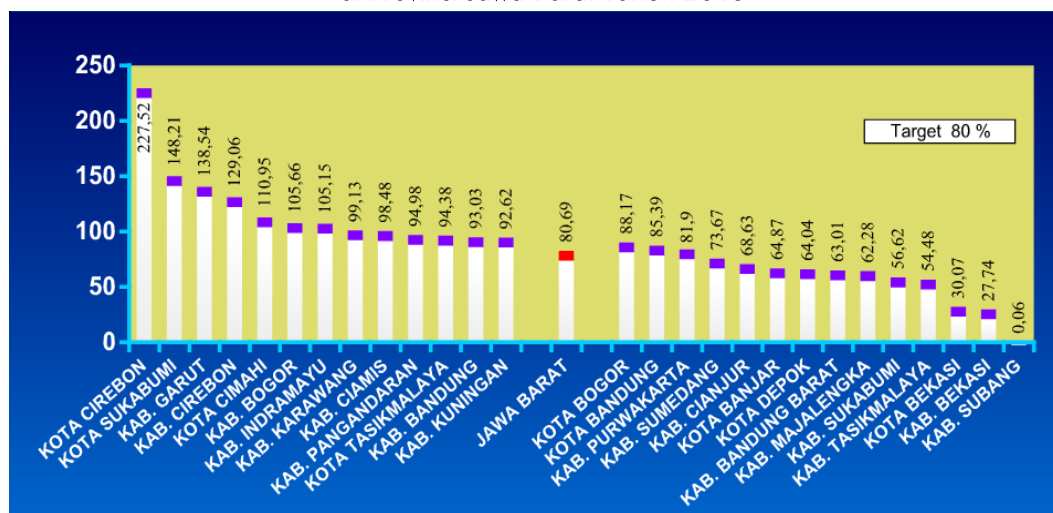
Gambar VII.D.10
Cakupan Pelayanan Diare
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2016



Sumber : Profil Kesehatan Jawa Barat Tahun 2007-2015

Jumlah Penderita Diare yang ditangani di Jawa Barat tahun 2016 sebanyak 1.032.284 orang, atau 80,6% dari target sasaran sebesar 10% x 270/1000 penduduk, akan tetapi angka penemuan diare di kabupaten/kota menunjukkan perbedaan yang ekstrim antar Kab/Kota, dengan besaran antara 0,06 % – 227,52 % , batas terendah kab sebang 0,06 % dan batas tertinggi Kota Cirebon 227,52% ., ini menunjukkan bahwa penentuan target sasaran penemuan diare 10% dari 70/1000 tidak bisa ditentukan, akan tetapi besaran masalah Diare dapat dilihat walaupun demikian tidak menutup kemungkinan untuk daerah yang cakupannya rendah diakibatkan oleh surveilan kasus diare yang kurang baik.

Gambar VII.D.11
Perbandingan Cakupan Diare Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



b. Kusta

Kasus tercatat Kusta di Jawa Barat tahun 2016 sebanyak 2.465 penderita dengan kasus MB 2.272 penderita (92,17%) dan Kasus PB 193 penderita (7,83%), dan kasus baru kusta sebanyak 2.057 orang dengan kasus MB 1.831 penderita (89,01%) dan Kasus PB 226 penderita (10,99%), sementara kasus pada anak sebesar 270 penderita (13,13%) tersebar di 15 kabupaten/kota, yaitu : Kab Bogor, Kab Sukabumi, Kab Garut, Kab Ciamis, Kab Kuningan, Kab Cirebon, Kab Indramayu, Kab Subang, Kab Purwakarta, Kab Karawang, Kab Bekasi, Kab Bandung Barat, Kab Pangandaran, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Tasikmalaya.

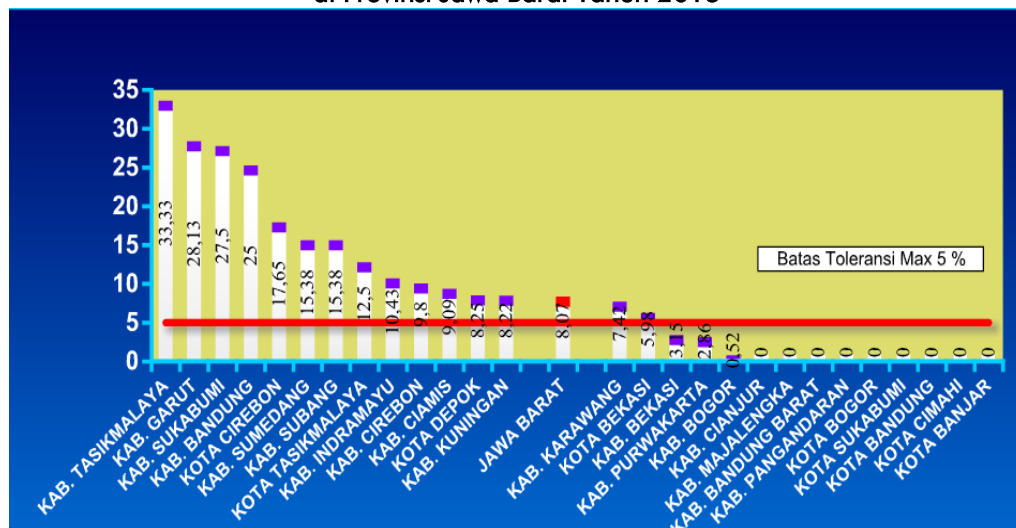
Tabel VII.D.9
Penemuan Kusta Baru, Kusta Tercatat, Kusta Anak, dan Kecacatan Tk.2
di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2008 – 2016

NO	KABUPATEN/KOTA	KASUS										Pngobatan (RFT)					
		Tercatat			Baru							PB/Kering	RFT PB (%)	MB/Basah	RFT MB (%)		
		Kering	Basah	Jml	Kering	Basah	Jml	anak (%)	Cacat Tk2 (%)								
1	KAB. BOGOR	11	310	321	11	181	192	24	13%	1	1%	9	9	100%	219	212	97%
2	KAB. SUKABUMI	5	35	40	5	35	40	3	8%	11	28%	3	3	100%	36	36	100%
3	KAB. CIANJUR	0	10	10	0	10	10	0	0%	0	0%	1	1	100%	11	11	100%
4	KAB. BANDUNG	9	21	30	0	4	4	0	0%	1	25%	3	3	100%	6	6	100%
5	KAB. GARUT	2	44	46	0	32	32	3	9%	9	28%	5	5	100%	13	12	92%
6	KAB. TASIKMALAYA	0	8	8	0	6	6	0	0%	2	33%	0	0	0%	17	15	88%
7	KAB. CIAMIS	3	9	12	3	8	11	1	9%	1	9%	6	5	83%	12	11	92%
8	KAB. KUNINGAN	7	76	83	17	56	73	20	27%	6	8%	27	26	96%	51	49	96%
9	KAB. CIREBON	11	222	233	25	220	245	96	39%	24	10%	16	15	94%	202	196	97%
10	KAB. MAJALENGA	3	151	154	0	50	50	0	0%	0	0%	3	3	100%	47	47	100%
11	KAB. SUMEDANG	0	14	14	0	13	13	0	0%	2	15%	0	0	0%	21	15	71%
12	KAB. INDRAMAYU	11	275	286	24	187	211	16	8%	22	10%	30	23	77%	217		0%
13	KAB. SUBANG	24	171	195	24	171	195	11	6%	30	15%	32	31	97%	135	129	96%
14	KAB. PURWAKARTA	3	32	35	3	32	35	2	6%	1	3%	9	9	100%	57	52	91%
15	KAB. KARAWANG	53	338	391	53	338	391	41	10%	29	7%	53	38	72%	338	0	0%
16	KAB. BEKASI	19	235	254	19	235	254	28	11%	8	3%	5	5	100%	208	198	95%
17	KAB. BANDUNG BARAT	4	12	16	5	11	16	3	19%	0	0%	1	0	0%	5	5	100%
18	KAB. PANGANDARAN	1	9	10	1	9	10	0	0%	0	0%	0	0	0%	4	4	100%
19	KOTA BOGOR	2	15	17	2	15	17	0	0%	0	0%	0	0	0%	15	13	87%
20	KOTA SUKABUMI	0	2	2	0	2	2	0	0%	0	0%	2	0	0%	2	2	100%
21	KOTA BANDUNG	3	6	9	1	6	7	0	0%	0	0%	2	2	100%	8	8	100%
22	KOTA CIREBON	1	18	19	1	16	17	0	0%	3	18%	1	3	300%	7	4	57%
23	KOTA BEKASI	12	132	144	20	97	117	7	6%	7	6%	15	14	93%	130	118	91%
24	KOTA DEPOK	9	115	124	12	85	97	14	14%	8	8%	3	3	100%	59	32	54%
25	KOTA CIMAH	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
26	KOTA TASIKMALAYA	0	8	8	0	8	8	1	13%	1	13%	0	0	0%	0	0	0%
27	KOTA BANJAR	0	4	4	0	4	4	0	0%	0	0%	0	0	0%	4	4	100%
	JAWA BARAT	193	2.272	2465	226	1.831	2.057	270	13%	166	8%	226	198	88%	1.824	1.179	65%

Penemuan kusta baru tahun 2016 sebanyak 2057 orang diantaranya pada kasus anak sebanyak 270 orang (13%) dan kusta kecacatan tingkat 2 mencapai 166 orang (8%), ini menunjukkan kecacatan tingkat 2 berada diatas batas toleransi maksimal 5%. Kondisi seperti ini bisa diinterpretasikan terdapat permasalahan mendasar dalam pelaksanaan program pengendalian kusta, seperti terlambatnya deteksi dini baik oleh petugas kesehatan (keterlambatan petugas dalam penemuan penderita kusta). Maupun oleh penderita kusta (keterlambatan penderita kusta mencari pengobatan).

Selama periode tahun 2010 – 2016 angka kecacatan selalu diatas 5 %, pada tahun 2010 mencapai 15,5%, turun menjadi 7,9 % di tahun 2011 dan naik kembali pada tahun 2012 mencapai 13,9%, kemudian sedikit turun menjadi 12,1% pada tahun 2013, pada tahun 2014 angka kecacatan kusta masih 12,06%, turun sedikit pada tahun 2015 turun menjadi 11,59%, dan pada tahun 2016 turun menjadi 8%, Berdasarkan kabupaten/kota penemuan kusta dengan kecacatan tingkat 2 terdapat di 18 kabupaten/kota, dengan prosentasinya dibawah 5% terdapat di 3 Kab/Kota yaitu : Kab Bekasi, Kab Purwakarta dan Kab Bogor.

Gambar VII.D.12
Penemuan Kusta Dengan Kecacatan Tingkat 2
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



Prevalensi merupakan indikator yang menunjukkan besarnya masalah di suatu daerah dan menentukan beban kerja. Angka prevalensi didapat dari jumlah kasus kusta terdaftar PB dan MB pada 1 tahun. Di Jawa Barat selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 Prevalensi kusta cenderung menurun

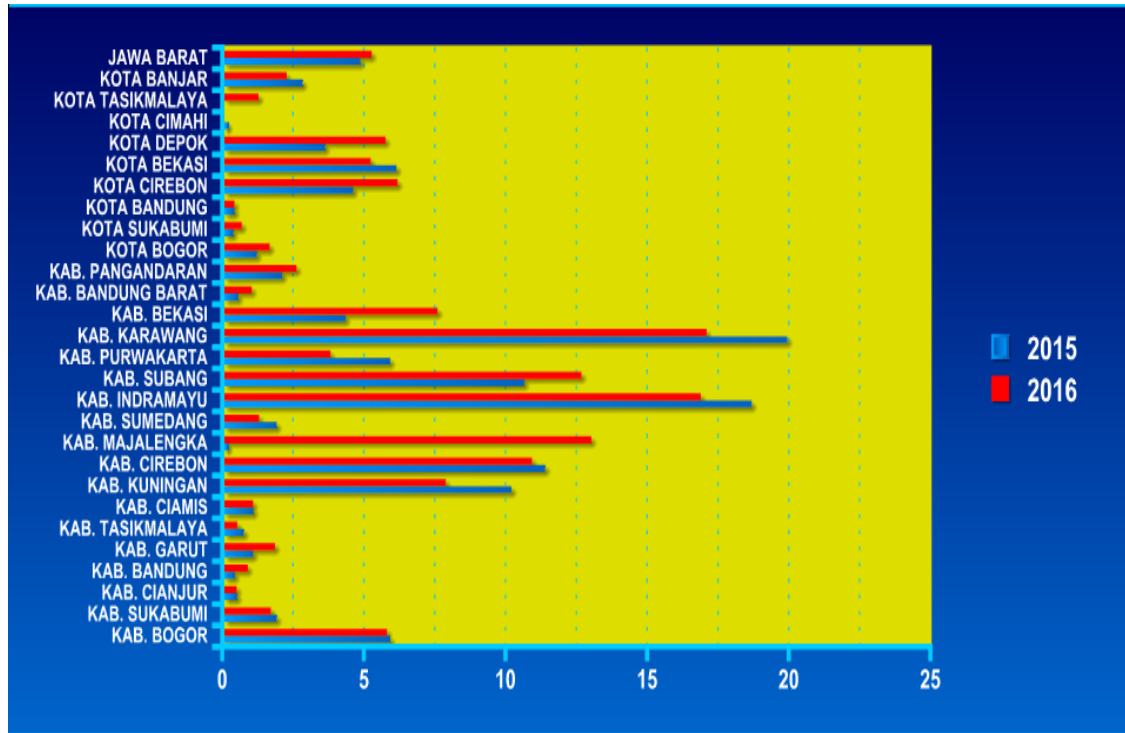
dari 0,59/10.000 penduduk pada tahun 2008 menjadi 0,52/10.000 pada tahun 2016 begitu juga dengan angka penemuan kasus baru (CDR) yang didapatkan dengan jumlah penemuan kasus baru kusta yang ditemukan pada periode 1 tahun dan merupakan indikator yang paling bermanfaat dalam menetapkan besarnya masalah dan transmisi yang sedang berlangsung. Dalam kurun waktu 2008 – 2016, penemuan kusta baru (CDR) cenderung menurun dari 5,5/ 100.000 atau 0,55/10.000 pada tahun 2005 menjadi 4,3/100.000 atau 0,43/10.000 pada tahun 2016, pada tahun 2011 antara CDR dan Prevalensi berada pada angka yang sama (0,5/10.000) dan tahun 2012 sama sama mengalami kenaikan selanjutnya secara perlahan terus kedua indikator tersebut sejalan menurun, namun tahun 2016 cenderung meningkat.

Gambar VII.D.13
Prevalensi Kusta dan Case Detection Rate / 100.000 Penduduk di Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2016



Berdasarkan kabupaten/kota perbandingan prevalensi kusta tahun 2016 terhadap tahun 2015 yang mengalami peningkatan terdapat di 12 kabupaten/kota, yaitu : Kab. Majalengka naik 12,9 poin, Kab Bekasi 3,3 poin, Kota Depok 2,1 poin, Kab Subang 2 poin, Kota Cirebon 1,6 poin, Kota Tasik 1,2 poin, Kab Garut 0,8 poin, Kab Pangandaran 0,5 poin, Kab Bandung Barat 0,5 poin, Kab Bandung 0,5 poin, Kota Bogor 0,5 poin, dan Kota Sukabumi 0,3 poin.

Gambar VII.D.14
Perbandingan Prevalensi Rate (PR/10.000) Penyakit Kusta, Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 – 2016



c. Tuberkulosa

Indonesia sekarang berada pada ranking kelima negara dengan beban TB tertinggi di dunia. Estimasi prevalensi TB semua kasus adalah sebesar 660,000 (WHO, 2010) dan estimasi insidensi berjumlah 430,000 kasus baru per tahun. Jumlah kematian akibat TB diperkirakan 61,000 kematian per tahunnya.

Indonesia merupakan negara pertama diantara *High Burden Country* (HBC) di wilayah WHO *South-East Asian* yang mampu mencapai target global TB untuk deteksi kasus dan keberhasilan pengobatan pada tahun 2006. Pada tahun 2009, tercatat sejumlah 294.732 kasus TB telah ditemukan dan diobati (data awal Mei 2010) dan lebih dari 169.213 diantaranya terdeteksi BTA+. Dengan demikian, *Case Notification Rate* untuk TB BTA+ adalah 73 per 100.000 (*Case Detection Rate* 73%). Rerata pencapaian angka keberhasilan pengobatan selama 4 tahun terakhir adalah sekitar 90% dan pada kohort tahun 2008 mencapai 91%. Pencapaian target global tersebut merupakan tonggak pencapaian program pengendalian TB nasional yang utama.

Target program Penanggulangan TB nasional yaitu eliminasi pada tahun 2035 dan Indonesia bebas TB tahun 2050. Strategi nasional Penanggulangan TB terdiri atas: penguatan kepemimpinan program TB; peningkatan akses layanan TB yang bermutu; pengendalian faktor risiko TB; peningkatan kemitraan TB; peningkatan kemandirian masyarakat dalam Penanggulangan TB; dan penguatan manajemen program TB.

Sasaran strategi nasional pengendalian TB hingga 2019 mengacu pada rencana strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 yaitu menurunkan prevalensi TB dari 297 per 100.000 penduduk menjadi 245 per 100.000 penduduk. Saat ini diperkirakan ada 1 dari setiap 3 kasus TB yang masih belum terdeteksi oleh program.

1) *Case Notification Rate (CNR)*

Case Notification Rate (CNR) adalah angka yang menunjukkan jumlah pasien yang ditemukan dan tercatat dalam laporan triwulanan pasien baru TBC (TB 07) diantara 100.000 penduduk di suatu wilayah tertentu. Angka ini apabila dikumpulkan serial akan menggambarkan kecenderungan penemuan kasus dari tahun ke tahun di wilayah tersebut, angka ini berguna untuk menunjukkan *trend* atau kecenderungan meningkat atau menurunnya penemuan pasien TBC pada wilayah tersebut.

Pada tahun 2016 ditemukan kasus suspec TB Paru yaitu Orang yang memiliki gejala utama batuk berdahak selama 2-3 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan gejala tambahan yaitu dahak bercampur darah, batuk berdarah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, malaise, berkeringat malam hari tanpa kegiatan fisik, demam meriang lebih dari satu bulan sebanyak 259.933 kasus dari hasil pemeriksaan Lab hanya ditemukan kasus baru indikasi BTA + sebanyak 34.070 orang, atau 13,11% dari suspec TB Paru angka ini masih dalam batas toleransi antara 5 – 15 %, jika angka ini < 5% itu menunjukkan penjarangan suspec terlalu longgar atau ada masalah dalam pemeriksaan lab (negatif palsu) dan sebaliknya jika > 15 % menunjukkan penjarangan terlalu ketat atau ada masalah dalam pemeriksaan lab (positif palsu) , Jumlah keseluruhan kasus TB Paru pada tahun 2016 sebanyak 57.247 kasus

dan kasus pada anak sebanyak 6.600 orang (11,53%) , secara epidemiologi CNR TB Paru dapat dilihat pada gambar dibawah ini

Gambar VII.D.15
Case Notification Rate (CNR) TBC Paru dalam 100.000 Penduduk
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 – 2016

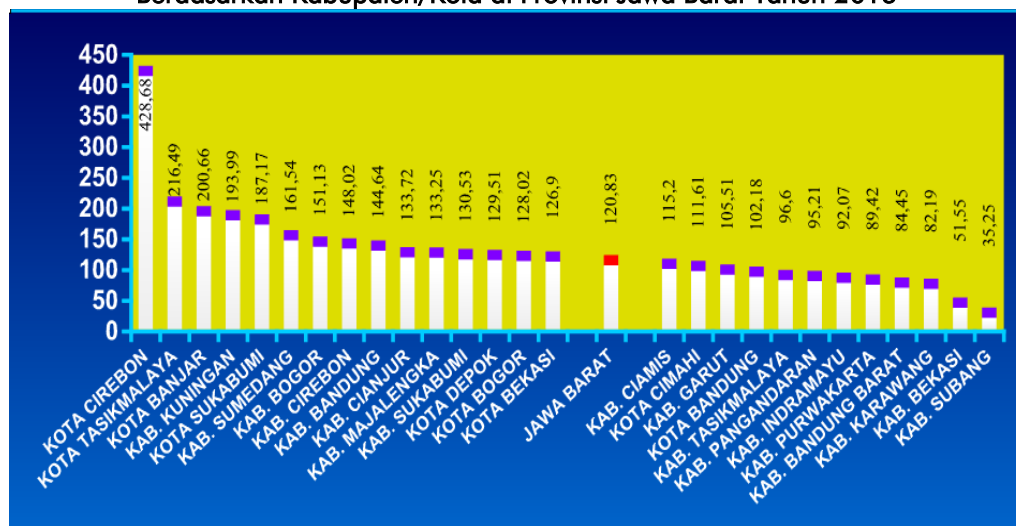


Trend CNR di Provinsi Jawa Barat periode tahun 2010 - 2015 cenderung naik, dari 76,22/100.000 pada tahun 2010 menjadi 138,87/100.000 pada tahun 2015, dan pada tahun 2016 mengalami penurunan cukup signifikan pada posisi 120,25/100.000

Jumlah kasus TB Paru yang ditemukan dan tercatat dalam laporan berdasarkan kabupaten/kota per 100.000 penduduk, antara 35,25 /100.000 (Kab.Subang) hingga 428,68 (Kota Cirebon) dengan rata rata 136,13, Terdapat 14 Kab/Kota dengan CNR dibawah Jawa Barat (120,58), yaitu Kab Subang, Kab Bekasi, Kab Karawang, Kab Bandung Barat, Kab Purwakarta, Kab Indramayu, Kab Pangandaran, Kab Tasikmalaya, Kota Bandung, Kab Garut, Kota Cimahi dan Kab Ciamis

tinggi-rendahnya angka CNR di suatu wilayah selain dipengaruhi oleh upaya penemuan kasus (case finding) juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kinerja sistem pencatatan dan pelaporan di wilayah tersebut, jumlah fasyankes yang terlibat layanan DOTS, dan banyaknya pasien TB yang tidak dilaporkan oleh fasyankes.

Gambar VII.D.16
Case Notification Rate (CNR) TBC Paru dalam 100.000 Penduduk
Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



- 2) Angka Kesembuhan (Cure Rate), Pengobatan Lengkap (Complete Rate) dan Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate)

a) Angka Kesembuhan (Cure Rate)

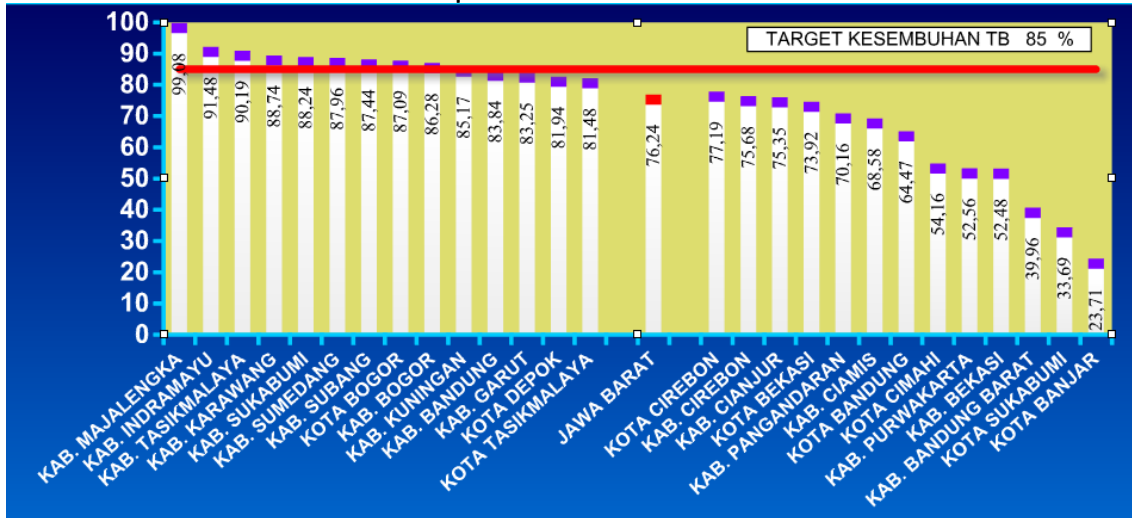
Adalah angka yang menunjukkan prosentase pasien TBC paru BTA positif yang sembuh setelah selesai masa pengobatan diantara pasien TBC Paru BTA positif yang tercatat. Angka kesembuhan dihitung tersendiri untuk pasien baru TBC Paru BTA positif yang mendapat pengobatan kategori 1 atau pasien TBC Paru BTA positif pengobatan ulang dengan kategori 2, angka ini dihitung untuk mengetahui keberhasilan program dan masalah potensial, angka indikator kesembuhan menurut program secara nasional adalah $\geq 85\%$.

Dari 30.047 BTA + yang diobati yang dinyatakan sembuh sebanyak 25.974 kasus (76,24%) angka ini masih dibawah target 85%, dan jika dibandingkan dengan tahun 2015 turun 5,51 point yang pada saat itu ada dalam angka 81,75%

Dari 27 kabupaten/kota terdapat 17 kabupaten/kota yang belum mencapai $\geq 85\%$, yaitu Kota Banjar, Kota Sukabumi, Kab Bandung Barat, Kab Bekasi, Kab Purwakarta, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kab Ciamis, Kab Pangandaran, Kota Bekasi, Kab Cianjur, Kab Cirebon, Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, Kota Depok, Kab Garut, dan Kab Bandung, cakupan

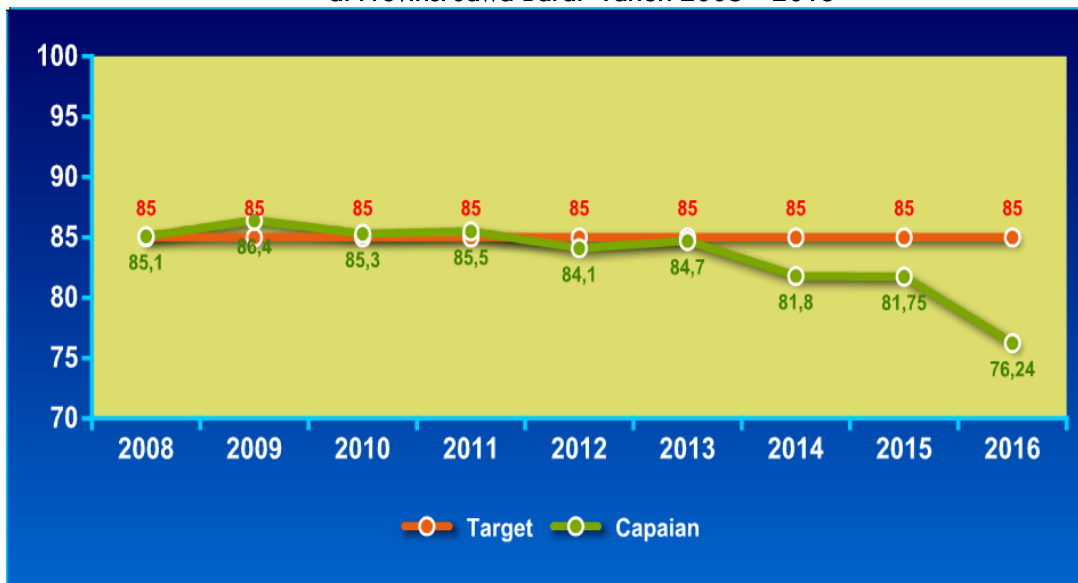
tertinggi dicapai oleh Kab. Majalengka (99,08%) dan terendah Kota Banjar (23,71%).

Gambar VII.D.17
Angka Kesembuhan (Cure Rate) TBC Paru
Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



Jika dilihat pola tahunan selama 2008 – 2016 angka kesembuhan cenderung menurun dari 85,1 pada tahun 2008 menjadi 76,24 tahun 2016, angka tertinggi pada tahun 2009 mencapai 86,4% dan angka terendah terjadi pada tahun 2016 dengan cakupan 76,24 %.

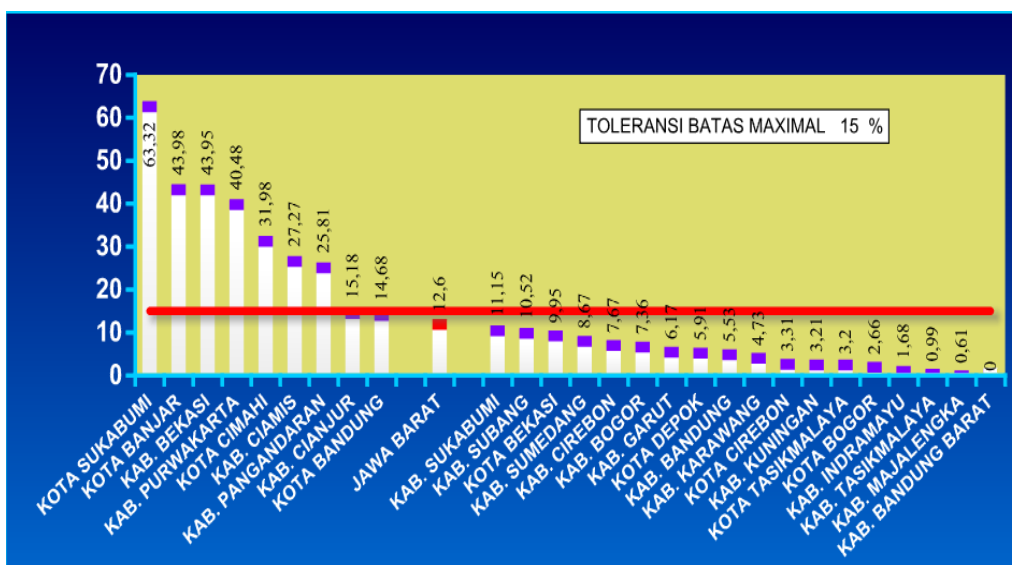
Gambar VII.D.18
Pola Angka Kesembuhan (Cure Rate) TBC Paru
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2016



b) Angka Pengobatan Lengkap (*Complete Rate*)

Pengobatan Lengkap adalah pasien yang telah menyelesaikan pengobatannya secara lengkap tetapi tidak memenuhi persyaratan sembuh atau gagal, ini mengindikasikan semakin besar angka complete rate semakin besar proses pengobatan tidak dilakukan diagnosa laboratorium akhir. angka Jawa Barat sebesar 12,63 %, angka Kab/Kota antara 0,61 – 63,32%, terdapat 8 Kab/Kota yang diluar ambang batas > 15% yaitu Kota Sukabumi, Kota Banjar, Kab Bekasi, Kab Purwakarta, Kota Cimahi, Kab Ciamis, Kab Pangandaran dan Kab Cianjur angka *Complete rate* terbesar terjadi di Kota Sukabumi (63,32%) dan terendah di Kab Majalengka (0,61%.)

Gambar VII.D.19
Angka Pengobatan Lengkap (*Complete Rate*) TBC Paru
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

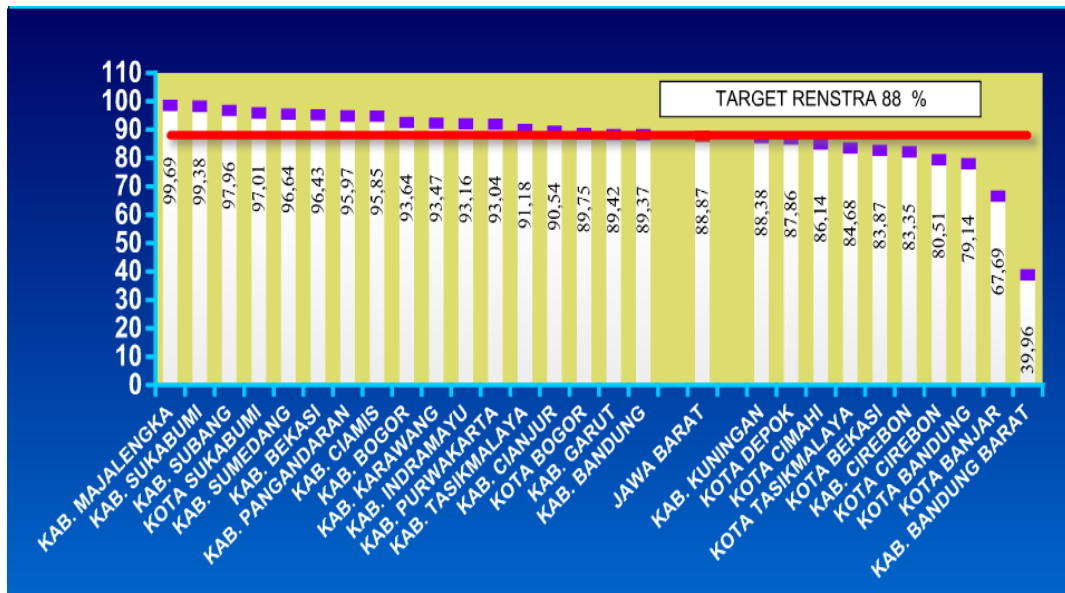
c) Angka Keberhasilan Pengobatan TB (*Traetmet Success Rate*)

Adalah angka yang menunjukkan prosentase pasien baru TB Paru, terkonfirmasi *bacteriologis* yang menyelesaikan pengobatan (baik yang sembuh maupun pengobatan lengkap) diantara pasien baru TB Paru terkonfirmasi *bacteriologis* yang tercatat. Dengan demikian angka ini merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap.

Renstra Jawa Barat menargetkan Angka Keberhasilan Pengobatan sebesar 88% dan hasil yang telah dicapai pada tahun 2016 sebesar

88,87%. Terdapat 9 kabupaten/kota yang belum mencapai target, yaitu Kab Bandung Barat, Kota Banjar, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kab Cirebon, Kota Bekasi, Kota Tasikmalaya, Kota Cimahi dan Kota Depok. Cakupan terbesar dicapai oleh Kab. Majalengka 99,69% dan terendah adalah Kab Bandung Barat (39,96%), Jumlah kematian sebanyak 417 orang dengan angka kematian selama pengobatan 9/10.000 penduduk.

Gambar VII.D.20
Angka Keberhasilan Pengobatan (TSR) TBC Paru
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



d. Pneumonia

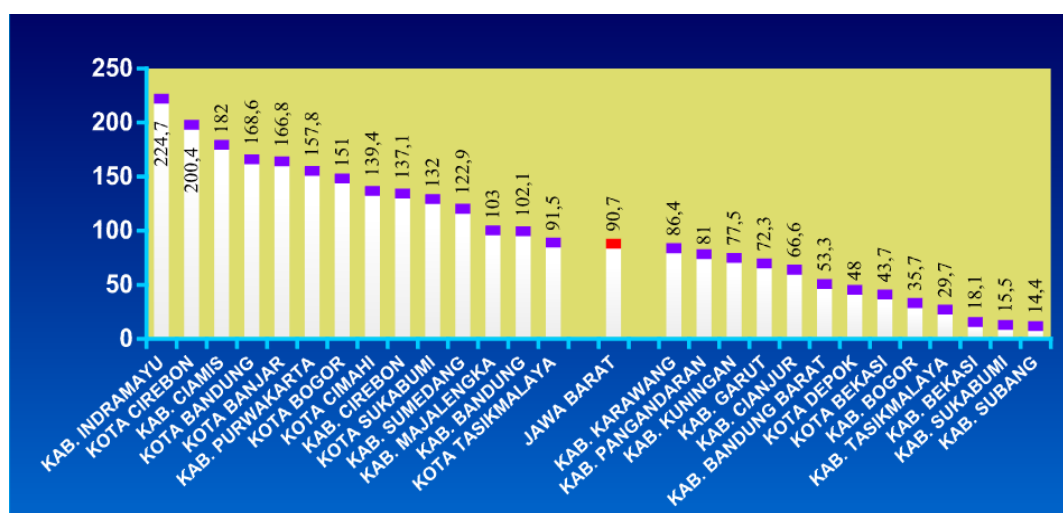
Pneumonia masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia terutama pada Balita. Menurut hasil Riskesdas 2007, pneumonia merupakan pembunuh nomor dua pada Balita (13,2%) setelah diare (17,2%). Hasil survei morbiditas yang dilaksanakan oleh subdit ISPA dan Balitbangkes menunjukkan angka kesakitan 5,12%, namun karena jumlah sampel dinilai tidak representatif maka subdit ISPA tetap menggunakan angka WHO yaitu 10% dari jumlah Balita. Angka WHO ini mendekati angka SDKI 2007 yaitu 11,2%. Jika dibandingkan dengan hasil penelitian oleh Rudan, et al (2004) di negara berkembang termasuk Indonesia insidens pneumonia sekitar 36% dari jumlah Balita.

Berdasarkan hasil Riskesdas 2013 Insiden Jawa Barat tahun 2013 adalah 1,9 persen (Nasional 1,8%) dan prevalensi pneumonia 4,9 persen

(Nasional 4,5%). Lima kabupaten/kota yang mempunyai insiden dan prevalensi pneumonia tertinggi untuk semua umur adalah Kota Tasikmalaya, Kab. Sumedang, Kab. Tasikmalaya, Kab. Bandung Barat, dan Kab. Purwakarta. Faktor risiko yang berkontribusi terhadap insidens pneumonia tersebut antara lain gizi kurang, ASI eksklusif rendah, polusi udara dalam ruangan, kepadatan, cakupan imunisasi campak rendah dan BBLR. Cakupan Pneumonia dihitung dari Jumlah kasus ditemukan dan ditangani dibagi Angka Sasaran Pneumonia (Jumlah Balita x 10%).

Cakupan penemuan Pneumoni di Jawa Barat dengan sasaran 10% dari Jumlah balita selama tahun 2000 sampai dengan tahun 2015 antara 34.5% sampai dengan 52.7%. tetapi untuk tahun 2016 menggunakan target sasaran sebesar 4,62% dari jumlah balita sehingga angka Pneumonia ditemukan sebesar 90,7% dengan range antara 14,4 % - 224,7 %

Gambar VII.D.21
Cakupan Pneumoni di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



Terdapat 13 Kab/Kota dengan cakupan melebihi 100% hal ini menunjukkan bahwa besarnya angka penemuan kasus berdasarkan riskesdas tahun 2013 di 13 Kab/Kota tersebut tidak sesuai, penemuan kasus di daerah tersebut masih menunjukkan angka 10 % dari sasaran (Jumlah Balita).

e. HIV/AIDS dan IMS

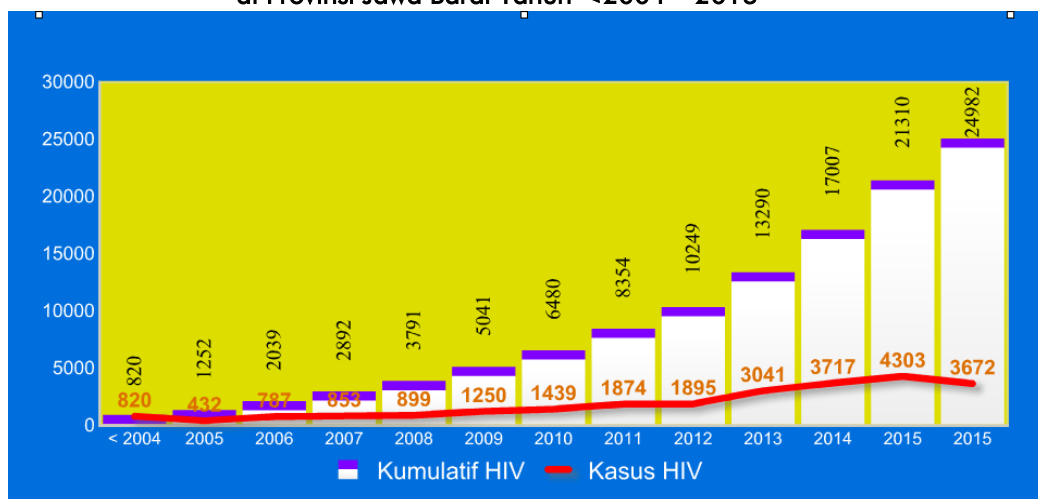
Acquired Immunodeficiency Syndrome atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (disingkat AIDS) adalah sekumpulan gejala dan infeksi (atau:

sindrom) yang timbul karena menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV. *Human Immunodeficiency Virus* (atau disingkat HIV) yaitu virus yang memperlemah kekebalan pada tubuh manusia. Orang yang terkena virus ini akan menjadi rentan terhadap infeksi oportunistik ataupun mudah terkena tumor. Meskipun penanganan yang telah ada dapat memperlambat laju perkembangan virus, namun penyakit ini belum benar-benar bisa disembuhkan.

1) Kasus HIV di Jawa Barat 2016

Kumulatif HIV di Jawa Barat sampai tahun 2016 yaitu sebanyak 23.301 kasus. Selama periode < 2004 – 2016 pola penemuan kasus HIV positif cenderung meningkat, akan tetapi pada tahun 2016 tercatat sebanyak 3.672 menurun jika dibanding tahun 2015 sebesar 4.303, dengan lokasi terjangkit tersebar di 27 Kabupaten/Kota. Kasus HIV berdasarkan Jenis Kelamin sebesar 58,42% laki laki dan 41,68% Perempuan, Berdasarkan Kelompok umur < 4 tahun sebesar 3,30%, kelompok umur 5-14 tahun sebesar 1,59%, kelompok umur 15-19 tahun sebesar 2,5%, kelompok umur 20-24 tahun sebesar 16,78%, kelompok umur 25-49 tahun sebesar 72%, dan kelompok umur > 50 tahun sebesar 3,83%.

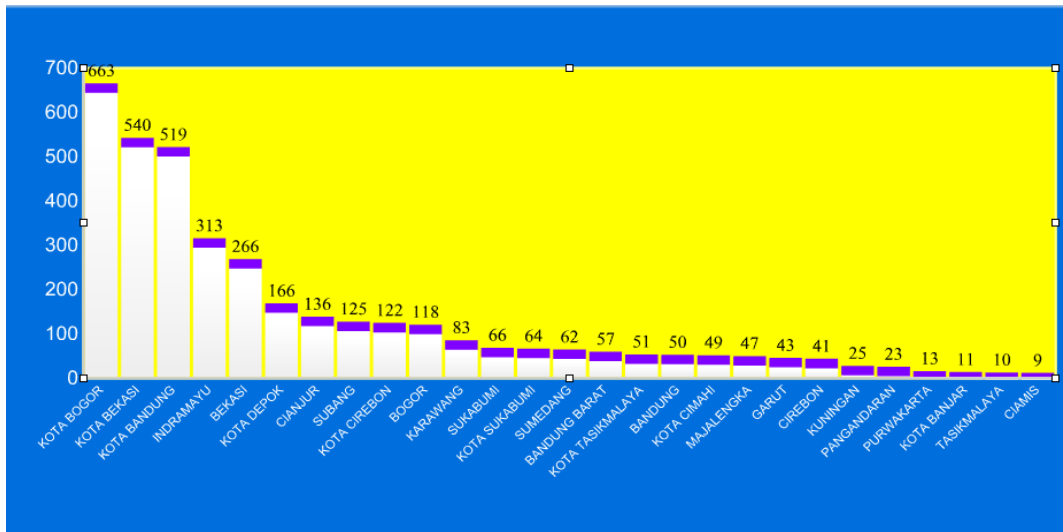
Gambar VII.D.22
Kumulatif HIV dan Kasus HIV
di Provinsi Jawa Barat Tahun <2004 – 2016



Berdasarkan kelompok risiko kasus HIV terjadi pada : WPS 8,96 %, PPS 0,39 %, Waria 1,85 %, LSL 13,10 %, IDU 4,02 %, Pasangan Risti 15,02 %, Pelanggan PS 9,46 % dan faktor lainnya 47,21 %. Kasus HIV tertinggi di Kota Bandung

sebanyak 746 kasus (17,34%) dan terendah di Kab. Pangandaran 4 kasus (09%) untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

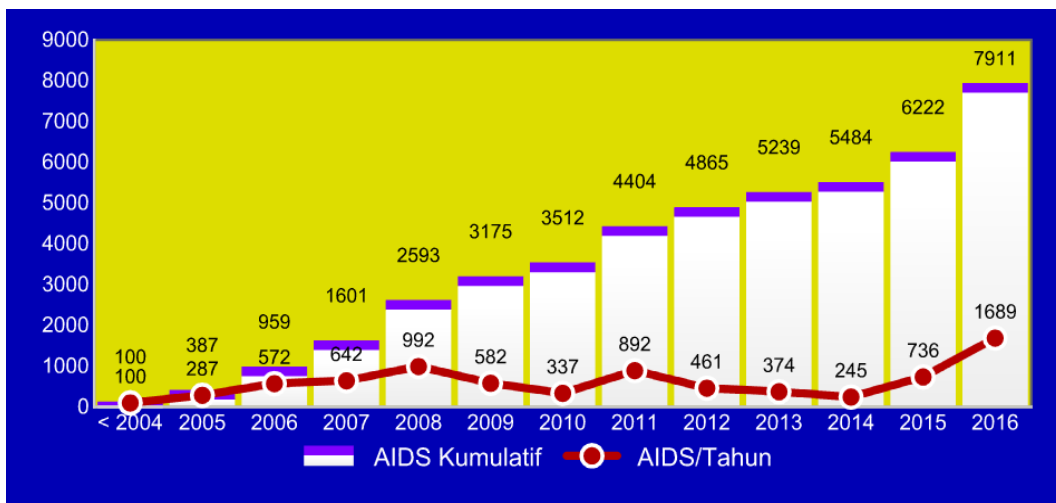
Gambar VII.D.23
Kasus HIV Berdasarkan Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



2) Kasus AIDS

Kumulatif penderita AIDS di Jawa Barat sampai tahun 2016 yaitu sebanyak 7.911 kasus. Selama periode <2004 – 2015 pola penemuan kasus AIDS berfluktuatif, dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008.

Gambar VII.D.24
Cakupan Penemuan Kasus AIDS
di Provinsi Jawa Barat Tahun < 2004 – 2016



AIDS cenderung meningkat namun sampai dengan tahun 2010 kecenderungannya menurun, pada tahun 2011 terjadi peningkatan tajam (265%) mencapai 892 kasus dibanding tahun 2010 yang hanya 337 kasus, dan hingga

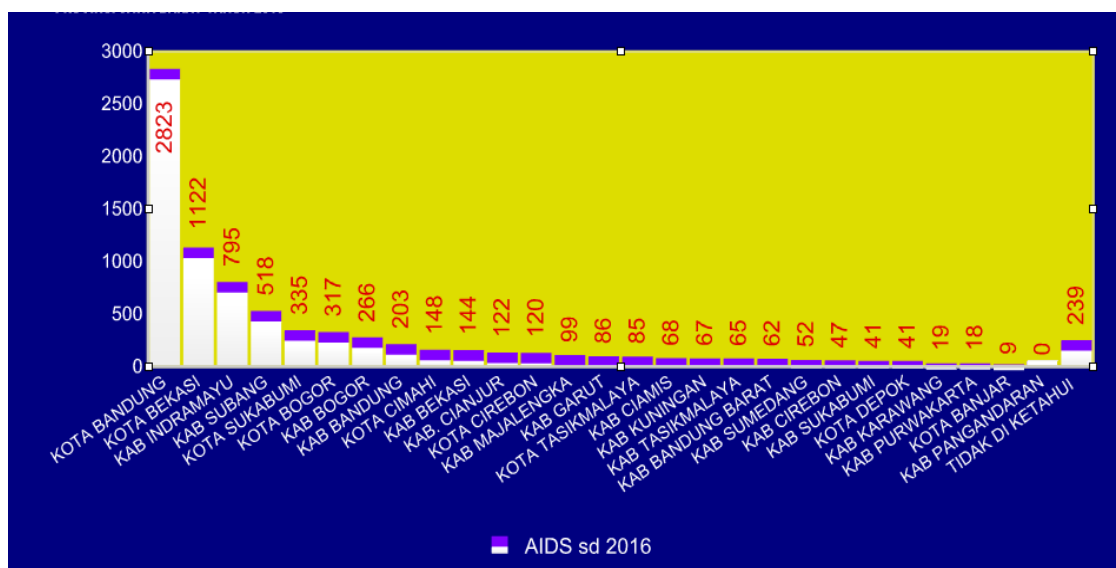
tahun 2014 kasus AIDS terus menurun, akan tetapi tahun 2015 kembali meningkat hingga 300 % dari 245 kasus AIDS pada tahun 2014 menjadi 736 Kasus AIDS pada tahun 2015, dan pada tahun 2016 penemuan AIDS mencapai 1.689 meningkat 230 % dibanding tahun 2015.

Berdasarkan jenis kelamin dan umur Kasus AIDS terjadi pada laki laki sebesar 5.354 orang (67,68%), perempuan 2.539 orang (32,09%) dan tidak diketahui 18 orang (0,23%), sebagian besar terjadi pada usia 20 – 39 tahun mencapai 80,89 %, berdasarkan Faktor resiko 88,1 % terjangkit pada *Hetero Sex* dan Pengguna Napza Suntik, dengan perincian *Homo Sex/Bisex* 4,1%, *Hetero Sex* 40,3% Pengguna Napza suntik 47,8%, Transfusi 0,2%, Tاتoo 0,1%, Perinatal/Anak 4,2%, dan tidak diketahui 3,2%. Berdasarkan Status Pekerjaan ternyata AIDS banyak terjangkit pada kelompok Tidak Bekerja 25,06%, Karyawan 14,08%, Wiraswasta 13,69%, Ibu Rumah Tangga 13,05% Wanita Pekerja Sex 5,88%, Mahasiswa/siswi 3,1%, Buruh 3,02% Pekerjaan Lainnya 8,9% dan tidak diketahui 13,21%, Berdasarkan Laporan kasus AIDS telah dilaporkan oleh Kab/Kota di Jawa Barat sebesar 7672 orang (96,98%) dan dari kab/kota diluar Jawa Barat sebesar 239 orang (3,02%) dengan lokasi terjangkit di 26 Kabupaten/Kota dari 27 Kabupaten/Kota (96,3%) persentasi tertinggi di Kota Bandung 35,68% dan terendah Kota Banjar 0,11% , Kab Pangadaran tidak ditemukan kasus AIDS. Untuk kasus *Unclass* (Tidak diketahui) sebanyak 239 kasus dilaporkan oleh 19 wilayah yaitu dari DKI Jakarta sebanyak 169 orang, Kota Tangerang sebanyak 21 orang, sisanya 17 wilayah lainnya sebanyak 49 orang.

Tabel VII.D.10
Kasus AIDS Menurut Kelompok Umur, Tahun 2016

NO	KELOMPOK UMUR	AIDS	Proporsi (%)
1	< 1	61	0,77
2	1 - 4	194	2,45
3	5 – 14	100	1,26
4	15 – 19	88	1,11
5	20 – 29	3431	43,37
6	30 – 39	2968	37,52
7	40 – 49	721	9,11
8	50 – 59	177	2,24
9	> 60	28	0,35
10	Tidak diketahui	143	1,81
TOTAL		7911	100

Gambar VII.D.25
Kasus AIDS berdasarkan Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Barat Tahun <2004 -2016



3. Penyakit yang dapat Di Cegah Dengan Imunisasi (P3DI)

Surveilans penyakit yang dapat dicegah oleh Imunisasi, mempunyai peran menentukan daerah rawan/resiko tinggi, Memantau kemajuan penanggulangan, dan memberikan rekomendasi kegiatan penanggulangan dengan strategi pelaksanaan program imunisasi, fokus terhadap Eradikasi Polio (Upaya menghilangkan angka Insiden di dunia), Eliminasi (Upaya menurunkan Insiden menjadi 0) Campak, Surveilans Diptheri dan Tetanus Neonatorum.

a. Diptheri

Penyakit Diptheri merupakan salah satu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Meskipun cakupan imunisasi DPT3 sudah cukup tinggi, namun kejadian Diptheri setiap tahun di Jawa Barat secara sporadis selalu ditemukan oleh kabupaten kota. Penegakan diagnosa Diptheri ditentukan secara konfirmasi laboratorium melalui pemeriksaan apus tenggorokan (APT). Permasalahan penyakit Diptheri selain karena tingkat fatalitasnya yang tinggi, juga adanya *carrier*, yaitu orang yang tubuhnya terinfeksi kuman bakteri namun tidak menampilkan gejala diptheri, dan sangat potensial meningkatkan risiko penularan Diptheri.

Penemuan kasus Diptheri sangat dipengaruhi oleh aktivitas surveilans aktif kabupaten kota. Situasi Diptheri di Jawa Barat tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 berfluktuasi, pada tahun 2009 terjadi 28 kasus, pada tahun 2010 sebanyak 27 kasus kemudian pada tahun 2011 meningkat tajam menjadi 45 kasus (166%), Diptheri turun kembali menjadi 31 kasus pada tahun 2012, dan tahun berikutnya 2013 relatif sama sebanyak 32 kasus, kemudian meningkat tajam pada tahun 2014 mencapai 45 kasus (145%), melihat pola kasus penyakit diptheri selalu terjadi peningkatan setiap 3 tahun, dan diprediksi tahun 2015 akan turun namun ternyata tahun 2015 meningkat menjadi 59 situasi ini menunjukkan pola tak beraturan perlu dilakukan pengamatan kasus secara terus menerus, dan pada tahun 2016 terjadi KLB di beberapa daerah tersebar di 18 Kab/Kota dengan jumlah kasus sebanyak 153 kasus naik hampir 300% dari kasus tahun sebelumnya.

Pola dan Sebaran lokasi terjangkit dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

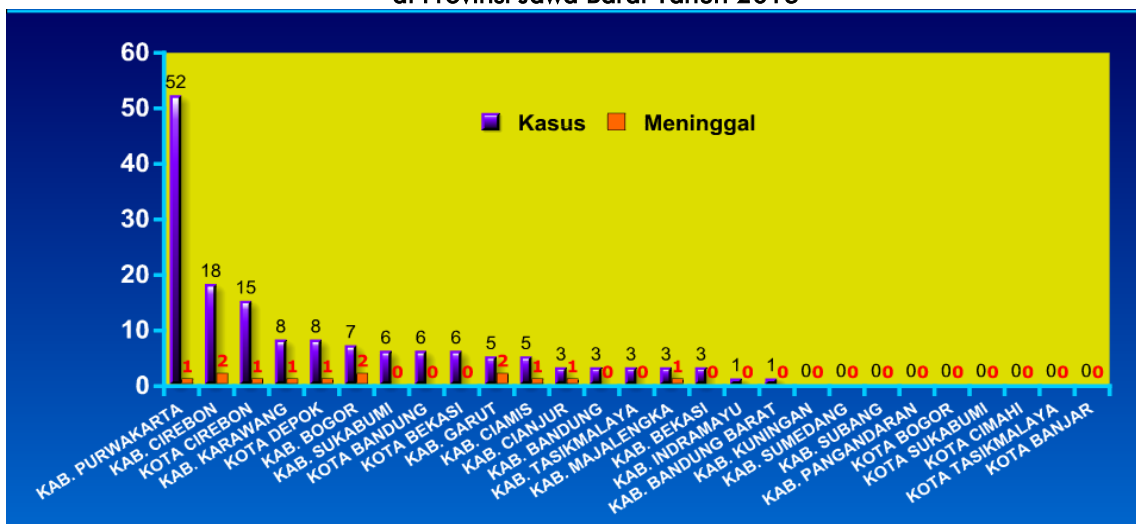
Gambar VII.D.26
Penemuan Kasus Diptheri di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2016



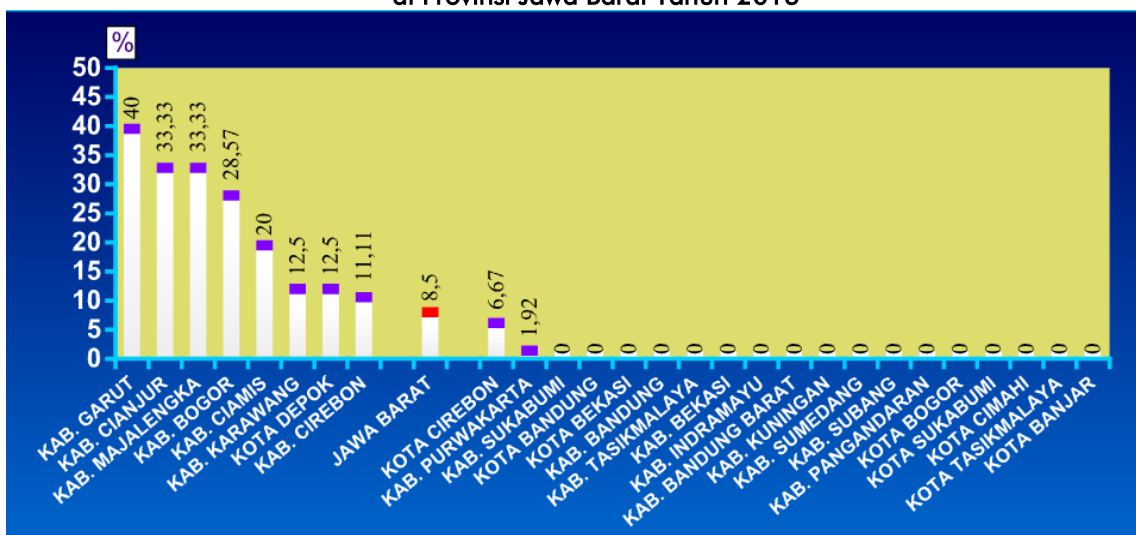
Lokasi terjangkit kasus Diptheri tersebar di 18 Kab/Kota (66,67%) dengan jumlah kasus 153 orang dan meninggal 13 orang (CFR 8,50%) dengan sebaran : Kab Purwakarta 52 penderita meninggal 1 orang CFR; 1,92%, Kab Cirebon 18 penderita meninggal 2 orang CFR; 11,11%, Kota Cirebon 15 penderita meninggal 1 orang CFR; 6,67%, Kab Karawang 8 penderita meninggal 1 orang CFR; 12,50%, Kota Depok 8 penderita meninggal 1 orang

CFR; 12,50%, Kab Bogor 7 penderita meninggal 2 orang CFR; 28,57%, Kab Sukabumi, Kota Bandung, Kota Bekasi masing masing 6 penderita tanpa kematian CFR; 0 %, Kab Garut 5 penderita meninggal 2 orang CFR; 40,0%, Kab Ciamis 5 penderita meninggal 1 orang CFR; 20%, Kab Cianjur, Kab Majalengka masing masing 3 penderita dengan meninggal 1 orang CFR ; 33,33%, Kab Bandung, Kab Tasikmalaya, Kab Bekasi masing masing 3 penderita tanpa kematian, Kab Indramayu dan Kab Bandung Barat masing masing 1 penderita tanpa kematian.

Gambar VII.D.27
Kasus Diptheri Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



Gambar VII.D.28
Angka Kematian (CFR) Diptheri Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



b. Pertusis

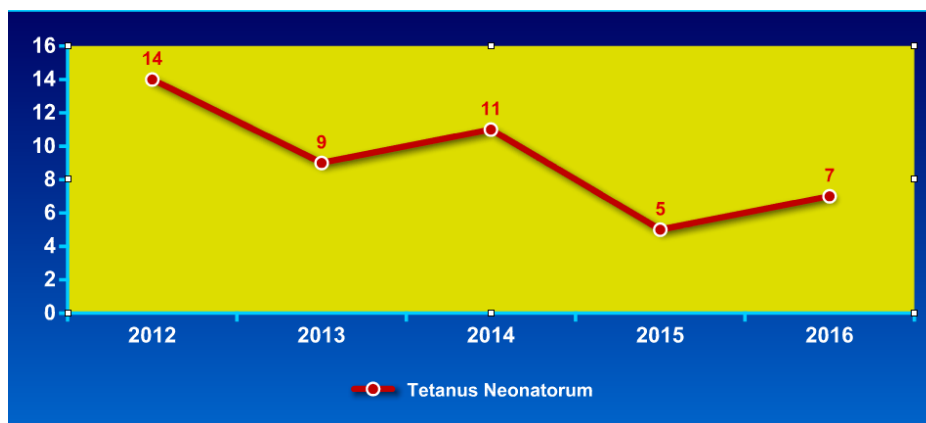
Pada tahun 2015 dari 27 Kab/kota hanya ditemukan kasus pertusis di 1 Kabupaten/Kota yaitu Kab. Bandung dengan 1 kasus, sedangkan untuk tahun 2016 tidak ditemukan kasus pertusisi, sama halnya dengan penemuan kasus Diptheri, kasus pertusus pun sangat dipengaruhi oleh aktivitas surveilans aktif kabupaten/kota.

c. Tetanus Neonatorum

Upaya pengendalian Tetanus Neonatorum untuk mencapai status eliminasi Tetanus Neonatorum (ETN). Penemuan dan pelaporan kasus tetanus neonatorum dilakukan melalui pendekatan W1, artinya satu kasus tetanus neonatorum masuk dalam kondisi KLB. Penemuan kasus Tetanus Neonatorum di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2013 menurun di banding tahun 2012, yaitu dari 14 kasus tahun 2012 menjadi 9 kasus pada tahun 2013, akan tetapi pada tahun 2014 sedikit meningkat menjadi 11 kasus dan pada tahun 2015 turun menjadi 5 kasus akan tetapi pada tahun 2016 sedikit naik menjadi 7 kasus dengan kematian 5 orang, angka kematian sebesar 71,43%, ditemukan di 5 Kab/kota yaitu : Kab. Cianjur sebanyak 2 orang dengan 1 kematian (CFR 50%), Kab Bogor sebanyak 2 penderita dengan kematian 1 orang (CFR 100%), Kab Cirebon sebanyak 1 penderita dengan kematian 1 orang (CFR 100%), Kab Garut sebanyak 1 penderita dengan 1 kematian (CFR 100%) dan Kab Tasikmalaya sebanyak 1 orang tanpa kematian (CFR 0%).

Untuk Kasus Tetanus Non Neanotorum sebanyak 7 orang tersebar di Kab Garut sebanyak 3 orang meninggal 1 (CFR ; 33,3%) , Kab Bandung 2 orang tanpa kematian, Kota Cirebon 1 orang tanpa kematian dan Kab Purwakarta 1 orang tanpa kematian.

Gambar VII.D.29
Kasus Tetanus Neonatrum
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2016

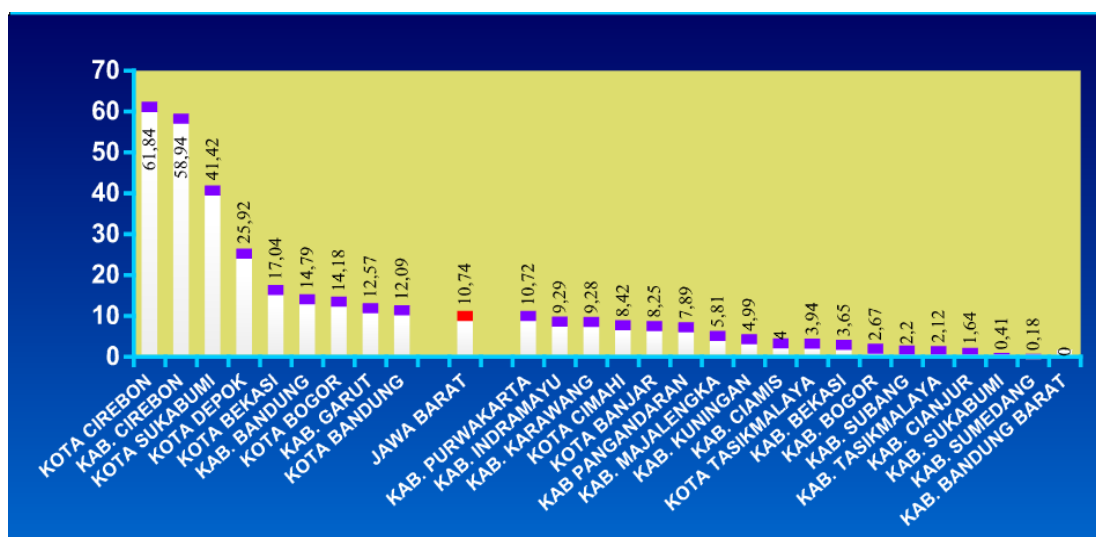


d. Campak

Walaupun Cakupan Imunisasi campak cukup tinggi namun kasus campak sering terjadi bahkan menimbulkan KLB serta kematian, Kejadian campak pada tahun 2016 sebanyak 5.089 orang, dengan 1 orang kematian (CFR = 0,02%), Insiden terjadi di 26 Kab/Kota, jika dibandingkan dengan tahun 2015 menunjukkan peningkatan kasus sebanyak 954 kasus dari 4.135 pada tahun 2015 menjadi 5.089 kasus pada tahun 2016, begitu juga dengan sebaran lokasi terjangkit dari 23 Kab/Kota menjadi 26 Kab/Kota, hanya 1 Kab/Kota yang tidak terjangkit campak yaitu Kab Bandung Barat.

Angka Insiden Rate mencapai 10,74/100.000 besaran antara 0,18 – 61,84 / 100.000, Angka kejadian tertinggi terjadi di Kota Cirebon sebesar 61,84/100.000 penduduk dan terendah di Kab. Sumedang 0,18/100.000 penduduk, sedangkan Kab. Bandung Barat tidak ditemukan kasus campak, sementara angka kematian terjadi di Kab Garut dari 323 Kasus meninggal 1 orang (CFR: 0,30%).

Gambar VII.D.30
Insiden Rate Campak Berdasarkan Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Barat 2016



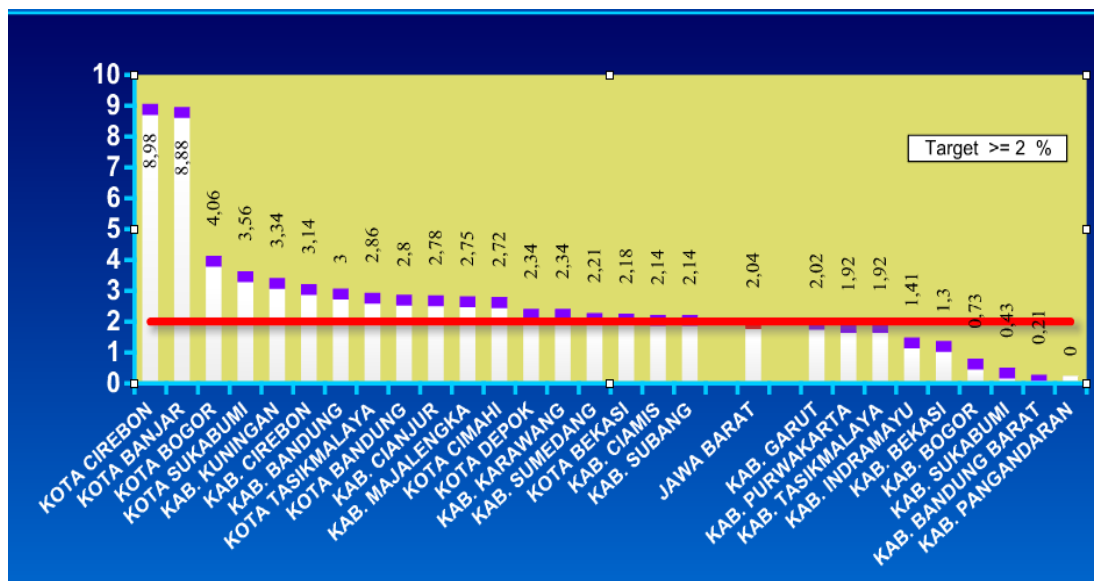
e. Surveilans AFP (Non Polio)

Surveilans AFP (*Acut Paralysis Flaccid*), merupakan kegiatan pencarian kasus kelumpuhan yang bersifat layuh dan terjadi secara mendadak bukan disebabkan oleh ruda paksa, dengan cara mengamati semua AFP ≥ 2 / 100.000 penduduk usia < 15 tahun dengan indikator adequate stool specimen

> 80%, dan zero reporting > 90%. Upaya penemuan dilakukan di Rumah Sakit, Puskesmas dan Masyarakat.

Hasil surveilans AFP rate dalam 100.000 penduduk umur < 15 tahun di Jawa Barat sebesar 2,04/100.000, angka tertinggi ditemukan di Kota Cirebon 8,98/100.000, dan terendah di Kab. Bandung Barat 0,21/100.000. Insiden AFP $\geq 2 / 100.000$ terjadi di 19 Kab/Kota sedangkan yang dibawah 2/100.000 sebanyak 7 Kab/Kota (Kab Purwakarta, Kab Tasikmalaya, Kab Indramayu, Kab Bekasi, Kab Bogor, Kab Sukabumi, Kab Bandung Barat) sedangkan Kab Pangandaran belum ditemukan kasus AFP.

Gambar VII.D.31
Surveilans AFP Rate di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



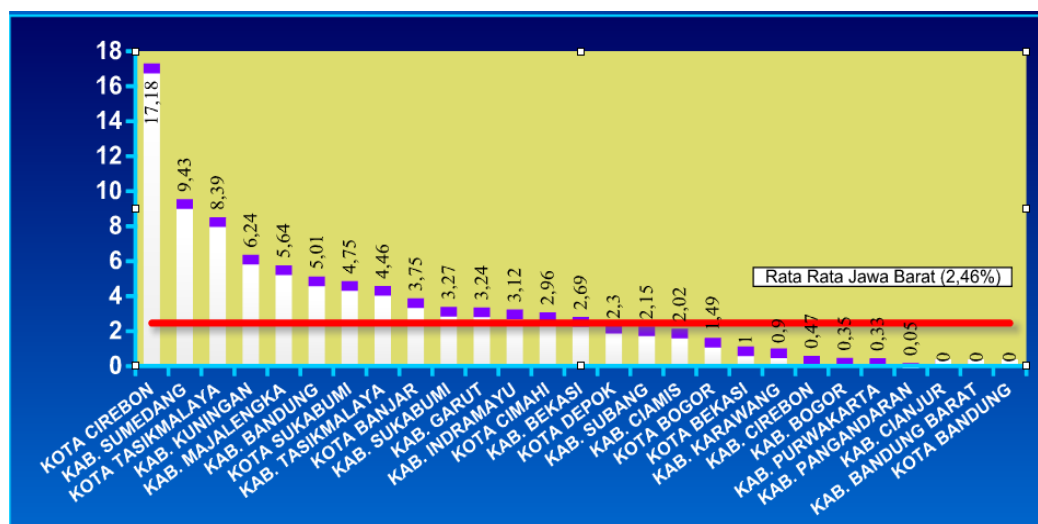
4. Penyakit Tidak Menular

a. Hipertensi

Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg pada dua kali pengukuran dengan selang waktu lima menit dalam keadaan cukup istirahat/tenang. Peningkatan tekanan darah yang berlangsung dalam jangka waktu lama (persisten) dapat menimbulkan kerusakan pada ginjal (gagal ginjal), jantung (penyakit jantung koroner) dan otak (menyebabkan stroke).

Untuk mengetahui gambaran umum permasalahan Hipertensi di Jawa Barat tahun 2016, terhadap jumlah penduduk usia ≥ 18 tahun dapat di lihat pada gambar dibawah ini.

Gambar VII.D.32
Prevalensi Hipertensi terhadap Penduduk Usia ≥ 18 Tahun Berdasarkan Pemeriksaan Tekanan Darah di Puskesmas Provinsi Jawa Barat, Tahun 2016



Pada tahun 2016 di Jawa Barat ditemukan 790.382 orang kasus hipertensi (2,46 % terhadap jumlah penduduk ≥ 18 tahun), dengan jumlah kasus yang diperiksa sebanyak 8.029.245 orang, tersebar di 26 Kabupaten/Kota, dan hanya 1 Kabupaten/Kota (Kab. Bandung Barat), tidak melaporkan kasus Hipertensi,

Penemuan kasus tertinggi di Kota Cirebon (17,18 %) dan terendah di Kab Pangandaran (0,05%), sedangkan Kabupaten Cianjur dan Kota Bandung mencatat jumlah yang diperiksa tetapi tidak mencatat hasil kasus hipertensi, sebaliknya Kab Ciamis Tidak Mencatat jumlah yang diperiksa tetapi ditemukan kasus Hipertensi.

Program PTM dalam pemeriksaan Hipertensi merupakan program baru sehingga dalam operasional kegiatan masih belum menunjukkan aktifitas yang optimal. Berdasarkan hasil Riskesdas 2013 prevalensi hipertensi pada umur ≥ 18 tahun (pernah didiagnosis nakes) adalah 10,5% (Nasional 9,5 %). Sedangkan prevalensi hipertensi berdasarkan hasil pengukuran pada umur ≥ 18 tahun sebesar 29,4 persen. Prevalensi hipertensi pada perempuan cenderung lebih tinggi dari pada laki-laki.

b. Obesitas

Obesitas adalah suatu keadaan dimana terjadi timbunan lemak yang berlebihan atau abnormal pada jaringan adipose, yang akan mengganggu kesehatan (WHO, 1998). Seseorang dikatakan obesitas apabila Indeks Massa Tubuh (IMT) ≥ 25 kg/m². Klasifikasi obesitas tersebut adalah : Kategori Obesitas I dengan IMT (kg/m²) adalah 25,0-29,9; Kategori Obesitas II dengan IMT (kg/m²) adalah ≥ 30 .

Untuk mengendalikan obesitas ini perlu dilakukan Kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap faktor risiko PTM yang berbasis Posbindu PTM agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan.

Pos Binaan Terpadu (POSBINDU) adalah kegiatan monitoring dan deteksi dini faktor resiko PTM terintegrasi (Penyakit jantung dan pembuluh darah, diabetes, penyakit paru obstruktif akut dan kanker) serta gangguan akibat kecelakaan dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dikelola oleh masyarakat melalui pembinaan terpadu.

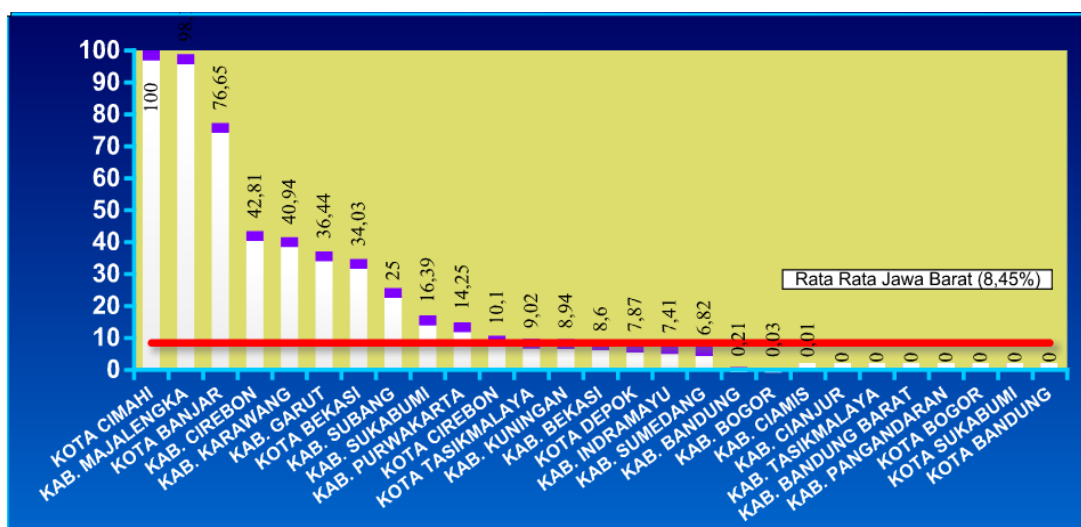
Posbindu Adalah bentuk peran serta masyarakat (kelompok Masyarakat, Organisasi, Industri, Kampus dll). Jumlah Posbindu di Jawa Barat sebanyak 8.099 Buah, tersebar di 27 Kabupaten/Kota. Gambaran umum permasalahan Obesitas di Jawa Barat tahun 2016, dengan melakukan pengukuran obesitas, diperiksa sebanyak 1.644.079 orang dan terindikasi obesitas sebanyak 138.965 orang (8,45%) pelaporan berasal dari 23 Kabupaten/Kota (85,18%), dengan angka obesitas terbesar di Kota Cimahi 100 % dan terendah Kab. Ciamis 0,01 % . Kabupaten/kota yang tidak melaporkan kegiatan pemeriksaan obesitas adalah Kab. Kab. Cianjur, Kab. Tasikmalaya, Kab Bandung Barat, dan Kota Bandung.

Program PTM pemeriksaan Obesitas merupakan program baru sehingga dalam operasional kegiatan masih belum menunjukkan aktifitas yang optimal, Posbindu belum terkoordinasi dengan baik, dan belum tertata dengan baik sistem pencatatan dan pelaporan sehingga perlu mengkaji lebih dalam data data yang dilaporkan.

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, prevalensi faktor risiko PTM di Indonesia relatif tinggi, seperti laki-laki obese umur > 18

tahun (19,7%), perempuan obese (32,9%), obesitas sentral (26,6%), konsumsi tembakau usia \geq 15 tahun (36,3%), kurang konsumsi sayur-buah (93,5%) Riskesdas merupakan survei 3 tahunan yang menggunakan sampel penduduk.

Gambar VII.D.33
Persentasi Pemeriksaan Obesitas Berdasarkan Kab/Kota
Terhadap Jumlah Pengunjung Puskesmas dan Jejaringnya
di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2016

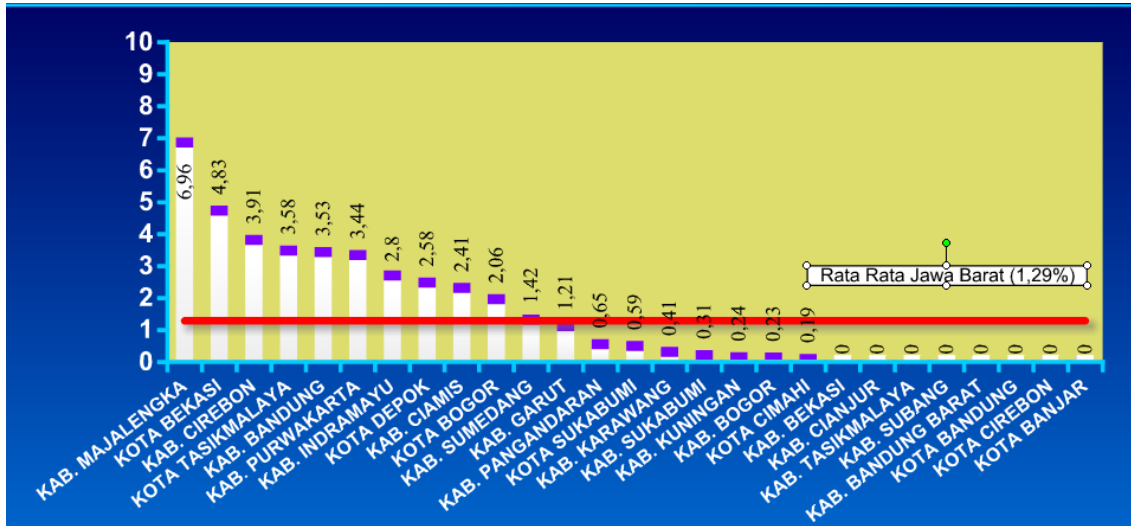


c. Deteksi Kanker Leher Rahim dan Payudara

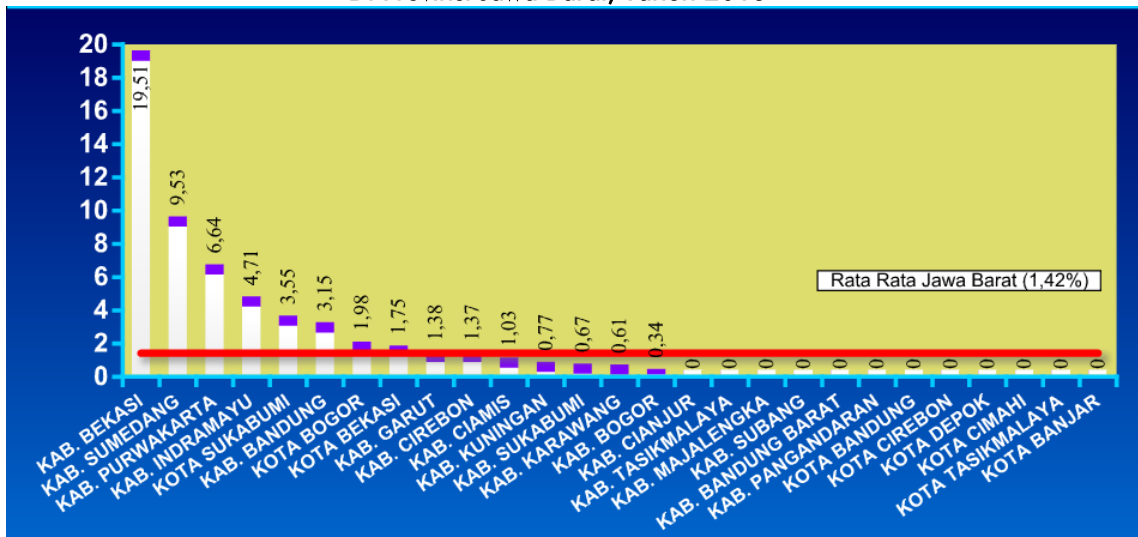
Deteksi kanker Leher Rahim dengan menggunakan metoda IVA dilaporkan oleh 22 Kabupaten/Kota di Jawa Barat (81,48 %) dengan pemeriksaan sebanyak 62.220 orang, dari sasaran pemeriksaan wanita usia 30 – 50 tahun sebanyak 7.206.164 orang sehingga cakupan IVA sebesar 0,89 %, dan ditemukan IVA Positif 829 orang (1,29%) dari jumlah pemeriksaan leher rahim, Kab Kota yang tidak melaporkan Kab Subang, Kab Bandung Barat, Kot, Kota Bandung, Kota Cirebon, dan Kota Banjar.

Ditemukan Tumor/Benjolan sebanyak 912 orang, (0,013% dari Sasaran wanita usia 30-50 th), atau 1,42 % dari jumlah yang diperiksa, tersebar di 15 Kab/Kota yaitu Kab Bekasi dengan positif tumor brnjolan 19,51 % , Kab Sumedang 9,53%, Kab Purwakarta 6,64% Kab Indramayu 4,71%, Kota Sukabumi 3,55%, Kab Bandung 3,15%, Kota Bogor 1,98%, Kota Bekasi 1,75%, Kab Garut 1,38%, Kab Cirebon 1,37%, Kab Ciamis 1,03%, Kab Kuningan 0,77%, Kab Sukabumi 0,67%, Kab Karawang 0,61%, dan Kab Bogor 0,34%.

Gambar VII.D.34
 IVA Positif (Kanker Rahim) Berdasarkan Kab/Kota
 Terhadap Sasaran Wanita Usia 30 – 50 Tahun
 di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2016



Gambar VII.D.35
 IVA Positif (Tumor/ Benolan) Berdasarkan Kab/Kota
 Terhadap Sasaran Wanita Usia 30 – 50 Tahun
 Di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2016



5. Kejadian Luar Biasa (KLB)

Selama tahun 2016 telah terjadi KLB sebanyak 634 kali dan 630 (99,37%) kasus KLB dapat ditanggulangan kurang dari 24 jam, tersebar di 24 Kabupaten/Kota.

TABEL 1

**LUAS WILAYAH, JUMLAH DESA/KELURAHAN, JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH RUMAH TANGGA,
DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	LUAS WILAYAH (<i>km</i> ²)	KECAMATAN	JUMLAH			JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH RUMAH TANGGA	RATA-RATA JIWA/RUMAH TANGGA	KEPADATAN PENDUDUK <i>per km</i> ²
				DESA	KELURAHAN	DESA + KELURAHAN				
1	KAB. BOGOR	2,710.62	40	143	291	434	5,587,390	1,382,911	4.04	2,061
2	KAB. SUKABUMI	4,145.70	47	266	120	386	2,444,616	662,236	3.69	590
3	KAB. CIANJUR	3,840.16	32	287	73	360	2,250,977	615,281	3.66	586
4	KAB. BANDUNG	1,767.96	31	69	211	280	3,596,623	924,532	3.89	2,034
5	KAB. GARUT	3,074.07	42	280	162	442	2,569,505	643,719	3.99	836
6	KAB. TASIKMALAYA	2,551.19	39	275	76	351	1,742,276	488,116	3.57	683
7	KAB. CIAMIS	1,414.71	26	200	65	265	1,175,389	352,170	3.34	831
8	KAB. KUNINGAN	1,110.56	32	253	123	376	1,061,886	272,433	3.90	956
9	KAB. CIREBON	984.52	40	112	312	424	2,142,999	566,521	3.78	2,177
10	KAB. MAJALENGKA	1,204.24	26	220	123	343	1,188,004	350,652	3.39	987
11	KAB. SUMEDANG	1,518.33	26	206	77	283	1,142,097	340,352	3.36	752
12	KAB. INDRAMAYU	2,040.11	31	207	110	317	1,700,815	496,341	3.43	834
13	KAB. SUBANG	1,893.95	30	200	53	253	1,546,000	442,444	3.49	816
14	KAB. PURWAKARTA	825.74	17	119	73	192	932,701	244,808	3.81	1,130
15	KAB. KARAWANG	1,652.20	30	183	126	309	2,295,778	615,291	3.73	1,390
16	KAB. BEKASI	1,224.88	23	86	101	187	3,371,691	903,117	3.73	2,753
17	KAB. BANDUNG BARAT	1,305.77	16	84	81	165	1,648,387	434,590	3.79	1,262
18	KAB. PANGANDARAN	1,010.00	10	81	12	93	392,817	117,696	3.34	389
19	KOTA BOGOR	118.50	6	0	68	68	1,064,687	262,157	4.06	8,985
20	KOTA SUKABUMI	48.25	7	0	33	33	321,097	81,704	3.93	6,655
21	KOTA BANDUNG	167.67	30	0	151	151	2,490,622	664,958	3.75	14,854
22	KOTA CIREBON	37.36	5	0	22	22	310,486	79,426	3.91	8,311
23	KOTA BEKASI	206.61	12	0	56	56	2,787,205	715,117	3.90	13,490
24	KOTA DEPOK	200.29	11	0	63	63	2,179,813	551,879	3.95	10,883
25	KOTA CIMAHI	39.27	3	0	15	15	594,021	159,794	3.72	15,127
26	KOTA TASIKMALAYA	171.61	10	8	61	69	659,606	171,035	3.86	3,844
27	KOTA BANJAR	113.49	4	12	13	25	181,901	50,510	3.60	1,603
	JAWA BARAT	35,377.76	626	3,291	2,671	5,962	47,379,389	12,589,790	3.76	1,339

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

TABEL 2

**JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	JUMLAH PENDUDUK			
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI+PEREMPUAN	RASIO JENIS KELAMIN
1	0-4	2,322,699	2,216,688	4,539,387	104.78
2	5-9	2,217,338	2,105,405	4,322,743	105.32
3	10-14	2,198,507	2,104,636	4,303,143	104.46
4	15-19	2,182,015	2,107,319	4,289,334	103.54
5	20-24	2,089,998	2,033,108	4,123,106	102.80
6	25-29	2,017,507	1,969,390	3,986,897	102.44
7	30-34	1,982,028	1,968,207	3,950,235	100.70
8	35-39	1,913,336	1,863,615	3,776,951	102.67
9	40-44	1,737,583	1,667,086	3,404,669	104.23
10	45-49	1,476,706	1,418,479	2,895,185	104.10
11	50-54	1,205,333	1,160,318	2,365,651	103.88
12	55-59	945,846	886,671	1,832,517	106.67
13	60-64	668,044	636,902	1,304,946	104.89
14	65-69	448,387	477,549	925,936	93.89
15	70-75	307,003	348,445	655,448	88.11
16	75+	298,931	404,310	703,241	73.94
JUMLAH		24,011,261	23,368,128	47,379,389	102.75
ANGKA BEBAN TANGGUNGAN (DEPENDENCY RATIO)				48.39	

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

TABEL 3

**PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF
DAN IJAZAH TERTINGGI YANG DIPEROLEH MENURUT JENIS KELAMIN
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	VARIABEL	JUMLAH			PERSENTASE		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI+ PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI+ PEREMPUAN
1	PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS			37,972,690			100.00
2	PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF			37,296,776			98.22
3	PERSENTASE PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN:						
	a. TIDAK MEMILIKI IJAZAH SD			5,726,282			15.08
	b. SD/MI			12,663,893			33.35
	c. SMP/ MTs			8,008,440			21.09
	d. SMA/ MA, SMK			8,885,609			23.40
	e. Diploma, S1, S2, S3			2,688,466			7.08
				-			
				-			
				-			
				-			

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat

TABEL 4

**JUMLAH KELAHIRAN MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KELAHIRAN								
		LAKI-LAKI			PEREMPUAN			LAKI-LAKI + PEREMPUAN		
		HIDUP	MATI	HIDUP + MATI	HIDUP	MATI	HIDUP + MATI	HIDUP	MATI	HIDUP + MATI
1	KAB. BOGOR	61,375	95	61,470	63,405	113	63,518	124,780	208	124,988
2	KAB. SUKABUMI	24,045	36	24,081	22,611	25	22,636	46,656	61	46,717
3	KAB. CIANJUR			-			41,559	41,472	87	41,559
4	KAB. BANDUNG	32,245	45	32,290	30,521	33	30,554	62,766	78	62,844
5	KAB. GARUT	28,656	103	28,759	27,521	126	27,647	56,177	229	56,406
6	KAB. TASIKMALAYA	15,507	109	15,616	15,479	104	15,583	30,986	213	31,199
7	KAB. CIAMIS	9,648	92	9,740	8,782	63	8,845	18,430	155	18,585
8	KAB. KUNINGAN	10,319	52	10,371	9,574	33	9,607	19,893	85	19,978
9	KAB. CIREBON							47,016	89	47,105
10	KAB. MAJALENGKA	10,857	33	10,890	10,006	27	10,033	20,863	60	20,923
11	KAB. SUMEDANG	10,340	32	10,372	9,715	30	9,745	20,055	62	20,117
12	KAB. INDRAMAYU	17,725	88	17,813	17,759	71	17,830	35,484	159	35,643
13	KAB. SUBANG	15,654	85	15,739	15,434	94	15,528	31,088	179	31,267
14	KAB. PURWAKARTA	10,134	84	10,218	9,621	38	9,659	19,755	122	19,877
15	KAB. KARAWANG	23,869	69	23,938	25,054	56	25,110	48,923	125	49,048
16	KAB. BEKASI	45,878	45	45,923	48,701	35	48,736	94,579	80	94,659
17	KAB. BANDUNG BARAT	15,244	83	15,327	14,140	48	14,188	29,384	131	29,515
18	KAB. PANGANDARAN	3,027	29	3,056	3,017	28	3,045	6,044	57	6,101
19	KOTA BOGOR	9,803	10	9,813	10,072	2	10,074	19,875	12	19,887
20	KOTA SUKABUMI	3,097	13	3,110	3,048	16	3,064	6,145	29	6,174
21	KOTA BANDUNG	23,431	0	23,431	22,369	0	22,369	42,389	32	42,421
22	KOTA CIREBON	2,875	8	2,883	2,661	11	2,672	5,536	19	5,555
23	KOTA BEKASI	22,866	0	22,866	24,053	0	24,053	46,919	13	46,932
24	KOTA DEPOK	20,997	20	21,017	20,820	12	20,832	41,817	32	41,849
25	KOTA CIMAHI	5,255	19	5,274	5,086	14	5,100	10,341	33	10,374
26	KOTA TASIKMALAYA	6,029	35	6,064	5,784	26	5,810	11,813	61	11,874
27	KOTA BANJAR							3,247	36	3,283
	JAWA BARAT	428,876	1,185	430,061	425,233	1,005	467,797	942,433	2,447	944,880
	ANGKA LAHIR MATI PER 1.000 KELAHIRAN (DILAPORKAN)		2.8			2.1			2.6	

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 5

**JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEMATIAN											
		LAKI - LAKI				PEREMPUAN				LAKI - LAKI + PEREMPUAN			
		NEONATAL	BAYI	ANAK BALITA	BALITA	NEONAT AL	BAYI	ANAK BALITA	BALITA	NEONAT AL	BAYI	ANAK BALITA	BALITA
1	KAB. BOGOR	78	86	4	90	48	56	5	61	126	142	9	151
2	KAB. SUKABUMI	123	177	18	195	109	141	13	154	232	318	31	349
3	KAB. CIANJUR									137	170	8	178
4	KAB. BANDUNG	123	136	4	140	70	78	1	79	193	214	5	219
5	KAB. GARUT	154	161	0	161	163	172	0	172	317	333	0	333
6	KAB. TASIKMALAYA	123	158	14	172	74	97	10	107	197	255	24	279
7	KAB. CIAMIS	54	68	8	76	47	68	0	68	101	136	8	144
8	KAB. KUNINGAN	51	67	9	76	38	45	7	52	89	112	16	128
9	KAB. CIREBON									168	209	35	244
10	KAB. MAJALENGKA	58	70	6	76	53	66	5	71	111	136	11	147
11	KAB. SUMEDANG	47	24	13	37	35	14	12	26	82	38	25	63
12	KAB. INDRAMAYU	161	184	12	35	113	130	10	27	274	314	22	336
13	KAB. SUBANG	63	67	2	69	47	52	2	54	110	119	4	123
14	KAB. PURWAKARTA	56	67	7	74	39	48	7	55	95	115	14	129
15	KAB. KARAWANG	91	109	7	116	78	87	1	88	169	196	8	204
16	KAB. BEKASI	44	46	1	47	39	46	2	48	83	92	3	95
17	KAB. BANDUNG BARAT	63	66	2	68	44	48	2	50	107	114	4	118
18	KAB. PANGANDARAN	19	30	6	36	17	24	4	28	36	54	10	64
19	KOTA BOGOR	30	37	0	37	13	17	0	17	43	54	0	54
20	KOTA SUKABUMI	17	25	2	27	12	22	2	24	29	47	4	51
21	KOTA BANDUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	159	223	26	249
22	KOTA CIREBON	8	9	4	13	10	10	1	11	18	19	5	24
23	KOTA BEKASI	23	34	1	35	13	14	1	15	36	48	2	50
24	KOTA DEPOK	39	55	4	59	29	37	2	39	68	92	6	98
25	KOTA CIMAHI	30	39	1	40	20	27	3	30	50	66	4	70
26	KOTA TASIKMALAYA	40	23	8	31	29	17	10	27	69	40	18	58
27	KOTA BANJAR	17	26	9	35	17	20	8	28	34	46	17	63
	JAWA BARAT	1,512	1,764	142	1,745	1,157	1,336	108	1,331	3,133	3,702	319	4,021
	ANGKA KEMATIAN (DILAPORKAN)	1.6	1.9	0.2	1.85	1.2	1.42	0.1	1.4	3.32	3.93	0.34	4.27

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 6

**JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT KELOMPOK UMUR, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH LAHIR HIDUP	KEMATIAN IBU															
			JUMLAH KEMATIAN IBU HAMIL				JUMLAH KEMATIAN IBU BERSALIN				JUMLAH KEMATIAN IBU NIFAS				JUMLAH KEMATIAN IBU			
			< 20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	JUMLAH	< 20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	JUMLAH	< 20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	JUMLAH	< 20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	JUMLAH
1	KAB. BOGOR	124,780	3	18	4	25	0	3	0	3	0	19	11	30	3	40	15	58
2	KAB. SUKABUMI	46,656	6	7	4	17	0	2	2	4	2	23	5	30	8	32	11	51
3	KAB. CIANJUR	41,472	2	5	3	10	1	6	6	17	1	4	6	17	4	15	15	34
4	KAB. BANDUNG	62,766	0	10	3	13	0	6	6	12	2	15	4	21	2	31	13	46
5	KAB. GARUT	56,177	6	4	5	15	1	14	11	26	7	18	8	33	14	36	24	74
6	KAB. TASIKMALAYA	30,986	1	8	3	12	2	6	4	12	3	14	4	21	6	28	11	45
7	KAB. CIAMIS	18,430	0	2	1	3	0	2	1	3	0	7	2	9	0	11	4	15
8	KAB. KUNINGAN	19,893	1	4	3	8	0	1	1	2	1	12	3	16	2	17	7	26
9	KAB. CIREBON	47,016	1	10	2	13	1	6	2	9	2	22	2	26	4	38	6	48
10	KAB. MAJALENGKA	20,863	0	1	3	4	0	6	3	9	1	3	1	5	1	10	7	18
11	KAB. SUMEDANG	20,055	0	2	3	5	0	2	3	5	1	4	2	7	1	8	8	17
12	KAB. INDRAMAYU	35,484	2	11	3	16	6	3	5	14	2	19	9	30	10	33	17	60
13	KAB. SUBANG	31,088	1	10	4	15	0	5	4	9	2	5	3	10	3	20	11	34
14	KAB. PURWAKARTA	19,755	0	3	0	3	0	3	0	3	2	10	7	19	2	16	7	25
15	KAB. KARAWANG	48,923	1	13	3	17	1	12	4	17	2	17	8	27	4	42	15	61
16	KAB. BEKASI	94,579	0	11	2	13	0	10	5	15	0	5	0	5	0	26	7	33
17	KAB. BANDUNG BARAT	29,384	1	3	2	6	0	9	6	15	1	6	3	10	2	18	11	31
18	KAB. PANGANDARAN	6,044	0	1	0	1	0	2	1	3	0	5	0	5	0	8	1	9
19	KOTA BOGOR	19,875	0	3	0	3	0	4	0	4	0	12	3	15	0	19	3	22
20	KOTA SUKABUMI	6,145	0	1	0	1	0	0	0	0	1	4	0	5	1	5	0	6
21	KOTA BANDUNG	42,389	0	2	5	7	0	0	0	0	2	11	6	19	2	13	11	26
22	KOTA CIREBON	5,536	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
23	KOTA BEKASI	46,919	0	5	0	5	0	7	1	8	1	2	0	3	1	14	1	16
24	KOTA DEPOK	41,817	0	7	0	7	0	4	1	5	0	3	1	4	0	14	2	16
25	KOTA CIMAHI	10,341	0	2	1	3	0	2	2	4	0	0	1	1	0	4	4	8
26	KOTA TASIKMALAYA	11,813	0	2	1	3	0	1	1	2	1	5	5	11	1	8	7	16
27	KOTA BANJAR	3,247	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	1	3
	JAWA BARAT	942,433	25	146	56	227	12	117	69	202	34	246	94	380	71	509	219	799
	ANGKA KEMATIAN IBU (DILAPORKAN)					24.09				21.43				40.32	8.89	63.70	27.41	84.78

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 7

**KASUS BARU TB BTA+, SELURUH KASUS TB, KASUS PADA TB PADA ANAK, DAN CASE NOTIFICATION RATE (CNR)
PER 100.000 PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH KASUS BARU BTA+						JUMLAH SELURUH KASUS TB						KASUS TB ANAK 0-14 TAHUN	
					L		P		L+P	L		P		L+P				
		L	P	L+P	JUMLAH	%	JUMLAH	%		JUMLAH	%	JUMLAH	%		JUMLAH	%		
1	KAB. BOGOR	2,856,529	2,730,861	5,587,390	2,110	54.6	1,378	40.82	3,865	4,788	56.7	3656	44.01	8,444	881	10.43		
2	KAB. SUKABUMI	1,239,279	1,205,337	2,444,616					1,938		0.0			3,191	355	11.13		
3	KAB. CIANJUR	1,158,318	1,092,659	2,250,977	706	49.1	585	43.91	1,437	1,584	53.2	1426	46.77	3,010	696	23.12		
4	KAB. BANDUNG	1,823,708	1,772,915	3,596,623	1,116		868		1,157	2,765	53.2	2437		5,202	1,334	25.64		
5	KAB. GARUT	1,294,616	1,274,889	2,569,505	781	50.7	649	42.14	1,540	1,438	53.0	1273	46.96	2,711	221	8.15		
6	KAB. TASIKMALAYA	863,488	878,788	1,742,276	504	50.0	387	1,406	1,009	921	54.7	762	1,619	1,683	154	9.15		
7	KAB. CIAMIS	580,986	594,403	1,175,389	568	39.3	359	24.84	1,445	825	60.9	529	39.07	1,354	141	10.41		
8	KAB. KUNINGAN	533,873	528,013	1,061,886	599	60.0	353	35.37	998	1,218	59.1	842	40.87	2,060	92	4.47		
9	KAB. CIREBON	1,098,423	1,044,576	2,142,999	1,175	55.0	773	36.16	2,138	1,912	60.3	1260	39.72	3,172	118	3.72		
10	KAB. MAJALENGKA	593,721	594,283	1,188,004	756	57.8	517	39.50	1,309	930	58.7	653	41.25	1,583	60	3.79		
11	KAB. SUMEDANG	569,024	573,073	1,142,097	407	61.9	266	40.49	657	1,034	56.0	811	43.96	1,845	242	13.12		
12	KAB. INDRAMAYU	875,815	825,000	1,700,815	503	60.4	274	32.89	833	985	62.9	581	37.10	1,566	101	6.45		
13	KAB. SUBANG	780,776	765,224	1,546,000	645	50.6	455	35.71	1,274	297	54.5	248	45.50	545	377	69.17		
14	KAB. PURWAKARTA	474,572	458,129	932,701	429	46.7	375	40.81	919	447	53.6	387	46.40	834	87	10.43		
15	KAB. KARAWANG	1,177,310	1,118,468	2,295,778	1,042	74.7	731	52.44	1,394	1,104	58.5	783	41.49	1,887	148	7.84		
16	KAB. BEKASI	1,717,783	1,653,908	3,371,691	656	31.6	391	18.86	2,073	1,087	62.5	651	37.46	1,738	74	4.26		
17	KAB. BANDUNG BARAT	836,728	811,659	1,648,387	425	27.2	295	18.86	1,564	773	55.5	619	44.47	1,392	88	6.32		
18	KAB. PANGANDARAN	195,629	197,188	392,817	142	57.3	141	56.85	248	185	49.5	189	50.53	374	8	2.14		
19	KOTA BOGOR	540,288	524,399	1,064,687	574	56.6	391	38.52	1,015	793	58.2	570	41.82	1,363	95	6.97		
20	KOTA SUKABUMI	162,586	158,511	321,097	156	16.7	137	14.65	935	330	54.9	271	45.09	601	96	15.97		
21	KOTA BANDUNG	1,257,176	1,233,446	2,490,622	596		511		1,908	1,312		1233		2,545	398	15.64		
22	KOTA CIREBON	155,677	154,809	310,486	302	58.9	152	29.63	513	782	58.8	549	41.25	1,331	154	11.57		
23	KOTA BEKASI	1,405,379	1,381,826	2,787,205	844	65.1	557	42.98	1,296	2,076	58.7	1461	41.31	3,537	305	8.62		
24	KOTA DEPOK	1,098,473	1,081,340	2,179,813	830	87.6	542	57.23	947	1,667	59.1	1156	40.95	2,823	228	8.08		
25	KOTA CIMAHI	299,309	294,712	594,021	154	28.5	151	27.91	541	329	49.6	334	50.38	663	17	2.56		
26	KOTA TASIKMALAYA	331,885	327,721	659,606	324	54.5	244	41.08	594	775	54.3	653	45.73	1,428	116	8.12		
27	KOTA BANJAR	89,910	91,991	181,901	87	16.6	48	9.18	523	221	60.5	144	39.45	365	14	3.84		
JUMLAH (KAB/KOTA)		24,011,261	23,368,128	47,379,389	16,431	48	11,530	34	34,070	30,578	53	23,478	41	57,247	6,600	11.53		
CNR KASUS BARU BTA+ PER 100.000 PENDUDUK					34.68		24.34		71.91									
CNR SELURUH KASUS TB PER 100.000 PENDUDUK										64.54		49.55		120.83				

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 8

**JUMLAH KASUS DAN ANGKA PENEMUAN KASUS TB PARU BTA+ MENURUT JENIS KELAMIN,
KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	SUSPEK	BTA (+)	% BTA (+) TERHADAP SUSPEK
		L + P	L + P	L + P
1	KAB. BOGOR	40,064	3,865	9.65
2	KAB. SUKABUMI	21,356	1,938	9.07
3	KAB. CIANJUR	11,239	1,437	12.79
4	KAB. BANDUNG	15,889	1,157	7.28
5	KAB. GARUT	13,931	1,540	11.05
6	KAB. TASIKMALAYA	7,708	1,009	13.09
7	KAB. CIAMIS	7,960	1,445	18.15
8	KAB. KUNINGAN	8,247	998	12.10
9	KAB. CIREBON	13,703	2,138	15.60
10	KAB. MAJALENGKA	16,245	1,309	8.06
11	KAB. SUMEDANG	5,107	657	12.86
12	KAB. INDRAMAYU	4,952	833	16.82
13	KAB. SUBANG	13,148	1,274	9.69
14	KAB. PURWAKARTA	5,157	919	17.82
15	KAB. KARAWANG	8,868	1,394	15.72
16	KAB. BEKASI	8,062	2,073	25.71
17	KAB. BANDUNG BARAT	5,521	1,564	28.33
18	KAB. PANGANDARAN	2,795	248	8.87
19	KOTA BOGOR	8,312	1,015	12.21
20	KOTA SUKABUMI	539	935	173.47
21	KOTA BANDUNG	7,363	1,908	25.91
22	KOTA CIREBON	6,305	513	8.14
23	KOTA BEKASI	11,960	1,296	10.84
24	KOTA DEPOK	7,687	947	12.32
25	KOTA CIMAHI	1,921	541	28.16
26	KOTA TASIKMALAYA	4,695	594	12.65
27	KOTA BANJAR	1,199	523	43.62
JAWA BARAT		259,933	34,070	13.11

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 9

**ANGKA KESEMBUHAN DAN PENGOBATAN LENGKAP TB PARU BTA+ SERTA KEBERHASILAN PENGOBATAN
MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA PRIVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	BTA (+) DIOBATI	ANGKA KESEMBUHAN (CURE RATE)		ANGKA PENGOBATAN LENGKAP (COMPLETE RATE)		ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN (SUCCESS RATE/SR)	JUMLAH KEMATIAN SELAMA PENGOBATAN
			L + P		L + P			
		L + P	JUMLAH	%	JUMLAH	%	L+P	L+P
1	KAB. BOGOR	3,865	3,688	86.28	79	7.36	93.64	21
2	KAB. SUKABUMI	1,938	1,710	88.24	216	11.15	99.38	13
3	KAB. CIANJUR	1,437	1,138	75.35	121	15.18	90.54	29
4	KAB. BANDUNG	1,157	970	83.84	64	5.53	89.37	0
5	KAB. GARUT	1,540	1,282	83.25	95	6.17	89.42	28
6	KAB. TASIKMALAYA	1,009	910	90.19	10	0.99	91.18	17
7	KAB. CIAMIS	1,445	991	68.58	394	27.27	95.85	6
8	KAB. KUNINGAN	998	850	85.17	32	3.21	88.38	44
9	KAB. CIREBON	2,138	1,618	75.68	164	7.67	83.35	33
10	KAB. MAJALENGKA	1,309	1,297	99.08	8	0.61	99.69	13
11	KAB. SUMEDANG	657	577	87.96	36	8.67	96.64	22
12	KAB. INDRAMAYU	833	762	91.48	14	1.68	93.16	21
13	KAB. SUBANG	1,274	1,114	87.44	134	10.52	97.96	18
14	KAB. PURWAKARTA	919	483	52.56	372	40.48	93.04	0
15	KAB. KARAWANG	1,394	1,237	88.74	66	4.73	93.47	0
16	KAB. BEKASI	2,073	1,088	52.48	911	43.95	96.43	5
17	KAB. BANDUNG BARAT	1,564	625	39.96		-	39.96	0
18	KAB. PANGANDARAN	248	174	70.16	64	25.81	95.97	1
19	KOTA BOGOR	1,015	884	87.09	27	2.66	89.75	21
20	KOTA SUKABUMI	935	315	33.69	592	63.32	97.01	6
21	KOTA BANDUNG	1,908	1,230	64.47	280	14.68	79.14	40
22	KOTA CIREBON	513	396	77.19	17	3.31	80.51	16
23	KOTA BEKASI	1,296	958	73.92	129	9.95	83.87	21
24	KOTA DEPOK	947	776	81.94	56	5.91	87.86	14
25	KOTA CIMAHI	541	293	54.16	173	31.98	86.14	12
26	KOTA TASIKMALAYA	594	484	81.48	19	3.20	84.68	16
27	KOTA BANJAR	523	124	23.71	230	43.98	67.69	0
JAWA BARAT		34,070	25,974	76.24	4303	12.63	88.87	417
ANGKA KEMATIAN SELAMA PENGOBATAN PER 100.000 PENDUDUK								0.9

TABEL 10

**PENEMUAN KASUS PNEUMONIA BALITA MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH BALITA			PNEUMONIA PADA BALITA									
					JUMLAH PERKIRAAN PENDERITA/TARGET SASARAN			PENDERITA DITEMUKAN DAN DITANGANI						
		L	P	L+P	L	P	L+P	L		P		L + P		
							JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%		
1	KAB. BOGOR	288,738	277,904	566,642	13,282	12,784	26,179	4,988	37.6	4,348	34.0	9,336	35.7	
2	KAB. SUKABUMI	115,971	112,778	228,749	5,335	5,188	10,568	1,060	19.9	576	11.1	1,636	15.5	
3	KAB. CIANJUR	109,074	104,966	214,040	5,017	4,828	9,889	-	0.0	-	0.0	6,585	66.6	
4	KAB. BANDUNG	182,490	175,395	357,885	8,395	8,068	16,534	8,497	101.2	8,392	104.0	16,889	102.1	
5	KAB. GARUT	132,411	127,823	260,234	6,091	5,880	12,023	4,566	75.0	4,126	70.2	8,692	72.3	
6	KAB. TASIKMALAYA	76,273	73,631	149,904	3,509	3,387	6,926	2,057	58.6		0.0	2,057	29.7	
7	KAB. CIAMIS	46,158	43,559	89,717	2,123	2,004	4,145	4,098	193.0	3,446	172.0	7,544	182.0	
8	KAB. KUNINGAN	46,644	43,664	90,308	2,146	2,009	4,172	1,739	81.0	1,495	74.4	3,234	77.5	
9	KAB. CIREBON	95,127	90,438	185,565	4,376	4,160	8,573	6,221	142.2	5,534	133.0	11,755	137.1	
10	KAB. MAJALENGKA	50,096	47,474	97,570	2,304	2,184	4,508	2,375	103.1	2,266	103.8	4,641	103.0	
11	KAB. SUMEDANG	46,602	44,787	91,389	2,144	2,060	4,222	2,690	125.5	2,499	121.3	5,189	122.9	
12	KAB. INDRAMAYU	70,762	67,627	138,389	3,255	3,111	6,394	10,531	323.5	3,834	123.2	14,365	224.7	
13	KAB. SUBANG	63,384	60,317	123,701	2,916	2,775	5,715	4,068	139.5	4,172	150.4	824	14.4	
14	KAB. PURWAKARTA	45,456	44,045	89,501	2,091	2,026	4,135	3,348	160.1	3,176	156.8	6,524	157.8	
15	KAB. KARAWANG	106,664	101,761	208,425	4,907	4,681	9,629	4,376	89.2	3,939	84.1	8,315	86.4	
16	KAB. BEKASI	179,775	172,110	351,885	8,270	7,917	16,257	1,500	18.1	1,445	18.3	2,945	18.1	
17	KAB. BANDUNG BARAT	80,281	77,486	157,767	3,693	3,564	7,289	2,175	58.9	1,711	48.0	3,885	53.3	
18	KAB. PANGANDARAN	15,433	14,674	30,107	710	675	1,391	576	81.1	551	81.6	1,127	81.0	
19	KOTA BOGOR	49,177	46,134	95,311	2,262	2,122	4,403	3,257	144.0	3,391	159.8	6,648	151.0	
20	KOTA SUKABUMI	14,961	14,320	29,281	688	659	1,353	988	143.6	797	121.0	1,785	132.0	
21	KOTA BANDUNG	104,902	100,864	205,766	4,825	4,640	9,506	8,505	176.3	7,525	162.2	16,030	168.6	
22	KOTA CIREBON	13,888	12,816	26,704	639	590	1,234	1,307	204.6	1,165	197.6	2,472	200.4	
23	KOTA BEKASI	127,263	122,211	249,474	5,854	5,622	11,526	2,585	44.2	2,448	43.5	5,033	43.7	
24	KOTA DEPOK	106,258	100,266	206,524	4,888	4,612	9,541	2,324	47.5	2,255	48.9	4,579	48.0	
25	KOTA CIMAH	27,202	25,998	53,200	1,251	1,196	2,458	1,120	89.5	2,307	192.9	3,427	139.4	
26	KOTA TASIKMALAYA	30,050	28,625	58,675	1,382	1,317	2,711	1,351	97.7	1,129	85.7	2,480	91.5	
27	KOTA BANJAR	7,751	7,343	15,094	357	338	697	626	175.6	537	159.0	1,163	166.8	
	JAWA BARAT	2,167,788	2,077,050	4,244,838	99,718	95,544	196,112	83,831	84.1	69,091	72.3	152,090	77.6	

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 11

**JUMLAH KASUS HIV, AIDS, DAN SYPHILIS MENURUT JENIS KELAMIN
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KELOMPOK UMUR	HIV				AIDS				JUMLAH KEMATIAN AKIBAT AIDS			SYPHILIS			
		L	P	L+P	PROPORSI KELOMPOK UMUR	L	P	L+P	PROPORSI KELOMPOK UMUR	L	P	L+P	L	P	L+P	PROPORSI KELOMPOK UMUR
1	≤ 4 TAHUN	69	68	137	3.30			26	3.53							
2	5 - 14 TAHUN	34	32	66	1.59			9	1.22							
3	15 - 19 TAHUN	54	50	104	2.50			8	1.09							
4	20 - 24 TAHUN	428	269	697	16.78			346	47.01							
5	25 - 49 TAHUN	1,732	1,259	2,991	72.00			320	43.48							
6	≥ 50 TAHUN	110	49	159	3.83			15	2.04							
7	Tidak Diketahui							12	2							
JAWA BARAT		2,427	1,727	4,154		0	0	736								
PROPORSI JENIS KELAMIN		58.43	41.57			0.00	0.00									

Sumber: Bidang PPLP DinKes Provinsi Jabar

TABEL 12

**PERSENTASE DONOR DARAH DISKRINING TERHADAP HIV MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	UNIT TRANSFUSI DARAH	DONOR DARAH														
		JUMLAH PENDONOR			SAMPEL DARAH DIPERIKSA/DISKRINING TERHADAP HIV						POSITIF HIV					
					L		P		L + P		L		P		L + P	
		L	P	L+P	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	KAB. BOGOR	13,240	5,592	18,832	13240	0.71	5592	0.65	18832	0.69	30	46.39	36	47.37	66	46.67
2	KAB. SUKABUMI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	KAB. CIANJUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	KAB. BANDUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	KAB. GARUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	KAB. TASIKMALAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	KAB. CIAMIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	KAB. KUNINGAN	8,174	4,884	13,058	8,174	-	4884	-	13058	100	28	0.21	18	0.14	46	0.35
9	KAB. CIREBON	14,178	4,459	18,637	14,178	100	4459	100	18637	100	31	0.17	6	0.03	37	0.20
10	KAB. MAJALENGKA	9,105	5,938	15,043	8,796	96.61	5738	96.63	14534	96.62	26	0.18	6	0.04	-	0.00
11	KAB. SUMEDANG	7,002	4,373	11,375	7,002	-	4373	-	11375	-	12	-	0	-	12	-
12	KAB. INDRAMAYU	11,620	5,162	16,782	11,620	100	5162	100	11620	69.24	39	0.34	24	0.46	63	0.54
13	KAB. SUBANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	KAB. PURWAKARTA	10,276	1,749	12,025	10,276	100	1748	99.94	12024	99.99	29	0.28	9	0.51	38	0.32
15	KAB. KARAWANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	KAB. BEKASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	KAB. BANDUNG BARAT	2,845	1,771	4,616	2,845	100	1771	100	4616	100	4	0.14	0	0.00	4	0.09
18	KAB. PANGANDARAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	KOTA BOGOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	KOTA SUKABUMI	9,699	5,226	14,925	9,699	-	5226	-	14925	-	40	-	2	-	42	-
21	KOTA BANDUNG	84,280	37,302	121,582	84,280	-	37302	-	121582	-	641	-	302	-	943	-
22	KOTA CIREBON	17,554	6,818	24,372	17,554	100	6818	100	24372	100	26	0.15	3	0.04	29	0.12
23	KOTA BEKASI	18,928	6,248	25,176	18,810	99.38	6229	99.70	25039	99.46	94	0.50	28	0.45	122	0.49
24	KOTA DEPOK	10,211	7,012	17,223	10,211	100	7012	100	17223	100	49	0.48	7	0.10	56	0.33
25	KOTA CIMAH	4,403	2,855	7,258	4,403	100	2855	100	7258	100	11	0.25	7	0.25	18	0.25
26	KOTA TASIKMALAYA	470	75	545	12	-	0	-	12	-	7	-	0	-	7	-
27	KOTA BANJAR	6,345	2,732	9,077	6,201	-	2612	-	8813	-	11	-	1	-	12	-
	JAWA BARAT	228,330	102,196	330,526	227,301	99.55	101,781	99.59	323,920	98.00	1,078	0.47	449	0	1,495	0.46

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 13

**KASUS DIARE YANG DITANGANI MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK			DIARE					
					Target Penemuan 10% Sasaran			DIARE DITANGANI		
		L	P	L+P	L	P	L+P	JUMLAH	%	
1	KAB. BOGOR	2,856,529	2,730,861	5,587,390	77,126	73,733	150,860	159,405	105.66	
2	KAB. SUKABUMI	1,239,279	1,205,337	2,444,616	33,461	32,544	66,005	37,369	56.62	
3	KAB. CIANJUR	1,158,318	1,092,659	2,250,977	31,275	29,502	60,776	41,709	68.63	
4	KAB. BANDUNG	1,823,708	1,772,915	3,596,623	49,240	47,869	97,109	90,337	93.03	
5	KAB. GARUT	1,294,616	1,274,889	2,569,505	34,955	34,422	69,377	96,111	138.54	
6	KAB. TASIKMALAYA	863,488	878,788	1,742,276	23,314	23,727	47,041	25,629	54.48	
7	KAB. CIAMIS	580,986	594,403	1,175,389	15,687	16,049	31,736	31,254	98.48	
8	KAB. KUNINGAN	533,873	528,013	1,061,886	14,415	14,256	28,671	26,554	92.62	
9	KAB. CIREBON	1,098,423	1,044,576	2,142,999	29,657	28,204	57,861	74,674	129.06	
10	KAB. MAJALENGKA	593,721	594,283	1,188,004	16,030	16,046	32,076	19,976	62.28	
11	KAB. SUMEDANG	569,024	573,073	1,142,097	15,364	15,473	30,837	22,718	73.67	
12	KAB. INDRAMAYU	875,815	825,000	1,700,815	23,647	22,275	45,922	48,287	105.15	
13	KAB. SUBANG	780,776	765,224	1,546,000	21,081	20,661	41,742	25	0.06	
14	KAB. PURWAKARTA	474,572	458,129	932,701	12,813	12,369	25,183	20,625	81.90	
15	KAB. KARAWANG	1,177,310	1,118,468	2,295,778	31,787	30,199	61,986	61,444	99.13	
16	KAB. BEKASI	1,717,783	1,653,908	3,371,691	46,380	44,656	91,036	25,251	27.74	
17	KAB. BANDUNG BARAT	836,728	811,659	1,648,387	22,592	21,915	44,506	28,045	63.01	
18	KAB. PANGANDARAN	195,629	197,188	392,817	5,282	5,324	10,606	10,074	94.98	
19	KOTA BOGOR	540,288	524,399	1,064,687	14,588	14,159	28,747	25,345	88.17	
20	KOTA SUKABUMI	162,586	158,511	321,097	4,390	4,280	8,670	12,849	148.21	
21	KOTA BANDUNG	1,257,176	1,233,446	2,490,622	33,944	33,303	67,247	57,425	85.39	
22	KOTA CIREBON	155,677	154,809	310,486	4,203	4,180	8,383	19,073	227.52	
23	KOTA BEKASI	1,405,379	1,381,826	2,787,205	37,945	37,309	75,255	22,626	30.07	
24	KOTA DEPOK	1,098,473	1,081,340	2,179,813	29,659	29,196	58,855	37,690	64.04	
25	KOTA CIMAH	299,309	294,712	594,021	8,081	7,957	16,039	17,795	110.95	
26	KOTA TASIKMALAYA	331,885	327,721	659,606	8,961	8,848	17,809	16,808	94.38	
27	KOTA BANJAR	89,910	91,991	181,901	2,428	2,484	4,911	3,186	64.87	
JAWA BARAT		24,011,261	23,368,128	47,379,389	648,304	630,939	1,279,244	1,032,284	80.69	
ANGKA KESAKITAN DIARE PER 1.000 PENDUDUK							214			

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 14

**JUMLAH KASUS BARU KUSTA MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	KASUS BARU								
		Pausi Basiler (PB)/ Kusta Kering			Multi Basiler (MB)/ Kusta Basah			PB + MB		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	KAB. BOGOR	7	4	11	112	69	181	119	73	192
2	KAB. SUKABUMI	3	2	5	23	12	35	26	14	40
3	KAB. CIANJUR	0	0	0	6	4	10	6	4	10
4	KAB. BANDUNG	0	0	0	1	3	4	1	3	4
5	KAB. GARUT	0	0	0	19	13	32	19	13	32
6	KAB. TASIKMALAYA	0	0	0	3	3	6	3	3	6
7	KAB. CIAMIS	2	1	3	8	0	8	10	1	11
8	KAB. KUNINGAN	11	6	17	42	14	56	53	20	73
9	KAB. CIREBON	13	12	25	136	84	220	149	96	245
10	KAB. MAJALENGKA	0	0	0	34	16	50	34	16	50
11	KAB. SUMEDANG	0	0	0	11	2	13	11	2	13
12	KAB. INDRAMAYU	13	11	24	120	67	187	133	78	211
13	KAB. SUBANG	8	16	24	83	88	171	91	104	195
14	KAB. PURWAKARTA	2	1	3	20	12	32	22	13	35
15	KAB. KARAWANG	21	32	53	215	123	338	236	155	391
16	KAB. BEKASI	8	11	19	142	93	235	150	104	254
17	KAB. BANDUNG BARAT	3	2	5	8	3	11	11	5	16
18	KAB. PANGANDARAN	0	1	1	4	5	9	4	6	10
19	KOTA BOGOR	1	1	2	13	2	15	14	3	17
20	KOTA SUKABUMI	0	0	0	1	1	2	1	1	2
21	KOTA BANDUNG	1	0	1	4	2	6	5	2	7
22	KOTA CIREBON	0	1	1	13	3	16	13	4	17
23	KOTA BEKASI	8	12	20	58	39	97	66	51	117
24	KOTA DEPOK	0	0	12	0	0	85	0	0	97
25	KOTA CIMAHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	KOTA TASIKMALAYA	0	0	0	4	4	8	4	4	8
27	KOTA BANJAR	0	0	0	3	1	4	3	1	4
	JAWA BARAT	101	113	226	1,083	663	1,831	1,184	776	2,057
	PROPORSI JENIS KELAMIN	44.69	50.00		59.15	36.21		57.56	37.72	
	ANGKA PENEMUAN KASUS BARU (NCDR/NEW CASE DETECTION RATE) PER 100.000 PENDUDUK									4.34

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 15

**KASUS BARU KUSTA 0-14 TAHUN DAN CACAT TINGKAT 2 MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	PENDERITA KUSTA 0-14 TAHUN				
		KAUS BARU KUSTA	PENDERITA KUSTA 0-14 TAHUN		CACAT TINGKAT 2	
			L+P	JUMLAH	%	JUMLAH
1	KAB. BOGOR	192	24	12.50	1	0.52
2	KAB. SUKABUMI	40	3	7.50	11	27.50
3	KAB. CIANJUR	10	-	0	0	0.00
4	KAB. BANDUNG	4	-	0.00	1	25.00
5	KAB. GARUT	32	3	9.38	9	28.13
6	KAB. TASIKMALAYA	6	-	0.00	2	33.33
7	KAB. CIAMIS	11	1	9.09	1	9.09
8	KAB. KUNINGAN	73	20	27.40	6	8.22
9	KAB. CIREBON	245	96	39.18	24	9.80
10	KAB. MAJALENGKA	50	-	0.00	0	0.00
11	KAB. SUMEDANG	13	-	0.00	2	15.38
12	KAB. INDRAMAYU	211	16	7.58	22	10.43
13	KAB. SUBANG	195	11	5.64	30	15.38
14	KAB. PURWAKARTA	35	2	5.71	1	2.86
15	KAB. KARAWANG	391	41	10.49	29	7.42
16	KAB. BEKASI	254	28	11.02	8	3.15
17	KAB. BANDUNG BARAT	16	3	18.75	0	0.00
18	KAB. PANGANDARAN	10	-	0.00	0	0.00
19	KOTA BOGOR	17	-	0.00	0	0.00
20	KOTA SUKABUMI	2	-	0.00	0	0.00
21	KOTA BANDUNG	7	-	0.00	0	0.00
22	KOTA CIREBON	17	-	0.00	3	17.65
23	KOTA BEKASI	117	7	5.98	7	5.98
24	KOTA DEPOK	97	14	14.43	8	8.25
25	KOTA CIMAHI	-	-	0.00	0	0.00
26	KOTA TASIKMALAYA	8	1	0.00	1	12.50
27	KOTA BANJAR	4	-	0.00	0	0.00
JAWA BARAT		2,057	270	13.13	166	8.07
ANGKA CACAT TINGKAT 2 PER 100.000 PENDUDUK					0	

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 16

**JUMLAH KASUS DAN ANGKA PREVALENSI PENYAKIT KUSTA MENURUT TIPE/JENIS, JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	KASUS TERCATAT								
		Pausi Basiler/Kusta kering			Multi Basiler/Kusta Basah			JUMLAH		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	KAB. BOGOR	6	5	11	196	114	310	202	119	321
2	KAB. SUKABUMI	3	2	5	23	12	35	26	14	40
3	KAB. CIANJUR	0	0	0	6	4	10	6	4	10
4	KAB. BANDUNG	2	7	9	13	8	21	15	15	30
5	KAB. GARUT	2	0	2	30	14	44	32	14	46
6	KAB. TASIKMALAYA	0	0	0	4	4	8	4	4	8
7	KAB. CIAMIS	2	1	3	8	1	9	10	2	12
8	KAB. KUNINGAN	4	3	7	54	22	76	58	25	83
9	KAB. CIREBON	5	6	11	141	81	222	146	87	233
10	KAB. MAJALENGKA	2	1	3	94	57	151	96	58	154
11	KAB. SUMEDANG	0	0	0	11	3	14	11	3	14
12	KAB. INDRAMAYU	6	5	11	173	102	275	179	107	286
13	KAB. SUBANG	8	16	24	83	88	171	91	104	195
14	KAB. PURWAKARTA	2	1	3	20	12	32	22	13	35
15	KAB. KARAWANG	21	32	53	215	123	338	236	155	391
16	KAB. BEKASI	8	11	19	142	93	235	150	104	254
17	KAB. BANDUNG BARAT	2	2	4	6	6	12	8	8	16
18	KAB. PANGANDARAN	0	1	1	4	5	9	4	6	10
19	KOTA BOGOR	1	1	2	13	2	15	14	3	17
20	KOTA SUKABUMI	0	0	0	1	1	2	1	1	2
21	KOTA BANDUNG	2	1	3	5	1	6	7	2	9
22	KOTA CIREBON	0	1	1	14	4	18	14	5	19
23	KOTA BEKASI	6	6	12	82	50	132	88	56	144
24	KOTA DEPOK	0	0	9	0	0	115	0	0	124
25	KOTA CIMAHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	KOTA TASIKMALAYA	0	0	0	4	4	8	4	4	8
27	KOTA BANJAR	0	0	0	3	1	4	3	1	4
JAWA BARAT		82	102	193	1,345	812	2,272	1,427	914	2,465
ANGKA PREVALENSI PER 10.000 PENDUDUK								0.3	0.2	0.52

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2015

TABEL 17

**PERSENTASE PENDERITA KUSTA SELESAI BEROBAT (RELEASE FROM TREATMENT/RFT) MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	KUSTA (PB)									KUSTA (MB)								
		PENDERITA PB a			RFT PB						PENDERITA MB			RFT MB					
					L		P		L + P					L		P		L + P	
		L	P	L+P	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	L	P	L+P	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	KAB. BOGOR	2	7	9	2	0	7	0	9	100	137	82	219	135	0	77	0	212	97
2	KAB. SUKABUMI	2	1	3	2	100	1	100	3	100	28	8	36	28	100	8	100	36	100
3	KAB. CIANJUR	1	0	1	1	100	0	0	1	100	7	4	11	7	100	4	100	11	100
4	KAB. BANDUNG	0	3	3	0	0	3	0	3	100	4	2	6	4	0	2	0	6	100
5	KAB. GARUT	5	0	5	0	0	5	0	5	100	8	5	13	0	0	12	240	12	92
6	KAB. TASIKMALAYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	4	17	11	85	4	100	15	88
7	KAB. CIAMIS	4	2	6	3	75	2	100	5	83	8	4	12	7	88	4	100	11	92
8	KAB. KUNINGAN	11	16	27	10	91	16	100	26	96	38	13	51	36	95	13	100	49	96
9	KAB. CIREBON	11	5	16	5	45	10	0	15	94	140	62	202	136	97	60	0	196	97
10	KAB. MAJALENGKA	2	1	3	2	0	1	100	3	100	30	17	47	30	0	17	0	47	0
11	KAB. SUMEDANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	6	21	11	73	4	67	15	71
12	KAB. INDRAMAYU	17	13	30	12	0	11	0	23	77	137	80	217		0		0		0
13	KAB. SUBANG	19	13	32	19	100	12	92	31	97	88	47	135	83	94	46	98	129	96
14	KAB. PURWAKARTA	3	6	9	3	100	6	100	9	100	39	18	57	35	90	17	94	52	91
15	KAB. KARAWANG	21	32	53	12	0	26	0	38	72	215	123	338	0	0	0	0	0	0
16	KAB. BEKASI	1	4	5	1	100	4	100	5	100	138	70	208	129	93	69	99	198	95
17	KAB. BANDUNG BARAT	0	1	1	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	100	0	0	5	100
18	KAB. PANGANDARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	2	200	2	67	4	100
19	KOTA BOGOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	5	15	10	0	3	0	13	87
20	KOTA SUKABUMI	-	-	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	0	0	2	100
21	KOTA BANDUNG	0	2	2	0	0	2	0	2	100	5	3	8	6	0	2	0	8	100
22	KOTA CIREBON	0	1	1	3	0	0	0	3	300	7	0	7	4	57	0	0	4	57
23	KOTA BEKASI	10	5	15	9	90	5	100	14	93	87	43	130	79	0	39	0	118	91
24	KOTA DEPOK	3	0	3	3	0	0	0	3	100	-	-	59	0	0	0	0	32	0
25	KOTA CIMAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	KOTA TASIKMALAYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	KOTA BANJAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	3	0	1	0	4	0
	JAWA BARAT	112	112	226	87	77.7	111	99	198	87.6	1,165	600	1,824	763	65	384	64	1,179	65

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 18**JUMLAH KASUS AFP (NON POLIO) MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK <15 TAHUN	JUMLAH KASUS AFP (NON POLIO)
1	KAB. BOGOR	1,649,548	12
2	KAB. SUKABUMI	697,649	3
3	KAB. CIANJUR	648,018	18
4	KAB. BANDUNG	1,032,704	31
5	KAB. GARUT	792,992	16
6	KAB. TASIKMALAYA	469,074	9
7	KAB. CIAMIS	280,194	6
8	KAB. KUNINGAN	269,797	9
9	KAB. CIREBON	572,866	18
10	KAB. MAJALENGKA	290,831	8
11	KAB. SUMEDANG	272,051	6
12	KAB. INDRAMAYU	425,331	6
13	KAB. SUBANG	374,342	8
14	KAB. PURWAKARTA	260,360	5
15	KAB. KARAWANG	599,506	14
16	KAB. BEKASI	922,662	12
17	KAB. BANDUNG BARAT	468,437	1
18	KAB. PANGANDARAN	91,261	
19	KOTA BOGOR	270,783	11
20	KOTA SUKABUMI	84,227	3
21	KOTA BANDUNG	571,661	16
22	KOTA CIREBON	77,960	7
23	KOTA BEKASI	686,906	15
24	KOTA DEPOK	555,772	13
25	KOTA CIMAHI	147,164	4
26	KOTA TASIKMALAYA	174,985	5
27	KOTA BANJAR	45,032	4
JAWA BARAT		12,732,113	260
AFP RATE (NON POLIO) PER 100.000 PENDUDUK USIA < 15 TAHUN			2.04

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 19

**JUMLAH KASUS PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I) MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KASUS PD3I															
		DIFTERI				PERTUSIS			TETANUS (NON NEONATORUM)				TETANUS NEONATORUM				
		JUMLAH KASUS			MENINGGAL	L	P	L+P	JUMLAH KASUS			MENINGGAL	JUMLAH KASUS			MENINGGAL	
		L	P	L+P					L	P	L+P		L	P	L+P		
1	KAB. BOGOR	7	0	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
2	KAB. SUKABUMI	4	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	KAB. CIANJUR	1	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1
4	KAB. BANDUNG	0	3	3	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
5	KAB. GARUT	3	2	5	2	0	0	0	3	0	3	1	1	0	1	1	1
6	KAB. TASIKMALAYA	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
7	KAB. CIAMIS	4	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	KAB. KUNINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	KAB. CIREBON	10	8	18	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
10	KAB. MAJALENGKA	2	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	KAB. SUMEDANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	KAB. INDRAMAYU	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KAB. SUBANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	KAB. PURWAKARTA	32	20	52	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
15	KAB. KARAWANG	6	2	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	KAB. BEKASI	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	KAB. BANDUNG BARAT	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	KAB. PANGANDARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	KOTA BOGOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	KOTA SUKABUMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KOTA BANDUNG	3	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	KOTA CIREBON	8	7	15	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
23	KOTA BEKASI	5	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	KOTA DEPOK	5	3	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	KOTA CIMAHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	KOTA TASIKMALAYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	KOTA BANJAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JAWA BARAT		94	59	153	13	0	0	0	5	2	7	1	3	4	7	5	
CASE FATALITY RATE (%)					8.50							14.29				71.43	

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota 2016

TABEL 20

**JUMLAH KASUS PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I) MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KASUS PD3I									
		CAMPAK				POLIO			HEPATITIS B		
		JUMLAH KASUS			MENINGGAL	L	P	L+P	L	P	L+P
L	P	L+P									
1	KAB. BOGOR	77	72	149	0	0	0	0	0	0	0
2	KAB. SUKABUMI	5	5	10	0	0	0	0	0	0	0
3	KAB. CIANJUR	10	27	37	0	0	0	0	0	0	0
4	KAB. BANDUNG	307	225	532	0	0	0	0	0	0	0
5	KAB. GARUT	158	165	323	1	0	0	0	1	1	2
6	KAB. TASIKMALAYA	17	20	37	0	0	0	0	0	0	0
7	KAB. CIAMIS	26	21	47	0	0	0	0	0	0	0
8	KAB. KUNINGAN	29	24	53	0	0	0	0	0	0	0
9	KAB. CIREBON	616	647	1,263	0	0	0	0	0	0	0
10	KAB. MAJALENGKA	39	30	69	0	0	0	0	3	4	7
11	KAB. SUMEDANG	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
12	KAB. INDRAMAYU	83	75	158	0	0	0	0	0	0	0
13	KAB. SUBANG	23	11	34	0	0	0	0	0	0	0
14	KAB. PURWAKARTA	53	47	100	0	0	0	0	0	0	0
15	KAB. KARAWANG	93	120	213	0	0	0	0	31	29	60
16	KAB. BEKASI	73	50	123	0	0	0	0	0	0	0
17	KAB. BANDUNG BARAT	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
18	KAB. PANGANDARAN	14	17	31	0	0	0	0	0	0	0
19	KOTA BOGOR	90	61	151	0	0	0	0	0	0	0
20	KOTA SUKABUMI	66	67	133	0	0	0	0	0	0	0
21	KOTA BANDUNG	133	168	301	0	0	0	0	0	0	0
22	KOTA CIREBON	93	99	192	0	0	0	0	0	0	0
23	KOTA BEKASI	234	241	475	0	0	0	0	0	0	0
24	KOTA DEPOK	297	268	565	0	0	0	0	0	0	0
25	KOTA CIMAHI	28	22	50	0	0	0	0	0	0	0
26	KOTA TASIKMALAYA	13	13	26	0	0	0	0	0	0	0
27	KOTA BANJAR	6	9	15	0	0	0	0	0	14	14
	JAWA BARAT	2,585	2,508	5,089	1	0	0	0	35	48	83
	CASE FATALITY RATE (%)				0.02						

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 22

**KESAKITAN DAN KEMATIAN AKIBAT MALARIA MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	MALARIA																		
		SUSPEK			SEDIAAN DARAH DIPERIKSA										MENINGGAL			CFR		
					L	P	L+P	L	P	L+P	POSITIF									
		L	%	P							%	L+P	%	L	P	L+P				
1	KAB. BOGOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
2	KAB. SUKABUMI	-	-	-	11,727	3,751	15,478	59	1	7	0	66	0.4	-	-	-	-	-	0.00	
3	KAB. CIANJUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
4	KAB. BANDUNG	1	-	1	1	-	1	1	100	-	-	1	100.0	-	-	-	-	-	0.00	
5	KAB. GARUT	504	815	1,319	239	417	656	3	1	2	-	5	0.8	-	-	-	-	-	0.00	
6	KAB. TASIKMALAYA	-	-	-	-	-	-	54	-	5	-	59	-	-	-	-	-	-	0.00	
7	KAB. CIAMIS	6	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
8	KAB. KUNINGAN	-	-	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
9	KAB. CIREBON	-	-	-	11	-	11	11	100	-	-	11	100.0	-	-	-	-	-	0.00	
10	KAB. MAJALENGKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
11	KAB. SUMEDANG	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
12	KAB. INDRAMAYU	3	3	6	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	0.00	
13	KAB. SUBANG	6	-	6	6	-	6	6	100	-	-	6	100.0	-	-	-	-	-	0.00	
14	KAB. PURWAKARTA	5	-	5	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
15	KAB. KARAWANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
16	KAB. BEKASI	4	-	4	4	-	4	3	75	-	-	3	75.0	-	-	-	-	-	0.00	
17	KAB. BANDUNG BARAT	2	2	4	2	2	4	2	100	2	-	4	100.0	-	-	-	-	-	0.00	
18	KAB. PANGANDARAN	845	866	1,711	845	866	1,711	7	1	4	-	11	0.6	-	-	-	-	-	0.00	
19	KOTA BOGOR	10	-	1	10	-	10	10	100	-	-	10	100.0	-	-	-	-	-	0.00	
20	KOTA SUKABUMI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
21	KOTA BANDUNG	10	14	37	10	14	24	10	100	14	100	24	100.0	-	-	-	-	-	0.00	
22	KOTA CIREBON	277	383	660	277	383	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
23	KOTA BEKASI	12	1	13	12	1	13	12	100	1	100	13	100.0	-	-	-	-	-	0.00	
24	KOTA DEPOK	14	-	14	14	-	14	14	100	-	-	14	100.0	-	-	-	-	-	0.00	
25	KOTA CIMAH	1	-	1	1	-	1	1	100	-	-	1	100.0	-	-	-	-	-	0.00	
26	KOTA TASIKMALAYA	-	-	-	19	-	19	19	100	-	-	19	100.0	-	-	-	-	-	0.00	
27	KOTA BANJAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
	JAWA BARAT	1,701	2,086	3,791	13,186	5,435	18,621	215	1.63	35	0.64	250	1.34	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
	JUMLAH PENDUDUK BERISIKO																			
	ANGKA KESAKITAN (ANNUAL PARASITE INCIDENCE) PER 1.000 PENDUDUK BERISIKO											0.211								

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 21

**JUMLAH KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) MENURUT JENIS KELAMIN,
KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)								
		JUMLAH KASUS			MENINGGAL			CFR (%)		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	KAB. BOGOR	1725	1699	3424	23	22	45	1.33	1.29	1.31
2	KAB. SUKABUMI	419	374	793	5	2	7	1.19	0.53	0.88
3	KAB. CIANJUR	434	365	799	4	3	7	0.92	0.82	0.88
4	KAB. BANDUNG	1664	1708	3372	1	7	8	0.06	0.41	0.24
5	KAB. GARUT	291	225	516	1	1	2	0.34	0.44	0.39
6	KAB. TASIKMALAYA	229	250	479	2	1	3	0.87	0.40	0.63
7	KAB. CIAMIS	387	361	748	0	0	0	-	-	-
8	KAB. KUNINGAN	933	781	1714	6	7	13	0.64	0.90	0.76
9	KAB. CIREBON	940	937	1877	11	8	19	1.17	0.85	1.01
10	KAB. MAJALENGKA	176	152	328	2	2	4	1.14	1.32	1.22
11	KAB. SUMEDANG	475	433	908	1	3	4	0.21	0.69	0.44
12	KAB. INDRAMAYU	483	477	960	15	20	35	3.11	4.19	3.65
13	KAB. SUBANG	428	271	699	4	3	7	0.93	1.11	1.00
14	KAB. PURWAKARTA	424	361	785	1	0	1	0.24	-	0.13
15	KAB. KARAWANG	546	513	1059	2	6	8	0.37	1.17	0.76
16	KAB. BEKASI	910	703	1613	6	12	18	0.66	1.71	1.12
17	KAB. BANDUNG BARAT	815	739	1554	1	2	3	0.12	0.27	0.19
18	KAB. PANGANDARAN	73	70	143	0	1	1	-	1.43	0.70
19	KOTA BOGOR	658	566	1224	5	6	11	0.76	1.06	0.90
20	KOTA SUKABUMI	431	511	942	2	3	5	0.46	0.59	0.53
21	KOTA BANDUNG	2054	1827	3881	1	6	7	0.05	0.33	0.18
22	KOTA CIREBON	590	521	1111	2	0	2	0.34	-	0.18
23	KOTA BEKASI	1972	1841	3813	22	28	50	1.12	1.52	1.31
24	KOTA DEPOK	1285	1270	2555	3	4	7	0.23	0.31	0.27
25	KOTA CIMAH	483	516	999	1	2	3	0.21	0.39	0.30
26	KOTA TASIKMALAYA	381	373	754	0	5	5	-	1.34	0.66
27	KOTA BANJAR	175	193	368	0	2	2	-	1.04	0.54
	JAWA BARAT	19,381	18,037	37,418	121	156	277	0.62	0.86	0.74
	INCIDENCE RATE PER 100.000 PENDUDUK			78.98						

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 23

**PENDERITA FILARIASIS DITANGANI MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	PENDERITA FILARIASIS					
		KASUS BARU DITEMUKAN			JUMLAH SELURUH KASUS		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	KAB. BOGOR	7	19	26	0	0	0
2	KAB. SUKABUMI	0	0	0	46	59	105
3	KAB. CIANJUR	0	0	0	0	0	0
4	KAB. BANDUNG	0	5	5	12	27	39
5	KAB. GARUT	2	0	2	2	0	2
6	KAB. TASIKMALAYA	0	2	2	29	38	67
7	KAB. CIAMIS	1	1	2	14	11	25
8	KAB. KUNINGAN	2	6	8	24	32	56
9	KAB. CIREBON	0	0	0	0	0	0
10	KAB. MAJALENGKA	1	3	4	1	3	4
11	KAB. SUMEDANG	0	0	0	0	2	2
12	KAB. INDRAMAYU	2	0	2	7	20	27
13	KAB. SUBANG	1	1	2	18	12	30
14	KAB. PURWAKARTA	3	5	8	12	17	29
15	KAB. KARAWANG	0	1	1	28	24	52
16	KAB. BEKASI	0	0	0	17	24	41
17	KAB. BANDUNG BARAT	0	0	0	3	10	13
18	KAB. PANGANDARAN	0	0	0	0	0	0
19	KOTA BOGOR	0	0	0	0	0	0
20	KOTA SUKABUMI	0	0	0	14	10	24
21	KOTA BANDUNG	2	1	3	6	12	18
22	KOTA CIREBON	0	0	0	0	0	0
23	KOTA BEKASI	0	0	0	10	14	24
24	KOTA DEPOK	0	0	0	0	0	0
25	KOTA CIMAH	0	0	0	0	0	0
26	KOTA TASIKMALAYA	0	0	0	0	0	0
27	KOTA BANJAR	0	0	0	0	0	0
	JAWA BARAT	21	44	65	243	315	558
	ANGKA KESAKITAN PER 100.000 PENDUDUK (KAB/KOTA)				1.01	1.3	1.18

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 24

**PENGUKURAN TEKANAN DARAH PENDUDUK ≥ 18 TAHUN MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KAB/KOTA	JUMLAH PENDUDUK ≥ 18 TAHUN			DILAKUKAN PENGUKURAN TEKANAN DARAH						HIPERTENSI/TEKANAN DARAH TINGGI						Prosentasi Hipertensi Terhadap Penduduk > 18 Th
					LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LAKI-LAKI + PEREMPUAN		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LAKI-LAKI + PEREMPUAN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI + PEREMPUAN	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	
1	KAB. BOGOR	1,848,073	1,770,358	3,618,431	-	-	-	-	2,456,092	67.88	-	-	-	-	12,682	0.52	0.35
2	KAB. SUKABUMI	815,754	801,032	1,616,786	92,138	11	143,426	18	235,564	14.57	19,351	21.00	33,538	23.38	52,889	22.45	3.27
3	KAB. CIANJUR	762,382	718,628	1,481,010	12,933	2	15,990	2	28,923	1.95	-	-	-	-	-	-	-
4	KAB. BANDUNG	1,198,690	1,172,854	2,371,544	267,406	22	267,415	23	534,821	22.55	-	-	-	-	118,751	22.20	5.01
5	KAB. GARUT	815,636	816,689	1,632,325	456,337	56	511,535	63	534,821	32.76	19,549	4.28	33,308	6.51	52,857	9.88	3.24
6	KAB. TASIKMALAYA	579,107	606,732	1,185,839	456,337	79	511,535	84	967,872	81.62	19,594	4.29	33,308	6.51	52,902	5.47	4.46
7	KAB. CIAMIS	408,739	431,480	840,219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,950	-	2.02
8	KAB. KUNINGAN	367,072	373,206	740,278	114,725	31	216,779	58	331,504	44.78	14,939	13.02	31,239	14.41	46,178	13.93	6.24
9	KAB. CIREBON	737,902	707,880	1,445,782	5,634	1	20,165	3	25,799	1.78	1,332	23.64	5,481	27.18	6,813	26.41	0.47
10	KAB. MAJALENGKA	416,667	425,907	842,574	-	-	-	-	-	-	16,021	-	31,474	-	47,495	#DIV/0!	5.64
11	KAB. SUMEDANG	400,336	412,560	812,896	174,253	44	239,366	58	413,619	50.88	24,489	14.05	52,143	21.78	76,632	18.53	9.43
12	KAB. INDRAMAYU	608,245	578,184	1,186,429	20,275	3	32,443	6	52,718	4.44	13,608	67.12	23,435	72.23	37,043	70.27	3.12
13	KAB. SUBANG	549,487	547,571	1,097,058	122,685	22	123,336	23	246,021	22.43	8,179	6.67	15,417	12.50	23,596	9.59	2.15
14	KAB. PURWAKARTA	315,984	305,665	621,649	6,039	2	8,156	3	14,195	2.28	861	14.26	1,162	14.25	2,023	14.25	0.33
15	KAB. KARAWANG	807,855	770,454	1,578,309	19,255	2	26,668	3	45,923	2.91	6,105	31.71	8,131	30.49	14,236	31.00	0.90
16	KAB. BEKASI	1,163,061	1,121,957	2,285,018	229,644	20	286,255	26	515,899	22.58	27,275	11.88	34,211	11.95	61,486	11.92	2.69
17	KAB. BANDUNG BARAT	553,358	539,991	1,093,349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	KAB. PANGANDARAN	139,687	144,861	284,548	35,949	26	47,106	33	83,055	29.19	69	0.19	63	0.13	132	0.16	0.05
19	KOTA BOGOR	373,362	364,591	737,953	84,405	23	154,323	42	238,728	32.35	4,342	5.14	6,661	4.32	11,003	4.61	1.49
20	KOTA SUKABUMI	110,868	109,037	219,905	7,941	7	10,638	10	18,579	8.45	4,286	53.97	6,160	57.91	10,446	56.22	4.75
21	KOTA BANDUNG	902,859	889,580	1,792,439	9,521	1	18,090	2	27,611	1.54	-	-	-	-	-	-	-
22	KOTA CIREBON	106,905	108,858	215,763	31,731	30	21,273	20	53,004	24.57	16,273	51.28	20,801	97.78	37,074	69.95	17.18
23	KOTA BEKASI	985,496	974,375	1,959,871	47,964	5	68,647	7	116,611	5.95	7,481	15.60	12,026	17.52	19,507	16.73	1.00
24	KOTA DEPOK	762,310	757,109	1,519,419	381,367	50	378,343	50	759,710	50.00	14,126	3.70	20,802	5.50	34,928	4.60	2.30
25	KOTA CIMAH	209,355	207,604	416,959	64,791	31	124,498	60	189,289	45.40	3,596	5.55	8,753	7.03	12,349	6.52	2.96
26	KOTA TASIKMALAYA	224,119	224,274	448,393	46,686	21	82,419	37	129,105	28.79	14,226	30.47	23,415	28.41	37,641	29.16	8.39
27	KOTA BANJAR	61,986	65,249	127,235	2,590	4	7,192	11	9,782	7.69	1,397	53.94	3,372	46.89	4,769	48.75	3.75
JAWA BARAT		16,225,295	15,946,686	32,171,981	2,690,606	16.58	3,315,598	20.79	8,029,245	24.96	237,099	8.81	404,900	12.21	790,382	9.84	2.46

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 25

**PEMERIKSAAN OBESITAS MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS
DESA DAN KELURAHAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KAB/KOTA	JUMLAH PENGUNJUNG PUSKESMAS DAN JARINGANNYA BERUSIA ≥ 15 TAHUN			DILAKUKAN PEMERIKSAAN OBESITAS						OBESITAS					
				LAKI-LAKI + PEREMPUAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LAKI-LAKI + PEREMPUAN		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LAKI-LAKI + PEREMPUAN	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	KAB. BOGOR	274,185	264,357	538,542	-	-	-	-	448,704	83.32	-	-	-	-	150	0.03
2	KAB. SUKABUMI	44,995	66,727	111,722	24,566	-	41,084	-	65,650	58.76	4,491	-	6,271	-	10,762	16.39
3	KAB. CIANJUR			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	KAB. BANDUNG	698,955	672,397	1,371,352	267,406	-	267,415	-	534,821	39.00	-	-	-	-	1,136	0.21
5	KAB. GARUT	13,125	17,939	31,064	3,587	-	5,583	-	9,170	29.52	783	-	1,523	-	3,342	36.44
6	KAB. TASIKMALAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	KAB. CIAMIS	71,998	71,616	143,614	18,923	-	16,800	-	35,723	24.87	1,156	-	1,428	-	3	0.01
8	KAB. KUNINGAN	404,622	413,138	817,760	68,940	17	117,256	28	186,196	22.77	5,119	7	11,531	10	16,650	8.94
9	KAB. CIREBON	387,780	628,673	1,016,453	5,646	1	20,055	3	25,701	2.53	2,009	-	8,993	-	11,002	42.81
10	KAB. MAJALENGKA			-	263	-	283	-	546	-	253	96	283	100	536	98.17
11	KAB. SUMEDANG	190,015	311,141	501,156	24,099	-	41,474	-	65,573	13.08	2,035	-	2,438	-	4,473	6.82
12	KAB. INDRAMAYU	28,204	47,975	76,179	3,235	-	4,037	-	7,272	9.55	178	-	361	-	539	7.41
13	KAB. SUBANG	13,057	23,212	36,269	3,176	-	5,196	-	8,372	23.08	794	-	1,299	-	2,093	25.00
14	KAB. PURWAKARTA	233,977	218,405	452,382	6,039	3	8,156	4	14,195	3.14	861	14	1,162	14	2,023	14.25
15	KAB. KARAWANG	741,082	756,049	1,497,131	1,520	0	13,699	2	15,219	1.02	907	60	5,323	39	6,230	40.94
16	KAB. BEKASI	256,926	263,104	520,030	24,348	-	30,244	-	54,592	10.50	1,802	-	2,891	-	4,693	8.60
17	KAB. BANDUNG BARAT			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	KAB. PANGANDARAN	35,949	47,106	83,055	6,878	-	8,885	-	15,763	18.98	-	-	-	-	-	-
19	KOTA BOGOR	205,533	244,209	449,742	-	-	-	-	-	-	17,585	-	33,143	-	50,728	-
20	KOTA SUKABUMI	38,585	35,939	74,524	-	-	-	-	-	-	17	-	40	-	57	-
21	KOTA BANDUNG			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	KOTA CIREBON	108,602	108,257	216,859	31,731	29	28,544	26	60,275	27.79	2,356	7	3,729	-	6,085	10.10
23	KOTA BEKASI	192,326	261,550	453,876	7,799	4	9,392	4	17,191	3.79	2,324	30	3,526	12	5,850	34.03
24	KOTA DEPOK	248,970	296,930	545,900	25,736	10	34,631	12	60,367	11.06	1,647	6	3,104	33	4,751	7.87
25	KOTA CIMAHI	57,248	120,352	177,600	1,980	3	4,679	4	6,659	3.75	1,980	-	4,679	-	6,659	100.00
26	KOTA TASIKMALAYA			-	3,679	-	8,244	-	11,923	-	260	-	815	-	1,075	9.02
27	KOTA BANJAR	2,554	3,496	6,050	89	-	78	-	167	2.76	63	-	65	-	128	76.65
	JAWA BARAT	4,248,688	4,872,572	9,121,260	529,640	12.47	665,735	13.66	1,644,079	18.02	46,620	8.80	92,604	13.91	138,965	8.45

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 26

**CAKUPAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM DENGAN METODE IVA DAN KANKER PAYUDARA
DENGAN PEMERIKSAAN KLINIS (CBE) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KECAMATAN	PEREMPUAN USIA 30-50 TAHUN	PEMERIKSAAN LEHER RAHIM DAN PAYUDARA		IVA POSITIF		TUMOR/BENJOLAN	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	KAB. BOGOR	816,262	871	0.11	2	0.23	3	0.34
2	KAB. SUKABUMI	353,064	7,012	1.99	22	0.31	47	0.67
3	KAB. CIANJUR	320,748	1,324	0.41	-	-	-	-
4	KAB. BANDUNG	540,306	2,126	0.39	75	3.53	67	3.15
5	KAB. GARUT	353,690	2,902	0.82	35	1.21	40	1.38
6	KAB. TASIKMALAYA	269,963	1,294	0.48	-	-	-	-
7	KAB. CIAMIS	182,676	873	0.48	21	2.41	9	1.03
8	KAB. KUNINGAN	160,751	6,775	4.21	16	0.24	52	0.77
9	KAB. CIREBON	308,833	947	0.31	37	3.91	13	1.37
10	KAB. MAJALENGKA	182,821	805	0.44	56	6.96	-	-
11	KAB. SUMEDANG	171,186	703	0.41	10	1.42	67	9.53
12	KAB. INDRAMAYU	261,388	1,252	0.48	35	2.80	59	4.71
13	KAB. SUBANG	241,190	-	-	-	-	-	-
14	KAB. PURWAKARTA	136,104	1,686	1.24	58	3.44	112	6.64
15	KAB. KARAWANG	353,367	14,964	4.23	62	0.41	92	0.61
16	KAB. BEKASI	528,590	287	0.05	-	-	56	19.51
17	KAB. BANDUNG BARAT	242,251	-	-	-	-	-	-
18	KAB. PANGANDARAN	64,704	154	0.24	1	0.65	-	-
19	KOTA BOGOR	165,868	12,889	7.77	265	2.06	255	1.98
20	KOTA SUKABUMI	47,139	169	0.36	1	0.59	6	3.55
21	KOTA BANDUNG	390,475	-	-	-	-	-	-
22	KOTA CIREBON	48,398	-	-	-	-	-	-
23	KOTA BEKASI	474,127	1,946	0.41	94	4.83	34	1.75
24	KOTA DEPOK	368,996	776	0.21	20	2.58	-	-
25	KOTA CIMAH	97,114	4,158	4.28	8	0.19	-	-
26	KOTA TASIKMALAYA	98,214	307	0.31	11	3.58	-	-
27	KOTA BANJAR	27,939	-	-	-	-	-	-
	JAWA BARAT	7,206,164	64,220	0.89	829	1.29	912	1.42

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 28

**KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) DI DESA/KELURAHAN YANG DITANGANI < 24 JAM
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	KLB DI DESA/KELURAHAN		
		JUMLAH	DITANGANI <24 JAM	%
1	KAB. BOGOR	11	11	100
2	KAB. SUKABUMI	33	33	100
3	KAB. CIANJUR	11	11	100
4	KAB. BANDUNG	11	11	100
5	KAB. GARUT	29	25	86
6	KAB. TASIKMALAYA	260	260	100
7	KAB. CIAMIS	12	12	100
8	KAB. KUNINGAN	30	30	100
9	KAB. CIREBON	103	103	100
10	KAB. MAJALENGKA	18	18	100
11	KAB. SUMEDANG	4	4	100
12	KAB. INDRAMAYU	3	3	100
13	KAB. SUBANG	3	3	100
14	KAB. PURWAKARTA	22	22	100
15	KAB. KARAWANG	16	16	100
16	KAB. BEKASI	3	3	100
17	KAB. BANDUNG BARAT	4	4	100
18	KAB. PANGANDARAN	1	1	100
19	KOTA BOGOR	3	3	100
20	KOTA SUKABUMI	4	4	100
21	KOTA BANDUNG	18	18	100
22	KOTA CIREBON	15	15	100
23	KOTA BEKASI	15	15	100
24	KOTA DEPOK	0	0	-
25	KOTA CIMAH	0	0	-
26	KOTA TASIKMALAYA	5	5	100
27	KOTA BANJAR	0	0	-
	JAWA BARAT	634	630	99.37

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 29

**CAKUPAN KUNJUNGAN IBU HAMIL, PERSALINAN DITOLONG TENAGA KESEHATAN, DAN PELAYANAN KESEHATAN IBU NIFAS
MENURUT KABUPATEN/KOTA, PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	IBU HAMIL					IBU BERSALIN/NIFAS						
		JUMLAH	K1		K4		JUMLAH	PERSALINAN DITOLONG NAKES		MENDAPAT YANKES NIFAS		IBU NIFAS MENDAPAT VIT A	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%		JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	KAB. BOGOR	126,474	135,016	107	129,419	102	120,725	116,040	96.12	118,106	97.83	102,290	84.73
2	KAB. SUKABUMI	51,056	51,314	101	45,566	89	48,736	40,984	84.09	43,391	89.03	46,701	95.82
3	KAB. CIANJUR	47,773	49,554	104	41,879	88	45,601	39,755	87.18	41,579	91.18	43,231	94.80
4	KAB. BANDUNG	79,880	72,253	90	67,898	85	76,249	61,764	81.00	61,743	80.98	61,743	80.98
5	KAB. GARUT	58,084	62,518	108	58,594	101	55,444	53,622	96.71	56,004	101.01	56,514	101.93
6	KAB. TASIKMALAYA	33,459	34,713	104	29,809	89	31,938	30,252	94.72	30,678	96.05	28,801	90.18
7	KAB. CIAMIS	20,024	20,755	104	18,467	92	19,114	18,341	95.96	18,203	95.23	18,386	96.19
8	KAB. KUNINGAN	20,156	20,267	101	18,797	93	19,240	19,795	102.88	19,464	101.16	19,797	102.90
9	KAB. CIREBON	41,418	52,160	126	49,514	120	39,536	47,234	119.47	46,883	118.58	47,798	120.90
10	KAB. MAJALENGKA	21,778	22,499	103	20,693	95	20,788	20,451	98.38	20,410	98.18	20,789	100.00
11	KAB. SUMEDANG	20,397	21,649	106	19,784	97	19,470	20,006	102.75	19,807	101.73	20,021	102.83
12	KAB. INDRAMAYU	30,888	39,984	129	36,383	118	29,484	34,453	116.85	35,130	119.15	34,312	116.37
13	KAB. SUBANG	27,610	33,073	120	31,205	113	26,355	29,015	110.09	26,901	102.07	28,620	108.59
14	KAB. PURWAKARTA	19,976	21,341	107	19,909	100	19,068	19,102	100.18	19,183	100.60	19,732	103.48
15	KAB. KARAWANG	46,520	52,785	113	50,234	108	44,406	49,398	111.24	49,221	110.84	49,275	110.96
16	KAB. BEKASI	78,540	78,966	101	76,179	97	74,970	72,811	97.12	73,824	98.47	73,893	98.56
17	KAB. BANDUNG BARAT	35,213	45,906	130	43,997	125	33,613	41,433	123.26	41,395	123.15	39,825	118.48
18	KAB. PANGANDARAN	6,720	6,914	103	6,188	92	6,414	5,965	93.00	6,034	94.08	606	9.45
19	KOTA BOGOR	21,273	21,509	101	20,810	98	20,306	18,992	93.53	19,380	95.44	19,443	95.75
20	KOTA SUKABUMI	6,535	6,859	105	6,088	93	6,238	6,076	97.40	5,972	95.74	6,092	97.66
21	KOTA BANDUNG	45,927	45,906	100	43,997	96	43,840	41,433	94.51	41,395	94.42	39,825	90.84
22	KOTA CIREBON	5,960	5,956	100	5,565	93	5,689	5,422	95.31	5,289	92.97	5,418	95.24
23	KOTA BEKASI	55,682	52,285	94	49,565	89	53,151	46,924	88.28	44,951	84.57	46,437	87.37
24	KOTA DEPOK	46,096	46,201	100	43,924	95	44,000	41,794	94.99	39,644	90.10	40,383	91.78
25	KOTA CIMAHI	11,875	11,364	96	10,648	90	11,335	10,338	91.20	9,589	84.60	10,186	89.86
26	KOTA TASIKMALAYA	13,097	12,905	99	12,414	95	12,501	11,744	93.94	11,727	93.81	11,784	94.26
27	KOTA BANJAR	3,369	3,874	115	3,491	104	3,216	3,259	101.34	3,256	101.24	3,256	101.24
	JAWA BARAT	975,780	1,028,526	105.4	961,017	98.49	931,427	906,403	97.3	909,159	97.61	895,158	96.11

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 30

**PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI TT PADA IBU HAMIL MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH IBU HAMIL	IMUNISASI TETANUS TOKSOID PADA IBU HAMIL											
			TT-1		TT-2		TT-3		TT-4		TT-5		TT2+	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	KAB. BOGOR	126,474	70,066	55.4	59,685	47.2	23,021	18.2	11,802	9.3	7,300	5.8	101,808	80.5
2	KAB. SUKABUMI	51,056	27,401	53.7	24,167	47.3	9,269	18.2	4,741	9.3	6,628	13.0	44,805	87.8
3	KAB. CIANJUR	47,773	41,096	86.0	40,812	85.4	6,125	12.8	3,468	7.3	2,808	5.9	53,213	111.4
4	KAB. BANDUNG	79,880	10,161	12.7	9	0.0	708	0.9	5,813	7.3	4,795	6.0	27,118	33.9
5	KAB. GARUT	58,084	43,789	75.4	38,238	65.8	9,452	16.3	5,492	9.5	5,496	9.5	58,678	101.0
6	KAB. TASIKMALAYA	33,459	29,717	88.8	27,440	82.0	1,740	5.2	1,507	4.5	1,447	4.3	32,134	96.0
7	KAB. CIAMIS	20,024	8,169	40.8	6,945	34.7	5,246	26.2	2,487	12.4	2,040	10.2	16,718	83.5
8	KAB. KUNINGAN	20,156	7,237	35.9	7,122	35.3	6,757	33.5	3,324	16.5	1,684	8.4	26,124	129.6
9	KAB. CIREBON	41,418	33,890	81.8	30,892	74.6	10,529	25.4	4,955	12.0	2,643	6.4	49,019	118.4
10	KAB. MAJALENGKA	21,778	11,319	52.0	10,300	47.3	5,938	27.3	2,295	10.5	1,255	5.8	19,788	90.9
11	KAB. SUMEDANG	20,397	19,937	97.7	19,075	93.5	799	3.9	425	2.1	309	1.5	20,563	100.8
12	KAB. INDRAMAYU	30,888	32,753	106.0	30,795	99.7	1,348	4.4	923	3.0	686	2.2	33,752	109.3
13	KAB. SUBANG	27,610	23,519	85.2	19,471	70.5	5,799	21.0	3,105	11.2	2,780	10.1	28,698	103.9
14	KAB. PURWAKARTA	19,976	8,528	42.7	6,993	35.0	5,520	27.6	2,438	12.2	1,268	6.3	16,219	81.2
15	KAB. KARAWANG	46,520	21,000	45.1	20,252	43.5	12,087	26.0	4,520	9.7	4,520	9.7	41,379	88.9
16	KAB. BEKASI	78,540	56,437	71.9	54,680	69.6	20,239	25.8	15,156	19.3	12,236	15.6	102,311	130.3
17	KAB. BANDUNG BARAT	35,213	16,602	47.1	12,732	36.2	7,693	21.8	4,864	13.8	398	1.1	29,269	83.1
18	KAB. PANGANDARAN	6,720	2,798	41.6	2,329	34.7	1,250	18.6	437	6.5	320	4.8	4,336	64.5
19	KOTA BOGOR	21,273	10,932	51.4	9,511	44.7	3,283	15.4	1,828	8.6	1,514	7.1	16,136	75.9
20	KOTA SUKABUMI	6,535	5,058	77.4	4,497	68.8	963	14.7	546	8.4	761	11.6	6,767	103.6
21	KOTA BANDUNG	45,927	28,170	61.3	24,288	52.9	11,369	24.8	7,936	17.3	5,783	12.6	49,376	107.5
22	KOTA CIREBON	5,960	2,251	37.8	2,090	35.1	1,373	23.0	788	13.2	723	12.1	9,948	166.9
23	KOTA BEKASI	55,682	31,575	56.7	27,466	49.3	15,260	27.4	9,147	16.4	5,253	9.4	57,126	102.6
24	KOTA DEPOK	46,096	33,098	71.8	30,638	66.5	12,657	27.5	9,254	20.1	8,526	18.5	61,075	132.5
25	KOTA CIMAHI	11,875	8,222	69.2	7,657	64.5	830	7.0	325	2.7	211	1.8	9,023	76.0
26	KOTA TASIKMALAYA	13,097	5,216	39.8	5,416	41.4	4,116	31.4	2,196	16.8	1,246	9.5	12,506	95.5
27	KOTA BANJAR	3,369	2,304	68.4	2,157	64.0	1,028	30.5	529	15.7	321	9.5	4,035	119.8
	JAWA BARAT	975,780	591,245	60.6	525,657	53.9	184,399	18.9	110,301	11.3	82,951	8.5	931,924	95.5

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 31

**PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI TT PADA WANITA USIA SUBUR MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH WUS (15-39 TAHUN)	IMUNISASI TETANUS TOKSOID PADA WUS									
			TT-1		TT-2		TT-3		TT-4		TT-5	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	KAB. BOGOR			-		-		-		-		-
2	KAB. SUKABUMI	469,893	15,588	-	12,870	-	5,885	-	3,367	-	3,432	-
3	KAB. CIANJUR			-		-		-		-		-
4	KAB. BANDUNG			-		-		-		-		-
5	KAB. GARUT	62,514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	KAB. TASIKMALAYA	347,790	6,267	0.9	3,007	0.7	4	0.0	4	0.0	4	0.0
7	KAB. CIAMIS	2,593	8,169	315.0	6,945	267.8	5,246	202.3	2,487	95.9	204	7.9
8	KAB. KUNINGAN	20,166	7,084	-	7,064	-	6,851	-	3,363	-	1,669	-
9	KAB. CIREBON	5,379,807,778	33,890	-	30,892	-	10,529	-	4,955	-	26,431	-
10	KAB. MAJALENGKA	214,628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	KAB. SUMEDANG	20,684	1,241	6.0	608	2.9	-	-	-	-	-	-
12	KAB. INDRAMAYU	295,219	32,477	11.0	30	-	133	-	905	-	658	-
13	KAB. SUBANG	35,351	23,519	-	19,471	-	5,799	-	3,105	-	2,780	-
14	KAB. PURWAKARTA		1,196	-	907	-		-		-		-
15	KAB. KARAWANG	486,538	21,000	-	20,252	-	12,087	-	4,520	-	4,520	-
16	KAB. BEKASI	334,621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	KAB. BANDUNG BARAT	289,663	325	0.1	116	0.0	-	-	-	-	-	-
18	KAB. PANGANDARAN	93,314	47	0.1	11	0.0	-	-	-	-	-	-
19	KOTA BOGOR			-		-		-		-		-
20	KOTA SUKABUMI	68,028	124	-	31	-	-	-	-	-	-	-
21	KOTA BANDUNG	48,157	34,635	71.9	31,464	65.3	16,662	34.6	12,728	26.4	10,015	20.8
22	KOTA CIREBON			-		-		-		-		-
23	KOTA BEKASI	679,571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	KOTA DEPOK		802	-	142	-		-		-		-
25	KOTA CIMAHI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	KOTA TASIKMALAYA	132,105	1,983	-	821	-	-	-	-	-	-	-
27	KOTA BANJAR	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	JAWA BARAT	5,383,408,613	188,347	0.0	134,631	0.0	63,196	0.0	35,434	0.0	49,713	0.0

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 33

**JUMLAH DAN PERSENTASE PENANGANAN KOMPLIKASI KEBIDANAN DAN KOMPLIKASI NEONATAL
MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH IBU HAMIL	PERKIRAAN BUMIL DENGAN KOMPLIKASI KEBIDANAN	PENANGANAN KOMPLIKASI KEBIDANAN		JUMLAH LAHIR HIDUP	PERKIRAAN NEONATAL KOMPLIKASI	PENANGANAN KOMPLIKASI NEONATAL			
				JUMLAH	%			L + P	L + P	L + P	
										JUMLAH	%
1	KAB. BOGOR	126,474	25,295	21,604	85.4	114,976	17,246	7,366	42.7		
2	KAB. SUKABUMI	51,056	10,211	13,334	130.6	46,415	6,962	4,187	60.1		
3	KAB. CIANJUR	47,773	9,555	8,220	86.0	43,430	6,514	4,278	65.7		
4	KAB. BANDUNG	79,880	15,976	11,818	74.0	72,618	10,892	8,447	77.6		
5	KAB. GARUT	58,084	11,617	7,469	64.3	52,804	7,920	3,930	49.6		
6	KAB. TASIKMALAYA	33,459	6,692	7,169	107.1	30,417	4,562	1,568	34.4		
7	KAB. CIAMIS	20,024	4,005	555	13.9	18,204	2,730	2,933	107.4		
8	KAB. KUNINGAN	20,156	4,031	4,037	100.1	18,324	2,748	1,819	66.2		
9	KAB. CIREBON	41,418	8,284	12,854	155.2	37,653	5,647	6,320	111.9		
10	KAB. MAJALENGKA	21,778	4,356	4,380	100.6	19,798	2,970	2,428	81.8		
11	KAB. SUMEDANG	20,397	4,079	4,037	99.0	18,543	2,781	1,819	65.4		
12	KAB. INDRAMAYU	30,888	6,178	8,614	139.4	28,080	4,212	3,456	82.1		
13	KAB. SUBANG	27,610	5,522	5,896	106.8	25,100	3,765	4,051	107.6		
14	KAB. PURWAKARTA	19,976	3,995	4,369	109.4	18,160	2,724	2,152	79.0		
15	KAB. KARAWANG	46,520	9,304	8,960	96.3	42,291	6,344	5,711	90.0		
16	KAB. BEKASI	78,540	15,708	12,979	82.6	71,400	10,710	7,824	73.1		
17	KAB. BANDUNG BARAT	35,213	7,043	5,438	77.2	32,012	4,801	2,029	42.3		
18	KAB. PANGANDARAN	6,720	1,344	1,562	116.2	6,109	916	588	64.2		
19	KOTA BOGOR	21,273	4,255	3,321	78.0	19,339	2,901	2,463	84.9		
20	KOTA SUKABUMI	6,535	1,307	1,271	97.2	5,941	891	829	93.0		
21	KOTA BANDUNG	45,927	9,185	4,812	52.4	41,752	6,263	4,812	76.8		
22	KOTA CIREBON	5,960	1,192	1,315	110.3	5,418	812	992	122.2		
23	KOTA BEKASI	55,682	11,136	4,272	38.4	50,620	7,593	1,452	19.1		
24	KOTA DEPOK	46,096	9,219	8,273	89.7	41,905	6,286	2,101	33.4		
25	KOTA CIMAH	11,875	2,375	1,854	78.1	10,795	1,619	619	38.2		
26	KOTA TASIKMALAYA	13,097	2,619	2,577	98.4	11,906	1,786	1,409	78.9		
27	KOTA BANJAR	3,369	674	838	124.3	3,063	459	308	67.1		
JAWA BARAT		975,780	195,156	171,828	88.0	887,073	133,054	85,891	64.6		

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 34

**PROPORSI PESERTA KB AKTIF MENURUT JENIS KONTRASEPSI, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	PESERTA KB AKTIF																						MKJP + NON MKJP	% MKJP + NON MKJP
		MKJP										NON MKJP													
		IUD	%	MOP	%	MOW	%	IM PLAN	%	JUMLAH	%	KONDOM	%	SUNTIK	%	PIL	%	OBAT VAGINA	%	LAIN NYA	%	JUMLAH	%		
1	KAB. BOGOR	45,421	11.0	5,925	1.4	15,858	3.8	42,878	10.4	110,082	26.6	8,001	1.9	39,766	9.6	256,236	61.9	0	0.0	0	0.0	304,003	73.4	414,085	100
2	KAB. SUKABUMI	18,457	4.9	3,120	0.8	6,159	1.6	56,231	15.0	83,967	22.4	8,656	2.3	171,943	46.0	109,550	29.3	0	0.0	3	0.0	290,152	77.6	374,119	100
3	KAB. CIANJUR	31,358	8.1	2,358	0.6	3,157	0.8	27,353	7.1	84,644	16.6	-	0.0	180,657	46.7	114,696	29.7	0	0.0	6,731	1.7	302,084	78.1	386,728	95
4	KAB. BANDUNG	102,275	17.6	5,423	0.9	16,411	2.8	28,827	5.0	152,936	26.4	7,222	1.2	315,320	54.3	104,856	18.1	0	0.0	0	0.0	427,398	73.6	580,334	100
5	KAB. GARUT	71,826	11.6	2,800	0.5	9,397	1.5	59,934	9.7	143,957	23.3	7,077	1.1	342,529	55.5	123,794	20.1	0	0.0	0	0.0	473,400	76.7	617,357	100
6	KAB. TASIKMALAYA	30,635	12.2	1,000	0.4	5,335	2.1	17,219	6.8	54,189	21.5	2,331	0.9	153,079	60.8	42,270	16.8	0	0.0	0	0.0	197,680	78.5	251,869	100
7	KAB. CIAMIS	18,403	10.3	1,377	0.8	7,031	3.9	9,852	5.5	36,663	20.4	1,928	1.1	100,989	56.3	39,893	22.2	0	0.0	0	0.0	142,810	79.6	179,473	100
8	KAB. KUNINGAN	22,688	13.7	300	0.2	9,027	5.4	16,410	9.9	48,425	29.2	1,382	0.8	105,858	63.8	10,302	6.2	0	0.0	0	0.0	117,542	70.8	165,967	100
9	KAB. CIREBON	21,355	6.2	1,973	0.6	15,120	4.4	24,308	7.0	62,756	18.1	8,100	2.3	217,187	62.6	59,132	17.0	0	0.0	0	0.0	284,419	81.9	347,175	100
10	KAB. MAJALENGKA	10,097	4.8	2,313	1.1	9,351	4.4	12,323	5.8	34,084	16.1	3,023	1.4	141,282	66.7	33,358	15.8	0	0.0	0	0.0	177,663	83.9	211,747	100
11	KAB. SUMEDANG	14,397	8.1	529	0.3	7,513	4.2	9,815	5.5	32,254	18.1	1,357	0.8	114,768	64.5	29,527	16.6	0	0.0	0	0.0	145,652	81.9	177,906	100
12	KAB. INDRAMAYU	18,073	6.0	3,572	1.2	5,553	1.8	18,651	6.2	45,849	15.1	4,230	1.4	158,501	52.3	94,657	31.2	0	0.0	0	0.0	257,388	84.9	303,237	100
13	KAB. SUBANG	52,288	20.0	3,059	1.2	8,723	3.3	15,547	5.9	79,617	30.4	5,450	2.1	113,800	43.5	63,022	24.1	0	0.0	0	0.0	182,272	69.6	261,889	100
14	KAB. PURWAKARTA	16,523	11.0	1,549	1.0	3,922	2.6	11,503	7.7	33,497	22.4	4,653	3.1	70,574	47.2	40,930	27.3	0	0.0	0	0.0	116,157	77.6	149,654	100
15	KAB. KARAWANG	16,545	5.3	1,622	0.5	8,335	2.6	20,467	6.5	46,969	14.9	5,974	1.9	178,965	56.9	82,711	26.3	0	0.0	0	0.0	267,650	85.1	314,619	100
16	KAB. BEKASI	45,412	7.7	5,505	0.9	1,191	0.2	3,984	0.7	56,092	9.5	15,984	2.7	301,403	51.0	215,953	36.6	976	0.2	310	0.1	534,626	90.5	590,718	100
17	KAB. BANDUNG BARAT	4,551	10.4	472	1.1	110	0.3	6,810	15.6	11,943	27.4	1,350	3.1	20,608	47.2	9,732	22.3	0	0.0	0	0.0	31,690	72.6	43,633	100
18	KAB. PANGANDARAN	7,168	15.2	256	0.5	2,141	4.5	4,699	10.0	14,264	30.3	874	1.9	30,548	64.8	1,446	3.1	0	0.0	0	0.0	32,868	69.7	47,132	100
19	KOTA BOGOR	22,669	26.9	520	0.6	4,042	4.8	7,137	8.5	1,800	40.8	3,387	4.0	58,226	69.1	20,838	24.7	0	0.0	0	0.0	82,451	97.9	84,251	139
20	KOTA SUKABUMI	4,873	12.1	157	0.4	1,101	2.7	3,590	8.9	9,721	24.2	1,267	3.2	18,828	46.8	10,393	25.8	0	0.0	0	0.0	30,488	75.8	40,209	100
21	KOTA BANDUNG	98,538	36.7	1,099	0.4	11,819	4.4	5,266	2.0	116,722	43.4	5,756	2.1	106,366	39.6	39,859	14.8	0	0.0	0	0.0	151,981	56.6	268,703	100
22	KOTA CIREBON	3,839	15.5	104	0.4	2,449	9.9	1,264	5.1	7,656	30.8	476	1.9	16,661	67.1	36	0.1	0	0.0	0	0.0	17,173	69.2	24,829	100
23	KOTA BEKASI	75,535	20.6	2,441	0.7	9,132	2.5	22,189	6.0	109,297	29.8	18,108	4.9	148,908	40.5	91,004	24.8	0	0.0	0	0.0	258,020	70.2	367,317	100
24	KOTA DEPOK	37,790	15.3	1,342	0.5	6,655	2.7	14,415	5.8	60,202	24.4	9,083	3.7	114,055	46.3	63,110	25.6	0	0.0	0	0.0	186,248	75.6	246,450	100
25	KOTA CIMAHI	18,499	26.1	223	0.3	2,923	4.1	590	0.8	22,235	31.4	1,496	2.1	35,981	50.8	11,081	15.7	0	0.0	0	0.0	48,558	68.6	70,793	100
26	KOTA TASIKMALAYA	10,821	12.0	192	0.2	1,438	1.6	2,786	3.1	15,237	16.9	193	0.2	54,275	60.3	20,292	22.5	0	0.0	0	0.0	74,760	83.1	89,997	100
27	KOTA BANJAR	3,032	12.2	818	3.3	1,369	5.5	369	1.5	5,588	22.6	808	3.3	12,612	50.9	5,757	23.2	0	0.0	0	0.0	19,177	77.4	24,765	100
	JAWA BARAT	823,068	12.4	50,049	0.8	175,262	2.6	444,417	6.7	1,492,796	22.5	128,166	1.9	3,323,689	50.0	1,694,435	25.5	976	0.0	7,044	0.1	5,154,310	77.5	6,647,106	100

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016
Keterangan: MKJP = Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

TABEL 35

**PROPORSI PESERTA KB BARU MENURUT JENIS KONTRASEPSI, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	PESERTA KB BARU																				MKJP + NON MKJP	%MKJP + NON MKJP		
		MKJP										NON MKJP													
		IUD	%	MOP	%	MOW	%	IMPLAN	%	JUMLAH	%	KONDOM	%	SUNTIK	%	PIL	%	OBAT VAGINA	%	LAIN NYA	%	JUMLAH	%		
1	KAB. BOGOR	3,002	2.3	70	0.1	70	0.1	6,494	4.9	9,636	7.3	1,197	0.9	76,468	57.8	44,107	33.4	0	0.0	0	0.0	122,628	92.1	132,218	99
2	KAB. SUKABUMI	2,842	4.1	322	0.5	902	1.3	10,331	14.8	14,397	20.6	1,315	1.9	36,334	51.9	17,927	25.6	0	0.0	1	0.0	55,577	79.4	69,974	100
3	KAB. CIANJUR	290	0.3	4	0.0	8	0.0	376	0.4	11,659	0.7	-	0.0	4,053	4.0	3,264	3.3	0	0.0	414	0.4	88,493	7.7	100,152	8
4	KAB. BANDUNG	8,370	14.2	200	0.3	983	1.7	4,925	8.4	14,478	24.6	637	1.1	37,374	63.4	6,434	10.9	0	0.0	0	0.0	44,445	75.4	58,923	100
5	KAB. GARUT	3,937	17.1	13	0.1	144	0.6	2,709	11.7	6,803	29.5	448	1.9	13,753	59.6	2,064	8.9	0	0.0	0	0.0	16,265	70.5	23,068	100
6	KAB. TASIKMALAYA	30,835	12.2	1,000	0.4	5,335	2.1	17,219	6.8	54,389	21.6	2,331	0.9	153,079	60.7	42,270	16.8	0	0.0	0	0.0	197,680	78.4	252,069	100
7	KAB. CIAMIS	2,572	8.9	10	0.0	492	1.7	2,585	8.9	5,659	19.6	408	1.4	16,646	57.6	6,195	21.4	0	0.0	0	0.0	23,249	80.4	28,908	100
8	KAB. KUNINGAN	2,059	9.0	15	0.1	651	2.9	3,385	14.9	6,110	26.8	347	1.5	14,007	61.5	2,302	10.1	0	0.0	0	0.0	16,656	73.2	22,766	100
9	KAB. CIREBON	2,205	3.1	127	0.2	1,309	1.9	4,235	6.0	7,871	11.2	2,944	4.2	47,825	67.9	11,837	16.8	0	0.0	0	0.0	62,606	88.8	70,482	100
10	KAB. MAJALENGKA	1,328	4.2	151	0.5	573	1.8	2,061	6.5	4,113	12.9	938	2.9	20,279	63.7	6,495	20.4	0	0.0	0	0.0	27,712	87.1	31,825	100
11	KAB. SUMEDANG	2,399	11.9	13	0.1	517	2.6	1,955	9.7	4,884	24.3	180	0.9	12,949	64.3	2,121	10.5	0	0.0	0	0.0	15,250	75.7	20,134	100
12	KAB. INDRAMAYU	1,723	2.4	284	0.4	579	0.8	4,640	6.4	7,226	9.9	2,800	3.8	32,599	44.8	30,123	41.4	0	0.0	0	0.0	65,522	90.1	72,748	100
13	KAB. SUBANG	4,832	7.9	58	0.1	579	0.9	3,400	5.5	8,869	14.5	408	0.7	38,786	63.3	13,200	21.5	0	0.0	0	0.0	52,394	85.5	61,263	100
14	KAB. PURWAKARTA	121	7.1	-	0.0	10	0.6	127	7.5	258	15.2	30	1.8	977	57.5	435	25.6	0	0.0	0	0.0	1,442	84.8	1,700	100
15	KAB. KARAWANG	278	5.4	3	0.1	47	0.9	253	4.9	581	11.2	150	2.9	3,113	60.1	1,333	25.7	0	0.0	0	0.0	4,596	88.8	5,177	100
16	KAB. BEKASI	3,984	3.9	356	0.3	1,073	1.1	7,922	7.8	13,335	13.1	5,937	5.8	44,194	43.4	38,071	37.4	275	0.3	23	0.0	88,500	86.9	101,835	100
17	KAB. BANDUNG BARAT	27,735	10.9	2,361	0.9	7,570	3.0	17,803	7.0	55,469	21.8	3,338	1.3	142,429	56.1	52,634	20.7	0	0.0	0	0.0	198,401	78.2	253,870	100
18	KAB. PANGANDARAN	303	7.9	-	0.0	30	0.8	183	4.8	516	13.5	62	1.6	3,101	81.1	145	3.8	0	0.0	0	0.0	3,308	86.5	3,824	100
19	KOTA BOGOR	2,188	2.8	10	0.0	487	0.6	709	0.9	27,938	4.4	381	0.5	11,226	14.5	2,441	3.1	0	0.0	0	0.0	49,641	18.1	77,579	22
20	KOTA SUKABUMI	1,557	17.3	3	0.0	371	4.1	631	7.0	2,562	28.5	138	1.5	5,558	61.8	736	8.2	0	0.0	0	0.0	6,432	71.5	8,994	100
21	KOTA BANDUNG	14,174	25.3	19	0.0	1,619	2.9	1,161	2.1	16,973	30.3	1,346	2.4	30,912	55.2	6,724	12.0	0	0.0	0	0.0	38,982	69.7	55,955	100
22	KOTA CIREBON	963	14.1	4	0.1	575	8.4	602	8.8	2,144	31.4	61	0.9	4,333	63.5	285	4.2	0	0.0	0	0.0	4,679	68.6	6,823	100
23	KOTA BEKASI	9,860	13.0	82	0.1	1,382	1.8	3,425	4.5	14,749	19.4	4,344	5.7	38,744	51.0	18,177	23.9	0	0.0	0	0.0	61,265	80.6	76,014	100
24	KOTA DEPOK	4,352	11.6	1	0.0	579	1.5	2,195	5.8	7,127	18.9	1,519	4.0	22,451	59.6	6,552	17.4	0	0.0	0	0.0	30,522	81.1	37,649	100
25	KOTA CIMAH	1,438	15.4	4	0.0	150	1.6	359	3.9	1,951	20.9	57	0.6	6,585	70.7	725	7.8	0	0.0	0	0.0	7,367	79.1	9,318	100
26	KOTA TASIKMALAYA	1,653	17.8	1	0.0	37	0.4	1,278	13.7	2,969	31.9	150	1.6	4,475	48.1	1,668	17.9	0	0.0	43	0.5	6,336	68.1	9,305	100
27	KOTA BANJAR	246	11.2	42	1.9	49	2.2	372	17.0	709	32.4	44	2.0	1,144	52.2	293	13.4	0	0.0	0	0.0	1,481	67.6	2,190	100
	JAWA BARAT	135,246	9.4	5,153	0.4	26,121	1.8	101,335	7.0	267,855	18.6	31,510	2.2	823,394	57.1	318,558	22.1	275	0.0	481	0.0	1,174,218	81.4	1,442,073	100

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

Keterangan: MKJP = Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

TABEL 36

**JUMLAH PESERTA KB BARU DAN KB AKTIF MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUS	PESERTA KB BARU		PESERTA KB AKTIF	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	KAB. BOGOR	1,030,865	132,218	12.8	771,966	74.9
2	KAB. SUKABUMI	606,581	60,853	10.0	322,957	53.2
3	KAB. CIANJUR	578,182	100,152	17.3	366,310	63.4
4	KAB. BANDUNG	648,562	4,879	0.8	580,334	89.5
5	KAB. GARUT	503,253	58,275	11.6	617,357	122.7
6	KAB. TASIKMALAYA	323,582	46,967	14.5	251,869	77.8
7	KAB. CIAMIS	243,843	20,389	8.4	179,473	73.6
8	KAB. KUNINGAN	218,344	21,880	10.0	165,967	76.0
9	KAB. CIREBON	439,227	61,569	14.0	347,175	79.0
10	KAB. MAJALENGKA	268,080	30,383	11.3	211,747	79.0
11	KAB. SUMEDANG	214,404	22,997	10.7	177,906	83.0
12	KAB. INDRAMAYU	332,792	75,484	22.7	303,237	91.1
13	KAB. SUBANG	759,728	57,320	7.5	261,889	34.5
14	KAB. PURWAKARTA	191,186	30,394	15.9	149,654	78.3
15	KAB. KARAWANG	491,837	71,982	14.6	314,619	64.0
16	KAB. BEKASI	819,105	107,435	13.1	637,293	77.8
17	KAB. BANDUNG BARAT	293,308	42,672	14.5	26	0.0
18	KAB. PANGANDARAN	78,435	7,759	9.9	60,146	76.7
19	KOTA BOGOR	152,739	77,579	50.8	116,819	76.5
20	KOTA SUKABUMI	53,935	7,787	14.4	40,209	74.6
21	KOTA BANDUNG	367,375	55,937	15.2	268,703	73.1
22	KOTA CIREBON	41,140	2,140	5.2	28,554	69.4
23	KOTA BEKASI	497,089	52,511	10.6	367,317	73.9
24	KOTA DEPOK	323,023	34,745	10.8	246,450	76.3
25	KOTA CIMAHI	90,072	8,699	9.7	70,793	78.6
26	KOTA TASIKMALAYA	113,731	25,538	22.5	91,734	80.7
27	KOTA BANJAR	35,051	3,126	8.9	28,086	80.1
	JAWA BARAT	9,715,469	1,221,670	12.6	6,978,590	71.8

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 37

**BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH LAHIR HIDUP	BAYI BARU LAHIR DITIMBANG		BBLR	
			L + P		L + P	
		L + P	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	KAB. BOGOR	114,976	124,780	108.5	1,381	1.1
2	KAB. SUKABUMI	46,415	41,288	89.0	2,202	5.3
3	KAB. CIANJUR	43,430	42,028	96.8	1,458	3.5
4	KAB. BANDUNG	72,618	62,766	86.4	417	0.7
5	KAB. GARUT	52,804	56,177	100.0	1,307	2.3
6	KAB. TASIKMALAYA	30,417	30,833	101.4	943	3.1
7	KAB. CIAMIS	18,204	18,430	101.2	877	4.8
8	KAB. KUNINGAN	18,324	19,892	108.6	1,141	5.7
9	KAB. CIREBON	37,653	47,115	125.1	1,322	2.8
10	KAB. MAJALENGKA	19,798	20,863	105.4	997	4.8
11	KAB. SUMEDANG	18,543	20,060	108.2	757	3.8
12	KAB. INDRAMAYU	28,080	34,819	124.0	1,322	3.8
13	KAB. SUBANG	25,100	31,088	123.9	788	2.5
14	KAB. PURWAKARTA	18,160	19,755	108.8	522	2.6
15	KAB. KARAWANG	42,291	48,923	115.7	1,281	2.6
16	KAB. BEKASI	71,400	75,978	106.4	531	0.7
17	KAB. BANDUNG BARAT	32,012	29,384	91.8	532	1.8
18	KAB. PANGANDARAN	6,109	6,044	98.9	257	4.3
19	KOTA BOGOR	19,339	19,645	101.6	54	0.3
20	KOTA SUKABUMI	5,941	6,174	103.9	230	3.7
21	KOTA BANDUNG	41,752	45,800	109.7	845	1.8
22	KOTA CIREBON	5,418	5,536	102.2	210	3.8
23	KOTA BEKASI	50,620	46,919	92.7	163	0.3
24	KOTA DEPOK	41,905	41,817	99.8	411	1.0
25	KOTA CIMAHI	10,795	10,341	95.8	237	2.3
26	KOTA TASIKMALAYA	11,906	11,813	99.2	390	3.3
27	KOTA BANJAR	3,063	3,253	106.2	112	3.4
	JAWA BARAT	887,073	921,521	103.9	20,687	2.2

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun Tahun 2016

TABEL 38

**CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH LAHIR HIDUP	KUNJUNGAN NEONATAL 1 KALI (KN1)		KUNJUNGAN NEONATAL 3 KALI (KN LENGKAP)	
			L + P		L + P	
			L + P	JUMLAH	%	JUMLAH
1	KAB. BOGOR	114,976	120,801	105.1	117,740	102.4
2	KAB. SUKABUMI	46,415	42,252	91.0	43,768	94.3
3	KAB. CIANJUR	43,430	42,552	98.0	38,776	89.3
4	KAB. BANDUNG	72,618	62,766	86.4	62,481	86.0
5	KAB. GARUT	52,804	56,490	107.0	55,177	104.5
6	KAB. TASIKMALAYA	30,417	30,833	101.4	30,489	100.2
7	KAB. CIAMIS	18,204	18,327	100.7	18,259	100.3
8	KAB. KUNINGAN	18,324	19,805	108.1	19,548	106.7
9	KAB. CIREBON	37,653	47,016	124.9	46,838	124.4
10	KAB. MAJALENGKA	19,798	20,853	105.3	20,601	104.1
11	KAB. SUMEDANG	18,543	19,968	107.7	19,825	106.9
12	KAB. INDRAMAYU	28,080	35,009	124.7	34,720	123.6
13	KAB. SUBANG	25,100	31,139	124.1	30,253	120.5
14	KAB. PURWAKARTA	18,160	19,673	108.3	19,153	105.5
15	KAB. KARAWANG	42,291	49,025	115.9	4,887	11.6
16	KAB. BEKASI	71,400	7,277	10.2	7,231	10.1
17	KAB. BANDUNG BARAT	32,012	27,273	85.2	24,004	75.0
18	KAB. PANGANDARAN	6,109	6,044	98.9	6,017	98.5
19	KOTA BOGOR	19,339	19,645	101.6	19,561	101.1
20	KOTA SUKABUMI	5,941	6,098	102.6	5,880	99.0
21	KOTA BANDUNG	41,752	40,475	96.9	39,424	94.4
22	KOTA CIREBON	5,418	5,415	99.9	5,314	98.1
23	KOTA BEKASI	50,620	46,919	92.7	45,457	89.8
24	KOTA DEPOK	41,905	41,775	99.7	38,902	92.8
25	KOTA CIMAHI	10,795	10,157	94.1	9,606	89.0
26	KOTA TASIKMALAYA	11,906	11,790	99.0	11,591	97.4
27	KOTA BANJAR	3,063	3,247	106.0	3,141	102.5
JAWA BARAT		887,073	842,624	95.0	778,643	87.8

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 39

**JUMLAH BAYI YANG DIBERI ASI EKSKLUSIF MENURUT JENIS KELAMIN,
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH BAYI 0-6 BULAN	JUMLAH BAYI YANG DIBERI ASI EKSKLUSIF	
			USIA 0-6 BULAN	
			L + P	
			L+P	JUMLAH
1	KAB. BOGOR	113,341	59,613	52.6
2	KAB. SUKABUMI	43,668	27,216	62.3
3	KAB. CIANJUR	41,472	20,550	49.6
4	KAB. BANDUNG	30,631	5,271	17.2
5	KAB. GARUT	38,243	4,648	12.2
6	KAB. TASIKMALAYA	31,030	22,224	71.6
7	KAB. CIAMIS	17,619	7,630	43.3
8	KAB. KUNINGAN	28,727	12,340	43.0
9	KAB. CIREBON	40,808	27,210	66.7
10	KAB. MAJALENGKA	21,851	15,446	70.7
11	KAB. SUMEDANG	14,023	10,607	75.6
12	KAB. INDRAMAYU	39,184	4,526	11.6
13	KAB. SUBANG	16,069	6,141	38.2
14	KAB. PURWAKARTA	12,918	763	5.9
15	KAB. KARAWANG	57,044	17,806	31.2
16	KAB. BEKASI	66,924	25,082	37.5
17	KAB. BANDUNG BARAT	21,766	15,480	71.1
18	KAB. PANGANDARAN	11,445	2,696	23.6
19	KOTA BOGOR	19,638	10,462	53.3
20	KOTA SUKABUMI	5,404	4,597	85.1
21	KOTA BANDUNG	21,983	21,410	97.4
22	KOTA CIREBON	4,471	2,554	57.1
23	KOTA BEKASI	25,900	6,266	24.2
24	KOTA DEPOK	11,250	4,711	41.9
25	KOTA CIMAHI	3,619	2,507	69.3
26	KOTA TASIKMALAYA	11,906	9,431	79.2
27	KOTA BANJAR	3,504	2,781	79.4
	JAWA BARAT	754,438	349,968	46.4

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 40

**CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH BAYI			PELAYANAN KESEHATAN BAYI	
		L	P	L + P	L + P	
					JUMLAH	%
1	KAB. BOGOR	57874	55467	113,341	104,602	92.3
2	KAB. SUKABUMI	22246	21422	43,668	44,621	102.2
3	KAB. CIANJUR	21254	20218	41,472	33,163	80.0
4	KAB. BANDUNG	35945	34376	70,321	68,891	98.0
5	KAB. GARUT	25298	24236	49,534	52,807	106.6
6	KAB. TASIKMALAYA	14382	13763	28,145	33,065	117.5
7	KAB. CIAMIS	8918	8374	17,292	18,817	108.8
8	KAB. KUNINGAN	9416	8660	18,076	20,460	113.2
9	KAB. CIREBON	19471	18532	38,003	48,991	128.9
10	KAB. MAJALENGKA	9870	9390	19,260	21,767	113.0
11	KAB. SUMEDANG	9444	8951	18,395	20,743	112.8
12	KAB. INDRAMAYU	14421	13499	27,920	37,446	134.1
13	KAB. SUBANG	12660	11844	24,504	29,466	120.2
14	KAB. PURWAKARTA	9081	8901	17,982	17,696	98.4
15	KAB. KARAWANG	21933	20583	42,516	55,608	130.8
16	KAB. BEKASI	37430	35747	73,177	74,507	101.8
17	KAB. BANDUNG BARAT	15474	14842	30,316	27,876	92.0
18	KAB. PANGANDARAN	3079	2855	5,934	5,986	100.9
19	KOTA BOGOR	10057	9546	19,603	18,879	96.3
20	KOTA SUKABUMI	3026	2915	5,941	5,584	94.0
21	KOTA BANDUNG	21622	21444	43,066	39,643	92.1
22	KOTA CIREBON	2883	2684	5,567	5,132	92.2
23	KOTA BEKASI	26059	25739	51,798	44,147	85.2
24	KOTA DEPOK	21959	20863	42,822	39,268	91.7
25	KOTA CIMAHI	5578	5396	10,974	9,722	88.6
26	KOTA TASIKMALAYA	6018	5754	11,772	11,653	99.0
27	KOTA BANJAR	1616	1525	3,141	3,231	102.9
	JAWA BARAT	447,014	427,526	874,540	893,771	102.2

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 41

**CAKUPAN DESA/KELURAHAN UCI MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DESA/KELURAHAN	DESA/KEL UCI	% DESA/KEL UCI
1	KAB. BOGOR	434	404	93.1
2	KAB. SUKABUMI	386	375	97.2
3	KAB. CIANJUR	360	317	88.1
4	KAB. BANDUNG	280	210	75.0
5	KAB. GARUT	442	367	83.0
6	KAB. TASIKMALAYA	351	334	95.2
7	KAB. CIAMIS	265	240	90.6
8	KAB. KUNINGAN	376	344	91.5
9	KAB. CIREBON	424	370	87.3
10	KAB. MAJALENGKA	343	327	95.3
11	KAB. SUMEDANG	283	277	97.9
12	KAB. INDRAMAYU	317	293	92.4
13	KAB. SUBANG	253	231	91.3
14	KAB. PURWAKARTA	192	181	94.3
15	KAB. KARAWANG	309	286	92.6
16	KAB. BEKASI	187	181	96.8
17	KAB. BANDUNG BARAT	165	165	100.0
18	KAB. PANGANDARAN	93	87	93.5
19	KOTA BOGOR	68	67	98.5
20	KOTA SUKABUMI	33	33	100.0
21	KOTA BANDUNG	151	151	100.0
22	KOTA CIREBON	22	20	90.9
23	KOTA BEKASI	56	56	100.0
24	KOTA DEPOK	63	63	100.0
25	KOTA CIMAHI	15	13	86.7
26	KOTA TASIKMALAYA	69	67	97.1
27	KOTA BANJAR	25	24	96.0
	JAWA BARAT	5,962	5,483	92.0

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 42

**CAKUPAN IMUNISASI HEPATITIS B < 7 HARI DAN BCG PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KECAMATAN	JUMLAH LAHIR HIDUP	BAYI DIIMUNISASI			
			Hb < 7 hari (HBO)		BCG	
			L + P		L + P	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	KAB. BOGOR	114,976	106,624	92.74	111,270	96.78
2	KAB. SUKABUMI	46,415	44,155	95.13	46,836	100.91
3	KAB. CIANJUR	43,430	42,008	96.73	43,592	98.90
4	KAB. BANDUNG	72,618	20,287	27.94	63,219	87.06
5	KAB. GARUT	52,804	54,435	103.09	54,991	104.14
6	KAB. TASIKMALAYA	30,417	31,669	104.12	32,532	100
7	KAB. CIAMIS	18,204	18,077	99.30	17,570	96.52
8	KAB. KUNINGAN	18,324	18,077	98.65	17,570	95.89
9	KAB. CIREBON	37,653	19,353	51.40	19,588	100
10	KAB. MAJALENGKA	19,798	45,854	231.61	47,984	242.37
11	KAB. SUMEDANG	18,543	19,812	106.84	20,359	109.79
12	KAB. INDRAMAYU	28,080	23,231	82.73	19,716	70.21
13	KAB. SUBANG	25,100	28,655	114.16	29,316	100
14	KAB. PURWAKARTA	18,160	19,001	104.63	18,897	104.06
15	KAB. KARAWANG	42,291	49,509	117.07	52,604	100
16	KAB. BEKASI	71,400	70,531	98.78	72,714	101.84
17	KAB. BANDUNG BARAT	32,012	27,012	84.38	29,920	93.46
18	KAB. PANGANDARAN	6,109	4,977	81.47	5,749	94.11
19	KOTA BOGOR	19,339	19,050	98.51	19,527	100.97
20	KOTA SUKABUMI	5,941	6,292	105.91	6,092	102.54
21	KOTA BANDUNG	41,752	42,085	100.80	43,621	104.48
22	KOTA CIREBON	5,418	5,093	94.00	5,130	94.68
23	KOTA BEKASI	50,620	45,348	89.59	50,988	100
24	KOTA DEPOK	41,905	39,764	94.89	41,712	100
25	KOTA CIMAH	10,795	10,061	93.20	10,483	100
26	KOTA TASIKMALAYA	11,906	11,170	93.82	11,114	93.35
27	KOTA BANJAR	3,063	3,161	103.20	3,167	103.40
	JAWA BARAT	887,073	825291	93.04	896261	101.04

Sumber: Bidang P2PL (Imunisasi)

TABEL 43

**CAKUPAN IMUNISASI DPT-HB/DPT-HB-Hib, POLIO, CAMPAK, DAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI
MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KECAMATAN	JUMLAH BAYI (SURVIVING INFANT)			DPT-HB3/DPT-HB-Hib3		POLIO 4 ^a		CAMPAK		IMUNISASI DASAR LENGKAP	
		L	P	L+P	L + P		L + P		L + P		L + P	
					JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	KAB. BOGOR	57,874	55,467	113,341	107,353	101	107,245	95	107,911	95	102,717	90.63
2	KAB. SUKABUMI	22,246	21,422	43,668	46,090	106	44,942	103	45,265	104	34,719	79.51
3	KAB. CIANJUR	21,254	20,218	41,472	41,598	100	41,759	101	41,597	100	38,737	93.41
4	KAB. BANDUNG	35,945	34,376	70,321	61,251	87	61,539	88	83,171	118	63,219	89.90
5	KAB. GARUT	25,298	24,236	49,534	53,529	108	53,373	108	52,807	107	48,149	97.20
6	KAB. TASIKMALAYA	14,382	13,763	28,145	32,057	114	31,522	112	31,825	113	30,867	109.67
7	KAB. CIAMIS	8,918	8,374	17,292	17,407	101	17,122	99	16,998	98	16,853	97.46
8	KAB. KUNINGAN	9,416	8,660	18,076	19,909	110	19,739	109	19,760	109	19,944	110.33
9	KAB. CIREBON	19,471	18,532	38,003	48,269	127	47,865	126	47,972	126	46,536	122.45
10	KAB. MAJALENGKA	9,870	9,390	19,260	20,256	105	20,173	105	20,129	105	19,379	100.62
11	KAB. SUMEDANG	9,444	8,951	18,395	19,491	106	19,352	105	20,316	110	19,865	107.99
12	KAB. INDRAMAYU	14,421	13,499	27,920	33,062	118	32,843	118	32,424	116	18,475	66.17
13	KAB. SUBANG	12,660	11,844	24,504	31,695	129	31,273	128	28,805	118	21,141	86.28
14	KAB. PURWAKARTA	9,081	8,901	17,982	18,134	101	17,692	98	18,178	101	16,547	92.02
15	KAB. KARAWANG	21,933	20,583	42,516	52,463	123	50,089	118	49,603	117	46,493	109.35
16	KAB. BEKASI	37,430	35,747	73,177	70,250	96	70,150	96	69,796	95	66,928	91.46
17	KAB. BANDUNG BARAT	15,474	14,842	30,316	30,624	101	30,624	101	29,664	98	29,664	97.85
18	KAB. PANGANDARAN	3,079	2,855	5,934	5,910	100	5,769	97	5,820	98	5,440	91.68
19	KOTA BOGOR	10,057	9,546	19,603	18,804	96	18,976	97	18,405	94	17,083	87.14
20	KOTA SUKABUMI	3,026	2,915	5,941	5,887	99	5,850	98	5,677	96	4,827	81.25
21	KOTA BANDUNG	21,622	21,444	43,066	42,686	99	42,970	100	43,431	101	39,839	92.51
22	KOTA CIREBON	2,883	2,684	5,567	4,836	87	4,841	87	4,687	84	4,453	79.99
23	KOTA BEKASI	26,059	25,739	51,798	48,992	95	48,384	93	48,749	94	41,067	79.28
24	KOTA DEPOK	21,959	20,863	42,822	40,375	94	40,226	94	40,351	94	40,274	94.05
25	KOTA CIMAHI	5,578	5,396	10,974	9,986	91	10,117	92	9,933	91	9,565	87.16
26	KOTA TASIKMALAYA	6,018	5,754	11,772	10,993	93	10,927	93	11,065	94	10,705	90.94
27	KOTA BANJAR	1,616	1,525	3,141	3,351	107	3,375	107	3,367	107	3,381	107.64
JAWA BARAT		447,014	427,526	874,540	895,258	102.4	888,737	101.6	907,706	103.79	816,867	93.4

Sumber: Bidang P2PL (Imunisasi)

Keterangan: a = khusus provinsi yang menerapkan 3 dosis polio maka diisi dengan polio 3

TABEL 44

**CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA BAYI, ANAK BALITA, DAN IBU NIFAS MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	bayi 6 - 11 bulan			ANAK BALITA (12-59 BULAN)			BALITA (6-59 BULAN)		
		JUMLAH BAYI L+P	MENDAPAT VIT A		JUMLAH L+P	MENDAPAT VIT A		JUMLAH L+P	MENDAPAT VIT A	
			L + P			L + P			L + P	
			JUMLAH	%		JUMLAH	%		JUMLAH	%
1	KAB. BOGOR	113,341	121,837	107.50	453,301	378,681	83.54	566,642	500,518	88.33
2	KAB. SUKABUMI	43,668	48	0.11	185,081	168,615	91.10	228,749	168,663	73.73
3	KAB. CIANJUR	41,472	44,449	107.18	172,568	159,011	92.14	214,040	203,460	95.06
4	KAB. BANDUNG	70,321	33,471	47.60	287,564	239,331	83.23	357,885	272,802	76.23
5	KAB. GARUT	49,534	56,363	113.79	210,700	179,414	85.15	260,234	235,777	90.60
6	KAB. TASIKMALAYA	28,145	35,349	125.60	121,759	10,746	8.83	149,904	46,095	30.75
7	KAB. CIAMIS	17,292	18,557	107.32	72,425	66,691	92.08	89,717	85,248	95.02
8	KAB. KUNINGAN	18,076	20,454	113.16	72,232	69,529	96.26	90,308	89,983	99.64
9	KAB. CIREBON	38,003	43,546	114.59	147,562	138,857	94.10	185,565	182,403	98.30
10	KAB. MAJALENGKA	19,260	21,700	112.67	78,310	76,801	98.07	97,570	98,501	100.95
11	KAB. SUMEDANG	18,395	19,408	105.51	72,994	67,018	91.81	91,389	86,426	94.57
12	KAB. INDRAMAYU	27,920	16,474	59.00	110,469	116,205	105.19	138,389	132,679	95.87
13	KAB. SUBANG	24,504	27,965	114.12	99,197	92,281	93.03	123,701	120,246	97.21
14	KAB. PURWAKARTA	17,982	22,216	123.55	71,519	66,269	92.66	89,501	88,485	98.86
15	KAB. KARAWANG	42,516	35,819	84.25	165,909	147,764	89.06	208,425	183,583	88.08
16	KAB. BEKASI	73,177	60,096	82.12	278,708	200,223	71.84	351,885	260,319	73.98
17	KAB. BANDUNG BARAT	30,316	31,304	103.26	127,451	111,133	87.20	157,767	142,437	90.28
18	KAB. PANGANDARAN	5,934	2,816	47.46	24,173	20,692	85.60	30,107	23,508	78.08
19	KOTA BOGOR	19,603	18,517	94.46	75,708	73,184	96.67	95,311	91,701	96.21
20	KOTA SUKABUMI	5,941	6,062	102.04	23,340	20,621	88.35	29,281	26,683	91.13
21	KOTA BANDUNG	43,066	32,027	74.37	162,700	111,106	68.29	205,766	143,133	69.56
22	KOTA CIREBON	5,567	5,538	99.48	21,137	18,061	85.45	26,704	23,599	88.37
23	KOTA BEKASI	51,798	41,130	79.40	197,676	133,058	67.31	249,474	174,188	69.82
24	KOTA DEPOK	42,822	33,435	78.08	163,702	104,809	64.02	206,524	138,244	66.94
25	KOTA CIMAHI	10,974	8,674	79.04	42,226	31,249	74.00	53,200	39,923	75.04
26	KOTA TASIKMALAYA	11,772	10,430	88.60	46,903	42,208	89.99	58,675	52,638	89.71
27	KOTA BANJAR	3,141	1,671	53.20	11,953	10,962	91.71	15,094	12,633	83.70
	JAWA BARAT	874,540	769,356	87.97	3,497,267	2,854,519	81.62	4,371,807	3,623,875	82.89

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 45

**JUMLAH ANAK 0-23 BULAN DITIMBANG MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	ANAK 0-23 BULAN (BADUTA)														
		JUMLAH BADUTA DILAPORKAN (S)			DITIMBANG						BGM					
					JUMLAH (D)			% (D/S)			L		P		L+P	
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	KAB. BOGOR			0			-			#DIV/0!		0.0		0.0		0.0
2	KAB. SUKABUMI	45,125	43,673	88,798	44,065	42,031	86,096	97.7	96	97.0	1,221	2.8	1,155	2.7	2,376	2.8
3	KAB. CIANJUR	45,500	42,988	88,488	39,819	38,913	78,732	87.5	89	89.0	694	1.7	680	1.7	1,374	1.7
4	KAB. BANDUNG	79,103	77,537	156,640	63,959	62,692	126,651	80.9	81	80.9	388	0.6	380	0.6	768	0.6
5	KAB. GARUT	54,009	50,787	104,796	32,796	31,824	64,620	60.7	63	61.7	110	0.3	123	0.4	233	0.4
6	KAB. TASIKMALAYA			-			-			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	-	#DIV/0!
7	KAB. CIAMIS	18,117	1,773	19,890	16,514	15,862	32,376	91.2	91	162.8	184	1.1	423	2.7	607	1.9
8	KAB. KUNINGAN	19,557	19,000	38,557	17,847	17,349	35,196	91.3	91	91.3	541	3.0	518	3.0	1,059	3.0
9	KAB. CIREBON			-			-			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	1,155	#DIV/0!
10	KAB. MAJALENGA	19,873	18,872	38,745	20,407	19,412	39,819	102.7	103	102.8	198	1.0	176	0.9	374	0.9
11	KAB. SUMEDANG	18,702	17,944	36,646	15,980	15,397	31,377	85.5	86	85.6	103	0.6	92	0.6	195	0.6
12	KAB. INDRAMAYU			-			-			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	1,031	#DIV/0!
13	KAB. SUBANG	27,964	28,276	56,240	25,645	25,987	51,632	91.7	92	91.8	476	1.9	444	1.7	920	1.8
14	KAB. PURWAKARTA	18,655	18,598	37,253	16,347	16,359	32,706	87.6	88	87.8	298	1.8	322	2.0	620	1.9
15	KAB. KARAWANG	-	-	-	-	-	-	0	0	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
16	KAB. BEKASI	49,045	73,006	122,051	40,739	61,110	101,849	83.1	84	83.4	632	1.6	907	1.5	1,539	1.5
17	KAB. BANDUNG BARAT	31,488	30,866	62,354	25,736	26,091	51,827	81.7	85	83.1	471	1.8	414	1.6	885	1.7
18	KAB. PANGANDARAN	7,996	10,025	18,021	5,807	5,834	11,641	72.6	58	64.6	43	0.7	45	0.8	88	0.8
19	KOTA BOGOR			-			-			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	475	#DIV/0!
20	KOTA SUKABUMI	5,719	5,584	11,303	5,213	5,029	10,242	91.2	90	90.6	30	0.6	38	0.8	68	0.7
21	KOTA BANDUNG			-			-			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	995	#DIV/0!
22	KOTA CIREBON	5,137	4,757	9,894	4,650	4,288	8,938	90.5	90	90.3	6	0.1	50	1.2	56	0.6
23	KOTA BEKASI	52,116	51,543	103,659	32,503	32,439	64,942	62.4	63	62.6	298	0.9	414	1.3	712	1.1
24	KOTA DEPOK	43,509	41,116	84,625	26,290	25,745	52,035	60.4	63	61.5	774	2.9	750	2.9	1,524	2.9
25	KOTA CIMAH	7,461	8,240	15,701	5,942	6,419	12,361	79.6	78	78.7	35	0.6	41	0.6	76	0.6
26	KOTA TASIKMALAYA	10,539	9,842	20,381	9,159	8,578	17,737	86.9	87	87.0	207	2.3	151	1.8	358	2.0
27	KOTA BANJAR			-			-					#DIV/0!		#DIV/0!	18	#DIV/0!
	JAWA BARAT	559,615	554,427	1,114,042	449,418	461,359	910,777	80.3	83	81.8	6,709	1.5	7,123	1.5	17,506	1.9

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 46

**CAKUPAN PELAYANAN ANAK BALITA MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	Anak Balita (1-4 Tahun)		
		JUMLAH L + P	MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN (MINIMAL 8 KALI)	
			JUMLAH	%
1	KAB. BOGOR	453,301	371,480	81.9
2	KAB. SUKABUMI	185,081	149,387	80.7
3	KAB. CIANJUR	172,568	138,037	80.0
4	KAB. BANDUNG	287,564	278,069	96.7
5	KAB. GARUT	210,700	98,889	46.9
6	KAB. TASIKMALAYA	121,759	134,765	110.7
7	KAB. CIAMIS	72,425	18,817	26.0
8	KAB. KUNINGAN	72,232	60,486	83.7
9	KAB. CIREBON	147,562	35,049	23.8
10	KAB. MAJALENGKA	78,310	78,544	100.3
11	KAB. SUMEDANG	72,994	65,023	89.1
12	KAB. INDRAMAYU	110,469	122,451	110.8
13	KAB. SUBANG	99,197	122,967	124.0
14	KAB. PURWAKARTA	71,519	44,264	61.9
15	KAB. KARAWANG	165,909	126,224	76.1
16	KAB. BEKASI	278,708	183,589	65.9
17	KAB. BANDUNG BARAT	127,451	66,699	52.3
18	KAB. PANGANDARAN	24,173	20,949	86.7
19	KOTA BOGOR	75,708	65,042	85.9
20	KOTA SUKABUMI	23,340	18,439	79.0
21	KOTA BANDUNG	162,700	146,430	90.0
22	KOTA CIREBON	21,137	18,616	88.1
23	KOTA BEKASI	197,676	92,248	46.7
24	KOTA DEPOK	163,702	116,410	71.1
25	KOTA CIMAHI	42,226	17,756	42.0
26	KOTA TASIKMALAYA	46,903	52,506	111.9
27	KOTA BANJAR	11,953	11,404	95.4
	JAWA BARAT	3,497,267	2,654,540	75.9

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 47

**JUMLAH BALITA DITIMBANG MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	BALITA				
		JUMLAH BALITA DILAPORKAN (S)	DITIMBANG		BGM	
			JUMLAH (D)	% (D/S)	L+P	
		L+P	L+P	L+P	JUMLAH	%
1	KAB. BOGOR	566,642	369,751	65.3	7,806	2.5
2	KAB. SUKABUMI	228,749	191,124	83.6	4,851	2.5
3	KAB. CIANJUR	214,040	169,132	79.0	2,383	1.4
4	KAB. BANDUNG	357,885	286,442	80.0	10,102	3.5
5	KAB. GARUT	260,234	179,940	69.1	2,423	1.3
6	KAB. TASIKMALAYA	149,904	111,279	74.2	3,679	3.3
7	KAB. CIAMIS	89,717	74,148	82.6	1,089	1.5
8	KAB. KUNINGAN	90,308	80,884	89.6	1,016	1.3
9	KAB. CIREBON	185,565	163,799	88.3	1,835	1.1
10	KAB. MAJALENGKA	97,570	92,830	95.1	809	0.9
11	KAB. SUMEDANG	91,389	76,455	83.7	484	0.6
12	KAB. INDRAMAYU	138,389	110,433	79.8	10,106	9.2
13	KAB. SUBANG	123,701	107,924	87.2	2,972	2.8
14	KAB. PURWAKARTA	89,501	74,523	83.3	1,437	1.9
15	KAB. KARAWANG	208,425	150,716	72.3	5,521	3.7
16	KAB. BEKASI	351,885	184,449	52.4	2,841	1.5
17	KAB. BANDUNG BARAT	157,767	110,192	69.8	1,496	1.4
18	KAB. PANGANDARAN	30,107	22,589	75.0	377	1.7
19	KOTA BOGOR	95,311	63,181	66.3	3,849	6.1
20	KOTA SUKABUMI	29,281	22,023	75.2	2,259	10.3
21	KOTA BANDUNG	205,766	117,767	57.2	924	0.8
22	KOTA CIREBON	26,704	20,494	76.7	224	1.1
23	KOTA BEKASI	249,474	148,695	59.6	1,322	0.9
24	KOTA DEPOK	206,524	110,466	53.5	2,586	2.3
25	KOTA CIMAH	53,200	29,345	55.2	2,529	8.6
26	KOTA TASIKMALAYA	58,675	44,467	75.8	803	1.8
27	KOTA BANJAR	15,094	12,530	83.0	168	1.3
	JAWA BARAT	4,371,807	3,125,577	71.5	75,891	2.4

Sumber: Program Gizi Jabar 2016

TABEL 48

**CAKUPAN KASUS BALITA GIZI BURUK YANG MENDAPAT PERAWATAN MENURUT
JENIS KELAMIN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DITEMUKAN	MENDAPAT PERAWATAN	
			L + P	
			JUMLAH	%
1	KAB. BOGOR	98	98	100
2	KAB. SUKABUMI	186	89	48
3	KAB. CIANJUR	323	323	100
4	KAB. BANDUNG	107	107	100
5	KAB. GARUT	143	143	100
6	KAB. TASIKMALAYA	63	63	100
7	KAB. CIAMIS	120	120	100
8	KAB. KUNINGAN	53	53	100
9	KAB. CIREBON	225	225	100
10	KAB. MAJALENGKA	18	18	100
11	KAB. SUMEDANG	44	44	100
12	KAB. INDRAMAYU	26	26	100
13	KAB. SUBANG	53	53	100
14	KAB. PURWAKARTA	100	100	100
15	KAB. KARAWANG	281	270	96
16	KAB. BEKASI	299	299	100
17	KAB. BANDUNG BARAT	37	37	100
18	KAB. PANGANDARAN	88	88	100
19	KOTA BOGOR	26	26	100
20	KOTA SUKABUMI	29	29	100
21	KOTA BANDUNG	374	346	93
22	KOTA CIREBON	43	43	100
23	KOTA BEKASI	142	142	100
24	KOTA DEPOK	85	85	100
25	KOTA CIMAH	42	42	100
26	KOTA TASIKMALAYA	83	83	100
27	KOTA BANJAR	1	1	100
JAWA BARAT		3,089	2,953	95.6

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 49

**CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN (PENJARINGAN) SISWA SD & SETINGKAT MENURUT
JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	MURID KELAS 1 SD DAN SETINGKAT			SD DAN SETINGKAT		
		JUMLAH	MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN		JUMLAH	MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN (PENJARINGAN)	%
			L + P	JUMLAH			
1	KAB. BOGOR	117082	106545	91.0	2385	2113	89
2	KAB. SUKABUMI	71330	54304	76.1	1533	1533	100
3	KAB. CIANJUR	42465	18683	44.0	1246	1182	95
4	KAB. BANDUNG	38604	32158	83.3	1588	1588	100
5	KAB. GARUT	35397	27046	76.4	1870	1001	54
6	KAB. TASIKMALAYA	30167	29701	98.5	1272	1272	100
7	KAB. CIAMIS	109342	63454	58.0	918	830	90
8	KAB. KUNINGAN	19087	19082	100.0	736	736	100
9	KAB. CIREBON	38198	35049	91.8	1053	1053	100
10	KAB. MAJALENGKA	26053	19009	73.0	751	751	100
11	KAB. SUMEDANG	17305	17305	100.0	659	659	100
12	KAB. INDRAMAYU	30238	28486	94.2	1018	1018	100
13	KAB. SUBANG	25784	23879	92.6	27544	7337	27
14	KAB. PURWAKARTA	27011	17286	64.0	449	449	100
15	KAB. KARAWANG	32530	32273	99.2	750	750	100
16	KAB. BEKASI	63021	57002	90.4	996	966	97
17	KAB. BANDUNG BARAT	35868	28317	78.9	886	834	94
18	KAB. PANGANDARAN	6600	6600	100.0	354	354	100
19	KOTA BOGOR	19624	18830	96.0	320	320	100
20	KOTA SUKABUMI	6388	6178	96.7	149	149	100
21	KOTA BANDUNG	41685	41685	100.0	865	865	100
22	KOTA CIREBON	7068	6793	96.1	183	183	100
23	KOTA BEKASI	49121	45096	91.8	789	789	100
24	KOTA DEPOK	35907	34007	94.7	572	572	100
25	KOTA CIMAHI	9415	9415	100.0	145	145	100
26	KOTA TASIKMALAYA	12236	12090	98.8	286	286	100
27	KOTA BANJAR	3327	3169	95.3	110	110	100
JAWA BARAT		950,853	793,442	83.4	49,427	27,845	56.34
CAKUPAN PENJARINGAN KESEHATAN SISWA SD & SETINGKAT				83.4			

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 50

**PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT		
		TUMPATAN GIGI TETAP	PENCABUTAN GIGI TETAP	RASIO TUMPATAN/ PENCABUTAN
1	KAB. BOGOR	19,834	24,812	0.8
2	KAB. SUKABUMI	3,888	6,825	0.6
3	KAB. CIANJUR	416	559	0.7
4	KAB. BANDUNG	15,283	15,966	1.0
5	KAB. GARUT	1,707	2,092	0.8
6	KAB. TASIKMALAYA	1,545	450	3.4
7	KAB. CIAMIS	1,718	4,124	0.4
8	KAB. KUNINGAN	2,561	4,364	0.6
9	KAB. CIREBON	10,335	10,572	1.0
10	KAB. MAJALENGKA	3,396	7,756	0.4
11	KAB. SUMEDANG	1,975	7,826	0.3
12	KAB. INDRAMAYU	3,959	7,374	0.5
13	KAB. SUBANG	18,614	6,547	2.8
14	KAB. PURWAKARTA	2,639	3,054	0.9
15	KAB. KARAWANG	2,000	4,249	0.5
16	KAB. BEKASI	8,495	9,516	0.9
17	KAB. BANDUNG BARAT	3,222	5,047	0.6
18	KAB. PANGANDARAN	268	1,485	0.2
19	KOTA BOGOR	19,669	7,480	2.6
20	KOTA SUKABUMI	2,820	3,605	0.8
21	KOTA BANDUNG	23,438	17,561	1.3
22	KOTA CIREBON	10,473	5,541	1.9
23	KOTA BEKASI	22,330	10,763	2.1
24	KOTA DEPOK	40,518	8,675	4.7
25	KOTA CIMAHI	6,156	3,452	1.8
26	KOTA TASIKMALAYA	3,866	4,874	0.8
27	KOTA BANJAR	36	681	0.1
	JAWA BARAT	231,161	185,250	1.25

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota tahun 2016

TABEL 51

**PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT PADA ANAK SD DAN SETINGKAT MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	UPAYA KESEHATAN GIGI SEKOLAH													
		JUMLAH SD/MI	JUMLAH SD/MI DGN SIKAT GIGI MASSAL	%	JUMLAH SD/MI MENDAPAT YAN. GIGI	%	JUMLAH MURID SD/MI			MURID SD/MI DIPERIKSA		PERLU PERAWATAN		MENDAPAT PERAWATAN	
							L + P	L + P	%	L + P	L + P	%			
1	KAB. BOGOR	2,398	199	8	680	28	118,167	9,838	8	1,566	173	11.0			
2	KAB. SUKABUMI	1,541	785	51	1,167	76	165,216	70,589	43	32,021	13,241	41.4			
3	KAB. CIANJUR	1,474	61	4	430	29	-	-	-	-	-	0.0			
4	KAB. BANDUNG	1,618	1,588	98	363	22	-	-	-	-	-	0.0			
5	KAB. GARUT	1,880	1,575	84	56	3	53,252	44,206	83	26,609	2,389	35.5			
6	KAB. TASIKMALAYA	1,302	1,078	83	1,078	83	167,305	40,301	24	17,802	7,933	44.6			
7	KAB. CIAMIS	966	739	77	830	86	109,342	63,454	58	34,181	7,985	23.4			
8	KAB. KUNINGAN	735	392	53	604	82	102,221	45,741	45	23,834	8,049	33.8			
9	KAB. CIREBON	1,075	725	67	888	83	101,800	101,782	100	36,275	12,979	35.8			
10	KAB. MAJALENGKA	742	194	26	712	96	58,895	50,218	85	17,790	9,250	52.0			
11	KAB. SUMEDANG	670	373	56	364	54	116,756	28,716	25	12,114	5,625	39.1			
12	KAB. INDRAMAYU	1,033	497	48	497	48	101,559	20,684	20	18,035	10,144	56.2			
13	KAB. SUBANG	979	423	43	437	45	75,606	18,583	25	14,736	8,321	56.5			
14	KAB. PURWAKARTA	471	389	83	407	86	92,203	48,320	52	16,579	9,365	56.5			
15	KAB. KARAWANG	1,029	1,063	103	1,063	103	225,984	16,596	7	16,596	10,609	63.9			
16	KAB. BEKASI	1,115	206	18	581	52	127,901	60,771	48	27,388	13,665	49.9			
17	KAB. BANDUNG BARAT	901	156	17	237	26	147,347	28,876	20	13,394	5,695	42.5			
18	KAB. PANGANDARAN	295	285	97	250	85	21,418	6,771	32	700	43	6.1			
19	KOTA BOGOR	333	278	83	316	95	96,589	63,896	66	29,819	15,390	51.6			
20	KOTA SUKABUMI	144	3	2	58	40	6,399	6,192	97	-	-	0			
21	KOTA BANDUNG	889	716	81	650	73	173,583	58,028	33	26,970	11,772	19.8			
22	KOTA CIREBON	199	64	32	183	92	30,382	6,793	22	3,795	3,795	100			
23	KOTA BEKASI	832	627	75	710	85	251,374	164,270	65	74,959	13,968	18.6			
24	KOTA DEPOK	575	428	74	550	96	199,853	42,947	21	23,634	17,557	74.3			
25	KOTA CIMAHI	150	79	53	258	172	117,581	25,214	21	7,026	1,642	23.4			
26	KOTA TASIKMALAYA	284	235	83	235	83	60,928	24,929	41	15,535	6,151	39.6			
27	KOTA BANJAR	108	108	100	108	100	19,182	15,536	81	3,968	2,407	60.7			
	JAWA BARAT	23,738	13,266	55.9	13,712	57.8	2,740,843	1,063,251	38.8	495,326	198,148	40.0			

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 52

**CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN USIA LANJUT MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	USILA (60TAHUN+)								
		JUMLAH			MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN					
		L	P	L+P	L	%	P	%	L+P	%
1	KAB. BOGOR	165,890	168,086	333,976	90,273	54	97,938	58	188,211	56
2	KAB. SUKABUMI	113,395	113,075	226,470	50	0	67,675	60	117,627	52
3	KAB. CIANJUR	99,659	102,604	202,263	5,693	6	45,861	45	51,554	25
4	KAB. BANDUNG	127,497	134,078	261,575	32,341	25	37,178	28	69,519	27
5	KAB. GARUT	115,101	123,067	238,168	2,084	2	1,966	2	4,050	2
6	KAB. TASIKMALAYA	100,212	107,330	207,542	22,990	23	29,693	28	52,683	25
7	KAB. CIAMIS	81,610	87,704	169,314	1,741	2	4,061	5	6,384	4
8	KAB. KUNINGAN	63,942	70,955	134,897	51,075	80	98,169	138	149,244	111
9	KAB. CIREBON	85,945	101,866	187,811	13,604	16	22,742	22	36,347	19
10	KAB. MAJALENGA	71,533	79,790	151,323	48,087	67	58,131	73	106,218	70
11	KAB. SUMEDANG	72,142	76,522	148,664	4,395	6	8,083	11	12,478	8
12	KAB. INDRAMAYU	81,145	91,981	173,126	15,344	19	31,133	34	46,477	27
13	KAB. SUBANG	88,842	94,913	183,755	15,268	17	15,191	16	30,459	17
14	KAB. PURWAKARTA	37,816	39,415	77,231	18,558	49	47,681	121	66,239	86
15	KAB. KARAWANG	92,734	96,968	189,702	33,914	37	43,020	44	76,934	41
16	KAB. BEKASI	82,264	87,323	169,587	79,973	97	86,832	99	166,805	98
17	KAB. BANDUNG BARAT	70,830	74,993	145,823	6,282	9	9,546	13	15,828	11
18	KAB. PANGANDARAN	26,236	27,379	53,615	3,887	15	7,351	27	11,238	21
19	KOTA BOGOR	36,635	39,138	75,773	4,975	14	8,505	22	13,480	18
20	KOTA SUKABUMI	13,460	15,575	29,035	897	7	2,186	14	3,082	11
21	KOTA BANDUNG	92,673	102,302	194,975	33,732	36	21,525	21	65,255	33
22	KOTA CIREBON	12,076	14,210	26,286	6,694	55	4,872	34	11,566	44
23	KOTA BEKASI	68,632	64,325	132,957	24,251	35	37,408	58	61,659	46
24	KOTA DEPOK	63,081	63,811	126,892	5,128	8	9,060	14	14,188	11
25	KOTA CIMAH	19,182	21,125	40,307	3,930	20	7,048	33	10,978	27
26	KOTA TASIKMALAYA	28,157	31,068	59,225	3,798	13	5,086	16	8,884	15
27	KOTA BANJAR	10,233	11,301	21,534	893	9	1,588	14	2,481	12
	JAWA BARAT	1,824,987	1,949,845	3,961,826	529,857	29.03	809,529	41.52	1,399,868	35.33

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 53

**CAKUPAN JAMINAN KESEHATAN PENDUDUK KABUPATEN/KOTA MENURUT JENIS JAMINAN DAN JENIS KELAMIN
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL					Jamkesda	Asuransi Swasta	Asuransi Perusahaan	TOTAL
		Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN	PBI APBD	Pekerja penerima upah (PPU)	Pekerja bukan penerima upah (PBPU)/mandiri	Bukan pekerja (BP)				
		L + P	L + P	L + P	L + P	L + P				
1	KAB. BOGOR	1,111,615	391,223	629,423	634,545	54,252			2,821,058	
2	KAB. SUKABUMI	1,224,331	45,574	307,389	176,456	33,408	132,992		1,920,150	
3	KAB. CIANJUR	1,106,514	7,570	117,935	84,700	37,189			1,353,908	
4	KAB. BANDUNG	1,217,269	109,359	428,498	237,177	76,361			2,068,609	
5	KAB. GARUT	1,203,653	9,329	132,804	124,841	51,360			1,521,987	
6	KAB. TASIKMALAYA	738,124	13,519	62,243	66,193	32,612	179,631		1,092,322	
7	KAB. CIAMIS	459,113	12,205	84,006	33,250	33,964			622,538	
8	KAB. KUNINGAN	532,525	7,246	71,914	106,915	28,450	29,885		776,935	
9	KAB. CIREBON	1,180,753	61,631	158,370	212,003	28,301			1,641,058	
10	KAB. MAJALENGKA	492,894		88,806	88,139	22,155			691,994	
11	KAB. SUMEDANG	382,522	21,268	170,913	78,982	35,288	88,814		777,787	
12	KAB. INDRAMAYU	867,932	23,148	72,310	92,542	17,808			1,073,740	
13	KAB. SUBANG	631,871	24,501	182,584	92,472	28,687			960,115	
14	KAB. PURWAKARTA	279,213	5,460	235,396	41,311	16,848	452,058		1,030,286	
15	KAB. KARAWANG	896,795	64,925	484,872	213,181	22,146	489,861		2,171,780	
16	KAB. BEKASI	571,845	132,779	903,967	302,939	13,172			1,924,702	
17	KAB. BANDUNG BARAT	543,583	69,310	147,346	112,322	19,625	152,298		1,044,484	
18	KAB. PANGANDARAN	135,165	21,095	21,384	7,627	9,575			194,846	
19	KOTA BOGOR	257,042	89,849	166,644	164,989	30,380	4,519	58,364	803,903	
20	KOTA SUKABUMI	137,786	17,518	50,554	34,039	11,609			251,506	
21	KOTA BANDUNG	382,063	273,787	99,976	317,913	110,755	613,459		1,797,953	
22	KOTA CIREBON	109,245	41,538	84,630	26,481	14,276			276,170	
23	KOTA BEKASI	399,611	12,821	385,164	457,216	46,260			1,301,072	
24	KOTA DEPOK	284,131	146,072	222,817	354,821	46,060			1,053,901	
25	KOTA CIMAH	127,589	8,188	162,290	89,675	23,407	4,954		416,103	
26	KOTA TASIKMALAYA	256,137	57,493	90,374	40,367	15,490	86,239		546,100	
27	KOTA BANJAR	54,843	3,748	21,880	13,042	4,187	36,475		134,175	
	JUMLAH JAWA BARAT	15,584,164	1,671,156	5,584,489	4,204,138	863,625	2,271,185	0	0	30,269,182
	PERSENTASE (%)			18	14	3	8	0	0	100

Sumber : Bidang Regulasi dan Kebijakan Kesehatan

TABEL 54

**JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN , RAWAT INAP, DAN KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA DI PUSKESMAS,
RUMAH SAKIT, DAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	RAWAT JALAN	RAWAT INAP	JUMLAH
		L+P	L+P	L+P
1	KAB. BOGOR	5,474,827	203,635	6,774
2	KAB. SUKABUMI			30,066
3	KAB. CIANJUR	715,825	4,050	2,154
4	KAB. BANDUNG	1,929,108	54,440	20,754
5	KAB. GARUT	58,780	13,570	1,800
6	KAB. TASIKMALAYA			
7	KAB. CIAMIS	572,366	6,987	3,257
8	KAB. KUNINGAN	1,885,609	9,399	40,168
9	KAB. CIREBON	2,988,062	110,937	143,559
10	KAB. MAJALENGKA	1,154,040	33,838	45,247
11	KAB. SUMEDANG	1,014,552	9,245	23,269
12	KAB. INDRAMAYU	1,242,684	10,105	1,327
13	KAB. SUBANG	568,988	26,789	8,582
14	KAB. PURWAKARTA	151,037	2,085	937
15	KAB. KARAWANG	2,457,522	149,910	26,311
16	KAB. BEKASI	2,463,823	154,155	23,423
17	KAB. BANDUNG BARAT	196,277	17,283	328
18	KAB. PANGANDARAN	118,766	5,546	477
19	KOTA BOGOR	2,630,692	118,238	43,301
20	KOTA SUKABUMI	269,175	64,970	692
21	KOTA BANDUNG	3,905,052	196,462	19,311
22	KOTA CIREBON	834,341	69,774	14,512
23	KOTA BEKASI	3,734,184	352,636	31,802
24	KOTA DEPOK	3,243,646	142,792	12,172
25	KOTA CIMAHI	1,446,337	338,522	18,532
26	KOTA TASIKMALAYA			
27	KOTA BANJAR	172,799	924	1,028
	JAWA BARAT	39,228,492	2,096,292	519,783
	JUMLAH PENDUDUK KAB/KOTA	46,709,569	46,709,569	
	CAKUPAN KUNJUNGAN (%)	83.98	4.49	

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

Catatan: Puskesmas non rawat inap hanya melayani kunjungan rawat jalan

TABEL 54.A

**JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN , RAWAT INAP, DAN KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA
SARANA PELAYANAN KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KUNJUNGAN						KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA		
		RAWAT JALAN			RAWAT INAP			JUMLAH		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
I	PUSKESMAS :									
1	KAB. BOGOR	1,030,981	2,020,989	3,051,970	5,950	8,669	14,619	290	295	585
2	KAB. SUKABUMI	318,215	478,039	796,254	11	292	303	9,511	8,828	18,339
3	KAB. CIANJUR			715,825			4,050			-
4	KAB. BANDUNG			1,502,651			2,107			4,190
5	KAB. GARUT			1,102,823			10,910			-
6	KAB. TASIKMALAYA	341,507	415,776	757,283	5,736	7,534	13,270	909	1,088	1,997
7	KAB. CIAMIS			600,887	32,890	47,053	79,943	9,995	12,011	22,006
8	KAB. KUNINGAN	-	-	2,238,289	-	-	548,399			132,795
9	KAB. CIREBON	438,230	665,064	1,103,294	24,112	30,580	54,692	13,379	20,577	33,956
10	KAB. MAJALENGKA	545,854	632,590	1,178,444	10,829	10,304	21,133	8,021	8,693	16,714
11	KAB. SUMEDANG			1,591,634			60,058			28,721
12	KAB. INDRAMAYU			1,452,969			12,857	12,877	12,155	25,032
13	KAB. SUBANG			-			-			-
14	KAB. PURWAKARTA	-	446,952	446,952	-	-	2,131	1,151	1,554	2,705
15	KAB. KARAWANG	-	1,509,797	1,509,797	-	-	9,361	-	-	72,526
16	KAB. BEKASI	578,865	702,312	1,281,177	1,503	2,259	3,762	301	296	597
17	KAB. BANDUNG BARAT			726,856			3,816	-	-	-
18	KAB. PANGANDARAN	56,546	62,220	118,766	2,606	2,940	5,546	183	294	477
19	KOTA BOGOR			1,407,274			790	2,990	1,976	4,966
20	KOTA SUKABUMI	164,748	223,609	388,357	-	205	205	623	457	1,080
21	KOTA BANDUNG	920,671	878,920	1,799,591	-	1,928	1,928	3,417	4,173	7,590
22	KOTA CIREBON	247,557	388,529	636,086	-	-	-	3,419	3,731	7,150
23	KOTA BEKASI	1,157,938	1,631,172	2,789,110	171,796	174,224	346,020	13,381	20,615	33,996
24	KOTA DEPOK	912,451	1,244,798	2,157,249	57,431	65,058	122,489	2,129	2,041	4,170
25	KOTA CIMAHI	270,636	214,015	484,651	25,696	20,657	46,353	3,724	2,482	6,206
26	KOTA TASIKMALAYA	107,633	308,692	416,325	29,374	67,670	97,044	8,437	3,879	12,316
27	KOTA BANJAR	-	-	75,132	-	-	-	490	839	1,329
	SUB JUMLAH I	7,091,832	11,823,474	30,329,646	367,934	439,373	1,461,786	95,227	105,984	439,443

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KUNJUNGAN						KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA		
		RAWAT JALAN			RAWAT INAP			JUMLAH		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
II	RUMAH SAKIT :									
				1,249,326	83,450	84,175	196,650	1	-	1
2	KAB. SUKABUMI			180,591			24,246			-
3	KAB. CIANJUR									
4	KAB. BANDUNG			420,534	14,340	20,558	34,898	2,559	12,327	14,886
5	KAB. GARUT	106,942	137,798	244,740	24,273	30,244	54,517	3,837	1,976	5,813
6	KAB. TASIKMALAYA			47,780						
7	KAB. CIAMIS			80,161	8,477	11,825	20,574	481	612	1,093
8	KAB. KUNINGAN	130,303	200,077	330,380	29,096	41,799	70,895	2,030	1,661	3,690
9	KAB. CIREBON	-	-	478,049	-	-	60,606	-	-	2,183
10	KAB. MAJALENGKA	60,791	81,492	142,283	19,134	23,921	43,055	2,231	1,687	3,918
11	KAB. SUMEDANG	78,564	110,551	189,115	6,546	8,211	14,757	335	186	521
12	KAB. INDRAMAYU			138,665	9,714	10,688	47,201	24	33	3,689
13	KAB. SUBANG									
14	KAB. PURWAKARTA	63,272	55,584	118,856	7,495	9,482	16,977	4,062	2,763	6,825
15	KAB. KARAWANG	328,360	407,550	1,086,298	45,035	60,117	151,136	6,691	4,220	13,340
16	KAB. BEKASI	354,470	489,767	844,237	40,980	43,411	84,391	10,608	11,844	22,452
17	KAB. BANDUNG BARAT	41,896	58,735	100,631	3,689	3,074	6,763	26,312	17,012	43,324
18	KAB. PANGANDARAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	KOTA BOGOR	41,896	58,735	100,631	3,689	3,074	6,763	26,312	17,012	43,324
20	KOTA SUKABUMI	112,754	151,420	264,174	29,414	33,531	62,945	340	221	561
21	KOTA BANDUNG	-	-	1,189,064	-	-	-	-	-	-
22	KOTA CIREBON	224,149	289,493	513,642	27,087	38,893	65,980	3,989	4,735	8,724
23	KOTA BEKASI	1,039,432	1,429,138	2,468,570	171,725	174,101	345,826	457	424	881
24	KOTA DEPOK	-	-	859,018	-	-	-	-	-	-
25	KOTA CIMAHI	270,636	214,015	484,651	25,696	20,657	46,353	3,724	2,482	6,206
26	KOTA TASIKMALAYA	107,633	308,692	416,325	29,374	67,670	97,044	8,437	3,879	12,316
27	KOTA BANJAR	10,679	11,045	21,724	2,021	2,178	4,199	4	11	15
	SUB JUMLAH II	2,971,777	4,004,092	11,969,445	581,235	687,609	1,455,776	102,434	83,085	193,762
	JAWA BARAT	10,063,609	15,827,566	42,299,091	949,169	1,126,982	2,917,562	197,661	189,069	633,205
	JUMLAH PENDUDUK KAB/KOTA	23,680,927	23,028,642	46,709,569	23,680,927	23,028,642	46,709,569			
	CAKUPAN KUNJUNGAN (%)	42.50	68.73	90.56	4.01	4.89	6.25			

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

Catatan: Puskesmas non rawat inap hanya melayani kunjungan rawat jalan

TABEL 55

**ANGKA KEMATIAN PASIEN DI RUMAH SAKIT
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KAB/KOTA	JUMLAH RS	JUMLAH TEMPAT TIDUR	PASIE N KELUAR (HIDUP + MATI)			PASIE N KELUAR MATI			PASIE N KELUAR MATI ≥ 48 JAM DIRAWAT			GDR			NDR		
				L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1	KAB. BOGOR	27	3,134	62,415	83,334	181,218	1,661	1,443	4,256	566	583	1,827	26.6	17.3	23.5	9.1	7.0	10.1
2	KAB. SUKABUMI	7	363			26,080	-	-	-			181			-			6.9
3	KAB. CIANJUR	2	446	20,144	27,011	47,155	808	772	1,580	333	331	664						
4	KAB. BANDUNG	7	1,112	20,484	31,850	52,334	758	643	1,401	391	238	629			26.8			12.0
5	KAB. GARUT	6	773	5,132	8,438	13,570	296	351	647	192	159	351	57.7	41.6	47.7	37.4	18.8	25.9
6	KAB. TASIKMALAYA	2	158			12,566			582			362	#DIV/0!	#DIV/0!	46.3	#DIV/0!	#DIV/0!	28.8
7	KAB. CIAMIS	3	416	6,609	9,355	21,201	288	240	548	130	134	269	43.6	25.7	25.8	19.7	14.3	12.7
8	KAB. KUNINGAN	8	1,078	36,551	50,847	87,398	1,056	1,106	2,162	522	623	1,145	28.9	21.8	24.7	14.3	12.3	13.1
9	KAB. CIREBON	11	1,902	49,720	61,898	111,618	2,292	2,250	4,542	1,050	1,034	2,084			40.7			18.7
10	KAB. MAJALENGKA	2	476	8,318	10,341	37,627			1,004			491	-	-	26.7	-	-	13.0
11	KAB. SUMEDANG	2	496	15,536	21,424	36,960	622	535	1,157	369	338	707	40.0	25.0	31.3	23.8	15.8	19.1
12	KAB. INDRAMAYU	7	106	2,035	2,482	5,251	111	110	222	14	25	39	54.5	44.3	42.3	6.9	10.1	7.4
13	KAB. SUBANG	10	635	11,423	15,366	26,789	315	263	578	147	131	278						
14	KAB. PURWAKARTA	11	993	21,331	28,475	66,626	474	514	1,693	206	197	776	22.2	18.1	25.4	9.7	6.9	11.6
15	KAB. KARAWANG	20	2,388	45,160	56,341	167,093	720	639	3,185	181	193	2,142	15.9	11.3	19.1	4.0	3.4	12.8
16	KAB. BEKASI	48	1,607	65,687	68,928	134,615	716	680	1,396	360	339	699	10.9	9.9	10.4	5.5	4.9	5.2
17	KAB. BANDUNG BARAT	5	523	3,756	4,651	17,675	32	34	197	34	31	137	8.5	7.3	11.1	9.1	6.7	7.8
18	KAB. PANGANDARAN	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	KOTA BOGOR	18	2,318	3,875	58,472	117,408	1,082	1,149	2,662	533	511	1,396	279.2	19.7	22.7	137.5	8.7	11.9
20	KOTA SUKABUMI	6	1,160	16,317	17,009	33,326	231	217	448	178	185	363	14.2	12.8	13.4	10.9	10.9	10.9
21	KOTA BANDUNG	33	3,555	34,566	42,194	197,944	905	700	5,361	669	499	4,249	26.2	16.6	27.1	19.4	11.8	21.5
22	KOTA CIREBON	11	1,207	31,394	42,717	74,111	13	1,372	2,672	877	927	1,804	0.4	32.1	36.1	27.9	21.7	24.3
23	KOTA BEKASI	38	3,810			214,271			4,053			1,635			18.9			7.6
24	KOTA DEPOK	20	198	5,669	6,057	137,761	579	528	128	239	216	455	102.1	87.2	0.9	42.2	35.7	3.3
25	KOTA CIMAHI	7	1,236	37,014	36,943	102,176	542	515	2,069	145	147	851	14.6	13.9	20.2	3.9	4.0	8.3
26	KOTA TASIKMALAYA	13	1,186	29,508	32,690	62,198	950	834	1,784	510	430	939	32.2	25.5	28.7	17.3	13.2	15.1
27	KOTA BANJAR	3	465	3,405	3,779	7,184	103	80	183	58	56	114	30.2	21.2	25.5	17.0	14.8	15.9
	JAWA BARAT	327	31,741	536,049	720,602	1,992,155	14,554	14,975	44,510	7,704	7,327	24,587	2.7	2.1	2.2	1.4	1.0	1.2

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 56

**INDIKATOR KINERJA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KAB/KOTA	JUMLAH RS	JUMLAH RS LAPOR	JUMLAH TEMPAT TIDUR	PASIE KELUAR (HIDUP + MATI)	JUMLAH HARI PERAWATAN	JUMLAH LAMA DIRAWAT	BOR (%)	BTO (KALI)	TOI (HARI)	ALOS (HARI)
1	KAB. BOGOR	27	27	3141	181,218	643,919	619,799	56.2	57.69	2.77	3.4
2	KAB. SUKABUMI	7	3	363	36,557	77,912	91,065	58.8	100.71	1.49	2.5
3	KAB. CIANJUR	3	2	564	42,049	143,145	126,415				
4	KAB. BANDUNG	7	7	1112	84,982	266,802	311,882	65.7	76.42	1.64	3.7
5	KAB. GARUT	6	5	773	54,538	203,615	227,160	72.2	70.55	1.44	4.2
6	KAB. TASIKMALAYA	2						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
7	KAB. CIAMIS	3	3	416	21,209	67,306	67,373	44.3	50.98	3.99	3.2
8	KAB. KUNINGAN	8	8	1078	87,398	291	266	0.1	81.07	4.50	0.0
9	KAB. CIREBON	11	11	1902	111,618	393,535	386,663	56.7	58.68	2.69	3.5
10	KAB. MAJALENGKA	4	2	476	37,627	120,074	144,913	69.1	79.05	1.43	3.9
11	KAB. SUMEDANG	2	2	496	36,960	156,194	114,382	86.3	74.52	0.67	3.1
12	KAB. INDRAMAYU	7	2	106	5,251	13,082	11,349	33.8	49.54	4.88	2.2
13	KAB. SUBANG	10	10	635	26,789	98,579	9,393	-	-	-	-
14	KAB. PURWAKARTA	11	9	1189	77,365	274,091	254,858	63.2	65.07	2.07	3.3
15	KAB. KARAWANG	20	20	2388	167,093	395,583	407	45.4	69.97	2.85	0.0
16	KAB. BEKASI	48	17	1607	134,615	308,560	337,856	52.6	83.77	2.07	2.5
17	KAB. BANDUNG BARAT	5	5	523	17,675	103	104	0.1	33.80	10.79	0.0
18	KAB. PANGANDARAN	0	0	0	-	-	-				
19	KOTA BOGOR	18	18	2.318	117	421	451	49.8	50.65	3.62	3.8
20	KOTA SUKABUMI	6	6	1160	64,506	275,339	243,266	65.0	55.61	2.30	3.8
21	KOTA BANDUNG	33	33	3640	217,814	749,972	463,841	56.4	59.84	2.66	2.1
22	KOTA CIREBON	11	11	1.207	74	264	274	59.9	61.40	2.39	3.7
23	KOTA BEKASI	38	38	3810	198,211	713,162	890,314	51.3	52.02	3.42	4.5
24	KOTA DEPOK	20	20	1980	137,761	407,217	377,614	56.3	69.58	2.29	2.7
25	KOTA CIMAHI	7	6	1236	102,176	329,268	324,314	73.0	82.67	1.19	3.2
26	KOTA TASIKMALAYA	13	12	1186	62,198	243,012	229,040	56.1	52.44	3.05	3.7
27	KOTA BANJAR	3	3	361	7,184			0.0	19.90		
	JAWA BARAT	330	280	30145.525	1912985.519	5,881,446	5,232,999	53.5	63.46	2.7	2.7

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

Keterangan: ^a termasuk rumah sakit swasta

TABEL 57

**PERSENTASE RUMAH TANGGA BERPERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (BER-PHBS) MENURUT KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	RUMAH TANGGA				
		JUMLAH	DIPANTAU	% DIPANTAU	JUMLAH BER- PHBS	% BER- PHBS
1	KAB. BOGOR	1,343,994	1,023,268	76	519,724	51
2	KAB. SUKABUMI	1,009,460	725,348	72	372,535	51.4
3	KAB. CIANJUR	651,916	434,223	67	192,370	44.3
4	KAB. BANDUNG	843,407	221,340	26	117,530	53.1
5	KAB. GARUT	696,998	576,809	83	191,777	33.2
6	KAB. TASIKMALAYA	597,250	170,560	29	69,955	41.0
7	KAB. CIAMIS	364,637	219,748	60	100,346	45.7
8	KAB. KUNINGAN	293,235	281,558	96	175,366	62.3
9	KAB. CIREBON	577,159	329,526	57	184,586	56.0
10	KAB. MAJALENGKA	325,243	271,833	84	142,064	52.3
11	KAB. SUMEDANG	349,356	349,356	100	182,150	52.1
12	KAB. INDRAMAYU	525,883	66,962	13	35,109	52.4
13	KAB. SUBANG	422,944	213,802	51	140,143	65.5
14	KAB. PURWAKARTA	278,416	278,416	100	17,615	6.3
15	KAB. KARAWANG	606,735	576,429	95	287,904	49.9
16	KAB. BEKASI	801,415	794,702	99	496,445	62.5
17	KAB. BANDUNG BARAT	453,373	49,200	11	26,559	54.0
18	KAB. PANGANDARAN	138,561	36,671	26	18,702	51.0
19	KOTA BOGOR	191,382	174,660	91	111,774	64.0
20	KOTA SUKABUMI	97,729	70,000	72	28,338	40.5
21	KOTA BANDUNG	653,572	434,311	66	286,274	65.9
22	KOTA CIREBON	78,416	71,120	91	46,209	65.0
23	KOTA BEKASI	586,264	156,739	27	104,116	66.4
24	KOTA DEPOK	429,157	408,709	95	315,584	77.2
25	KOTA CIMAHI	100,725	100,725	100	52,563	52.2
26	KOTA TASIKMALAYA	162,685	162,685	100	78,829	48.5
27	KOTA BANJAR	54,602	54,602	100	40,083	73.4
	JAWA BARAT	12,634,514	8,253,302	65.3	4,334,650	52.5

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 58

**PERSENTASE RUMAH SEHAT MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH SELURUH RUMAH	RUMAH MEMENUHI SYARAT (RUMAH SEHAT)		JUMLAH RUMAH YANG BELUM MEMENUHI SYARAT	RUMAH DIBINA		RUMAH DIBINA MEMENUHI SYARAT		RUMAH MEMENUHI SYARAT (RUMAH SEHAT)	
			JUMLAH	%		JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	KAB. BOGOR	993,304	839,308	84	153,997	46,200	30	29,319	63	868,629	87
2	KAB. SUKABUMI	652,674	357,396	55	294,240	156,714	53	75,880	48	433,177	66
3	KAB. CIANJUR	588,431	169,005	29	419,426	94,977	23	54,809	58	223,814	38
4	KAB. BANDUNG	806,774	416,912	52	367,148	78,701	21	37,596	48	454,508	56
5	KAB. GARUT	642,555	439,900	68	202,655	54,885	27	21,557	39	461,456	72
6	KAB. TASIKMALAYA	470,459	223,020	47	247,439	127,052	51	107,944	85	330,964	70
7	KAB. CIAMIS	347,781	208,479	60	139,302	139,302	100	42,331	30	250,810	72
8	KAB. KUNINGAN	274,374	169,486	62	104,888	23,678	23	14,237	60	183,723	67
9	KAB. CIREBON	468	306	65	163	117	72	69	59	394	84
10	KAB. MAJALENGKA	335,030	230,594	69	104,436	55,082	53	28,303	51	258,897	77
11	KAB. SUMEDANG	315,936	180,635	57	136,420	102,154	75	66,235	65	246,870	78
12	KAB. INDRAMAYU	456,156	289,943	64	166,372	31,291	19	12,850	41	313,443	69
13	KAB. SUBANG	404,160	154,733	38	249,427	34,232	14	23,725	69	178,458	44
14	KAB. PURWAKARTA	253,367	161,724	64	91,643	17,051	19	8,988	53	170,712	67
15	KAB. KARAWANG	566,427	236,616	42	329,811	168,274	51	134,894	80	371,510	100
16	KAB. BEKASI	798,545	515,655	65	282,890	135,247	48	71,002	52	586,657	73
17	KAB. BANDUNG BARAT	805	520	65	285	135	48	71	53	591	73
18	KAB. PANGANDARAN	121,668	82,420	68	39,248	39,248	100	1,962	5	84,383	69
19	KOTA BOGOR	191,382	131,436	69	57,658	46,123	80	38,629	84	157,134	82
20	KOTA SUKABUMI	72,573	28,675	40	43,898	14,446	33	6,605	46	35,280	49
21	KOTA BANDUNG	405,901	300,459	74	106,565	106,565	100	1,113	1	301,572	74
22	KOTA CIREBON	62,963	51,419	82	11,662	11,483	98	618	5	52,037	83
23	KOTA BEKASI	520,393	466,657	90	52,876	31,778	60	13,402	42	480,059	92
24	KOTA DEPOK	435,982	366,424	84	69,558	20,044	29	13,319	66	379,743	87
25	KOTA CIMAH	103,325	27,724	27	75,601	6,897	9	2,583	37	30,307	29
26	KOTA TASIKMALAYA	151,225	13,433	9	13,792	25,809	187	15,629	61	29,062	19
27	KOTA BANJAR	57,001	42,543	75	14,458	7,528	52	3,353	45	45,896	81
JAWA BARAT		10,029,658	6,105,422	60.87	3,775,857	1,575,013	1,474	827,024	1,348	6,930,086	69.10

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 59

**PENDUDUK DENGAN AKSES BERKELANJUTAN TERHADAP AIR MINUM BERKUALITAS (LAYAK) MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	PENDUDUK	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN															
			SUMUR GALI TERLINDUNG				SUMUR GALI DENGAN POMPA				SUMUR BOR DENGAN POMPA				TERMINAL AIR			
			JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	MEMENUHI SYARAT		JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	MEMENUHI SYARAT		JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	MEMENUHI SYARAT		JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	MEMENUHI SYARAT	
					JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA			JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA			JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA			JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA
1	KAB. BOGOR	5587390	374,837	1,874,185	308,607	1,543,033	24,787	619,675	20,324	508,095	189,420	947,100	33,496	167,482	-	-	-	-
2	KAB. SUKABUMI	2444616	284,771	874,199	197,696	650,493	98,063	319,542	50,792	191,891	53,252	224,942	34,702	171,564	2,932	38,914	2,406	36,119
3	KAB. CIANJUR	2250977	263,230	613,638	219,358	393,284	67,484	324,089	31,393	121,931	29,387	130,979	21,425	51,895	2,169	10,097	903	3,819
4	KAB. BANDUNG	3596623	244,943	1,075,232	207,830	953,796	235,698	970,225	219,746	804,102	66,863	318,809	66,220	279,385	18,429	192,083	15,905	146,869
5	KAB. GARUT	2569505	214,732	1,459,525	156,191	1,132,964	25,055	164,616	21,185	126,419	6,951	34,443	4,399	31,257	609	18,112	343	16,618
6	KAB. TASIKMALAYA	1742276	96,717	476,643	81,017	400,045	148,037	669,656	123,363	531,098	9,486	43,321	8,250	38,551	1,849	51,032	1,301	36,239
7	KAB. CIAMIS	1175389	99,789	406,956	65,190	318,780	135,961	494,989	110,045	422,757	2,437	8,281	2,137	6,869	-	-	-	-
8	KAB. KUNINGAN	1061886	59,021	236,084	51,649	206,596	82,960	331,840	79,589	318,356	7,954	31,816	7,184	28,736	-	-	-	-
9	KAB. CIREBON	2142999	116,278	590,926	78,400	411,629	103,957	462,069	65,691	315,333	124,035	609,374	91,280	448,541	31	1,262	26	998
10	KAB. MAJALENGA	1188004	95,471	347,943	73,867	288,569	46,712	177,540	31,046	150,455	53,574	215,815	43,618	183,134	678	27,720	525	24,223
11	KAB. SUMEDANG	1142097	133,582	285,864	80,530	226,220	42,624	79,042	16,673	69,641	9,874	51,392	8,869	41,946	1,647	57,103	1,240	55,541
12	KAB. INDRAMAYU	1700815	73,094	286,258	63,629	245,286	33,729	162,687	21,797	112	136,616	606,341	117,859	553	931	7,777	749	7
13	KAB. SUBANG	1546000	111,189	414,341	111,189	414,341	73,386	314,026	73,386	314,026	37,751	123,627	37,751	123,627	-	-	-	-
14	KAB. PURWAKARTA	932701	65,259	307,970	41,118	218,740	58,013	212,271	74,423	171,454	27,383	88,115	25,054	81,028	310	9,790	47	7,662
15	KAB. KARAWANG	2295778	65,503	250,021	42,050	144,032	-	-	-	-	291,456	1,104,548	216,014	763,328	-	-	-	-
16	KAB. BEKASI	3371691	32,632	161,363	25,221	94,688	39,319	206,811	31,772	141,730	477,975	1,967,632	397,689	1,516,814	83	13,907	62	13,907
17	KAB. BANDUNG BARAT	1648387	114,986	447,326	105,811	410,489	105,797	377,015	86,477	323,226	74,920	264,826	64,282	241,083	7,675	206,496	6,929	186,783
18	KAB. PANGANDARAN	392817	72,775	175,658	52,818	122,961	313	3,435	250	2,748	497	2,138	479	2,065	-	-	-	-
19	KOTA BOGOR	1064687	11,182	128,788	9,557	49,966	22,548	95,507	21,492	93,088	34,845	362,875	34,662	204,571	22	124	22	124
20	KOTA SUKABUMI	321097	3,174	14,320	2,423	10,640	34,355	158,496	27,475	123,507	22,275	104,399	19,031	8,822	-	-	-	-
21	KOTA BANDUNG	2490622	88,015	165,375	47,929	187,558	25,363	86,237	11,965	91,108	49,473	115,089	30,657	183,622	-	-	-	-
22	KOTA CIREBON	310486	8,307	36,545	7,312	25,325	2,798	13,370	2,595	12,127	5,072	22,383	4,915	15,422	-	-	-	-
23	KOTA BEKASI	2787205	1,029	4,536	1,021	4,416	35,847	137,399	2,601	11,341	470,476	2,117,594	461,564	2,052,697	12	2,268	12	2,268
24	KOTA DEPOK	2179813	16,421	77,505	15,169	71,215	186,781	718,448	165,616	617,476	191,781	905,915	167,945	801,966	4	23	4	23
25	KOTA CIMAHI	594021	8,060	32,240	3,429	16,657	14,769	57,885	4,652	21,315	30,640	127,641	16,699	64,906	-	-	-	-
26	KOTA TASIKMALAYA	659606	33,134	128,999	33,134	128,999	75,916	280,230	75,916	280,230	3,585	15,466	3,585	15,466	-	-	-	-
27	KOTA BANJAR	181901	26,295	73,686	24,543	63,506	15,807	58,863	13,912	45,806	2,045	5,962	2,005	5,832	-	-	-	-
	JAWA BARAT	47,379,389	2,714,426	10,946,126	2,106,688	8,734,228	1,736,079	7,495,963	1,384,176	5,809,372	2,410,023	10,550,823	1,921,771	7,531,162	37,381	636,708	30,474	531,200

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 59

**PENDUDUK DENGAN AKSES BERKELANJUTAN TERHADAP AIR MINUM BERKUALITAS (LAYAK) MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN								PERPIPAAN (PDAM, BPSPAM)				PENDUDUK YANG MEMILIKI AKSES AIR MINUM	
		MATA AIR TERLINDUNG				PENAMPUNGAN AIR HUJAN				JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	MEMENUHI SYARAT		JUMLAH	%
		JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	MEMENUHI SYARAT		JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	MEMENUHI SYARAT				JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA		
JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA			JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA			JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA						
1	KAB. BOGOR	5	440	5	440	-	-	-	-	50,166	254,403	50,147	241,752	2,460,802	44.04
2	KAB. SUKABUMI	5,306	235,286	8,004	204,333	-	-	-	-	6,033	77,342	5,834	75,994	1,330,394	54.42
3	KAB. CIANJUR	-	-	-	-	-	-	-	-	85,056	351,469	85,056	351,469	922,398	40.98
4	KAB. BANDUNG	244	14,760	226	13,560	7	21	-	-	85,023	340,092	81,518	326,072	2,523,784	70.17
5	KAB. GARUT	717	20,343	345	6,153	-	-	-	-	8,904	33,985	8,989	28,525	1,341,936	52.23
6	KAB. TASIKMALAYA	358	13,509	293	11,635	-	-	-	-	83,553	337,449	65,043	292,365	1,309,933	75.19
7	KAB. CIAMIS	22,264	106,840	21,573	91,110	-	-	-	-	114,909	490,124	100,555	427,728	1,267,244	107.81
8	KAB. KUNINGAN	23	286	14	61	-	-	-	-	47,488	247,402	47,160	247,259	801,008	75.43
9	KAB. CIREBON	285	43,249	193	32,075	-	-	-	-	86,853	405,436	21,677	330,044	1,538,620	71.80
10	KAB. MAJALENGKA	1,191	17,652	737	12,267	-	-	-	-	115,146	506,653	114,348	490,058	817,769	68.84
11	KAB. SUMEDANG	45	4,178	45	4,178	-	-	-	-	22,637	73,420	22,637	73,420	470,946	41.24
12	KAB. INDRAMAYU	17,907	129,885	16,844	129,487	-	-	-	-	85,443	364,250	85,426	363,485	738,931	43.45
13	KAB. SUBANG	248	1,656	99	543	94	587	69	540	187,031	829,994	121,041	1,380,603	2,233,680	144.48
14	KAB. PURWAKARTA	7,194	85,038	7,749	128,092	15	14,781	9	8,252	25,750	438,685	24,275	445,361	1,060,589	113.71
15	KAB. KARAWANG	8,141	37,913	2,990	31,287	2,213	14,128	10	100	40,630	156,137	37,204	135,844	1,074,591	46.81
16	KAB. BEKASI	10,000	254,240	8,291	66,241	7,843	33,149	3,662	15,634	17,162	116,888	15,188	93,285	1,942,299	57.61
17	KAB. BANDUNG BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	42	1,015	25	827	1,162,408	70.52
18	KAB. PANGANDARAN	113	743	107	717	22,858	16,673	16,927	13,869	92,890	387,012	77,882	341,277	483,637	123.12
19	KOTA BOGOR	2,659	17,590	1,123	12,388	97	329	97	332	36,530	176,722	36,304	148,458	508,927	47.80
20	KOTA SUKABUMI	71	6,349	54	5,334	-	-	-	-	11,627	55,436	11,057	48,480	196,783	61.28
21	KOTA BANDUNG	115	40,250	94	32,970	-	-	-	-	23,938	134,545	18,445	922,250	1,417,508	56.91
22	KOTA CIREBON	31,718	247,921	17,408	4,575	4,575	18,373	1,932	10,286	58,399	330,645	51,589	281,951	349,686	112.63
23	KOTA BEKASI	2,337	8,287	1,139	530	1,534	6,422	972	3,215	58,749	244,614	54,701	159,650	2,234,117	80.16
24	KOTA DEPOK	2,900	9,672	2,320	7,738	204	798	163	638	3,544	18,459	2,835	14,767	1,513,823	69.45
25	KOTA CIMAHI	6	21	6	21	1,367	5,273	1,149	4,651	98,216	373,105	92,020	354,051	461,601	77.71
26	KOTA TASIKMALAYA	58,882	317,368	8,075	77,746	-	-	-	-	46,930	213,428	22,589	117,869	620,310	94.04
27	KOTA BANJAR	4,331	26,218	19	1,263	-	20	-	-	15,006	58,558	8,249	36,684	153,091	84.16
	JAWA BARAT	177,060	1,639,694	97,753	874,744	40,807	110,554	24,990	57,517	1,507,655	7,017,268	1,261,794	7,729,528	30,936,814	65.30

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/

TABEL 60

**PERSENTASE KUALITAS AIR MINUM DI PENYELENGGARA AIR MINUM
YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENYELENGGARA AIR MINUM	JUMLAH SAMPEL DIPERIKSA	MEMENUHI SYARAT (FISIK, BAKTERIOLOGI, DAN KIMIA)	
				JUMLAH	%
1	KAB. BOGOR	344	300	133	44.33
2	KAB. SUKABUMI	38,959	3,191	8	0.26
3	KAB. CIANJUR	272	220	81	36.82
4	KAB. BANDUNG	528	501	273	54.49
5	KAB. GARUT	87	82	82	100.00
6	KAB. TASIKMALAYA	254	295	257	87.12
7	KAB. CIAMIS	228	173	100	57.80
8	KAB. KUNINGAN	245	245	207	84.49
9	KAB. CIREBON	14,343	5,356	4,024	75.13
10	KAB. MAJALENGKA	9,170	568	388	68.31
11	KAB. SUMEDANG	497	331	294	88.82
12	KAB. INDRAMAYU	11	11	11	100.00
13	KAB. SUBANG	323	22	8	36.36
14	KAB. PURWAKARTA	826	153	64	41.83
15	KAB. KARAWANG	12	-	-	-
16	KAB. BEKASI	32	6	5	83.33
17	KAB. BANDUNG BARAT	422	32	31	96.88
18	KAB. PANGANDARAN	53	20	15	75.00
19	KOTA BOGOR	1	140	137	97.86
20	KOTA SUKABUMI	243	466	297	63.73
21	KOTA BANDUNG	187,031	476	429	90.13
22	KOTA CIREBON	1	324	317	97.84
23	KOTA BEKASI	723	343	259	75.51
24	KOTA DEPOK	12	4	4	100.00
25	KOTA CIMAHI	58	13	4	30.77
26	KOTA TASIKMALAYA	-	-	-	-
27	KOTA BANJAR	92	90	86	95.56
	JAWA BARAT	254,767	13,362	7,514	56.24

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 61

**PENDUDUK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (JAMBAN SEHAT) MENURUT JENIS JAMBAN,
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK	JENIS SARANA JAMBAN									
			KOMUNAL					LEHER ANGSA				
			JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGUNA	MEMENUHI SYARAT			JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGUNA	MEMENUHI SYARAT		
JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGUNA	% PENDUDUK PENGUNA			JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGUNA	% PENDUDUK PENGUNA					
1	KAB. BOGOR	5,459,668	2,893	144,650	2,764	138,250	95.58	657,959	3,292,000	623,088	3,115,440	94.64
2	KAB. SUKABUMI	2,434,221	20,358	132,219	12,452	90,416	68.38	468,966	1,509,812	328,615	1,064,317	70.49
3	KAB. CIANJUR	2,243,904	32,903	173,863	24,894	85,147	48.97	325,097	1,282,735	208,081	548,410	42.75
4	KAB. BANDUNG	3,534,114	9,547	210,130	8,381	152,076	72.37	518,149	2,305,734	434,723	1,892,355	82.07
5	KAB. GARUT	2,548,723	-	-	-	-	-	321,371	2,050,808	244,231	1,380,853	67.33
6	KAB. TASIKMALAYA	1,735,998	12,822	114,094	7,824	53,127	46.56	240,989	1,126,145	190,486	896,396	79.60
7	KAB. CIAMIS	1,168,682	101	639	68	503	78.72	227,885	820,296	181,430	663,952	80.94
8	KAB. KUNINGAN	1,055,417	310	465	310	465	100.00	234,696	938,784	234,696	938,784	100.00
9	KAB. CIREBON	2,126,179	23,805	74,232	19,536	34,724	46.78	411,859	1,846,701	281,481	1,345,543	72.86
10	KAB. MAJALENGKA	1,182,109	3,257	17,604	2,246	13,386	76.04	202,618	779,597	166,159	645,377	82.78
11	KAB. SUMEDANG	1,137,273	1,523	56,711	1,438	52,766	93.04	28,037	928,565	240,535	873,889	94.11
12	KAB. INDRAMAYU	1,691,386	548	5,115	424	4,548	-	313,250	1,349,380	284,494	1,222,704	90.61
13	KAB. SUBANG	1,529,388	-	-	-	-	-	314,379	1,313,539	314,228	1,264,230	96.25
14	KAB. PURWAKARTA	921,598	949	8,075	647	6,361	78.77	197,983	746,347	150,936	649,628	87.04
15	KAB. KARAWANG	2,273,579	97	9,088	97	9,088	100.00	385,535	1,495,710	294,689	1,143,465	76.45
16	KAB. BEKASI	3,246,013	1,794	38,620	1,659	36,686	94.99	619,392	2,700,571	555,718	2,397,462	88.78
17	KAB. BANDUNG BARAT	1,629,423	1,294	83,229	1,193	77,424	93.03	419,661	1,278,371	393,072	1,153,214	90.21
18	KAB. PANGANDARAN	390,483	40	-	-	-	-	84,616	258,076	64,201	193,216	74.87
19	KOTA BOGOR	1,047,922	285	29,140	285	23,434	80.42	146,794	669,784	130,786	626,037	93.47
20	KOTA SUKABUMI	318,117	121	22,626	39	3,705	16.37	65,318	307,686	30,296	141,632	46.03
21	KOTA BANDUNG	2,481,469	860	19,156	97	8,281	-	385,002	2,396,889	213,444	1,471,456	61.39
22	KOTA CIREBON	307,494	144	2,563	133	2,446	95.44	62,681	295,166	59,675	275,385	93.30
23	KOTA BEKASI	2,714,825	97	2,666	89	2,546	95.50	538,817	2,527,889	592,283	2,420,531	95.75
24	KOTA DEPOK	2,106,102	13,105	68,506	10,871	64,662	94.39	418,332	1,827,485	381,468	1,665,959	91.16
25	KOTA CIMAH	586,580	3,149	22,808	2,420	9,809	43.01	99,240	432,168	72,256	339,510	78.56
26	KOTA TASIKMALAYA	657,477	257	3,090	113	1,320	-	132,100	526,991	66,727	250,614	47.56
27	KOTA BANJAR	181,425	11,729	794	61	794	100.00	45,506	180,082	41,169	144,756	80.38
	JAWA BARAT	46,709,569	141,988	1,240,083	98,041	871,964	70.31	7,866,232	35,187,311	6,778,967	28,725,115	81.63

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 61

**PENDUDUK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (JAMBAN SEHAT) MENURUT JENIS JAMBAN,
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	JENIS SARANA JAMBAN									PENDUDUK DENGAN AKSES SANITASI LAYAK		
		PLENGSENGAN					CEPLUNG						
		JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	MEMENUHI SYARAT			JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	MEMENUHI SYARAT				
				JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	% PENDUDUK PENGGUNA			JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	% PENDUDUK PENGGUNA		
										JUMLAH	%		
1	KAB. BOGOR	90,177	589,955	81,644	374,854	63.54	111,459	557,295	79,955	398,735	71.55	4,027,279	72.08
2	KAB. SUKABUMI	77,575	194,339	46,229	117,020	60.21	73,706	204,236	37,246	90,778	44.45	1,362,531	54.78
3	KAB. CIANJUR	67,512	257,446	29,730	111,171	43.18	11,734	53,073	35,531	24,014	45.25	768,742	61.45
4	KAB. BANDUNG	61,127	281,046	47,611	221,435	78.79	63,498	302,513	47,368	224,566	74.23	2,490,432	70.20
5	KAB. GARUT	42,280	278,609	34,311	176,421	63.32	50,740	269,599	42,765	234,101	86.83	1,791,375	69.71
6	KAB. TASIKMALAYA	25,284	86,537	17,418	63,175	73.00	20,998	80,966	7,241	25,450	31.43	1,038,148	60.81
7	KAB. CIAMIS	22,182	85,940	17,788	70,266	81.76	12,977	46,316	9,702	35,065	75.71	769,786	62.39
8	KAB. KUNINGAN	5,705	5,705	-	-	-	1,488	1,488	-	-	-	939,249	81.49
9	KAB. CIREBON	23,805	74,232	19,536	34,724	46.78	64	271	28	230	84.87	1,415,221	61.27
10	KAB. MAJALENGA	30,629	125,292	23,234	84,643	67.56	20,315	72,465	8,157	21,546	29.73	764,952	64.39
11	KAB. SUMEDANG	12,164	55,472	11,730	54,753	98.70	25,337	58,549	24,077	49,540	84.61	1,030,948	89.93
12	KAB. INDRAMAYU	22,350	63,323	11,162	38,335	60.54	3,520	9,507	712	1,808	19.02	1,267,395	71.15
13	KAB. SUBANG	830	6,781	805	6,654	98.13	-	-	-	-	-	1,270,884	83.43
14	KAB. PURWAKARTA	5,140	22,301	4,215	21,480	96.32	5,152	25,977	3,553	20,924	80.55	698,393	74.97
15	KAB. KARAWANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,152,553	50.20
16	KAB. BEKASI	56,472	156,726	58,137	113,550	72.45	17,787	78,448	19,091	51,099	65.14	2,598,797	69.90
17	KAB. BANDUNG BARAT	26,657	115,401	28,876	96,935	84.00	11,957	45,189	10,869	39,551	87.52	1,367,124	82.00
18	KAB. PANGANDARAN	1,006	3,198	758	968	30.27	4,634	16,541	2,429	7,481	45.23	201,665	47.37
19	KOTA BOGOR	39,292	140,895	12,584	39,264	27.87	4,738	31,180	2,954	15,704	50.37	704,439	66.16
20	KOTA SUKABUMI	2,197	10,407	635	1,514	14.55	-	-	-	-	-	146,851	45.26
21	KOTA BANDUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,479,737	59.41
22	KOTA CIREBON	113	527	77	371	70.40	222	997	16	80	8.02	278,282	89.63
23	KOTA BEKASI	419	500	50	250	50.00	328	1,326	20	209	15.76	2,423,536	86.45
24	KOTA DEPOK	1,165	6,282	590	4,676	74.43	1,075	5,026	921	3,661	72.84	1,738,958	79.78
25	KOTA CIMAHI	235	2,515	449	2,145	85.29	146	731	128	689	94.25	352,153	69.95
26	KOTA TASIKMALAYA	419	1,062	31	85	8.00	2,790	6,056	-	-	-	252,019	40.05
27	KOTA BANJAR	261	26,752	160	514	1.92	664	16,582	58	511	3.08	146,575	78.35
	JAWA BARAT	614,996	2,591,243	447,760	1,635,203	63.10	445,329	1,884,331	332,821	1,245,742	66.11	32,478,024	69.53

Sumber: Profil Kesehatan Kabupate

TABEL 62

**DESA YANG MELAKSANAKAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DESA/KELURAHAN	SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)					
			DESA MELAKSANAKAN STBM		DESA STBM		DESA STOP BABS (SBS)	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	KAB. BOGOR	434	121	27.9	37	8.53	121	27.88
2	KAB. SUKABUMI	386	183	47.4			4	1.04
3	KAB. CIANJUR	360	104	28.9				-
4	KAB. BANDUNG	280	265	94.6			38	13.57
5	KAB. GARUT	442	313	70.8			138	31.22
6	KAB. TASIKMALAYA	351	351	100.0			18	5.13
7	KAB. CIAMIS	265	265	100.0			31	11.70
8	KAB. KUNINGAN	376	167	44.4			73	19.41
9	KAB. CIREBON	424	358	84.4			88	20.75
10	KAB. MAJALENGKA	343	193	56.3				
11	KAB. SUMEDANG	283	277	97.9	75	26.50	153	54.06
12	KAB. INDRAMAYU	317	121	38.2			17	5.36
13	KAB. SUBANG	253	245	96.8			148	58.50
14	KAB. PURWAKARTA	192	133	69.3			34	17.71
15	KAB. KARAWANG	309	149	48.2	70	22.65		
16	KAB. BEKASI	187	123	65.8			24	12.83
17	KAB. BANDUNG BARAT	165	165	100.0			14	8.48
18	KAB. PANGANDARAN	93	49	52.7				
19	KOTA BOGOR	68	68	100.0				
20	KOTA SUKABUMI	33	33	100.0				
21	KOTA BANDUNG	151	58	38.4			1	0.66
22	KOTA CIREBON	22	22	100.0			1	4.55
23	KOTA BEKASI	56	33	58.9				
24	KOTA DEPOK	63	62	98.4	13	20.63	4	6.35
25	KOTA CIMAH	15	15	100.0				
26	KOTA TASIKMALAYA	69	47	68.1				
27	KOTA BANJAR	25	25	100.0			10	40.00
	JAWA BARAT	5,962	3,945	66.2	195	3.27	917	15.38

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 63

**PERSENTASE TEMPAT-TEMPAT UMUM MEMENUHI SYARAT KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	TEMPAT-TEMPAT UMUM																								
		YANG ADA								MEMENUHI SYARAT KESEHATAN																
		SARANA PENDIDIKAN			SARANA KESEHATAN		HOTEL			JUMLAH TTU	SARANA PENDIDIKAN						SARANA KESEHATAN				HOTEL				TEMPAT-TEMPAT UMUM	
		SD/MI	SLTP	SLTA	PUSKESMAS	RUMAH SAKIT	BINTANG	NON BINTANG	SD		SLTP		SLTA		PUSKESMAS		RUMAH SAKIT UMUM		BINTANG		NON BINTANG					
JUMLAH	%								JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%		
1	KAB. BOGOR	2,398	639	535	101	27	47	133	3880	983	41.0	343	53.68	198	37.0	49	45	16	48.00	24	51	33	24.8	1646	42.4	
2	KAB. SUKABUMI	1,541	311	219	58	8	9	135	2281	923	59.9	292	93.89	184	84.0	50	100	6	100	7	78	67	49.6	1529	67.0	
3	KAB. CIANJUR	1,474	268	242	45	4	29	47	2109	630	42.7	156	58.21	95	39.3	61	82	3	60	26	90	22	46.8	993	47.1	
4	KAB. BANDUNG	1,618	302	238	62	9	17	65	2311	852	52.7	220	72.85	118	49.6	124	98	15	71.43	17	100	53	81.5	1399	60.5	
5	KAB. GARUT	1,880	339	268	65	6	13	74	2645	1221	64.9	349	102.95	188	70.1	65	97	6	100	13	100	48	64.9	1890	71.5	
6	KAB. TASIKMALAYA	1,302	240	173	40	2	0	11	1768	790	60.7	217	90.42	102	59.0	67	74	3	33.33	0	-	3	27.3	1182	66.9	
7	KAB. CIAMIS	966	106	86	37	3	11	35	1244	646	66.9	128	120.75	82	95.3	37	100	1	100	1	9	-	-	895	71.9	
8	KAB. KUNINGAN	735	94	68	37	8	4	33	979	304	41.4	28	29.79	25	36.8	11	38	8	57.14	1	25	10	30.3	387	39.5	
9	KAB. CIREBON	1,075	183	146	57	11	5	20	1497	888	82.6	245	133.88	142	97.3	75	100	12	100	5	100	15	75.0	1382	92.3	
10	KAB. MAJALENGA	742	103	75	32	3	0	10	965	602	81.1	123	119.42	72	96.0	32	97	4	100	0	-	6	60.0	839	86.9	
11	KAB. SUMEDANG	670	101	102	32	2	3	20	930	480	71.6	120	118.81	83	81.4	35	86	2	100	0	-	14	70.0	734	78.9	
12	KAB. INDRAMAYU	1,033	193	171	49	7	0	26	1479	580	56.1	106	54.92	69	40.4	64	75	7	85.71	0	-	18	69.2	844	57.1	
13	KAB. SUBANG	979	151	150	40	7	2	50	1379	642	65.6	95	62.91	71	47.3	20	50	2	28.57	2	100	33	66.0	865	62.7	
14	KAB. PURWAKARTA	471	165	81	20	11	9	16	773	360	76.4	94	56.97	60	74.1	41	75	10	78.57	9	100	10	62.5	584	75.5	
15	KAB. KARAWANG	1,029	145	143	50	20	9	42	1438	660	64.1	72	49.66	41	28.7	58	78	20	100	9	100	11	26.2	871	60.6	
16	KAB. BEKASI	1,115	304	292	39	44	13	25	1832	640	57.4	195	64.14	146	50.0	44	91	45	72.97	13	100	2	8.0	1085	59.2	
17	KAB. BANDUNG BARAT	901	151	147	31	6	9	47	1292	589	65.4	136	90.07	87	59.2	32	100	4	100	8	89	43	91.5	899	69.6	
18	KAB. PANGANDARAN	295	47	30	15	0	0	302	689	258	87.5	48	102.13	28	93.3	15	100	-	100	0	-	208	68.9	557	80.8	
19	KOTA BOGOR	333	120	150	24	17	27	21	692	199	59.8	82	68.33	102	68.0	50	91	14	86.67	28	104	16	76.2	491	74.1	
20	KOTA SUKABUMI	144	41	49	15	6	3	21	279	105	72.9	44	107.32	43	87.8	15	89	9	100	3	100	20	95.2	239	85.7	
21	KOTA BANDUNG	889	234	274	73	34	115	171	1790	595	66.9	241	102.99	167	60.9	64	98	17	71.43	110	96	138	80.7	1332	53.1	
22	KOTA CIREBON	199	42	54	22	11	16	41	385	196	98.5	41	97.62	48	88.9	22	100	13	100	16	100	37	90.2	373	96.9	
23	KOTA BEKASI	832	254	259	31	39	12	21	1448	641	77.0	205	80.71	149	57.5	597	100	38	94.74	12	100	19	90.5	1661	82.6	
24	KOTA DEPOK	575	206	200	32	20	4	10	1047	424	73.7	169	82.04	123	61.5	37	100	18	94.74	3	75	8	80.0	782	74.9	
25	KOTA CIMAHI	150	36	40	13	7	1	2	249	52	34.7	18	50.00	18	45.0	13	64	2	33.33	1	100	-	-	104	41.8	
26	KOTA TASIKMALAYA	284	69	78	20	13	6	28	498	81	28.5	18	26.09	19	24.4	8	100	4	12	3	50	3	10.7	136	27.3	
27	KOTA BANJAR	108	22	19	10	3	0	8	170	91	84.3	28	127.27	25	131.6	12	100	1	100	0		4	50.0	161	94.7	
	JAWA BARAT	23,738	4,866	4,289	1,050	328	364	1,414	36,049	14,432	1,734	3,813	2,218	2,485	1,764	1,698	2,329	280	2,129	311	1,766	841	1,496	23,860	66.19	

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 64

**TEMPAT PENGELOLAAN MAKAN (TPM) MENURUT STATUS HIGIENE SANITASI
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH TPM	TPM MEMENUHI SYARAT HIGIENE SANITASI						TPM TIDAK MEMENUHI SYARAT HIGIENE SANITASI					
			JASA BOGA	RUMAH MAKAN/ RESTORAN	DEPOT AIR MINUM (DAM)	MAKANAN JAJANAN	TOTAL	%	JASA BOGA	RUMAH MAKAN/ RESTORAN	DEPOT AIR MINUM (DAM)	MAKANAN JAJANAN	TOTAL	%
1	KAB. BOGOR	1,924	71	72	127	421	691	35.9	91	215	216	711	1,233	64.1
2	KAB. SUKABUMI	7,148	280	566	442	2627	3,915	54.8	238	598	353	2,044	3,233	45.2
3	KAB. CIANJUR	729	29	136	184	15	364	49.9	42	128	172	23	365	50.1
4	KAB. BANDUNG	11,638	899	419	747	3048	5,113	43.9	701	691	530	4,603	6,525	56.1
5	KAB. GARUT	1,827	18	210	324	501	1,053	57.6	1	56	110	607	774	42.4
6	KAB. TASIKMALAYA	7,619	105	411	177	5068	5,761	75.6	46	275	93	1,444	1,858	24.4
7	KAB. CIAMIS	3,521	19	277	264	1450	2,010	57.1	37	165	78	1,231	1,511	42.9
8	KAB. KUNINGAN	1,906	25	70	179	1142	1,416	74.3	0	22	28	440	490	25.7
9	KAB. CIREBON	10,813	89	277	762	4608	5,736	53.0	44	111	227	4,695	5,077	47.0
10	KAB. MAJALENGKA	2,372	58	238	408	700	1,404	59.2	14	114	157	683	968	40.8
11	KAB. SUMEDANG	6,898	94	284	326	1845	2,549	37.0	299	196	137	3,717	4,349	63.0
12	KAB. INDRAMAYU	12,118	58	96	433	2226	2,813	23.2	44	93	504	8,664	9,305	76.8
13	KAB. SUBANG	1,723	48	135	179	586	948	55.0	8	48	50	669	775	45.0
14	KAB. PURWAKARTA	2,448	80	297	180	787	1,344	54.9	19	189	101	795	1,104	45.1
15	KAB. KARAWANG	2,960	103	146	258	46	553	18.7	51	1625	649	82	2,407	81.3
16	KAB. BEKASI	8,843	272	969	856	1924	4,021	45.5	125	643	746	3,308	4,822	54.5
17	KAB. BANDUNG BARAT	2,247	24	104	413	797	1,338	59.5	12	113	188	596	909	40.5
18	KAB. PANGANDARAN	2,257	60	613	15	1065	1,753	77.7	7	104	37	356	504	22.3
19	KOTA BOGOR	4,325	83	2067	375	1507	4,032	93.2	33	108	118	34	293	6.8
20	KOTA SUKABUMI	1,306	16	41	48	179	284	21.7	8	13	17	984	1,022	78.3
21	KOTA BANDUNG	4,055	178	282	283	590	1,333	32.9	85	457	334	1,846	2,722	67.1
22	KOTA CIREBON	927	41	213	112	457	823	88.8	0	1	28	75	104	11.2
23	KOTA BEKASI	4,571	123	968	521	1218	2,830	61.9	23	76	103	1,539	1,741	38.1
24	KOTA DEPOK	2,554	100	498	242	168	1,008	39.5	104	831	174	437	1,546	60.5
25	KOTA CIMAHI	5,753	17	34	52	633	736	12.8	70	68	116	4,763	5,017	87.2
26	KOTA TASIKMALAYA	2,345	9	6	4	215	234	10.0	54	78	274	1,705	2,111	90.0
27	KOTA BANJAR	645	11	57	81	185	334	51.8	57	30	7	202	311	48.2
JAWA BARAT		115,472	2,910	9,486	7,992	34,008	54,396	47.11	2,213	7,048	5,547	46,253	61,076	52.89

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 65

**TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN DIBINA DAN DIUJI PETIK
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH TPM TIDAK MEMENUHI SYARAT	JUMLAH TPM DIBINA					PERSENTASE TPM DIBINA	JUMLAH TPM MEMENUHI SYARAT HIGIENE SANITASI	JUMLAH TPM DIUJI PETIK					PERSENTASE TPM DIUJI PETIK
			JASA BOGA	RUMAH MAKAN/ RESTORAN	DEPOT AIR MINUM (DAM)	MAKANAN JAJANAN	TOTAL			JASA BOGA	RUMAH MAKAN/ RESTORAN	DEPOT AIR MINUM (DAM)	MAKANAN JAJANAN	TOTAL	
1	KAB. BOGOR	1,233	68	28	18	188	302	24.49	691	39	23	45	56	163	23.59
2	KAB. SUKABUMI	3,233	222	406	340	1,643	2,611	80.76	3,408	112	197	293	364	966	28.35
3	KAB. CIANJUR	365	42	128	172	15	357	98	364	21	73	18	9	121	33.24
4	KAB. BANDUNG	6,525	91	240	340	4,243	4,914	75.31	3,359	160	61	63	655	939	27.95
5	KAB. GARUT	774	1	56	110	419	586	75.71	1,053	7	35	78	97	217	20.61
6	KAB. TASIKMALAYA	1,858	46	205	93	1,270	1,614	86.87	5,939	29	78	116	395	618	10.41
7	KAB. CIAMIS	1,511	37	93	78	297	505	33.42	2,010	28	67	68	247	410	20.40
8	KAB. KUNINGAN	490	-	22	28	440	490	100	1,416	-	-	-	99	99	6.99
9	KAB. CIREBON	5,077	44	111	227	3,286	3,668	72.25	1,832	12	105	318	743	1,178	64.30
10	KAB. MAJALENGKA	968	14	54	128	139	335	34.61	1,404	22	43	166	73	304	21.65
11	KAB. SUMEDANG	4,349	58	160	128	1,816	2,162	49.71	2,736	55	105	163	714	1,037	37.90
12	KAB. INDRAMAYU	9,305	44	93	504	2,936	3,577	38.44	3,922	-	-	-	-	-	0.00
13	KAB. SUBANG	775	8	48	50	349	455	58.71	948	4	-	3	-	7	0.74
14	KAB. PURWAKARTA	1,104	19	134	101	663	917	83.06	948	48	151	76	165	440	46.41
15	KAB. KARAWANG	2,407	38	1,069	442	37	1,586	65.89	553	4	9	26	12	51	9.22
16	KAB. BEKASI	4,822	99	433	424	1,290	2,246	46.58	4,021	11	32	70	102	215	5.35
17	KAB. BANDUNG BARAT	909	12	113	148	163	436	47.96	702	28	21	50	181	280	39.89
18	KAB. PANGANDARAN	504	7	104	37	356	504	100.00	1,754	-	-	15	98	113	6.44
19	KOTA BOGOR	293	33	108	118	34	293	100.00	2,100	9	14	28	486	537	25.57
20	KOTA SUKABUMI	1,022	5	13	8	498	524	51.27	284	4	3	21	13	41	14.44
21	KOTA BANDUNG	2,722	85	382	209	1,234	1,910	70	1,333	28	25	98	177	328	24.61
22	KOTA CIREBON	104	-	1	28	63	92	88.46	871	32	194	103	402	731	83.93
23	KOTA BEKASI	1,741	10	52	103	364	529	30.38	2,815	18	178	286	125	607	21.56
24	KOTA DEPOK	1,546	72	583	165	85	905	58.54	917	26	50	83	9	168	18.32
25	KOTA CIMAH	5,017	29	29	78	432	568	11.32	203	3	5	28	16	52	25.62
26	KOTA TASIKMALAYA	2,111	22	23	136	516	697	33.02	234	3	2	10	42	57	24.36
27	KOTA BANJAR	311	38	71	69	186	364	117.04	135	3	11	38	54	106	78.52
	JAWA BARAT	61,076	1,144	4,759	4,282	22,962	33,147	54.27	45,952	706	1,482	2,263	5,334	9,785	21.29

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 66

**PERSENTASE KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	NAMA OBAT	SATUAN TERKECIL	KEBUTUHAN	TOTAL PENGGUNAAN	SISA STOK	JUMLAH OBAT/VAKSIN	PERSENTASE KETERSEDIAAN OBAT/VAKSIN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Alopurinol tablet 100 mg	tablet	2,651,445	1,687,986	1,278,521	2,966,507	111.88
2	Aminofilin tablet 200 mg	tablet	1,169,962	646,341	635,797	1,282,138	109.59
3	Aminofilin injeksi 24 mg/ml	tablet	222,539	62,446	7,777	70,223	31.56
4	Amitripiilin tablet salut 25 mg (HCL)	tablet	166,429	126,939	199,678	326,617	196.25
5	Amoksisilin kapsul 250 mg	kapsul	17,123,683	6,380,555	13,127,278	19,507,833	113.92
6	Amoksisilin kaplet 500 mg	kaplet	52,990,862	33,405,409	18,859,753	52,265,162	98.63
7	Amoksisilin sirup kering 125 mg/ 5 mg	botol	1,405,523	865,757	712,109	1,577,866	112.26
8	Metampiron tablet 500 mg	tablet	8,772,674	3,947,644	3,413,276	7,360,920	83.91
9	Metampiron injeksi 250 mg	ampul	57,756	44,005	26,035	70,040	121.27
10	Antasida DOEN I tablet kunyah, kombinasi :Aluminium Hidroksida 200 mg + Magnesium Hidroksida 200 mg	tablet	44,174,837	25,715,865	20,442,436	46,158,301	104.49
11	Anti Bakteri DOEN saleb kombinasi : Basitrasin 500 IU/g + polimiksin 10.000 IU/g	tube	284,645	179,986	169,910	349,896	122.92
12	Antihemoroid DOEN kombinasi : Bismut Subgalat 150 mg + Heksaklorofen 250 mg	supp	229,352	130,106	112,148	242,254	105.63
13	Antifungi DOEN Kombinasi : Asam Benzoat 6% + Asam Salisilat 3%	pot	142,664	68,421	60,390	128,811	90.29
14	Antimigren : Ergotamin tartrat 1 mg + Kofein 50 mg	tablet	413,397	267,055	442,249	709,304	171.58
15	Antiparkinson DOEN tablet kombinasi : Karbidopa 25 mg + Levodopa 250 mg	tablet	2,610	-	2	2	0.08
16	Aqua Pro Injeksi Steril, bebas pirogen	vial	56,174	27,735	31,336	59,071	105.16
17	Asam Askorbat (vitamin C) tablet 50 mg	tablet	16,432,850	10,056,516	9,650,759	19,707,275	119.93
18	Asam Asetisalisilat tablet 100 mg (Asetosal)	tablet	99,386	43,000	131,800	174,800	175.88
19	Asam Asetisalisilat tablet 500 mg (Asetosal)	tablet	90,929	75,400	151,200	226,600	249.21
20	Atropin sulfat tablet 0,5 mg	tablet	7,400	3,820	19,467	23,287	314.69
21	Atropin tetes mata 0,5%	botol	306	911	154	1,065	348.04
22	Atropin injeksi 1.m/lv/s.k. 0,25 mg/mL - 1 mL (sulfat)	ampul	3,672	3,090	2,917	6,007	163.61
23	Betametason krim 0,1 %	krim	648,026	372,959	291,308	664,267	102.51
24	Deksametason Injeksi l.v. 5 mg/ml	ampul	220,698	121,853	109,031	230,884	104.62
25	Deksametason tablet 0,5 mg	tablet	32,781,444	17,203,812	12,453,096	29,656,908	90.47
26	Dekstran 70-larutan infus 6% steril	botol	252	14	102	116	46.03
27	Dekstrometorfan sirup 10 mg/5 ml (HBr)	botol	151,274	29,900	-	29,900	19.77
28	Dekstrometorfan tablet 15 mg (HBr)	tablet	2,500,500	541,200	-	541,200	21.64
29	Diazepam Injeksi 5mg/ml	ampul	17,933	6,649	6,135	12,784	71.29
30	Diazepam tablet 2 mg	tablet	2,158,226	875,987	1,598,737	2,474,724	114.66
31	Diazepam tablet 5 mg	tablet	133,637	49,841	47,034	96,875	72.49
32	Difenhidramin injeksi 1.M. 10 mg/ml (HCL)	ampul	178,813	70,594	82,520	153,114	85.63
33	Diagoksin tablet 0,25 mg	tablet	570,604	301,555	351,173	652,728	114.39
34	Efedrin tablet 25 mg (HCL)	tablet	1,529,179	388,025	763,545	1,151,570	75.31
35	Ekstrks belladonna tablet 10 mg	tablet	2,063,934	399,814	100,793	500,607	24.25
36	Epinefrin (Adrenalin) injeksi 0,1% (sebagai HCL)	ampul	45,215	17,484	51,851	69,335	153.34
37	Etakridin larutan 0,1%	botol	35,020	15,268	17,555	32,823	93.73
38	Fenitoin Natrium Injeksi 50 mg/ml	ampul	20	-	-	-	-
39	Fenobarbital Injeksi 1.m/lv. 50 mg/ml	ampul	9,239	3,768	4,506	8,274	89.56
40	Fenobarbital tablet 30 mg	tablet	2,196,091	617,009	997,327	1,614,336	73.51
41	Fenoksimetil Penisilin tablet 250 mg	tablet	269,900	104,500	111,011	215,511	79.85
42	Fenoksimetil Penisilin tablet 500 mg	tablet	836,075	451,542	131,600	583,142	69.75
43	Fenol Gliserol tetes telinga 10%	botol	88,281	42,968	30,519	73,487	83.24
44	Fitomenadion (Vit. K1) injeksi 10 mg/ml	ampul	201,471	86,111	43,724	129,835	64.44
45	Fitomenadion (Vit. K1) tablet salut gula 10 mg	tablet	1,219,505	675,781	507,879	1,183,660	97.06
46	Furosemid tablet 40 mg	tablet	1,102,380	683,072	705,937	1,389,009	126.00
47	Gameksan lotion 1 %	botol	3,532	-	-	-	-
48	Garam Oralit I serbuk Kombinasi : Natrium 0,70 g, Kalium klorida 0,30 g, Tribatrium Sitrat dihidrat 0,58 g	sach	3,363,888	2,258,243	2,016,263	4,274,506	127.07
49	Gentian Violet Larutan 1 %	botol	150,845	62,960	35,801	98,761	65.47
50	Glibenklamida tablet 5 mg	tablet	3,126,251	1,716,593	1,569,900	3,286,493	105.13
51	Gliseril Gualakolat tablet 100 mg	tablet	28,932,708	15,488,619	10,769,828	26,258,447	90.76
52	Gliserin	botol	2,145	2,434	2,881	5,315	247.79
53	Glukosa larutan infus 5%	botol	121,602	69,535	103,464	172,999	142.27
54	Glukosa larutan infus 10%	botol	7,378	3,320	13,380	16,700	226.34
55	Glukosa larutan infus 40% steril (produk lokal)	ampul	1,181	1,664	6,093	7,757	656.82
56	Griseofulvin tablet 125 mg, micronized	tablet	1,495,178	839,479	870,291	1,709,770	114.35
57	Haloperidol tablet 0,5 mg	tablet	115,926	99,882	102,842	202,724	174.87
58	Haloperidol tablet 1,5 mg	tablet	680,358	452,843	570,462	1,023,305	150.41
59	Haloperidol tablet 5 mg	tablet	1,507,094	614,452	491,900	1,106,352	73.41
60	Hidroklorotiazida tablet 25 mg	tablet	2,245,147	520,386	513,228	1,033,614	46.04
61	Hidrkortison krim 2,5%	tube	640,898	343,643	233,871	577,514	90.11
62	Ibuprofen tablet 200 mg	tablet	6,238,395	3,461,679	3,099,776	6,561,455	105.18
63	Ibuprofen tablet 400 mg	tablet	6,198,416	4,279,139	2,779,026	7,058,165	113.87
64	Isosorbid Dinitrat Tablet Sublingual 5 mg	tablet	339,400	165,409	223,954	389,363	114.72
65	Kalsium Laktat (Kalk) tablet 500 mg	tablet	14,158,526	9,396,940	6,910,407	16,307,347	115.18
66	Kaptopril tablet 12,5 mg	tablet	5,227,574	4,096,107	5,378,107	9,474,214	181.24
67	Kaptopril tablet 25 mg	tablet	9,492,399	4,083,011	5,008,147	9,091,158	95.77
68	Karbamazepim tablet 200 mg	tablet	393,788	293,547	172,111	465,658	118.25
69	Ketamin Injeksi 10 mg/ml	vial	-	-	-	-	#DIV/0!
70	Klofazimin kapsul 100 mg microzine	kapsul	-	-	-	-	#DIV/0!
71	Kloramfenikol kapsul 250 mg	kapsul	4,210,915	1,696,378	1,343,798	3,040,176	72.20
72	Kloramfenikol tetes telinga 3 %	botol	338,096	78,516	84,629	163,145	48.25
73	Kloraniramina mealeat (CTM) tablet 4 mg	tablet	57,679,043	31,868,943	25,781,860	57,650,803	99.95
74	Klorpromazin injeksi i.m 5 mg/ml-2ml (HCL)	ampul	920	200	1,770	1,970	214.13

**PERSENTASE KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	NAMA OBAT	SATUAN TERKECIL	KEBUTUHAN	TOTAL PENGGUNAAN	SISA STOK	JUMLAH OBAT/VAKSIN	PERSENTASE KETERSEDIAAN OBAT/VAKSIN
75	Klorpromazin injeksi i.m 25 mg/ml (HCL)	ampul	212	48	3,166	3,214	1,516.04
76	Klorpromazin tablet salut 25 mg (HCL)	tablet	375,250	217,860	261,358	479,218	127.71
77	Klorpromazin HCl tablet salut 100 mg (HCL)	tablet	541,993	368,854	363,667	732,521	135.15
78	Anti Malaria DOEN Kombinasi Pirimetamin 25 mg + Sulfadoxin 500 mg	tablet	200	-	-	-	-
79	Kotrimosazol Suspensi Kombinasi :Sulfametoksazol 200 mg + Trimetoprim 40 mg/ 5 ml	botol	814,545	386,472	376,882	763,354	93.72
80	Kotrimosazol DOEN I (dewasa) Kombinasi : Sulfametoksazol 400 mg, Trimetoprim 80 mg	tablet	7,513,595	4,551,634	4,165,330	8,716,964	116.02
81	Kotrimosazol DOEN II (pediatrik) Kombinasi : Sulfametoksazol 100 mg, Trimetoprim 20 mg	tablet	386,336	204,930	640,320	845,250	218.79
82	Kuinin (kina) tablet 200 mg	tablet	-	-	-	-	#DIV/0!
83	Kuinin Dihidroklorida injeksi 25%-2 ml	ampul	-	100	600	700	#DIV/0!
84	Lidokain injeksi 2% (HCL) + Epinefrin 1 : 80.000-2 ml	vial	461,820	189,484	103,750	293,234	63.50
85	Magnesium Sulfat inj (IV) 20%-25 ml	vial	78,250	13,488	6,060	19,548	24.98
86	Magnesium Sulfat inj (IV) 40%-25 ml	vial	123,059	14,162	3,808	17,970	14.60
87	Magnesium Sulfat serbuk 30 gram	sach	-	-	-	-	#DIV/0!
88	Mebendazol sirup 100 mg / 5 ml	botol	420	-	-	-	-
89	Mebendazol tablet 100 mg	tablet	2,410	760	2,058	2,818	116.93
90	Metilergometrin Maleat (Metilergometrin) tablet salut 0,125 mg	tablet	896,533	371,766	464,090	835,856	93.23
91	Metilergometrin Maleat injeksi 0,200 mg -1 ml	ampul	92,459	49,491	78,493	127,984	138.42
92	Metronidazol tablet 250 mg	tablet	2,487,111	1,191,404	1,044,617	2,236,021	89.90
93	Natrium Bikarbonat tablet 500 mg	tablet	4,532,536	1,662,591	3,712,421	5,375,012	118.59
94	Natrium Fluoresein tetes mata 2 %	botol	-	-	-	-	#DIV/0!
95	Natrium Klorida larutan infus 0,9 %	botol	92,398	55,546	60,076	115,622	125.14
96	Natrium Thiosulfat injeksi i.v. 25 %	ampul	-	-	-	-	#DIV/0!
97	Nistatin tablet salut 500.000 IU/g	tablet	107,087	53,174	103,354	156,528	146.17
98	Nistatin Vaginal tablet salut 100.000 IU/g	tablet	309,446	169,870	152,975	322,845	104.33
99	Obat Batuk hitam (O.B.H.)	botol	776,228	595,539	332,352	927,891	119.54
100	Oksitetrasiklin HCL salep mata 1 %	tube	358,356	180,012	93,539	273,551	76.33
101	Oksitetrasiklin injeksi i.m. 50 mg/ml-10 ml	vial	4,190	3,579	667	4,246	101.34
102	Oksitosin injeksi 10 IU/ml-1 ml	ampul	197,835	105,470	136,897	242,367	122.51
103	Paracetamol sirup 120 mg / 5 ml	botol	1,719,838	1,307,324	1,063,553	2,370,877	137.85
104	Paracetamol tablet 100 mg	tablet	666,557	771,269	271,832	1,043,101	156.49
105	Paracetamol tablet 500 mg	tablet	108,659,530	66,274,314	51,928,656	118,202,970	108.78
106	Pilokarpin tetes mata 2 % (HCL/Nitrat)	botol	200	9,799	441	10,240	5,120.00
107	Pirantel tab. Score (base) 125 mg	tablet	104,288	73,998	152,240	226,238	216.94
108	Piridoksin (Vitamin B6) tablet 10 mg (HCL)	tablet	20,379,710	9,859,149	12,507,306	22,366,455	109.75
109	Povidon Iodida larutan 10 %	botol	39,082	26,691	35,911	62,602	160.18
110	Povidon Iodida larutan 10 %	botol	41,997	26,043	16,825	42,868	102.08
111	Prednison tablet 5 mg	tablet	13,947,834	7,370,639	5,704,366	13,075,005	93.74
112	Primakuin tablet 15 mg	tablet	56,040	459	25,292	25,751	45.95
113	Propiltiourasil tablet 100 mg	tablet	72,014	40,450	66,189	106,639	148.08
114	Propanol tablet 40 mg (HCL)	tablet	133,835	37,556	147,524	185,080	138.29
115	Reserpin tablet 0,10 mg	tablet	8,600	1,050	14,856	15,906	184.95
116	Reserpin tablet 0,25 mg	tablet	1,785,850	802,900	822,068	1,624,968	90.99
117	Ringer Laktat larutan infus	botol	626,061	459,402	371,065	830,467	132.65
118	Salap 2-4, kombinasi: Asam Salisilat 2% + Belerang endap 4%	tube	251,144	121,734	225,280	347,014	138.17
119	Salisil bedak 2%	kotak	558,647	331,843	308,204	640,047	114.57
120	Serum Anti Bisa Ular Polivalen injeksi 5 ml (ABU I)	vial	5,401	2,080	740	2,820	52.21
121	Serum Anti Bisa Ular Polivalen injeksi 50 ml (ABU II)	vial	-	-	-	-	#DIV/0!
122	Serum Anti Difteri Injeksi 20.000 IU/vial (A.D.S.)	vial	272	76	133	209	76.84
123	Serum Anti Tetanus Injeksi 1.500 IU/ampul (A.T.S.)	ampul	12,860	5,185	3,060	8,245	64.11
124	Serum Anti Tetanus Injeksi 20.000 IU/vial (A.T.S.)	vial	233	30	-	30	12.88
125	Sianokobalamin (Vitamin B12) injeksi 500 mcg	ampul	491,287	392,372	169,625	561,997	114.39
126	Sulfasetamida Natrium tetes mata 15 %	botol	278,023	103,267	75,879	179,146	64.44
127	Tetrakain HCL tetes mata 0,5%	botol	820	1,612	1,330	2,942	358.78
128	Tetrasiklin kapsul 250 mg	kapsul	1,621,244	1,105,354	1,127,081	2,232,435	137.70
129	Tetrasiklin kapsul 500 mg	kapsul	2,199,226	860,793	569,180	1,429,973	65.02
130	Tiamin (vitamin B1) injeksi 100 mg/ml	ampul	109,445	50,753	31,438	82,191	75.10
131	Tiamin (vitamin B1) tablet 50 mg (HCL/Nitrat)	tablet	25,355,548	15,665,085	14,251,341	29,916,426	117.99
132	Tiopental Natrium serbuk injeksi 1000 mg/amp	ampul	-	-	-	-	#DIV/0!
133	Triheksifenidil tablet 2 mg	tablet	1,431,200	1,114,436	496,737	1,611,173	112.57
134	Vaksin Rabies Vero	vial	170	138	36	174	102.35
135	Vitamin B Kompleks tablet	tablet	29,117,969	19,788,360	15,921,671	35,710,031	122.64
VAKSIN							
136	BCG	vial	179,881	139,680	18,585	158,265	87.98
137	T T	vial	218,123	132,932	19,883	152,815	70.06
138	D T	vial	86,855	48,080	2,252	50,332	57.95
139	CAMPAK 10 Dosis	vial	252,840	200,458	23,828	224,286	88.71
140	POLIO 10 Dosis	vial	330,014	233,913	26,361	260,274	78.87
141	DPT-HB	vial	416,881	294,975	18,460	313,435	75.19
142	HEPATITIS B 0,5 ml ADS	vial	403,207	284,264	22,802	307,066	76.16
143	POLIO 20 Dosis	vial	27,504	17,613	3,003	20,616	74.96
144	CAMPAK 20 Dosis	vial	14,500	16,500	-	16,500	113.79

KETERANGAN :

Jumlah rata-rata kebutuhan obat	3,957,830
---------------------------------	-----------

TABEL 67

**JUMLAH SARANA KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	FASILITAS KESEHATAN	PEMILIKAN/PENGELOLA						JUMLAH
		KEMENKES	PEM.PROV	PEM.KAB/KOTA	TNI/POLRI	BUMN	SWASTA	
RUMAH SAKIT								
1	RUMAH SAKIT UMUM	1	2	41	13	4	193	254
2	RUMAH SAKIT KHUSUS	4	2	2	0	1	65	74
PUSKESMAS DAN JARINGANNYA								
1	PUSKESMAS RAWAT INAP			229				229
	- JUMLAH TEMPAT TIDUR			2,025				2,025
2	PUSKESMAS NON RAWAT INAP			821				821
3	PUSKESMAS KELILING			1016				1,016
4	PUSKESMAS PEMBANTU			1,603				1,603
SARANA PELAYANAN LAIN								
1	RUMAH BERSALIN						1.1	110
2	BALAI PENGOBATAN/KLINIK					10,201	17.6	1,800
3	PRAKTIK DOKTER BERSAMA						0.2	25
4	PRAKTIK DOKTER PERORANGAN						75.8	7,731
5	PRAKTIK PENGOBATAN TRADISIONAL						4.9	500
6	BANK DARAH RUMAH SAKIT						0.2	16
7	UNIT TRANSFUSI DARAH						0.2	19
SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN								
1	INDUSTRI FARMASI							8
2	INDUSTRI OBAT TRADISIONAL							19
3	USAHA KECIL OBAT TRADISIONAL							63
4	PRODUKSI ALAT KESEHATAN							12
5	PEDAGANG BESAR FARMASI							109
6	APOTEK							4,046
7	TOKO OBAT							1,205
8	PENYALUR ALAT KESEHATAN							113

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 67 A

**JUMLAH RUMAH SAKIT MENURUT KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	RUMAH SAKIT					
		UMUM	IBU ANAK/ BERSALIN	JIWA	PARU	KHUSUS LAINNYA	JUMLAH
1	KAB BOGOR	21	6				27
2	KAB SUKABUMI	8	-	-	-	-	8
3	KAB CIANJUR	3	1	-	-		4
4	KAB BANDUNG	9					9
5	KAB GARUT	6					6
6	KAB TASIKMALAYA	2					2
7	KAB CIAMIS	2	1	-	-	-	3
8	KAB KUNINGAN	8	-	-	-	-	8
9	KAB CIREBON	8	1	-	1	1	11
10	KAB MAJALENGKA	2	-	-	-	1	3
11	KAB SUMEDANG	2	-				2
12	KAB INDRAMAYU	7	-	-	-	-	7
13	KAB SUBANG	6	1				7
14	KAB PURWAKARTA	7	3			1	11
15	KAB KARAWANG	15	5				20
16	KAB BEKASI	31	13				44
17	KAB BANDUNG BARAT	4	1	1			6
18	KAB PANGANDARAAN	-	-	-	-	-	-
19	KOTA BOGOR	11	6				17
20	KOTA SUKABUMI	6	-	-	-	-	6
21	KOTA BANDUNG	20	7		1	6	34
22	KOTA CIREBON	5	4			2	11
23	KOTA BEKASI	32	6			1	39
24	KOTA DEPOK	16	3			1	20
25	KOTA CIMAH	7					7
26	KOTA TASIKMALAYA	7	6	-	-	-	13
27	KOTA BANJAR	3					3
	JAWA BARAT	248	64	1	2	13	328

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 67 B

**JUMLAH PUSKESMAS DENGAN PONED, TEMPAT TIDUR PUSKESMAS, PUSKESMAS KELILING DAN RUMAH SAKIT DENGAN PONEK,
DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS	PUSKESMAS TANPA PERAWATAN	PUSKESMAS DENGAN PERAWATAN		TEMPAT TIDUR PUSKESMAS PERAWATAN	PUSKESMAS DENGAN PONED		TEMPAT TIDUR PONED	PUSKESMAS PEMBANTU	PUSKESMAS KELILING			JUMLAH RUMAH SAKIT	RUMAH SAKIT DENGAN PONEK	
				JUMLAH	%		JUMLAH	%			RODA 4	RODA 2	PERAHU		JUMLAH	%
1	KAB. BOGOR	101	82	19	18.8	253	25	24.8	50	117	37			27	2	7.4
2	KAB. SUKABUMI	58	53	5	8.6		30	51.7		128	78			8	1	12.5
3	KAB. CIANJUR	45	37	8	17.8		25	5.6		116				4	1	25.0
4	KAB. BANDUNG	62	57	5	8.1	39	16	25.8		78	270			9		-
5	KAB. GARUT	65	50	15	23.1	317	30	46.2	50	136	48	86		6	1	16.7
6	KAB. TASIKMALAYA	40	25	15	37.5	264	28	70.0		153	8			2		-
7	KAB. CIAMIS	37	27	10	27.0		19	51.4		87	37	-	-	3	1	33.3
8	KAB. KUNINGAN	37	31	6	16.2	93	24	64.9	85	68	40	159	-	8	1	12.5
9	KAB. CIREBON	57	49	8	14.0	143	25	43.9		70	59	-	-	11	2	18.2
10	KAB. MAJALENGKA	32	23	9	28.1	124	28	87.5		71	41	-	-	3	-	-
11	KAB. SUMEDANG	32	26	6	18.8	133	14	43.8		69	6	-	-	2	1	50.0
12	KAB. INDRAMAYU	49	40	9	18.4	82	20	40.8	46	67	35	-	-	7	2	28.6
13	KAB. SUBANG	40	29	11	27.5		25	62.5		74				7		-
14	KAB. PURWAKARTA	20	18	2	10.0	20	10	50.0	-	44	20			11	10	90.9
15	KAB. KARAWANG	50	37	13	26.0	120	28	56.0		71	15			20		-
16	KAB. BEKASI	39	30	9	23.1		18	46.2		54				44		-
17	KAB. BANDUNG BARAT	31	26	5	16.1	52	12	38.7		64	31			6		-
18	KAB. PANGANDARAN	15	9	6	40.0	102	9	60.0		35				-	-	-
19	KOTA BOGOR	24	16	8	33.3	71	6	25.0	71	-	43	-		17	-	-
20	KOTA SUKABUMI	15	15	-	-	6	5	33.3	22.2	20	18			6		-
21	KOTA BANDUNG	73	73	-	-		5	6.8			45			34		-
22	KOTA CIREBON	22	22	-	-		5	22.7		16				11		-
23	KOTA BEKASI	31	27	4	12.9	48	7	22.6	48	24	11			39		-
24	KOTA DEPOK	32	30	2	6.3	140	6	18.8		4	42			20		-
25	KOTA CIMAHI	13	13	-	-	-	3	23.1	12	4	-	-	-	7	1	14.3
26	KOTA TASIKMALAYA	20	20	-	-	18	5	25.0		24	21			13		-
27	KOTA BANJAR	10	9	1	10.0		3	30.0		9				3		-
	JAWA BARAT	1,050	874	176	16.8	2,025	431	4.1	384	1,603	905	245	-	328	23	7.0

TABEL 68

**PERSENTASE SARANA KESEHATAN (RUMAH SAKIT) DENGAN KEMAMPUAN PELAYANAN GAWAT DARURAT (GADAR) LEVEL I
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH SARANA	MEMPUNYAI KEMAMPUAN YAN. GADAR LEVEL I	
			JUMLAH	%
1	RUMAH SAKIT UMUM	229	159	69
2	RUMAH SAKIT KHUSUS	50	46	92
JAWA BARAT		279	205	73

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 68 A

**PERSENTASE SARANA KESEHATAN (RUMAH SAKIT) DENGAN KEMAMPUAN PELAYANAN GAWAT DARURAT (GADAR)
LEVEL I , PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KAB/KOTA	JUMLAH SARANA	MEMPUNYAI KEMAMPUAN YAN. GADAR LEVEL I			
			RUMAH SAKIT UMUM	RUMAH SAKIT KHUSUS	TOTAL	%
1	KAB. BOGOR	25	19	6	25	100
2	KAB. SUKABUMI	7	7	0	7	100
3	KAB. CIANJUR	3	2	1	3	100
4	KAB. BANDUNG	7	7	0	7	100
5	KAB. GARUT	6	6	0	6	100
6	KAB. TASIKMALAYA	1	1	0	1	100
7	KAB. CIAMIS	4	3	1	4	100
8	KAB. KUNINGAN	7	7	0	7	100
9	KAB. CIREBON	10	7	3	10	100
10	KAB. MAJALENGKA	3	2	1	3	100
11	KAB. SUMEDANG	2	2	0	2	100
12	KAB. INDRAMAYU	6	6	0	6	100
13	KAB. SUBANG	8	7	1	8	100
14	KAB. PURWAKARTA	11	7	4	11	100
15	KAB. KARAWANG	20	17	3	20	100
16	KAB. BEKASI	44	31	13	44	100
17	KAB. BANDUNG BARAT	6	4	2	6	100
18	KAB. PANGANDARAN	-	-	-	-	-
19	KOTA BOGOR	16	10	6	16	100
20	KOTA SUKABUMI	6	6	0	6	100
21	KOTA BANDUNG	33	19	14	33	100
22	KOTA CIREBON	11	7	4	11	100
23	KOTA BEKASI	38	31	7	38	100
24	KOTA DEPOK	20	16	4	20	100
25	KOTA CIMAHI	6	6	0	6	100
26	KOTA TASIKMALAYA	13	7	6	13	100
27	KOTA BANJAR	3	3	0	3	100
	JAWA BARAT	316	240	76	316	100

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 69

**JUMLAH POSYANDU MENURUT STRATA, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	STRATA POSYANDU									POSYANDU AKTIF	
		PRATAMA		MADYA		PURNAMA		MANDIRI		JUMLAH	JUMLAH	%
		JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%			
1	KAB. BOGOR	157	6.61	2418	101.77	1393	58.63	898	37.79	4866	2291	47.08
2	KAB. SUKABUMI	43	1.81	946	39.81	1693	71.25	683	28.75	3365	2376	70.61
3	KAB. CIANJUR	0	0.00	1330	55.98	1232	51.85	295	12.42	2857	1527	53.45
4	KAB. BANDUNG	479	20.16	1830	77.02	1438	60.52	542	22.81	4289	1980	46.16
5	KAB. GARUT	119	5.01	2578	108.50	1010	42.51	293	12.33	4000	1303	32.58
6	KAB. TASIKMALAYA	689	29.00	1103	46.42	541	22.77	110	4.63	2443	651	26.65
7	KAB. CIAMIS	0	0.00	500	21.04	621	26.14	475	19.99	1596	1096	68.67
8	KAB. KUNINGAN	10	0.42	334	14.06	772	32.49	303	12.75	1419	1075	75.76
9	KAB. CIREBON	229	9.64	1111	46.76	1121	47.18	134	5.64	2595	1255	48.36
10	KAB. MAJALENGKA	316	13.30	476	20.03	596	25.08	73	3.07	1461	669	45.79
11	KAB. SUMEDANG	98	4.12	439	18.48	812	34.18	287	12.08	1636	1099	67.18
12	KAB. INDRAMAYU	0	0.00	1694	71.30	568	23.91	58	2.44	2320	626	26.98
13	KAB. SUBANG	0	1.14	26	30.17	566	50.44	996	18.25	1836	1261	68.68
14	KAB. PURWAKARTA	43	1.81	402	16.92	429	18.06	140	5.89	1014	569	56.11
15	KAB. KARAWANG	3	0.13	1445	60.82	682	28.70	152	6.40	2282	834	36.55
16	KAB. BEKASI	608	25.59	1208	50.84	502	21.13	214	9.01	2532	716	28.28
17	KAB. BANDUNG BARAT	0	0.00	889	37.42	1044	43.94	311	13.09	2244	1355	60.38
18	KAB. PANGANDARAN	1	0.04	344	14.48	154	6.48	25	1.05	524	179	34.16
19	KOTA BOGOR	1	0.04	385	16.20	418	17.59	175	7.37	979	593	60.57
20	KOTA SUKABUMI	8	0.34	162	6.82	142	5.98	140	5.89	452	282	62.39
21	KOTA BANDUNG	0	0.00	600	25.25	980	41.25	398	16.75	1978	1378	69.67
22	KOTA CIREBON	12	0.51	62	2.61	147	6.19	109	4.59	330	256	77.58
23	KOTA BEKASI	11	0.46	463	19.49	736	30.98	342	14.39	1552	1078	69.46
24	KOTA DEPOK	2	0.08	109	4.59	486	20.45	421	17.72	1018	907	89.10
25	KOTA CIMAH	1	0.04	64	2.69	288	12.12	45	1.89	398	333	83.67
26	KOTA TASIKMALAYA	15	0.63	383	16.12	293	12.33	159	6.69	850	452	53.18
27	KOTA BANJAR	0	0.00	11	0.46	110	4.63	78	3.28	199	188	94.47
	JAWA BARAT	2845	5.57	21312	41.76	18774	36.79	7856	15.39	51,035	26,329	51.59
	RASIO POSYANDU PER 100 BALITA									52		

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 70

**JUMLAH UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT (UKBM)
MENURUT KABUPATEN/KOTA 'PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	DESA/ KELURAHAN	UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT (UKBM)		
			POSKEDES	POLINDES	POSBINDU
1	KAB. BOGOR	434	81	55	496
2	KAB. SUKABUMI	386	183	130	366
3	KAB. CIANJUR	360	189	54	371
4	KAB. BANDUNG	280	146	0	599
5	KAB. GARUT	442	122	36	307
6	KAB. TASIKMALAYA	351	73	69	73
7	KAB. CIAMIS	265	139	0	202
8	KAB. KUNINGAN	376	209	8	388
9	KAB. CIREBON	424	361	201	417
10	KAB. MAJALENGKA	343	52	138	212
11	KAB. SUMEDANG	277	225	52	0
12	KAB. INDRAMAYU	317	122	112	412
13	KAB. SUBANG	253	151	210	340
14	KAB. PURWAKARTA	192	19	20	161
15	KAB. KARAWANG	309	89	51	276
16	KAB. BEKASI	187	53	13	300
17	KAB. BANDUNG BARAT	165	77	0	168
18	KAB. PANGANDARAN	93	46	46	54
19	KOTA BOGOR	68	0	0	417
20	KOTA SUKABUMI	33	0	0	196
21	KOTA BANDUNG	151	0	0	900
22	KOTA CIREBON	22	0	0	233
23	KOTA BEKASI	56	3	0	426
24	KOTA DEPOK	63	0	0	691
25	KOTA CIMAHI	15			225
26	KOTA TASIKMALAYA	69	17	17	247
27	KOTA BANJAR	25	38	0	87
	JAWA BARAT	5,956	2,395	1,212	8,564

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 71

**JUMLAH DESA SIAGA MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	DESA/KELURAHAN SIAGA					JUMLAH	%
			PRATAMA	MADYA	PURNAMA	MANDIRI			
1	KAB. BOGOR	434	139	224	54	17	434	100	
2	KAB. SUKABUMI	386	110	205	63	8	386	100	
3	KAB. CIANJUR	360	354	6	0	0	360	100	
4	KAB. BANDUNG	280	105	106	52	17	280	100	
5	KAB. GARUT	442	330	68	10	0	408	92.3	
6	KAB. TASIKMALAYA	351	208	97	37	9	351	100	
7	KAB. CIAMIS	265	109	93	37	26	265	100	
8	KAB. KUNINGAN	376	11	231	120	14	376	100	
9	KAB. CIREBON	424	237	148	27	9	421	99.3	
10	KAB. MAJALENGKA	343	144	131	66	2	343	100.0	
11	KAB. SUMEDANG	277	91	110	50	26	277	100	
12	KAB. INDRAMAYU	317	72	201	38	6	317	100	
13	KAB. SUBANG	253	0	13	102	138	253	100	
14	KAB. PURWAKARTA	192	120	64	6	2	192	100.0	
15	KAB. KARAWANG	309	147	148	11	3	309	100	
16	KAB. BEKASI	187	168	17	1	1	187	100	
17	KAB. BANDUNG BARAT	165	70	68	19	8	165	100	
18	KAB. PANGANDARAN	93	62	30	1	0	93	100	
19	KOTA BOGOR	68	14	45	9	0	68	100	
20	KOTA SUKABUMI	33	0	28	1	4	33	100	
21	KOTA BANDUNG	151	97	38	10	6	151	100.0	
22	KOTA CIREBON	22	2	11	6	3	22	100	
23	KOTA BEKASI	56	32	0	0	0	32	57	
24	KOTA DEPOK	63	3	29	18	13	63	100	
25	KOTA CIMAHI	15	0	9	4	2	15	100	
26	KOTA TASIKMALAYA	69	12	33	10	14	69	100	
27	KOTA BANJAR	25	0	11	14	0	25	100	
JAWA BARAT		5,956	2,637	2,164	766	328	5,895	98.98	

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 72

**JUMLAH TENAGA MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	UNIT KERJA	DR SPESIALIS ^a			DOKTER UMUM			JUMLAH			DOKTER GIGI			DOKTER SPESIALIS GIGI			JUMLAH			TOTAL MEDIS		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	KAB. BOGOR	394	270	664	184	340	524	578	610	1,188	22	134	156	9	23	32	31	157	188	609	767	1,376
2	KAB. SUKABUMI	-	-	-	38	49	87	38	49	87	5	14	19	-	-	-	5	14	19	43	63	106
3	KAB. CIANJUR	24	8	32	50	69	119	74	77	151	3	24	27	1	1	2	4	25	29	78	102	180
4	KAB. BANDUNG	50	40	90	56	124	180	106	164	270	14	56	70	2	2	4	16	58	74	122	222	344
5	KAB. GARUT	43	20	63	59	66	125	102	86	188	4	12	16	-	-	-	4	12	16	106	98	204
6	KAB. TASIKMALAYA	5	1	6	46	32	78	51	33	84	7	15	22	-	-	-	7	15	22	58	48	106
7	KAB. CIAMIS	22	7	29	16	13	29	38	20	58	-	3	3	1	-	1	1	3	4	39	23	62
8	KAB. KUNINGAN	36	13	49	49	65	114	85	78	163	8	19	27	-	-	-	8	19	27	93	97	190
9	KAB. CIREBON	93	46	139	108	111	219	201	157	358	7	35	42	2	-	2	9	35	44	210	192	402
10	KAB. MAJALENGKA	15	9	24	38	56	94	53	65	118	3	17	20	-	-	-	3	17	20	56	82	138
11	KAB. SUMEDANG	46	21	67	46	81	127	92	102	194	8	22	30	2	-	2	10	22	32	102	124	226
12	KAB. INDRAMAYU	36	12	48	53	75	128	89	87	176	8	34	42	1	1	2	9	35	44	98	122	220
13	KAB. SUBANG	19	9	28	43	26	69	62	35	97	2	19	21	1	-	1	3	19	22	65	54	119
14	KAB. PURWAKARTA	23	35	58	32	49	81	55	84	139	6	20	26	2	-	2	8	20	28	63	104	167
15	KAB. KARAWANG	325	122	447	130	89	219	455	211	666	19	35	54	5	1	6	24	36	60	479	247	726
16	KAB. BEKASI	264	137	401	175	150	325	439	287	726	21	83	104	3	10	13	24	93	117	463	380	843
17	KAB. BANDUNG BARAT	18	16	34	132	83	215	150	99	249	9	32	41	-	-	-	9	32	41	159	131	290
18	KAB. PANGANDARAN	-	-	-	7	11	18	7	11	18	3	3	6	-	-	-	3	3	6	10	14	24
19	KOTA BOGOR	348	208	556	91	210	301	439	418	857	17	90	107	17	19	36	34	109	143	473	527	1,000
20	KOTA SUKABUMI	106	35	141	51	64	115	157	99	256	4	22	26	2	2	4	6	24	30	163	123	286
21	KOTA BANDUNG	640	444	1,084	161	322	483	801	766	1,567	8	77	85	-	-	-	8	77	85	809	843	1,652
22	KOTA CIREBON	88	35	123	45	67	112	133	102	235	10	27	37	11	10	21	21	37	58	154	139	293
23	KOTA BEKASI	219	117	336	83	198	281	302	315	617	11	97	108	8	26	34	19	123	142	321	438	759
24	KOTA DEPOK	288	233	521	122	246	368	410	479	889	13	101	114	11	34	45	24	135	159	434	614	1,048
25	KOTA CIMAH	102	79	181	42	108	150	144	187	331	4	26	30	7	1	8	11	27	38	155	214	369
26	KOTA TASIKMALAYA	112	67	179	46	55	101	158	122	280	6	21	27	4	3	7	10	24	34	168	146	314
27	KOTA BANJAR	25	12	37	16	17	33	41	29	70	2	3	5	-	-	-	2	3	5	43	32	75
	JUMLAH JAWA BARAT	3,341	1,996	5,337	1,919	2,776	4,695	5,260	4,772	10,032	224	1,041	1,265	89	133	222	313	1,174	1,487	5,573	5,946	11,519

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 72 A

**JUMLAH TENAGA MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	UNIT KERJA	DR SPESIALIS ^a			DOKTER UMUM			TOTAL			DOKTER GIGI			DOKTER SPESIALIS GIGI			TOTAL			
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
I	PUSKESMAS																			
1	KAB. BOGOR	-	-	-	52	119	171	52	119	171	5	64	69	-	-	-	5	64	69	
2	KAB. SUKABUMI			-	38	49	87	38	49	87	5	14	19			-	5	14	19	
3	KAB. CIANJUR			-	30	42	72	30	42	72	2	22	24	-	-	-	2	22	24	
4	KAB. BANDUNG	-	-	-	33	93	126	33	93	126	9	52	61	-	-	-	9	52	61	
5	KAB. GARUT	-	-	-	40	54	94	40	54	94	4	12	16	-	-	-	4	12	16	
6	KAB. TASIKMALAYA	-	-	-	42	28	70	42	28	70	6	15	21	-	-	-	6	15	21	
7	KAB. CIAMIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	KAB. KUNINGAN	-	-	-	25	36	61	25	36	61	5	13	18	-	-	-	5	13	18	
9	KAB. CIREBON	-	-	-	42	53	95	42	53	95	4	25	29	-	-	-	4	25	29	
10	KAB. MAJALENGKA	-	-	-	27	42	69	27	42	69	2	13	15	-	-	-	2	13	15	
11	KAB. SUMEDANG	-	-	-	6	13	19	6	13	19	2	3	5	-	-	-	2	3	5	
12	KAB. INDRAMAYU	-	-	-	15	25	40	15	25	40	3	13	16			-	3	13	16	
13	KAB. SUBANG			-	29	15	44	29	15	44	2	16	18			-	2	16	18	
14	KAB. PURWAKARTA	-	-	-	15	29	44	15	29	44	4	15	19	-	-	-	4	15	19	
15	KAB. KARAWANG	97	35	132	38	27	65	135	62	197	5	11	16	1	-	1	6	11	17	
16	KAB. BEKASI	-	-	-	26	59	85	26	59	85	2	37	39	-	-	-	2	37	39	
17	KAB. BANDUNG BARAT	-	-	-	18	38	56	18	38	56	6	26	32	-	-	-	6	26	32	
18	KAB. PANGANDARAN	-	-	-	7	11	18	7	11	18	3	3	6	-	-	-	3	3	6	
19	KOTA BOGOR	-	1	1	8	73	81	8	74	82	3	40	43	-	-	-	3	40	43	
20	KOTA SUKABUMI	-	-	-	10	14	24	10	14	24	4	13	17	-	-	-	4	13	17	
21	KOTA BANDUNG	-	-	-	26	103	129	26	103	129	8	77	85	-	-	-	8	77	85	
22	KOTA CIREBON	-	-	-	11	30	41	11	30	41	3	18	21	-	-	-	3	18	21	
23	KOTA BEKASI	1	2	3	18	99	117	19	101	120	5	71	76	-	2	2	5	73	78	
24	KOTA DEPOK	-	-	-	23	102	125	23	102	125	1	52	53	-	-	-	1	52	53	
25	KOTA CIMAHI	-	1	1	3	27	30	3	28	31	-	13	13	-	-	-	-	13	13	
26	KOTA TASIKMALAYA	-	-	-	11	18	29	11	18	29	4	10	14	-	-	-	4	10	14	
27	KOTA BANJAR	-	-	-	7	5	12	7	5	12	1	-	1	-	-	-	1	-	1	
	SUB JUMLAH I (PUSKESMAS)	98	39	137	600	1,204	1,804	698	1,243	1,941	98	648	746	1	2	3	99	650	749	

**JUMLAH TENAGA MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	UNIT KERJA	DR SPESIALIS ^a			DOKTER UMUM			TOTAL			DOKTER GIGI			DOKTER SPESIALIS GIGI			TOTAL		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
II	RUMAH SAKIT																		
1	KAB. BOGOR	393	262	655	132	219	351	525	481	1,006	17	68	85	9	23	32	26	91	117
2	KAB. SUKABUMI	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	KAB. CIANJUR	24	8	32	20	27	47	44	35	79	1	2	3	1	1	2	2	3	5
4	KAB. BANDUNG	50	40	90	23	31	54	73	71	144	5	4	9	2	2	4	7	6	13
5	KAB. GARUT	43	20	63	19	12	31	62	32	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	KAB. TASIKMALAYA	5	1	6	4	4	8	9	5	14	1	-	1	-	-	-	1	-	1
7	KAB. CIAMIS	22	7	29	16	13	29	38	20	58	-	3	3	1	-	1	1	3	4
8	KAB. KUNINGAN	36	13	49	24	29	53	60	42	102	3	6	9	-	-	-	3	6	9
9	KAB. CIREBON	93	46	139	65	58	123	158	104	262	3	10	13	2	-	2	5	10	15
10	KAB. MAJALENGKA	15	9	24	11	14	25	26	23	49	1	4	5	-	-	-	1	4	5
11	KAB. SUMEDANG	27	11	38	10	18	28	37	29	66	1	2	3	1	-	1	2	2	4
12	KAB. INDRAMAYU	36	12	48	38	50	88	74	62	136	5	21	26	1	1	2	6	22	28
13	KAB. SUBANG	19	9	28	14	11	25	33	20	53	-	3	3	1	-	1	1	3	4
14	KAB. PURWAKARTA	23	35	58	17	20	37	40	55	95	2	5	7	2		2	4	5	9
15	KAB. KARAWANG	228	87	315	92	62	154	320	149	469	14	24	38	4	1	5	18	25	43
16	KAB. BEKASI	264	137	401	149	91	240	413	228	641	19	46	65	3	10	13	22	56	78
17	KAB. BANDUNG BARAT	18	16	34	16	11	27	34	27	61	2	6	8			-	2	6	8
18	KAB. PANGANDARAN			-			-	-	-	-			-			-	-	-	-
19	KOTA BOGOR	348	207	555	83	137	220	431	344	775	14	50	64	17	19	36	31	69	100
20	KOTA SUKABUMI	106	35	141	41	50	91	147	85	232	-	9	9	2	2	4	2	11	13
21	KOTA BANDUNG	640	444	1,084	135	219	354	775	663	1,438			-			-	-	-	-
22	KOTA CIREBON	88	35	123	34	37	71	122	72	194	7	9	16	11	10	21	18	19	37
23	KOTA BEKASI	218	115	333	65	99	164	283	214	497	6	26	32	8	24	32	14	50	64
24	KOTA DEPOK	288	233	521	99	144	243	387	377	764	12	49	61	11	34	45	23	83	106
25	KOTA CIMAH	102	78	180	39	81	120	141	159	300	4	13	17	7	1	8	11	14	25
26	KOTA TASIKMALAYA	112	67	179	35	37	72	147	104	251	2	11	13	4	3	7	6	14	20
27	KOTA BANJAR	25	12	37	9	12	21	34	24	58	1	3	4	-	-	-	1	3	4
	SUB JUMLAH II (RUMAH SAKIT)	3,223	1,939	5,162	1,190	1,486	2,676	4,413	3,425	7,838	120	374	494	87	131	218	207	505	712

**JUMLAH TENAGA MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	UNIT KERJA	DR SPESIALIS ^a			DOKTER UMUM			TOTAL			DOKTER GIGI			DOKTER SPESIALIS GIGI			TOTAL		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
III	SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN																		
1	KAB. BOGOR	1	8	9	-	2	2	1	10	11	-	2	2	-	-	-	-	2	2
2	KAB. SUKABUMI			-			-	-	-	-			-			-	-	-	-
3	KAB. CIANJUR			-			-	-	-	-			-			-	-	-	-
4	KAB. BANDUNG			-			-	-	-	-			-			-	-	-	-
5	KAB. GARUT			-			-	-	-	-			-			-	-	-	-
6	KAB. TASIKMALAYA			-			-	-	-	-			-			-	-	-	-
7	KAB. CIAMIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	KAB. KUNINGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	KAB. CIREBON	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	KAB. MAJALENGKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	KAB. SUMEDANG	19	10	29	30	50	80	49	60	109	5	17	22	1	-	1	6	17	23
12	KAB. INDRAMAYU			-			-	-	-	-			-			-	-	-	-
13	KAB. SUBANG			-			-	-	-	-			-			-	-	-	-
14	KAB. PURWAKARTA			-			-	-	-	-			-			-	-	-	-
15	KAB. KARAWANG			-			-	-	-	-			-			-	-	-	-
16	KAB. BEKASI			-			-	-	-	-			-			-	-	-	-
17	KAB. BANDUNG BARAT	-	-	-	98	34	132	98	34	132	1	-	1			-	1	-	1
18	KAB. PANGANDARAN			-			-	-	-	-			-			-	-	-	-
19	KOTA BOGOR			-			-	-	-	-			-			-	-	-	-
20	KOTA SUKABUMI			-			-	-	-	-			-			-	-	-	-
21	KOTA BANDUNG			-			-	-	-	-			-			-	-	-	-
22	KOTA CIREBON			-			-	-	-	-			-			-	-	-	-
23	KOTA BEKASI			-			-	-	-	-			-			-	-	-	-
24	KOTA DEPOK			-			-	-	-	-			-			-	-	-	-
25	KOTA CIMAHI			-			-	-	-	-			-			-	-	-	-
26	KOTA TASIKMALAYA			-			-	-	-	-			-			-	-	-	-
27	KOTA BANJAR			-			-	-	-	-			-			-	-	-	-
	SUB JUMLAH III	20	18	38	129	86	215	149	104	253	6	19	25	1	-	1	7	19	26
	JAWA BARAT	3,341	1,996	5,337	1,919	2,776	4,695	5,260	4,772	10,032	224	1,041	1,265	89	133	222	313	1,174	1,487
	RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK			11.43			10.05			21.48			2.71			0.48			3.18

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

Keterangan : ^a termasuk S3

TABEL 73

**JUMLAH TENAGA KEPERAWATAN DI FASILITAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	UNIT KERJA	BIDAN	PERAWAT ^a			PERAWAT GIGI			TOTAL KEPERAWATAN		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	KAB. BOGOR	938	343	615	958	13	45	58	356	1,598	1,954
2	KAB. SUKABUMI	984	567	745	1,312	18	34	52	585	1,763	2,348
3	KAB. CIANJUR	850	408	453	861	10	27	37	418	1,330	1,748
4	KAB. BANDUNG	581	101	208	309	8	59	67	109	848	957
5	KAB. GARUT	607	615	621	1,236	10	57	67	625	1,285	1,910
6	KAB. TASIKMALAYA	623	253	201	454	24	53	77	277	877	1,154
7	KAB. CIAMIS	454	252	290	542	12	50	62	264	794	1,058
8	KAB. KUNINGAN	669	323	602	925	6	31	37	329	1,302	1,631
9	KAB. CIREBON	915	607	1,127	1,734	19	38	57	626	2,080	2,706
10	KAB. MAJALENGKA	560	276	420	696	11	32	43	287	1,012	1,299
11	KAB. SUMEDANG	479	200	480	680	13	27	40	213	986	1,199
12	KAB. INDRAMAYU	1,057	427	491	918	5	20	25	432	1,568	2,000
13	KAB. SUBANG	922	436	448	884	11	42	53	447	1,412	1,859
14	KAB. PURWAKARTA	400	209	356	565	3	21	24	212	777	989
15	KAB. KARAWANG	1,142	592	981	1,573	9	22	31	601	2,145	2,746
16	KAB. BEKASI	1,039	460	1,095	1,555	3	42	45	463	2,176	2,639
17	KAB. BANDUNG BARAT	455	137	240	377	3	36	39	140	731	871
18	KAB. PANGANDARAN	91	58	72	130	4	12	16	62	175	237
19	KOTA BOGOR	473	569	1,602	2,171	9	62	71	578	2,137	2,715
20	KOTA SUKABUMI	318	384	679	1,063	1	20	21	385	1,017	1,402
21	KOTA BANDUNG	877	946	3,411	4,357	4	46	50	950	4,334	5,284
22	KOTA CIREBON	74	410	715	1,125	9	29	38	419	818	1,237
23	KOTA BEKASI	383	197	792	989	2	44	46	199	1,219	1,418
24	KOTA DEPOK	629	304	2,074	2,378	6	70	76	310	2,773	3,083
25	KOTA CIMAHI	218	339	854	1,193	1	32	33	340	1,104	1,444
26	KOTA TASIKMALAYA	328	343	546	889	15	54	69	358	928	1,286
27	KOTA BANJAR	85	61	81	142	1	10	11	62	176	238
	JAWA BARAT	16,151	9,817	20,199	30,016	230	1,015	1,245	10,047	37,365	47,412

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 73 A

**JUMLAH TENAGA KEPERAWATAN DI FASILITAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	UNIT KERJA	BIDAN	PERAWAT ³			PERAWAT GIGI		
			L	P	L+P	L	P	L+P
I	PUSKESMAS							
1	KAB. BOGOR	835	125	315	440	11	40	51
2	KAB. SUKABUMI	882	302	207	509	17	25	42
3	KAB. CIANJUR	747	190	153	343	8	22	30
4	KAB. BANDUNG	564	87	172	259	7	56	63
5	KAB. GARUT	543	290	301	591	9	51	60
6	KAB. TASIKMALAYA	606	239	165	404	23	50	73
7	KAB. CIAMIS	399	162	160	322	12	45	57
8	KAB. KUNINGAN	472	97	121	218	3	21	24
9	KAB. CIREBON	683	179	351	530	17	26	43
10	KAB. MAJALENGKA	513	154	198	352	10	29	39
11	KAB. SUMEDANG	386	75	133	208	11	15	26
12	KAB. INDRAMAYU	553	238	231	469	5	17	22
13	KAB. SUBANG	461	218	224	442			-
14	KAB. PURWAKARTA	336	77	117	194	1	18	19
15	KAB. KARAWANG	716	153	127	280	9	15	24
16	KAB. BEKASI	606	92	228	320	-	23	23
17	KAB. BANDUNG BARAT	390	61	172	233	3	34	37
18	KAB. PANGANDARAN	91	58	72	130	4	12	16
19	KOTA BOGOR	126	19	91	110	1	22	23
20	KOTA SUKABUMI	105	34	74	108	-	14	14
21	KOTA BANDUNG	344	37	180	217	4	46	50
22	KOTA CIREBON	13	30	101	131	8	16	24
23	KOTA BEKASI	199	26	146	172	2	36	38
24	KOTA DEPOK	177	14	130	144	2	26	28
25	KOTA CIMAH	49	8	41	49	-	17	17
26	KOTA TASIKMALAYA	138	71	110	181	11	41	52
27	KOTA BANJAR	66	18	34	52	1	10	11
					-			-
	SUB JUMLAH I (PUSKESMAS)	11,000	3,054	4,354	7,408	179	727	906
II	RUMAH SAKIT							
1	KAB. BOGOR	103	218	300	518	2	5	7
2	KAB. SUKABUMI	102	265	538	803	1	9	10
3	KAB. CIANJUR	103	218	300	518	2	5	7
4	KAB. BANDUNG	17	14	36	50	1	3	4
5	KAB. GARUT	64	325	320	645	1	6	7
6	KAB. TASIKMALAYA	17	14	36	50	1	3	4
7	KAB. CIAMIS	55	90	130	220	-	5	5
8	KAB. KUNINGAN	197	226	481	707	3	10	13
9	KAB. CIREBON	232	428	776	1,204	2	12	14
10	KAB. MAJALENGKA	47	122	222	344	1	3	4
11	KAB. SUMEDANG	93	125	347	472	2	12	14
12	KAB. INDRAMAYU	504	189	260	449	-	3	3
13	KAB. SUBANG	461	218	224	442	11	42	53
14	KAB. PURWAKARTA	64	132	239	371	2	3	5
15	KAB. KARAWANG	426	439	854	1,293	-	7	7
16	KAB. BEKASI	433	368	867	1,235	3	19	22
17	KAB. BANDUNG BARAT	65	76	68	144	-	2	2
18	KAB. PANGANDARAN	-	-	-	-	-	-	-
19	KOTA BOGOR	347	550	1,511	2,061	8	40	48
20	KOTA SUKABUMI	213	350	605	955	1	6	7
21	KOTA BANDUNG	533	909	3,231	4,140			-
22	KOTA CIREBON	61	380	614	994	1	13	14
23	KOTA BEKASI	184	171	646	817	-	8	8
24	KOTA DEPOK	452	290	1,944	2,234	4	44	48
25	KOTA CIMAH	169	331	813	1,144	1	15	16
26	KOTA TASIKMALAYA	190	272	436	708	4	13	17
27	KOTA BANJAR	19	43	47	90	-	-	-
	SUB JUMLAH II (RUMAH SAKIT)	5,151	6,763	15,845	22,608	51	288	339
	JAWA BARAT	16,151	9,817	20,199	30,016	230	1,015	1,245
	RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK	34.1			63.4			2.6

TABEL 74

**JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN FASILITAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	UNIT KERJA	TENAGA KEFARMASIAN								
		TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN ^a			APOTEKER			TOTAL		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1	KAB. BOGOR	65	282	347	16	79	95	81	361	442
2	KAB. SUKABUMI	1	13	14	7	4	11	8	17	25
3	KAB. CIANJUR	12	42	54	5	11	16	17	53	70
4	KAB. BANDUNG	24	97	121	5	13	18	29	110	139
5	KAB. GARUT	28	46	32	11	14	25	39	60	99
6	KAB. TASIKMALAYA	5	19	24	3	9	12	8	28	36
7	KAB. CIAMIS	8	28	36	3	10	13	11	38	49
8	KAB. KUNINGAN	14	71	85	7	33	40	21	104	125
9	KAB. CIREBON	45	170	215	11	23	34	56	193	249
10	KAB. MAJALENGKA	15	41	56	4	2	6	19	43	62
11	KAB. SUMEDANG	27	47	74	1	6	7	28	53	81
12	KAB. INDRAMAYU	5	47	35	3	6	8	6	37	43
13	KAB. SUBANG	12	32	44	2	12	14	14	44	58
14	KAB. PURWAKARTA	14	37	51	9	11	20	23	48	71
15	KAB. KARAWANG	65	207	297	9	37	52	74	244	349
16	KAB. BEKASI	6	56	62	-	14	14	6	70	76
17	KAB. BANDUNG BARAT	5	41	46	5	12	17	10	53	63
18	KAB. PANGANDARAN	3	10	13	-	-	-	3	10	13
19	KOTA BOGOR	65	207	272	12	63	75	77	270	347
20	KOTA SUKABUMI	53	163	216	16	27	43	69	190	259
21	KOTA BANDUNG	66	212	303	7	39	52	73	251	355
22	KOTA CIREBON	29	125	154	10	29	39	39	154	193
23	KOTA BEKASI	25	166	191	1	58	59	26	224	250
24	KOTA DEPOK	33	350	383	4	72	76	37	422	459
25	KOTA CIMAHI	21	108	129	6	18	24	27	126	153
26	KOTA TASIKMALAYA	42	101	143	12	16	28	54	117	171
27	KOTA BANJAR	12	33	45	1	7	8	13	40	53
	JUMLAH	700	2,751	3,442	170	625	806	870	3,376	4,248

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 74 A

**JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN FASILITAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	UNIT KERJA	TENAGA KEFARMASIAN								
		TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN ^a			APOTEKER			TOTAL		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
I	PUSKESMAS									
1	KAB. BOGOR	3	20	23	-	3	3	3	23	26
2	KAB. SUKABUMI	1	13	14	7	4	11	8	17	25
3	KAB. CIANJUR	4	14	18	1	3	4	5	17	22
4	KAB. BANDUNG	8	29	37	-	-	-	8	29	37
5	KAB. GARUT	11	35	4	9	8	17	20	43	63
6	KAB. TASIKMALAYA	2	17	19	3	8	11	5	25	30
7	KAB. CIAMIS	3	14	17	1	4	5	4	18	22
8	KAB. KUNINGAN	3	14	17	1	3	4	4	17	21
9	KAB. CIREBON	20	64	84	1	1	2	21	65	86
10	KAB. MAJALENGKA	7	21	28	-	-	-	7	21	28
11	KAB. SUMEDANG	4	14	18	-	-	-	4	14	18
12	KAB. INDRAMAYU	1	16	-	1	-	-	-	-	-
13	KAB. SUBANG	7	20	27	1	5	6	8	25	33
14	KAB. PURWAKARTA	5	17	22	4	4	8	9	21	30
15	KAB. KARAWANG	4	25	29	2	3	5	6	28	34
16	KAB. BEKASI	3	28	31	-	7	7	3	35	38
17	KAB. BANDUNG BARAT	2	26	28	4	6	10	6	32	38
18	KAB. PANGANDARAN	3	10	13	-	-	-	3	10	13
19	KOTA BOGOR	6	25	31	-	5	5	6	30	36
20	KOTA SUKABUMI	27	88	115	8	14	22	35	102	137
21	KOTA BANDUNG	5	30	35	-	5	5	5	35	40
22	KOTA CIREBON	6	27	33	3	7	10	9	34	43
23	KOTA BEKASI	4	16	20	-	13	13	4	29	33
24	KOTA DEPOK	8	36	44	-	10	10	8	46	54
25	KOTA CIMAHI	4	19	23	-	1	1	4	20	24
26	KOTA TASIKMALAYA	5	13	18	1	1	2	6	14	20
27	KOTA BANJAR			-			-	-	-	-
	SUB JUMLAH I (PUSKESMAS)	156	651	748	47	115	161	203	766	909
II	RUMAH SAKIT									
1	KAB. BOGOR	62	262	324	16	76	92	78	338	416
2	KAB. SUKABUMI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	KAB. CIANJUR	8	28	36	4	8	12	12	36	48
4	KAB. BANDUNG	16	68	84	5	13	18	21	81	102
5	KAB. GARUT	17	11	28	2	6	8	19	17	36
6	KAB. TASIKMALAYA	3	2	5	-	1	1	3	3	6
7	KAB. CIAMIS	5	14	19	2	6	8	7	20	27
8	KAB. KUNINGAN	11	57	68	6	30	36	17	87	104
9	KAB. CIREBON	25	106	131	10	22	32	35	128	163
10	KAB. MAJALENGKA	8	20	28	4	2	6	12	22	34
11	KAB. SUMEDANG	23	33	56	1	6	7	24	39	63
12	KAB. INDRAMAYU	4	31	35	2	6	8	6	37	43
13	KAB. SUBANG	5	12	17	1	7	8	6	19	25
14	KAB. PURWAKARTA	9	20	29	5	7	12	14	27	41
15	KAB. KARAWANG	61	182	268	7	34	47	68	216	315
16	KAB. BEKASI	3	28	31	-	7	7	3	35	38
17	KAB. BANDUNG BARAT	3	15	18	1	6	7	4	21	25
18	KAB. PANGANDARAN			-			-	-	-	-
19	KOTA BOGOR	59	182	241	12	58	70	71	240	311
20	KOTA SUKABUMI	26	75	101	8	13	21	34	88	122
21	KOTA BANDUNG	61	182	268	7	34	47	68	216	315
22	KOTA CIREBON	23	98	121	7	22	29	30	120	150
23	KOTA BEKASI	21	150	171	1	45	46	22	195	217
24	KOTA DEPOK	25	314	339	4	62	66	29	376	405
25	KOTA CIMAHI	17	89	106	6	17	23	23	106	129
26	KOTA TASIKMALAYA	37	88	125	11	15	26	48	103	151
27	KOTA BANJAR	12	33	45	1	7	8	13	40	53
	SUB JUMLAH II (RUMAH SAKIT)	544	2,100	2,694	123	510	645	667	2,610	3,339
	JAWA BARAT	700	2,751	3,442	170	625	806	870	3,376	4,248
	RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK			7.3689			1.7256			9.0945

TABEL 75

**JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT DAN KESEHATAN LINGKUNGAN
DI FASILITAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	UNIT KERJA	KESEHATAN MASYARAKAT			KESEHATAN LINGKUNGAN		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	KAB. BOGOR	64	92	156	44	42	86
2	KAB. SUKABUMI	51	11	62	33	19	52
3	KAB. CIANJUR	6	13	19	18	12	30
4	KAB. BANDUNG	7	2	9	22	32	54
5	KAB. GARUT	14	39	53	17	23	40
6	KAB. TASIKMALAYA	8	5	13	12	15	27
7	KAB. CIAMIS	9	15	24	13	18	31
8	KAB. KUNINGAN	9	16	25	12	24	36
9	KAB. CIREBON	29	29	58	24	58	82
10	KAB. MAJALENGKA	15	25	40	20	24	44
11	KAB. SUMEDANG	22	19	41	18	25	43
12	KAB. INDRAMAYU	33	29	62	15	16	31
13	KAB. SUBANG	23	15	38	20	20	40
14	KAB. PURWAKARTA	5	10	15	9	12	21
15	KAB. KARAWANG	16	28	44	15	12	27
16	KAB. BEKASI	8	35	43	11	21	32
17	KAB. BANDUNG BARAT	5	18	23	5	17	22
18	KAB. PANGANDARAN	4	7	11	3	4	7
19	KOTA BOGOR	48	88	136	21	35	56
20	KOTA SUKABUMI	12	13	25	8	15	23
21	KOTA BANDUNG	33	52	85	38	49	87
22	KOTA CIREBON	8	21	29	13	27	40
23	KOTA BEKASI	-	42	42	9	42	51
24	KOTA DEPOK	7	58	65	11	26	37
25	KOTA CIMAHI	2	11	13	7	10	17
26	KOTA TASIKMALAYA	12	20	32	18	14	32
27	KOTA BANJAR	22	15	37	5	5	10
	JAWA BARAT	472	728	1,200	441	617	1,058

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 75 A

**JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT DAN KESEHATAN LINGKUNGAN DI FASILITAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	UNIT KERJA	KESEHATAN MASYARAKAT			KESEHATAN LINGKUNGAN		
		L	P	L+P	L	P	L+P
I	PUSKESMAS						
1	KAB. BOGOR	26	32	58	22	21	43
2	KAB. SUKABUMI	51	11	62	33	19	52
3	KAB. CIANJUR	2	8	10	18	12	30
4	KAB. BANDUNG	4	-	4	21	26	47
5	KAB. GARUT	12	34	46	13	22	35
6	KAB. TASIKMALAYA	6	5	11	11	15	26
7	KAB. CIAMIS	6	9	15	13	15	28
8	KAB. KUNINGAN	6	2	8	10	21	31
9	KAB. CIREBON	14	10	24	22	48	70
10	KAB. MAJALENGKA	8	21	29	18	22	40
11	KAB. SUMEDANG	15	13	28	14	20	34
12	KAB. INDRAMAYU	28	24	52	12	15	27
13	KAB. SUBANG	23	13	36	19	18	37
14	KAB. PURWAKARTA	3	7	10	8	11	19
15	KAB. KARAWANG	9	19	28	13	10	23
16	KAB. BEKASI	2	14	16	8	16	24
17	KAB. BANDUNG BARAT	4	15	19	4	15	19
18	KAB. PANGANDARAN	4	7	11	3	4	7
19	KOTA BOGOR	25	61	86	12	29	41
20	KOTA SUKABUMI	4	9	13	6	10	16
21	KOTA BANDUNG	1	6	7	16	35	51
22	KOTA CIREBON	5	14	19	10	15	25
23	KOTA BEKASI	-	21	21	7	30	37
24	KOTA DEPOK	1	5	6	4	14	18
25	KOTA CIMAH	-	2	2	3	9	12
26	KOTA TASIKMALAYA	-	-	-	8	10	18
27	KOTA BANJAR	-	1	1	3	2	5
	SUB JUMLAH I (PUSKESMAS)	259	363	622	331	484	815
II	RUMAH SAKIT						
1	KAB. BOGOR	37	59	96	22	20	42
2	KAB. SUKABUMI			-			-
3	KAB. CIANJUR	4	5	9	-	-	-
4	KAB. BANDUNG	3	2	5	1	6	7
5	KAB. GARUT	2	5	7	4	1	5
6	KAB. TASIKMALAYA	2	-	2	1	-	1
7	KAB. CIAMIS	2	6	8	-	3	3
8	KAB. KUNINGAN	3	14	17	2	3	5
9	KAB. CIREBON	13	19	32	2	8	10
10	KAB. MAJALENGKA	7	4	11	2	2	4
11	KAB. SUMEDANG	7	4	11	4	2	6
12	KAB. INDRAMAYU	5	5	10	3	1	4
13	KAB. SUBANG	-	2	2	1	2	3
14	KAB. PURWAKARTA	2	3	5	1	1	2
15	KAB. KARAWANG	7	9	16	2	2	4
16	KAB. BEKASI	6	21	27	3	5	8
17	KAB. BANDUNG BARAT	1	3	4	1	2	3
18	KAB. PANGANDARAN	-		-			-
19	KOTA BOGOR	23	27	50	9	6	15
20	KOTA SUKABUMI	8	4	12	2	5	7
21	KOTA BANDUNG	32	46	78	22	14	36
22	KOTA CIREBON	3	7	10	3	12	15
23	KOTA BEKASI	-	21	21	2	11	13
24	KOTA DEPOK	6	53	59	7	12	19
25	KOTA CIMAH	2	9	11	4	1	5
26	KOTA TASIKMALAYA	6	10	16	5	2	7
27	KOTA BANJAR	14	8	22	1	3	4
	SUB JUMLAH II (RUMAH SAKIT)	195	346	541	104	124	228

NO	UNIT KERJA	KESEHATAN MASYARAKAT			KESEHATAN LINGKUNGAN		
		L	P	L+P	L	P	L+P
III SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN							
1	KAB. BOGOR	1	1	2	-	1	1
2	KAB. SUKABUMI			-			-
3	KAB. CIANJUR			-			-
4	KAB. BANDUNG			-			-
5	KAB. GARUT			-			-
6	KAB. TASIKMALAYA			-			-
7	KAB. CIAMIS	1	-	1	-	-	-
8	KAB. KUNINGAN	-	-	-	-	-	-
9	KAB. CIREBON	2	-	2	-	2	2
10	KAB. MAJALENGKA	-	-	-	-	-	-
11	KAB. SUMEDANG	-	2	2	-	3	3
12	KAB. INDRAMAYU	-	-	-	-	-	-
13	KAB. SUBANG			-			-
14	KAB. PURWAKARTA			-			-
15	KAB. KARAWANG			-			-
16	KAB. BEKASI			-			-
17	KAB. BANDUNG BARAT			-			-
18	KAB. PANGANDARAN			-			-
19	KOTA BOGOR			-			-
20	KOTA SUKABUMI			-			-
21	KOTA BANDUNG			-			-
22	KOTA CIREBON			-			-
23	KOTA BEKASI			-		1	1
24	KOTA DEPOK			-			-
25	KOTA CIMAH			-			-
26	KOTA TASIKMALAYA	6	10	16	5	2	7
27	KOTA BANJAR			-			-
SUB JUMLAH III		10	13	23	5	9	14
V KLINIK DI DINAS KESEHATAN KAB/KOTA							
1	KAB. BOGOR			-			-
2	KAB. SUKABUMI			-			-
3	KAB. CIANJUR			-			-
4	KAB. BANDUNG			-			-
5	KAB. GARUT			-			-
6	KAB. TASIKMALAYA			-			-
7	KAB. CIAMIS			-			-
8	KAB. KUNINGAN			-			-
9	KAB. CIREBON			-			-
10	KAB. MAJALENGKA			-			-
11	KAB. SUMEDANG			-			-
12	KAB. INDRAMAYU			-			-
13	KAB. SUBANG			-			-
14	KAB. PURWAKARTA			-			-
15	KAB. KARAWANG			-			-
16	KAB. BEKASI			-			-
17	KAB. BANDUNG BARAT			-			-
18	KAB. PANGANDARAN			-			-
19	KOTA BOGOR			-			-
20	KOTA SUKABUMI			-			-
21	KOTA BANDUNG			-			-
22	KOTA CIREBON			-			-
23	KOTA BEKASI			-			-
24	KOTA DEPOK			-			-
25	KOTA CIMAH			-			-
26	KOTA TASIKMALAYA			-			-
27	KOTA BANJAR	8	6	14	1		1
SUB JUMLAH V		8	6	14	1	-	1
JAWA BARAT		492	754	1,246	451	635	1,086
RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK				2.667547628			2.325005397

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 76

**JUMLAH TENAGA GIZI DI FASILITAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	UNIT KERJA	NUTRISIONIS			DIETISIEN			TOTAL		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	KAB. BOGOR	17	84	101	2	11	13	19	95	114
2	KAB. SUKABUMI	5	26	31	-	-	-	5	26	31
3	KAB. CIANJUR	3	30	33	-	1	1	3	31	34
4	KAB. BANDUNG	13	51	64	4	8	12	17	56	73
5	KAB. GARUT	2	38	40	-	-	-	2	38	40
6	KAB. TASIKMALAYA	8	25	33	-	-	-	8	25	33
7	KAB. CIAMIS	2	16	15	-	5	-	2	21	23
8	KAB. KUNINGAN	5	22	27	1	2	3	6	24	30
9	KAB. CIREBON	10	52	62	-	15	15	10	67	77
10	KAB. MAJALENGKA	9	27	36	-	-	-	9	27	36
11	KAB. SUMEDANG	6	15	21	-	-	-	6	15	21
12	KAB. INDRAMAYU	11	26	29	-	1	1	11	27	38
13	KAB. SUBANG	7	31	38	3	-	3	10	31	41
14	KAB. PURWAKARTA	1	24	25	3	5	8	4	29	33
15	KAB. KARAWANG	7	36	43	1	8	16	8	44	52
16	KAB. BEKASI	2	46	45	2	17	19	4	63	67
17	KAB. BANDUNG BARAT	3	31	34	-	-	-	3	31	34
18	KAB. PANGANDARAN	2	5	7	-	-	-	2	5	7
19	KOTA BOGOR	10	56	66	-	6	6	10	59	69
20	KOTA SUKABUMI	1	27	28	1	5	6	2	32	34
21	KOTA BANDUNG	13	55	68	-	-	-	13	55	68
22	KOTA CIREBON	16	29	45	1	-	1	17	29	46
23	KOTA BEKASI	5	64	69	-	21	21	5	85	90
24	KOTA DEPOK	3	69	72	-	13	13	3	82	85
25	KOTA CIMAH	1	36	37	2	16	18	3	52	55
26	KOTA TASIKMALAYA	7	44	51	-	-	-	7	44	51
27	KOTA BANJAR	3	7	10	-	-	-	3	7	10
	JUMLAH JAWA BARAT	172	972	1,130	20	134	156	192	1,100	1,292

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 76 A

**JUMLAH TENAGA GIZI DI FASILITAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT 2016**

NO	UNIT KERJA	NUTRISIONIS			DIETISIEN			TOTAL		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
I	PUSKESMAS									
1	KAB. BOGOR	9	32	41	-	-	-	9	32	41
2	KAB. SUKABUMI	5	26	31	-	-	-	5	26	31
3	KAB. CIANJUR	3	20	23	-	-	-	3	20	23
4	KAB. BANDUNG	12	39	51	-	-	-	12	39	51
5	KAB. GARUT	1	19	20	-	-	-	1	19	20
6	KAB. TASIKMALAYA	6	22	28	-	-	-	6	22	28
7	KAB. CIAMIS	2	13	15	-	-	-	2	13	15
8	KAB. KUNINGAN	2	9	11	-	-	-	2	9	11
9	KAB. CIREBON	7	31	38	-	-	-	7	31	38
10	KAB. MAJALENGKA	6	21	27	-	-	-	6	21	27
11	KAB. SUMEDANG	6	15	21	-	-	-	6	15	21
12	KAB. INDRAMAYU	10	19	21	-	-	-	10	19	29
13	KAB. SUBANG	7	27	34	-	-	-	7	27	34
14	KAB. PURWAKARTA	1	21	22	-	-	-	1	21	22
15	KAB. KARAWANG	7	17	24	-	-	-	7	17	24
16	KAB. BEKASI	2	30	29	-	-	-	2	30	32
17	KAB. BANDUNG BARAT	2	26	28	-	-	-	2	26	28
18	KAB. PANGANDARAN	2	5	7	-	-	-	2	5	7
19	KOTA BOGOR	3	22	25	-	-	-	3	22	25
20	KOTA SUKABUMI	1	11	12	-	-	-	1	11	12
21	KOTA BANDUNG	13	55	68	-	-	-	13	55	68
22	KOTA CIREBON	13	2	15	-	-	-	13	2	15
23	KOTA BEKASI	1	31	32	-	-	-	1	31	32
24	KOTA DEPOK	2	27	29	-	-	-	2	27	29
25	KOTA CIMAH	-	15	15	-	-	-	-	15	15
26	KOTA TASIKMALAYA	4	14	18	-	-	-	4	14	18
27	KOTA BANJAR	1	3	4	-	-	-	1	3	4
	SUB JUMLAH I (PUSKESMAS)	128	572	689	-	-	-	128	572	700
II	RUMAH SAKIT									
1	KAB. BOGOR	8	52	60	2	11	13	10	63	73
2	KAB. SUKABUMI									
3	KAB. CIANJUR		10	10		1	1		11	11
4	KAB. BANDUNG	1	9	10	4	8	12	5	17	22
5	KAB. GARUT	1	19	20	-	-	-	1	19	20
6	KAB. TASIKMALAYA	-	2	2	-	-	-	-	2	2
7	KAB. CIAMIS		3	-		5	-		8	8
8	KAB. KUNINGAN	3	13	16	1	2	3	4	15	19
9	KAB. CIREBON	3	21	24	-	15	15	3	36	39
10	KAB. MAJALENGKA	3	6	9				3	6	9
11	KAB. SUMEDANG			-						
12	KAB. INDRAMAYU	1	7	8	-	1	1	1	8	9
13	KAB. SUBANG		4	4	3		3	3	4	7
14	KAB. PURWAKARTA	-	3	3	3	5	8	3	8	11
15	KAB. KARAWANG	-	19	19	1	8	16	1	27	28
16	KAB. BEKASI	-	16	16	2	17	19	2	33	35
17	KAB. BANDUNG BARAT	1	5	6				1	5	6
18	KAB. PANGANDARAN			-						
19	KOTA BOGOR	7	31	38	-	6	6	7	37	44
20	KOTA SUKABUMI	-	16	16	1	5	6	1	21	22
21	KOTA BANDUNG									
22	KOTA CIREBON	3	27	30	1	-	1	4	27	31
23	KOTA BEKASI	4	33	37	-	21	21	4	54	58
24	KOTA DEPOK	1	42	43	-	13	13	1	55	56
25	KOTA CIMAH	1	21	22	2	16	18	3	37	40
26	KOTA TASIKMALAYA	3	30	33	-	-	-	3	30	33
27	KOTA BANJAR	2	4	6	-	-	-	2	4	6
	SUB JUMLAH II (RUMAH SAKIT)	42	393	432	20	134	156	62	527	589

NO	UNIT KERJA	NUTRISIONIS			DIETISIEN			TOTAL		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
III	SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN							-	-	-
1	KAB. BOGOR			-			-	-	-	-
2	KAB. SUKABUMI			-			-	-	-	-
3	KAB. CIANJUR			-			-	-	-	-
4	KAB. BANDUNG			-			-	-	-	-
5	KAB. GARUT			-			-	-	-	-
6	KAB. TASIKMALAYA			-			-	-	-	-
7	KAB. CIAMIS			-			-	-	-	-
8	KAB. KUNINGAN			-			-	-	-	-
9	KAB. CIREBON			-			-	-	-	-
10	KAB. MAJALENGKA			-			-	-	-	-
11	KAB. SUMEDANG			-			-	-	-	-
12	KAB. INDRAMAYU			-			-	-	-	-
13	KAB. SUBANG			-			-	-	-	-
14	KAB. PURWAKARTA			-			-	-	-	-
15	KAB. KARAWANG			-			-	-	-	-
16	KAB. BEKASI			-			-	-	-	-
17	KAB. BANDUNG BARAT			-			-	-	-	-
18	KAB. PANGANDARAN			-			-	-	-	-
19	KOTA BOGOR			-			-	-	-	-
20	KOTA SUKABUMI			-			-	-	-	-
21	KOTA BANDUNG			-			-	-	-	-
22	KOTA CIREBON			-			-	-	-	-
23	KOTA BEKASI			-			-	-	-	-
24	KOTA DEPOK			-			-	-	-	-
25	KOTA CIMAH			-			-	-	-	-
26	KOTA TASIKMALAYA			-			-	-	-	-
27	KOTA BANJAR			-			-	-	-	-
	SUB JUMLAH III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	KLINIK DI INSTITUSI DIKNAKES/DIKLAT									
1	KAB. BOGOR			-			-	-	-	-
2	KAB. SUKABUMI			-			-	-	-	-
3	KAB. CIANJUR			-			-	-	-	-
4	KAB. BANDUNG		3	3			-	-	-	-
5	KAB. GARUT			-			-	-	-	-
6	KAB. TASIKMALAYA	2	1	3	-	-	-	2	1	3
7	KAB. CIAMIS			-			-	-	-	-
8	KAB. KUNINGAN			-			-	-	-	-
9	KAB. CIREBON			-			-	-	-	-
10	KAB. MAJALENGKA			-			-	-	-	-
11	KAB. SUMEDANG			-			-	-	-	-
12	KAB. INDRAMAYU			-			-	-	-	-
13	KAB. SUBANG			-			-	-	-	-
14	KAB. PURWAKARTA			-			-	-	-	-
15	KAB. KARAWANG			-			-	-	-	-
16	KAB. BEKASI			-			-	-	-	-
17	KAB. BANDUNG BARAT			-			-	-	-	-
18	KAB. PANGANDARAN			-			-	-	-	-
19	KOTA BOGOR			-			-	-	-	-
20	KOTA SUKABUMI			-			-	-	-	-
21	KOTA BANDUNG			-			-	-	-	-
22	KOTA CIREBON			-			-	-	-	-
23	KOTA BEKASI			-			-	-	-	-
24	KOTA DEPOK			-			-	-	-	-
25	KOTA CIMAH			-			-	-	-	-
26	KOTA TASIKMALAYA			-			-	-	-	-
27	KOTA BANJAR			-			-	-	-	-
	SUB JUMLAH IV	2	4	6	-	-	-	2	1	3

NO	UNIT KERJA	NUTRISIONIS			DIETISIEN			TOTAL		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
								-	-	-
V	KLINIK DI DINAS KESEHATAN KAB/KOTA							-	-	-
1	KAB. BOGOR			-			-	-	-	-
2	KAB. SUKABUMI			-			-	-	-	-
3	KAB. CIANJUR			-			-	-	-	-
4	KAB. BANDUNG			-			-	-	-	-
5	KAB. GARUT			-			-	-	-	-
6	KAB. TASIKMALAYA			-			-	-	-	-
7	KAB. CIAMIS			-			-	-	-	-
8	KAB. KUNINGAN			-			-	-	-	-
9	KAB. CIREBON			-			-	-	-	-
10	KAB. MAJALENGKA			-			-	-	-	-
11	KAB. SUMEDANG			-			-	-	-	-
12	KAB. INDRAMAYU			-			-	-	-	-
13	KAB. SUBANG			-			-	-	-	-
14	KAB. PURWAKARTA			-			-	-	-	-
15	KAB. KARAWANG			-			-	-	-	-
16	KAB. BEKASI			-			-	-	-	-
17	KAB. BANDUNG BARAT			-			-	-	-	-
18	KAB. PANGANDARAN			-			-	-	-	-
19	KOTA BOGOR	-	3	3	-	-	-	-	-	-
20	KOTA SUKABUMI			-			-	-	-	-
21	KOTA BANDUNG			-			-	-	-	-
22	KOTA CIREBON			-			-	-	-	-
23	KOTA BEKASI			-			-	-	-	-
24	KOTA DEPOK			-			-	-	-	-
25	KOTA CIMAHI			-			-	-	-	-
26	KOTA TASIKMALAYA			-			-	-	-	-
27	KOTA BANJAR			-			-	-	-	-
								-	-	-
	SUB JUMLAH V	-	3	3	-	-	-	-	-	-
	JAWA BARAT	172	972	1,130	20	134	156	192	1,100	1,292
	RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK			2.42			0.33			2.77

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 77

**JUMLAH TENAGA KETERAPIAN FISIK DI FASILITAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	UNIT KERJA	TENAGA TEKNIISI MEDIS												TOTAL		
		FISIOTERAPI			TERAPI OKUPASI			TERAPI WICARA			AKUPUNKTUR					
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	KAB. BOGOR	26	52	78	-	-	-	1	4	5	2	3	5	29	59	88
2	KAB. SUKABUMI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	KAB. CIANJUR	2	1	3	1	-	1	1	1	2	-	-	-	4	2	6
4	KAB. BANDUNG	3	8	11	1	-	1	-	3	3	-	-	-	5	14	19
5	KAB. GARUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	KAB. TASIKMALAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	KAB. CIAMIS	5	3	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	8
8	KAB. KUNINGAN	7	6	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6	13
9	KAB. CIREBON	8	14	22	-	-	-	-	2	2	-	-	-	8	16	24
10	KAB. MAJALENGKA	1	1	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	1	3	4
11	KAB. SUMEDANG	2	2	4	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	4	7
12	KAB. INDRAMAYU	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4
13	KAB. SUBANG	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4
14	KAB. PURWAKARTA	3	2	5	-	-	-	-	-	-	9	8	17	12	10	22
15	KAB. KARAWANG	7	33	41	1	1	8	-	1	1	-	-	-	8	35	43
16	KAB. BEKASI	13	24	37	2	-	2	-	3	3	-	-	-	15	27	42
17	KAB. BANDUNG BARAT	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
18	KAB. PANGANDARAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	KOTA BOGOR	22	38	60	1	8	9	1	10	11	-	3	3	24	59	83
20	KOTA SUKABUMI	2	16	18	-	2	2	-	4	4	-	-	-	2	22	24
21	KOTA BANDUNG	37	67	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	67	104
22	KOTA CIREBON	5	9	16	1	-	1	-	1	1	-	-	-	6	12	18
23	KOTA BEKASI	10	30	40	-	5	5	1	5	6	-	-	-	11	40	51
24	KOTA DEPOK	1	42	43	-	13	13	1	55	56	-	-	-	2	110	112
25	KOTA CIMAH	13	15	28	-	3	3	-	7	7	1	4	5	14	29	43
26	KOTA TASIKMALAYA	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4
27	KOTA BANJAR	2	3	5	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	4	6
	JAWA BARAT	172	376	551	7	33	46	5	98	103	13	20	33	198	532	730

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 77 A

**JUMLAH TENAGA KETERAPIAN FISIK DI FASILITAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	UNIT KERJA	TENAGA TEKNISI MEDIS												TOTAL			
		FISIOTERAPI			TERAPI OKUPASI			TERAPI WICARA			AKUPUNKTUR			L	P	L+P	
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P				
I	PUSKESMAS																
1	KAB. BOGOR			-			-			-			-			-	
2	KAB. SUKABUMI			-			-			-			-			-	
3	KAB. CIANJUR			-			-			-			-			-	
4	KAB. BANDUNG			-			-			-			-			-	
5	KAB. GARUT			-			-			-			-			-	
6	KAB. TASIKMALAYA			-			-			-			-			-	
7	KAB. CIAMIS	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	
8	KAB. KUNINGAN			-			-			-			-			-	
9	KAB. CIREBON			-			-			-			-			-	
10	KAB. MAJALENGKA			-			-			-			-			-	
11	KAB. SUMEDANG			-			-			-			-			-	
12	KAB. INDRAMAYU			-			-			-			-			-	
13	KAB. SUBANG			-			-			-			-			-	
14	KAB. PURWAKARTA			-			-			-			-			-	
15	KAB. KARAWANG			-			-			-			-			-	
16	KAB. BEKASI			-			-			-			-			-	
17	KAB. BANDUNG BARAT			-			-			-			-			-	
18	KAB. PANGANDARAN			-			-			-			-			-	
19	KOTA BOGOR			-			-			-			-			-	
20	KOTA SUKABUMI			-			-			-			-			-	
21	KOTA BANDUNG			-			-			-			-			-	
22	KOTA CIREBON			-			-			-			-			-	
23	KOTA BEKASI			-			-			-			-			-	
24	KOTA DEPOK			-			-			-			-			-	
25	KOTA CIMAHI			-			-			-			-			-	
26	KOTA TASIKMALAYA			-			-			-			-			-	
27	KOTA BANJAR			-			-			-			-			-	
	SUB JUMLAH I (PUSKESMAS)	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	
II	RUMAH SAKIT																
1	KAB. BOGOR	26	52	78	-	-	-	1	4	5	2	3	5	29	59	88	
2	KAB. SUKABUMI			-			-			-			-			-	
3	KAB. CIANJUR	2	1	3	1	-	1	1	1	2	-	-	-	4	2	6	
4	KAB. BANDUNG	3	8	11	1	-	1	-	3	3	-	-	-	5	14	19	
5	KAB. GARUT			-			-			-			-			-	
6	KAB. TASIKMALAYA			-			-			-			-			-	
7	KAB. CIAMIS	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	
8	KAB. KUNINGAN	7	6	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6	13	
9	KAB. CIREBON	8	14	22	-	-	-	-	2	2	-	-	-	8	16	24	
10	KAB. MAJALENGKA	1	1	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	1	3	4	
11	KAB. SUMEDANG	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	
12	KAB. INDRAMAYU	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	
13	KAB. SUBANG	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	
14	KAB. PURWAKARTA	3	2	5	-	-	-	-	-	-	9	8	17	12	10	22	
15	KAB. KARAWANG	7	33	41	1	1	8	-	1	1	-	-	-	8	35	43	
16	KAB. BEKASI	13	24	37	2	-	2	-	3	3	-	-	-	15	27	42	
17	KAB. BANDUNG BARAT		1	1			-			-			-		1	1	
18	KAB. PANGANDARAN			-			-			-			-			-	
19	KOTA BOGOR	22	38	60	1	8	9	1	10	11	-	3	3	24	59	83	
20	KOTA SUKABUMI	1	8	9	-	1	1	-	2	2	-	-	-	1	11	12	
21	KOTA BANDUNG	37	67	104			-			-			-	37	67	104	
22	KOTA CIREBON	5	9	16	1	-	1	-	1	1	-	-	-	6	12	18	
23	KOTA BEKASI	10	30	40	-	5	5	1	5	6	-	-	-	11	40	51	
24	KOTA DEPOK	1	42	43	-	13	13	1	55	56	-	-	-	2	110	112	
25	KOTA CIMAHI	13	14	27	-	1	1	-	3	3	-	-	-	13	18	31	
26	KOTA TASIKMALAYA	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	
27	KOTA BANJAR	2	3	5	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	4	6	
	SUB JUMLAH II (RUMAH SAKIT)	167	365	535	7	30	43	5	92	97	11	14	25	191	506	697	

**JUMLAH TENAGA KETERAPIAN FISIK DI FASILITAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	UNIT KERJA	TENAGA TEKNISI MEDIS											TOTAL				
		FISIOTERAPI			TERAPI OKUPASI			TERAPI WICARA			AKUPUNKTUR			L	P	L+P	
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P				
V	KLINIK DI DINAS KESEHATAN KAB/KOTA																
1	KAB. BOGOR			-			-				-			-		-	-
2	KAB. SUKABUMI			-			-				-			-		-	-
3	KAB. CIANJUR			-			-				-			-		-	-
4	KAB. BANDUNG			-			-				-			-		-	-
5	KAB. GARUT			-			-				-			-		-	-
6	KAB. TASIKMALAYA			-			-				-			-		-	-
7	KAB. CIAMIS			-			-				-			-		-	-
8	KAB. KUNINGAN			-			-				-			-		-	-
9	KAB. CIREBON			-			-				-			-		-	-
10	KAB. MAJALENGKA			-			-				-			-		-	-
11	KAB. SUMEDANG			-			-				-			-		-	-
12	KAB. INDRAMAYU			-			-				-			-		-	-
13	KAB. SUBANG			-			-				-			-		-	-
14	KAB. PURWAKARTA			-			-				-			-		-	-
15	KAB. KARAWANG			-			-				-			-		-	-
16	KAB. BEKASI			-			-				-			-		-	-
17	KAB. BANDUNG BARAT			-			-				-			-		-	-
18	KAB. PANGANDARAN			-			-				-			-		-	-
19	KOTA BOGOR			-			-				-			-		-	-
20	KOTA SUKABUMI			-			-				-			-		-	-
21	KOTA BANDUNG			-			-				-			-		-	-
22	KOTA CIREBON			-			-				-			-		-	-
23	KOTA BEKASI			-			-				-			-		-	-
24	KOTA DEPOK			-			-				-			-		-	-
25	KOTA CIMAH			-			-				-			-		-	-
26	KOTA TASIKMALAYA			-			-				-			-		-	-
27	KOTA BANJAR			-			-				-			-		-	-
	SUB JUMLAH V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JAWA BARAT	172	376	551	7	33	46	5	98	103	13	20	33	198	532	730	
	RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK			1.18			0.098			0.221			0.071			1.563	

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 78

**JUMLAH TENAGA TEKNIKI MEDIS DAN FISIOTERAPIS DI FASILITAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	UNIT KERJA	TENAGA TEKNIKI MEDIS																																	
		RADIOGRAFER			RADIOTERAPIS			TEKNIKI			TEKNIKI GIGI			ANALISIS			REFRAKSIONIS			ORTETIK			REKAM MEDIS			TEKNIKI			TEKNIKI			JUMLAH			
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	KAB. BOGOR	74	38	112	11	1	12	19	1	20	3	16	19	61	154	215	1	1	2	1	4	5	35	64	99	4	13	17	-	-	-	209	292	501	
2	KAB. SUKABUMI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6
3	KAB. CIANJUR	5	3	8	-	-	-	1	1	2	-	-	-	9	25	34	2	1	3	-	-	-	5	4	9	-	-	-	-	-	-	22	34	56	
4	KAB. BANDUNG	13	8	21	-	-	-	6	-	6	-	-	-	11	46	57	-	1	1	-	-	-	18	15	33	-	-	-	-	-	-	48	70	118	
5	KAB. GARUT	14	6	20	-	-	-	1	1	2	1	2	3	12	25	37	-	1	1	-	-	-	1	5	6	-	-	-	1	-	1	30	40	70	
6	KAB. TASIKMALAYA	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	16	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	16	25	
7	KAB. CIAMIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	KAB. KUNINGAN	12	7	19	-	-	-	2	2	4	-	-	-	20	22	42	-	-	-	-	-	-	4	14	18	-	-	-	-	-	-	38	45	83	
9	KAB. CIREBON	25	20	45	5	2	7	7	1	8	2	2	4	32	79	111	1	1	2	-	-	-	14	38	52	2	3	5	-	-	-	88	146	234	
10	KAB. MAJALENGKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	11	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	11	18	
11	KAB. SUMEDANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	KAB. INDRAMAYU	10	7	17	-	-	-	2	-	2	-	-	-	11	28	39	-	-	-	-	-	-	2	8	10	-	1	1	-	-	-	25	44	69	
13	KAB. SUBANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	KAB. PURWAKARTA	7	7	14	-	-	-	2	1	3	-	-	-	14	32	46	1	-	1	-	-	-	2	8	10	-	1	1	-	-	-	26	49	75	
15	KAB. KARAWANG	44	29	73	-	-	-	1	-	1	-	-	-	27	94	121	-	-	-	-	-	-	22	26	48	1	-	1	-	-	-	95	149	244	
16	KAB. BEKASI	117	43	160	1	9	10	4	4	8	1	5	6	29	77	106	-	-	-	-	-	-	19	49	68	-	1	1	-	-	-	171	188	359	
17	KAB. BANDUNG BARAT	2	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	36	46	-	-	-	-	-	-	4	5	9	-	-	-	-	-	-	16	44	60	
18	KAB. PANGANDARAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	
19	KOTA BOGOR	34	38	72	2	-	2	2	2	4	-	1	1	48	121	169	2	1	3	-	-	-	25	32	57	1	4	5	-	-	-	114	199	313	
20	KOTA SUKABUMI	7	9	16	-	-	-	2	3	5	-	-	-	28	48	76	1	1	2	-	-	-	4	13	17	1	3	4	-	-	-	43	77	120	
21	KOTA BANDUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	7	8	
22	KOTA CIREBON	20	13	33	1	-	1	3	1	4	-	2	2	21	61	82	-	-	-	-	-	-	8	15	23	3	2	5	5	-	5	61	94	155	
23	KOTA BEKASI	22	30	52	6	10	16	2	6	8	-	1	1	18	91	109	-	-	-	-	-	-	7	20	27	1	3	4	-	-	-	56	161	217	
24	KOTA DEPOK	50	49	99	7	6	13	12	4	16	1	2	3	39	178	217	3	3	6	-	-	-	20	73	93	3	6	9	-	-	-	135	321	456	
25	KOTA CIMAH	27	12	39	-	-	-	8	2	10	1	-	1	23	104	127	4	2	6	-	-	-	39	52	91	-	-	-	2	-	2	104	172	276	
26	KOTA TASIKMALAYA	25	9	34	-	-	-	1	-	1	-	-	-	21	99	120	5	-	5	-	-	-	7	23	30	-	-	-	1	-	1	60	131	191	
27	KOTA BANJAR	6	5	11	-	-	-	1	1	2	-	-	-	13	20	33	-	-	-	-	-	-	3	4	7	2	-	2	-	-	-	25	30	55	
	JAWA BARAT	515	336	851	33	28	61	76	30	106	9	31	40	465	1,380	1,845	20	12	32	1	4	5	239	470	709	18	37	55	9	-	9	1,385	2,328	3,713	

TABEL 79

**JUMLAH TENAGA KESEHATAN LAIN DI FASILITAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	UNIT KERJA	TENAGA KESEHATAN LAINNYA						TOTAL		
		PENGELOLA PROGRAM			TENAGA KESEHATAN LAINNYA			L	P	L+P
		L	P	L+P	L	P	L+P			
1	KAB. BOGOR	3	4	7	31	34	65	34	38	72
2	KAB. SUKABUMI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	KAB. CIANJUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	KAB. BANDUNG	-	-	-	5	5	10	5	5	10
5	KAB. GARUT	1	-	1	-	1	1	1	1	2
6	KAB. TASIKMALAYA	25	10	35	1	-	1	26	10	36
7	KAB. CIAMIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	KAB. KUNINGAN	-	-	-	23	33	56	23	33	56
9	KAB. CIREBON	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	KAB. MAJALENGKA	-	-	-	-	1	1	-	1	1
11	KAB. SUMEDANG	-	-	-	8	23	31	8	23	31
12	KAB. INDRAMAYU	17	23	40	-	-	-	17	23	40
13	KAB. SUBANG	-	-	-	78	38	116	78	38	116
14	KAB. PURWAKARTA	1	-	1	19	13	32	20	13	33
15	KAB. KARAWANG	2	-	2	122	82	204	124	82	206
16	KAB. BEKASI	5	2	7	-	11	11	5	13	18
17	KAB. BANDUNG BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	KAB. PANGANDARAN	-	-	-	1	1	2	1	1	2
19	KOTA BOGOR	1	-	1	37	48	85	38	48	86
20	KOTA SUKABUMI	1	-	1	1	2	3	2	2	4
21	KOTA BANDUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	KOTA CIREBON	9	24	33	2	11	13	11	35	46
23	KOTA BEKASI	16	62	78	98	15	113	114	77	191
24	KOTA DEPOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	KOTA CIMAHI	13	27	40	-	-	-	13	27	40
26	KOTA TASIKMALAYA	2	1	3	1	-	1	3	1	4
27	KOTA BANJAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JAWA BARAT	96	153	249	427	318	745	523	471	994

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 79 A

**JUMLAH TENAGA KESEHATAN LAIN DI FASILITAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	UNIT KERJA	TENAGA KESEHATAN LAINNYA						TOTAL		
		PENGELOLA PROGRAM KESEHATAN			TENAGA KESEHATAN LAINNYA			L	P	L+P
		L	P	L+P	L	P	L+P			
I	PUSKESMAS									
1	KAB. BOGOR	-	-	-	28	18	46	28	18	46
2	KAB. SUKABUMI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	KAB. CIANJUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	KAB. BANDUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	KAB. GARUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	KAB. TASIKMALAYA	25	10	35	1	-	1	26	10	36
7	KAB. CIAMIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	KAB. KUNINGAN	-	-	-	16	12	28	16	12	28
9	KAB. CIREBON	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	KAB. MAJALENGKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	KAB. SUMEDANG	-	-	-	2	12	14	2	12	14
12	KAB. INDRAMAYU	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	KAB. SUBANG	-	-	-	78	38	116	78	38	116
14	KAB. PURWAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	KAB. KARAWANG	-	-	-	121	79	200	121	79	200
16	KAB. BEKASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	KAB. BANDUNG BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	KAB. PANGANDARAN	-	-	-	1	1	2	1	1	2
19	KOTA BOGOR	-	-	-	15	16	31	15	16	31
20	KOTA SUKABUMI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	KOTA BANDUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	KOTA CIREBON	8	20	28	-	-	-	8	20	28
23	KOTA BEKASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	KOTA DEPOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	KOTA CIMAHI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	KOTA TASIKMALAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	KOTA BANJAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB JUMLAH I (PUSKESMAS)	33	30	63	262	176	438	295	206	501
II	RUMAH SAKIT									
1	KAB. BOGOR	3	4	7	3	16	19	6	20	26
2	KAB. SUKABUMI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	KAB. CIANJUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	KAB. BANDUNG	-	-	-	5	5	10	5	5	10
5	KAB. GARUT	1	-	1	-	1	1	1	1	2
6	KAB. TASIKMALAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	KAB. CIAMIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	KAB. KUNINGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	KAB. CIREBON	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	KAB. MAJALENGKA	-	-	-	-	1	1	-	1	1
11	KAB. SUMEDANG	-	-	-	5	11	16	5	11	16
12	KAB. INDRAMAYU	1	-	1	-	-	-	1	-	1
13	KAB. SUBANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	KAB. PURWAKARTA	1	-	1	19	13	32	20	13	33
15	KAB. KARAWANG	2	-	2	1	3	4	3	3	6
16	KAB. BEKASI	5	2	7	-	11	11	5	13	18
17	KAB. BANDUNG BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	KAB. PANGANDARAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	KOTA BOGOR	1	-	1	3	16	19	4	16	20
20	KOTA SUKABUMI	1	-	1	1	2	3	2	2	4
21	KOTA BANDUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	KOTA CIREBON	1	4	5	2	11	13	3	15	18
23	KOTA BEKASI	-	-	-	98	15	113	98	15	113
24	KOTA DEPOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	KOTA CIMAHI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	KOTA TASIKMALAYA	2	1	3	1	-	1	3	1	4
27	KOTA BANJAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB JUMLAH II (RUMAH SAKIT)	18	11	29	138	105	243	156	116	272

NO	UNIT KERJA	TENAGA KESEHATAN LAINNYA						TOTAL		
		PENGELOLA PROGRAM KESEHATAN			TENAGA KESEHATAN LAINNYA			L	P	L+P
		L	P	L+P	L	P	L+P			
III	SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN									
1	KAB. BOGOR			-			-	-	-	-
2	KAB. SUKABUMI			-			-	-	-	-
3	KAB. CIANJUR			-			-	-	-	-
4	KAB. BANDUNG			-			-	-	-	-
5	KAB. GARUT			-			-	-	-	-
6	KAB. TASIKMALAYA			-			-	-	-	-
7	KAB. CIAMIS			-			-	-	-	-
8	KAB. KUNINGAN		-	-	-	2	2	-	2	2
9	KAB. CIREBON			-			-	-	-	-
10	KAB. MAJALENGKA			-			-	-	-	-
11	KAB. SUMEDANG			-			-	-	-	-
12	KAB. INDRAMAYU			-			-	-	-	-
13	KAB. SUBANG			-			-	-	-	-
14	KAB. PURWAKARTA			-			-	-	-	-
15	KAB. KARAWANG			-			-	-	-	-
16	KAB. BEKASI			-			-	-	-	-
17	KAB. BANDUNG BARAT			-			-	-	-	-
18	KAB. PANGANDARAN			-			-	-	-	-
19	KOTA BOGOR			-			-	-	-	-
20	KOTA SUKABUMI			-			-	-	-	-
21	KOTA BANDUNG			-			-	-	-	-
22	KOTA CIREBON			-			-	-	-	-
23	KOTA BEKASI			-			-	-	-	-
24	KOTA DEPOK			-			-	-	-	-
25	KOTA CIMAH			-			-	-	-	-
26	KOTA TASIKMALAYA			-			-	-	-	-
27	KOTA BANJAR			-			-	-	-	-
	SUB JUMLAH III	-	-	-	-	2	2	-	2	2
IV	KLINIK DI INSTITUSI DIKNAKES/DIKLAT									
1	KAB. BOGOR			-			-	-	-	-
2	KAB. SUKABUMI			-			-	-	-	-
3	KAB. CIANJUR			-			-	-	-	-
4	KAB. BANDUNG			-			-	-	-	-
5	KAB. GARUT			-			-	-	-	-
6	KAB. TASIKMALAYA			-			-	-	-	-
7	KAB. CIAMIS			-			-	-	-	-
8	KAB. KUNINGAN			-			-	-	-	-
9	KAB. CIREBON			-			-	-	-	-
10	KAB. MAJALENGKA			-			-	-	-	-
11	KAB. SUMEDANG			-			-	-	-	-
12	KAB. INDRAMAYU	16	23	39	-	-	-	16	23	39
13	KAB. SUBANG			-			-	-	-	-
14	KAB. PURWAKARTA			-			-	-	-	-
15	KAB. KARAWANG			-			-	-	-	-
16	KAB. BEKASI			-			-	-	-	-
17	KAB. BANDUNG BARAT			-			-	-	-	-
18	KAB. PANGANDARAN			-			-	-	-	-
19	KOTA BOGOR			-			-	-	-	-
20	KOTA SUKABUMI			-			-	-	-	-
21	KOTA BANDUNG			-			-	-	-	-
22	KOTA CIREBON			-			-	-	-	-
23	KOTA BEKASI			-			-	-	-	-
24	KOTA DEPOK			-			-	-	-	-
25	KOTA CIMAH			-			-	-	-	-
26	KOTA TASIKMALAYA			-			-	-	-	-
27	KOTA BANJAR			-			-	-	-	-
	SUB JUMLAH IV	16	23	39	-	-	-	16	23	39

NO	UNIT KERJA	TENAGA KESEHATAN LAINNYA						TOTAL		
		PENGELOLA PROGRAM KESEHATAN			TENAGA KESEHATAN LAINNYA					
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
V	KLINIK DI DINAS KESEHATAN KAB/KOTA									
1	KAB. BOGOR			-			-	-	-	
2	KAB. SUKABUMI			-			-	-	-	
3	KAB. CIANJUR			-			-	-	-	
4	KAB. BANDUNG			-			-	-	-	
5	KAB. GARUT			-			-	-	-	
6	KAB. TASIKMALAYA			-			-	-	-	
7	KAB. CIAMIS			-			-	-	-	
8	KAB. KUNINGAN	-	-	-	7	19	26	7	19	26
9	KAB. CIREBON			-			-	-	-	
10	KAB. MAJALENKA			-			-	-	-	
11	KAB. SUMEDANG	-	-	-	1	-	1	1	-	1
12	KAB. INDRAMAYU			-			-	-	-	
13	KAB. SUBANG			-			-	-	-	
14	KAB. PURWAKARTA			-			-	-	-	
15	KAB. KARAWANG			-			-	-	-	
16	KAB. BEKASI			-			-	-	-	
17	KAB. BANDUNG BARAT			-			-	-	-	
18	KAB. PANGANDARAN			-			-	-	-	
19	KOTA BOGOR	-	-	-	19	16	35	19	16	35
20	KOTA SUKABUMI			-			-	-	-	
21	KOTA BANDUNG			-			-	-	-	
22	KOTA CIREBON			-			-	-	-	
23	KOTA BEKASI	16	62	78			-	16	62	78
24	KOTA DEPOK			-			-	-	-	
25	KOTA CIMAH	13	27	40	-	-	-	13	27	40
26	KOTA TASIKMALAYA			-			-	-	-	
27	KOTA BANJAR			-			-	-	-	
	SUB JUMLAH V	29	89	118	27	35	62	56	124	180
	JAWA BARAT	96	153	249	427	318	745	523	471	994
	RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK			0.53			1.59			2.13

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2015

TABEL 80

**JUMLAH TENAGA NON KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	UNIT KERJA	TENAGA NON KESEHATAN																								TOTAL		
		PEJABAT STRUKTURAL			STAF PENUNJANG ADMINISTRASI			STAF PENUNJANG TEKNOLOGI			STAF PENUNJANG PERENCANAAN			TENAGA PENDIDIK			TENAGA KEPENDIDIKAN			JURU			TENAGA PENUNJANG KESEHATAN LAINNYA					
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	KAB. BOGOR	162	267	429	304	399	703	32	8	40	8	7	15	-	2	2	22	20	42	46	20	66	29	20	49	574	743	1,317
2	KAB. SUKABUMI	85	31	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	31	116
3	KAB. CIANJUR	76	44	120	282	143	425	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360	187	547
4	KAB. BANDUNG	82	51	133	351	271	622	3	-	3	1	2	3	2	-	2	-	-	-	-	3	3	14	7	21	439	334	773
5	KAB. GARUT	84	19	103	313	180	493	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	398	201	599
6	KAB. TASIKMALAYA	63	23	86	54	23	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	24	80	117	70	187
7	KAB. CIAMIS	65	30	95	103	94	197	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	6	-	6	-	-	-	176	124	300
8	KAB. KUNINGAN	75	31	106	57	67	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132	98	230
9	KAB. CIREBON	33	3	36	482	365	847	62	11	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	577	379	956
10	KAB. MAJALENGKA	75	38	113	188	147	335	4	-	4	4	-	4	-	-	-	-	-	-	12	-	12	35	50	85	283	235	518
11	KAB. SUMEDANG	60	56	116	132	120	252	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	193	179	372
12	KAB. INDRAMAYU	99	62	161	113	108	221	3	1	4	2	-	2	-	-	-	-	-	-	3	2	5	-	-	-	220	173	393
13	KAB. SUBANG	18	7	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	7	25
14	KAB. PURWAKARTA	48	29	77	179	156	335	6	3	9	2	2	4	-	-	-	-	-	-	45	9	54	-	-	-	280	199	479
15	KAB. KARAWANG	203	200	403	351	408	759	24	-	24	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	99	47	146	579	656	1,235
16	KAB. BEKASI	142	74	216	124	310	434	22	2	24	4	3	7	1	3	4	-	1	1	21	19	40	23	29	52	314	441	755
17	KAB. BANDUNG BARAT	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	8	-	8
18	KAB. PANGANDARAN	10	6	16	16	7	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	13	39
19	KOTA BOGOR	147	162	309	643	570	1,213	25	2	27	5	9	14	-	11	11	1	-	1	103	152	255	924	906	1,830	924	1,812	2,736
20	KOTA SUKABUMI	84	88	172	303	321	624	15	4	19	6	4	10	-	-	-	1	5	6	19	17	36	-	-	-	428	439	867
21	KOTA BANDUNG	20	42	62	94	135	229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	177	291
22	KOTA CIREBON	79	101	180	173	149	322	5	-	5	3	3	6	-	-	-	1	4	5	6	-	6	19	2	21	267	259	526
23	KOTA BEKASI	29	50	79	235	245	480	-	-	-	4	12	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268	307	575
24	KOTA DEPOK	190	313	503	213	377	590	39	19	58	5	9	14	-	7	7	13	1	14	223	137	360	-	-	-	683	863	1,546
25	KOTA CIMAHI	25	53	78	376	366	742	2	-	2	2	3	5	-	-	-	-	-	-	3	11	14	408	433	841	408	866	1,274
26	KOTA TASIKMALAYA	91	90	181	188	193	381	4	-	4	4	-	4	-	1	1	-	-	-	2	3	5	22	13	35	289	300	589
27	KOTA BANJAR	55	17	72	282	94	376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337	111	448
	JUMLAH JAWA BARAT	2,108	1,887	3,995	5,556	5,248	10,804	248	50	298	54	58	112	3	24	27	38	31	69	490	373	863	1,634	1,533	3,167	8,497	9,204	17,701

TABEL 80 A

**JUMLAH TENAGA NON KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

NO	UNIT KERJA	TENAGA NON KESEHATAN																								TOTAL		
		PEJABAT STRUKTURAL			STAF PENUNJANG ADMINISTRASI			STAF PENUNJANG TEKNOLOGI			STAF PENUNJANG PERENCANAAN			TENAGA PENDIDIK			TENAGA KEPENDIDIKAN			JURU			TENAGA PENUNJANG KESEHATAN LAINNYA					
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
I	PUSKESMAS																											
1	KAB. BOGOR	43	37	80	72	43	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28	18	46	116	98	214
2	KAB. SUKABUMI	85	31	116																						85	31	116
3	KAB. CIANJUR	59	31	90	45	20	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104	51	155
4	KAB. BANDUNG	35	26	61	132	115	247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167	141	308
5	KAB. GARUT	62	10	72	209	117	326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271	127	398
6	KAB. TASIKMALAYA	27	11	38	29	13	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	24	80	56	48	104	
7	KAB. CIAMIS	53	21	74	101	84	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154	105	259
8	KAB. KUNINGAN	48	26	74	52	65	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	91	191
9	KAB. CIREBON	4	1	5	70	66	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	67	141
10	KAB. MAJALENGKA	46	18	64	68	65	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	83	197
11	KAB. SUMEDANG	41	29	70	28	53	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	69	84	153	
12	KAB. INDRAMAYU	65	33	98	47	37	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	115	70	185
13	KAB. SUBANG	18	7	25																						18	7	25
14	KAB. PURWAKARTA	27	13	40	80	27	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	108	41	149
15	KAB. KARAWANG	82	43	125																						82	43	125
16	KAB. BEKASI	64	24	88	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	66	30	96
17	KAB. BANDUNG BARAT	4		4																						4	-	4
18	KAB. PANGANDARAN	10	6	16	16	7	23																			26	13	39
19	KOTA BOGOR	22	26	48	16	15	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	41	79	38	82	120	
20	KOTA SUKABUMI	13	17	30	29	37	66	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	55	100
21	KOTA BANDUNG	20	42	62	94	135	229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	177	291
22	KOTA CIREBON	25	42	67	40	49	89	-	-	-	3	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	94	162
23	KOTA BEKASI	11	20	31	27	52	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	72	110
24	KOTA DEPOK	7	15	22	33	27	60	12	17	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	49	147	-	-	-	150	108	258
25	KOTA CIMAH	10	16	26	11	11	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	27	48	21	54	75	
26	KOTA TASIKMALAYA	23	19	42	11	11	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	30	64
27	KOTA BANJAR	3	7	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	10
	SUB JUMLAH I (PUSKESMAS)	907	571	1,478	1,210	1,055	2,265	15	18	33	3	3	6	-	-	-	-	-	-	105	50	155	144	112	256	2,240	1,809	4,049

NO	UNIT KERJA	TENAGA NON KESEHATAN																								TOTAL		
		PEJABAT STRUKTURAL			STAF PENUNJANG ADMINISTRASI			STAF PENUNJANG TEKNOLOGI			STAF PENUNJANG PERENCANAAN			TENAGA PENDIDIK			TENAGA KEPENDIDIKAN			JURU			TENAGA PENUNJANG KESEHATAN LAINNYA					
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
II	RUMAH SAKIT																											
1	KAB. BOGOR	119	229	348	232	356	588	32	8	40	8	7	15	-	1	1	22	20	42	42	8	50	1	2	3	455	631	1,086
2	KAB. SUKABUMI			-			-			-			-			-												
3	KAB. CIANJUR	17	13	30	237	123	360			-	2		2			-										256	136	392
4	KAB. BANDUNG	47	25	72	219	156	375	3	-	3	1	2	3	2	-	2	-	-	-	-	3	3	14	7	21	272	193	465
5	KAB. GARUT	22	9	31	104	63	167			-	1	2	3			-										127	74	201
6	KAB. TASIKMALAYA	36	12	48	25	10	35			-			-			-										61	22	83
7	KAB. CIAMIS	12	9	21	2	10	12	1		1	1		1			-					6		6			22	19	41
8	KAB. KUNINGAN	25	3	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	3	28
9	KAB. CIREBON	29	2	31	410	298	708	62	11	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	501	311	812
10	KAB. MAJALENGKA	15	13	28	103	72	175	4	-	4	4	-	4	-	-	-	-	-	-	12	-	12	35	50	85	138	135	273
11	KAB. SUMEDANG	19	27	46	104	67	171	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124	95	219
12	KAB. INDRAMAYU	34	29	63	66	71	137	3	1	4	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	105	103	208
13	KAB. SUBANG			-			-			-			-			-												
14	KAB. PURWAKARTA	21	16	37	99	129	228	6	3	9	2	2	4	-	-	-	-	-	-	44	8	52				172	158	330
15	KAB. KARAWANG	121	157	278	351	408	759	24	-	24	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	99	47	146	497	613	1,110
16	KAB. BEKASI	78	50	128	124	304	428	22	2	24	4	3	7	1	3	4	-	1	1	19	19	38	23	29	52	248	411	659
17	KAB. BANDUNG BARAT	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	4	-	4
18	KAB. PANGANDARAN			-			-			-			-			-												
19	KOTA BOGOR	119	119	238	627	555	1,182	25	2	27	5	9	14	-	11	11	1	-	1	103	152	255	880	848	1,728	880	1,696	2,576
20	KOTA SUKABUMI	71	71	142	274	284	558	12	3	15	6	4	10	-	-	-	1	5	6	19	17	36	-	-	-	383	384	767
21	KOTA BANDUNG			-			-			-			-			-												
22	KOTA CIREBON	54	59	113	133	100	233	5	-	5	-	-	-	-	-	-	1	4	5	6	-	6	19	2	21	199	165	364
23	KOTA BEKASI	12	12	24	185	155	340	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198	169	367
24	KOTA DEPOK	183	298	481	180	350	530	27	2	29	5	9	14	-	7	7	13	1	14	125	88	213				533	755	1,288
25	KOTA CIMAHI	12	23	35	360	346	706	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374	369	743	374	738	1,112
26	KOTA TASIKMALAYA	52	60	112	153	137	290	4	-	4	4	-	4	-	1	1	-	-	-	2	3	5	22	13	35	215	214	429
27	KOTA BANJAR	26	5	31	141	47	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167	52	219
	SUB JUMLAH II (RUMAH SAKIT)	1,128	1,241	2,369	4,129	4,041	8,170	233	32	265	46	42	88	3	23	26	38	31	69	379	300	679	1,471	1,367	2,838	5,956	7,077	13,033

NO	UNIT KERJA	TENAGA NON KESEHATAN																								TOTAL		
		PEJABAT STRUKTURAL			STAF PENUNJANG ADMINISTRASI			STAF PENUNJANG TEKNOLOGI			STAF PENUNJANG PERENCANAAN			TENAGA PENDIDIK			TENAGA KEPENDIDIKAN			JURU			TENAGA PENUNJANG KESEHATAN LAINNYA					
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
III	SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN																											
1	KAB. BOGOR	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	12	15				3	14	17
2	KAB. SUKABUMI			-			-			-			-			-			-			-			-			-
3	KAB. CIANJUR			-			-			-			-			-			-			-			-			-
4	KAB. BANDUNG			-			-			-			-			-			-			-			-			-
5	KAB. GARUT			-			-			-			-			-			-			-			-			-
6	KAB. TASIKMALAYA			-			-			-			-			-			-			-			-			-
7	KAB. CIAMIS			-			-			-			-			-			-			-			-			-
8	KAB. KUNINGAN	2	2	4	5	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	4	11
9	KAB. CIREBON	-	-	-	2	1	3																			2	1	3
10	KAB. MAJALENGKA			-			-			-			-			-			-			-			-			-
11	KAB. SUMEDANG			-			-			-			-			-			-			-			-			-
12	KAB. INDRAMAYU			-			-			-			-			-			-			-			-			-
13	KAB. SUBANG			-			-			-			-			-			-			-			-			-
14	KAB. PURWAKARTA			-			-			-			-			-			-			-			-			-
15	KAB. KARAWANG			-			-			-			-			-			-			-			-			-
16	KAB. BEKASI			-			-			-			-			-			-			-			-			-
17	KAB. BANDUNG BARAT			-			-			-			-			-			-			-			-			-
18	KAB. PANGANDARAN			-			-			-			-			-			-			-			-			-
19	KOTA BOGOR	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	3
20	KOTA SUKABUMI			-			-			-			-			-			-			-			-			-
21	KOTA BANDUNG			-			-			-			-			-			-			-			-			-
22	KOTA CIREBON			-			-			-			-			-			-			-			-			-
23	KOTA BEKASI	2	1	3	5	4	9																			7	5	12
24	KOTA DEPOK			-			-			-			-			-			-			-			-			-
25	KOTA CIMAHI			-			-			-			-			-			-			-			-			-
26	KOTA TASIKMALAYA	2	4	6	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	10
27	KOTA BANJAR	26	5	31	141	47	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167	52	219
	SUB JUMLAH III	33	14	47	154	57	211	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	12	15	1	1	2	190	85	275

NO	UNIT KERJA	TENAGA NON KESEHATAN																								TOTAL		
		PEJABAT STRUKTURAL			STAF PENUNJANG ADMINISTRASI			STAF PENUNJANG TEKNOLOGI			STAF PENUNJANG PERENCANAAN			TENAGA PENDIDIK			TENAGA KEPENDIDIKAN			JURU			TENAGA PENUNJANG KESEHATAN LAINNYA					
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
V	KLINIK DI DINAS KESEHATAN KAB/KOTA																											
1	KAB. BOGOR			-			-			-			-			-			-			-			-			-
2	KAB. SUKABUMI			-			-			-			-			-			-			-			-			-
3	KAB. CIANJUR			-			-			-			-			-			-			-			-			-
4	KAB. BANDUNG			-			-			-			-			-			-			-			-			-
5	KAB. GARUT			-			-			-			-			-			-			-			-			-
6	KAB. TASIKMALAYA			-			-			-			-			-			-			-			-			-
7	KAB. CIAMIS			-			-			-			-			-			-			-			-			-
8	KAB. KUNINGAN			-			-			-			-			-			-			-			-			-
9	KAB. CIREBON			-			-			-			-			-			-			-			-			-
10	KAB. MAJALENGKA	14	7	21	17	10	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	17	48
11	KAB. SUMEDANG			-			-			-			-			-			-			-			-			-
12	KAB. INDRAMAYU			-			-			-			-			-			-			-			-			-
13	KAB. SUBANG			-			-			-			-			-			-			-			-			-
14	KAB. PURWAKARTA			-			-			-			-			-			-			-			-			-
15	KAB. KARAWANG			-			-			-			-			-			-			-			-			-
16	KAB. BEKASI			-			-			-			-			-			-			-			-			-
17	KAB. BANDUNG BARAT			-			-			-			-			-			-			-			-			-
18	KAB. PANGANDARAN			-			-			-			-			-			-			-			-			-
19	KOTA BOGOR	5	16	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	16	21	5	32	37
20	KOTA SUKABUMI			-			-			-			-			-			-			-			-			-
21	KOTA BANDUNG			-			-			-			-			-			-			-			-			-
22	KOTA CIREBON			-			-			-			-			-			-			-			-			-
23	KOTA BEKASI	4	17	21	18	34	52			-	3	10	13			-			-			-			-	25	61	86
24	KOTA DEPOK			-			-			-			-			-			-			-			-			-
25	KOTA CIMAHI	3	14	17	5	9	14	-	-	-	2	3	5	-	-	-	-	-	-	3	11	14	13	37	50	13	74	87
26	KOTA TASIKMALAYA	14	7	21	23	42	65			-			-			-			-			-			-	37	49	86
27	KOTA BANJAR			-			-			-			-			-			-			-			-			-
	SUB JUMLAH V	40	61	101	63	95	158	-	-	-	5	13	18	-	-	-	-	-	-	3	11	14	18	53	71	111	233	344
	JAWA BARAT	2,108	1,887	3,995	5,556	5,248	10,804	248	50	298	54	58	112	3	24	27	38	31	69	490	373	863	1,634	1,533	3,167	8,497	9,204	17,701
	RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK			8.55			23.13			0.64			0.24			0.06			0.15					6.78			37.90	

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

TABEL 81

PEMBIAYAAN KESEHATAN DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

No	KAB/KOTA/PROVINSI	A P B N				A P B D			
		Dana Alokasi Khusus		Dana Dekon	KAPITASI	Provinsi		Kab/Kota	
		DAK DINKKES	DAK RS	Kegiatan Program Yg Diperbantukan	JKN	APBD MURNI	Bankeu Gub	APBD MURNI	JAMKESDA
1	KAB. BOGOR	114,901,044,320	83,418,192,000	-	169,263,480,000	-	37,200,460,100	1,489,620,206,000	
2	KAB. SUKABUMI	109,318,542,500		-	107,229,480,000	-		457,332,370,717	
3	KAB. CIANJUR	94,210,385,940		-	81,234,480,000	-			
4	KAB. BANDUNG		13,596,371,000	-	91,319,220,000	-		437,173,047,093	
5	KAB. GARUT	82,637,316,680	3,129,630,000	-	37,352,280,000	-		226,177,574,889	
6	KAB. TASIKMALAYA	76,268,643,840	3,479,630,000	-	44,823,000,000	-	7,659,120,000	293,999,639,628	
7	KAB. CIAMIS	49,671,198,140	20,752,637,000	-	98,463,480,000	-	18,709,054,550	81,567,938,993	
8	KAB. KUNINGAN	24,774,510,020	32,000,000,000	-	64,424,400,000	-	5,812,705,600	298,083,888,345	
9	KAB. CIREBON	87,742,384,440	10,300,108,000	-	57,606,900,000	-	4,952,048,025	555,056,834,529	
10	KAB. MAJALENGKA	35,816,277,260	3,479,630,000	-	41,338,380,000	-	7,808,471,856	109,572,878,012	
11	KAB. SUMEDANG	39,126,473,120	25,003,108,000	-	54,761,460,000	-			
12	KAB. INDRAMAYU	59,837,652,000	3,919,607,000	-	34,693,680,000	-			
13	KAB. SUBANG	48,939,098,060	3,129,630,000	-	100,915,140,000	-		131,178,659,544	
14	KAB. PURWAKARTA	12,189,849,480	50,000,000,000	-	115,482,120,000	-		133,129,541,661	
15	KAB. KARAWANG	84,681,575,460	20,325,250,000	-	53,531,160,000	-		360,228,102,592	
16	KAB. BEKASI	29,610,877,920	16,129,630,000	-	11,690,760,000	-	53,483,040,000	200,069,975,550	
17	KAB. BANDUNG BARAT	36,737,129,120	30,000,000,000	-	124,116,540,000	-		145,218,639,006	
18	KAB PANGANDARAN	21,586,163,040		-	41,519,640,000	-	36,551,939,525	72,725,869,781	
19	KOTA BOGOR	18,687,697,920	6,919,614,000	-	15,090,360,000	-		270,815,576,083	
20	KOTA SUKABUMI	13,076,785,460	38,580,093,000	-	71,069,640,000	-		68,383,604,107	
21	KOTA BANDUNG	31,762,240,240	3,129,630,000	-	78,064,320,000	-	14,608,453,209	501,698,398,438	96,733,269,141
22	KOTA CIREBON	58,051,851,020	57,000,000,000	-	27,591,660,000	-		368,619,900,327	
23	KOTA BEKASI	27,181,602,980		-	5,862,000,000	-	2,951,590,000	451,080,429,501	
24	KOTA DEPOK	22,123,193,340		-	42,534,240,000	-	2,754,664,000	360,489,271,661	
25	KOTA CIMAHI	20,945,689,120	35,491,508,000	-	16,570,200,000	-	6,698,582,252	257,131,732,505	
26	KOTA TASIKMALAYA	19,909,811,720	40,531,762,000	-	63,234,060,000	-		118,443,183,263	
27	KOTA BANJAR	10,574,121,720	10,129,630,000	-	24,668,940,000	-	1,173,301,750	30,234,755,832	
28	PROVINSI JAWA BARAT	-	108,817,000,000	5,154,000,000	-	258,647,615,064			-
	JUMLAH ANGGARAN	1,230,362,114,860	619,262,660,000	5,154,000,000	1,674,451,020,000	258,647,615,064	200,363,430,867	7,418,032,018,057	96,733,269,141

TABEL 81

PEMBIAYAAN KESEHATAN DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

No	KAB/KOTA/PROVINSI	HIBAH/SUMBER PEMERINTAH LAIN/PHLN	TOTAL ANGGARAN KESEHATAN	TOTAL APBN	Proporsi Terhadap Total Anggaran Kesehatan (%)	TOTAL APBD	Proporsi Terhadap Total Anggaran Kesehatan (%)	TOTAL PHLN	Proporsi Terhadap Total Anggaran Kesehatan (%)	TOTAL ANGGARAN KESEHATAN	Proporsi Terhadap Total Anggaran Kesehatan (%)	ANGGARAN KESEHATAN PERKAPITA
1	KAB. BOGOR		1,894,403,382,420	367,582,716,320	3.07	1,526,820,666,100	13	-	-	1,894,403,382,420	15.81	339,049.79
2	KAB. SUKABUMI	113,902,797,350	787,783,190,567	216,548,022,500	1.81	457,332,370,717	4	113,902,797,350	1	787,783,190,567	6.57	322,252.33
3	KAB. CIANJUR		175,444,865,940	175,444,865,940	1.46	-	-	-	-	175,444,865,940	1.46	77,941.65
4	KAB. BANDUNG		542,088,638,093	104,915,591,000	0.88	437,173,047,093	4	-	-	542,088,638,093	4.52	150,721.56
5	KAB. GARUT		349,296,801,569	123,119,226,680	1.03	226,177,574,889	2	-	-	349,296,801,569	2.92	135,939.34
6	KAB. TASIKMALAYA	750,000,000	426,980,033,468	124,571,273,840	1.04	301,658,759,628	3	750,000,000	0	426,980,033,468	3.56	245,070.26
7	KAB. CIAMIS	64,283,291,112	333,447,599,795	168,887,315,140	1.41	100,276,993,543	1	64,283,291,112	1	333,447,599,795	2.78	283,691.27
8	KAB. KUNINGAN	1,871,950,000	426,967,453,965	121,198,910,020	1.01	303,896,593,945	3	1,871,950,000	0	426,967,453,965	3.56	402,084.08
9	KAB. CIREBON	3,515,429,000	719,173,703,994	155,649,392,440	1.30	560,008,882,554	5	3,515,429,000	0	719,173,703,994	6.00	335,592.18
10	KAB. MAJALENKA	1,879,012,178	199,894,649,306	80,634,287,260	0.67	117,381,349,868	1	1,879,012,178	0	199,894,649,306	1.67	168,260.92
11	KAB. SUMEDANG		118,891,041,120	118,891,041,120	0.99	-	-	-	-	118,891,041,120	0.99	104,098.90
12	KAB. INDRAMAYU		98,450,939,000	98,450,939,000	0.82	-	-	-	-	98,450,939,000	0.82	57,884.57
13	KAB. SUBANG		284,162,527,604	152,983,868,060	1.28	131,178,659,544	1	-	-	284,162,527,604	2.37	183,805.00
14	KAB. PURWAKARTA		310,801,511,141	177,671,969,480	1.48	133,129,541,661	1	-	-	310,801,511,141	2.59	333,227.38
15	KAB. KARAWANG	124,034,706,877	642,800,794,929	158,537,985,460	1.32	360,228,102,592	3	124,034,706,877	1	642,800,794,929	5.36	279,992.58
16	KAB. BEKASI	94,033,942,781	405,018,226,251	57,431,267,920	0.48	253,553,015,550	2	94,033,942,781	1	405,018,226,251	3.38	120,123.17
17	KAB. BANDUNG BARAT	1,840,260,000	337,912,568,126	190,853,669,120	1.59	145,218,639,006	1	1,840,260,000	0	337,912,568,126	2.82	204,995.89
18	KAB PANGANDARAN		172,383,612,346	63,105,803,040	0.53	109,277,809,306	1	-	-	172,383,612,346	1.44	438,839.49
19	KOTA BOGOR	13,422,587,920	324,935,835,923	40,697,671,920	0.34	270,815,576,083	2	13,422,587,920	0	324,935,835,923	2.71	305,193.77
20	KOTA SUKABUMI		191,110,122,567	122,726,518,460	1.02	68,383,604,107	1	-	-	191,110,122,567	1.59	595,178.79
21	KOTA BANDUNG		725,996,311,028	112,956,190,240	0.94	613,040,120,788	5	-	-	725,996,311,028	6.06	291,491.97
22	KOTA CIREBON		511,263,411,347	142,643,511,020	1.19	368,619,900,327	3	-	-	511,263,411,347	4.27	1,646,655.28
23	KOTA BEKASI		487,075,622,481	33,043,602,980	0.28	454,032,019,501	4	-	-	487,075,622,481	4.06	174,754.14
24	KOTA DEPOK	36,522,251,000	464,423,620,001	64,657,433,340	0.54	363,243,935,661	3	36,522,251,000	0	464,423,620,001	3.88	213,056.63
25	KOTA CIMAH	21,833,487,962	358,671,199,839	73,007,397,120	0.61	263,830,314,757	2	21,833,487,962	0	358,671,199,839	2.99	603,802.22
26	KOTA TASIKMALAYA		242,118,816,983	123,675,633,720	1.03	118,443,183,263	1	-	-	242,118,816,983	2.02	367,065.82
27	KOTA BANJAR	1,776,624,400	78,557,373,702	45,372,691,720	0.38	31,408,057,582	0	1,776,624,400	0	78,557,373,702	0.66	431,868.84
28	PROVINSI JAWA BARAT	-	372,618,615,064	113,971,000,000	0.95	258,647,615,064	2	-	-	372,618,615,064	3.11	7,864.57
JUMLAH ANGGARAN		479,666,340,580	11,982,672,468,569	3,529,229,794,860	29.45	7,973,776,333,129	66.54	479,666,340,580	4.00	11,982,672,468,569	100	8,820,502



Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Jln. Pasteur 25 Bandung • <http://diskes.jabarprov.go.id>